bkkbn

PARAMETER PROGRAM BANGGA KENCANA TINGKAT KABUPATEN / KOTA

TAHUN 2022

DIREKTORAT PERENCANAAN PENGENDALIAN PENDUDUK
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
2023

BUKU PARAMETER PROGRAM BANGGA KENCANA TINGKAT KABUPATEN/KOTA TAHUN 2022

Pengarah : Bonivasius Prasetya Ichtiarto
Editor : Munawar Asikin
Kontributor : Wendy Hartanto & Faharuddin
Penulis : Muthiatun Nuriah
Erita Agustin Hardiyanti
Agus Supardi
Gracia Ivanna Caroline Hutapea
Havil Alian Zulkarnain
Lisna Prihantini
Reni Ardianti
Sri Haryanto
Satrio Wibowo
Reni Dwi Jayanti
Irma Yusrina
Riski Putri
Tamalia Rahmi F
Aida Novia
Titania Citra Noora
Emi Lusiana
Samsu Alam
Sukarno
Aas Tejasmara
Feny Nur Anggraeni
Ria Rahayu
Meta Arfasari
Vidia Nabilah Putri
Dyah Batiar Aprillia
Elvira Edmanda
Pengolah Data : Muthiatun Nuriah
Erita Agustin Hardiyanti
Gracia Ivanna Caroline Hutapea
Istiqomatul Fajriah Yuliati

Layout Editor : Gracia Ivanna Caroline Hutapea

Diterbitkan Oleh : Direktorat Perencanaan Pengendalian Penduduk BKKBN

©2023

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional

Alamat : Jl. Permata No. 1, Halim Perdanakusuma Jakarta Timur, 13650

Telp : 021-8098018

Website : www.bkkbn.go.id

Hak Cipta dilindungi oleh Undang-Undang, Dilarang memperbanyak buku ini sebagian atau seluruhnya, dalam bentuk dan dengan cara apa pun juga, baik secara mekanis maupun elektronik, termasuk fotocopi, rekaman, dan lain-lain tanpa izin tertulis dari penulis dan penerbit

KATA SAMBUTAN



Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga Buku Parameter Program Bangga Kencana Tingkat Kabupaten/Kota Tahun 2022 dapat diterbitkan. Buku Parameter Program Bangga Kencana Tingkat Kabupaten/Kota Tahun 2022 ini merupakan salah satu upaya dalam penyediaan data parameter Program Bangga Kencana di provinsi hingga kabupaten/kota.

Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Perencanaan pembangunan sangat diperlukan suatu negara dalam mencapai tujuan bernegara. Salah satu alasan penting perlunya sistem perencanaan pembangunan nasional adalah untuk menjamin agar pembangunan berjalan efektif, efisien, dan bersasaran. Tujuan sistem perencanaan pembangunan nasional antara lain adalah: (1) mendukung koordinasi antarpelaku pembangunan, (2) menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antardaerah, antarruang, antarwaktu, antarfungsi pemerintah maupun antara pusat dan daerah, (3) menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, (4) mengoptimalkan partisipasi masyarakat, dan (5) menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan. Salah satu sumber daya dalam pembangunan nasional adalah data.Data yang valid dan *up to date* harus dijadikan arah kebijakan dalam menentukan kemana kebijakan kependudukan harus diarahkan. Data memiliki peranan penting dalam mendukung perencanaan pembangunan serta memantau perkembangan program Bangga Kencana.

Adanya ketersediaan data parameter untuk Program Bangga Kencana yang konsisten setiap tahunnya, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran, komitmen dan kepedulian *stakeholder* kepada Program Bangga Kencana. Tujuan pembangunan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) melalui Program Bangga Kencana, tentunya hanya dapat terlaksana dengan adanya dukungan dan kontribusi yang luas dari berbagai komponen bangsa. Program Bangga Kencana memberikan landasan utama pembangunan manusia dengan pendekatan siklus hidup. Pelaksanaan program Bangga Kencana juga bersifat holistik dan komprehensif yang artinya program ini tidak dapat berdiri sendiri, melainkan perlu dukungan berbagai pihak guna pembangunan kualitas hidup masyarakat Indonesia.

Akhir kata, Saya menyambut baik penerbitan Buku Parameter Program Bangga Kencana Tingkat Kabupaten/Kota Tahun 2022 dan mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan masukan hingga buku ini dapat terselesaikan dan dipublikasikan. Semoga buku ini dapat memberikan manfaat seluas-luasnya.

Jakarta, Juli 2023
Kepala BKKBN,

Dr. (H.C) dr. Hasto Wardoyo, Sp.OG (K)

KATA PENGANTAR



Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) ditujukan untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas sehingga tercapai tujuan pembangunan yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Keberhasilan program Bangga Kencana tidak dapat dilepaskan dari peran aktif semua pihak, baik pemerintah pusat pemerintah daerah dan masyarakat.

Kedeputian Bidang Pengendalian Penduduk melalui Direktorat Perencanaan Pengendalian Penduduk (Ditrenduk) menerbitkan Buku Parameter Program Bangga Kencana Tingkat kabupaten/kota Tahun 2022 dengan harapan dapat meningkatkan kesadaran, komitmen dan kepedulian stakeholder terhadap Program Bangga Kencana. Sehingga harapannya program Bangga Kencana mendapat dukungan yang luas dari berbagai pihak dengan begitu program Bangga Kencana dapat benar-benar memberikan kontribusi positif dalam mewujudkan program peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang akhirnya akan berkontribusi pada kemajuan bangsa.

Buku ini mengkompilasi Indikator Bangga Kencana dengan memanfaatkan berbagai sumber data antara lain untuk TFR dan ASFR 15-19 tahun memanfaatkan data Long Form SP 2020, sedangkan untuk MUKP, mCPR, MKJP, unmet need, serta iBangga mengacu pada data hasil dari Pemutakhiran Pendataan Keluarga Tahun 2022. Dalam penulisan buku ini kami menyadari tentu masih banyak kekurangannya, untuk itu kami terbuka untuk menerima saran dan masukan untuk perbaikan penulisan buku ini dimasa mendatang. Akhir kata, semoga buku ini dapat dipergunakan seluas-luasnya bagi berbagai pihak seperti kementerian/lembaga lintas sektor, pemerintah daerah, akademisi, praktisi kependudukan dan pemerhati kependudukan, pihak swasta serta organisasi masyarakat pemerhati kependudukan lainnya

Jakarta, Juli 2023
Deputi Bidang Pengendalian Penduduk,

Dr. Bonivasius Ichtiarto Prasetya, S.Si., M.Eng

RINGKASAN EKSEKUTIF

Data telah menjadi isu strategis dalam pembagunan, terutama pada bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga yang menunjukkan bahwa data dan informasi begitu fundamental bagi Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) sehingga data diamanatkan kepada pemerintah, pemerintah daerah serta masyarakat untuk bersama-sama terlibat dalam mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan data dan informasi mengenai kependudukan dan keluarga sebagai bagian dari pengelolaan kependudukan dan pembangunan keluarga. Terlebih pada era otonomi daerah seperti sekarang dimana menurut Undang-Undang No 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, mengamanatkan bahwa urusan bidang pengendalian penduduk dan KB masuk sebagai urusan wajib non pelayanan yang bersifat konkuren. Keberadaan data-data indikator Bangga Kencana terutama sampai tingkat kabupaten/kota sangat dibutuhkan sebagai bahan acuan perencanaan dan evaluasi program Bangga Kencana pada tingkat kabupaten/kota.

Buku ini mencakup 7 (tujuh) indikator utama dari program Bangga Kencana yang ditampilkan pada tingkat kabupaten/kota. Indikator-indikator tersebut yaitu *Total Fertility Rate* (TFR)/Angka Kelahiran Total, *Age Sepcific Fertility Rate* (ASFR) 15-19 tahun/ Banyaknya kelahiran tiap 1000 perempuan pada kelompok umur 15-19 tahun, *Unmet Need/* Kebutuhan KB Tidak Terpenuhi, Median Usia Kawin Pertama (MUKP), *Modern Contraceptive Prevalence Rate* (mCPR)/ Kesertaan ber KB modern, Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP), dan Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga). Sumber data yang digunakan adalah dari Long Form Sensus Penduduk 2020 (LF SP2020), terutama untuk TFR dan ASFR 15-19 tahun, dan Pemutakhiran Pendataan Keluarga Tahun 2022 untuk indikator lainnya. 7 (tujuh) indikator utama ini merupakan indikator yang tercakup dalam Indikator Kinerja Utama pada dokumen Rencana Strategis (Renstra) 2020-2024 BKKBN. Angka-angka pada level kabupaten/kota yang disajikan dalam buku ini sebagai bagian dari bentuk fasilitasi BKKBN kepada pemerintah daerah untuk mengawal perencanaan dan evaluasi Program Bangga Kencana pada tingkat kabupaten/kota.

Angka TFR secara nasional dilaporkan terus menurun dan telah mencapai angka 2,18 anak per perempuan, sementara itu pola TFR pada tingkat provinsi menunjukkan bahwa di Indonesia sudah tidak ada lagi provinsi yang memiliki TFR diatas 3 anak per perempuan (Hasil LF SP2020). Pola TFR tingkat kabupaten/kota menurut LF SP2020 yang mencakup 514 kabupaten/kota menunjukkan bahwa ada kesenjangan angka TFR kabupaten/kota cukup lebar dengan angka terendah yakni sebesar 1,54 anak per perempuan (Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta) dan angka tertinggi yakni sebesar 4,22 anak per perempuan (Kabupaten Asmat, Provinsi Papua). Kesenjangan angka yang cukup besar ini menunjukkan adanya kondisi yang sangat beragam mengenai kondisi fertilitas di kabupaten/kota di Indonesia. Kondisi ini mendorong perlu

adanya kebijakan pengendalian penduduk yang berbeda antar wilayah. Tidak semua provinsi perlu untuk menurunkan atau meningkatkan fertilitasnya. Setiap pemerintah daerah perlu menyadari bahwa tujuan ideal dari pengendalian penduduk bukanlah menurunkan angka TFR serendah-rendahnya, tetapi mencapai penduduk tumbuh seimbang dengan angka ideal dimana TFR 2,1 anak per perempuan dengan *Net Reproductive Rate* (NRR) sebesar 1.

Indikator selanjutnya adalah ASFR 15-19 tahun yang menunjukkan indikator kelahiran/fertilitas pada perempuan kelompok usia 15-19 tahun. Hasil LF SP2020 menunjukkan bahwa kabupaten/kota dengan ASFR terendah ada pada Kota Padang Provinsi Sumatera Barat dengan angka 4 kelahiran per 1000 penduduk perempuan usia 15-19 tahun, sementara angka tertinggi ada di Kabupaten Asmat Provinsi Papua dengan angka 105,6 kelahiran per penduduk perempuan usia 15-19 tahun. Lebarnya perbedaan angka tertinggi dan terendah dari ASFR 15-19 tahun menunjukkan adanya disparitas pada berbagai aspek pembangunan. Hal ini karena ASFR 15-19 tahun berkaitan erat dengan angka perkawinan anak, kemiskinan, pendidikan, ketenagakerjaan perempuan, budaya dan pengetahuan tentang kesehatan reproduksi remaja, serta kesehatan (stunting). Oleh karena itu, kebijakan untuk menurunkan ASFR 15-19 tahun di suatu daerah harus melibatkan berbagai sektor terkait agar secara bersama-sama peduli dan menurunkan angka ASFR 15-19 tahun.

Indikator MUKP dihubungkan dengan konteks hubungan seksual pertama kali dilakukan bertepatan dengan momentum perkawinan pertama. Hubungan seksual merupakan awal seseorang berisiko hamil. Semakin rendah usia kawin pertama seorang perempuan maka semakin panjang periode untuk hamil dan melahirkan yang berdampak meningkatkan potensi jumlah anak yang dilahirkannya. Pemutakhiran Pendataan Keluarga Tahun 2022 menunjukkan bahwa MUKP tertinggi terdapat pada Kota Kupang Provinsi NTT yaitu 26,3 tahun, sementara terendah terdapat pada Kabupaten Bondowoso Provinsi Jawa Timur yaitu 17,6 tahun. Upaya peningkatan MUKP pada dasarnya memiliki tujuan yang sama dengan indikator ASFR 15-19 tahun yaitu meningkatkan usia kawin pertama. BKKBN memiliki Program PUP (Pendewasaan Usia Perkawinan) yang diharapkan dapat didukung berbagai sektor untuk mewujudkan peningkatan usia kawin pertama di masa depan.

Unmet need KB masih menjadi tantangan bagi program KB karena masih belum mencapai target RPJMN 2020-2024. Angka *unmet need* KB juga sangat bervariasi, antar daerah kabupaten/kota di Indonesia. Berdasarkan data PK22 *unmet need* tingkat kabupaten/kota terendah ada di Kota Probolinggo Provinsi Jawa Timur sebesar 4,2 persen dan tertinggi ada di Kabupaten Asmat Provinsi Papua sebesar 74,6 persen. Indikator *unmet need* berkaitan erat dengan kehamilan yang tidak diinginkan. Kehamilan yang tidak diinginkan dapat meningkatkan risiko pada aborsi, kehamilan berisiko, kematian bayi, kematian ibu, kurangnya persiapan karena tidak mengharapkan kehamilan tentunya dapat berdampak pada kesehatan dan pemenuhan gizi anak di masa depan. Setiap kelahiran merupakan hal yang sangat berharga terutama pada era dimana penurunan fertilitas sedang terjadi. Oleh karena

itu, setiap kelahiran diharapkan memang benar-benar direncanakan, dengan begitu bayi-bayi yang dilahirkan adalah bayi-bayi sehat dan menjadi bibit unggul yang siap menghadapi tantangan masa depan.

Modern Contraceptive Prevalence Rate (mCPR) adalah salah satu Indikator Kinerja Utama (IKU) BKKBN. Metode kontrasepsi modern meliputi Metode Operasi Wanita (MOW) atau steril wanita atau tubektomi, Metode Operasi Pria (MOP) atau steril pria atau vasektomi, Alat Kontrasepsi Dalam Rahim (AKDR) atau spiral atau *Intra-Uterine Device* (IUD), susuk (implant), suntik, pil, kondom, dan Metode Amenore Laktasi (MAL). Berdasarkan Pemutakhiran Pendataan Keluarga Tahun 2020 Kabupaten Lanny Jaya, Provinsi Papua, memiliki angka mCPR terendah sebesar 0,08 persen. Sementara itu, kabupaten yang memiliki capaian mCPR tertinggi sebesar 78,25 persen adalah Kabupaten Probolinggo, Provinsi Jawa Timur. Fakta ini menunjukkan bahwa sama seperti indikator lainnya mCPR juga memiliki disparitas. Ketersediaan pelayanan KB modern merupakan salah satu kunci agar masyarakat dapat menjangkau kontrasepsi dengan mudah dan dilengkapi dengan *inform choice* yang jelas, agar calon peserta KB mengetahui alat/obat kontrasepsi yang sesuai dengan kebutuhan dalam mencegah kehamilan, memahami risiko dari tiap alat/obat kontrasepsi serta memilih kontrasepsi sesuai kebutuhannya (membatasi atau menjarangkan kelahiran).

Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) adalah bagian dari metode kontrasepsi modern yang hanya terdiri dari Metode Operasi Pria (MOP), Metode Operasi Wanita (MOW), IUD (Alat Kontrasepsi Dalam Rahim – AKDR) dan Implant (susuk). MKJP diutamakan karena memiliki efektifitas tinggi dalam memberikan perlindungan yang lebih lama untuk para PUS (Pasangan Usia Subur) dari kehamilan dan sekaligus menghindari angka putus pakai kontrasepsi. Berdasarkan PK22, MKJP terendah adalah 3,3 persen di Kabupaten Melawi Provinsi Kalimantan Barat, sementara itu MKJP tertinggi sebesar 92,6 persen di Kabupaten Sumba Barat Daya di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Hubungan antara MKJP dan mCPR cukup menarik untuk diperhatikan, karena MKJP merupakan bagian dari mCPR. Ada wilayah-wilayah dengan mCPR masih sangat rendah misalkan pada kabupaten/kota di Provinsi NTT, namun memiliki MKJP yang sangat tinggi. Ini menunjukkan pada Provinsi NTT, kesertaan ber KB modern masih rendah, namun dari yang menggunakan kontrasepsi modern terdapat proporsi yang cukup besar untuk penggunaan kontrasepsi MKJP. Oleh karena itu, tidak cukup hanya memiliki angka MKJP tinggi tapi mCPR rendah, kerja keras harus dilakukan untuk dapat menjangkau lebih banyaak PUS untuk dapat menjadi peserta KB modern (mCPR).

Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan dalam membangun kualitas keluarga. iBangga memiliki tiga dimensi yaitu ketentraman, kemandirian dan kebahagiaan. Berdasarkan PK22, nilai iBangga tertinggi terdapat pada Kota Banda Aceh Provinsi Aceh yaitu 60,97 dan terendah di Kabupaten Deiyai Provinsi Papua yaitu 13,15. Tingginya disparitas ini

perlu menjadi perhatian lebih dari pemerintah dan pemangku kepentingan dalam merumuskan kebijakan/program/kegiatan untuk mewujudkan keluarga berkualitas.

Buku ini juga mengulas temuan tentang hubungan antara TFR dan *unmet need* yang tidak mengikuti teori yang ada. TFR dan *unmet need* secara teori seharusnya memiliki hubungan positif, dimana semakin rendah *unmet need* maka TFR akan semakin rendah pula. Terdapat fenomena di beberapa kota yang memiliki TFR sangat rendah (2,1 ke bawah) ternyata justru memilki *unmet need* yang tinggi. Ada beberapa dugaan yang dapat menjelaskan kondisi ini, dimana pada PK22 ditemukan sangat rendahnya angka penggunaan kontrasepsi tradisional yang hanya 0,5 persen, padahal menurut SDKI tahun 1991-2017 angka tersebut terus meningkat dari 2,6 persen menjadi 6 persen. Hal tersebut menunjukkan adanya kemungkinan pencatatan penggunaan KB tradisional yang kurang teliti sehingga justru dapat mempertinggi angka *unmet need*, terutama pada beberapa daerah dengan TFR yang rendah. Namun tentunya dugaan ini perlu dikonfirmasi dengan studi yang lebih lanjut untuk mendapatkan pemahaman yang sebenarnya.

Sementara itu, pemetaan program Bangga Kencana tampak berbeda pada Provinsi Sumatera Utara. Pada provinsi ini terlihat MUKP nya sangat baik karena banyak yang hijau (mencapai target tahun 2022) dan biru (mencapai target tahun 2024), namun tidak konsisten dengan ASFR 15-19 tahun yang terlihat masih banyak yang merah (belum mencapai target tahun 2022). Penjelasan mengenai perbedaan budaya dengan Provinsi Aceh mungkin dapat memberikan penjelasan mengenai fenomena ini. Untuk indikator MKJP terlihat cukup menggembirakan karena sudah banyak kabupaten/kota yang sudah berwarna biru (mencapai target tahun 2024), dan sebaliknya untuk TFR, *unmet need*, mCPR serta iBangga kabupaten/kota masih didominasi warna merah (belum mencapai target tahun 2022) sehingga harus bekerja keras untuk meningkatkan kinerjanya. Dari dua contoh analisis pemetaan diatas terlihat bahwa setiap provinsi memiliki pola yang berbeda-beda, dengan melihat pemetaan dari ke tujuh indikator, maka pemangku kebijakan dapat mengambil langkah-langkah prioritas yang harus diambil untuk dapat mengarahkan program agar lebih efektif serta efisien untuk mencapai target yang telah ditetapkan.

Analisis data berdasarkan pemetaan indikator tingkat kabupaten/kota untuk indikator program Bangga Kencana memberikan pemahaman yang lebih tajam dari pada analisis tingkat provinsi dan nasional. Secara umum untuk ke tujuh indikator utama Program Bangga Kencana tingkat kabupaten/kota terjadi disparitas yang nyata dengan rentang pencapaian yang sangat lebar untuk masing-masing indikatornya. Diharapkan setiap pemerintah daerah dapat secara seksama memperhatikan capaian indikator Bangga Kencana pada wilayahnya masing-masing. Program Bangga Kencana merupakan program yang dilakukan dengan pendekatan siklus kehidupan (*life-cycle approach*) untuk meningkatkan kualitas SDM Indonesia. Oleh karena itu, untuk mensukseskan Program Bangga Kencana dan program peningkatan kualitas SDM lainnya, diperlukan keterlibatan semua sektor serta lapisan masyarakat karena eratnya keterkaitan antara program-program pada lintas sektor yang ada.

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga menyebutkan bahwa keluarga berencana adalah upaya untuk mengatur kelahiran anak, jarak, dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan, melalui promosi, perlindungan, dan bantuan sesuai hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas. Aspek kualitas penduduk semestinya harus menjadi perhatian semua pihak dalam proses pembangunan yang akan dilakukan. Kualitas hidup manusia dapat diukur melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Capaian IPM Indonesia tahun 2022 menunjukkan posisi Indonesia berada pada urutan 75 dari 132 negara di dunia. Angka ini menguat 0,62 poin dari tahun 2021 sebesar 72,29 menjadi 72,91 di tahun 2022. Adapun peningkatan IPM pada tahun 2022 terjadi pada seluruh dimensi, terutama pada dimensi umur panjang dan hidup sehat serta standar hidup layak. Untuk dimensi umur panjang dan hidup sehat, ada kenaikan angka harapan hidup pada bayi yang lahir pada tahun 2022 menjadi 71,85 tahun. Bila dibandingkan dengan tahun 2021, kenaikan angka harapan hidup pada tahun 2022 naik 0,28 tahun. Sementara itu, pada dimensi pengetahuan, harapan lama sekolah penduduk berumur 7 tahun mengalami peningkatan 0,02 tahun dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Adapun angkanya pada tahun 2022 ialah sebesar 13,10 tahun. Kemudian untuk dimensi standar hidup layak diukur berdasarkan rata-rata pengeluaran riil per kapita yang disesuaikan. Terjadi peningkatan rata-rata pengeluaran riil per kapita menjadi Rp323 ribu (2,90 persen) dibandingkan tahun sebelumnya.

Dalam mencapai cita-cita bersama menuju penduduk yang sejahtera dan berkualitas harus didukung dari kebijakan pembangunan kependudukan. Pembangunan kependudukan sendiri tidak dapat terlepas dari kebutuhan akan ketersediaan data dan informasi yang berkualitas, khususnya untuk parameter bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana (Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana - Bangga Kencana) sampai tingkat kabupaten dan kota. Data ini sangat dibutuhkan sebagai dasar dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah untuk penyusunan dokumen RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah), RKPD (Rencana Kinerja Pemerintah Daerah), Renstrada (Rencana Strategis Daerah) dan Renja (Rencana Kerja) organisasi perangkat daerah. Dengan demikian, data dan informasi yang berkualitas dan *up to date* sampai dengan tingkat kabupaten/kota menjadi sangat penting, tidak hanya dibutuhkan untuk perencanaan pembangunan saja, tetapi juga menjadi dasar pengambilan

keputusan maupun kebijakan untuk memecahkan berbagai permasalahan yang ada. Buku ini memberikan gambaran tentang kondisi indikator utama program Bangga Kencana tingkat kabupaten dan kota, dengan harapan data-data ini dapat bermanfaat bagi dasar perencanaan serta bahan evaluasi untuk program Bangga Kencana di tingkat kabupaten/kota.

1.2. Tujuan

Tujuan Umum

Menyediakan data parameter Program Bangga Kencana sebagai bahan evaluasi target perencanaan Program Bangga Kencana dalam dokumen perencanaan daerah yang *up to date*.

Tujuan Khusus

Tersedianya parameter program Bangga Kencana di tingkat Kabupaten/Kota untuk indikator TFR, ASFR 15-19 Tahun, MKJP, mCPR, MUKP, *Unmet need* tahun 2022

1.3. Manfaat Penulisan

Manfaat dari ditulisnya buku ini antara lain:

- Sebagai bahan evaluasi untuk pencapaian program Bangga Kencana di tingkat kabupaten/kota
- Sebagai data basis perencanaan program Bangga Kencana di tahun-tahun mendatang
- Sebagai bahan pertimbangan dalam penentuan Dana Alokasi Khusus/DAK program Bangga Kencana di tingkat kabupaten/kota

1.4. Sistematika Penulisan

Pembahasan dalam buku ini dibagi menjadi tujuh bab sebagai berikut:

- **Bab 1 Pendahuluan**,
  yang terdiri dari latar belakang, tujuan dan manfaat penulisan, serta sistematika penulisan.
- **Bab 2 Metodologi**,
  yang terdiri dari rumus dan definisi tiap indikator
- **Bab 3 Hasil Perhitungan**,
  yang menyajikan tentang capaian parameter Program Bangga Kencana yang terdiri atas TFR, ASFR 15-19 Tahun, MKJP, mCPR, MUKP, *Unmet need* tingkat kabupaten/kota tahun 2022
- **Bab 4 Penutup**,
  yang berisi kesimpulan dan rekomendasi

BAB II
METODOLOGI

2.1. Total Fertility Rate (TFR)/ Angka Kelahiran Total

Definisi

TFR adalah rata-rata banyaknya anak yang dilahirkan hidup oleh seorang perempuan sampai akhir masa reproduksinya. Dengan keberhasilan dan konsistensi pelaksanaan Program Keluarga Berencana di Indonesia selama kurang lebih 4-5 dekade, TFR di Indonesia berhasil mengalami penurunan yang sangat nyata dari 5,6 anak per perempuan pada tahun 1971 menjadi 2,14 anak per perempuan tahun 2022. Banyak faktor yang mempengaruhi Angka Kelahiran Total (TFR) yaitu tingkat pendapatan, tingkat pendidikan, tingkat kesehatan dan penggunaan alat kontrasepsi, dan tingkat urbanisasi.

TFR ditargetkan pada tahun 2022 sebesar 2,21 kelahiran per perempuan usia subur dan menjadi 2,1 pada tahun 2024. TFR dihitung dengan menjumlahkan nilai semua ASFR dikalikan 5 dibagi 1.000, yang menggambarkan tingkat kelahiran per perempuan usia subur.

Metode Penghitungan

Rumus :

$$TFR = \frac{1}{1000} x \, 5 \sum_{i=1}^{7} ASFR_i$$

Dimana,

$ASFR_i$: $\frac{Bi}{Pi}$ x 1000

B_i : jumlah kelahiran dari perempuan kelompok usia i

i : kelompok usia (15-19), (20-24), (25-29), (30-34), (35-39), (40-44), (45-49) tahun

P_i : jumlah perempuan kelompok usia i

Sumber Data

Long Form Sensus Penduduk 2020.

Manfaat

Beberapa manfaat dari TFR antara lain:

- Mengetahui status demografi saat ini dari suatu populasi serta konsekuensinya pada pertumbuhan penduduk.

- Memenuhi kebutuhan administrasi dan penelitian bagi institusi keluarga berencana (KB) dalam hubungannya dengan pembangunan, pelaksanaan, dan evaluasi program-program KB.
- Memenuhi kebutuhan akan informasi tentang perubahan penduduk dalam hubungannya dengan kegiatan-kegiatan profesional dan komersial.
- Pembuatan analisis perubahan penduduk pada masa lampau yang dibutuhkan untuk proyeksi penduduk dan karakteristik demografi lainnya untuk perencanaan kebutuhan fasilitas perumahan dan pendidikan, managemen program jaminan sosial serta untuk produksi dan penyediaan pelayanan dan komoditas untuk berbagai kelompok penduduk.
- Penentuan program-program KB untuk pengaturan fertilitas.
- Memenuhi kebutuhan individu-individu akan dokumen kelahiran

2.2. Age Specific Fertility Rate/ASFR 15 – 19 Tahun

Definisi

ASFR merupakan indikator kelahiran yang memperhitungkan perbedaan fertilitas dari wanita usia subur menurut usianya. Angka kelahiran menurut usia/*Age Specific Fertility Rate* (ASFR) 15-19 tahun adalah banyaknya kelahiran per 1.000 perempuan pada kelompok usia 15 -19 tahun. Angka kelahiran usia 15-19 tahun ditargetkan pada tahun 2022 sebesar 21 kelahiran per 1.000 wanita pada kelompok usia tersebut dan menjadi 18 kelahiran per 1000 wanita pada kelompok usia 15-19 pada tahun 2024 berdasarkan dokumen RPJMN 2020-2024.

Metode Penghitungan

Penghitungan ASFR 15-19 tahun yaitu membagi jumlah kelahiran kelompok usia 15-19 tahun dengan jumlah wanita pada kelompok usia yang sama dikali 1.000. ASFR 15-19 tahun dinyatakan dalam jumlah kelahiran per 1000 perempuan pada kelompok usia 15-19 tahun.

Rumus:

$$ASFR_{15-19} = \frac{B_{15-19}}{P_{15-19}} \text{ x } 1000$$

Dimana,

B_{15-19} : jumlah kelahiran dari perempuan kelompok usia 15-19 tahun

P_{15-19} : jumlah perempuan kelompok usia 15-19 tahun tahun

Sumber Data

Long Form Sensus Penduduk 2020.

Manfaat

Dari angka kelahiran menurut usia (ASFR) akan diperoleh gambaran komposisi usia penduduk di masa mendatang yang akan berguna bagi perencanaan dan pelaksanaan Program Bangga Kencana. ASFR usia 15-19 tahun juga berkaitan

dengan beberapa aspek lain yang mencakup angka perkawinan anak, kemiskinan, pendidikan, ketenagakerjaan perempuan, budaya dan pengetahuan tentang kesehatan reproduksi remaja, serta kesehatan (stunting)

2.3. Median Usia Kawin Pertama/MUKP

Definisi

Secara umum, Median Usia Kawin Pertama/MUKP didefinisikan sebagai nilai tengah atau median usia saat pertama kali kawin pada wanita usia subur (15-49 tahun) yang berstatus kawin atau pernah kawin. Angka MUKP menunjukkan sebanyak 50 persen dari seluruh wanita usia 15-49 tahun sudah melakukan perkawinan pada usia tertentu. Berdasarkan Renstra BKKBN Tahun 2022, angka MUKP ditargetkan sebesar 22 tahun.

Metode Penghitungan

Penghitungan angka MUKP yang dihasilkan dalam buku ini mengacu pada metode penghitungan Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) yang dilakukan melalui tiga tahap sebagai berikut:

Tahap 1

Penentuan batas usia termuda Wanita pernah kawin

Menghitung distribusi persentase wanita usia 15 -49 tahun menurut kelompok usia 5 tahunan dan status perkawinannya. Batas usia termuda adalah kelompok usia 5 tahunan dimana persentase yang pernah kawin (kawin, cerai hidup, cerai mati) sudah 50 persen atau lebih.

Tahap 2

Penentuan persentase wanita pernah kawin (kawin, cerai hidup dan cerai mati) menurut usia kawin pertama

Menggunakan rumus:

$$Wpk\ (wanita\ pernah\ kawin)\ umur\ xi) = \frac{Jumlah\ wpk\ (wanita\ pernah\ kawin)\ umur\ xi\ x\ 100}{Jumlah\ sw\ usia\ batas\ bawah-49\ tahun}$$

<u>Keterangan:</u>

xi : usia menikah pertama kali

wpk (pernah kawin) usia xi : persentase wanita pernah kawin yang kawin pada usia xi

sw : semua wanita (belum kawin dan pernah kawin)

Tahap 3

Menghitung median usia kawin pertama yaitu usia kawin pertama yang tepat berada pada 50 persen kumulatif distribusi persentase

Apabila 50 persen distribusi persentase berada diantara dua usia kawin pertama, maka median dihitung dengan melakukan interpolasi linear. Median Usia Kawin Pertama dinyatakan dalam satuan tahun.

Sumber Data

Pemutakhiran Pendataan Keluarga Tahun 2022.

Manfaat

Adapun manfaat dari penghitungan angka MUKP adalah berguna sebagai bahan masukan terhadap kebijakan penundaan usia perkawinan muda. Perkembangan MUKP menggambarkan pola perubahan fertilitas. MUKP dapat digunakan sebagai bahan dan metode advokasi dalam upaya penurunan ASFR kelompok 15-19 tahun dapat ditentukan agar dapat dilakukan secara efektif dan efisien.

2.4. Modern *Contraceptive Prevalence Rate* (mCPR)/Prevalensi Kontrasepsi Modern

Definisi

Prevalensi Kontrasepsi Modern atau Modern *Contraceptive Prevalence Rate* selanjutnya disebut mCPR, adalah proporsi wanita kawin usia 15-49 tahun (Pasangan Usia Subur/PUS) yang sedang menggunakan metode kontrasepsi modern saat pengumpulan data dilakukan dengan tujuan untuk menunda, mengatur jarak kelahiran, atau membatasi jumlah kelahiran dibandingkan dengan jumlah seluruh PUS. Metode kontrasepsi modern yang dimaksud meliputi Metode Operasi Wanita (MOW) atau steril wanita atau tubektomi, Metode Operasi Pria (MOP) atau steril pria atau vasektomi, Alat Kontrasepsi Dalam Rahim (AKDR) atau spiral atau *Intra-Uterine Device* (IUD), susuk (*implant*), suntik, pil, kondom, dan Metode Amenore Laktasi (MAL).

Berdasarkan target RPJMN 2020-2024, mCPR memiliki target untuk tahun 2022 sebesar 62,54 persen dan diharapkan terus meningkat menjadi 63,41 persen di tahun 2024.

Metode Penghitungan

mCPR menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) BKKBN, maka penghitungan mCPR dijelaskan secara lebih detail di bawah ini:

Jumlah PUS yang sedang menggunakan metode KB modern dibagi dengan jumlah pasangan usia subur seluruhnya. Prevalensi dinyatakan dalam satuan persen (%).

Rumus penghitungan:

$$mCPR = \frac{Jumlah\ PUS\ yang\ sedang\ menggunakan\ kontrasepsi\ modern}{Jumlah\ PUS} x\ 100$$

Keterangan:
mCPR: Persentase PUS yang sedang menggunakan metode KB modern

Sumber Data
Pemutakhiran Pendataan Keluarga tahun 2022.

Manfaat
Pemantauan mCPR dilakukan untuk mengetahui akses dan kualitas pelayanan kontrasepsi. Indikator ini juga dapat digunakan untuk menghitung *demand for family planning satisfied.*

2.5. Metode Kontrasepsi Jangka Panjang/MKJP

Definisi
Persentase peserta KB Aktif (PA) MKJP adalah proporsi wanita kawin 15-49 tahun (pasangan usia subur) yang pada saat pengumpulan data sedang menggunakan metode kontrasepsi jangka panjang terhadap semua peserta KB modern. Indikator ini merupakan indikator yang tercantum dalam dokumen Restra BKKBN tahun 2020-2024. Target persentase peserta KB aktif yang menggunakan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) pada tahun 2022 adalah sebesar 26,75 persen dan 28,39 persen di tahun 2024.

Metode Penghitungan
Jumlah pasangan usia subur (didekati dengan jumlah perempuan kawin usia 15-49 tahun) yang sedang menggunakan metode KB jangka panjang yang meliputi Metode Operasi Wanita (MOW)/steril wanita, Metode Operasi Pria (MOP)/steril pria, IUD/spiral/Alat Kontrasepsi Dalam Rahim (AKDR), dan implan/susuk.dibagi dengan jumlah pasangan usia subur yang menggunakan metode KB modern. Indikator ini dinyatakan dalam satuan persen (%).

Rumus penghitungan:

$$PA\ MKJP = \frac{Jumlah\ PUS\ yang\ sedang\ menggunakan\ MKJP}{Jumlah\ PUS\ yang\ menggunakan\ kontrasepsi\ modern} x\ 100$$

Keterangan:
PA MKJP: Persentase peserta KB Aktif yang menggunakan metode KB jangka Panjang.

Sumber Data
Pemutakhiran Pendataan Keluarga tahun 2022.

Manfaat
Indikator ini dapat digunakan sebagai bahan pemetaan prioritas dalam intervensi angka putus pakai/ *drop out* KB. Selain itu, indikator ini juga dapat dimanfaatkan untuk menentukan strategi penggerakan yang harus dilakukandalam pelaksanaan pelayanan KBPP/Keluarga Berencana Pasca Persalinan.

2.6. Unmet Need KB / Kebutuhan KB tidak terpenuhi

Definisi
Menurut Bradley et al, *unmet need* KB didefinisikan sebagai persentase perempuan usia subur yang tidak menggunakan kontrasepsi, tetapi tidak menginginkan anak lagi atau ingin menjarangkan kehamilan (Bradley et al, 2012). Makna harafiah atau makna literal dari kata unmet need adalah kebutuhan ber KB yang tidak terpenuhi. Kondisi ini mengisyaratkan keinginan pasangan usia subur (PUS) terhadap suatu jenis alat kontrasepsi yang tidak tersedia sehingga mereka mengambil keputusan tidak menggunakan alat atau metode kontrasepsi. Kemungkinan yang lain adalah penggunaan alat kontrasepsi oleh PUS saat ini pun tidak sesuai dengan keinginannya (Listyaningsih, et al, 2016). Berdasarkan hal tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa *unmet need* persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi adalah persentase Pasangan Usia Subur (PUS) 15-49 tahun yang tidak ingin mempunyai anak (lagi) atau ingin menjarangkan kelahiran berikutnya tetapi tidak menggunakan metode kontrasepsi apapun. Berdasarkan dokumen RPJMN 2020-2024 Target *unmet need* pada tahun 2022 adalah 8,0 dan menjadi 7,4 pada tahun 2024.

Metode Penghitungan
Penghitungan *unmet need* mengadopsi definisi *unmet need* Sarah Bradley, et al (2012) yang disesuaikan dengan ketersediaan Data Pemutakhiran Pendataan Keluarga Tahun 2022 (Gambar 1). Data Pemutakhiran Pendataan Keluarga Tahun 2022 termasuk perempuan hamil yang kehamilannya tidak diinginkan atau diinginkan kemudian. Indikator ini dihitung untuk dua kategori, yaitu:

<u>Kategori 1</u>
Unmet need penjarangan kelahiran (*for spacing*) meliputi perempuan kawin yang tidak ber-KB, ingin anak nanti (ditunda > 24 bulan) atau dalam kondisi hamil yang kehamilannya diinginkan nanti (dalam kurun waktu 2 tahun/24 bulan atau lebih).

Kategori 2

Unmet need pembatasan kelahiran (*for limiting*) meliputi perempuan kawin tidak hamil yang tidak ber-KB dan tidak ingin anak lagi atau dalam kondisi hamil yang kehamilannya tidak diinginkan lagi.

Penghitungan *unmet need limiting* merupakan gabungan dari kategori *unmet need* PUS sedang hamil dan PUS tidak hamil yang tidak ingin anak lagi, sedangkan *unmet need spacing* merupakan gabungan dari kategori *unmet need* perempuan kawin sedang hamil dan perempuan kawin tidak hamil yang ingin anak kemudian saat pendataan dilakukan.

Penghitungan *unmet need* dinyatakan dalam satuan persen (%) dengan rumus sebagai berikut:

$$U = U_S + U_L$$

Keterangan:

U : Unmet need

U_S : Unmet need untuk penjarangan kelahiran

U_L : Unmet need untuk pembatasan kelahiran

Persentase perempuan dari pasangan usia subur dengan *unmet need* KB dihitung berdasarkan 11 variabel dari pertanyaan PK 2021 yaitu:

Blok I. Kependudukan

1. Jumlah PUS (status perkawinan dari K.07=2)

Blok II. Keluarga Berencana

- **Tidak pakai KB**
    1. Apakah saat ini ibu atau suami menggunakan alat/obat/KB (kontrasepsi) (P.04 = 2).
    2. Alasan utama tidak pakai KB (P.06 selain kode 1 dan 13).
- **Status hamil untuk penghitungan *unmet need for spacing***
    1. Apakah ibu saat ini sedang hamil (P.03=1).
    2. Saat mulai hamil, apakah ibu memang ingin hamil saat itu, ingin hamil nanti, atau tidak ingin anak lagi?) (P.03 1.1=2; Ingin hamil nanti/kemudian).
- **Status hamil untuk penghitungan *unmet need for limiting***
    1. Apakah ibu saat ini sedang hamil (P.03=1).
    2. Saat mulai hamil, apakah ibu memang ingin hamil saat itu, ingin hamil nanti, atau tidak ingin anak lagi?) (P.03 1.1=3; Tidak ingin anak lagi).
- **Tidak Hamil**
    1. Apakah ibu saat ini sedang hamil (P.03=2).
- **Status tidak hamil untuk penghitungan *unmet need for spacing***
    1. Apakah ibu saat ini sedang hamil (P.03=2).

2. Apakah ibu menginginkan anak lagi? (P.03 2.1=2; Ya, ingin anak nanti/kemudian).

- **Status tidak hamil untuk penghitungan *unmet need for limiting***
  1. Apakah ibu saat ini sedang hamil (P.03=2).
  2. Apakah ibu menginginkan anak lagi? (P.03 2.1=3; Tidak ingin anak lagi).

Sumber Data

Pemutakhiran Pendataan Keluarga tahun 2022.

Manfaat

Pemantauan terhadap angka *unmet need* bermanfaat untuk mengetahui strategi penggarapan kesertaan ber-KB. Indikator unmet need dapat memberikan informasi mengenai perempuan yang berisiko mengalami kehamilan yang tidak diinginkan. Selain itu, indikator ini dapat menggambarkan keterbatasan layanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi.

Penurunan *unmet need* selain berkontribusi terhadap peningkatan CPR dan penurunan TFR, juga dapat berkontribusi pada penurunan angka kematian ibu (AKI) yang disebabkan oleh kehamilan tidak diinginkan.

2.7. Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)

Definisi

iBangga merupakan suatu pengukuran kualitas keluarga yang ditunjukkan melalui ketenteraman, kemandirian, dan kebahagiaan keluarga dan menggambarkan peran dan fungsi keluarga untuk semua wilayah di Indonesia. Dalam dokumen Renstra BKKBN 2020-2024 indikator iBangga memiliki target tahun 2022 sebesar 57,0 persen dan menjadi 61,0 persen di tahun 2024.

Metode Perhitungan

Penghitungan iBangga menggunakan pendekatan tiga dimensi yang dibentuk dari 17 variabel. Berikut dimensi dan variabel yang bersumber dari formulir Pemutakhiran PK 2022:

Tabel 2.7.1
Dimensi dan Variabel

Indikator	
Dimensi Ketentraman	1. Keluarga dengan Ibadah Rutin 2. Keluarga Akta Nikah 3. Keluarga dengan Akta Lahir Anak Usia 0-17 Thn 4. Keluarga dengan Kepemilikan Jamkes 5. Keluarga Tanpa Konflik 6. Keluarga Tanpa Cerai
Dimensi Kemandirian	7. Keluarga Memiliki Penghasilan 8. Keluarga Makan Beragam 9. Keluarga dengan Rumah Layak Huni

	10. Keluarga Memiliki Tabungan 11. Keluarga Tidak Ada Putus Sekolah 12. Keluarga Tidak Ada ART Sakit 13. Keluarga dengan Akses Media Online
Dimensi Kebahagiaan	14. Keluarga dengan Interaksi Antar Aanggota 15. Keluarga Pengasuhan Anak Bersama Suami Istri 16. Terdapat Rekreasi Keluarga 17. Keluarga Ikut Kegiatan Sosial
iBangga	

Adapun tahapan penghitungan adalah sebagai berikut:

- **Tahap pertama:** Menghitung nilai agregasi masing-masing variabel di level provinsi dan kabupaten/kota.

- **Tahap kedua:** Menghitung skor di setiap dimensi menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\mathrm{Di} = \sum \mathrm{W_{ij}}\ \mathrm{X_{ij}}$$

Di : Dimensi ke-i
W_{ij} : Bobot variabel ke-j dimensi ke-i
X_{ij} : variabel ke-j dimensi ke-i

- **Tahap ketiga:** Menghitung iBangga menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\mathrm{iBangga} = \frac{1}{3} \sum_{i=1}^{3} \mathrm{Di}$$

Tahapan penghitungan iBangga dilakukan untuk setiap keluarga, sedangkan agregat wilayah dihitung dengan rata-rata aritmetik dari iBangga semua keluarga dalam wilayah bersangkutan. Nilai iBangga berkisar antara 0-100 dengan kategori sebagai berikut:

- iBangga yang kurang baik (rentan) apabila nilainya di bawah 40.
- iBangga yang cukup baik (berkembang) apabila nilainya antara 40–70.
- iBangga yang baik (tangguh) apabila nilainya di atas 70.

Sumber Data
Pemutakhiran Pendataan Keluarga tahun 2022.

Manfaat

Indikator iBangga diperlukan sebagai dasar dalam merumuskan kebijakan/program/kegiatan pembangunan keluarga di Indonesia. Hasil iBangga dengan metode *scoring* dapat dimanfaatkan untuk pemetaan keluarga sampai pada satuan unit terkecil, yaitu sampai level keluarga. Metode ini juga memberikan ruang perumusan kebijakan yang berbeda sesuai kategori keluarga

2.8. Sumber Data

Terdapat dua sumber data yang digunakan dalam penghitungan parameter program Bangga Kencana dalam buku ini, yaitu:

1. **Long Form Sensus Penduduk 2020 (LFSP2020)**

   Rangkaian kegiatan SP2020 terbagi dalam dua tahapan yaitu pendataan penduduk dengan menggunakan kuesioner sederhana (*short form*) pada tahun 2020 dan kemudian dilanjutkan dengan pendataan menggunakan kuesioner yang lebih rinci (*long form*) melalui kegiatan survei pada tahun 2022. Kegiatan survei yang selanjutnya disebut sebagai pendataan *Long Form* SP2020 (LF SP2020) semula direncanakan diselenggarakan pada tahun 2021. Akan tetapi dengan penyesuaian tata kelola di masa pandemi Covid-19, maka pendataan LF SP2020 ditunda ke tahun 2022. Output yang diharapkan dari pendataan LF SP2020 yaitu tersedianya data-data terkait parameter demografi seperti kelahiran, kematian, dan migrasi serta informasi penting lainnya guna menghasilkan indikator *Sustainable Development Goals* (SDGs) dan RPJMN bidang kependudukan.

   Pendataan LF SP2020 dilaksanakan di seluruh Indonesia pada 15 Mei sampai 30 Juni 2023. Jumlah sampel yang dicakup sebanyak 4.294.896 rumah tangga pada 268.431 blok sensus yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Pengumpulan data LF SP2020 dilakukan dengan menggunakan beberapa moda pendataan diantaranya adalah *Paper-Assisted Personal Interviewing* (PAPI), *Computer-Assisted Personal Interviewing* (CAPI), *Computer-Assisted Telephones Interviewing* (CATI), dan *Computer Aided Web Interviewing* (CAWI). Beragamnya moda pengumpulan data LF SP2020 ini sebagai upaya untuk menjaga tingkat respon masyarakat untuk berpartisipasi dalam LF SP2020 di masa pandemi Covid-19.

   Beberapa indikator yang dihasilkan dari LF SP2020 diantaranya adalah parameter demografi seperti *Total Fertility Rate* (TFR), *Age Spesific Fertility Rate* (ASFR 15-19 tahun), *Crude Birth Rate* (CBR), Angka Kematian Bayi (AKB), Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Balita (AKBa), Angka Migrasi Seumur Hidup, dan Angka Migrasi Risen.

2. **Pemutakhiran Pendataan Keluarga 2022**

   Pemutakhiran Pendataan Keluarga adalah kegiatan melengkapi, memperbaharui, mencatat mutasi, dan mendata keluarga baru yang belum ada dalam Basis Data Keluarga Indonesia hasil Pendataan Keluarga

sebelumnya. Kegiatan pemutakhiran dilakukan melalui kunjungan rumah ke rumah dengan cara mewawancarai dan mengobservasi kepala keluarga, yang dilakukan secara serentak pada waktu yang telah ditentukan. Sebelumnya, Pemutakhiran Pendataan Keluarga lebih dikenal dengan nama Pemutakhiran Basis Data Keluarga Indonesia (PBDKI) sebelum berganti pada tahun 2022 menjadi Pemutakhiran Pendataan Keluarga (Pemutakhiran PK-22). Pemutakhiran PK-22 dilaksanakan pada bulan September hingga Oktober 2022.

Kegiatan pemutakhiran ini dilakukan dengan berdasar pada Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Pasal 49 dan 50). Hal tersebut juga dipertegas dengan Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga (Pasal 53) yang menyatakan bahwa Pendataan Keluarga yang dilakukan serentak oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota setiap lima tahun sekali wajib dilakukan pemutakhiran setiap tahun.

BAB III
HASIL PENGHITUNGAN

3.1. Total Fertility Rate/TFR

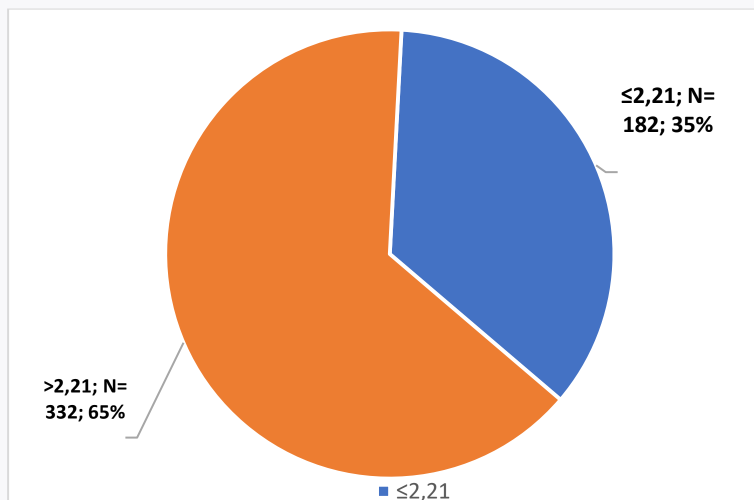
Pada aspek kependudukan hal paling mendasar dalam pembangunan apabila dilihat dari nilai universal, dimana penduduk merupakan pelaku dan sasaran pembangunan sekaligus yang menikmati hasil pembangunan. Peran penduduk tersebut, kualitas penduduk perlu ditingkatkan melalui berbagai sumber daya yang melekat, dan perwujudan keluarga kecil yang berkualitas, serta upaya untuk meningkatkan kuantitas penduduk dan persebaran kependudukan. Untuk menunjang keberhasilan pembangunan dan menangani permasalahan penduduk antara lain meliputi jumlah, komposisi dan distribusi penduduk maka diperlukan adanya upaya pengendalian jumlah penduduk. Pengendalian fertilitas merupakan salah satu cara untuk mengendalikan jumlah penduduk. Dan pengendalian jumlah penduduk lainnya adalah mortalitas (kematian) dan migrasi (perpindahan tempat).

Dalam melakukan pengukuran terhadap tingkat fertilitas, terdapat beberapa persoalan yang dihadapi, sehingga pengukuran terhadap fertilitas ini dilakukan melalui dua macam pendekatan yaitu Yearly Performance dan Reproductive History, salah satu teknik yang termasuk dalam pendekatan Yearly Performance adalah Total Fertility Rate (TFR) atau Angka Kelahiran Total.
Jumlah Kabupaten dan Kota yang dihitung TFR pada pembahasan ini mencakup 514 Kabupaten/Kota. TFR tertinggi sebesar 4,22 terdapat di Kabupaten Asmat , Provinsi Papua sementara yang terendah 1,54 terdapat di Kota Administrasi Jakarta Pusat Provinsi DKI Jakarta.

Hal ini berarti bahwa rata-rata jumlah anak per perempuan di Indonesia adalah 2 orang. Seperti telah disebutkan di atas bahwa tujuan dari pertumbuhan penduduk di Indonesia adalah Penduduk Tumbuh Seimbang (PTS) dengan indikator TFR 2,1 anak per perempuan pada akhir periode RPJMN Tahun 2020-2024. Oleh karena itu, di masa mendatang TFR pada masing-masing wilayah semakin mengerucut ke arah 2,1. Untuk wilayah-wilayah yang telah mencapai TFR dibawah 2,1 maka fokus pembangunan kependudukannya bukan lagi penurunan TFR melainkan ke arah peningkatan kualitas penduduk dan pembangunan keluarga. Sementara untuk wilayah-wilayah dengan TFR yang masih diatas target secara perlahan-lahan dapat menurunkan TFR hingga 2,1.

Target nasional untuk TFR Indonesia pada tahun 2022 yaitu 2,21. Dari hasil perhitungan, TFR tingkat kabupaten/kota dapat dikelompokkan berdasarkan kategori TFR ≤2,21 dan TFR >2,21. Sebanyak 182 kabupaten/kota atau 35 persen memiliki nilai TFR ≤2,21 dan sebanyak 332 Kabupaten/Kota atau 65 persen memiliki nilai TFR >2,21. Hasil perhitungan TFR berdasarkan kabupaten/kota dapat dilihat dari gambar berikut.

Gambar 3.1.1
Persentase Kabupaten/Kota yang Telah dan Belum Mencapai Target RPJMN Tahun 2022 (TFR=2,21)



Sumber : Long Form SP2020

Tabel 3.1.1 menunjukkan masih terdapat beberapa provinsi yang kabupaten/kota nya sama sekali belum ada yang mencapai target yaitu Sumatera Barat, Kalimantan Utara, Sulawesi Barat, Maluku dan Papua. Sebaliknya terdapat provinsi yang seluruh kabupaten/kota nya telah mencapai target yaitu Provinsi DKI Jakarta dan D.I Yogyakarta.

Tabel 3.1.1
Distribusi Kabupaten/Kota yang Telah dan Belum Mencapai Target RPJMN Tahun 2022 (TFR = 2,1) Menurut Provinsi

Provinsi	TFR		Jumlah Kab/Kota
	<= 2,21 (telah mencapai target)	>2,21 (belum mencapai target)	
Aceh	4%	96%	23
Sumatera Utara	12%	88%	33
Sumatera Barat	0%	100%	19
Riau	17%	83%	12
Jambi	45%	55%	11
Sumatera Selatan	18%	82%	17
Bengkulu	30%	70%	10
Lampung	20%	80%	15
Kepulauan Bangka Belitung	43%	57%	7
Kepulauan Riau	29%	71%	7
DKI Jakarta	100%	0%	6
Jawa Barat	67%	33%	27

Provinsi	**TFR**		**Jumlah Kab/Kota**
	<= 2,21 (telah mencapai target)	**>2,21 (belum mencapai target)**	
Jawa Tengah	80%	20%	35
DI Yogyakarta	100%	0%	5
Jawa Timur	97%	3%	38
Banten	88%	13%	8
Bali	78%	22%	9
Nusa Tenggara Barat	10%	90%	10
Nusa Tenggara Timur	9%	91%	22
Kalimantan Barat	7%	93%	14
Kalimantan Tengah	29%	71%	14
Kalimantan Selatan	31%	69%	13
Kalimantan Timur	40%	60%	10
Kalimantan Utara	0%	100%	5
Sulawesi Utara	87%	13%	15
Sulawesi Tengah	15%	85%	13
Sulawesi Selatan	50%	50%	24
Sulawesi Tenggara	6%	94%	17
Gorontalo	17%	83%	6
Sulawesi Barat	0%	100%	6
Maluku	0%	100%	11
Maluku Utara	20%	80%	10
Papua Barat	8%	92%	13
Papua	0%	100%	29
Indonesia	35%	65%	514

Sumber : Long Form Sensus Penduduk 2020

Kondisi ini mendorong perlu adanya kebijakan pengendalian penduduk yang berbeda antar wilayah. Tidak semua provinsi perlu untuk menurunkan atau meningkatkan fertilitasnya, semua harus kembali melihat pada kondisi wilayah masing-masing. Setiap pemerintah daerah perlu menyadari bahwa tujuan ideal dari pengendalian penduduk bukanlah menurunkan angka TFR serendah-rendahnya, tetapi mencapai penduduk tumbuh seimbang dengan angka ideal dimana TFR 2,1 anak per perempuan dengan Net Reproductive Rate (NRR) sebesar 1.

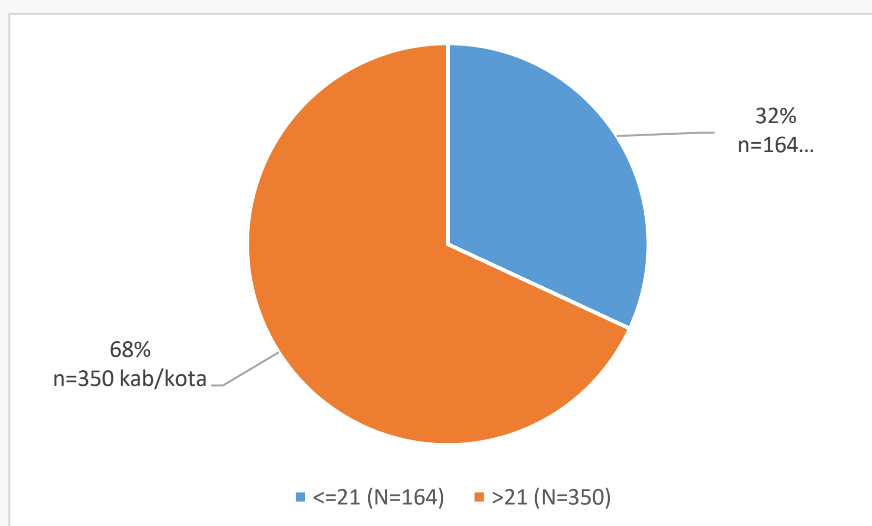
3.2. Age Specific Fertility Rate/ASFR 15 – 19 Tahun

ASFR atau angka kelahiran menurut umur adalah angka yang menunjukkan banyaknya kelahiran dari perempuan pada suatu kelompok umur pada satu tahun yang tertentu per 1000 perempuan pada kelompok umur reproduktif tertentu. ASFR pada kelompok umur reproduktif termuda yaitu 15 – 19 tahun perlu mendapat perhatian khusus karena berhubungan dengan tingkat kematian ibu dan anak. Selain itu, melahirkan pada usia muda mengurangi kesempatan untuk melanjutkan pendidikan atau mendapatkan pekerjaan yang lebih baik dimasa depan. Tingginya angka ASFR pada kelompok umur 15 – 19 tahun, menunjukkan masih tingginya angka pernikahan dini.

Hasil Long Form Sensus Penduduk 2020 menunjukkan ASFR 15-19 kabupaten/kota yang tertinggi adalah Kabupaten Asmat Provinsi Papua yaitu 105,6 dan terendah adalah Kota Padang Provinsi Sumatera Barat yaitu 4. Lebarnya perbedaan angka tertinggi dan terendah dari ASFR 15-19 tahun menunjukkan adanya disparitas pada berbagai aspek pembangunan. Hal ini karena ASFR 15-19 tahun berkaitan erat dengan angka perkawinan anak, kemiskinan, pendidikan, ketenagakerjaan perempuan, budaya dan juga pengetahuan tentang kesehatan reproduksi usia dini.

Berdasarkan RPJMN tahun 2020-2024, target ASFR 15-19 tahun secara nasional pada tahun 2022 adalah 21 kelahiran per 1000 perempuan 15-19 tahun. Gambar 3.2.1 menunjukkan hanya 164 kabupaten/kota (32 persen) yang telah mencapai target. Sementara masih ada 350 kabupaten/kota (68 persen) yang belum mencapai target.

Gambar 3.2.1
Persentase Kabupaten/Kota yang Telah dan Belum Mencapai Target RPJMN Tahun 2022 (ASFR 15-19 tahun = 21)



Tabel 3.2.1 menunjukkan bahwa Provinsi DKI Jakarta merupakan satu-satunya provinsi yang seluruh kabupaten/kotanya telah mencapai target ASFR 15-19

tahun. Sementara itu, tidak satupun kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Barat dan Papua Barat yang sudah mencapai target angka ASFR 15-19 tahun. Secara umum, terlihat mayoritas kabupaten/kota belum mencapai target yang ditetapkan untuk tahun 2022.

Tabel 3.2.1

Distribusi Kabupaten/Kota yang Telah dan Belum Mencapai Target RPJMN tahun 2022 (ASFR 15-19 tahun =21) Menurut Provinsi

Provinsi	ASFR 15-19 tahun		Jumlah Kab/Kota
	<= 21 (telah mencapai target)	>21 (belum mencapai target)	
Aceh	65%	35%	23
Sumatera Utara	42%	58%	33
Sumatera Barat	68%	32%	19
Riau	42%	58%	12
Jambi	18%	82%	11
Sumatera Selatan	18%	82%	17
Bengkulu	10%	90%	10
Lampung	20%	80%	15
Kepulauan Bangka Belitung	14%	86%	7
Kepulauan Riau	43%	57%	7
DKI Jakarta	100%	0%	6
Jawa Barat	56%	44%	27
Jawa Tengah	60%	40%	35
DI Yogyakarta	80%	20%	5
Jawa Timur	39%	61%	38
Banten	75%	25%	8
Bali	56%	44%	9
Nusa Tenggara Barat	20%	80%	10
Nusa Tenggara Timur	23%	77%	22
Kalimantan Barat	14%	86%	14
Kalimantan Tengah	7%	93%	14
Kalimantan Selatan	15%	85%	13
Kalimantan Timur	30%	70%	10
Kalimantan Utara	20%	80%	5
Sulawesi Utara	7%	93%	15
Sulawesi Tengah	8%	92%	13
Sulawesi Selatan	12%	88%	24
Sulawesi Tenggara	18%	82%	17
Gorontalo	17%	83%	6
Sulawesi Barat	0%	100%	19

Provinsi	ASFR 15-19 tahun		Jumlah Kab/Kota
	<= 21 (telah mencapai target)	>21 (belum mencapai target)	
Maluku	27%	73%	11
Maluku Utara	10%	90%	10
Papua Barat	23%	77%	13
Papua	0%	100%	29
Indonesia	32%	68%	514

Sumber : Long Form Sensus Penduduk 2020

ASFR 15-19 tahun merupakan salah satu indikator keberhasilan kinerja program Bangga Kencana di seluruh tingkatan wilayah. Data capaian tersebut menandakan belum meratanya pembangunan dan juga keberhasilan program. Oleh karena itu, kebijakan untuk menurunkan ASFR 15-19 tahun di suatu daerah harus melibatkan berbagai sektor terkait agar secara bersama-sama peduli dan menurunkan angka ASFR 15-19 tahun. Berbeda dengan indikator TFR yang kebijakannya tergantung pada kondisi TFR di wilayah masing-masing, ASFR 15-19 tahun arah kebijakannya adalah terus turunkan sampai sekecil-kecilnya dengan berbagai langkah percepatan penurunannya pada wilayah-wilayah yang memiliki ASFR 15-19 sangat tinggi.

Upaya penurunan ASFR 15-19 tahun dapat dilakukan dengan pendewasaan usia perkawinan melalui peningkatan usia lama sekolah anak perempuan, partisipasi perempuan dalam dunia kerja serta peningkatan pengetahuan, sikap dan perilaku kesehatan reproduksi remaja. BKKBN telah berupaya melakukan hal tersebut melalui berbagai strategi seperti Generasi Berencana (GenRe), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) dan Bina Ketahanan Remaja

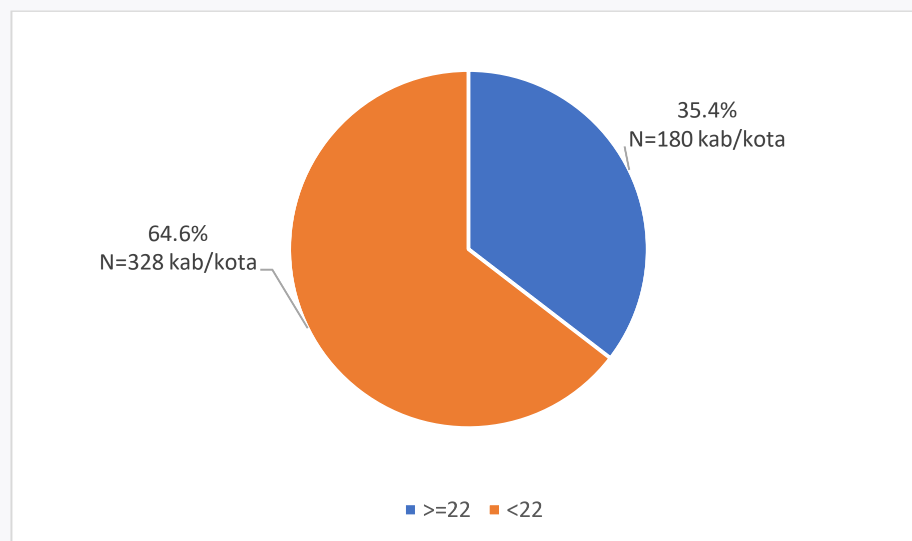
3.3. Median Usia Kawin Pertama/MUKP

Pada umumnya, konteks hubungan seksual pertama kali dilakukan bertepatan dengan momentum perkawinan pertama, karena biasanya seseorang akan melakukan hubungan seksual jika sudah terikat perkawinan. Hubungan seksual merupakan awal seorang perempuan berisiko hamil. Oleh karena itu, usia perkawinan pertama juga dapat digunakan sebagai periode awal seorang perempuan untuk berpotensi hamil. Untuk mengukur tinggi-rendahnya usia kawin pertama, digunakan indikator median usia kawin pertama (MUKP). Indikator tersebut berhubungan negatif dengan fertilitas, dimana semakin muda usia kawin pertama (UKP) maka semakin panjang pula masa reproduksinya sehingga semakin besar pula potensi jumlah anak yang dilahirkan.

Dari hasil penghitungan, didapati bahwa angka MUKP tertinggi terdapat di Kota Kupang Provinsi NTT yaitu 26,3 tahun. Di sisi lain, angka MUKP terendah terdapat di Kabupaten Bondowoso Provinsi Jawa Timur yaitu 17,6 tahun. Angka

tersebut masih cukup jauh dari target yang telah ditetapkan sebesar 22 tahun pada 2022. Hal tersebut menunjukkan bahwa perlu ada kegiatan penanganan yang berfokus pada peningkatan MUKP di Kabupaten Bondowoso baik dari sisi sosial maupun budaya. Sementara itu, kebijakan terkait pendewasaan usia kawin pertama di Kota Kupang perlu tetap dilaksanakan untuk mempertahankan angka MUKP yang sudah cukup tinggi di Kota Kupang.

Gambar 3.3.1
Persentase Kabupaten/Kota yang Telah dan Belum Mencapai Target RENSTRA BKKBN Tahun 2022 (MUKP >=22)



Sumber : Pemutakhiran Pendataan Keluarga Tahun 2022

Gambar di atas menunjukkan bahwa baru terdapat 35,4 persen kabupaten/kota di Indonesia yang telah mencapai target MUKP yang telah ditetapkan dalam dokumen Renstra BKKBN yakni 22 tahun pada tahun 2022. Sementara itu, 64,6 persen kabupaten/kota (328 kabupaten/kota) sisanya masih belum mencapai target MUKP yang telah ditetapkan. Mengingat beragamnya situasi dan kondisi daerah di Indonesia, intervensi yang dilakukan tidak boleh seragam antar daerah. Dibutuhkan upaya yang lebih intensif sesuai dengan kondisi dan situasi masing-masing daerah agar seluruh kabupaten/kota yang masih belum mencapai target yang ditetapkan dapat mengejar pencapaian indikator MUKP di tahun berikutnya. Beberapa upaya yang dapat dilakukan antara lain adalah dengan meningkatkan intensitas Komunikasi-Informasi-Edukasi/KIE melalui media sosial/*platform online* yang sering digunakan oleh remaja serta peningkatan peran tokoh masyarakat dan tokoh agama dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya perencanaan keluarga guna meningkatnya usia perkawinan.

Secara lebih rinci, distribusi capaian target indikator MUKP kabupaten/kota di Indonesia berdasarkan provinsi dapat dilihat pada Tabel 3.3.1. Berdasarkan tabel tersebut, terlihat bahwa terdapat kesenjangan yang cukup besar dalam distribusi pencapaian target MUKP per provinsi. Pada tabel tersebut, sama sekali belum

ada kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Utara yang mencapai target MUKP BKKBN pada tahun 2022. Di sisi lain, hampir seluruh kabupaten/kota di Provinsi NTT dan Maluku yang berhasil mencapai target MUKP. Untuk itu, diperlukan penajaman lokus program pendewasaan usia perkawinan di Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Utara dengan dukungan dari pemangku kebijakan setempat.

Tabel 3.3.1
Distribusi Kabupaten/Kota yang Telah dan Belum Mencapai Target RPJMN tahun 2022 (MUKP = 22 Tahun) Menurut Provinsi

Provinsi	MUKP pada Perempuan Pernah Kawin		Jumlah Kab/Kota
	<22 (belum mencapai target)	>=22 (telah mencapai target)	
Aceh	52.2%	47.8%	23
Sumatra Utara	33.3%	66.7%	33
Sumatra Barat	47.4%	52.6%	19
Riau	66.7%	33.3%	12
Jambi	90.9%	9.1%	11
Sumatra Selatan	94.1%	5.9%	17
Bengkulu	90.0%	10.0%	10
Lampung	86.7%	13.3%	15
Bangka Belitung	85.7%	14.3%	7
Kepulauan Riau	42.9%	57.1%	7
Jawa Barat	77.8%	22.2%	27
Jawa Tengah	74.3%	25.7%	35
DI Yogyakarta	20.0%	80.0%	5
Jawa Timur	73.7%	26.3%	38
Banten	75.0%	25.0%	8
Bali	33.3%	66.7%	9
NTB	60.0%	40.0%	10
NTT	9.1%	90.9%	22
Kalimantan Barat	85.7%	14.3%	14
Kalimantan Tengah	100.0%	0.0%	14
Kalimantan Selatan	100.0%	0.0%	13
Kalimantan Timur	70.0%	30.0%	10
Kalimantan Utara	100.0%	0.0%	5
Sulawesi Utara	66.7%	33.3%	15
Sulawesi Tengah	92.3%	7.7%	13
Sulawesi Selatan	62.5%	37.5%	24
Sulawesi Tenggara	88.2%	11.8%	17

Provinsi	MUKP pada Perempuan Pernah Kawin		Jumlah Kab/Kota
	<22 (belum mencapai target)	>=22 (telah mencapai target)	
Gorontalo	83.3%	16.7%	6
Sulawesi Barat	83.3%	16.7%	6
Maluku	9.1%	90.9%	11
Maluku Utara	60.0%	40.0%	10
Papua Barat	30.8%	69.2%	13
Papua	48.3%	51.7%	29
Indonesia	64.6%	35.4%	508

Sumber : Pemutakhiran Pendataan Keluarga Tahun 2022

3.4. Metode Kontrasepsi Jangka Panjang/MKJP

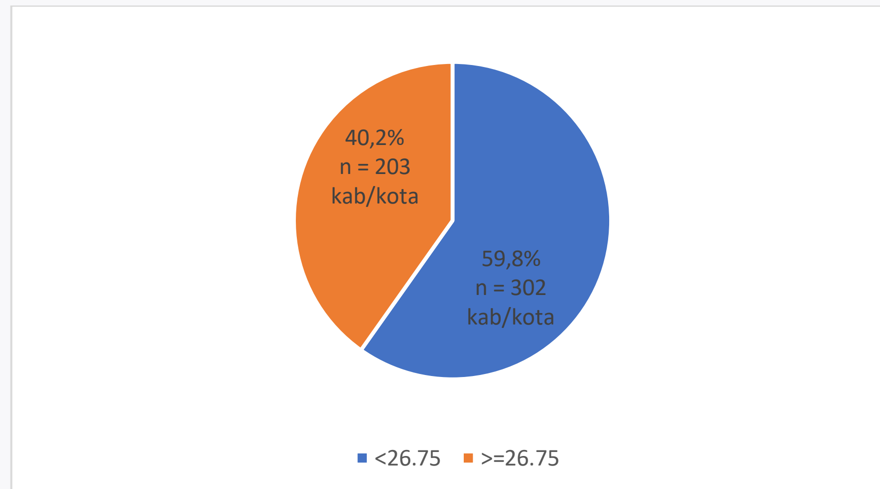
Metode kontrasepsi yang digunakan dalam program pemerintah adalah berdasarkan masa perlindungan yaitu Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) dan non Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (non-MKJP) (Kementerian Kesehatan, 2021). MKJP adalah bagian dari metode kontrasepsi modern yang hanya terdiri dari Metode Operasi Pria (MOP), Metode Operasi Wanita (MOW), *Intrauterine Device* (IUD) atau Alat Kontrasepsi Dalam Rahim (AKDR), dan Implant (susuk).

MKJP diperhatikan karena memiliki daya perlindungan lebih lama untuk para Pasangan Usia Subur (PUS) dari kehamilan sekaligus menghindari angka putus pakai dalam jangka waktu pendek. Hal ini membuat MKJP merupakan metode kontrasepsi dengan efektivitas tinggi dalam menurunkan kehamilan dan diharapkan penggunaan metode ini terus meningkat. Pemerintah dalam Renstra BKKBN 2020-2024 telah menetapkan target untuk angka MKJP di tahun 2022 yaitu sebesar 26,75%. Persentase MKJP ini sendiri didapatkan dari pembagian antara jumlah pengguna kontrasepsi jangka panjang terhadap jumlah seluruh pengguna kontrasepsi modern.

Hasil penghitungan persentase MKJP menunjukkan disparitas yang cukup lebar dimana angka MKJP tingkat kabupaten/kota tersebar mulai dari yang terendah sebesar 3,3% (Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat) hingga yang tertinggi 100% di Kabupaten Mamberamo Tengah dan Puncak Jaya di Provinsi Papua, namun dikarenakan data kedua kabupaten di Papua tersebut memiliki *Relative Standard Error* (RSE) sama dengan atau lebih dari 25 persen maka hasil penghitungan estimasi pada kedua kabupaten ini tidak dapat digunakan. Apabila data dari kedua kabupaten tersebut dikesampingkan, maka angka capaian persentase MKJP terbesar berikutnya adalah sebesar 92,6% yang terdapat di Kabupaten

Sumba Barat Daya di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Hal ini tentu saja masih menunjukkan disparitas yang cukup lebar mulai dari 3,3% hingga 92,6%.

Gambar 3.4.1
Persentase Kabupaten/Kota yang Telah dan Belum Mencapai Target Renstra BKKBN Tahun 2022 (PA MKJP >=26,75%)



Sumber: Pemutakhiran Pendataan Keluarga 2022

Dari gambar di atas, dapat kita perhatikan bahwa terdapat 40,2 persen atau sebanyak 203 kabupaten/kota yang telah memenuhi target Renstra BKKBN tahun 2022 untuk persentase MKJP. Sedangkan sebagian besar kabupaten/kota sebesar 59,8 persen atau sebanyak 302 kabupaten/kota masih memiliki angka persentase MKJP yang di bawah target Renstra BKKBN tahun 2022.

Tabel 3.4.1
Distribusi Kabupaten/Kota yang Telah dan Belum Mencapai Target Renstra BKKBN tahun 2022 (PA MKJP>= 26,75%) Menurut Provinsi

Provinsi	PA MKJP		Jumlah Kab/Kota
	< 26,75% Belum mencapai	>= 26,75% Sudah mencapai	
Aceh	91,3%	8,7%	23
Sumatera Utara	27,3%	72,7%	33
Sumatera Barat	36,8%	63,2%	19
Riau	100,0%	0,0%	12
Jambi	81,8%	18,2%	11
Sumatera Selatan	70,6%	29,4%	17
Bengkulu	80,0%	20,0%	10
Lampung	86,7%	13,3%	15
Bangka Belitung	100,0%	0,0%	7
Kepulauan Riau	71,4%	28,6%	7
Jawa Barat	81,5%	18,5%	27
Jawa Tengah	48,6%	51,4%	35

Provinsi	PA MKJP		Jumlah Kab/Kota
	< 26,75% Belum mencapai	>= 26,75% Sudah mencapai	
DI Yogyakarta	0,0%	100,0%	5
Jawa Timur	65,8%	34,2%	38
Banten	100,0%	0,0%	8
Bali	11,1%	88,9%	9
NTB	20,0%	80,0%	10
NTT	0,0%	100,0%	22
Kalimantan Barat	100,0%	0,0%	14
Kalimantan Tengah	100,0%	0.0%	14
Kalimantan Selatan	100,0%	0,0%	13
Kalimantan Timur	70,0%	30,0%	10
Kalimantan Utara	100,0%	0,0%	5
Sulawesi Utara	33,3%	66,7%	15
Sulawesi Tengah	38,5%	61,5%	13
Sulawesi Selatan	70,6%	29,4%	24
Sulawesi Tenggara	82,4%	17,6%	17
Gorontalo	0,0%	100,0%	6
Sulawesi Barat	36,8%	63,2%	6
Maluku	45,5%	54,5%	11
Maluku Utara	20,0%	80,0%	10
Papua Barat	92,3%	7,7%	13
Papua	46,2%	53,8%	29
Indonesia	59,8%	40,2%	508

Sumber : Pemutakhiran Pendataan Keluarga 2022

Data tersebut menunjukkan masih banyak provinsi yang kabupaten/kotanya belum memenuhi target Renstra BKKBN tahun 2022 untuk persentase MKJP. Beberapa provinsi dimana lebih dari sebagian kabupaten/kotanya telah mencapai target Renstra BKKBN tahun 2022 untuk persentase MKJP yaitu Provinsi Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jawa Tengah, D.I. Yogyakarta, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Gorontalo, Sulawesi Barat, Maluku, Maluku Utara, dan Papua.

Selain itu, juga terdapat beberapa provinsi yang seluruh kabupaten/kotanya telah mencapai target Renstra BKKBN tahun 2022 untuk persentase MKJP (100%) yaitu Provinsi D.I. Yogyakarta, Nusa Tenggara Timur, dan Gorontalo. Namun, di sisi lain juga terdapat provinsi yang seluruh kabupaten/kotanya belum ada yang mencapai target RPJMN tahun 2022 untuk persentase MKJP yaitu Provinsi Riau, Kep. Bangka Belitung, Banten, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara. Hal ini menunjukkan bahwa masih perlu upaya lebih lanjut dalam memberikan

sosialisasi kepada masyarakat dan advokasi kepada pemerintah daerah untuk lebih menggencarkan program terkait penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang ini sendiri sehingga target-target yang telah ditentukan dapat dicapai atau bahkan dilampaui.

Hasil capaian MKJP ini juga masih perlu disandingkan dengan hasil capaian *Modern Contraceptive Prevalence Rate* (mCPR) di provinsi masing-masing. Sehingga peningkatan capaian target MKJP dapat selaras dengan peningkatan capaian mCPR di daerah tersebut. Angka persentase MKJP di masa mendatang diharapkan dapat terus meningkat terutama untuk para perempuan yang baru saja mengalami persalinan sehingga dapat membantu mengatur jarak kelahiran dan juga melindungi pasangan dari memiliki anak kembali setelah jumlah anak ideal yang diharapkan telah tercapai

3.5. Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR

Dalam upaya penurunan tingkat fertilitas di Indonesia, Program Keluarga Berencana (KB) ditengarai memiliki andil besar dan penting. Dalam kurun waktu tiga dasawarsa sejak diformalkan oleh Pemerintah Indonesia pada akhir tahun 1970-an, Program KB dianggap berhasil mendukung penurunan TFR Indonesia dari 5,6 anak per perempuan menjadi 2,6 anak per perempuan pada awal tahun 2000-an. Samosir (2010: 175) menegaskan betapa pentingnya peran Program KB dalam penurunan tingkat kelahiran dan tingkat kematian sehingga menyebabkan penurunan tingkat pertumbuhan penduduk. Lebih jauh lagi, Samosir (2010: 176) menyebutkan bahwa keberhasilan Program KB membuat Indonesia mendapatkan bonus demografi akibat menurunnya jumlah penduduk usia 0-14 tahun.

Davis dan Blake (1956), kemudian Bongaarts (1978) menemukan faktor-faktor antara penentu fertilitas (Samosir, 2010: 190). Dalam konteks Indonesia, sejarah membuktikan bahwa tingkat pemakaian atau prevalensi kontrasepsi adalah faktor antara yang paling menentukan penurunan tingkat fertilitas. Hubungan antara prevalensi kontrasepsi dan TFR ini kemudian dijelaskan secara lebih rinci oleh Bongaarts dan Kirmeyer (1982, dalam Samosir, 2010: 190). Karena itu, maka pencapaian target TFR yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Pemerintah Indonesia dan Rencana Strategis (Renstra) BKKBN sangat tergantung pada pemenuhan akses terhadap informasi dan pelayanan KB bagi Wanita Usia Subur (WUS) berstatus kawin dan Pasangan Usia Subur (PUS).

Prevalensi Kontrasepsi (*Contraceptive Prevalence Rate*/CPR) adalah salah satu ukuran KB yang bersifat *current*, yakni menggambarkan kondisi perilaku KB pada satu titik waktu. Sementara metode kontrasepsi yang digunakan mencakup metode modern dan tradisional.

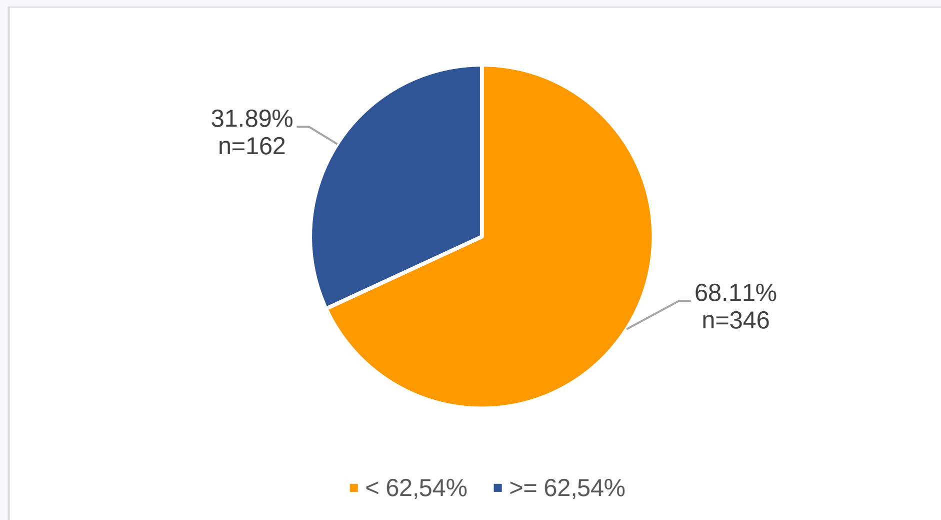
Modern Contraceptive Prevalence Rate (mCPR) adalah salah satu Indikator Kinerja Utama (IKU) BKKBN dalam RPJMN dan Renstra tahun 2020-2024. Dalam Program KB yang dikelola oleh BKKBN, metode kontrasepsi modern yang dimaksud meliputi Metode Operasi Wanita (MOW) atau steril wanita atau tubektomi, Metode Operasi Pria (MOP) atau steril pria atau vasektomi, Alat Kontrasepsi Dalam Rahim (AKDR) atau spiral atau *Intrauterine Device* (IUD), susuk (*implant*), suntik, pil, kondom, dan Metode Amenore Laktasi (MAL). Berdasarkan RPJMN dan Renstra BKKBN Tahun 2020-2024, secara nasional mCPR ditargetkan mencapai 62,54 persen pada tahun 2022 dan 63,41 persen pada tahun 2024.

Bagian ini membahas hasil penghitungan mCPR tingkat kabupaten/kota pada tahun 2022 berdasarkan data hasil Pemutakhiran Pendataan Keluarga Tahun 2022 dan pencapaiannya menurut target mCPR secara nasional. Penghitungan mCPR dilakukan pada 508 kabupaten/kota dari 34 provinsi di seluruh Indonesia. Artinya, 6 kabupaten/kota administratif yang ada di Provinsi DKI Jakarta tidak termasuk ke dalam kabupaten/kota yang dibahas.

Terdapat disparitas yang sangat lebar pada capaian mCPR kabupaten/kota di Indonesia tahun 2022. Kabupaten dengan mCPR terendah sebesar 0,00 persen adalah Kabupaten Dogiyai, Kabupaten Nduga, dan Kabupaten Puncak di Provinsi Papua. Namun, data mCPR ketiga kabupaten tersebut memiliki *Relative Standard Error* (RSE) sama dengan atau lebih dari 25 persen sehingga hasil penghitungan estimasi level pada ketiga kabupaten ini tidak dapat digunakan. Sebagai alternatif penggantinya adalah kabupaten/kota yang memiliki capaian mCPR terendah berikutnya dengan RSE kurang dari 25 persen. Kabupaten dimaksud adalah Kabupaten Lanny Jaya, Provinsi Papua, dengan mCPR sebesar 0,08 persen. Sementara itu, kabupaten yang memiliki capaian mCPR tertinggi sebesar 78,25 persen adalah Kabupaten Probolinggo, Provinsi Jawa Timur. Selisih antara kabupaten dengan mCPR tertinggi dan terendah sebesar 78,17 persen.

Sementara itu, hasil penghitungan mCPR menunjukkan kurang dari sepertiga kabupaten/kota yang telah mencapai target nasional pada tahun 2022. Hasil penghitungan mCPR dimaksud dapat dilihat dalam Gambar 3.5.1. di bawah ini,. Secara nasional, hanya sebanyak 31,89 persen kabupaten/kota (162 kabupaten/kota) yang telah mencapai target mCPR pada RPJMN tahun 2022 dan Renstra BKKBN Tahun 2020-2024. Hal ini sangat memprihatinkan karena berarti masih terdapat 68,11 persen kabupaten/kota (346 kabupaten/kota) yang belum mencapai target.

Gambar 3.5.1
Persentase Kabupaten/Kota yang Telah dan Belum Mencapai Target RPJMN Tahun 2022 (mCPR >=62,54%)



Sumber: Pemutakhiran Pendataan Keluarga Tahun 2022

Jika dilihat lebih jauh, maka terdapat provinsi yang hampir seluruh kabupaten/kotanya telah mencapai target nasional mCPR pada tahun 2022; namun, sebaliknya, ada provinsi yang tidak satupun kabupaten/kotanya sudah mencapai target. Terdapat 2 (dua) provinsi dengan proporsi kabupaten/kota yang telah mencapai target sebesar 90 persen atau lebih, yaitu Provinsi Bengkulu dan Kalimantan Selatan. Sementara itu, terdapat 9 (sembilan) provinsi yang kabupaten/kotanya sama sekali belum mencapai target RPJMN tahun 2022. Kesembilan provinsi tersebut meliputi Provinsi Sumatera Utara, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Tengah, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat. Distribusi kabupaten/kota yang telah dan belum mencapai target mCPR secara nasional pada tahun 2022 menurut provinsi selengkapnya dapat dicermati dalam Tabel 3.5.1. di bawah ini.

Tabel 3.5.1
Distribusi Kabupaten/Kota yang Telah dan Belum Mencapai Target RPJMN tahun 2022 (mCPR >=62,54%) Menurut Provinsi

Provinsi	mCPR		Jumlah Kab/Kota
	< 62,54% Belum mencapai	**>= 62,54% Sudah mencapai**	
Aceh	86,96%	13,04%	23
Sumatra Utara	100,00%	0,00%	33
Sumatra Barat	89,47%	10,53%	19
Riau	83,33%	16,67%	12

Provinsi	mCPR		Jumlah Kab/Kota
	< 62,54% Belum mencapai	**>= 62,54%** Sudah mencapai	
Jambi	18,18%	81,82%	11
Sumatra Selatan	17,65%	82,35%	17
Bengkulu	10,00%	90,00%	10
Lampung	33,33%	66,67%	15
Bangka Belitung	14,29%	85,71%	7
Kepulauan Riau	71,43%	28,57%	7
Jawa Barat	33,33%	66,67%	27
Jawa Tengah	40,00%	60,00%	35
DI Yogyakarta	80,00%	20,00%	5
Jawa Timur	36,84%	63,16%	38
Banten	87,50%	12,50%	8
Bali	88,89%	11,11%	9
NTB	80,00%	20,00%	10
NTT	100,00%	0,00%	22
Kalimantan Barat	71,43%	28,57%	14
Kalimantan Tengah	14,29%	85,71%	14
Kalimantan Selatan	7,69%	92,31%	13
Kalimantan Timur	100,00%	0,00%	10
Kalimantan Utara	100,00%	0,00%	5
Sulawesi Utara	80,00%	20,00%	15
Sulawesi Tengah	100,00%	0,00%	13
Sulawesi Selatan	87,50%	12,50%	24
Sulawesi Tenggara	94,12%	5,88%	17
Gorontalo	83,33%	16,67%	6
Sulawesi Barat	83,33%	16,67%	6
Maluku	100,00%	0,00%	11

Provinsi	mCPR		Jumlah Kab/Kota
	< 62,54% Belum mencapai	**>= 62,54%** Sudah mencapai	
Maluku Utara	100,00%	0,00%	10
Papua Barat	100,00%	0,00%	13
Papua	100,00%	0,00%	29
Indonesia	68,11%	31,89%	508

Sumber: Pemutakhiran Pendataan Keluarga Tahun 2022

Adanya disparitas yang signifikan dalam capaian mCPR antar kabupaten/kota di Indonesia pada tahun 2022 sebagaimana telah dibahas di atas memerlukan berbagai upaya untuk memperkecil *gap* disparitas tersebut. Sementara itu, masih rendahnya proporsi kabupaten/kota yang telah mencapai target mCPR secara nasional pada tahun 2022 tentunya menjadi peringatan bagi upaya pencapaian target pada akhir periode RPJMN tahun 2024 mendatang. Karena itu, maka diperlukan upaya ekstra untuk merumuskan kebijakan dan strategi peningkatan akses dan kualitas pelayanan kontrasepsi yang tepat. Beberapa upaya yang perlu dilakukan meliputi memperkuat sistem logistik di berbagai tingkatan, terutama memastikan distribusi dinamis di kabupaten/kota, memperkuat sarana dan prasarana pelayanan kesehatan untuk pelayanan KB, serta meningkatkan peran dan dukungan keluarga, media, dunia bisnis, akademisi, masyarakat, pemerintah daerah dan pemerintah terhadap pemberian pelayanan kontrasepsi (Alimoeso, 2023).

3.6. Unmet Need KB

Menurut Bradley et al (2012), *unmet need* KB didefinisikan sebagai persentase perempuan usia subur yang tidak menggunakan kontrasepsi, tetapi tidak menginginkan anak lagi atau ingin menjarangkan kehamilan. Makna harfiah atau makna literal dari kata *unmet need* adalah kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi. Kondisi ini mengisyaratkan keinginan pasangan usia subur (PUS) terhadap suatu jenis alat kontrasepsi yang tidak tersedia sehingga mereka mengambil keputusan tidak menggunakan alat atau metode kontrasepsi. Kemungkinan yang lain adalah penggunaan alat kontrasepsi oleh PUS saat ini pun tidak sesuai dengan keinginannya (Listyaningsih, et al, 2016).

Berdasarkan hal tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa *unmet need* persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi adalah persentase wanita kawin/Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang tidak ingin mempunyai anak (lagi) atau ingin menjarangkan kelahiran berikutnya tetapi tidak menggunakan metode kontrasepsi apapun.

Tabel 3.6.1
Distribusi Unmet Need berdasarkan Karakteristik dan Latar Belakang, PK Pemutakhiran Tahun 2022

Karakteristik latar belakang	Unmet Need		
	Jumlah Pasangan Usia Subur = 46.008.745		
	Untuk penjarangan	Untuk Pembatasan	Total
Total	4,2	10,5	14,7
Kelompok Umur			
15–19	6,5	1,7	8,1
20–24	6,2	1,8	8,1
25–29	6,7	3,2	9,9
30–34	6,1	6,1	12,2
35–39	5,2	10,1	15,3
40–44	4,0	15,9	19,9
45–49	2,9	**22,7**	**25,7**
Jumlah anak			
0–1	6,4	4,3	10,7
2–3	4,4	13,7	18,1
4 atau lebih	3,6	**23,0**	**26,6**
Pendidikan			
Tidak Tamat SD	9,7	**16,4**	**26,1**
Tamat SD	4,1	11,7	15,8
Tamat SMP	4,3	9,8	14,2
Tamat SMA	5,5	11,5	17,0
Perguruan Tinggi	6,9	12,0	18,9

Berdasarkan karakteristik dan latar belakang, terlihat pada tabel diatas ini bahwa 25,7 persen *unmet need* terjadi pada Pasangan Usia Subur (PUS) yang berumur 45-49 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar *unmet need* terjadi pada perempuan yang tingkat kesuburannya sudah berkurang. Sebanyak 22,7 persen diantaranya bahkan Tidak Ingin Anak Lagi (TIAL). *Unmet need* yang tinggi juga terdapat pada PUS dengan jumlah anak 4 atau lebih (26,5 persen). Kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi ini dapat diarahkan untuk menggunakan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) agar tidak menyebabkan *drop out* (DO) yang berkontribusi pada angka *unmet need*.

Berdasarkan tingkat pendidikan, *unmet need* paling banyak terjadi pada tingkat pendidikan terendah (tidak tamat SD) sebanyak 26,1 persen. Kelompok tertinggi selanjutnya justru terjadi pada tingkat pendidikan tertinggi (Perguruan Tinggi) sebanyak 18,9 persen. Dengan adanya fenomena ini maka perlu dilakukan studi

lebih lanjut untuk mengetahui penyebabnya. Beberapa studi telah menemukan hubungan antara pendidikan dan pemakaian kontrasepsi.

Menurut Rabiu & Rufa'I (2018), status pendidikan secara signifikan berkaitan dengan penggunaan kontrasepsi tradisional. Sementara sesuai dengan penelitian Wijayanti (2021), wanita usia subur yang berpendidikan tinggi dan tinggal di kota justru lebih memilih menggunakan kontrasepsi tradisional.

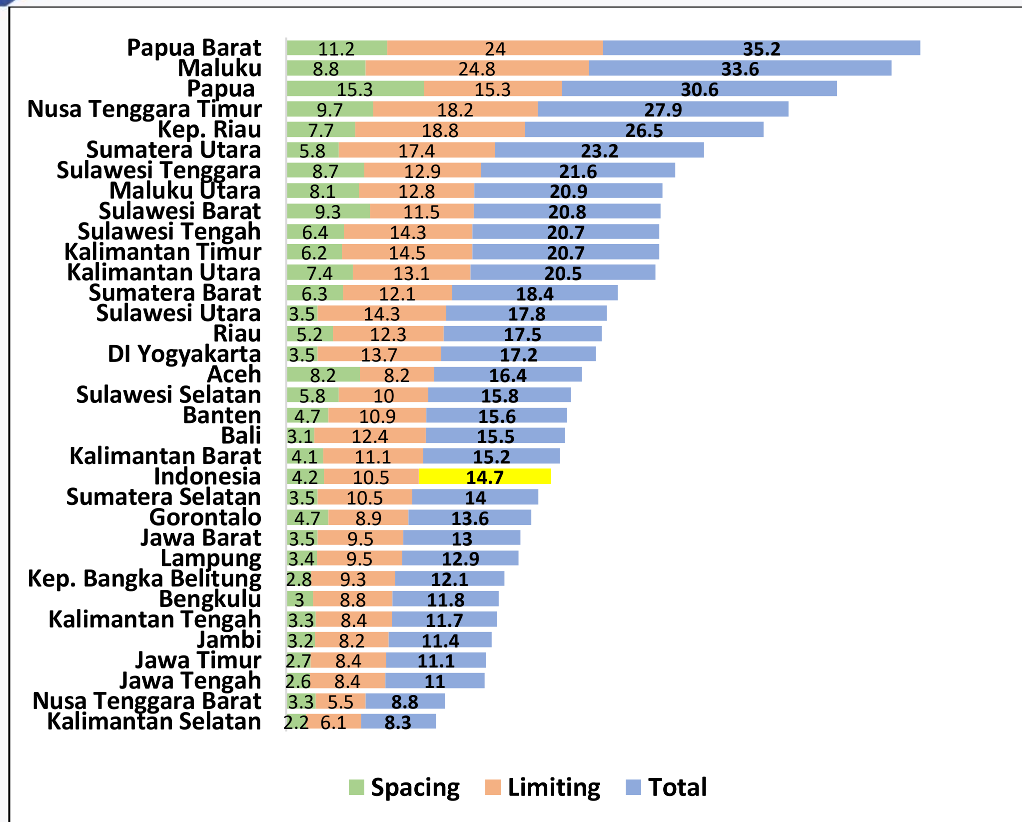
Secara nasional, angka *unmet need* pada tahun 2022 berdasarkan hasil perhitungan Pemutakhiran Pendataan Keluarga 2022 sebesar 14,7 persen. Capaian ini mengindikasikan hal yang positif karena angka *unmet need* mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2021 yaitu 18 persen.

Jika dilihat menurut tujuan maka *unmet need* lebih banyak terjadi pada pembatasan (*limiting*) yang mencapai 11,6 persen pada tahun 2022. Angka ini menurun dari tahun 2021 yaitu sebesar 12,5 persen. Sementara itu, angka *unmet need* untuk penjarangan (*spacing*) pada tahun 2022 sebesar 5,2 persen, berkurang sedikit dari tahun 2021 sebesar 5,5 persen. *Unmet need* untuk tujuan pembatasan (*limiting*) lebih dari dua kali lipat dari penjarangan (*spacing*). Hal ini menunjukkan besarnya kebutuhan ber-KB dengan menggunakan MKJP.

Gambar 3.6.1 menunjukkan angka *unmet need* sangat beragam menurut provinsi. Meskipun demikian, belum ada satupun provinsi yang berhasil mencapai target yang ditetapkan yaitu 8,0 persen. Provinsi dengan angka unmet need terendah adalah Provinsi Kalimantan Selatan (9,1 persen). Sementara angka *unmet need* tertinggi yaitu Provinsi Papua Barat (48,2%). Selain Provinsi Kalimantan Selatan**,** sebanyak 12 provinsi lainnya memiliki angka *unmet need* lebih rendah dari capaian nasional, meliputi Bengkulu (12,2 persen), Jambi (12,5 persen), Kepulauan Bangka Belitung (12,5 persen), Kalimantan Tengah (12,7 persen), Jawa Timur (13,9 persen), Jawa Tengah (14 persen) dan Jawa Barat (14,1 persen).

Jika dilihat menurut provinsi, maka angka *unmet need* untuk tujuan penjarangan (*spacing*) tertinggi adalah di Provinsi Papua (15,3 persen) dan Papua Barat (11,2 persen), sedangkan yang terendah di Provinsi Kalimantan Selatan (2,2 persen) dan Nusa Tenggara Barat (3,3 persen). *Unmet need* dengan tujuan pembatasan (*limiting*) tertinggi di Provinsi Maluku (24,8 persen) dan Papua Barat (24 persen), sedangkan terendah di Provinsi Nusa Tenggara Barat (5,5 persen) dan Kalimantan Selatan (6,1 persen). Terkait dengan *gap* proporsi antara *unmet need* dengan tujuan *spacing* dan *limiting*, Provinsi Maluku memiliki *gap* atau perbedaan yang paling besar diantara 33 provinsi yaitu sebesar 16 persen (*unmet need spacing* 8,8 persen dan *unmet need limiting* 24,8 persen).

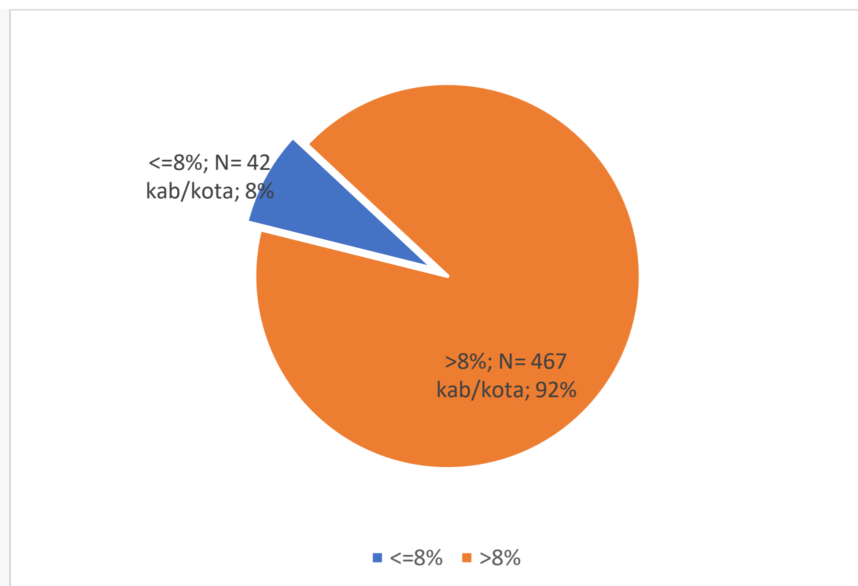
Gambar 3.6.1
Persentase Kebutuhan KB yang Tidak Terpenuhi (Unmet Need) pada wanita PUS/Kawin menurut Provinsi Tahun 2022



Unmet Need Tingkat Kabupaten/kota

Hasil perhitungan *unmet need* menunjukkan terdapat disparitas yang tinggi dimana *unmet need* tertinggi di Kabupaten Asmat (Papua) sebesar 74,6 persen dan *unmet need* terendah di Kota Probolinggo (Jawa Timur) sebesar 4,2 persen. Selain di Kabupaten Asmat, hasil perhitungan *unmet need* juga didapati tinggi di beberapa kabupaten lainnya di Papua seperti Mappi (54%), Deiyai (57,1%), dan Dogiyai (61,8%). *Unmet need* yang masih tinggi di wilayah dengan geografis sulit dijangkau memerlukan kebijakan tidak hanya dari segi penyediaan alokon, tetapi juga layanan keluarga berencana yang berkualitas dan dapat diakses oleh yang membutuhkan

Gambar 3.6.2
Persentase Kabupaten/Kota yang Telah dan Belum Mencapai Target RPJMN Tahun 2022 (Unmet Need <=8%)



Sumber: Pemutakhiran Pendataan Keluarga 2022

Meskipun belum ada provinsi yang mencapai target *unmet need* yang ditetapkan sebesar 8 persen, diagram diatas memperlihatkan bahwa pada tingkat kabupaten/kota, terdapat 42 kabupaten dari 12 provinsi yang sudah mencapai target. Namun demikian, diantara 42 kabupaten/kota tersebut terdapat 1 kabupaten yang memiliki Relative Standard Error (RSE) sama dengan atau lebih dari 25 persen sehingga hasil penghitungan kabupaten ini tidak dapat digunakan yaitu Kabupaten Puncak, Provinsi Papua. Dengan demikian, secara total, hanya ada 41 kabupaten/kota yang secara valid telah mencapai unmet need ≤8 persen. Tabel 3.6.3 menunjukkan 41 kabupaten/kota yang telah berhasil mencapai target ≤8 persen pada tahun 2022.

Tabel 3.6.2
Kabupaten/Kota yang Telah Mencapai Target Unmet Need

No	Kabupaten	Provinsi	Capaian Unmet Need
1	Gayo Lues	Aceh	6.6
2	Lebong	Bengkulu	5.6
3	Seluma	Bengkulu	7.9
4	Kerinci	Jambi	6.6
5	Merangin	Jambi	7.2
6	Sumedang	Jawa Barat	6.7
7	Kota Banjar	Jawa Barat	7.4
8	Bandung Barat	Jawa Barat	7.8
9	Rembang	Jawa Tengah	6.8
10	Batang	Jawa Tengah	7.0

No	Kabupaten	Provinsi	Capaian Unmet Need
11	Wonosobo	Jawa Tengah	7.1
12	Banjarnegara	Jawa Tengah	7.1
13	Blora	Jawa Tengah	7.2
14	Temanggung	Jawa Tengah	7.2
15	Pati	Jawa Tengah	7.9
16	Pemalang	Jawa Tengah	7.9
17	Grobogan	Jawa Tengah	8.0
18	Probolinggo	Jawa Timur	4.2
19	Bondowoso	Jawa Timur	4.9
20	Mojokerto	Jawa Timur	6.2
21	Bojonegoro	Jawa Timur	6.7
22	Lumajang	Jawa Timur	6.7
23	Situbondo	Jawa Timur	7.1
24	Pasuruan	Jawa Timur	7.3
25	Tuban	Jawa Timur	7.6
26	Trenggalek	Jawa Timur	7.7
27	Kayong Utara	Kalimantan Barat	7.6
28	Hulu Sungai Selatan	Kalimantan Selatan	5.4
29	Barito Kuala	Kalimantan Selatan	5.6
30	Balangan	Kalimantan Selatan	6.4
31	Tanah Laut	Kalimantan Selatan	6.5
32	Hulu Sungai Utara	Kalimantan Selatan	6.5
33	Tanah Bumbu	Kalimantan Selatan	6.9
34	Tabalong	Kalimantan Selatan	7.8
35	Barito Selatan	Kalimantan Tengah	6.2
36	Seruyan	Kalimantan Tengah	6.9
37	Bangka Selatan	Kepulauan Bangka Belitung	6.1
38	Lombok Tengah	Nusa Tenggara Barat	6.0
39	Lombok Timur	Nusa Tenggara Barat	6.1
40	Lombok Utara	Nusa Tenggara Barat	6.9
41	Penukal Abab Lematang Ilir	Sumatera Selatan	7.1
42	Puncak*	Papua	2.4

Sebagaimana ditunjukkan pada dibawah, masih terdapat 21 provinsi yang seluruh kabupaten/kotanya belum mencapai target *unmet need*. Provinsi Jawa Timur merupakan provinsi dengan kabupaten/kota paling banyak mencapai target yaitu sebanyak 53,85 persen kabupaten/kota, diikuti dengan Provinsi Kalimantan Selatan dengan 30 persen kabupaten/kotanya yang mencapai target. Adanya disparitas yang begitu lebar antar kabupaten/kota menunjukkan bahwa diperlukan langkah-langkah percepatan penurunan *unmet need* untuk

wilayah-wilayah dengan *unmet need* yang sangat tinggi dan penguatan pelayanan untuk wilayah dengan unmet yang sudah rendah.

Tabel 3.6.3
Distribusi Kabupaten/Kota yang Telah dan Belum Mencapai Target Unmet Need tahun 2022 (Unmet Need <=8%) Menurut Provinsi

Provinsi	Unmet Need		Jumlah Kab/Kota
	<= 8% Sudah mencapai	□ 8% Belum mencapai	
Aceh	4,35%	5,65%	23
Sumatra Utara	0,00%	100,00%	33
Sumatra Barat	0,00%	100,00%	19
Riau	20,00%	80,00%	12
Jambi	0,00%	100,00%	11
Sumatra Selatan	0,00%	100,00%	17
Bengkulu	18,18%	81,82%	10
Lampung	11,11%	88,89%	15
Bangka Belitung	25,71%	74,29%	7
Kepulauan Riau	23,68%	76,32%	7
Jawa Barat	7,14%	92,86%	27
Jawa Tengah	53,85%	46,15%	35
DI Yogyakarta	14,29%	85,71%	5
Jawa Timur	0,00%	100,00%	38
Banten	0,00%	100,00%	8
Bali	14,29%	85,71%	9
NTB	0,00%	100,00%	10
NTT	0,00%	100,00%	22
Kalimantan Barat	0,00%	100,00%	14
Kalimantan Tengah	0,00%	100,00%	14
Kalimantan Selatan	30,00%	70,00%	13
Kalimantan Timur	0,00%	100,00%	10
Kalimantan Utara	3,45%	96,55%	5
Sulawesi Utara	0,00%	100,00%	15
Sulawesi Tengah	0,00%	100,00%	13
Sulawesi Selatan	0,00%	100,00%	24

Provinsi	Unmet Need		Jumlah Kab/Kota
	<= 8% Sudah mencapai	□ 8% Belum mencapai	
Sulawesi Tenggara	0,00%	100,00%	17
Gorontalo	0,00%	100,00%	6
Sulawesi Barat	0,00%	100,00%	6
Maluku	0,00%	100,00%	11
Maluku Utara	0,00%	100,00%	10
Papua Barat	5,88%	94,12%	13
Papua	0,00%	100,00%	29
Indonesia	8,27%	91,73%	508

Sumber: Pemutakhiran Pendataan Keluarga Tahun 2022

Unmet need harus terus diturunkan di masa depan karena indikator ini berkaitan erat dengan kehamilan yang tidak diinginkan. Kehamilan yang tidak diinginkan dapat meningkatkan risiko aborsi, kehamilan berisiko, kematian bayi dan kematian ibu. Disaat Indonesia mengalami penurunan fertilitas, seyogyanya setiap kelahiran menjadi hal yang sangat berharga. Karena itu, setiap kehamilan harus direncanakan dengan baik sehingga bayi yang dilahirkan dapat menjadi bibit unggul yang siap menghadapi tantangan masa depan untuk menyambut Indonesia emas 2045.

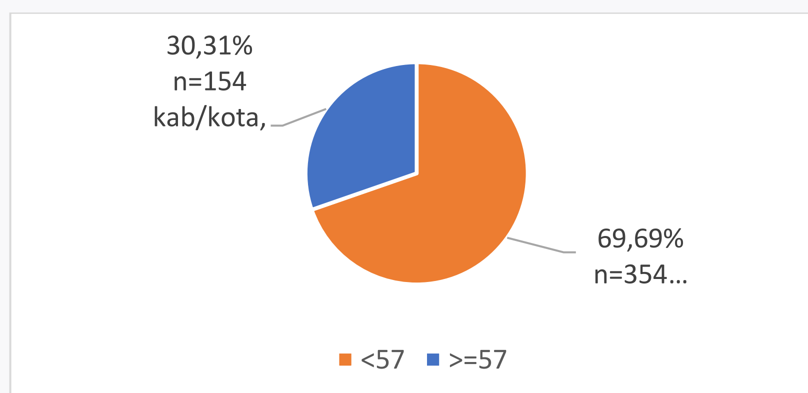
3.7. Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)

Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan dalam membangun kualitas keluarga. iBangga menggambarkan peran dan fungsi keluarga untuk semua wilayah di Indonesia, serta untuk mengklasifikasikan suatu wilayah dengan status pembangunan keluarga tangguh, berkembang, atau rentan. Dengan demikian iBangga dapat menentukan peringkat atau level pembangunan keluarga suatu wilayah dan menjadi dasar bagi pemangku kepentingan dan pengambil kebijakan dalam merumuskan kebijakan/program/kegiatan di wilayahnya. Peningkatan kualitas keluarga dapat menumbuhkan rasa aman, tenteram, dan harapan masa depan yang lebih baik dalam mewujudkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin.

Pada 2022, nilai iBangga tertinggi ada di Kota Banda Aceh Provinsi Aceh yaitu 60,97. Sementara nilai iBangga terendah ada di Kabupaten Deiyai Provinsi Papua yaitu 13,15. Tingginya disparitas ini perlu menjadi perhatian lebih bagi pemerintah dan pemangku kepentingan dalam merumuskan kebijakan/program dan kegiatan untuk mewujudkan keluarga berkualitas. Berdasarkan Renstra BKKBN tahun 2020-2024, diketahui bahwa target iBangga tahun 2022 adalah

57. Gambar 3.7.1 menjelaskan bahwa terdapat 154 kabupaten/kota (30,3%) yang sudah melampaui target iBangga sedangkan 354 kabupaten/kota sisanya (69,69%) masih belum mencapai target nasional. Capaian ini mengindikasikan bahwa peran, fungsi, dan kualitas keluarga yang ditunjukkan melalui dimensi ketenteraman, kemandirian, dan kebahagiaan keluarga masih belum maksimal. Untuk itu, dibutuhkan kolaborasi berbagai sektor pembangunan terkait. Berbagai upaya dapat dilakukan dengan cara pemberdayaan masyarakat dalam peningkatan kualitas gizi, sanitasi, lingkungan, pendidikan, dan sebagainya. Hal ini bertujuan meningkatkan pembangunan keluarga secara menyeluruh sebagai upaya mewujudkan keluarga yang berkualitas.

Gambar 3.7.1
Persentase Kabupaten/Kota yang Telah dan Belum Mencapai Target Renstra BKKBN Tahun 2022 (iBangga >=57)



Sumber: Pemutakhiran Pendataan Keluarga Tahun 2022

Tabel dibawah ini menunjukkan bahwa terdapat 7 provinsi dengan seluruh kabupaten/kotanya yang tidak mencapai target iBangga pada tahun 2022, yaitu Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Sulawesi Barat, dan Papua Barat. Selain itu, capaian iBangga yang melebihi target dengan persentase distribusi kabupaten/kota tertinggi terdapat pada Provinsi Jawa Tengah (94,3%) dan D.I. Yogyakarta (80,0%). Perbedaan capaian antar indikator pembangunan keluarga di setiap wilayah menggambarkan bahwa adanya ketimpangan level pembangunan keluarga di Indonesia. Hal ini disebabkan oleh masih rendahnya pemahaman masyarakat tentang peran dan fungsi keluarga, serta masih rendahnya kinerja pemerintah dalam melakukan intervensi pemerataan program bagi masyarakat. Oleh karena itu, melalui data iBangga tahun 2022 ini dapat dijadikan pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan untuk membenahi seluruh program yang berkaitan dengan pembangunan keluarga, lebih meningkatkan komitmen dan sinergisitas antar kementerian/lembaga, serta perlu digencarkan sosialisasi iBangga hingga ke seluruh desa agar terwujud keluarga yang berkualitas.

Tabel 3.7.1
Distribusi Kabupaten/Kota yang Telah dan Belum Mencapai Target Renstra BKKBN Tahun 2022 (iBangga>=57) Menurut Provinsi

Provinsi	iBANGGA		Jumlah Kab/Kota
	<57 Belum mencapai	>=57 Sudah Mencapai	
Aceh	39,1%	60,9%	23
Sumatera Utara	97,0%	3,0%	33
Sumatera Barat	68,4%	31,6%	19
Riau	42,9%	57,1%	12
Jambi	72,7%	27,3%	11
Sumatera Selatan	64,7%	35,3%	17
Bengkulu	60,0%	40,0%	10
Lampung	86,7%	13,3%	15
Kepulauan Bangka Belitung	57,1%	42,9%	7
Kepulauan Riau	42,9%	57,1%	7
Jawa Barat	74,1%	25,9%	27
Jawa Tengah	5,7%	94,3%	35
DI Yogyakarta	20,0%	80,0%	5
Jawa Timur	34,2%	65,8%	38
Banten	62,5%	37,5%	8
Bali	55,6%	44,4%	9
Nusa Tenggara Barat	60,0%	40,0%	10
Nusa Tenggara Timur	100,0%	0,0%	22
Kalimantan Barat	100,0%	0,0%	14
Kalimantan Tengah	100,0%	0,0%	14
Kalimantan Selatan	76,9%	23,1%	13
Kalimantan Timur	70,0%	30,0%	10
Kalimantan Utara	80,0%	20,0%	5
Sulawesi Utara	53,3%	46,7%	15
Sulawesi Tengah	84,6%	15,4%	13
Sulawesi Selatan	87,5%	12,5%	24
Sulawesi Tenggara	100,0%	0,0%	17
Gorontalo	100,0%	0,0%	6
Sulawesi Barat	100,0%	0,0%	6
Maluku	63,3%	36,4%	11
Maluku Utara	70,0%	30,0%	10
Papua Barat	100,0%	0,0%	13
Papua	96,6%	3,4%	28
Indonesia	**69,69%**	**30.31%**	**508**

Sumber: Diolah, Pemutakhiran Pendataan Keluarga Tahun 2022

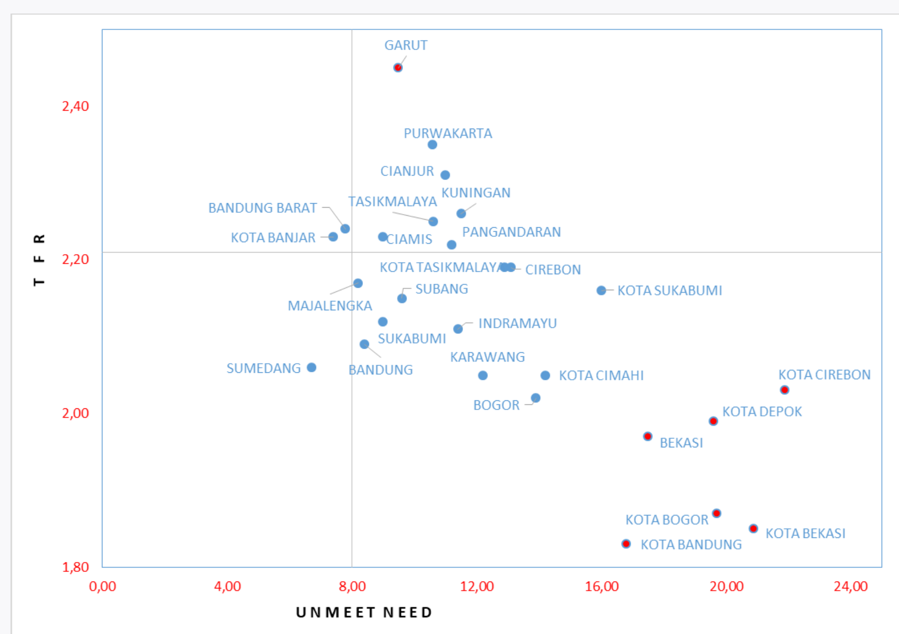
BAB IV
ANALISIS KETERKAITAN ANTAR INDIKATOR DAN PEMETAANNYA

4.1. Keterkaitan antara *Unmet Need* dan TFR

Unmet Need atau yang disebut kebutuhan pelayanan KB yang tidak terpenuhi menurut BKKBN didefinisikan sebagai persentase wanita kawin yang tidak ingin punya anak lagi atau ingin menjarangkan kelahiran berikutnya, tetapi tidak memakai alat/cara kontrasepsI. Perempuan yang tidak terpenuhi kebutuhan ber-Kbnya berpeluang untuk mengalami kehamilan yang tidak diinginkan atau kelahiran yang tidak diinginkan. Jika angka *unmet need* meningkat dengan sangat tinggi, maka hal tersebut dapat mendorong angka fertilitas meningkat yang menunjukkan Program Keluarga Berencana tidak berjalan dengan baik sehingga dapat mengakibatkan ledakan penduduk (Anggraeni dan Susilaningrum, 2017 dan Ratnaningsih, 2018). Uraian diatas mengindikasikan adanya hubungan yang positif antara *unmet need* dan fertilitas (TFR). Jika *unmet need* meningkat maka secara teori seharusnya TFR juga meningkat dan sebaliknya. Oleh karena itu, untuk melihat pola antara *unmet need* dan TFR, penggunaan kuadran dapat digunakan sebagai alat bantu dalam memberikan gambaran umum tentang keterkaitan dan dari kedua indikator tersebut.

Gambar-gambar berikut memperlihatkan kuadran antara *unmet need* dan TFR. Data *unmet need* didapat dari perhitungan Pemutakhiran Pendataan Keluarga Tahun 2022 dan TFR dari perhitungan Long Form SP 2020 untuk tingkat kabupaten/kota untuk beberapa provinsi yakni Jawa Barat dan Jawa Timur.

Gambar 4.1.1
Kuadran Unmet Need dan TFR di Provinsi Jawa Barat Tahun 2022

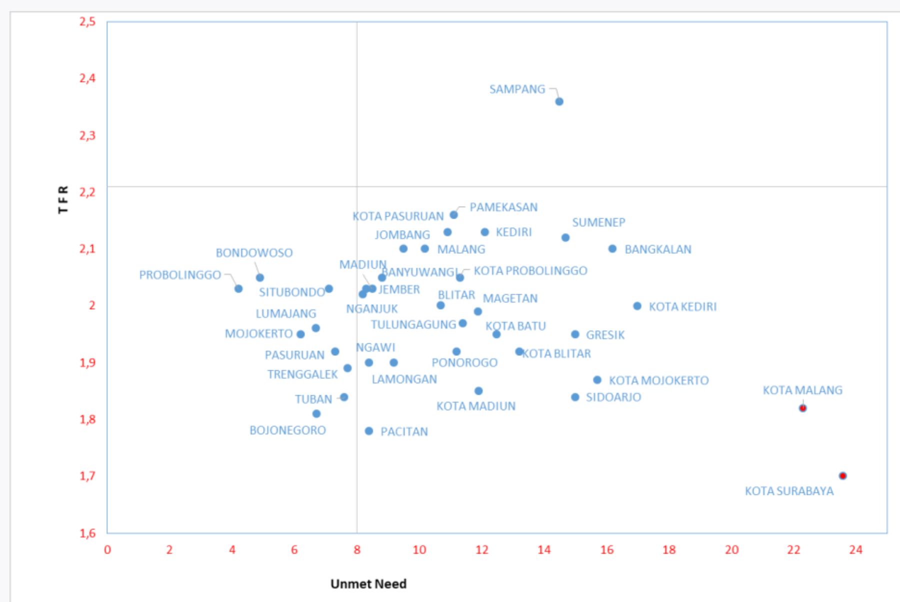


Sumber: Diolah, Pemutakhiran Pendataan Keluarga Tahun 2022 dan LF SP 2020

Hubungan antara TFR dan *unmet need* pada Provinsi Jawa Barat terlihat pada kuadran diatas. Kabupaten yang memiliki pola yang ideal yaitu Kabupaten Sumedang, karena memiliki TFR dan *unmet need* yang rendah tentunya kondisi ini harus dipertahankan. Sementara itu, ada kabupaten/kota yang masih memiliki TFR dan *unmet need* yang tinggi yaitu Garut, Purwakarta, Cianjur, Kuningan Pangandaran, Ciamis dan Tasikmalaya. Pada kabupaten-kabupaten tersebut harus segera menurunan baik *unmet need* dan TFR nya.

Kuadran diatas juga menunjukkan adanya fenomena yang tidak biasa karena tidak sesuai dengan teori yang ada antara TFR dan *unmet need.* Pada Kabupaten Bandung Barat dan Kota Banjar terdapat angka TFR yang tinggi namun masih memiliki *unmet need* yang rendah, ini menunjukkan bahwa rendahnya angka *unmet need* rendah tidak berpengaruh dalam menurunkan TFR. Hal tersebut ini dapat disebabkan karena adanya sasaran program KB yang tidak tepat yaitu menyasar PUS yang telah memiliki anak yang banyak atau bisa juga hal tersebut mengindikasikan bahwa banyak PUS yang masih menginginkan anak dimasa mendatang sehingga tidak membutuhkan KB. Sementara itu, fenomena sebaliknya juga terjadi dimana TFR sudah rendah namun justru *unmet need* yang tinggi. Untuk Provinsi Jawa Barat mayoritas kabupaten/kota terdapat pada kuadran ini yaitu ada 17 kabupaten/kota. Bahkan untuk kota-kota seperti Kota Bandung, Kota Bekasi, Kota Bogor, Kota Bekasi dan Kota Depok memiliki TFR 2,0 atau lebih rendah, namun justru memiliki *unmet need* yang tinggi diantara kabupaten yang lain di Jawa Barat. Fenomena ini perlu dijelaskan dengan penelitian yang lebih mendalam untuk dapat memahami penyebab terjadinya kondisi tersebut.

Gambar 4.1.2
Kuadran Unmet Need dan TFR di Provinsi Jawa Timur



Sumber: Diolah, Pemutakhiran Pendataan Keluarga Tahun 2022 dan LF SP 2020

Untuk Provinsi Jawa Timur, kuadran antara TFR dan *unmet need* dijabarkan pada kuadran diatas. Terlihat bahwa hanya Kabupaten Sampang yang memiliki angka TFR yang masih diatas 2,21 dan memilki *unmet need* yang tinggi sekitar 15. Ini menunjukkan bahwa Kabupaten Sampang masih harus menurunkan *unmet need* serta TFR nya. Sebanyak 9 kabupaten/kota termasuk pada kuadan yang ideal dimana angka TFR dan *unmet need*-nya sudah rendah. Kabupaten-kabupaten tersebut yaitu Bojonegoro, Tuban, Trenggalek, Pasuruan, Mojokerto, Lumayang, Situbondo, Bondowoso dan Probolinggo.

Sementara itu, terdapat 28 kabupaten/kota masuk pada kuadran yang tidak sesuai dengan teori dimana angka TFR rendah namun memiliki angka *unmet need* yang tinggi. Sama seperti pada Provinsi Jawa Barat, pada Provinsi Jawa Timur juga terjadi fenomena dimana kota-kota memiliki *unmet need* yang tinggi walaupun TFR pada wilayah-wilayah tersebut sangat rendah. Hal ini tentu tidak sesuai dengan banyak teori yang mengatakan bahwa *unmet need* yang tinggi dapat mendorong TFR menjadi tinggi dan sebaliknya. Kedua kuadran diatas memberikan contoh analisis hubungan antara TFR dan *unmet need* yang dapat direplikasi pada provinsi lain sehingga mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam untuk kedua indikator tersebut.

Fenomena beberapa kota yang memiliki TFR sudah sangat rendah (dibawah 2,1) namun justru memiliki *unmet need* yang lebih tinggi ini mengundang banyak pertanyaan. Hal ini dianggap 'aneh' karena seharusnya PUS di kota secara umum memiliki tingkat pengetahuan yang lebih tinggi, tingkat ekonomi yang lebih baik, akses terhadap alat/obat/metode kontrasepsi modern yang lebih mudah, namun pada wilayah tersebut justru terdapat angka *unmet need* yang tinggi.

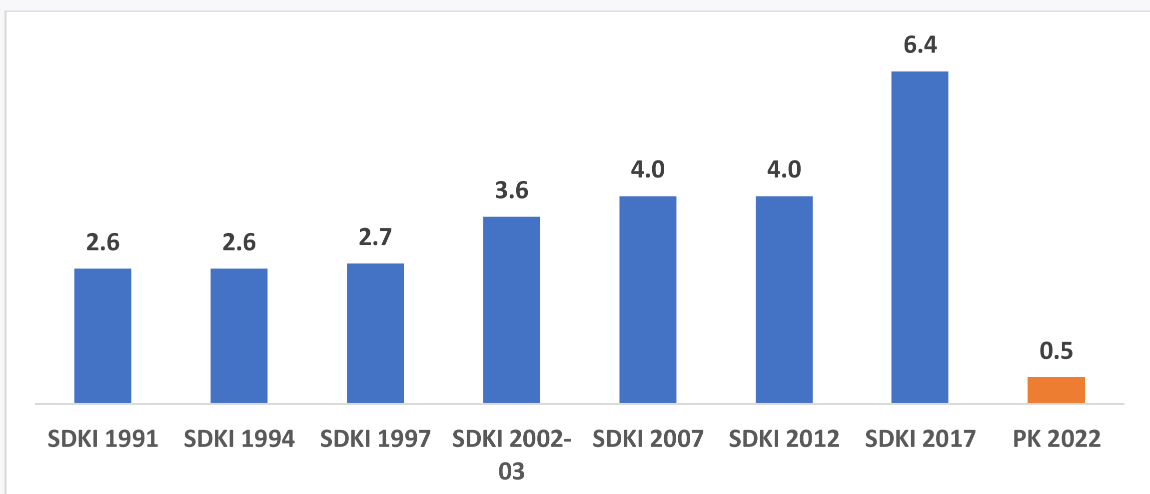
Fenomena yang tidak biasa ini menjadi menarik untuk dipelajari lebih lanjut, agar dapat ditemukan akar permasalahan dari fenomena ini. Pemahaman mendalam dari fenomena ini dapat membantu pemangku kebijakan untuk menyikapi dan menentukan arah kebijakan program KB yang lebih baik di masa mendatang. Beberapa penjelasan yang mungkin dapat menjadi penyebab fenomena di atas antara lain bahwa PUS di kota lebih banyak menggunakan metode kontrasepsi tradisional seperti senggama terputus ataupun sistem kalender untuk menjarangkan atau membatasi kehamilan, namun pada saat pencatatan/pendataan pada survey tidak tercatat sebagai pengguna kontrasepsi sehingga justru tercatat sebagai *unmet need* karena dianggap tidak menggunakan alat kontrasepsi. Hal tersebut menyebabkan *unmet need* di kota-kota tersebut menjadi tinggi.

Lingkungan kota diduga meningkatkan penggunaan kontrasepsi tradisional. Tingkat pendidikan dan ekonomi yang lebih tinggi membuat PUS semakin sensitif terhadap efek samping dari alat/obat kontrasepsi ditambah dengan pengetahuan yang lebih baik tentang siklus kesuburan bulanan perempuan menyebabkan mereka lebih nyaman dalam memilih kontrasepsi tradisional (senggama terputus dan kalender) yang ternyata juga cukup efektif dalam mencegah kehamilan.

Fenomena lainnya yang mungkin dapat menyebabkan tingginya *unmet need* di kota-kota tersebut adalah adanya PUS yang menjalani kehidupan terpisah atau *Long Distance Marriage* (LDM) sehingga PUS tidak menggunakan satu pun alat kontrasepsi meskipun tidak ingin anak lagi/ingin menjarangkan kelahiran karena pasangannya berjauhan. Hal ini mengingat bahwa arus migrasi di daerah kota cukup dinamis. Namun tentunya untuk memperjelas hal ini diperlukan penelitian lebih lanjut terkait fenomena ini pada PUS di kota-kota besar Indonesia.

Penggunaan alat kontrasepsi tradisional dari tahun ke tahun memang mengalami banyak peningkatan. Berdasarkan angka SDKI 1991 – SDKI 2017 penggunaan kontrasepsi modern terus meningkat dari 2,6 persen menjadi 6,4 persen. Akan tetapi, dari hasil Pemutakhiran Pendataan Keluarga 2022, kontrasepsi tradisional menjadi sangat kecil hanya 0,5 persen (Gambar 4.1.3). Ini menunjukkan adanya dugaan pencatatan kontrasepsi tradisional pada Pemutakhiran Pendataan Keluarga Tahun 2022 yang kurang optimal.

Gambar 4.1.3
Penggunaan kontrasepsi tradisional SDKI 1991 – SDKI 2017

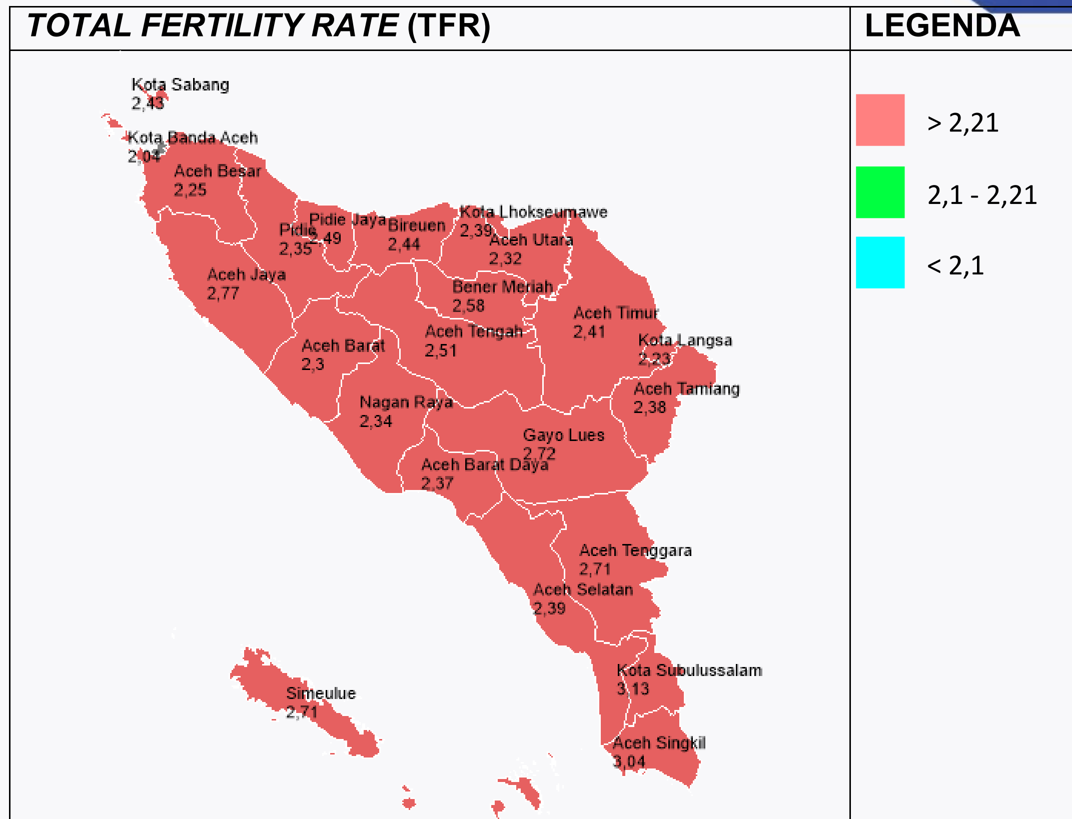


Sumber: diolah, Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI)1991-2017 dan Pemutakhiran Pendataan Keluarga Tahun 2022

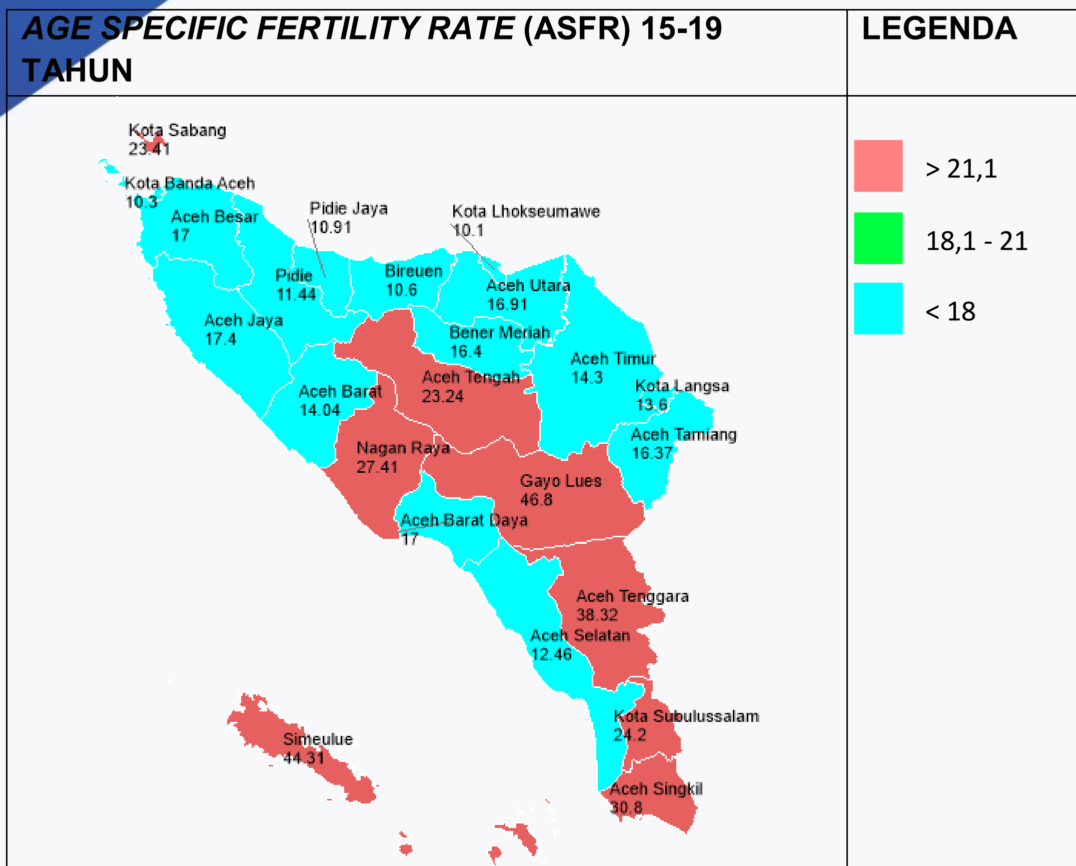
Penjabaran diatas menunjukkan bahwa di masa mendatang perlu adanya penelitian yang lebih menyeluruh mengenai fenomena ini. Selain itu, perlu adanya perbaikan dalam mencatatkan kontrasepsi tradisional dengan lebih seksama. Untuk mereka yang menjawab tidak menggunakan kontrasepsi saat ini perlu kembali dikonfirmasi kembali apakah mereka saat berhubungan seksual menggunakan metode kontrasepsi tradisional atau tidak untuk menghindari *undercount* dari metode kontrasepsi ini. Fenomena LDR pada PUS juga perlu untuk didefinisikan ulang apakah mereka masuk pada kategori *unmet need* karena pada kenyataannya mereka memang tidak ber-KB, mungkin tidak ingin hamil namun tidak menggunakan kontrasepsi karena memang mereka tidak melakukan hubungan seksual dalam jangka waktu yang panjang.

4.2. Analisis Peta Parameter Program Bangga Kencana di Kabupaten/Kota Berdasarkan Provinsi

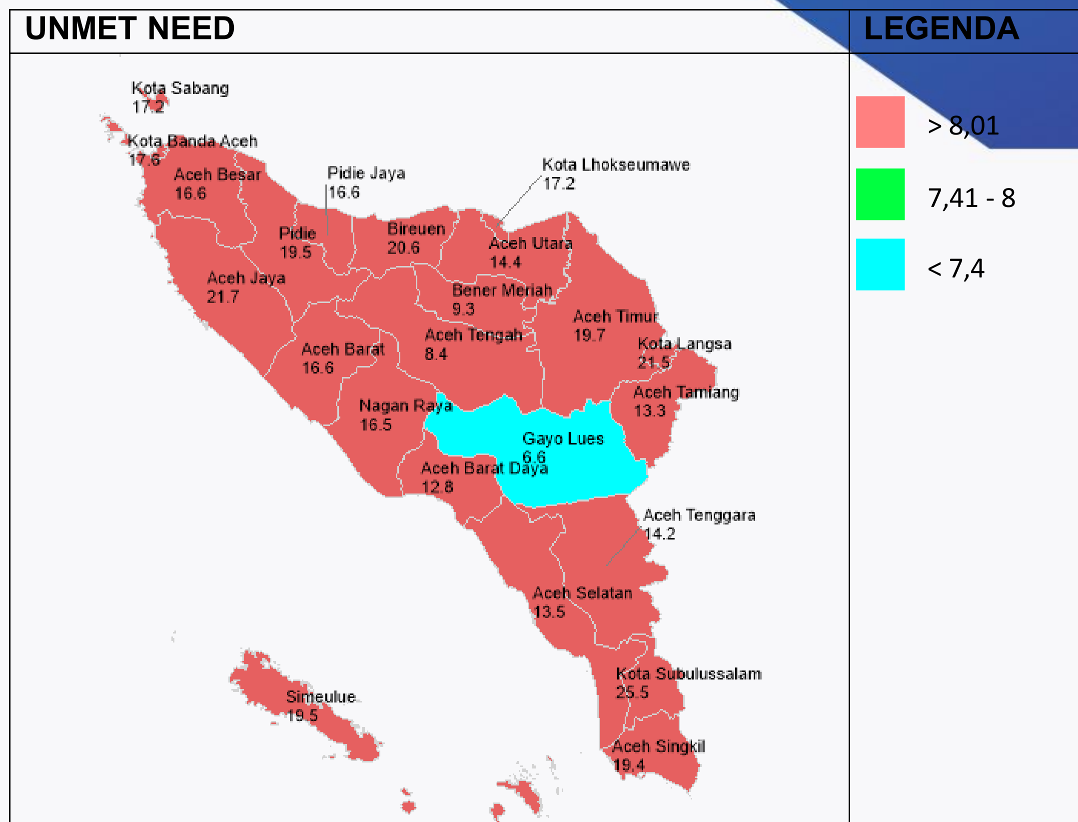
4.2.1. Peta Parameter Provinsi Aceh



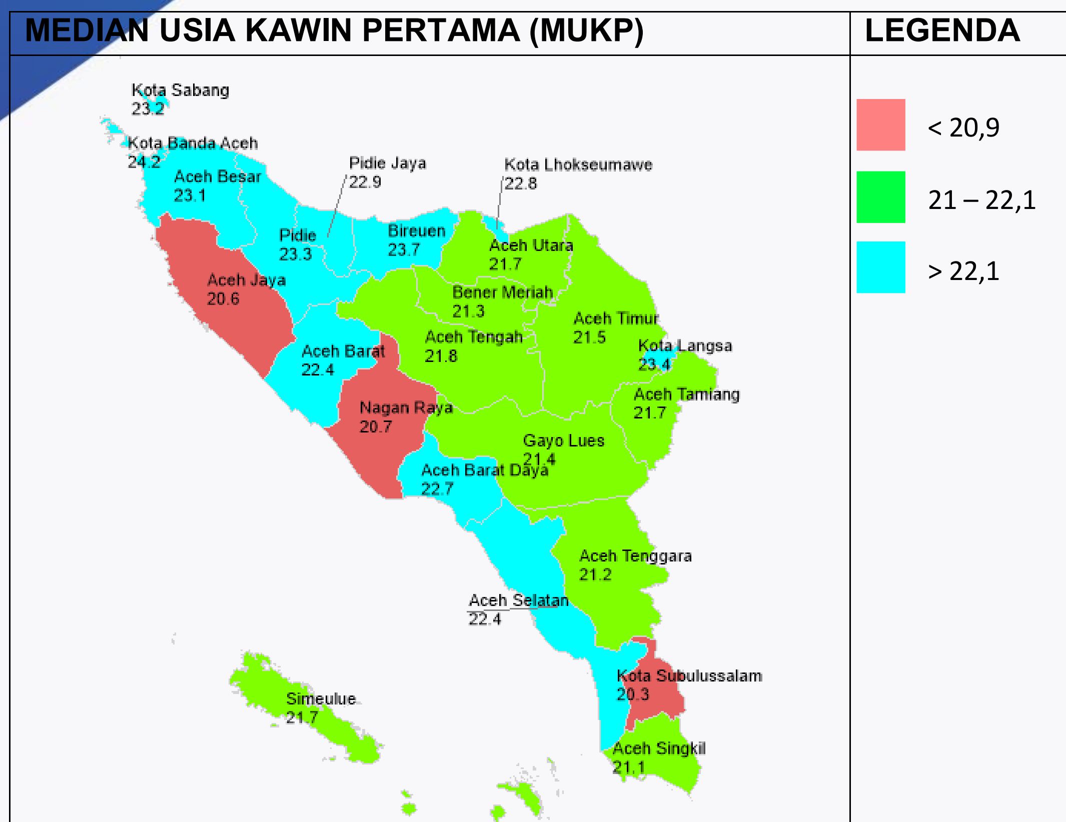
Berdasarkan Peta di atas dapat dilihat bahwa angka kelahiran total di Aceh masih sangat memiliki tantangan karena hamper seluruh kabupaten/kota di Aceh memiliki angka yang tinggi yaitu diatas 2,21 kecuali Kota Banda Aceh yang memiliki angka *Total Fertility Rate* (TFR 2,04). Hal ini perlu menjadi perhatian bagi para pengambil kebijakan di kabupaten/kota di Aceh untuk melakukan upaya dan langkah-langkah untuk menurunkan angka TFR di wilayahnya masing-masing



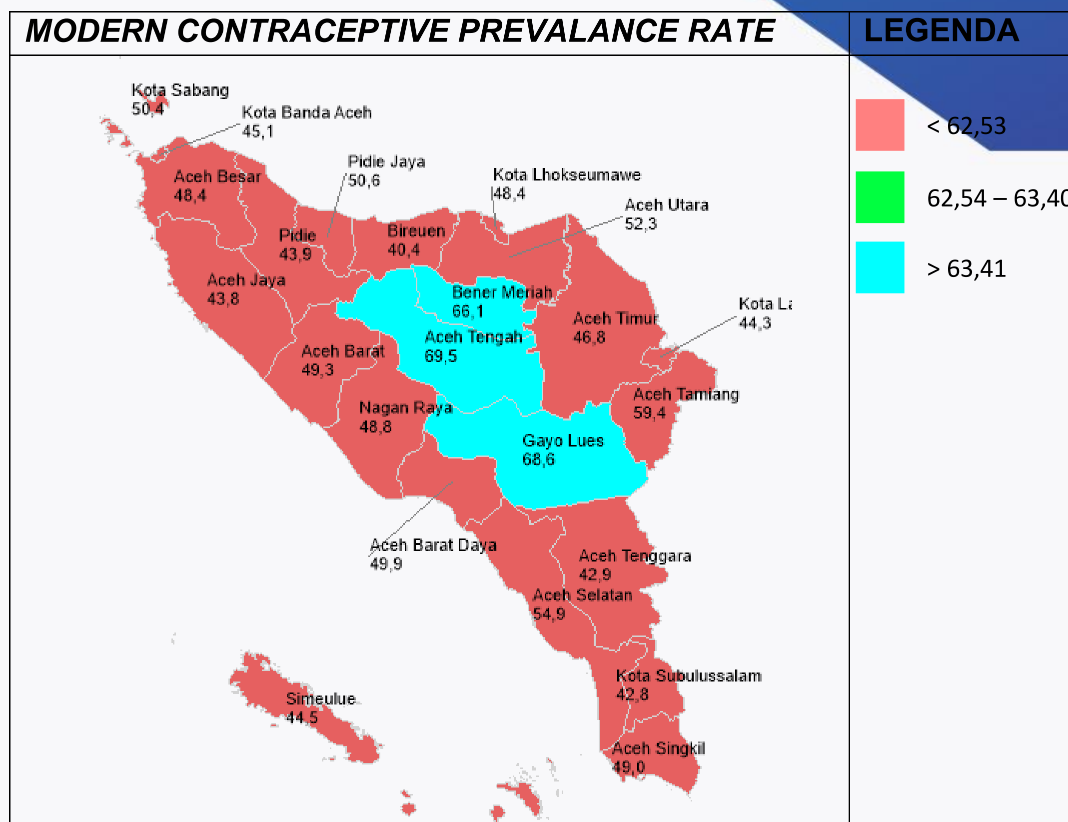
Berdasarkan peta di atas terlihat bahwa indikator ASFR (15-19 tahun) di Provinsi Aceh cukup baik karena sebagian besar kabupaten/kota di Aceh memiliki angka ASFR (15-19 tahun) yaitu di bawah 18 kelahiran, namun masih ada beberapa kabupaten/kota dengan angka ASFR (15-19 tahun) di atas 21,1 kelahiran yaitu Kabupaten Nagan Raya dengan angka ASFR (15-19 tahun) sebesar 27,41 , Kabupaten Aceh Tengah dengan angka ASFR (15-19 tahun) sebesar 23,24, Kabupaten Gayo Lues dengan angka ASFR (15-19 tahun) sebesar 46,8, Kabupaten Aceh tenggara dengan angka ASFR (15-19 tahun) sebesar 38,32, Kota Subulussalam dengan angka ASFR (15-19 tahun) sebesar 24,2, Aceh Singkil dengan angka ASFR (15-19 tahun) sebesar 30,8, Kabupaten Simeulue dengan angka ASFR (15-19 tahun) sebesar 44,31 dan Kota Sabang dengan angka ASFR (15-19 tahun) sebesar 23,1



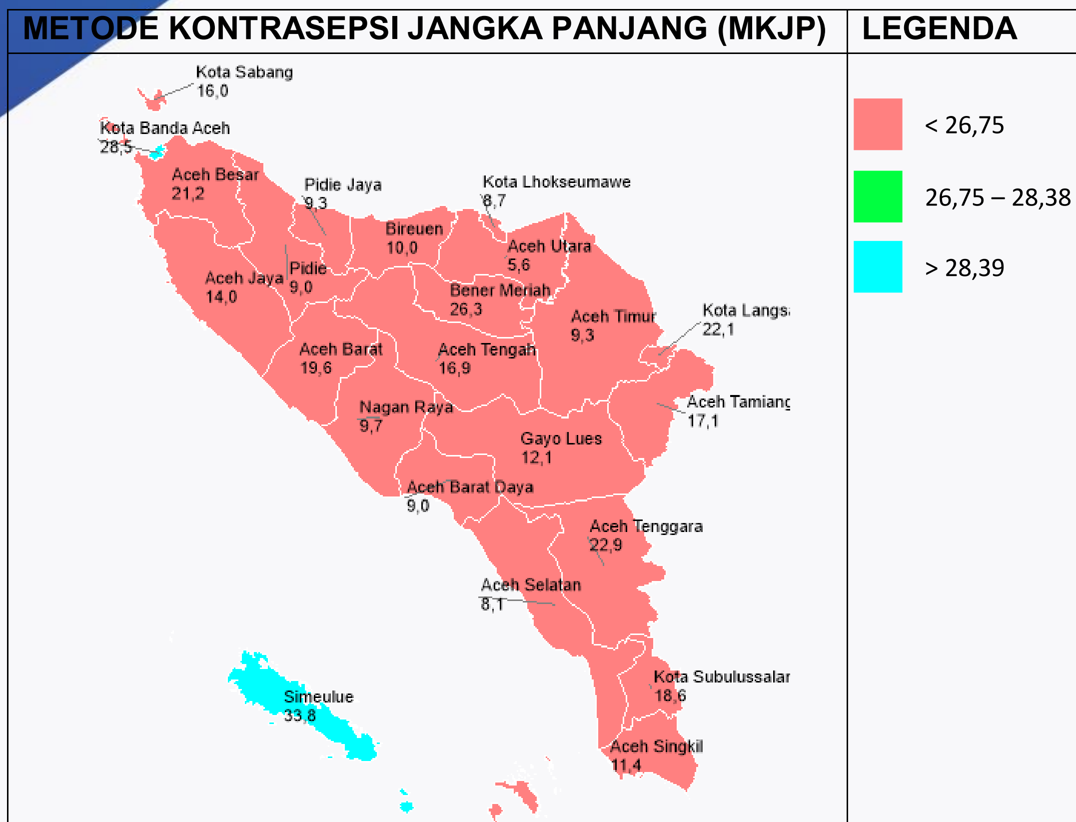
Berdasarkan peta di atas terlihat bahwa untuk indikator *unmet need* di Provinsi Aceh perlu perhatian yang besar karena hampir seluruh kabupaten/kota di Aceh memiliki angka *unmet need* yang sangat tinggi yaitu di atas 8,01 persen. Hanya ada 1 kabupaten yang angka *unmet need*-nya sudah rendah yaitu kabupaten Gayo Lues dengan angka unmet need sebesar 6,6 bahkan angka tersebut sudah mencapai target *unmet need* tahun 2024 yaitu di bawah 7,4.



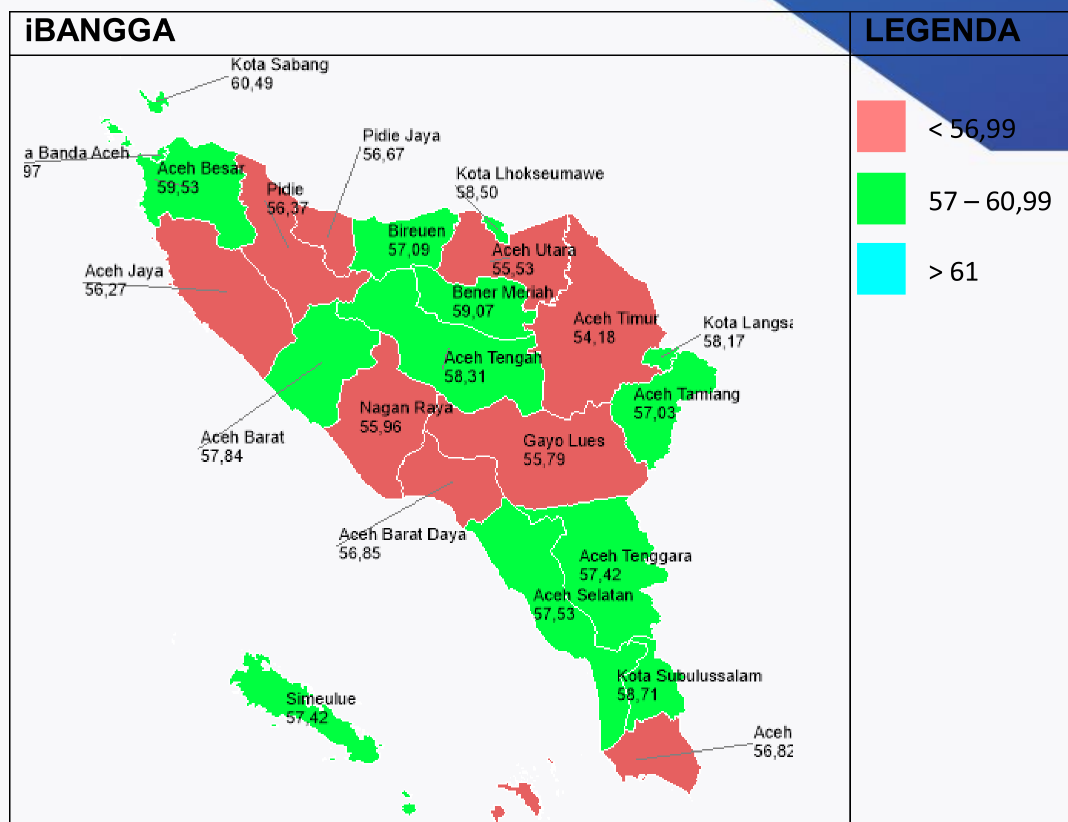
Berdasarkan peta di atas, terlihat bahwa angka Median Usia Kawin Pertama (MUKP) di Provinsi Aceh sudah cukup baik yaitu hampir semua kabupaten/kota mempunyai angka yang sudah mencapai target MUKP tahun 2022 yaitu 21 tahun ke atas bahkan ada 11 kabupaten/kota yang angka MUPK-nya telah mencapai target MUKP tahun 2024 yaitu di atas 22,1. Namun masih ada kabupaten/kota yang angka MUKP-nya masih di bawah 20,9 yaitu Kabupaten Aceh Jaya sebesar 20,6, Kabupaten Nagan Raya sebesar 20,7 dan Kota Subulussalaam sebesar 20,3. Sehingga khusus untuk 3 kabupaten/kota tersebut kampanye Upaya Pendewasaan Perkawinan perlu lebih ditingkatkan



Berdasarkan peta di atas terlihat bahwa untuk indikator mCPR di Provinsi Aceh terbagi dalam 2 kelompok wilayah yaitu wilayah tengah dan wilayah yang berbatasan dengan laut. Untuk wilayah tengah ada 3 kabupaten yang memiliki angka mCPR cukup tinggi bahkan sudah mencapai target mCPR tahun 2024 yaitu di atas 63,41 persen. Kabupaten tersebut yaitu Kabupaten Bener Meriah sebesar 66,1 persen, Kabupaten Aceh Tengah sebesar 69,5 persen dan Kabupaten Gayo Lues sebesar 68,9 persen. Hal ini perlu menjadi perhatian yang cukup besar karena hampir seluruh kabupaten/kota di Aceh memiliki angka *unmet need* yang sangat tinggi yaitu di atas 8,01 persen dan kondisi tersebut terjadi pada kabupaten/kota yang berada di wilayah yang berbatasan dengan pantai

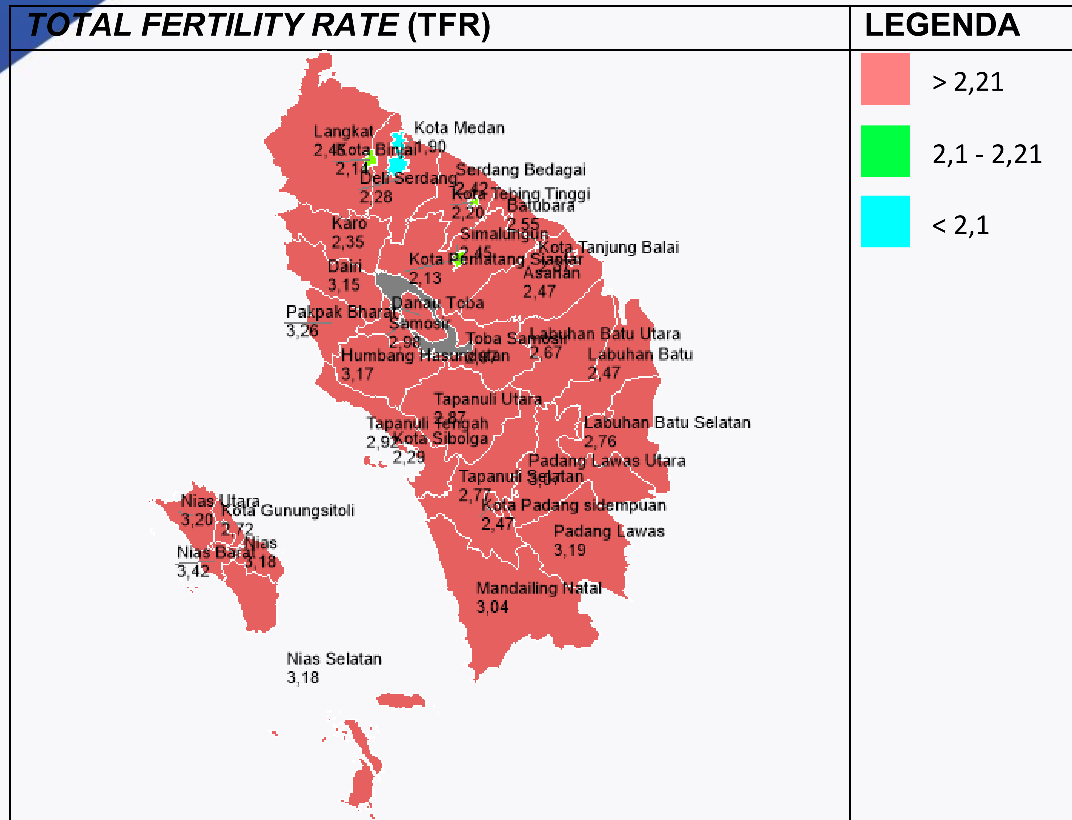


Berdasarkan peta di atas dapat dilihat bahwa angka MKJP di Provinsi Aceh memiliki pola yang hampir sama dengan pola TFR, yaitu hampir seluruh wilayah kabupaten/kota berwarna merah yang artinya memiliki angka MKJP yang rendah di bawah target MKJP tahun 2022 yaitu di bawah angka 26,75 persen, sehingga perlu ada peningkatan. Berdasarkan peta tersebut hanya ada 2 kabupaten/kota yang berwarna merah yaitu angka MKJP-nya cukup tinggi bahkan sudah mencapai target MKJP tahun 2024 yaitu Kota Banda Aceh dan Kabupaten Simeulue. Hal ini menunjukan bahwa kebijakan setiap kabupaten/kota dalam rangka penurunan angka TFR harus sejalan dengan peningkatan angka MKJP

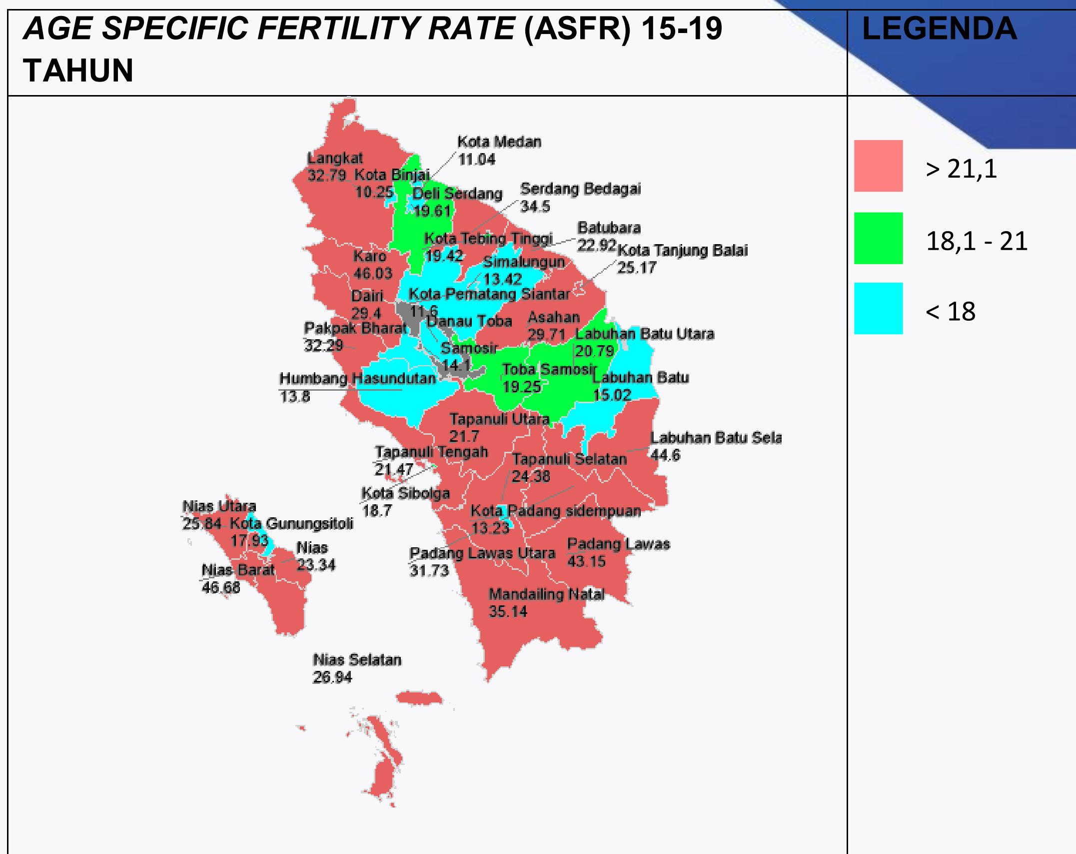


Berdasarkan peta di atas dapat dilihat bahwa secara umum angka indeks iBangga di Provinsi Aceh berada pada angka 57–60,99 yang terdiri dari wilayah ujung Provinsi Aceh yaitu Kota Sabang, Kota Banda Aceh dan Kabupaten Aceh Besar, kemudian di wilayah tengah yaitu Kabupaten Aceh Barat, Kabupaten Bireuen, Kabupaten Bener Meriah dan Kabupaten Aceh Tengah serta di wilayah Selatan yaitu Kabupaten Aceh Tenggara, Kabupaten Aceh Selatan, Kota Subulussalam dan Kabupaten Simeulue. Hal ini menunjukan bahwa sebagian besar kabupaten/kota di Aceh sudah mencapai target indikator iBangga tahun 2022 namun belum ada kabupaten/kota yang mencapai target indikator iBangga tahun 2024 yaitu di atas angka 61 dan masih ada wilayah kabupaten yang memiliki iBangga kurang dari 56,99 persen sehingga belum mencapai target indikator iBangga tahun 2022. Kabupaten tersebut yaitu Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Pidie, Kabupaten Pidie Jaya, Kabupaten Nagan Raya, Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Timur, Kabupaten Aceh Utara dan Kabupaten Aceh Singkil. Dengan kondisi tersebut menunjukan terjadi disparitas yang cukup tinggi pada indikator iBangga di Provinsi Aceh

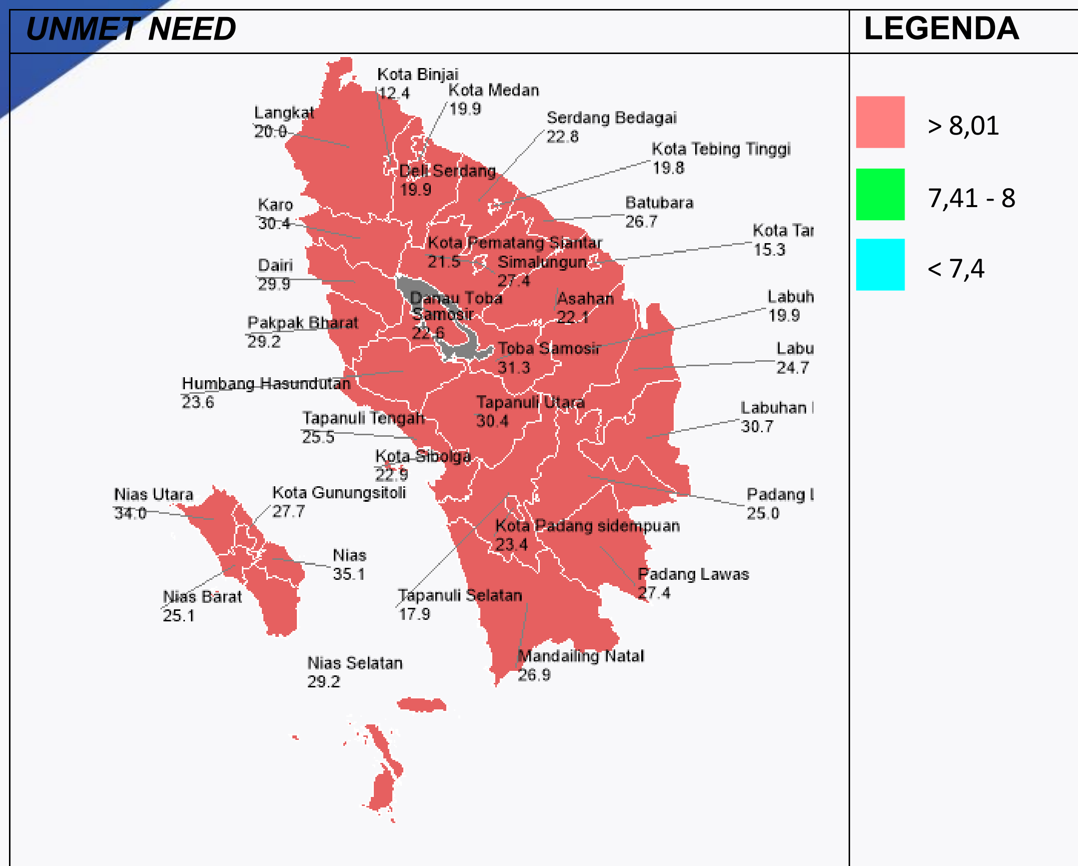
4.2.2. Peta Parameter Provinsi Sumatera Utara



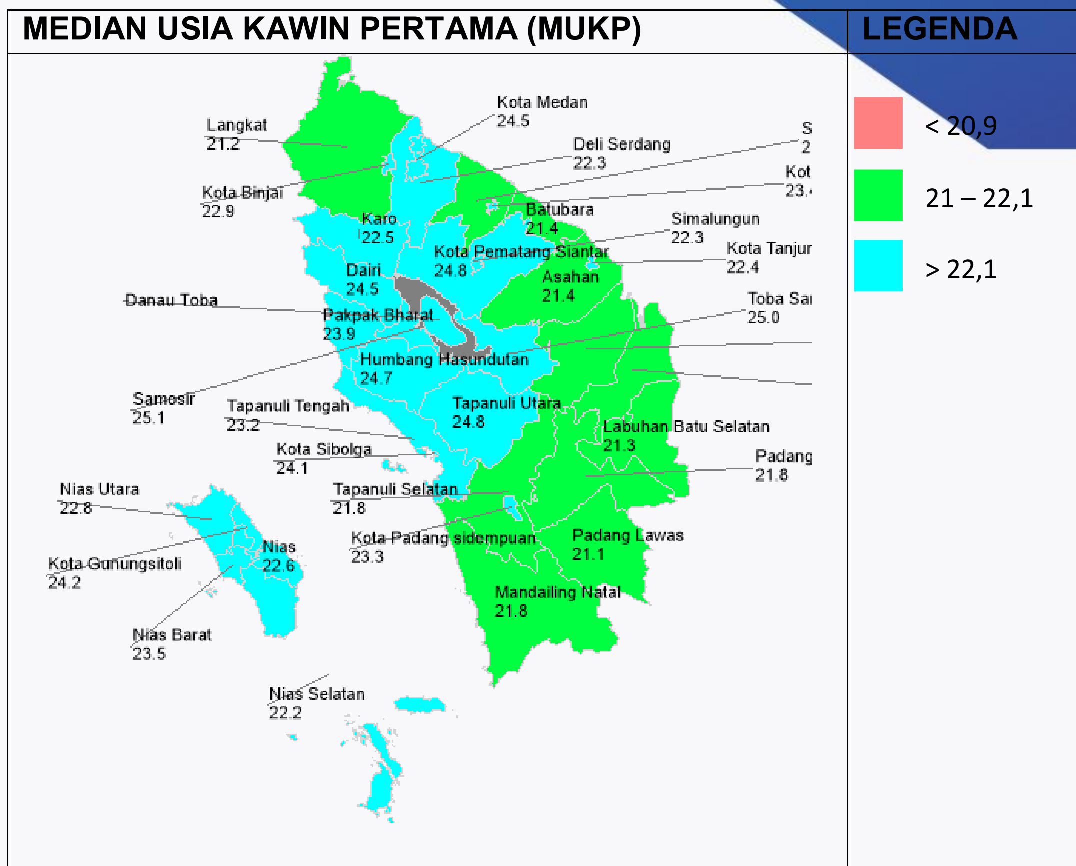
Berdasarkan peta diatas, perlu ada perhatian khusus dalam upaya penurunan TFR di Sumatera Utara. Hal tersebut terlihat dari hampir seluruh daerah di Sumatera Utara memiliki TFR yang masih tinggi yakni diatas 2,21 dimana tiga daerah dengan TFR tertinggi ada pada Nias Barat, Pak Pak Barat, dan Nias Utara. Sementara itu, daerah yang didapati sudah mencapai target TFR adalah daerah kota yakni Medan, Binjai, dan Pematang Siantar. Oleh sebab itu, perlu ada pemerataan intervensi program penurunan fertilitas di setiap daerah di Sumatera Utara, bukan hanya terfokus pada kota-kota.

***AGE SPECIFIC FERTILITY RATE* (ASFR) 15-19 TAHUN**	**LEGENDA**
	> 21,1 18,1 - 21 < 18

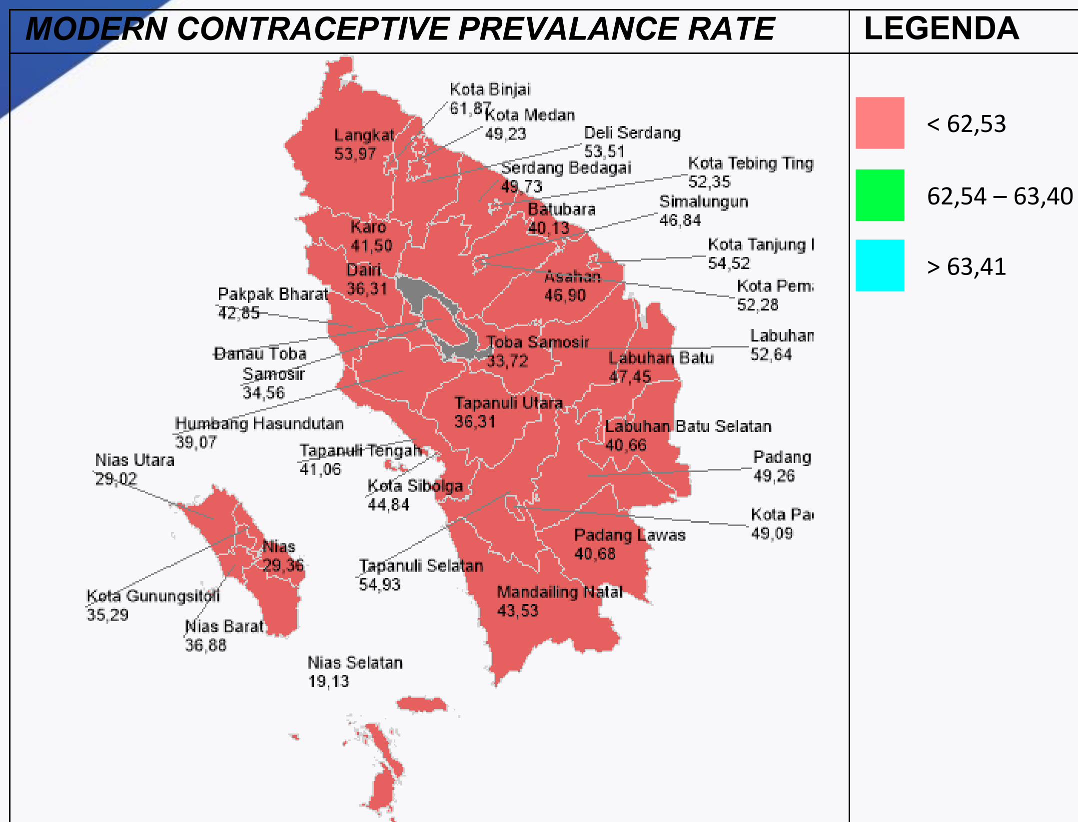
Berdasarkan peta diatas, terlihat terlihat bahwa terdapat beberapa kabupaten/kota di Sumatera Utara yang telah mencapai target ASFR 15-19 Tahun tahun 2022 yakni sebesar 21 tahun. Namun demikian, didapati juga bahwa sebagian banyak kabupaten/kota di Sumatera Utara memiliki ASFR 15-19 Tahun yang masih tinggi yaitu lebih dari 21,1. Hal tersebut perlu diintervensi yang tepat sasaran dan sesuai dengan latar situasi masing-masing daerah untuk dapat mencapai target ASFR 15-19 Tahun secara efisien.



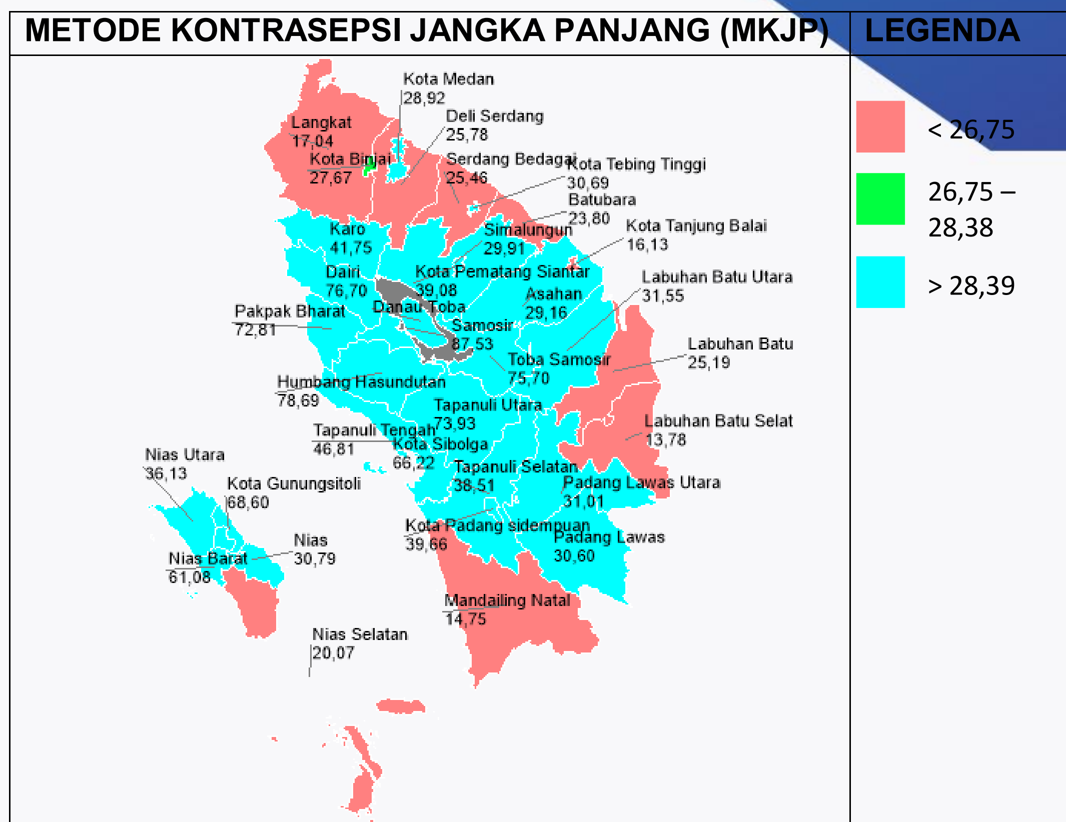
Berdasarkan peta diatas, terlihat terlihat bahwa seluruh kabupaten/kota di Sumatera Utara memiliki unmet need yang tinggi. Oleh karena itu, perlu dilakukan peningkatan pemahaman masyarakat Sumatera Utara terkait pentingnya menggunakan alat/metode kontrasepsi untuk mencegah kehamilan yang tidak/belum diinginkan dengan Komunikasi Informasi Edukasi (KIE) lewat wadah yang banyak digunakan oleh masyarakat.



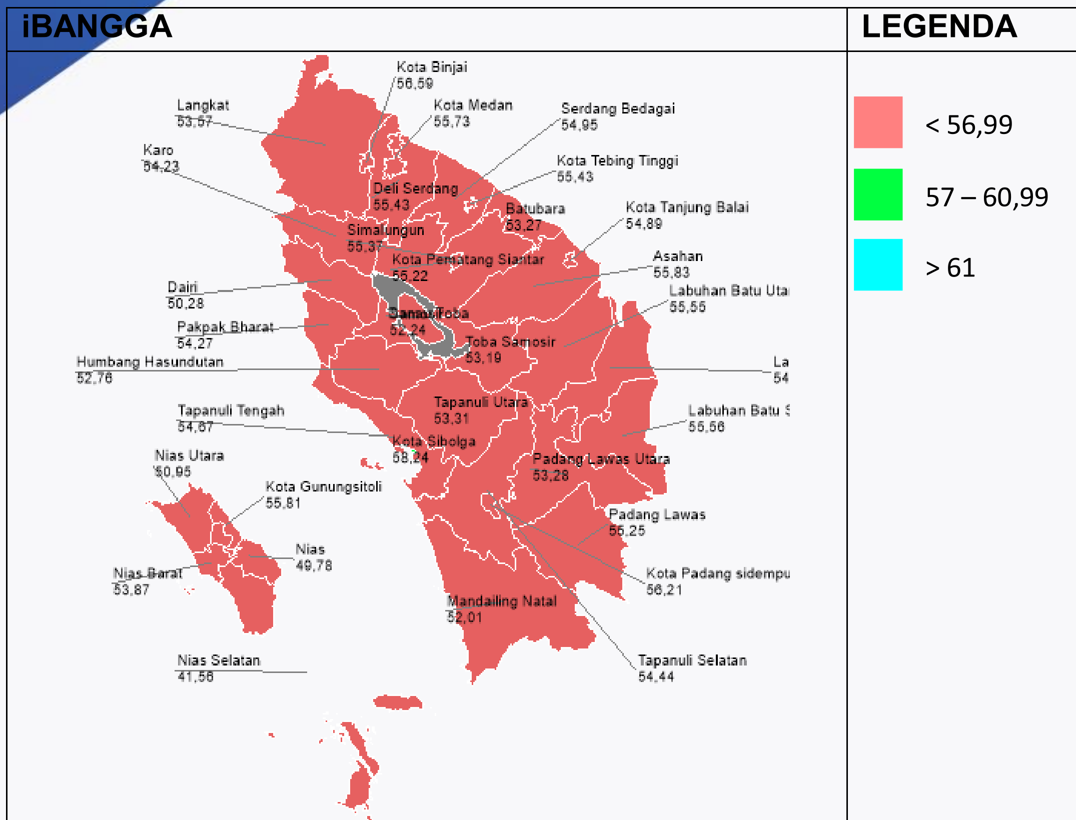
Berdasarkan peta diatas, terlihat bahwa seluruh kabupaten/kota di Sumatera Utara telah mencapai target MUKP yang ditetapkan pada tahun 2022, bahkan sebagian telah mencapai target tahun 2024. Hal tersebut sudah cukup baik, namun tetap perlu ada upaya edukasi masyarakat terkait pentingnya pendewasaan usia perkawinan pertama sehingga angka yang sudah tercapai dapat dipertahankan.



Dari peta diatas terlihat bahwa belum ada kabupaten/kota di Sumatera Utara yang berhasil mencapai target mCPR yang sudah ditetapkan. Hal ini tentu perlu mendapatkan perhatian khusus karena rendahnya parameter mCPR dapat menjadi batu sandungan bagi keberhasilan program Bangga Kencana di masa depan. Upaya KIE terkait manfaat menggunakan kontrasepsi modern perlu lebih digencarkan lagi, agar pasangan usia subur yang ingin menunda/tidak ingin anak lagi tidak mengalami kehamilan yang tidak diinginkan akibat penggunaan kontrasepsi kovensional yang kurang efektif bila dibandingkan dengan kontrasepsi modern.

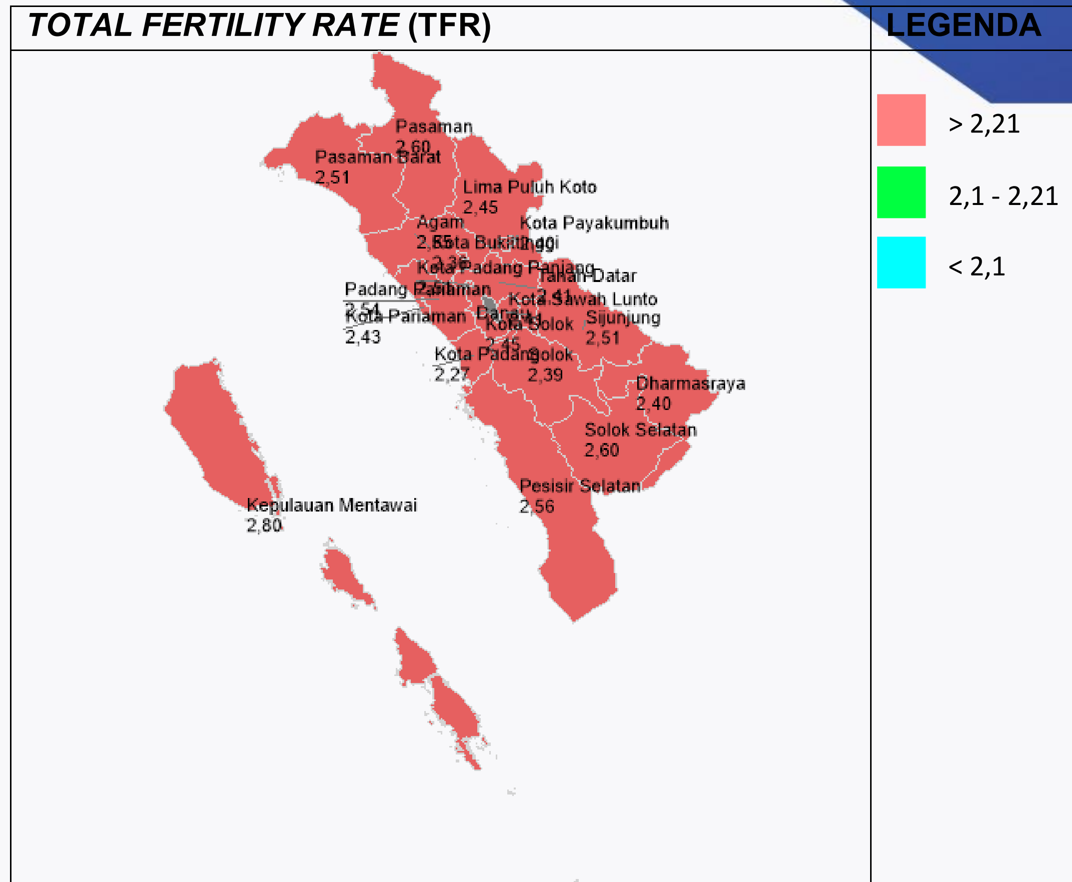


Berdasarkan peta diatas, terlihat bahwa ketercapaian MKJP di sebagian besar kabupaten/kota di Sumatera Utara sudah sangat baik yakni lebih dari 28,39%. Walah demikian, masih ada beberapa daerah yang capaian MKJP nya masih rendah, dimana letaknya kebanyakan di pinggir provinsi. Hal tersebut menandakan belum ratanya pelaksanaan program dan juga pelayanan kontrasepsi MKJP di Sumatera Utara. Oleh sebab itu dapat disimpulkan bahwa perlu ada pemerataan pelaksanaan program dan pelayanan di masa depan.



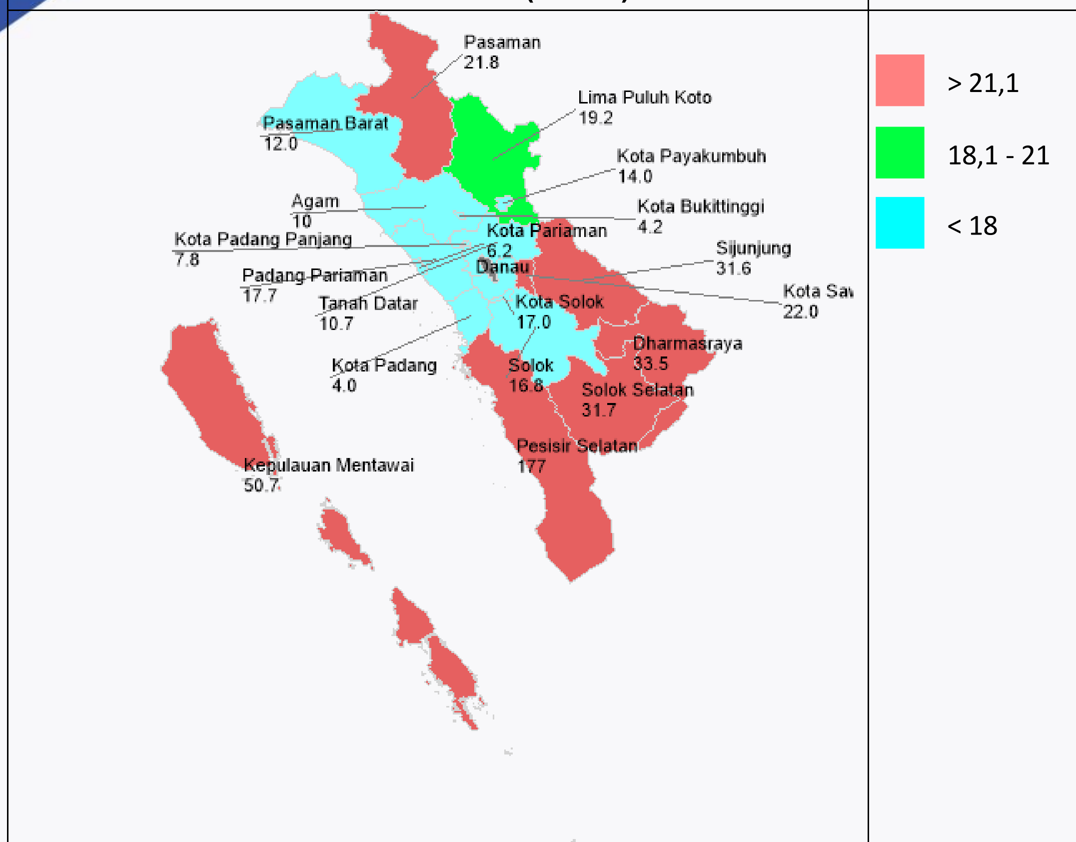
Dari peta diatas terlihat bahwa belum ada kabupaten/kota di Sumatera Utara yang berhasil mencapai target iBangga yang sudah ditetapkan yakni 56,99. Hal tersebut perlu diintervensi karena iBangga menggambarkan bagaimana kualitas kemandirian, ketenteraman, dan kebahagiaan keluarga, yang merupakan unit terkecil dalam masyarakat, di suatu daerah.

4.2.3. Peta Parameter Provinsi Sumatera Barat

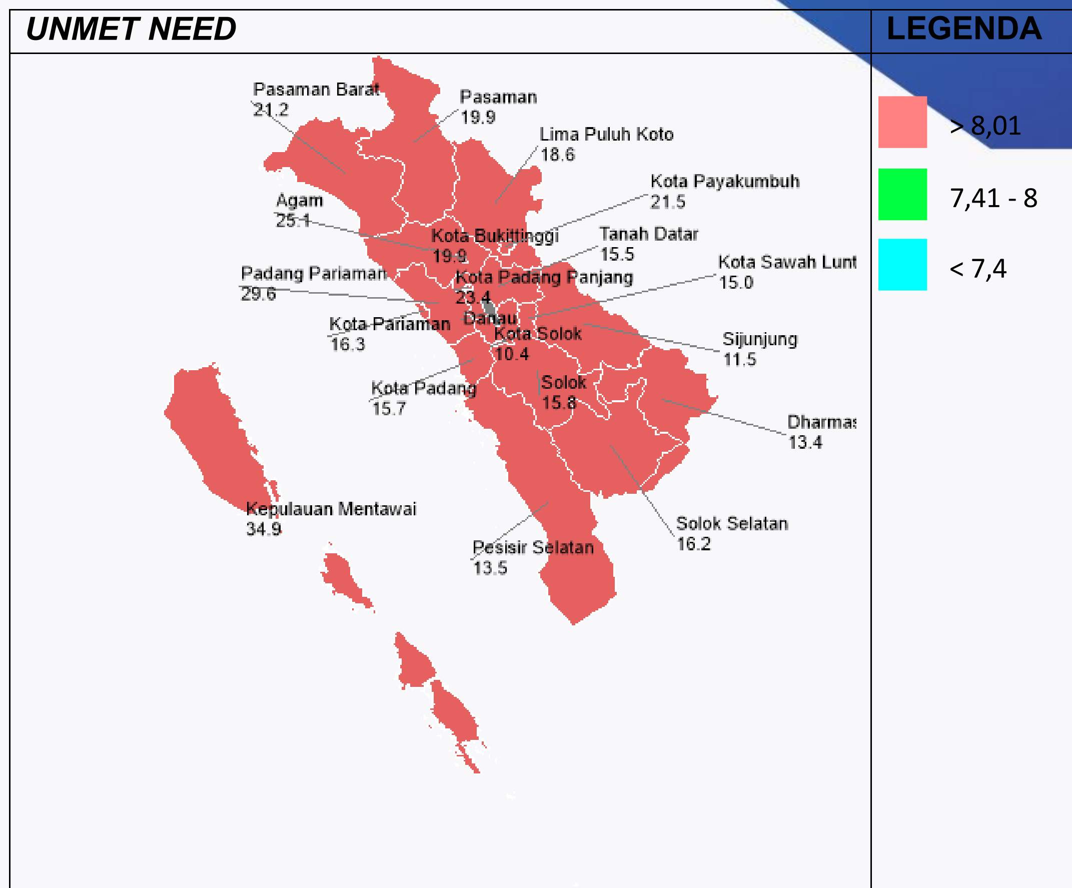


Berdasarkan Peta di atas dapat dilihat bahwa angka kelahiran total di Sumatera Barat masih cukup memiliki tantangan karena seluruh kabupaten/kota di Sumatera Barat memiliki angka yang tinggi yaitu di atas 2,21. Hal ini perlu menjadi perhatian bagi para pengambil kebijakan di kabupaten/kota di Sumatera Barat untuk melakukan upaya dan langkah-langkah untuk menurunkan angka TFR di wilayahnya masing-masing.

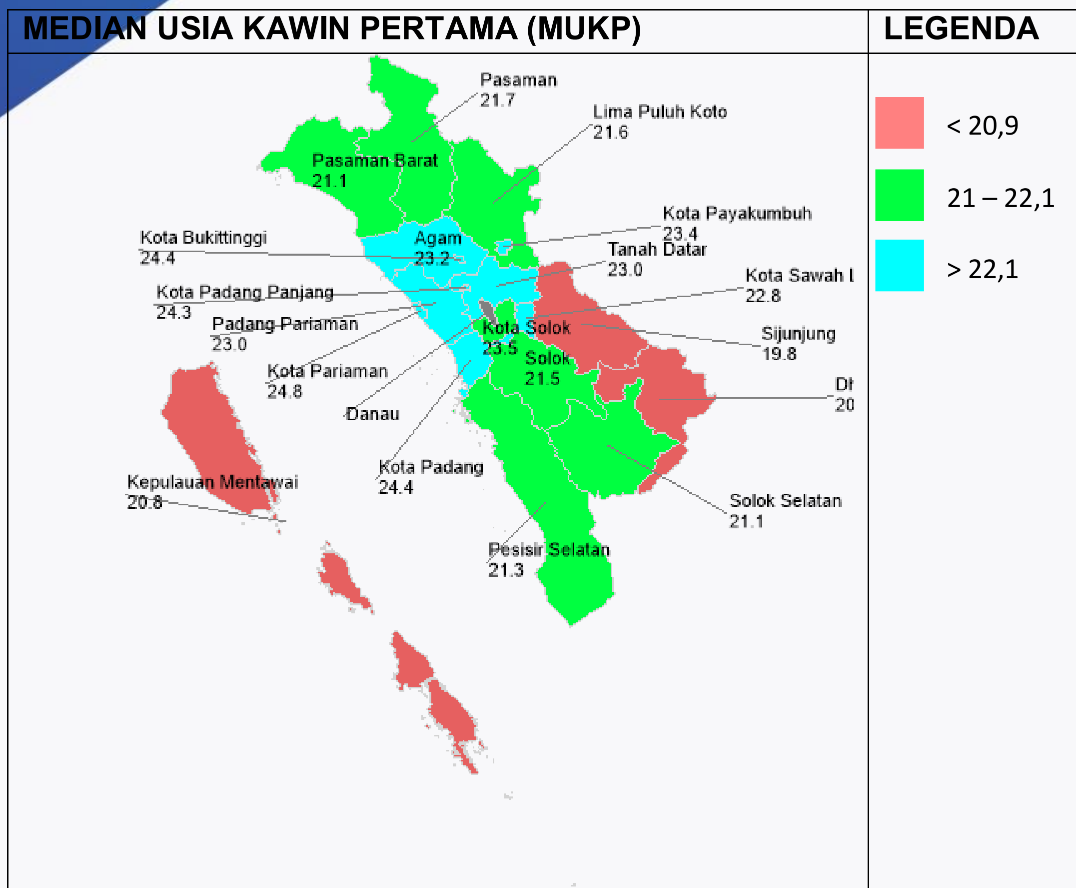
AGE SPECIFIC FERTILITY RATE **(ASFR) 15-19 TAHUN**	**LEGENDA**



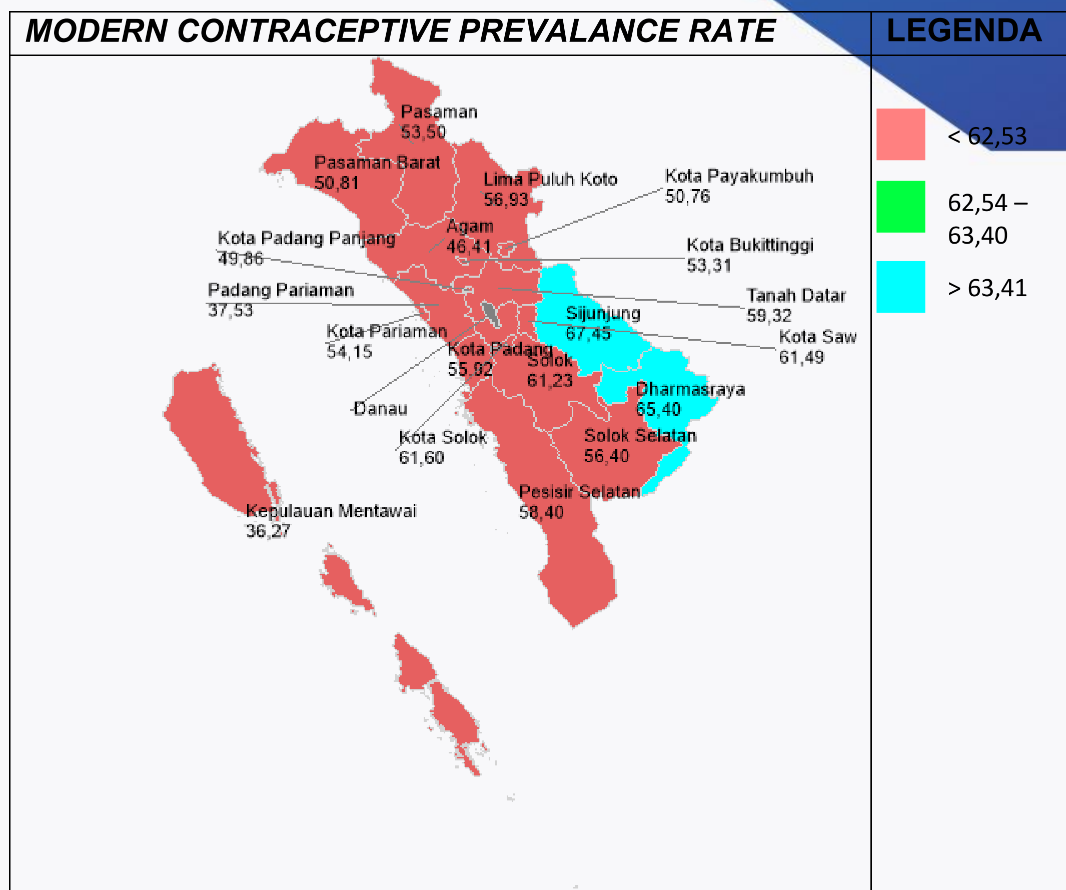
Berdasarkan peta di atas terlihat bahwa indikator ASFR 15-19 tahun tingkat kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat sebagian masih belum mencapai target. Hal tersebut perlu menjadi perhatian untuk dapat di intervensi secara efisien dan tepat sasaran agar kabupaten/kota lain yang belum mencapai target dapat mencapai target yang telah ditentukan di tahun-tahun kedepannya.



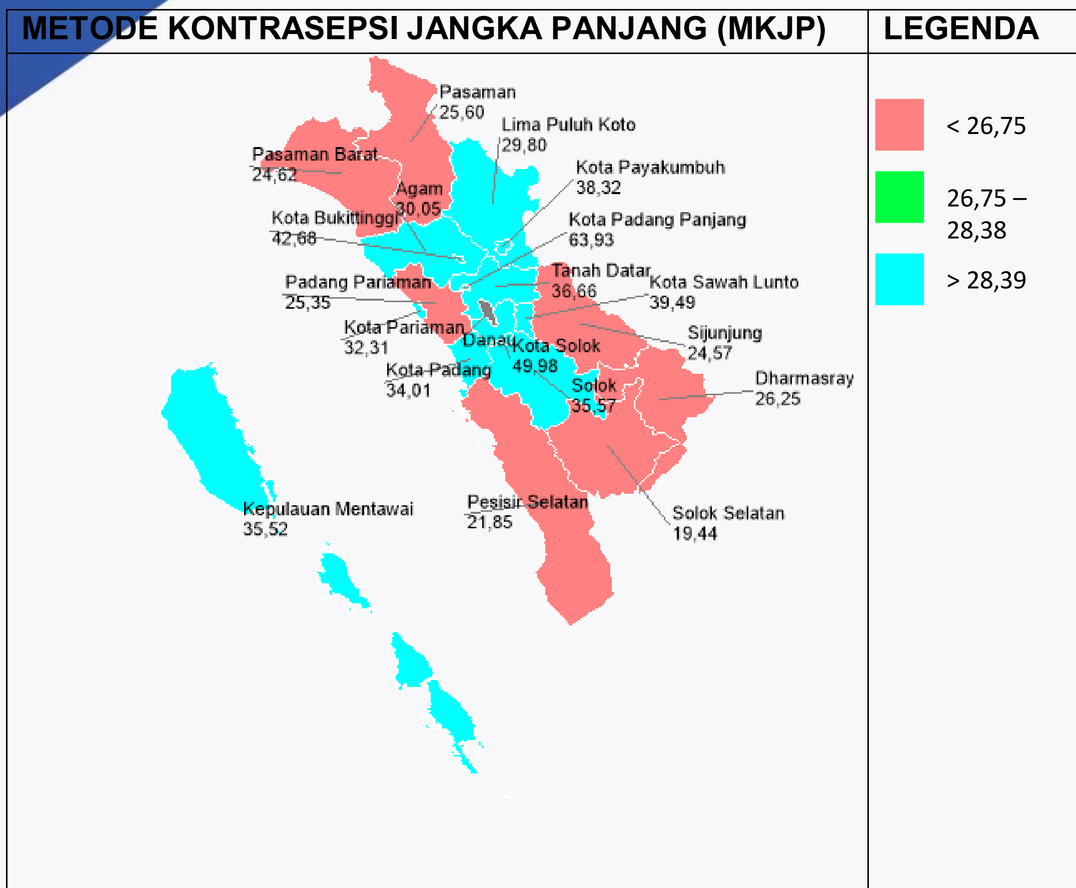
Berdasarkan peta di atas terlihat bahwa untuk indikator *unmet need* di Provinsi Sumatera Barat perlu perhatian yang besar karena seluruh kabupaten/kota di Sumatera Barat memiliki angka *unmet need* yang sangat tinggi yaitu di atas 8,01 persen.



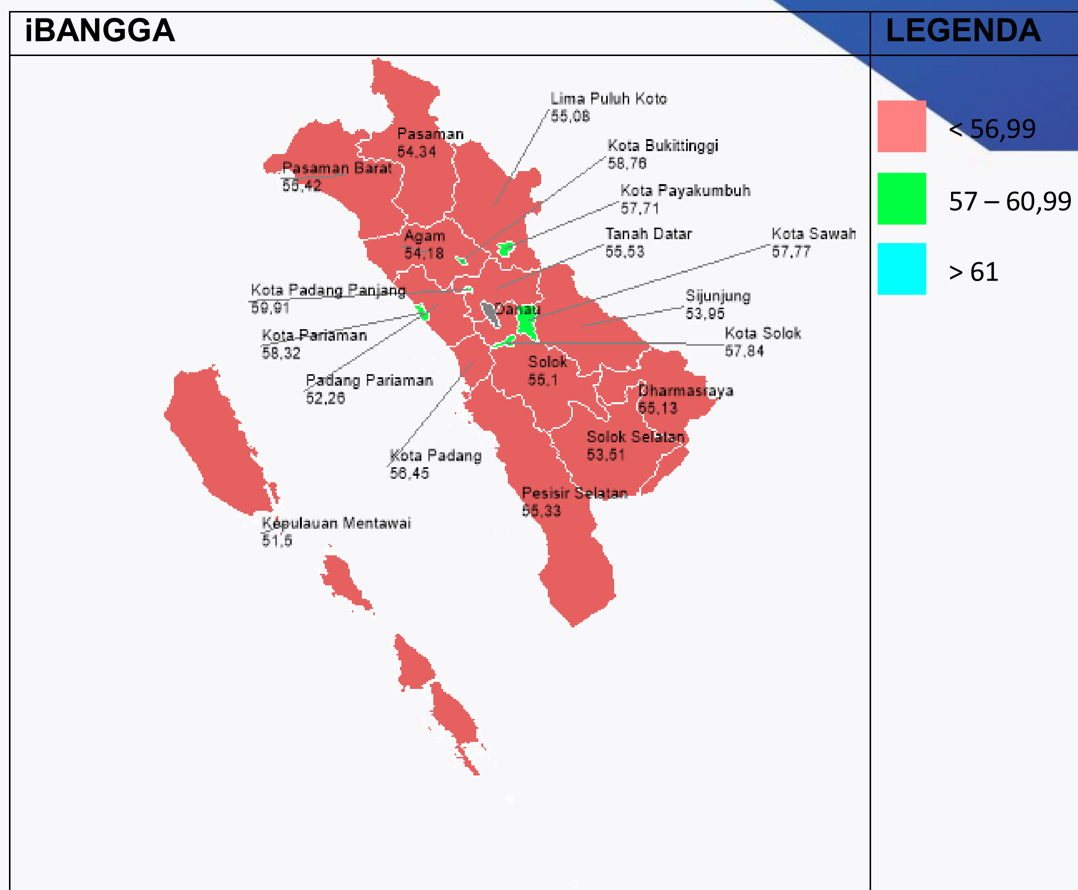
Berdasarkan peta di atas, terlihat bahwa angka Median Usia Kawin Pertama (MUKP) di Provinsi Sumatera Barat terdapat sebagian kecil kabupaten/kota yang belum mencapai target yang telah ditetapkan untuk MUKP tahun 2022 yaitu 21 tahun ke atas. Hal ini tetap harus menjadi perhatian agar kabupaten/kota yang angka MUKP-nya belum mencapai target dapat difokuskan untuk dilakukan intervensi yang diperlukan agar dapat mencapai target MUKP tahun 2024 yaitu di atas 22,1.



Berdasarkan peta di atas terlihat bahwa untuk indikator mCPR hampir seluruh kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat masih sangat rendah dan belum mencapai target, hanya Kabupaten Dharmasraya dan Kabupaten Sijunjung yang sudah mencapai target. Hal ini perlu menjadi perhatian, khususnya dalam aspek advokasi dan KIE serta pelayanan kontrasepsi di Sumatera Barat agar dapat dilaksanakan sesuai dengan kondisi dan situasi masing-masing daerah agar dapat berjalan secara terfokus dan tepat sasaran.

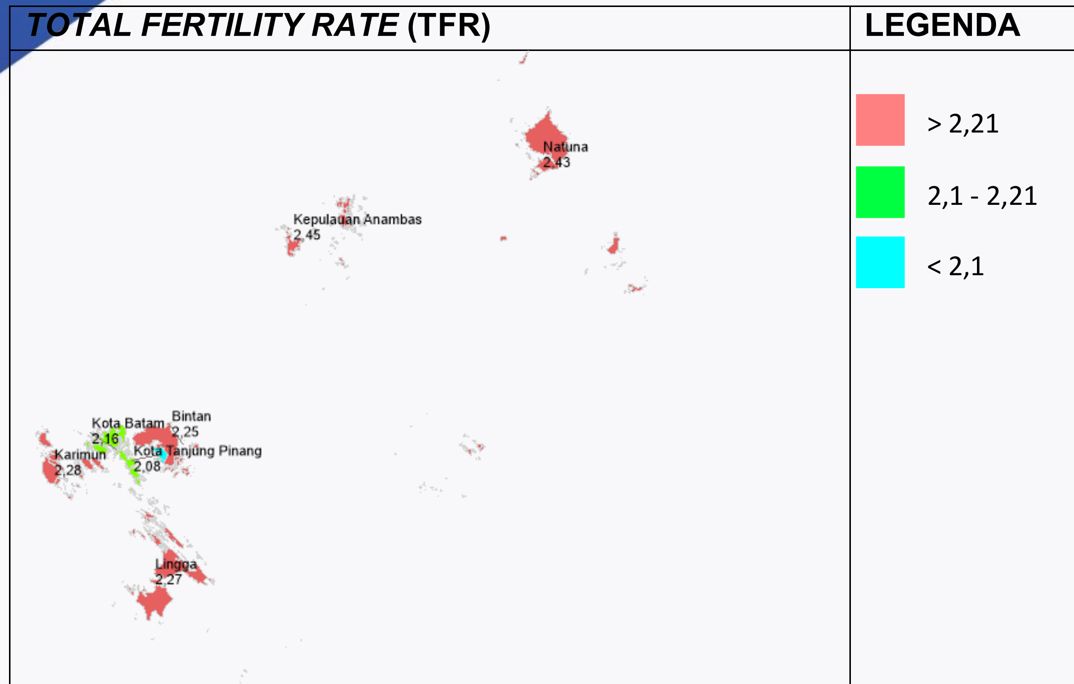


Berdasarkan peta di atas dapat dilihat bahwa masih terdapat sebagian kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat yang belum mencapai target MKJP tahun 2022. Hal ini perlu menjadi perhatian untuk menggencarkan kembali program-program dalam peningkatan angka MKJP di tingkat kabupaten/kota yang masih belum dapat mencapai target.

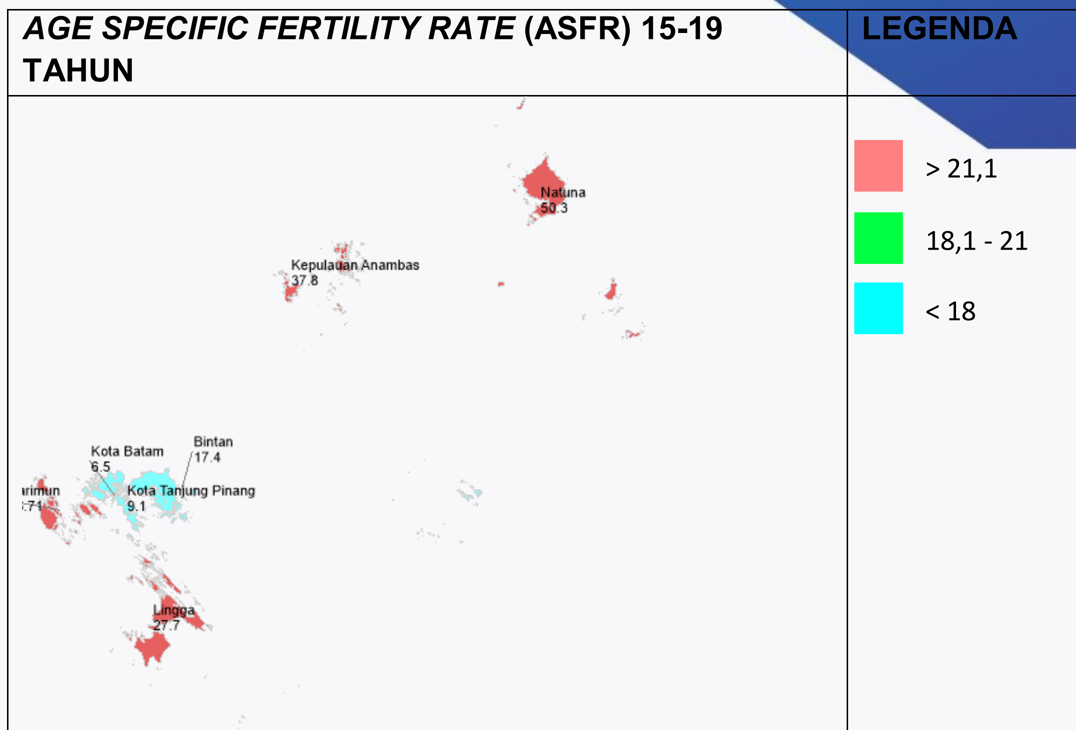


Berdasarkan peta di atas dapat dilihat bahwa secara umum angka indeks iBangga sebagian besar kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat masih belum mencapai target tahun 2022.

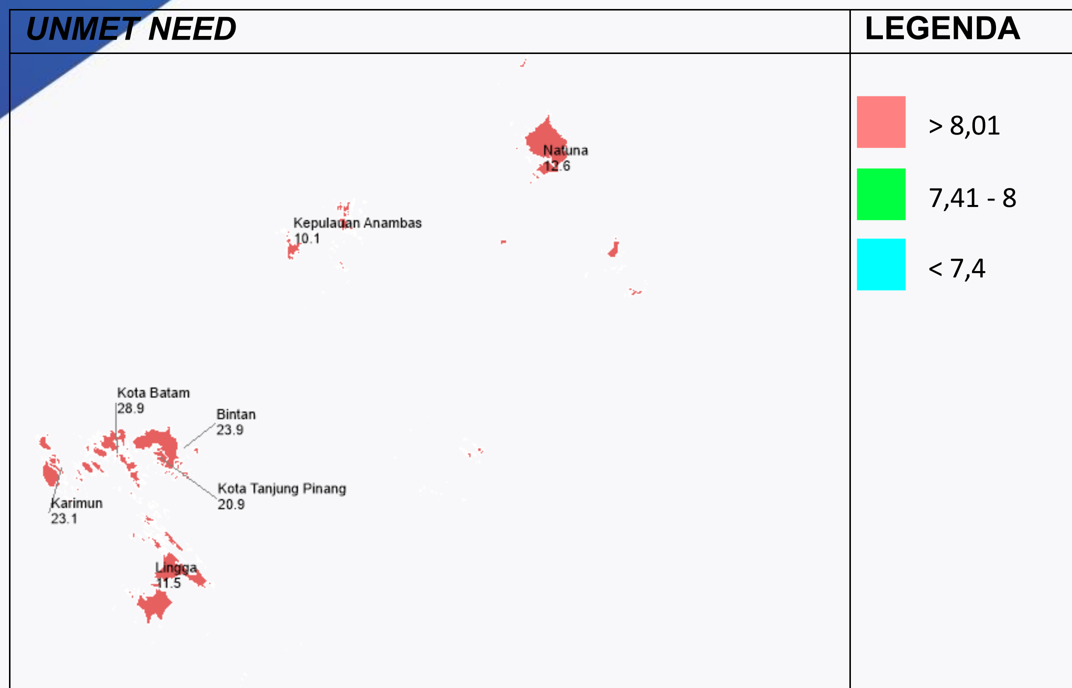
4.2.4. Peta Parameter Provinsi Riau



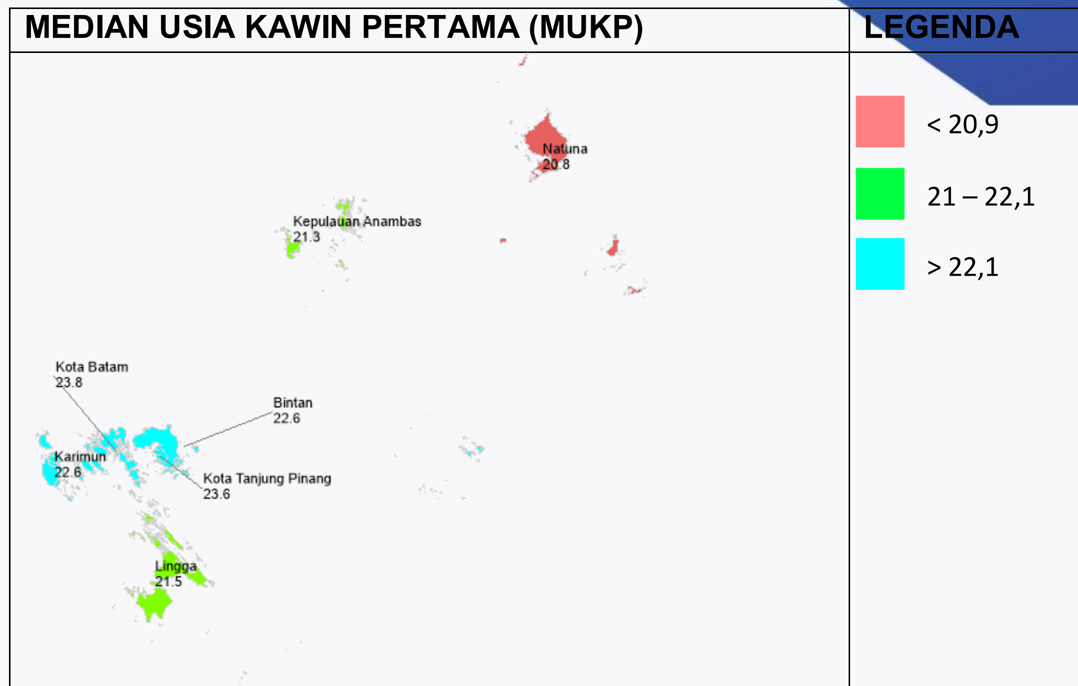
Berdasarkan Peta di atas, terlihat bahwa sebagian besar kabupaten/kota di Provinsi Riau masih memiliki angka TFR yang cukup tinggi dan/ belum memenuhi target. Hanya ada dua kabupaten/kota yang telah mencapai target baik tahun 2022 yakni Kota Batam bahkan target tahun 2024 yakni Kota Tanjung Pinang. Dengan itu dapat disimpulkan bahwa masih diperlukan penajaman dan pemerataan program, khususnya advokasi dan KIE pada *stakeholder* dan penduduk di Riau dalam rangka penurunan angka fertilitas.



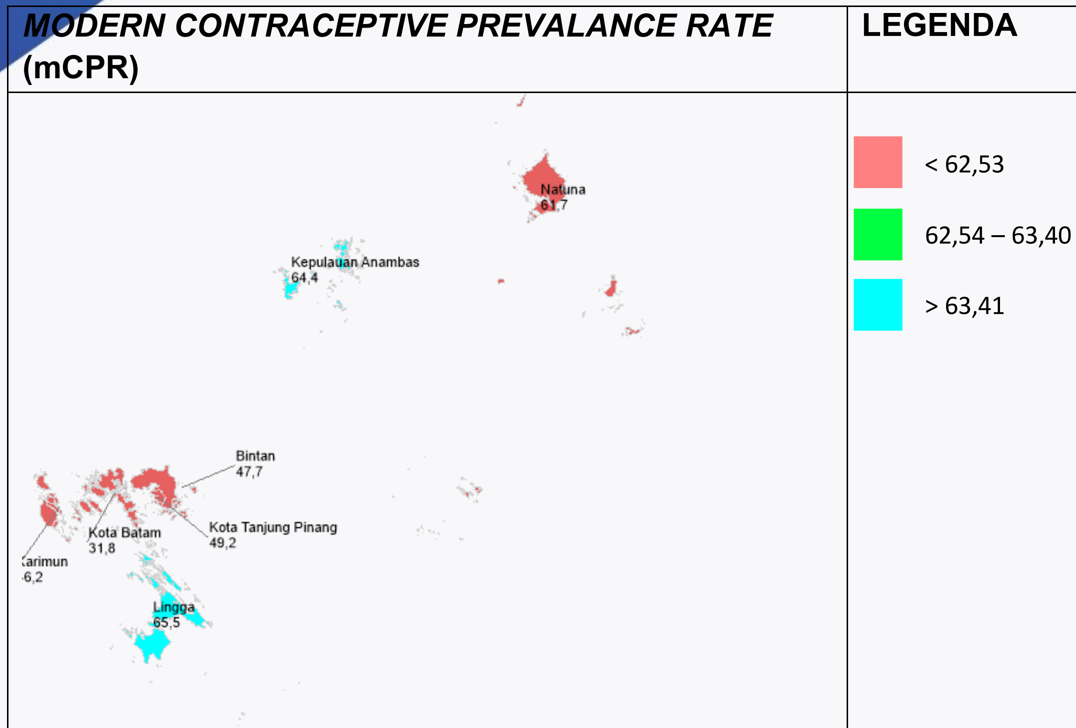
Dari seluruh kabupaten/kota di Provinsi Riau, hanya terdapat tiga kabupaten/kota yang telah mencapai target ASFR 15-19 Tahun yakni Kota Batam, Bintan, dan Kota Tanjung Pinang. Hal tersebut menandakan belum meratanya pelaksanaan program Bangga Kencana di Riau. Hal ini perlu di intervensi secara tepat karena fertilitas pada usia yang belum cukup dewasa dapat mengakibatkan berbagai dampak buruk dimana salah satunya adalah meningkatnya resiko kematian ibu dan bayi serta stunting.



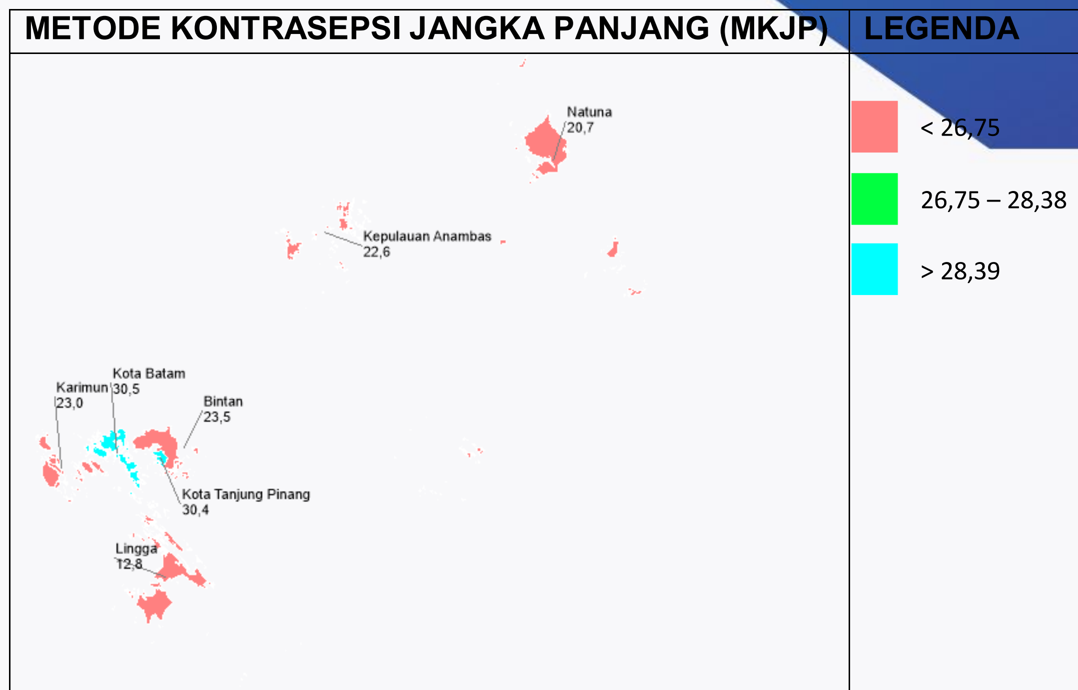
Berdasarkan peta di atas, terlihat bahwa diperlukan intervensi program bagi pemenuhan kebutuhan ber-KB para pasangan usia subur di Riau karena belum ada kabupaten/kota di Riau yang telah mencapai target *unmet need.* Oleh sebab itu, perlu dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program KB yang lebih dalam dan terfokus karena unmet need dapat mengakibatkan berbagai dampak buruk termasuk kehamilan yang tidak diinginkan yang berpotensi besar terhadap kehamilan beresiko, dan juga kematian ibu dan bayi serta stunting.



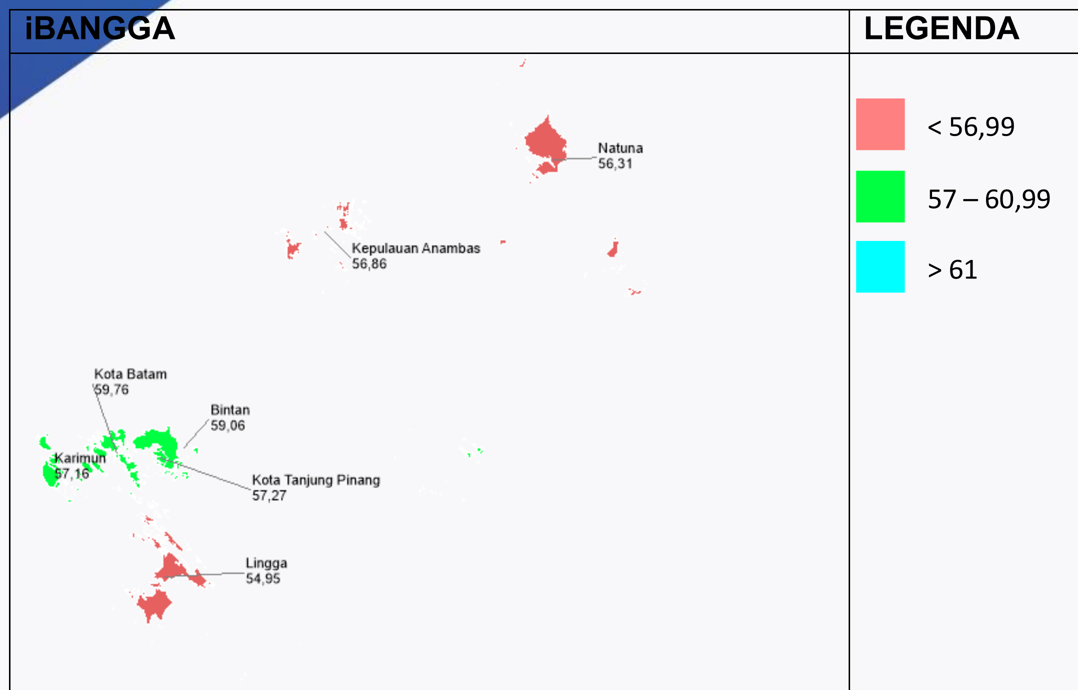
Berbeda dengan distribusi parameter program Bangga Kencana lainnya, terlihat bahwa angka Median Usia Kawin Pertama (MUKP) di Provinsi Riau sudah cukup baik dimana hanya terdapat satu kabupaten/kota yang belum mencapai target MUKP yang telah ditetapkan yakni Natuna. Hal tersebut perlu dipertahankan karena pendewasaan usia perkawinan berdampak baik dalam menekan resiko perceraian dan juga kehamilan beresiko yang dapat mengakibatkan terganggunya kesehatan janin, kematian ibu dan bayi, serta stunting pada anak.



Berdasarkan peta di atas terlihat bahwa indikator mCPR sebagian besar kabupaten/kota di Provinsi Riau masih sangat rendah dan baru ada dua kabupaten/kota yang mencapai target yakni Lingga dan Kepulauan Anambas. Hal ini perlu menjadi perhatian, karena dapat menjadi hambatan dalam pencapaian target program Bangga Kencana lainnya.

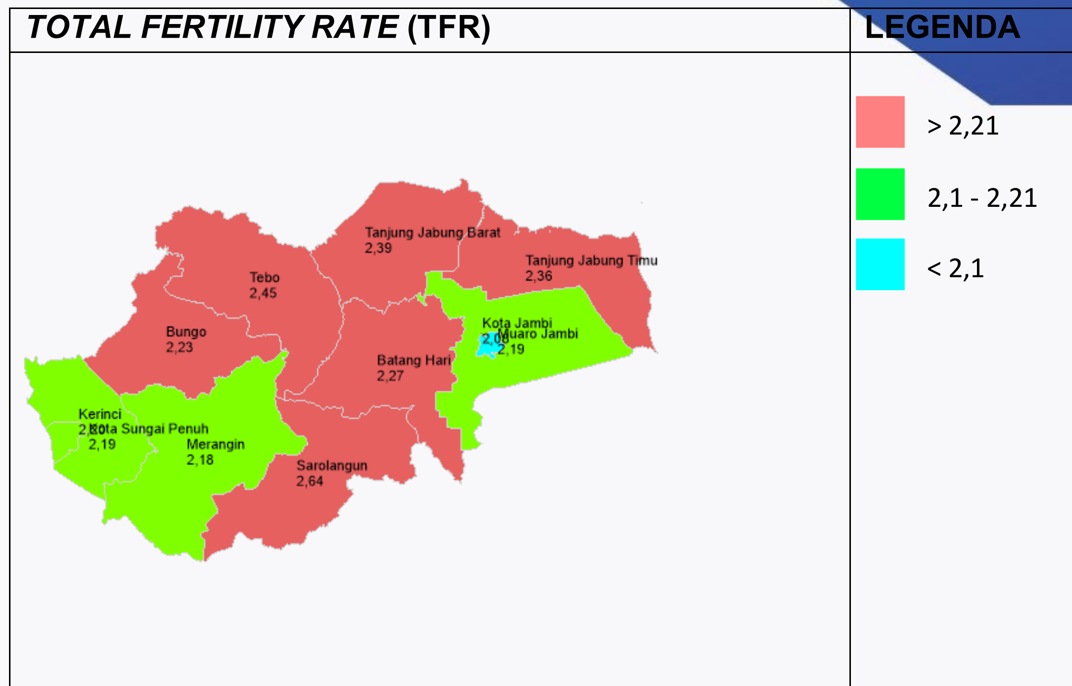


Berdasarkan peta di atas dapat dilihat bahwa capaian indikator MKJP di Riau juga masih cukup rendah dimana hanya terdapat dua kabupaten/kota yang telah mencapai target yakni Kota Batam dan Kota Tanjung Pinang. Oleh sebab itu diperlukan pemerataan pelaksanaan program advokasi dan KIE terkait penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang khususnya bagi PUS yang ingin menunda jarak kehamilan dan/ tidak menginginkan kehamilan lagi pada seluruh kabupaten/kota di Riau



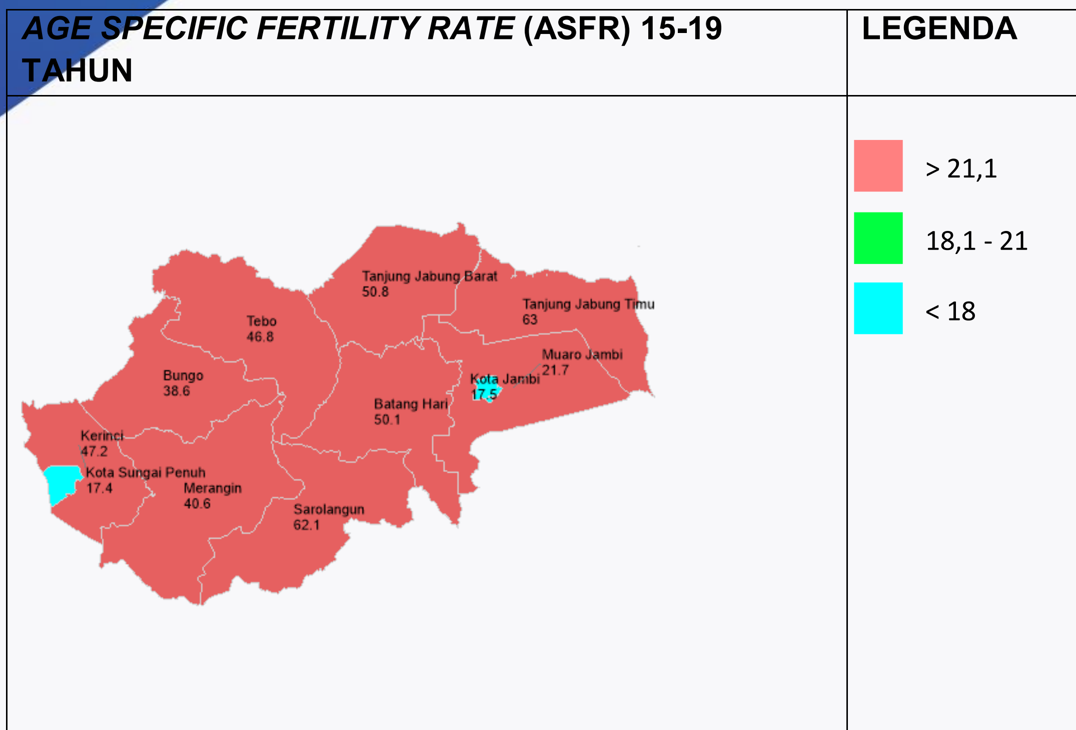
Berdasarkan peta di atas dapat dilihat bahwa seluruh kabupaten/kota di Riau memiliki angka iBangga yang beragam dimana ada beberapa kabupaten/kota yang sudah dan belum mencapai target. Kabupaten/Kota di Riau yang telah berhasil mencapai target iBangga yang telah ditetapkan mencakup Karimun, Kota Batam, Bintan, dan Kota Tanjung Pinang. Hal tersebut perlu menjadi perhatian khusus karena kualitas dari pembangunan Keluarga sangatlah penting dan mendasari kualitas keluarga sebagai unit terkecil di lingkup masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan

4.2.5. Peta Parameter Provinsi Jambi

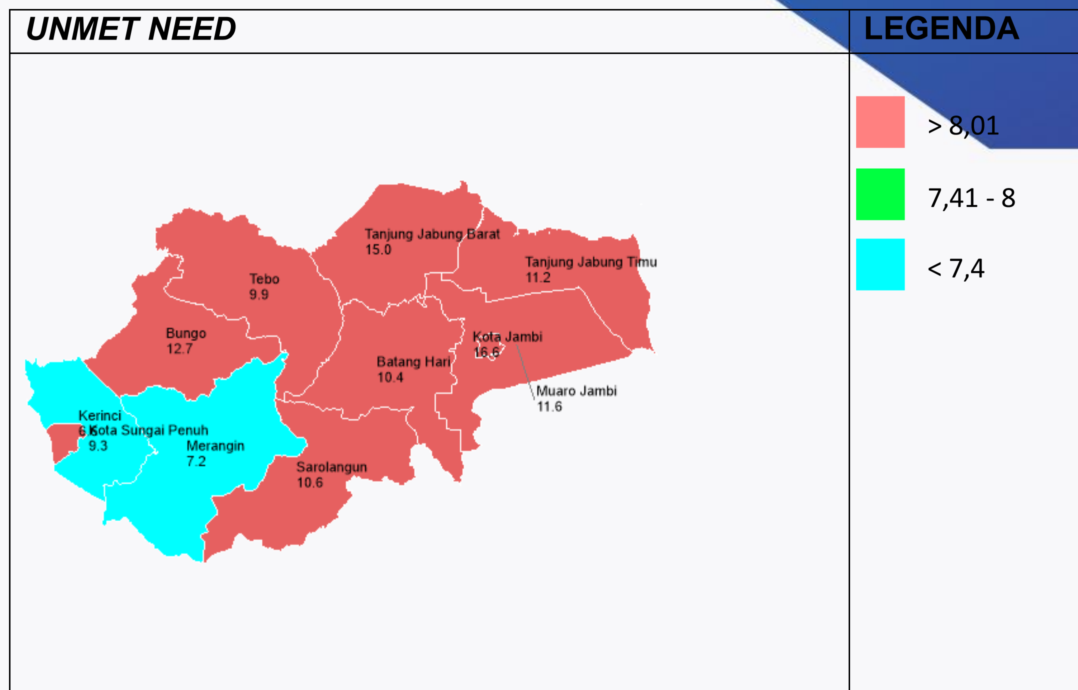


Pemetaan TFR pada Provinsi Jambi diatas menunjukkan adanya perbedaan warna pencapaian walaupun secara umum didominasi oleh warna merah, yang artinya tidak mencapai target tahun 2022 yaitu TFR=2,21. Sementara itu Kabupaten Kerinci, Kota Sungai Penuh, Kabupaten Merangin serta Kabupaten Muaro Jambi berhasil mencapai target tahun 2022. Sedangkan Kota Jambi memiliki pencapaian paling baik yaitu mencapai target untuk tahun 2024. Ini menunjukkan adanya disparitas yang kedepannya perlu untuk seimbangkan menuju indikator penduduk seimbang yaitu TFR=2,21.

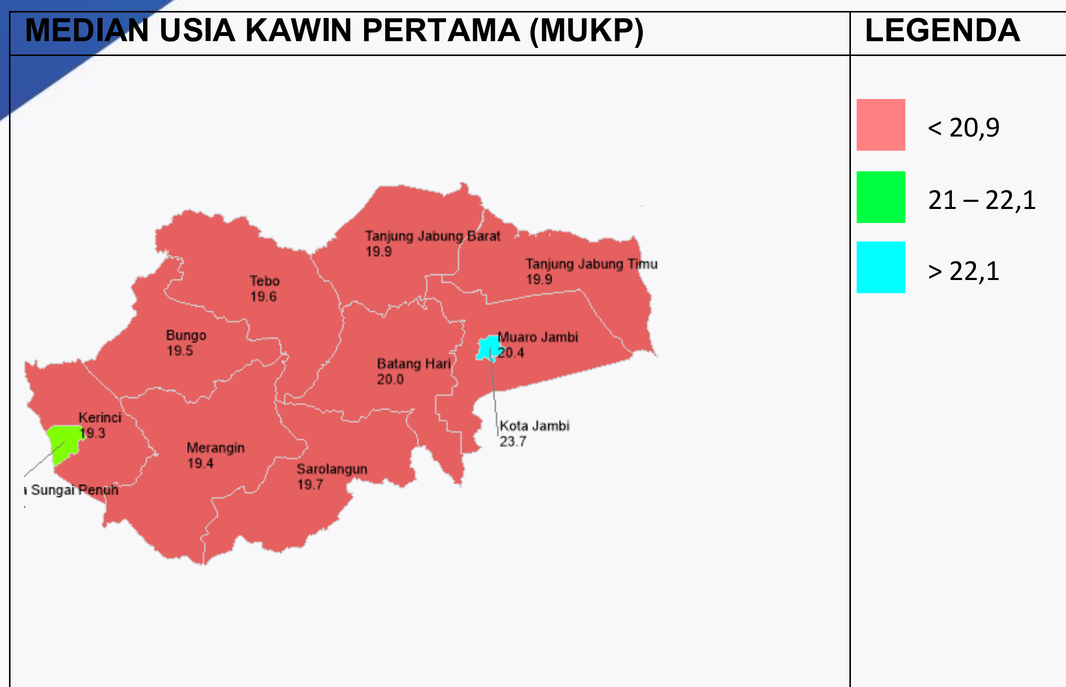
***AGE SPECIFIC FERTILITY RATE* (ASFR) 15-19 TAHUN** | **LEGENDA**



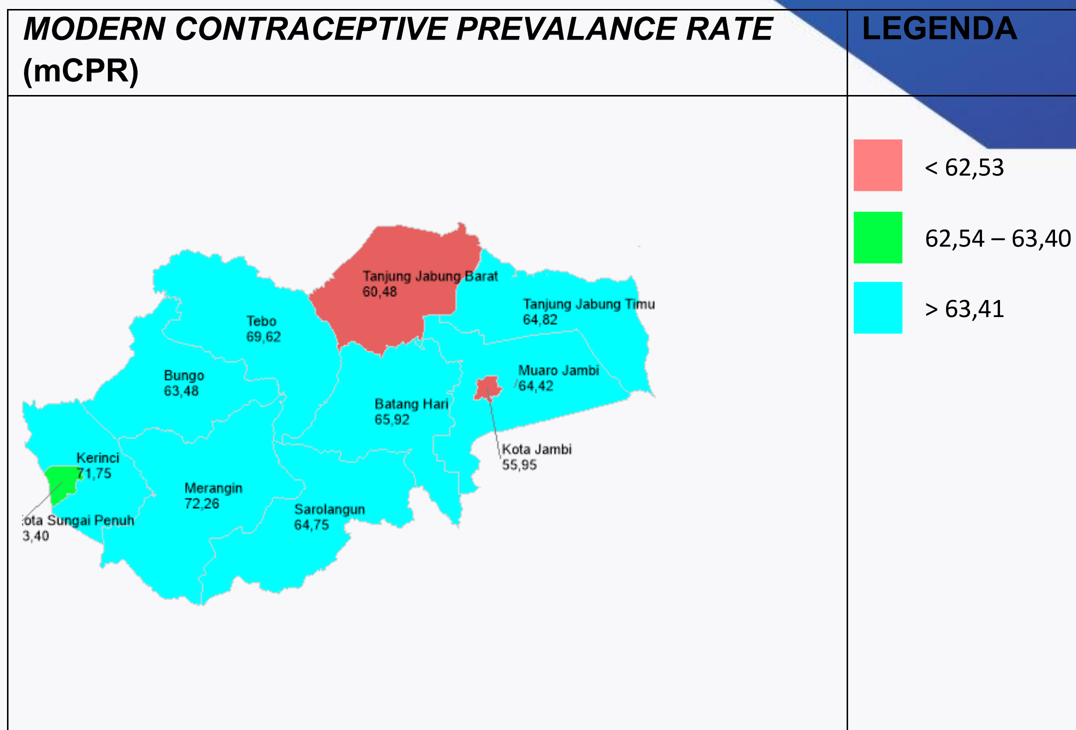
Peta di atas terlihat bahwa indikator ASFR 15-19 tahun di Provinsi Jambi menunjukkan hasil yang kurang baik karena masih didominasi warna merah yang artinya mayoritas Kabupaten/kota di provinsi ini masih memiliki ASFR yang lebih tinggi dari 21 dan belum mencapai target tahun 2022. Hanya Kota Sungai Penuh dan Kota Jambi yang berhasil mencapai target tahun 2024 sehingga berwarna biru karena kedua kota ini mencapai ASFR 15-19 tahun dibawah 18. Terlihat adanya diparitas yang cukup menonjol untuk ASFR 15-19 tahun diantara kabupaten/kota di Provinsi Jambi, untuk wilayah yang memiliki angka indikator ini yang masih tinggi maka perlu untuk menurunkan angka ASFR 15-19 tahun ini, karena kelahiran yang tinggi pada kelompok usia 15-19 tahun termasuk pada kelahiran yang berisiko tinggi untuk kematian ibu dan anak, peningkatan risiko pola asuh dan gizi buruk seperti stunting.



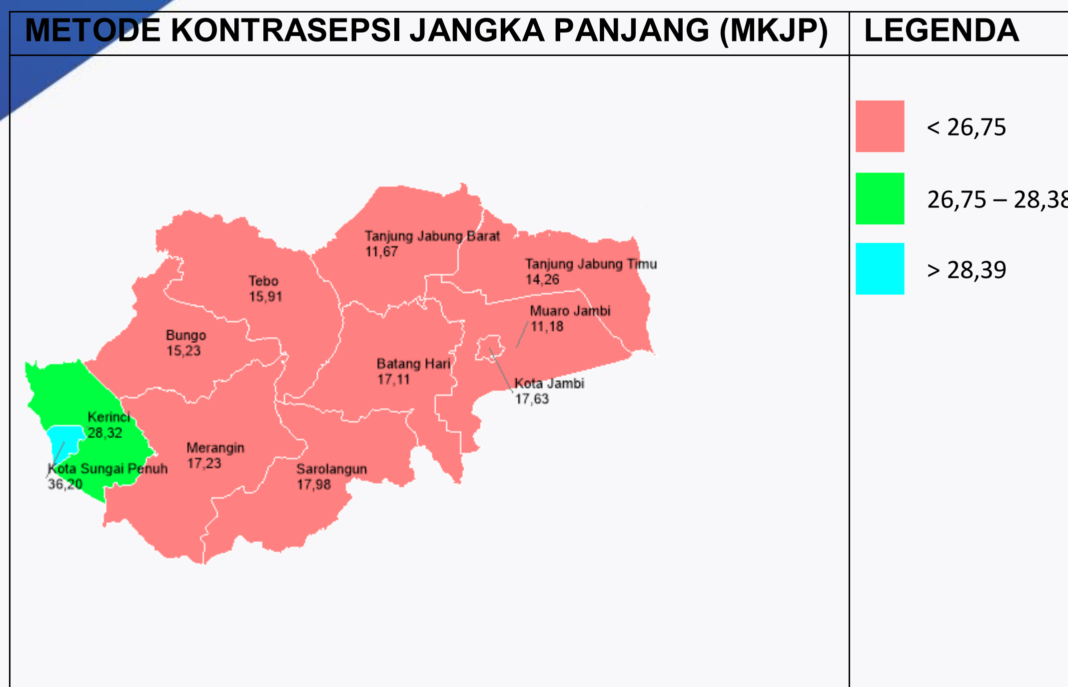
Berdasarkan peta di atas terlihat bahwa untuk indikator *unmet need* di Provinsi Jambi menunjukkan bahwa hampir seluruh kabupaten/kota berwarna merah yang artinya unmet need masih lebih tinggi dari angka 8. Hanya dua kabupaten yaitu Kerinci dan Merangin yang telah berhasil mencapai angka dibawah 7,4 sehingga berwarna biru atau telah berhasil mencapai target tahun 2024. Perlu perhatian yang besar karena hampir seluruh kabupaten/kota di Jambi memiliki angka *unmet need* yang sangat tinggi yaitu di atas 8 persen.



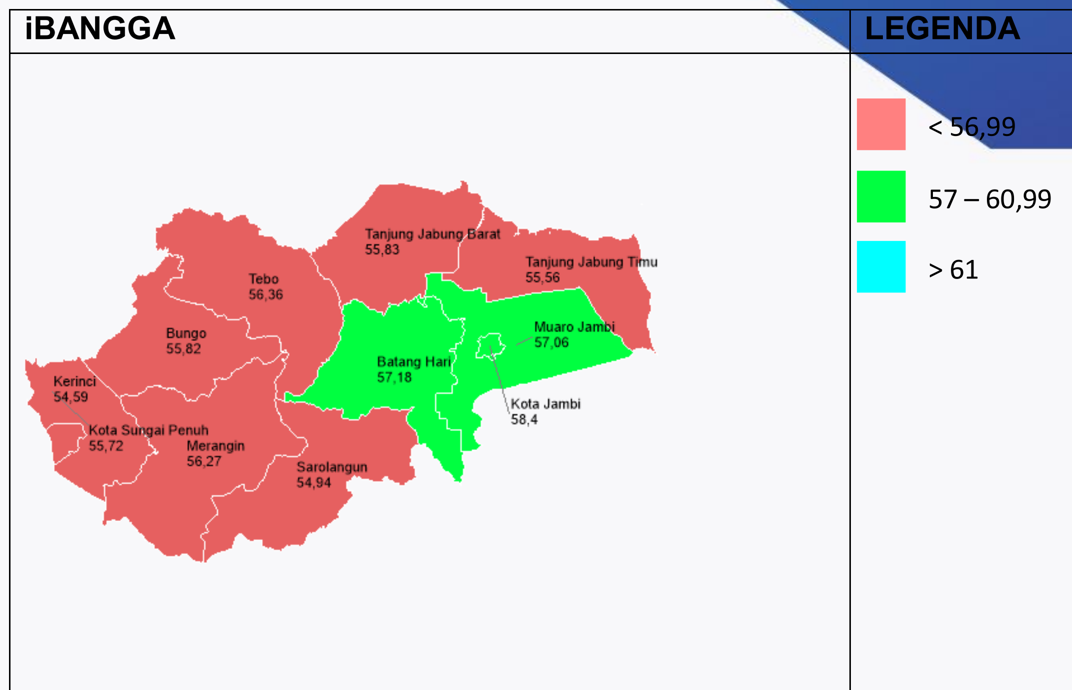
Berdasarkan peta di atas, terlihat bahwa angka Median Usia Kawin Pertama (MUKP) di Provinsi Jambi tidak begitu baik hampir semua kabupaten/kota mempunyai angka yang belum mencapai target MUKP tahun 2022 yaitu 21 tahun sehingga dominan berwarna merah. Namun ada kabupaten/kota yang angka MUKP-nya masih di sudah diatas 21 yaitu Kabupaten Sungai Penuh bahkan Kota Jambi sudah mencapai target 2024 karena memiliki MUKP diatas 22,1 sehingga berwarna biru. Kabupaten yang masih memiliki angka MUKP rendah perlu untuk menggalakkan kampanye Program Upaya Pendewasaan Perkawinan agar usia kawin pertama dapat meningkat dan mencapai target yang telah ditetapkan.

***MODERN CONTRACEPTIVE PREVALANCE RATE* (mCPR)**	**LEGENDA**
	< 62,53 62,54 – 63,40 > 63,41

Berdasarkan peta di atas terlihat bahwa untuk indikator mCPR di Provinsi Jambi terlihat cukup baik karena mayoritas sudah berwarna biru dan ada yang berwarna hijau dimana artinya target untuk tahun 2024 sudah banyak yang mencapainya. Sementara itu, ada dua kabupaten yaitu Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Kota Jambi masih berwarna merah karena belum berhasil melampaui target tahun 2022 yaitu mCPR = 62,54 persen. Disparitas masih terjadi untuk mCPR di Provinsi Jambi namun masih dalam batas yang tidak terlalu tinggi sehingga kedepannya diharapkan upaya peningkatan mCPR dapat terlaksana lebih baik terutama untuk wilayah-wilayah yang masih berwarna merah.

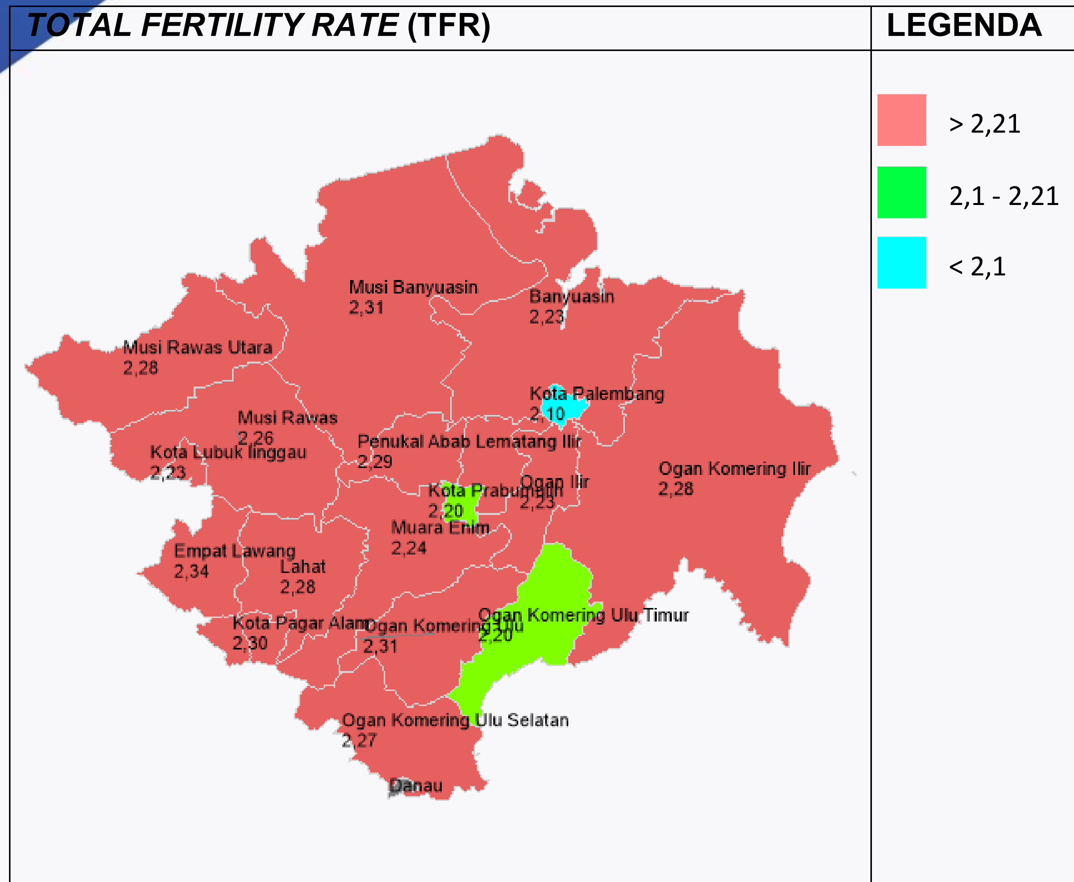


Berbeda dengan mCPR yang sudah cukup baik di Provinsi Jambi, pemetaan indikator MKJP di provinsi ini justru menunjukkan hasil yang kurang menggembirakan karena mayoritas kabupaten/kota masih merah yang artinya belum mampu mencapai target MKJP sebesar 26,75 persen pada tahun 2022. Hanya Kota Sungai Penuh yang berhasil berwarna biru dengan angka 36,2 persen (telah mencapai target tahun 2024), dan Kabupaten Kerinci sebesar 28,32 yang hijau (telah mencapai target tahun 2022). Angka mCPR nya sudah banyak yang berhasil mencapai target, sementara MKJP sebaliknya menunjukkan bahwa penggunaan KB modern di Provinsi Jambi masih didominasi pada KB Jangka Pendek yang memiliki peluang tinggi untuk putus pakai dan terjadi *unmet need* yang dapat berujung pada kehamilan yang tidak diinginkan atau aborsi. Peningkatan MKJP dapat melindungi PUS dari kehamilan yang lebih efektif dalam jangka waktu yang panjang sehingga pengaturan jarak dan pembatasan kehamilan dapat lebih baik.

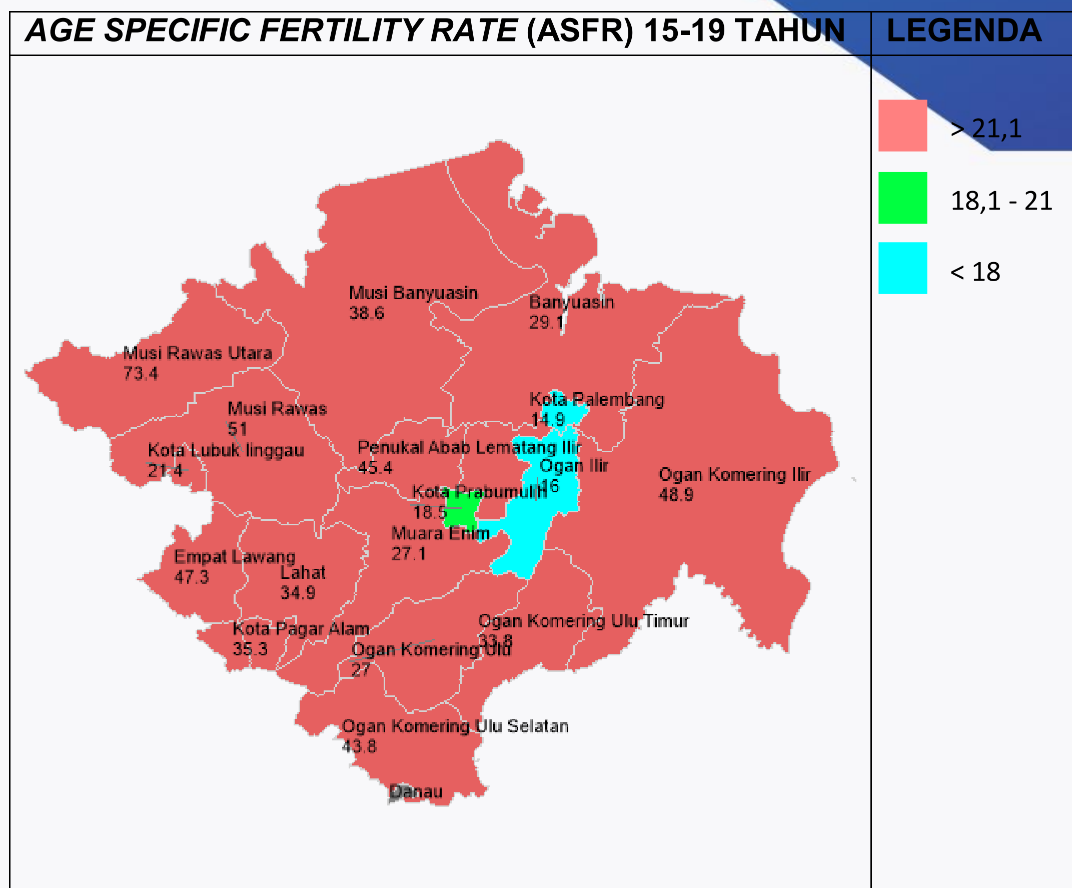


Berdasarkan peta di atas dapat dilihat bahwa secara umum angka indeks iBangga di Provinsi Jambi masih didominasi warna merah karena pencapaian iBangga dibawah 57 yang merupakan target tahun 2022. Ada tiga kabupaten/kota yang berhasil mencapai angka 57 sehingga berwarna hijau yaitu Batang Hari, Kota Jambi dan Muara Jambi. iBangga merupakan indikator dalam pembangunan keluarga, diharapkan dengan meningkanya indikator ini dapat meningkatkan kualitas keluarga Indonesia secara menyeluruh. Oleh karena itu, perlu upaya yang dilakukan kabupaten/kota yang masih merah untuk meningkatkan kualitas pembangunan keluarga pada wilayahnya.

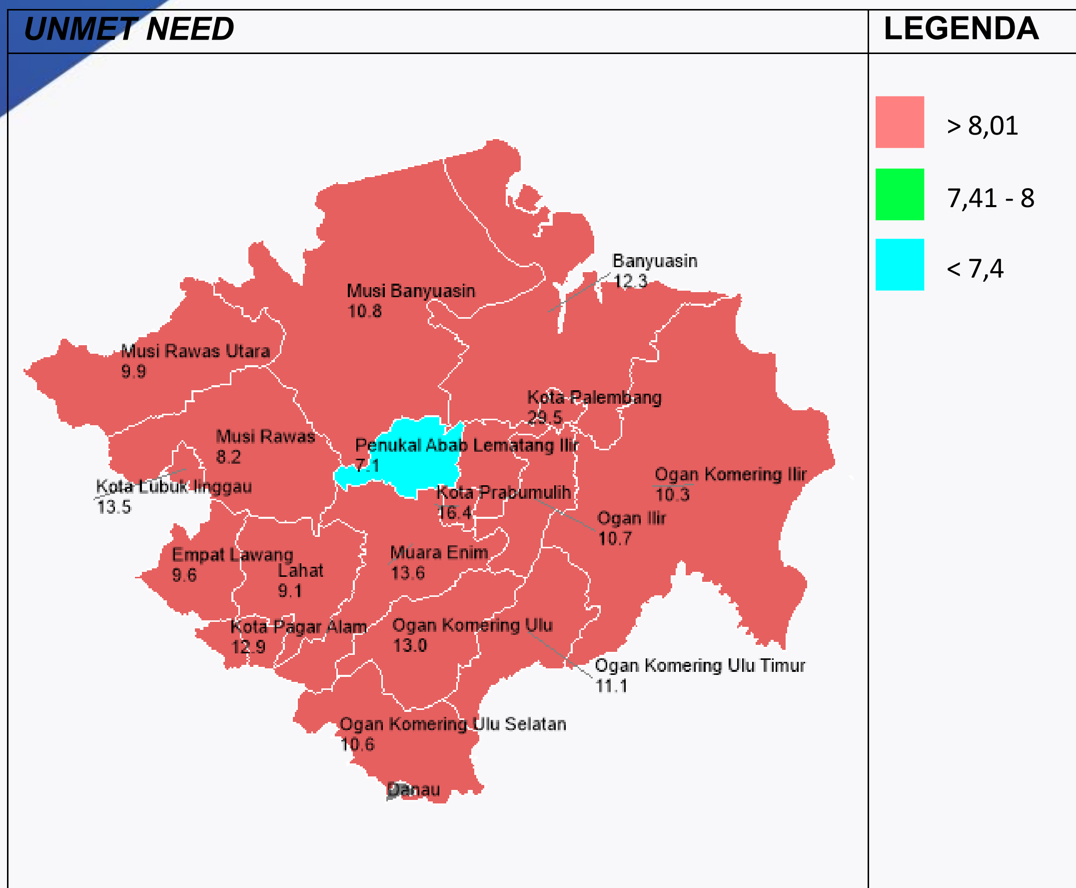
4.2.6. Peta Parameter Provinsi Sumatera Selatan



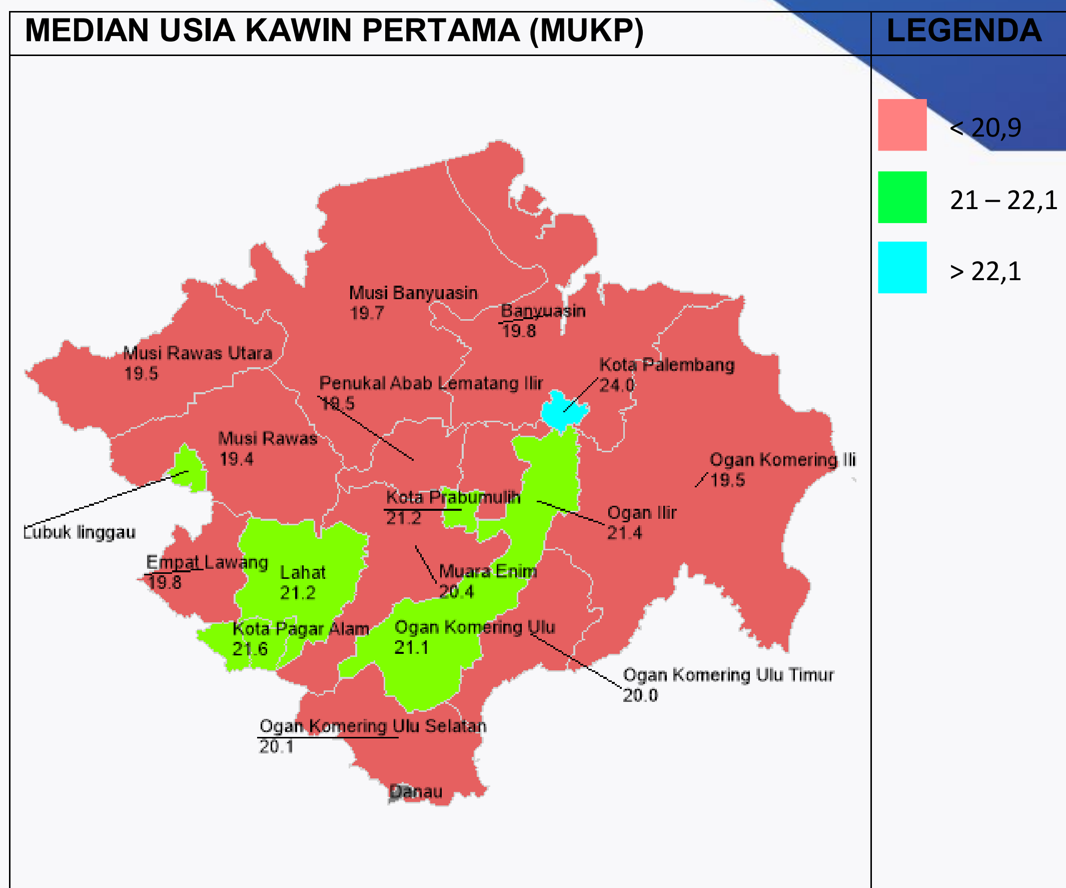
Berdasarkan Peta di atas dapat dilihat bahwa angka kelahiran total di Sumatera Selatan masih cukup memiliki tantangan karena hampir seluruh kabupaten/kota di Sumatera Selatan memiliki angka yang tinggi yaitu di atas 2,21. Hanya Kota Palembang, Kota Prabumulih, dan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur yang sudah memiliki angka kelahiran total di bawah 2,21. Hal ini perlu menjadi perhatian bagi para pengambil kebijakan di kabupaten/kota di Sumatera Selatan untuk melakukan upaya dan langkah-langkah untuk menurunkan angka TFR di wilayahnya masing-masing.



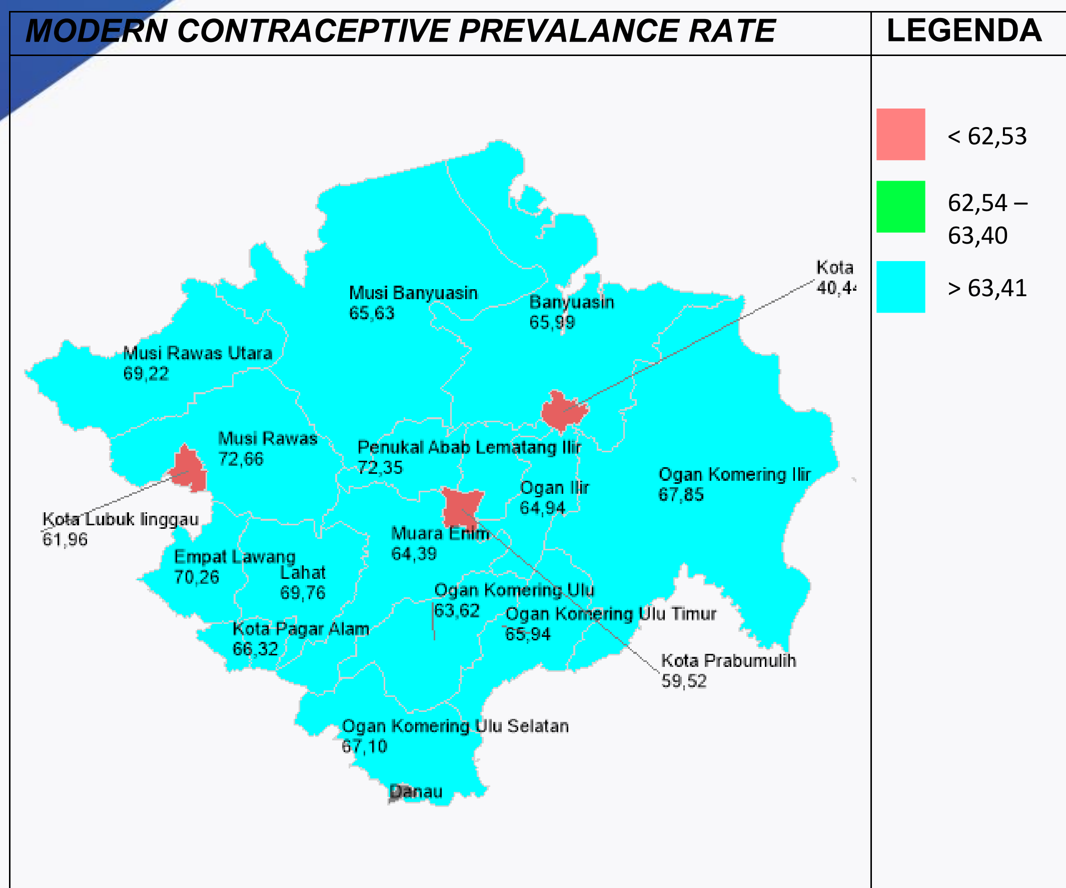
Berdasarkan peta di atas terlihat bahwa indikator ASFR 15-19 tahun tingkat kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan sebagian besar masih belum mencapai target. Hanya Kota Palembang, Kota Prabumulih, dan Kabupaten Ogan Ilir yang telah memenuhi target angka ASFR 15-19 tahun di bawah 21,1. Hal tersebut perlu menjadi perhatian untuk dapat di intervensi secara efisien dan tepat sasaran agar kabupaten/kota lain yang belum mencapai target dapat mencapai target yang telah ditentukan di tahun-tahun kedepannya.



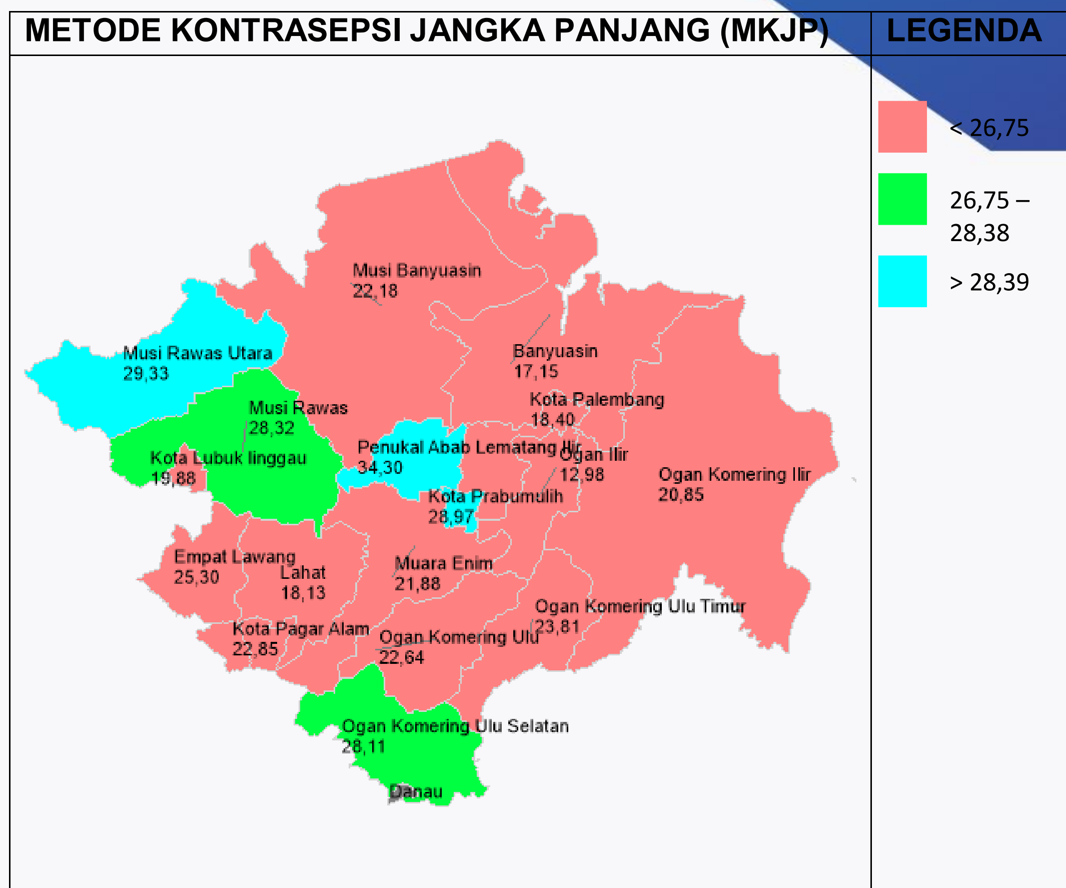
Berdasarkan peta di atas terlihat bahwa untuk indikator *unmet need* di Provinsi Sumatera Selatan perlu perhatian yang besar karena hampir seluruh kabupaten/kota di Sumatera Selatan memiliki angka *unmet need* yang sangat tinggi yaitu di atas 8,01 persen. Hanya Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir yang telah memenuhi target dengan angka *unmet need* di bawah 8.



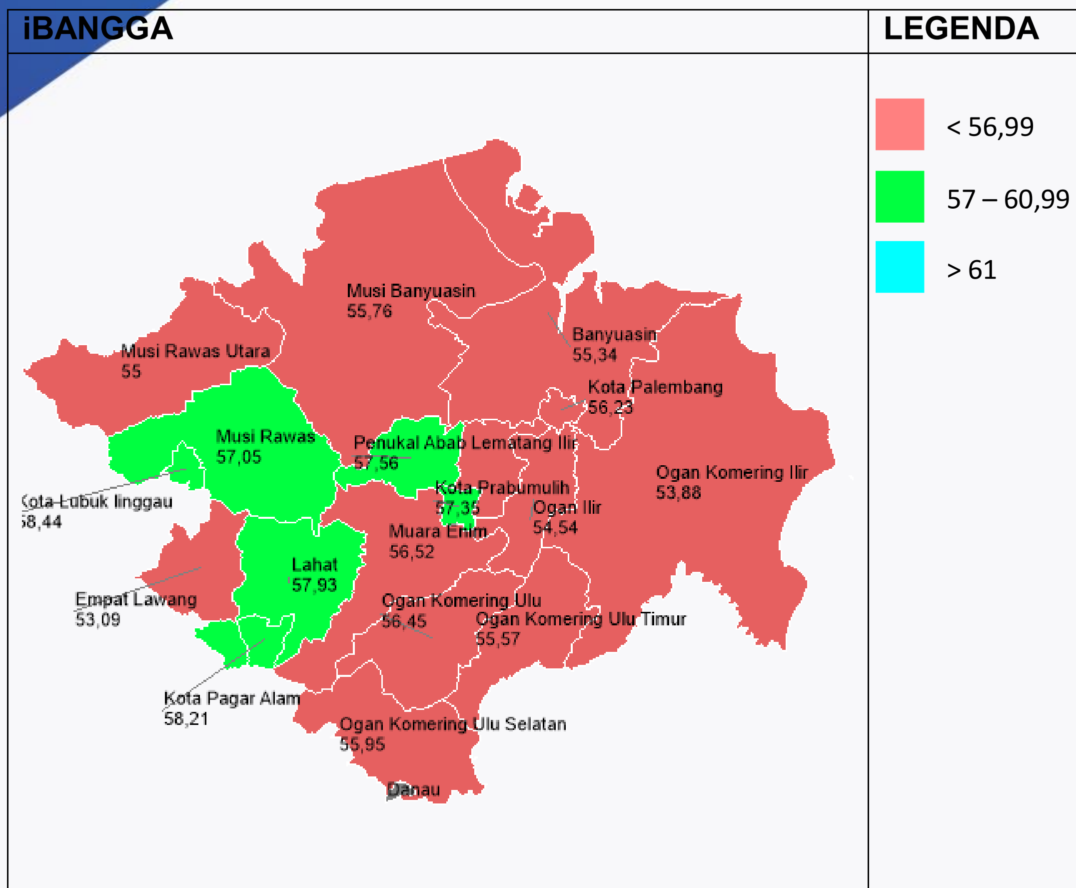
Berdasarkan peta di atas, terlihat bahwa angka Median Usia Kawin Pertama (MUKP) di Provinsi Sumatera Selatan terdapat sebagian kecil kabupaten/kota yang sudah mencapai target yang telah ditetapkan untuk MUKP tahun 2022 yaitu 21 tahun ke atas sedangkan sebagian besar masih belum mencapai target. Hal ini tentu harus menjadi perhatian agar kabupaten/kota yang angka MUKP-nya belum mencapai target dapat difokuskan untuk dilakukan intervensi yang diperlukan agar dapat mencapai target MUKP tahun 2024 yaitu di atas 22,1.



Berdasarkan peta di atas terlihat bahwa untuk indikator mCPR hampir seluruh kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan sudah mencapai target, hanya Kota Palembang, Kota Lubuk Linggau, dan Kota Prabumulih yang belum mencapai target. Hal ini tetap perlu menjadi perhatian, khususnya dalam aspek advokasi dan KIE serta pelayanan kontrasepsi di Sumatera Selatan agar dapat dilaksanakan sesuai dengan kondisi dan situasi masing-masing daerah agar dapat berjalan secara terfokus dan tepat sasaran.

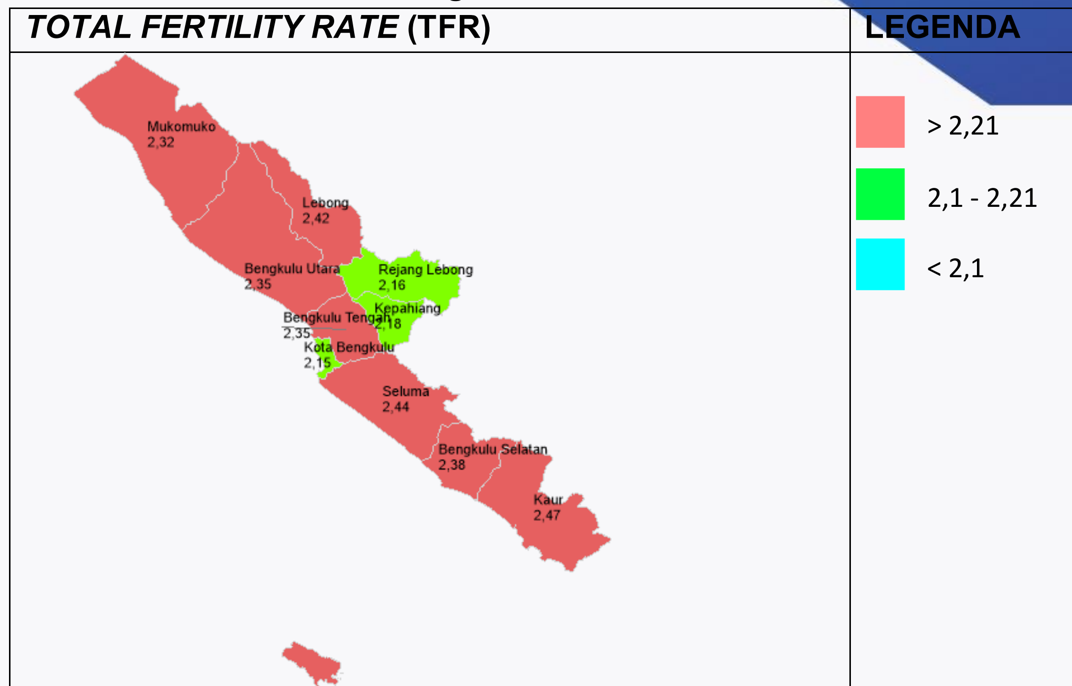


Berdasarkan peta di atas dapat dilihat bahwa masih terdapat sebagian besar kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan yang belum mencapai target MKJP tahun 2022. Hal ini perlu menjadi perhatian untuk menggencarkan kembali program-program dalam peningkatan angka MKJP di tingkat kabupaten/kota yang masih belum dapat mencapai target.

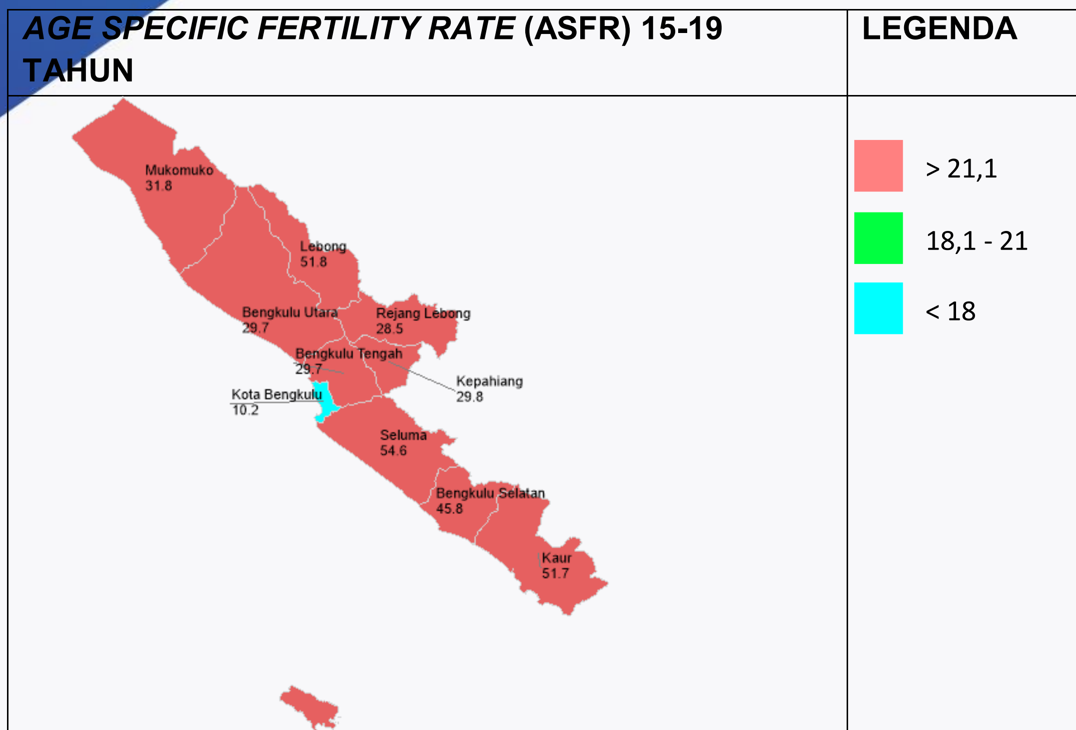


Berdasarkan peta di atas dapat dilihat bahwa secara umum angka indeks iBangga sebagian besar kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan masih belum mencapai target tahun 2022

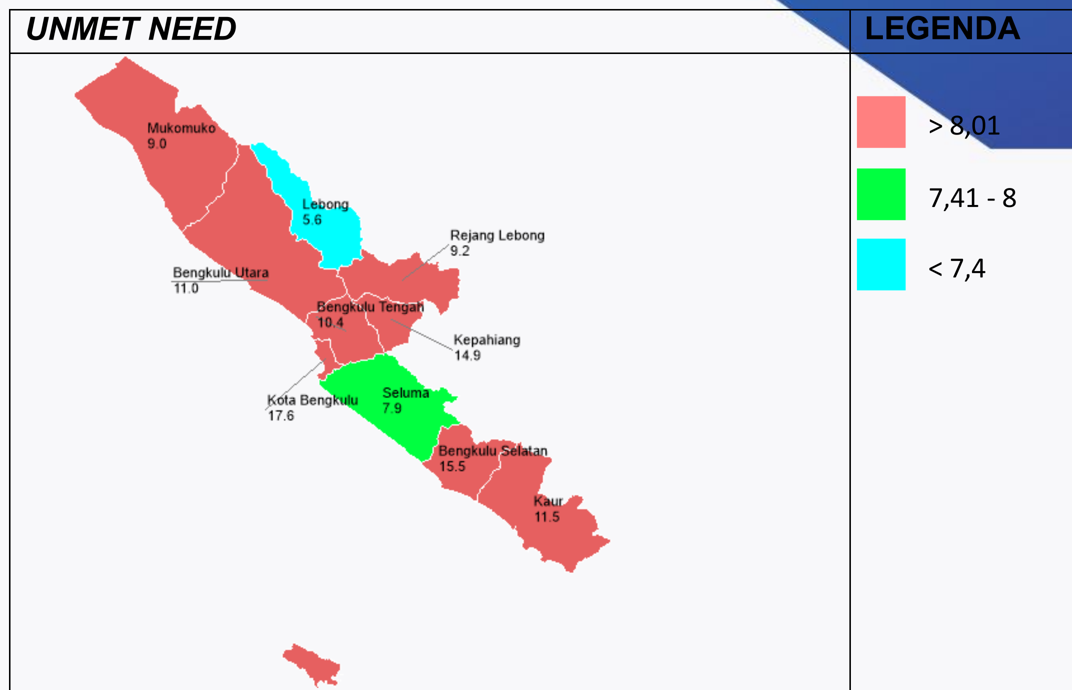
4.2.7. Peta Parameter Provinsi Bengkulu



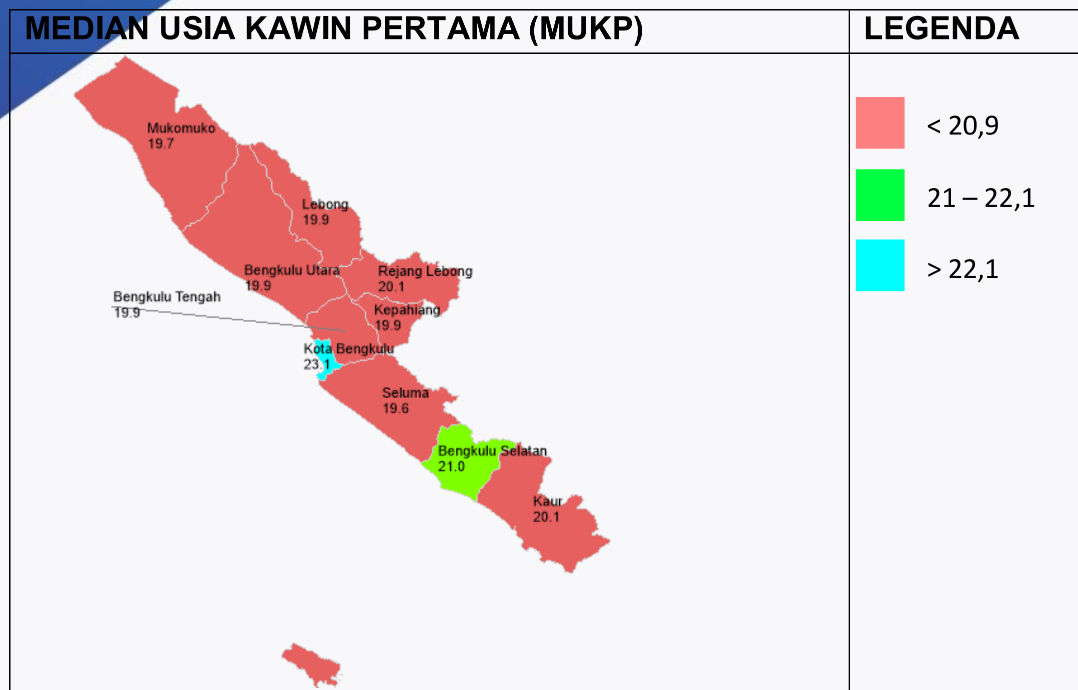
Berdasarkan peta di atas dapat dilihat TFR pada Provinsi Bengkulu didominasi warna merah (tidak mencapai target 2022 = 2,21), dan hanya Kota Bengkulu, Kepahiyang dan Rejanglebong yang berhasil mencapai angka 2,21 sehingga berwarna hijau. Ini menunjukkan bahwa TFR pada provinsi ini masih harus diturunkan. Upaya mencapai penduduk tumbuh seimbang dengan angka TFR 2,1 diharapkan dapat terjadi sesuai dengan target yang ditetapkan yaitu 2,1 pada tahun 2024.



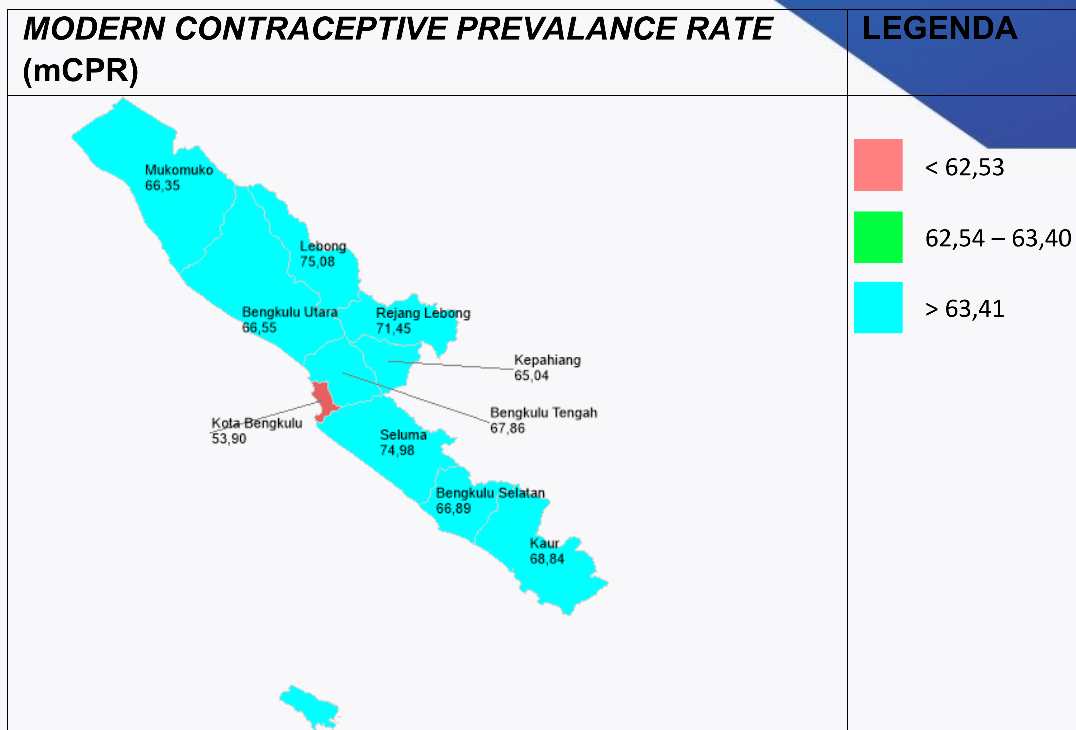
Pola Peta ASFR 15-19 tahun hampir mirip dengan Pola TFR dimana secara umum berwarna merah, namun pada ASFR 15-19 tahun hanya Kota Bengkulu yang berhasil mencapai target tahun 2022 dan 2024 sehingga dapat berwarna biru. Ini menunjukkan bahwa program-program untuk menurunkan angka kelahiran pada perempuan usia 15-19 tahun di provinsi ini harus secara intensif dilakukan. Melahirkan terlalu dini dapat menimbulkan risiko bagi bagi ibu dan bayinya, serta meningkatkan berbagai risiko kesehatan dan pertumbuhan anak seperti stunting.



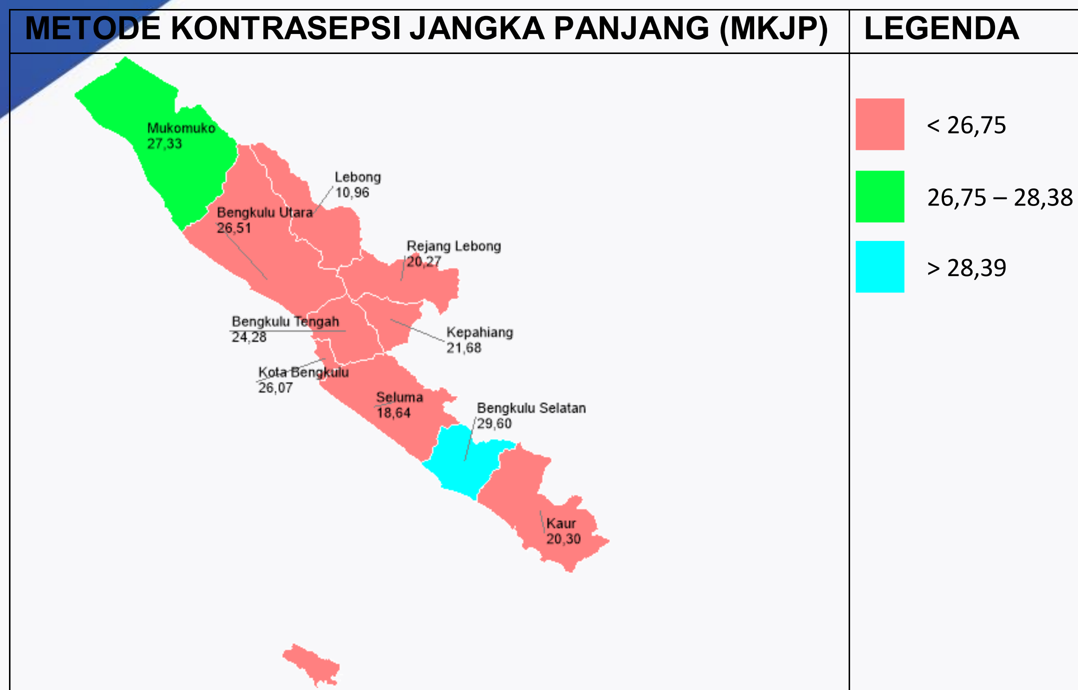
Berdasarkan peta di atas terlihat hanya Kabupaten Seluma dan Kabupaten Lebong yang berhasil mencapai target untuk indikator *unmet need* di Provinsi Bengkulu. Sisanya berwarna merah yang artinya tidak mencapai target tahun 2022. Ini menunjukkan bahwa perlu peningkatan upaya-upaya dalam menurunkan *unmet need* dengan melakukan lebih banyak KIE, mempermudah akses pelayanana KB, memetakan sasaran agar *unmet need* dapat signifikan dapat diturunkan. Kegagalan dalam menuntaskan *unmet need* dapat mengakibatkan putus pakai KB serta memicu kehamilan yang tidak diinginkan.



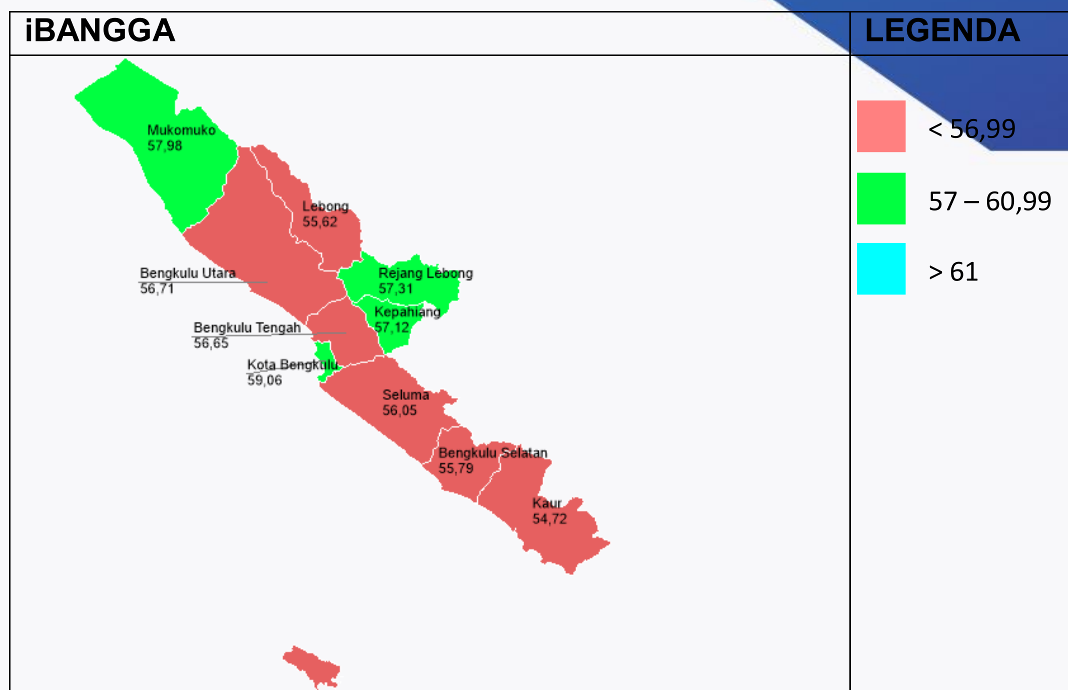
Berdasarkan peta di atas, terlihat bahwa angka Median Usia Kawin Pertama (MUKP) di Provinsi Bengkulu sama seperti indikator lainnya yaitu didominasi warna merah yang artinya tidak mencapai target. Hanya Kota Bengkulu selatan yang berhasil mencapai target 2022 berwarna hijau, sedangkan Kota Bengkulu mencapai target 2024 sehingga berwarna biru. Program Pendewasaan Usia Perkawinan perlu menjadi prioritas pada provinsi ini.



Berbeda dengan pola indikator lainnya, pada Provinsi Bengkulu kesertaan ber-KB modern (mCPR), justru sangat mengembirakan dimana hampir seluruh kabupaten dan kotanya telah mencapai target 2022 dan target 2024 sehingga dominan berwarna biru. Hanya Kota Bengkulu yang memiliki pencapaian mCPR dibawah target tahun 2022 sehingga berwarna merah. Oleh karena itu, untuk Kota Bengkulu harus lebih digiatkan lagi agar dapat mencapai target dimasa mendatang.



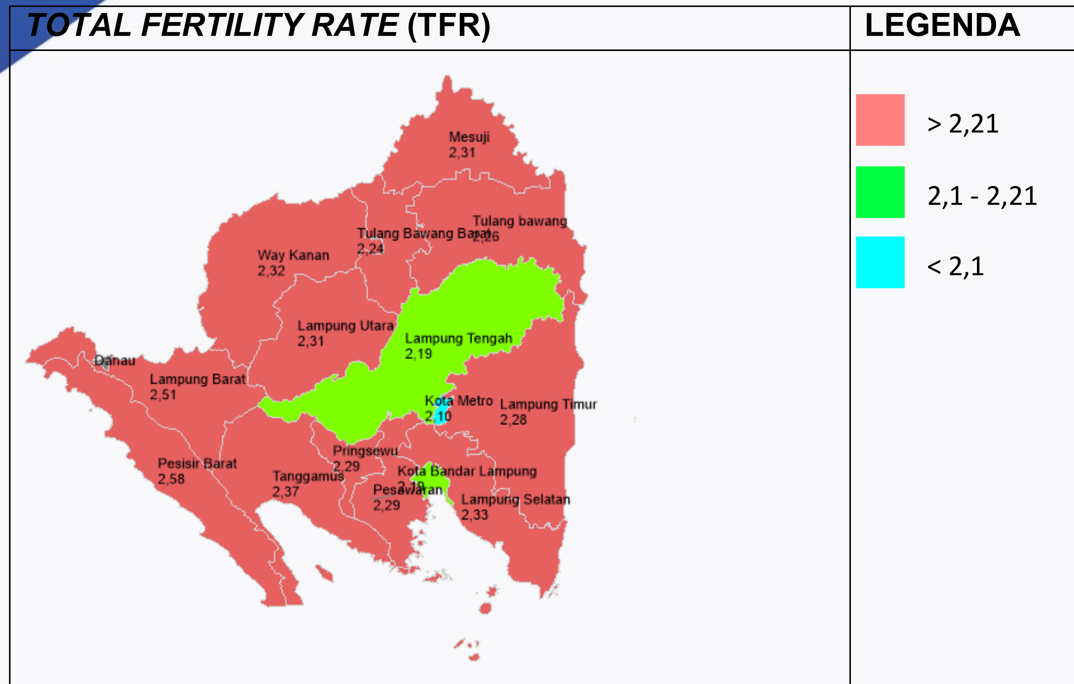
Pola yang berbeda ditampilkan antara mCPR dan MKJP pada Provinsi Bengkulu. Capaian mCPR pada peta sebelumnya terlihat cukup baik, namun ternyata untuk pencapaian MKJP tidak demikian. Terlihat pencapaian kabupaten/kota di Bengkulu unuk MKJP secara umum masih banyaak yang merah atau tidak mencapai target tahun 2022. Hanya Kabupaten Muko-Muko yang dapat mencapai target 2022 dan Kabupaten Bengkulu Selatan yang mencapai target 2024. Ini menunjukkan walaupun KB modernnya sudah baik, namun mayoritas masih menggunakan kontrasepsi jangka pendek yang memiliki risiko lebih tinggi untuk putus pakai yang mendorong terjadinya *unmet need* sehingga menyebabkan kehamilan yang tidak diinginkan.



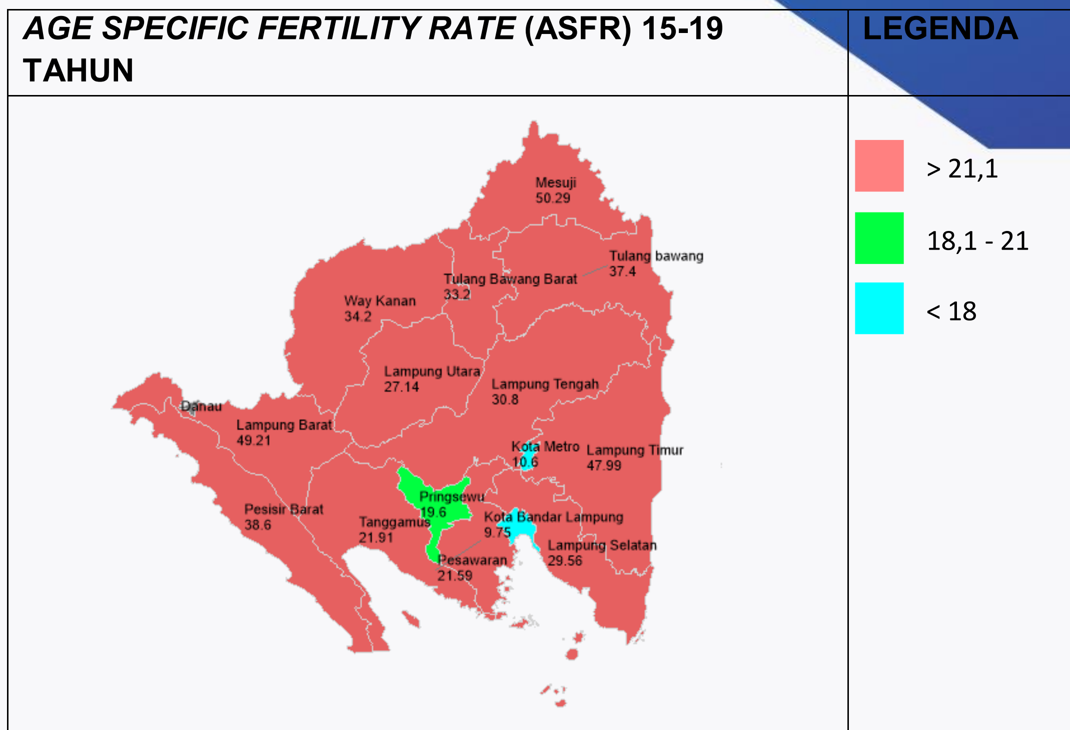
Peta indikator iBangga Provinsi Bengkulu di atas menunjukkan bahwa iBangga secara keseluruhan masih didominasi warna merah yang artinya secara umum kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu tidak berhasil mencapai target tahun 2022. Hanya ada empat kabupaten/kota yang berhasil mencapai target 2022 yaitu Muko-muko, Rejangleping, Kepahiyang dan Kota Bengkulu. Indeks iBangga masih perlu untuk ditingkatkan secara merata pada Provinsi Bengkulu.

4.2.8. Peta Parameter Provinsi Lampung

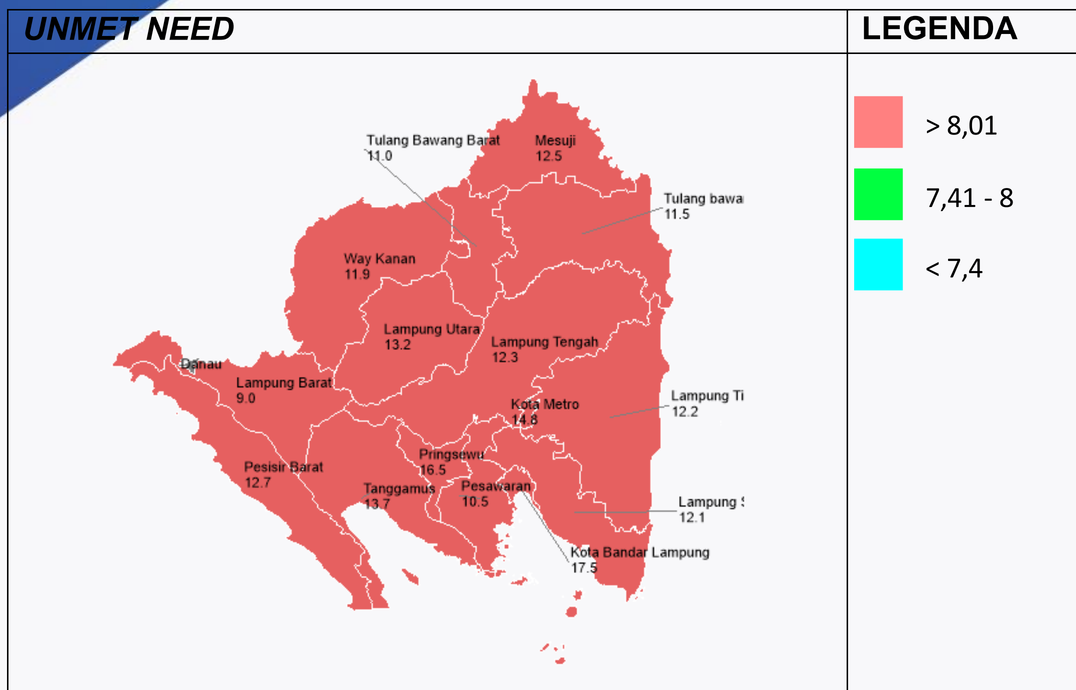
TOTAL FERTILITY RATE (TFR)	LEGENDA



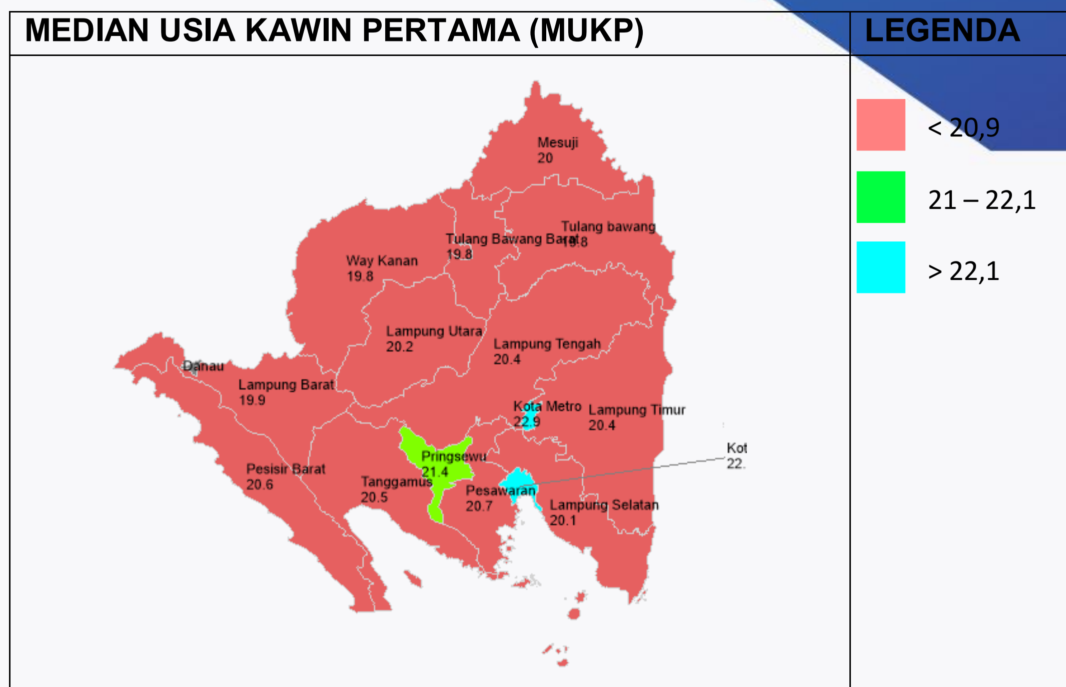
Berdasarkan Peta di atas dapat dilihat bahwa angka kelahiran total di Provinsi Lampung sebagian besar kabupaten/kota memiliki angka *Total Fertility Rate* (TFR) yang masih tinggi yaitu diatas 2,21. Hal ini terjadi pada hampir semua wilayah kabupaten kecuali Kabupaten Lampung Tengah yang memiliki angka TFR sebesar 2,19, sehingga sudah cukup rendah dan sudah memenuhi target TFR tahun 2022 yaitu berada pada angka 2,1-2,21. Sedangkan untuk wilayah kota semuanya sudah rendah, wilayah tersebut yaitu Kota Bandar Lampung angka TFR-nya sebesar 2,19 dan Kota Metro angka TFR-nya sebesar 2,1. Hal ini perlu menjadi perhatian bagi para pengambil kebijakan di wilayah kabupaten di Provinsi Lampung selain Kabupaten Lampung Tengah untuk melakukan upaya dan langkah-langkah dalam pengendalian kelahiran agar dapat menurunkan angka TFR di wilayahnya masing-masing.



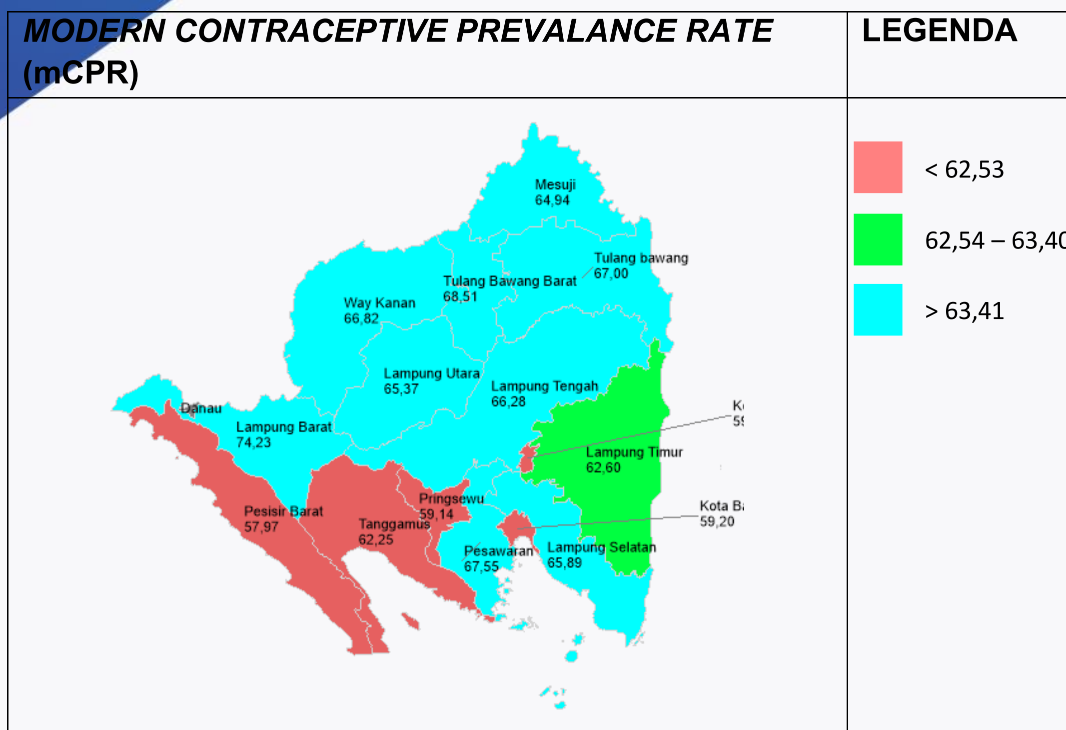
Berdasarkan peta di atas terlihat bahwa hampir semua wilayah kabupaten di Provinsi Lampung memiliki angka ASFR 15-19 yang tinggi yaitu lebih dari 21,1 kelahiran per 1000 penduduk perempuan usia 15-19 tahun. Sedangkan untuk 1 kabupaten lainnya yaitu Kabupaten Pringsewu sudah rendah yaitu sudah memenuhi target ASFR 15-19 tahun 2022 berada pada angka 18,1-21. Angka ASFR 15-19 tahun di Kabupaten Pringsewu tersebut sebesar 19,6. Sedangkan untuk wilayah kota yaitu Kota Bandar Lampung dan Kota Metro angka ASFR 15-19 tahun sudah rendah bahkan sudah mencapai target tahun 2024 yaitu di bawah 18 kelahiran per 1000 penduduk perempuan usia 15-19 tahun. Angka ASFR 15-18 tahun di Kota Bandar Lampung sebesar 9,75 kelahirandan ASFR 15-18 tahun di Kota Metro sebesar 10,6 kelahiran. Kondisi ASFR 15-19 tahun yang tinggi di hampir semua wilayah kabupaten di Provinsi Lampung ini perlu menjadi perhatian yaitu adanya peningkatan upaya untuk pencegahan pernikahan dini dan kelahiran pada remaja.



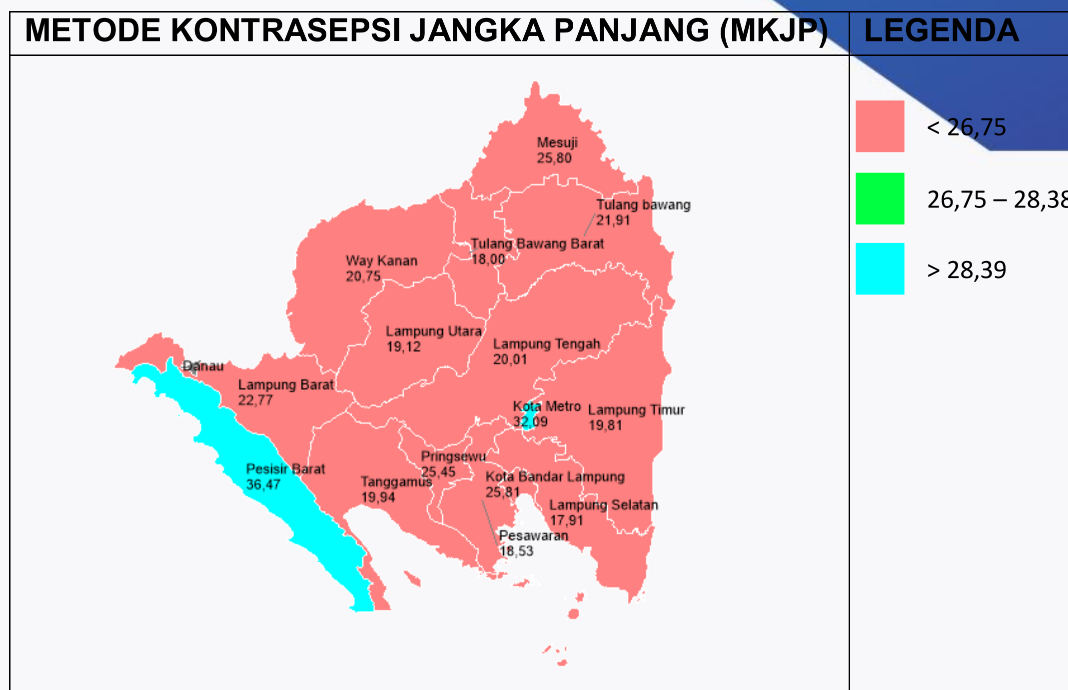
Berdasarkan peta di atas terlihat bahwa untuk indikator *unmet need* di Provinsi Lampung perlu perhatian yang besar karena seluruh kabupaten/kota baik wilayah kabupaten maupun wilayah Kota di Provinsi Lampung memiliki angka *unmet need* yang tinggi yaitu di atas 8,01 persen. sehingga perlu menjadi perhatian bagi para pengambil kebijakan di kabupaten/kota di Lampung tersebut yaitu dari segi penyediaan alokon, dan juga pelayanan keluarga berencana yang berkualitas dan dapat diakses oleh yang semua masyarakat yang membutuhkan di wilayahnya masing-masing.



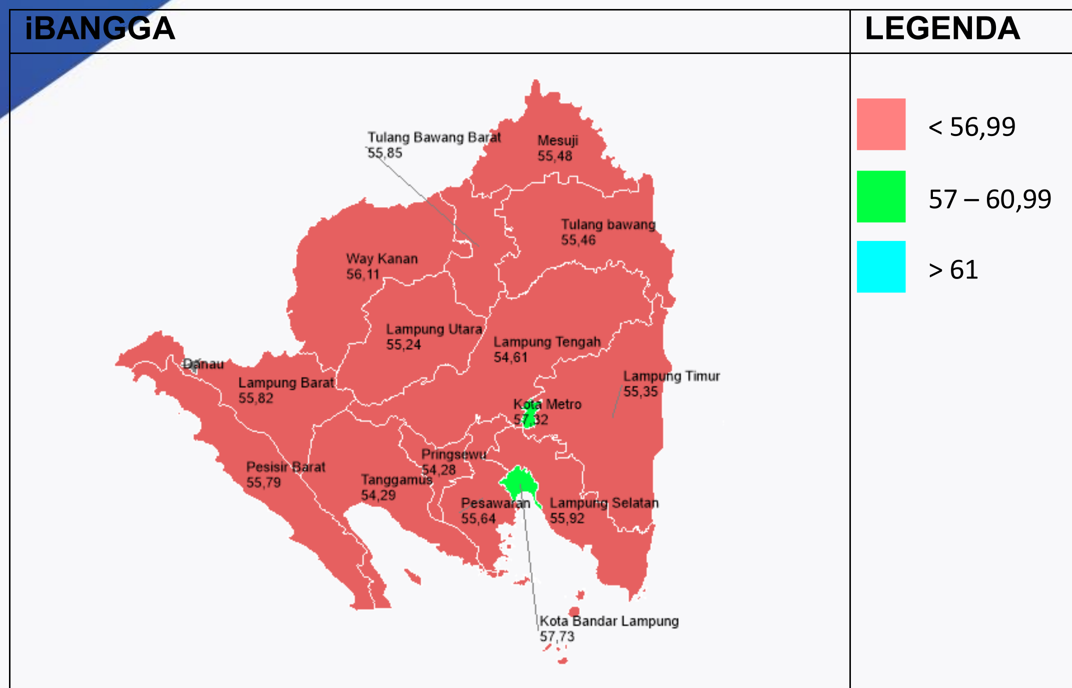
Berdasarkan peta di atas, terlihat bahwa sebagian besar wilayah berwarna merah artinya angka Median Usia Kawin Pertama (MUKP) di sebagian besar wilayah di Provinsi Lampung masih rendah, karena hampir semua wilayah kabupaten di Provinsi Lampung mempunyai angka di bawah target tahun 2022 yaitu 21 tahun, kecuali kabupaten Pringsewu yang memiliki angka MUKP yang sudah memiliki angka MUKP sebesar 21,4 tahun. Namun untuk wilayah kota di Provinsi Lampung yaitu Kota Bandar Lampung dan Kota Metro sudah tinggi bahkan sudah memenuhi target MUKP tahun 2024 yaitu di atas 22,1. Untuk semua wilayah kabupaten di Provinsi Lampung selain kabupaten Pringsewu, angka MUKP masih menjadi perhatian yang besar bagi pengambil kebijakan, sehingga kampanye untuk upaya Pendewasaan Perkawinan perlu lebih ditingkatkan di wilayah kabupaten di Provinsi Lampung.



Berdasarkan peta di atas terlihat bahwa untuk indikator mCPR di Provinsi Lampung sudah tinggi yaitu hampir seluruh kabupaten/kota sudah mencapai target mCPR Tahun 2022, bahkan sebagian besar wilayah yaitu 9 kabupaten dari 15 kabupaten/kota di Provinsi Lampung tersebut sudah memenuhi target mCPR tahun 2024 yaitu lebih dari 63,41 persen. Namun masih ada 5 kabupaten/kota yang angka mCPR masih di bawah 62,53. Kabupaten/kota tersebut yaitu Kota Bandar Lampung 59,20, Kota Metro sebesar 59, Kabupaten Pringsewu sebesar 59,14, Kabupaten Tanggamus sebesar 62,25 dan Kabupaten Pesisir Barat sebesar 57,97 persen. Hal ini perlu menjadi perhatian bagi pengambil kebijakan di 5 wilayah kabupaten/kota di Provinsi Lampung tersebut untuk meningkatkan kampanye program keluarga berencana khususnya sosialisasi penggunaan metode kontrasepsi modern.

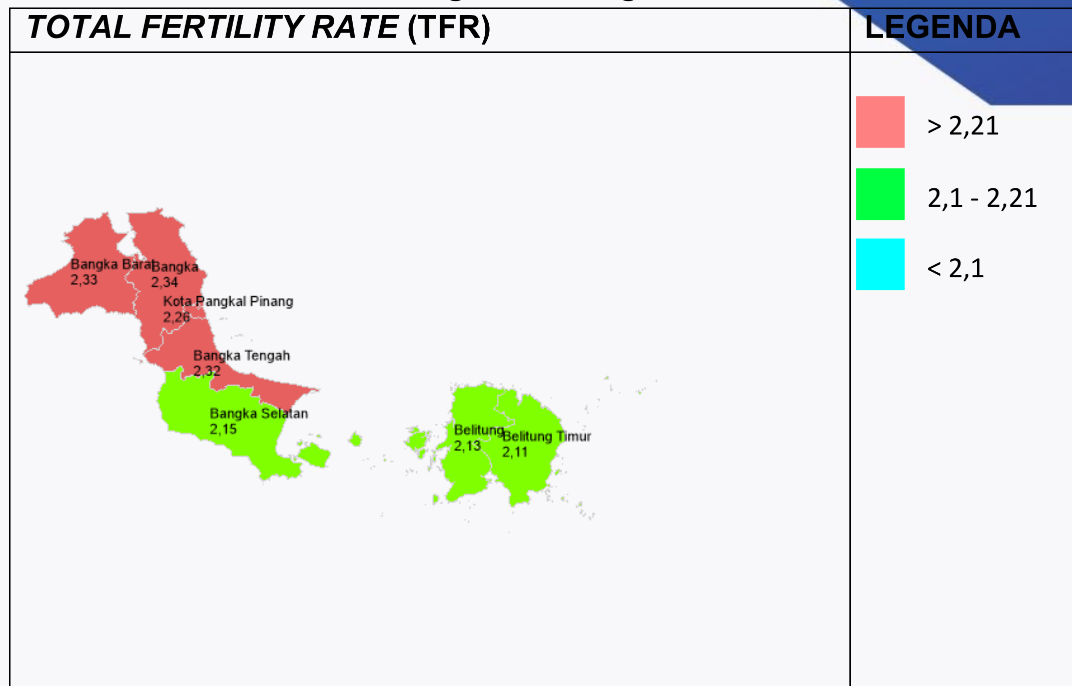


Berdasarkan peta di atas dapat dilihat bahwa hampir seluruh wilayah kabupaten/kota di Provinsi Lampung berwarna merah, artinya kabupaten/kota tersebut memiliki angka MKJP yang rendah di bawah target MKJP tahun 2022 yaitu di bawah angka 26,75 persen. Hal ini menjadi perhatian yang besar dari para pengambil kebijakan di kabupaten /kota di Lampung untuk meningkatkan angka MKJP di wilayah kabupaten/kota masing-masing. Namun ada 2 kabupaten/kota yang angka MKJP-nya sudah tinggi bahkan sudah memenuhi target MKJP tahun 2024 yaitu di atas 28,39. Kabupaten/kota tersebut yaitu Kota Metro angka MKJP sebesar 32,09 persen dan Kabupaten Pesisir Barat sebesar 36,47 persen.

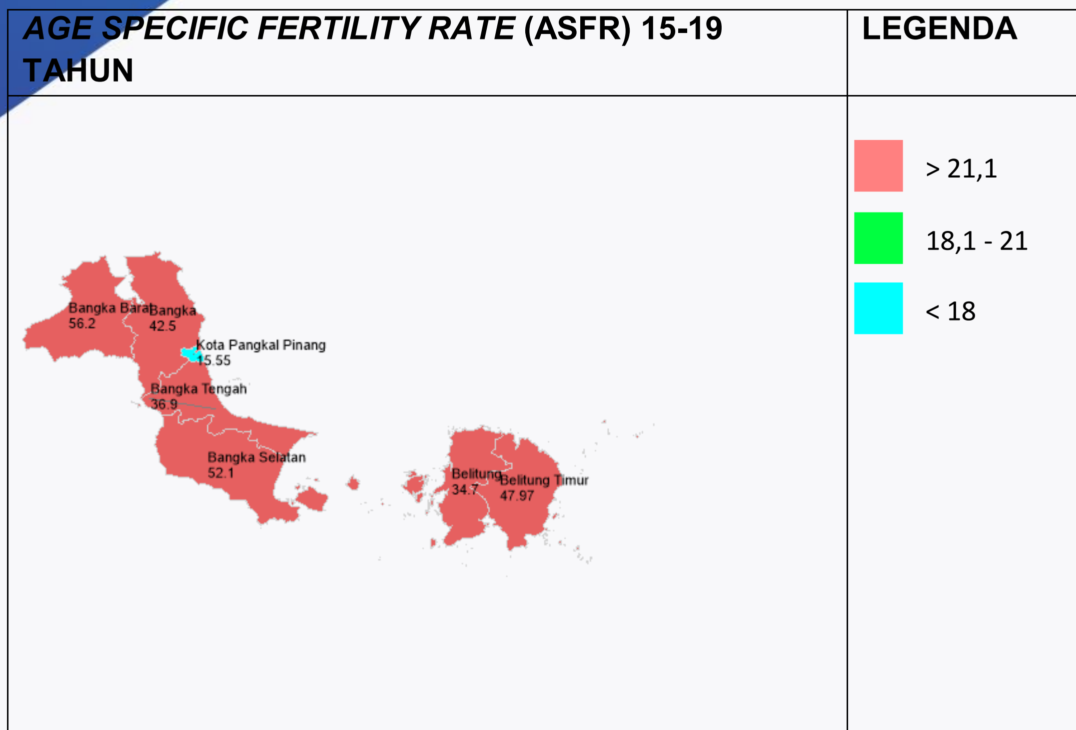


Berdasarkan peta di atas dapat dilihat bahwa angka indeks iBangga di hampir semua wilayah di Provinsi Lampung berwarna merah, artinya angka indeks iBangga masih rendah yaitu di bawah 56,99. Hal tersebut terjadi pada seluruh wilayah kabupaten di Provinsi Lampung. Sedangkan untuk wilayah kota sudah cukup tinggi, karena indeks iBangga di 2 wilayah kota di Provinsi Lampung tersebut sudah mencapai target iBangga tahun 2022 berada pada angka 57–60,99. Indeks iBangga pada 2 wilayah kota tersebut yaitu Kota Bandar Lampung sebesar 57,73 dan indeks iBangga Kota Metro sebesar 57,32. Kondisi capaian iBangga di semua wilayah kabupaten di Provinsi Lampung ini mengindikasikan bahwa peran, fungsi, dan kualitas keluarga yang ditunjukkan melalui dimensi ketenteraman, kemandirian, dan kebahagiaan keluarga masih belum maksimal, sehingga dibutuhkan kolaborasi berbagai sektor pembangunan terkait di wilayah masing-masing.

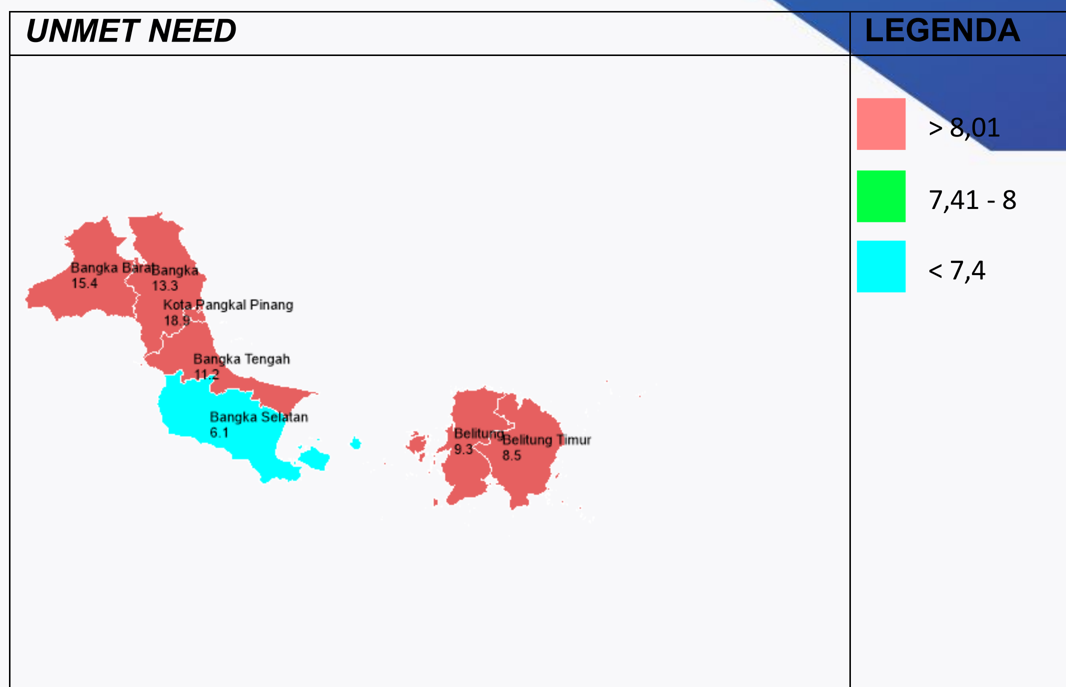
4.2.9. Peta Parameter Provinsi Bangka Belitung



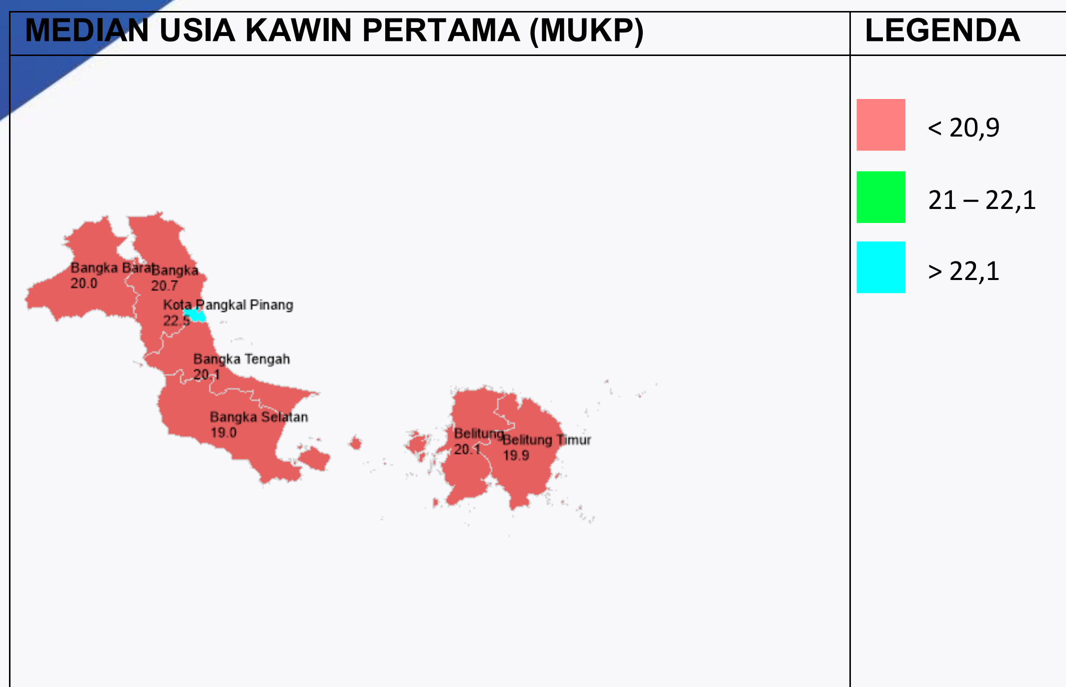
Berdasarkan Peta di atas dapat dilihat bahwa angka kelahiran total di Kepulauan Bangka Belitung sebagian besar kabupaten/kota memiliki angka *Total Fertility Rate* (TFR) yang masih tinggi yaitu diatas 2,21. Ada 4 kabupaten/kota dari 7 Kabupaten Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tersebut yang angka TFR-nya tinggi yaitu Kabupaten Bangka, Kabupaten Bangka Barat, Kabupaten Tengah dan Kota Pangkal Pinang. Sedangkan 3 kabupaten lainnya yang berada di wilayah bagian Selatan angka TFR-nya sudah cukup rendah mencapai target TFR tahun 2022 yaitu berada pada angka 2,1-2,21. Hal ini perlu menjadi perhatian bagi para pengambil kebijakan di 4 kabupaten/kota yang masih tinggi angka TFR-nya dan dilihat dari letak geografisnya berada di wilayah bagian Utara Provinsi Bangka Belitung. Hal ini perlu menjadi perhatian bagi para pengambil kebijakan di tingkat kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk melakukan upaya dan langkah-langkah pengendalian kelahiran agar dapat menurunkan angka TFR di wilayahnya masing-masing.

***AGE SPECIFIC FERTILITY RATE* (ASFR) 15-19 TAHUN**	**LEGENDA**
	> 21,1 18,1 - 21 < 18

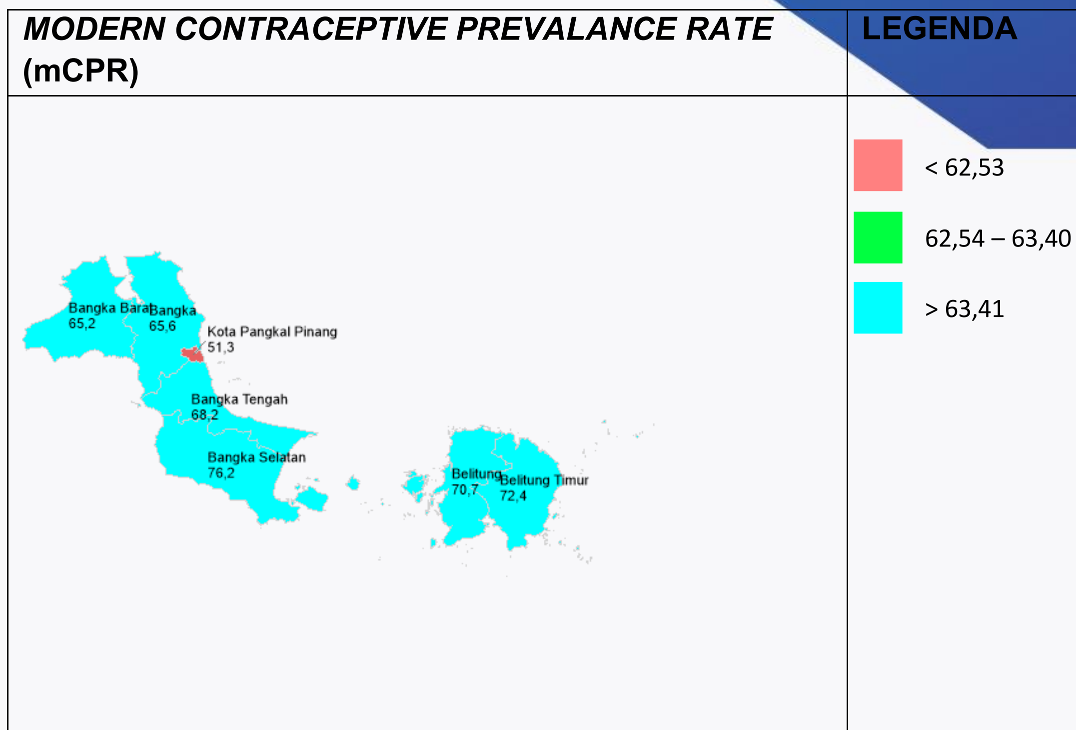
Berdasarkan peta di atas terlihat bahwa hampir semua wilayah kabupaten di Kepulauan Bangka Belitung memiliki angka ASFR 15-19 yang tinggi yaitu lebih dari 21,1 kelahiran per 1000 penduduk perempuan usia 15-19 tahun. Sedangkan untuk wilayah Kota dimana hanya ada satu wilayah yaitu Kota Pangkal Pinang yang angka ASFR 15-19 tahun sudah rendah bahkan sudah mencapai target tahun 2024 yaitu di bawah 18 kelahiran yaitu memiliki angka ASFR 15-19 sebesar 15,55 kelahiran per 1000 penduduk perempuan usia 15-19 tahun. Kondisi ASFR 15-19 tahun yang tinggi di semua wilayah kabupaten di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini perlu menjadi perhatian yaitu adanya peningkatan upaya untuk pencegahan pernikahan dini dan kelahiran pada remaja.



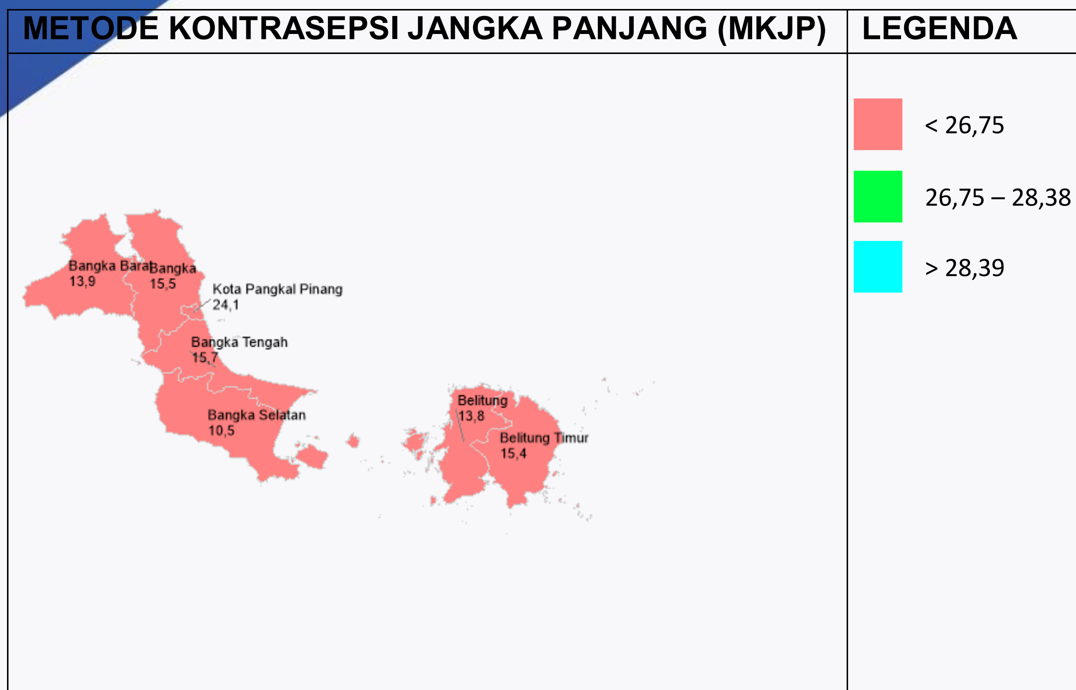
Berdasarkan peta di atas terlihat bahwa untuk indikator *unmet need* di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung perlu perhatian yang besar karena hampir semua kabupaten/kota di Kepulauan Bangka Belitung memiliki angka *unmet need* yang tinggi yaitu di atas 8,01 persen, hanya ada satu kabupaten yang angka unmet neednya rendah bahkan sudah mencapai target unmet need tahun 2024 di bawah 7,4 yaitu kabupaten Bangka Selatan sebesar 6,1 persen. sehingga perlu menjadi perhatian bagi para pengambil kebijakan di kabupaten/kota di Kepulauan Bangka Belitung tersebut yaitu dari segi penyediaan alokon, dan juga pelayanan keluarga berencana yang berkualitas yang dapat diakses oleh yang semua masyarakat yang membutuhkan di wilayahnya masing-masing.



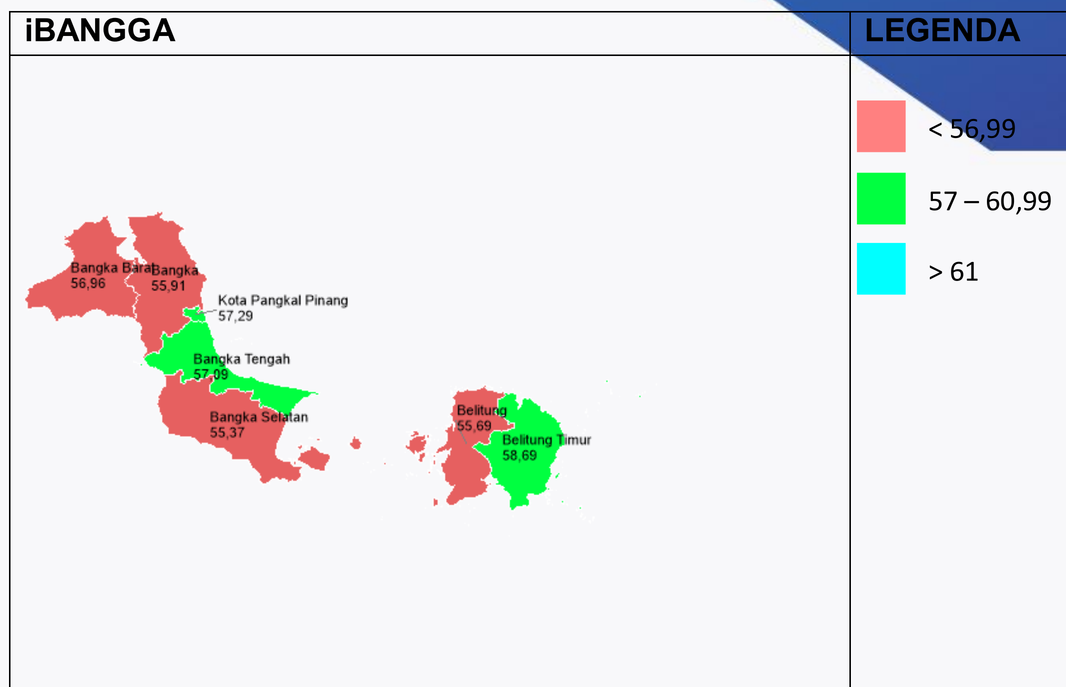
Berdasarkan peta di atas, terlihat bahwa angka Median Usia Kawin Pertama (MUKP) di Provinsi Kepulauan Bangka rendah. Semua wilayah kota mempunyai angka MUKP di bawah 21 tahun. Sedangkan di wilayah kota angka MUKP sudah tinggi bahkan sudah memenuhi target MUKP tahun 2024 yaitu lebih dari 22,1 tahun. Kondisi angka MUKP yang tinggi di semua wilayah kabupaten di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini masih menjadi perhatian bagi pengambil kebijakan, sehingga kampanye untuk upaya Pendewasaan Perkawinan masih perlu lebih ditingkatkan.



Berdasarkan peta di atas terlihat bahwa untuk indikator mCPR di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sudah tinggi di hampir semua kabupaten/kota yaitu lebih dari 63,41 persen yang merupakan target mCPR tahun 2024. Namun ada satu wilayah yaitu wilayah kota Pangkal Pinang angka mCPR rendah yaitu sebesar 51,3 persen di bawah angka 62,53 persen. Hal ini perlu menjadi perhatian bagi pengambil kebijakan di Kota Pangkal Pinang untuk meningkatkan kampanye program keluarga berencana khususnya sosialisasi penggunaan metode kontrasepsi modern.

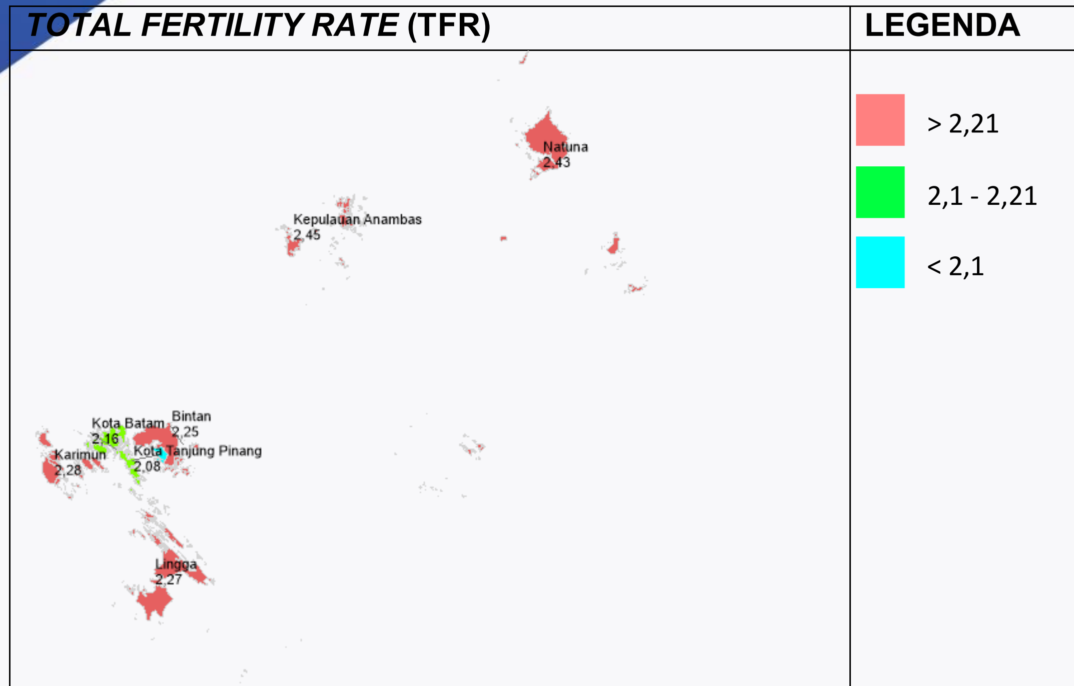


Berdasarkan peta di atas dapat dilihat bahwa seluruh wilayah kabupaten/kota di provinsi Bangka Belitung berwarna merah, artinya seluruh wilayah tersebut memiliki angka MKJP yang rendah di bawah target MKJP tahun 2022 yaitu di bawah angka 26,75 persen. Kondisi ini menunjukan bahwa dalam kebijakan setiap kabupaten/kota di Provinsi Bangka Belitung perlu untuk meningkakan upaya sosialisasi terkait penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang.



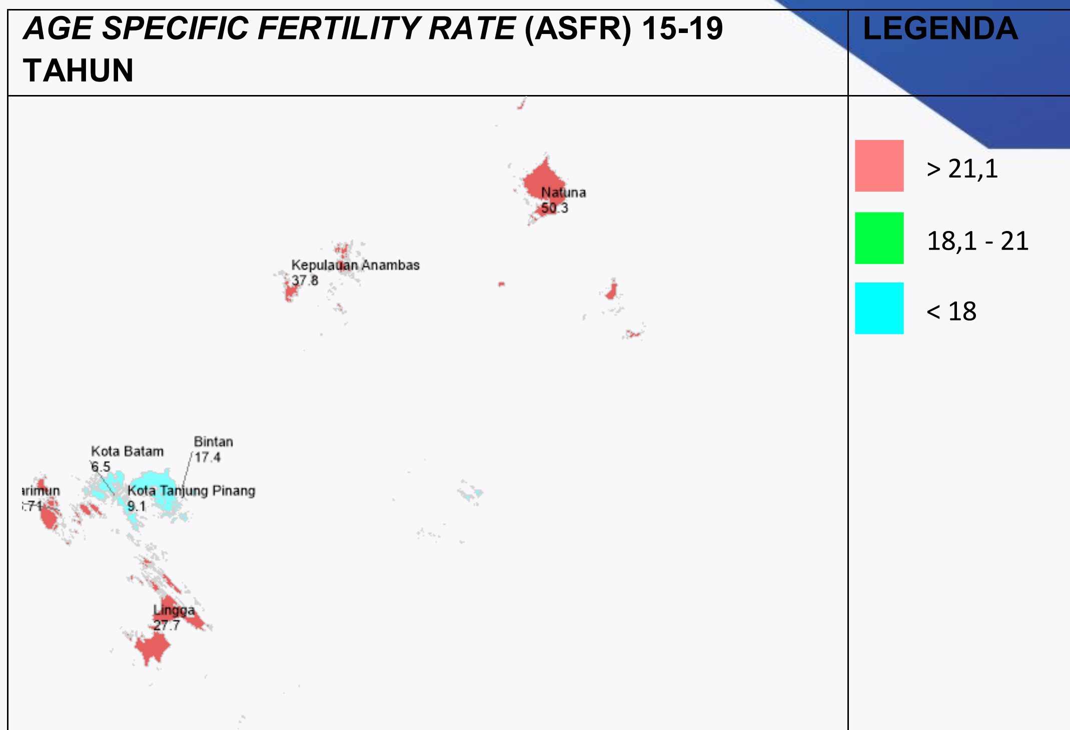
Berdasarkan peta di atas dapat dilihat bahwa angka indeks iBangga di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung masih rendah, karena hampir 4 wilayah kabupaten dari 7 kabupaten/kota di Provinsi Bangka Belitung di bawah angka 56,99. mencapai target indikator iBangga tahun 2022 yaitu 57 persen atau lebih. Namun untuk 3 wilayah kabupaten/kota sudah mencapai target indikator iBangga tahun 2022 yaitu 57 persen atau lebih. Kabupaten/kota tersebut yaitu kabupaten Belitung Timur sebesar 58,69, Kabupaten Bangka Tengah sebesar 57,09 dan Kota Pangkal Pinang sebesar 57,29. Untuk kondisi capaian iBangga yang rendah pada 4 kabupaten ini mengindikasikan bahwa peran, fungsi, dan kualitas keluarga yang ditunjukkan melalui dimensi ketenteraman, kemandirian, dan kebahagiaan keluarga masih belum maksimal, sehingga dibutuhkan kolaborasi berbagai sektor pembangunan terkait di wilayah masing-masing.

4.2.10. Peta Parameter Provinsi Kepulauan Riau

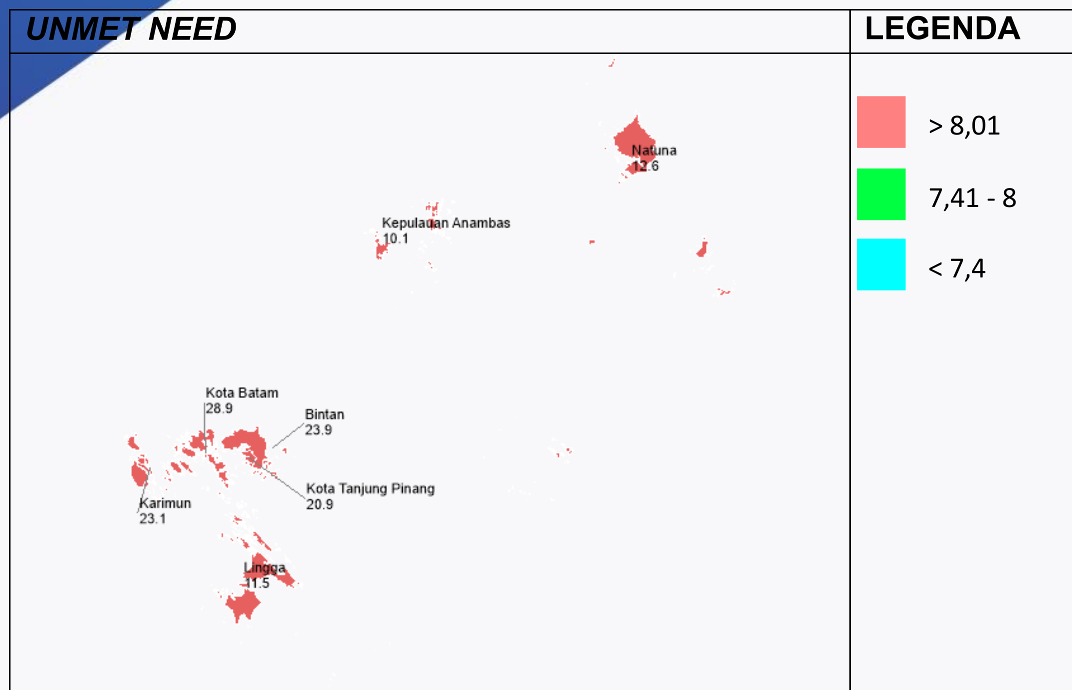


Berdasarkan Peta di atas dapat dilihat bahwa angka kelahiran total di Kepulauan Riau sebagian besar kabupaten/kota memiliki angka *Total Fertility Rate* (TFR) yang masih tinggi yaitu diatas 2,21. Hal tersebut terjadi pada seluruh wilayah kabupaten. Sedangkan untuk wilayah kota angka TFR sudah rendah yaitu berada pada angka 2,1–2,21 artinya sudah memenuhi target TFR tahun 2022. Angka TFR untuk wilayah kota tersebut yaitu Kota Batam sebesar 2,16 dan Kota Tanjung Pinang sebesar 2,08. Kondisi angka TFR yang masih tinggi untuk wilayah kabupaten tersebut perlu menjadi perhatian bagi para pengambil kebijakan di wilayah kabupaten di provinsi Kepulauan Riau untuk melakukan upaya dan langkah-langkah dalam pengendalian kelahiran agar dapat menurunkan angka TFR di wilayahnya masing-masing.

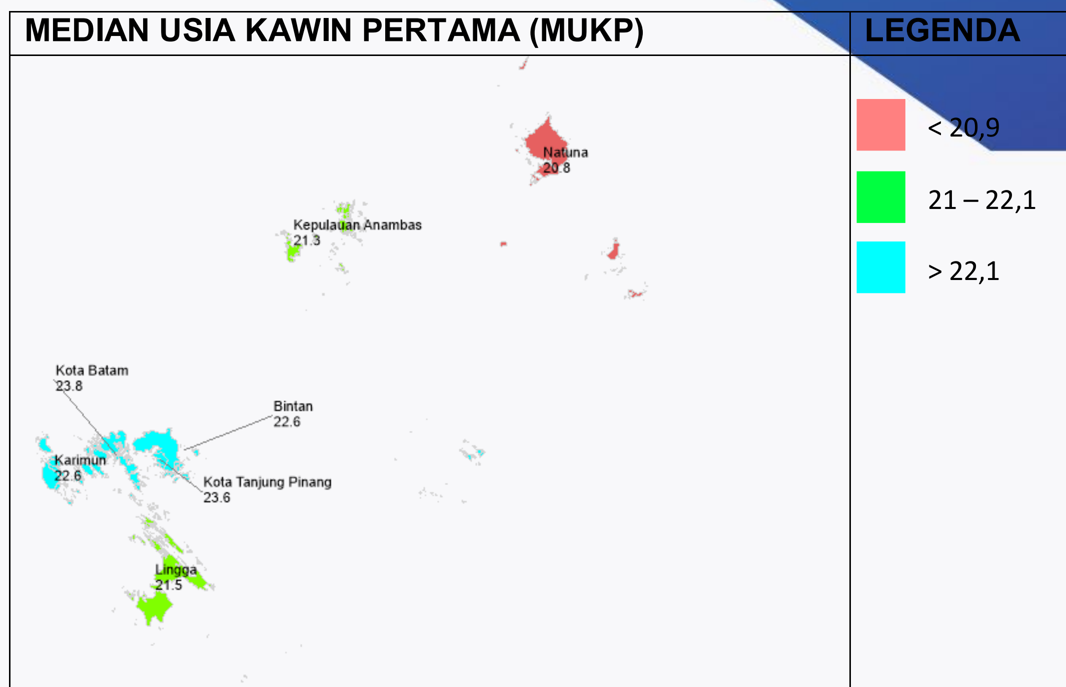
***AGE SPECIFIC FERTILITY RATE* (ASFR) 15-19 TAHUN**	**LEGENDA**



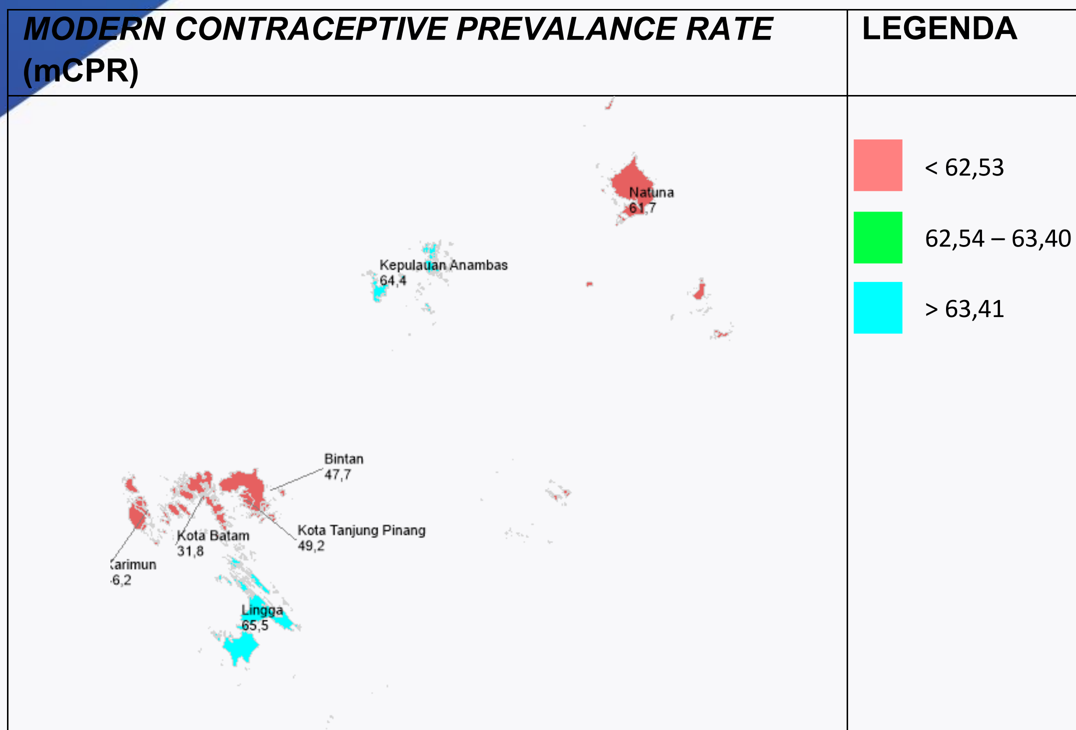
Berdasarkan peta di atas terlihat bahwa hampir semua wilayah kabupaten di Kepulauan Riau memiliki angka ASFR 15-19 yang tinggi yaitu di atas 21,1 kelahiran per 1000 penduduk perempuan usia 15-19 tahun. Sedangkan untuk 1 wilayah kabupaten lainnya yaitu Kabupaten Bintan dan 2 wilayah kota yaitu Kota Batam dan Kota Tanjung Pinang angka ASFR 15-19 tahun sudah rendah bahkan sudah memenuhi target ASFR 15-19 tahun 2024 yaitu di bawah 18 kelahiran per 1000 penduduk perempuan usia 15-19 tahun. Angka ASFR 15-19 tahun yang sudah rendah tersebut yaitu ASFR 15-19 tahun di Kabupaten Bintan sebesar 17,4 kelahiran, di Kota Batam sebesar 6,5 kelahiran dan di kota Tanjung Pinang sebesar 9,1 kelahiran. Kondisi ASFR 15-19 tahun yang tinggi di sebagian besar wilayah kabupaten di Provinsi Kepulauan Riau ini perlu menjadi perhatian yaitu adanya peningkatan upaya untuk pencegahan pernikahan dini dan kelahiran pada remaja.



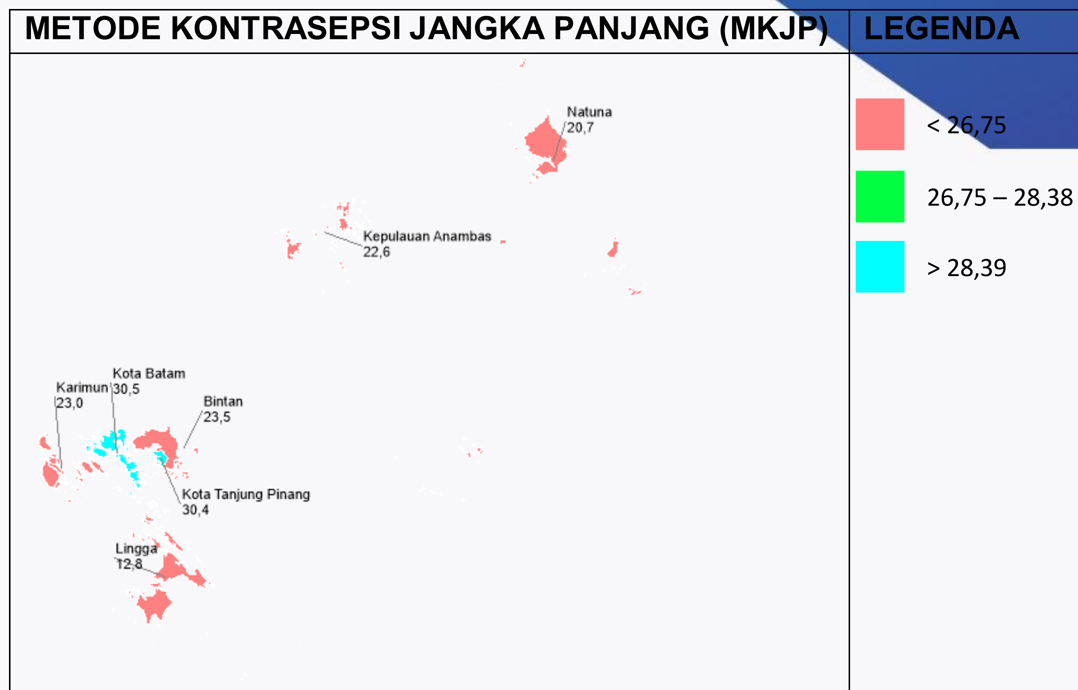
Berdasarkan peta di atas terlihat bahwa untuk indikator *unmet need* di Provinsi Kepulauan Riau perlu perhatian yang besar karena seluruh kabupaten/kota baik wilayah kabupaten maupun wilayah Kota memiliki angka *unmet need* yang tinggi yaitu di atas 8,01 persen. Angka unmet need tertinggi di Kota Batam sebesar 28,9 persen. Kondisi ini perlu menjadi perhatian bagi para pengambil kebijakan di kabupaten/kota di Kepulauan Riau tersebut yaitu dari segi penyediaan alokon, dan juga pelayanan keluarga berencana yang berkualitas yang dapat diakses oleh yang semua masyarakat yang membutuhkan di wilayahnya masing-masing.



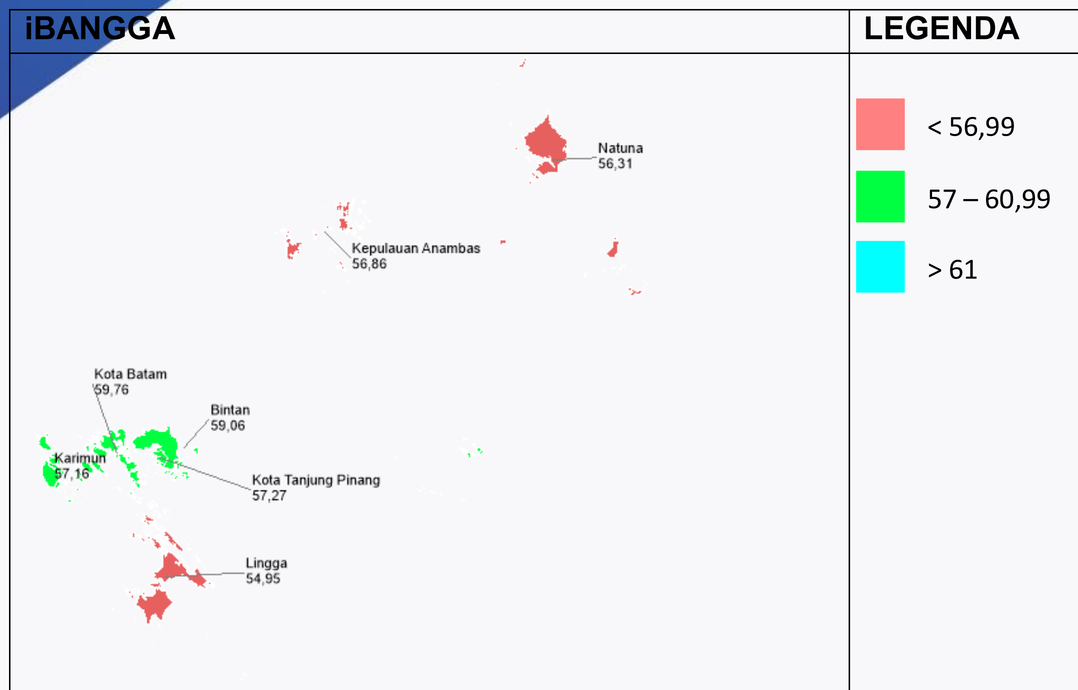
Berdasarkan peta di atas, terlihat bahwa angka Median Usia Kawin Pertama (MUKP) di Kepulauan Riau merupakan indikator yang lebih baik dibanding indikator lainnya, karena hampir semua kabupaten/kota mempunyai angka yang sudah cukup tinggi dan sudah mencapai target tahun 2022 yaitu 21 tahun ke atas, bahkan untuk Kota Batam, Kota Tanjung Pinag, Kabupaten Karimun dan Kabupaten Bintan angka MUKP sudah memenuhi target MUKP tahun 2024. Namun masih ada 1 kabupaten yaitu kabupaten Natuna yang MUKP-nya masih termasuk rendah karena masih di bawah 20,9 tahun yaitu sebesar 20,8 tahun. Dengan kondisi angka MUKP yang sudah cukup tinggi menunjukan kesadaran akan usia kawin sudah cukup tinggi, sehingga kondisi ini agar dapat dipertahankan. Untuk kabupaten Natuna masih menjadi perhatian bagi pengambil kebijakan, sehingga kampanye untuk upaya Pendewasaan Perkawinan masih perlu lebih ditingkatkan.



Berdasarkan peta di atas terlihat bahwa untuk indikator mCPR di sebagian besar kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Riau masih rendah yaitu di bawah 62,53 persen. Namun ada 2 kabupaten yang sudah tinggi bahkan sudah memenuhi target mCPR tahun 2024 yaitu lebih dari 63,41 persen. Kondisi ini, dimana sebagian besar wilayah di Provinsi Kepulauan Riau dengan capaian mCPR rendah tersebut perlu menjadi perhatian yang cukup besar bagi pengambil kebijakan kabupaten/kota tersebut untuk meningkatkan kampanye program keluarga berencana khususnya sosialisasi penggunaan metode kontrasepsi modern.

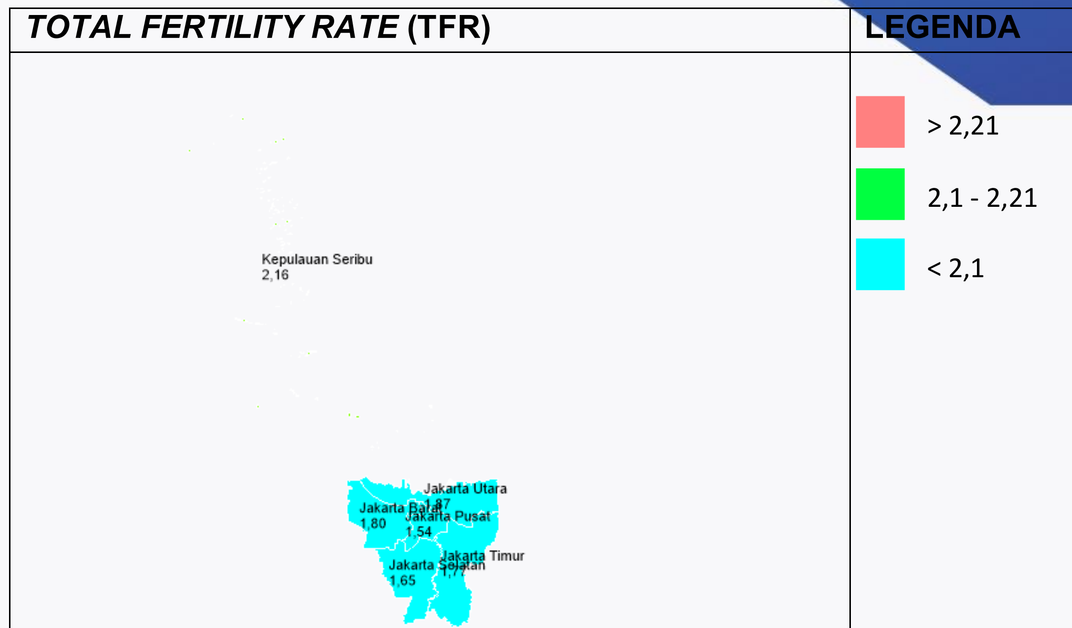


Berdasarkan peta di atas dapat dilihat bahwa hampir seluruh wilayah kabupaten/kota Provinsi Kepulauan Riau berwarna merah yang artinya memiliki angka MKJP yang rendah di bawah target MKJP tahun 2022 yaitu di bawah angka 26,75 persen, sehingga perlu ada peningkatan. Hal ini terjadi pada semua wilayah kabupaten. Sedangkan untuk wilayah Kota angka MKJP sudah memenuhi target MKJP tahun 2024 yaitu di atas 28,39. Angka MKJP di wilayah Kota tersebut yaitu Kota Batam sebesar 30,5 persen dan Kota Tanjung Pinang sebesar 30,4 persen. Kondisi angka MKJP yang rendah yang terjadi pada semua wilayah kabupaten di Provinsi Kepulauan Riau ini menunjukan bahwa dalam kebijakan setiap wilayah kabupaten di Provinsi Bangka Belitung tersebut perlu untuk meningkakan upaya sosialisasi terkait penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang.

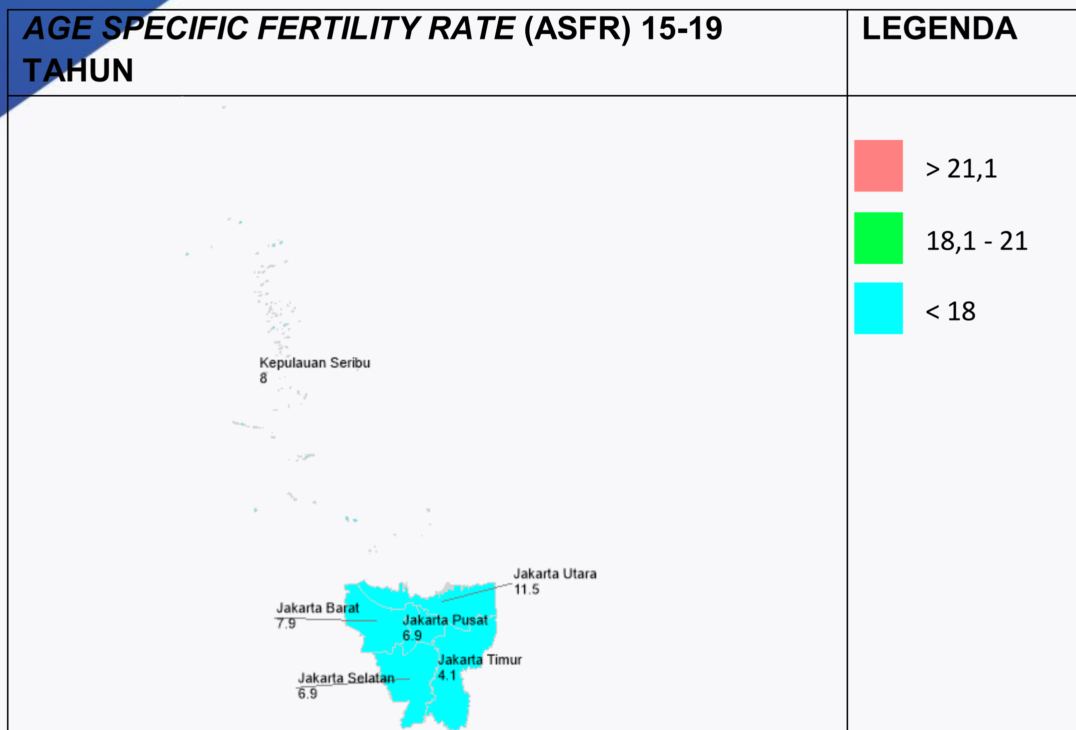


Berdasarkan peta di atas dapat dilihat bahwa secara umum angka indeks iBangga di Provinsi Kepulauan Riau sudah cukup tinggi, karena indeks iBangga di 4 wilayah kabupaten/kota dari 7 kabupaten/kota yang ada di Kepulauan Riau berada pada angka 57-60,99. Namun untuk 3 kabupaten masih berada di bawah 56,99. Indeks iBangga pada kabupaten tersebut yaitu Kabupaten Natuna sebesar 56,31, Kabupaten Kepulauan Anambas sebesar 56,86 dan Kabupaten Lingga sebesar 54,95. Hal ini mengindikasikan bahwa di 3 wilayah kabupaten tersebut, peran, fungsi, dan kualitas keluarga yang ditunjukkan melalui dimensi ketenteraman, kemandirian, dan kebahagiaan keluarga masih belum maksimal, sehingga dibutuhkan kolaborasi berbagai sektor pembangunan terkait di wilayah masing-masing

4.2.11. Peta Parameter Provinsi DKI Jakarta

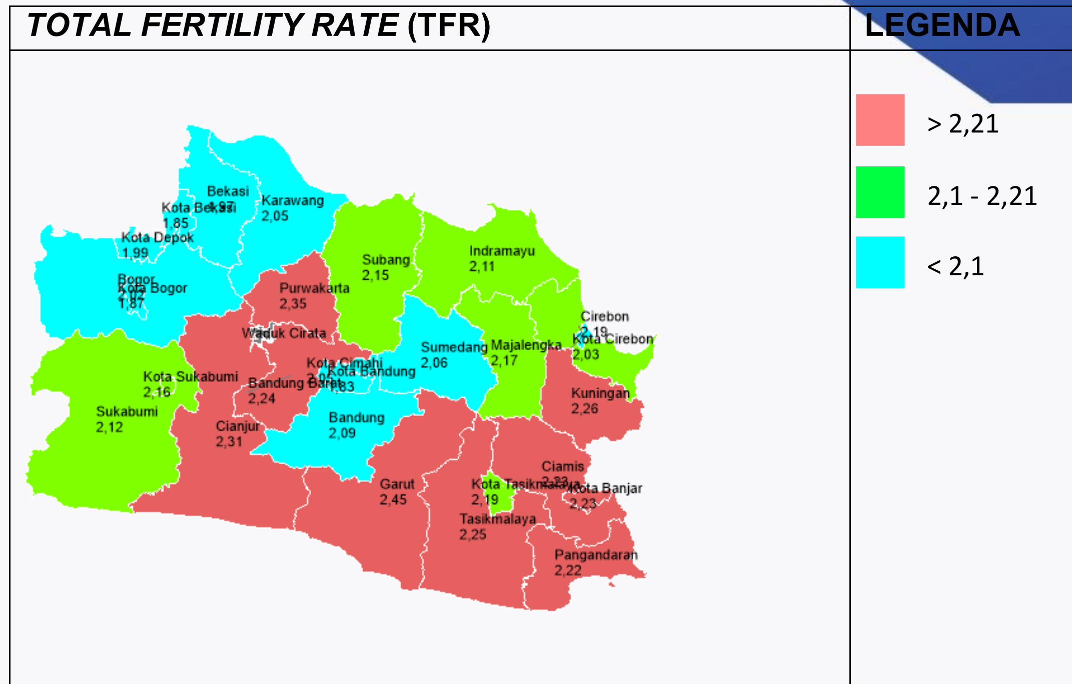


Berdasarkan peta di atas dapat dilihat bahwa angka TFR di Provinsi DKI Jakarta sudah sangat baik karena seluruh kabupaten/kota di DKI Jakarta memiliki TFR kurang dari 2,1. Meskipun demikian, patut menjadi perhatian bagi para pengambil kebijakan di kabupaten/kota di DKI Jakarta dalam penyusunan perencanaan pembangunan kependudukan khususnya terkait kebijakan pengendalian kelahiran mengingat TFR di Provinsi DKI Jakarta yang sudah rendah.



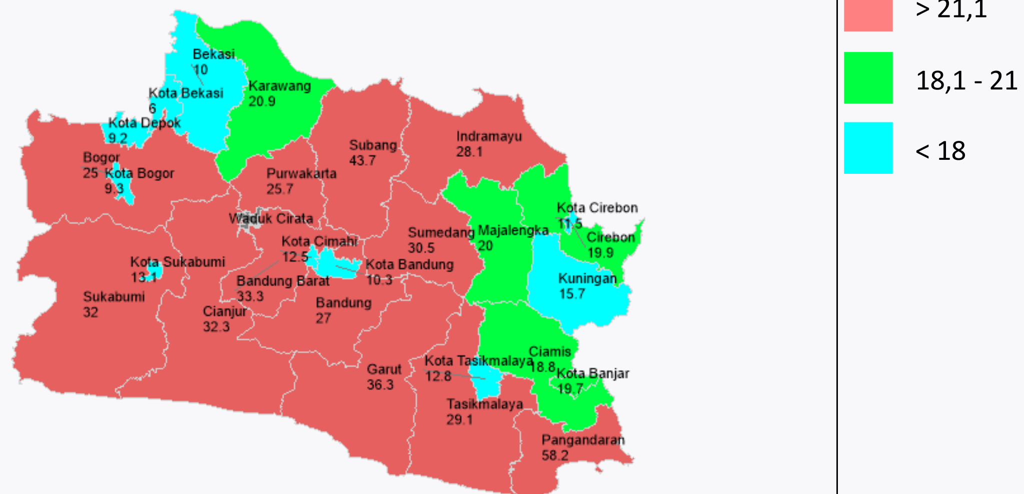
Berdasarkan peta di atas terlihat bahwa seluruh kabupaten/kota di Provinsi DKI Jakarta memiliki angka ASFR 15-19 tahun di bawah 18 kelahiran per 1000 perempuan usia 15 – 19 tahun sehingga dapat diartikan bahwa pencapaian indikator ASFR 15 – 19 tahun sudah sangat baik. Akan tetapi, angka ASFR 15-19 tahun masih harus tetap ditargetkan untuk turun karena terkait dengan isu kelahiran pada usia remaja.

4.2.12. Peta Parameter Provinsi Jawa Barat

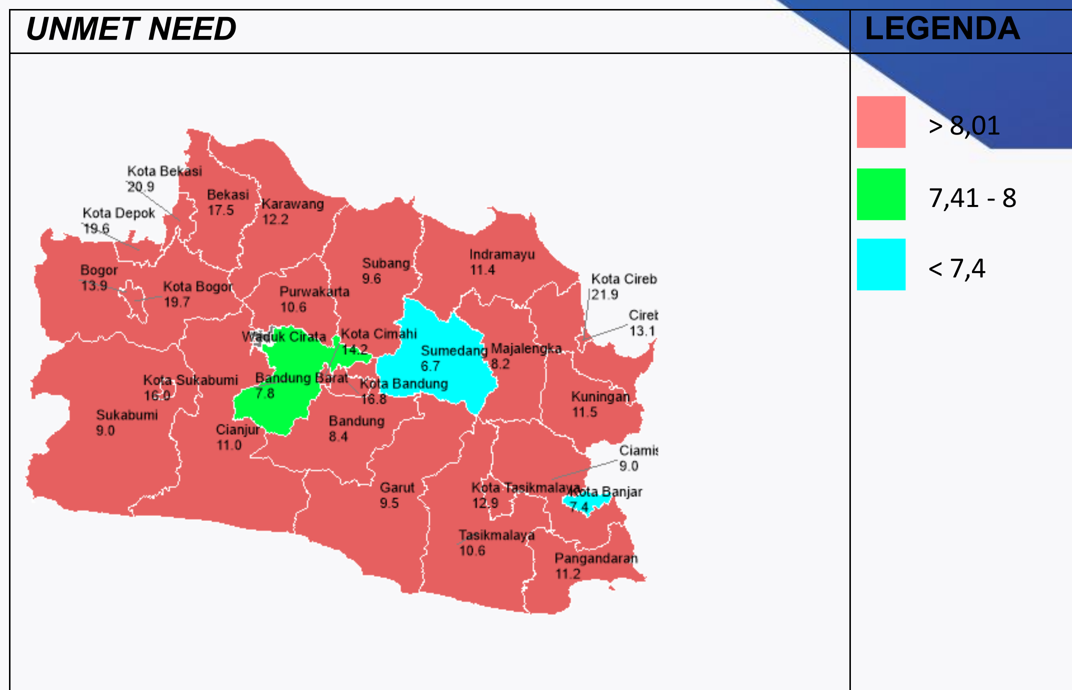


Peta di atas menunjukkan bahwa angka TFR di Provinsi Jawa Barat cukup baik karena 11 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat telah mencapai TFR kurang dari 2,1 yaitu Kabupaten Bekasi, Kabupaten Karawang, Kabupaten Bogor, Kabupaten Bandung, Kabupaten Sumedang, Kota Bandung, Kota Bogor, Kota Cirebon, Kota Depok, Kota Bekasi, Kota Cimahi. Akan tetapi, masih terdapat 9 kabupaten/kota yang memiliki TFR lebih dari 2,21 yang perlu menjadi perhatian karena belum mencapai target indikator TFR di tahun 2022 antara lain Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Kuningan, Kota Banjar, Kabupaten Pangandaran.

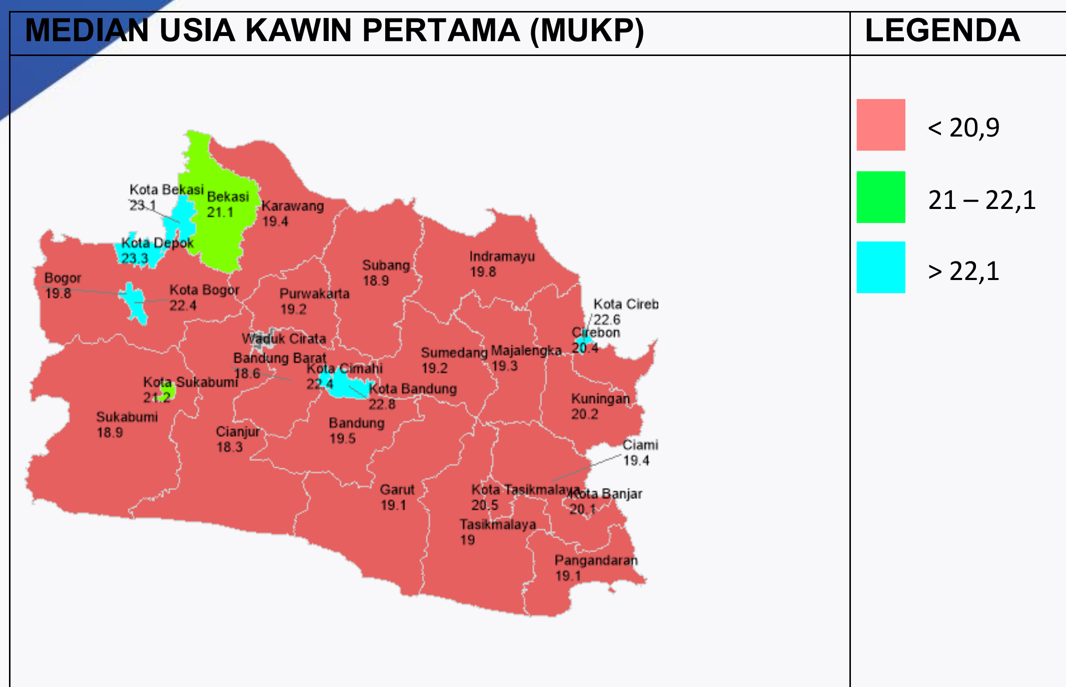
***AGE SPECIFIC FERTILITY RATE* (ASFR) 15-19 TAHUN**	**LEGENDA**



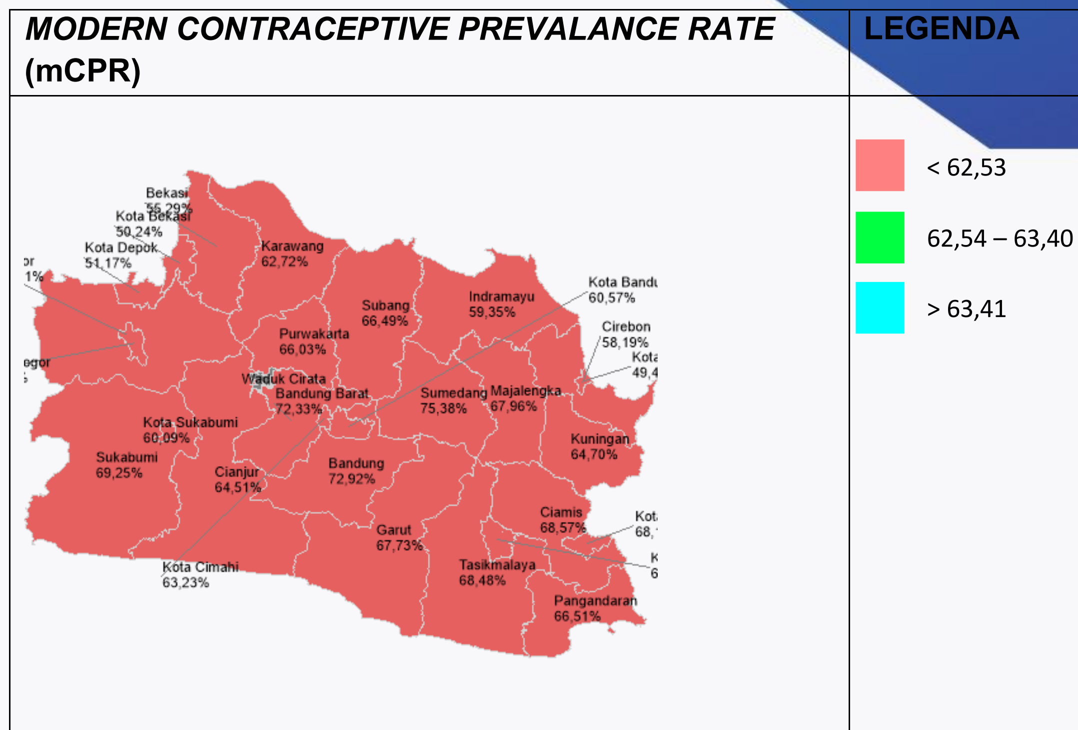
Berdasarkan peta di atas terlihat bahwa capaian indikator ASFR 15-19 tahun di Provinsi Jawa Barat belum optimal karena sebagian besar kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat memiliki angka ASFR 15-19 tahun di atas 21,1 kelahiran per 1000 penduduk perempuan 15-19 tahun. Hanya Kota Depok, Kota Bogor, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Karawang, Kota Sukabumi, Kota Bogor, Kota Bandung, Kota Tasikmalaya, Kota Banjar, Ciamis, Kuningan, Majalengka, Kota Cirebon dan Kabupaten Cirebon yang sudah mencapai target ASFR 15-19 tahun. Akan tetapi, masih diperlukan upaya untuk mencegah pernikahan dini dan kelahiran pada remaja pada kabupaten/kota yang masih belum mencapai target.



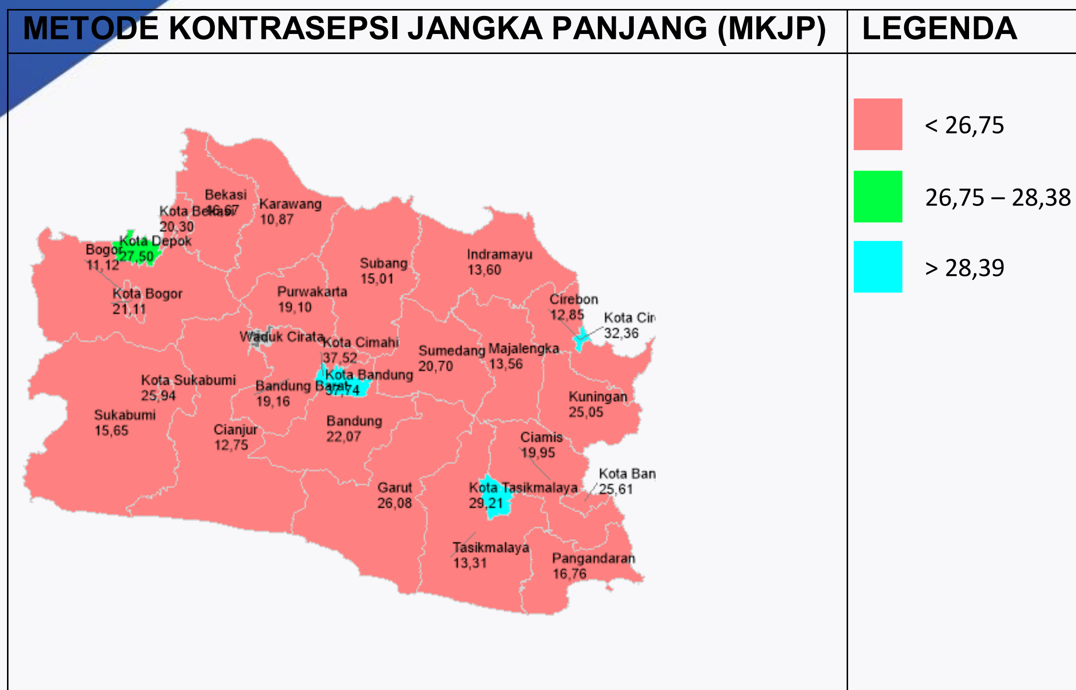
Peta terkait pencapaian indikator *unmet need* pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat di atas menunjukkan bahwa hanya Kabupaten Bandung Barat dan Kabupaten Sumedang, dan Kota Banjar yang telah mencapai target indikator *unmet need* di bawah 8,01 persen. Dengan demikian, permasalahan terkait *unmet need* ternyata menjadi tantangan di Provinsi Jawa Barat sehingga memerlukan penanganan khusus.



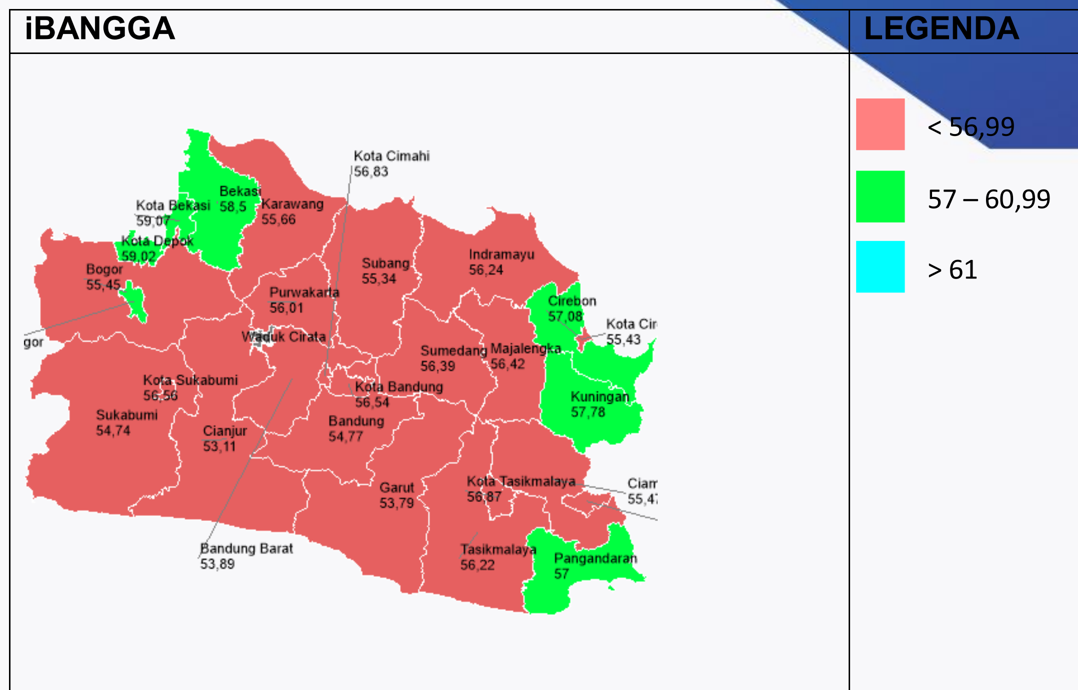
Berdasarkan peta di atas, terlihat bahwa angka Median Usia Kawin Pertama (MUKP) di Provinsi Jawa Barat belum baik karena hanya sebagian besar kabupaten/kota belum mencapai target MUKP tahun 2022. Sementara itu, terdapat 7 kabupaten/kota lainnya yang sudah mencapai target yaitu 21 tahun ke atas yaitu Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, Kota Depok, Kota Bogor, Kota Bandung, Kota Cimahi, dan Kota Cirebon,



Peta di atas menunjukkan bahwa pencapaian indikator mCPR di Provinsi Jawa Barat perlu mendapat perhatian lebih karena capaian indikator mCPR seluruh kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat masih sangat rendah dan belum mencapai target yang ditetapkan. Pemakaian kontrasepsi modern dibutuhkan dalam upaya menurunkan angka kehamilan yang tidak diinginkan sehingga perlu adanya upaya peningkatan pemakaian kontrasepsi modern melalui sosialisasi di berbagai media secara masif.

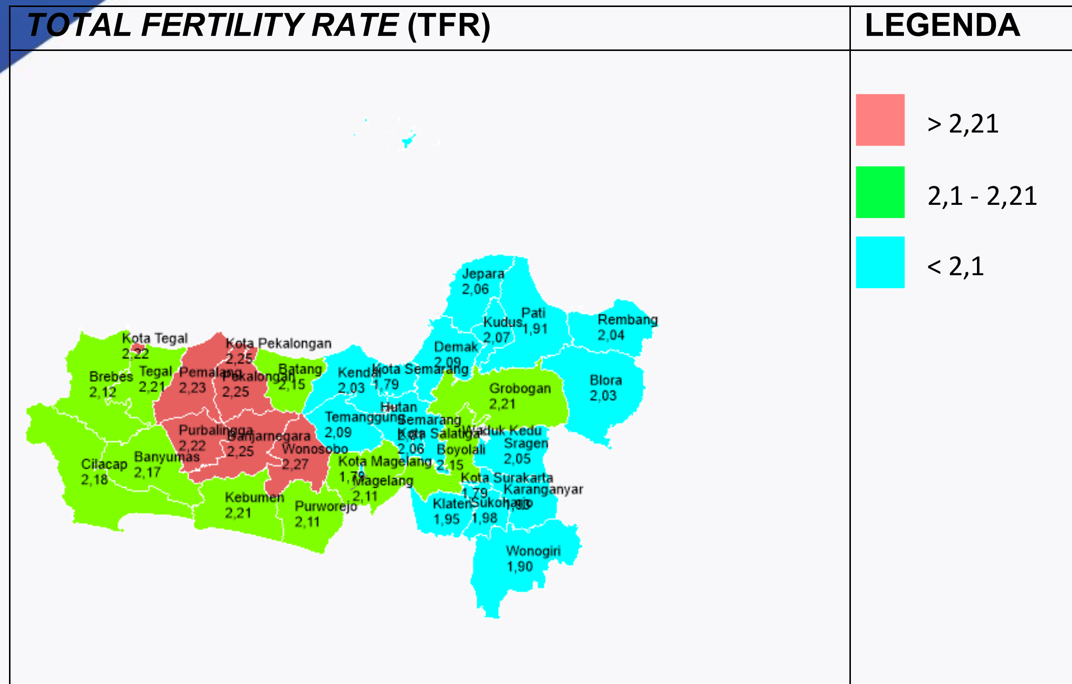


Berdasarkan peta di atas dapat terlihat bahwa hanya terdapat empat kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat yang sudah mencapai target MKJP yaitu 26,75 persen ke atas yaitu Kota Depok, Kota Bandung, Kota Tasikmalaya, dan Kota Cirebon. Oleh karena itu, diperlukan upaya sosialisasi terkait pemakaian kontrasepsi metode jangka panjang bekerja sama dengan tenaga kesehatan sehingga dapat mengurangi angka putus pakai kontrasepsi.

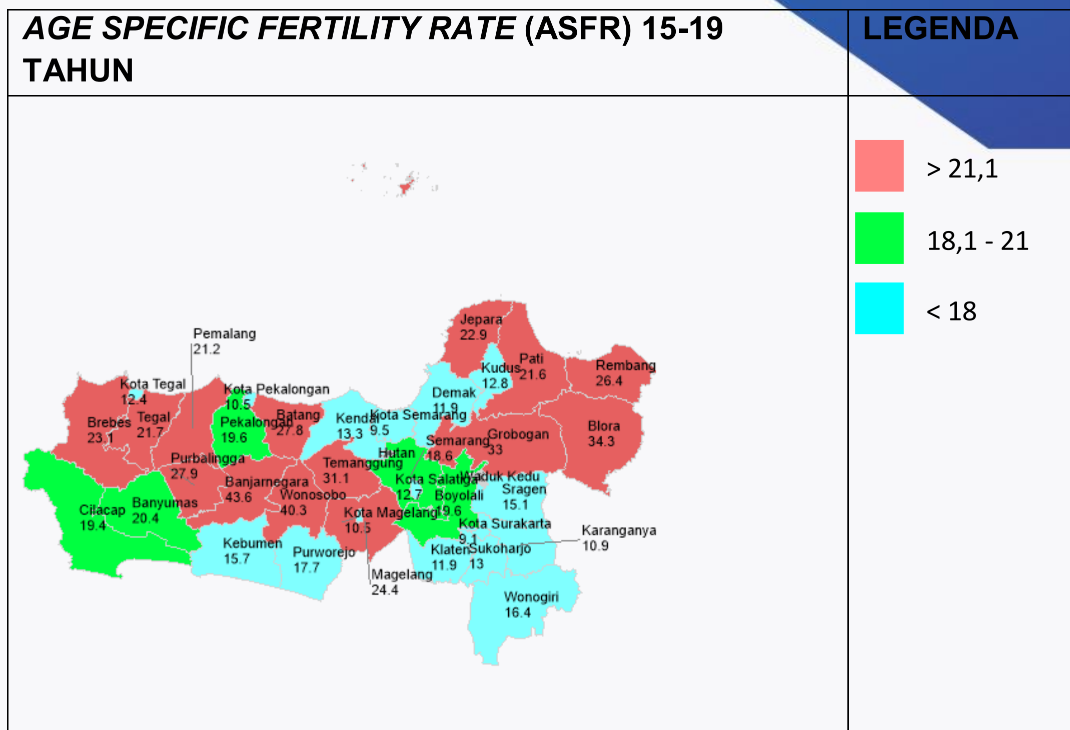


Peta di atas menunjukkan bahwa pencapaian indeks iBangga di kabupaten/kota Provinsi Jawa Barat masih belum optimal karena sebagian besar kabupaten/kota masih belum mencapai target iBangga. Akan tetapi terdapat 7 kabupaten/kota yang sudah mencapai target iBangga tahun 2022 yaitu Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, Kota Depok, Kota Bogor, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Kuningan, dan Kabupaten Pangandaran.

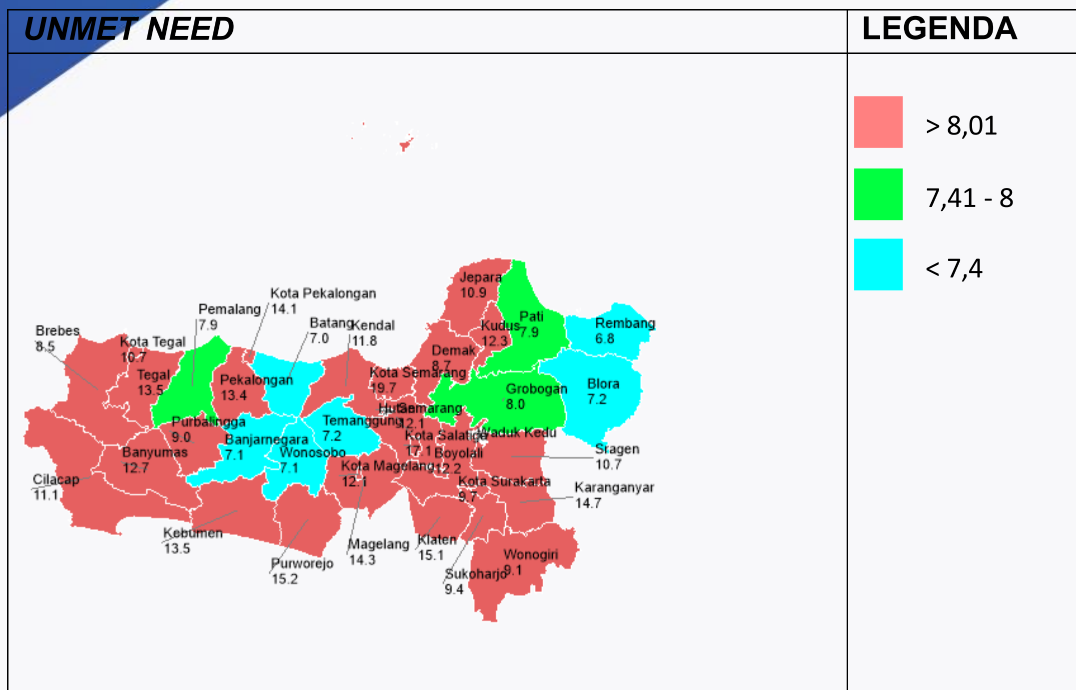
4.2.13. Peta Parameter Provinsi Jawa Tengah



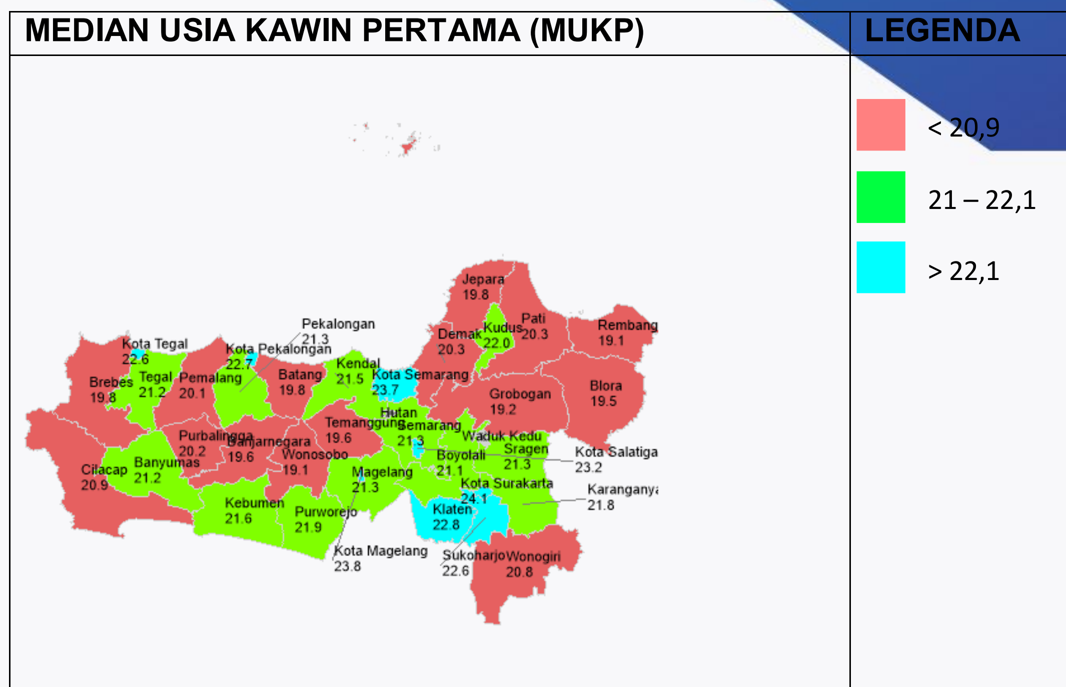
Berdasarkan peta di atas dapat terlihat bahwa angka TFR di Provinsi Jawa Tengah sudah baik karena hanya 7 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah yang belum mencapai target TFR (TFR > 2,21) yaitu Kota Tegal, Kota Pekalongan, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Banjarnegara, dan Kabupaten Wonosobo. Kabupaten/Kota tersebut dapat menjadi lokus bagi program pengaturan kelahiran guna menurunkan angka kelahiran di Provinsi Jawa Tengah.

AGE SPECIFIC FERTILITY RATE **(ASFR) 15-19 TAHUN**	**LEGENDA**
	> 21,1 18,1 - 21 < 18

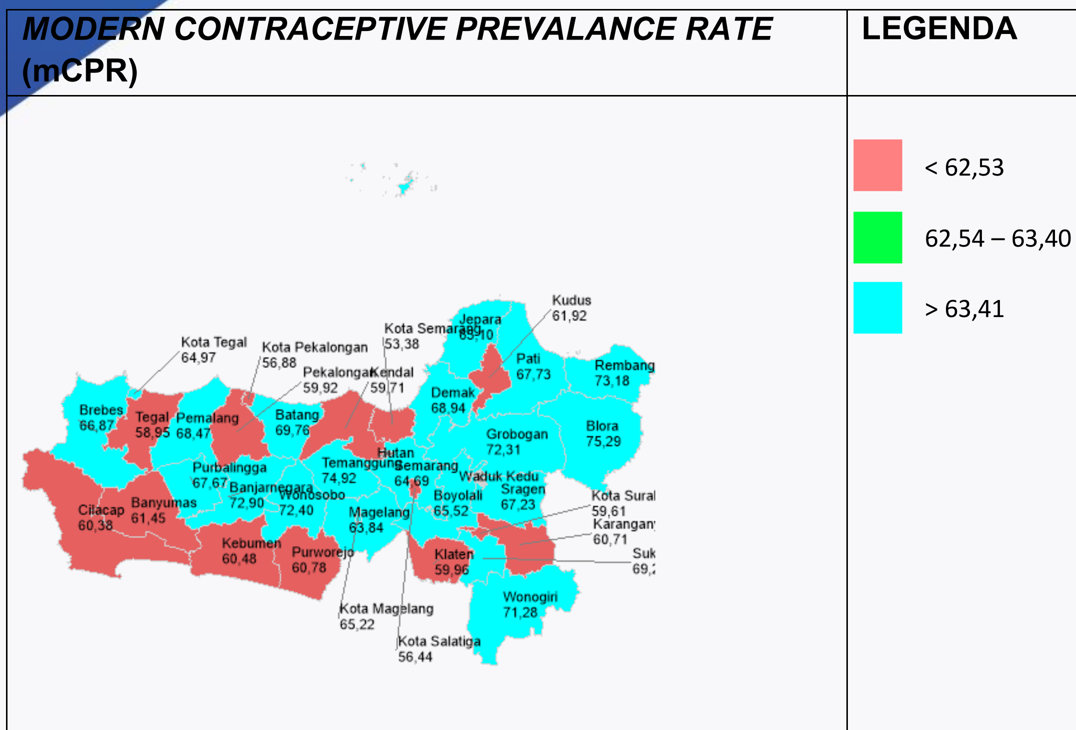
Peta di atas menunjukkan bahwa capaian indikator ASFR 15-19 tahun di Provinsi Jawa Tengah sudah cukup baik meskipun masih terdapat sepertiga kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah memiliki angka ASFR 15-19 tahun di atas 21,1 kelahiran per 1000 penduduk perempuan 15-19 tahun yaitu Kota Tegal, Kabupaten Brebes, Kabupaten Tegal, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Magelang, Kabupaten Jepara, Kabupaten Pati, Kabupaten Rembang, Kabupaten Blora, dan Kabupaten Batang.



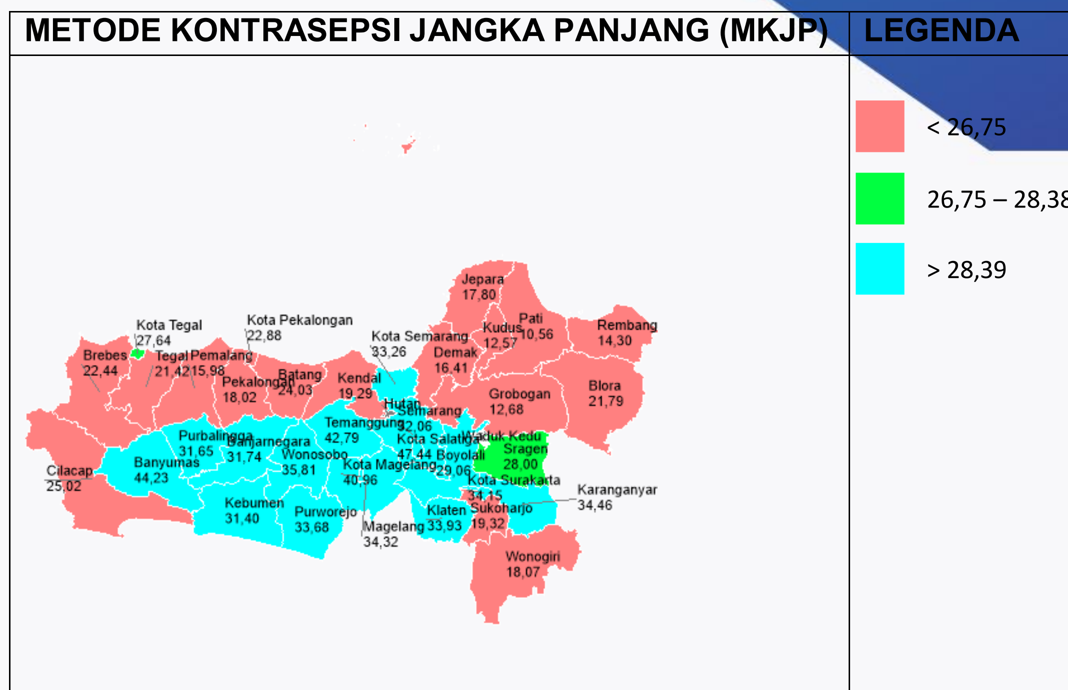
Peta terkait pencapaian indikator *unmet need* pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah di atas menunjukkan bahwa hanya Kabupaten Pemalang, Kabupaten Batang, Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Pati, Kabupaten Rembang, dan Kabupaten Blora yang telah mencapai target indikator *unmet need* di bawah 8,01 persen. Oleh karena itu, upaya penurunan *unmet need* harus menjadi perhatian karena sebagian besar kabupaten/kota mesih memiliki angka *unmet need* yang tinggi.



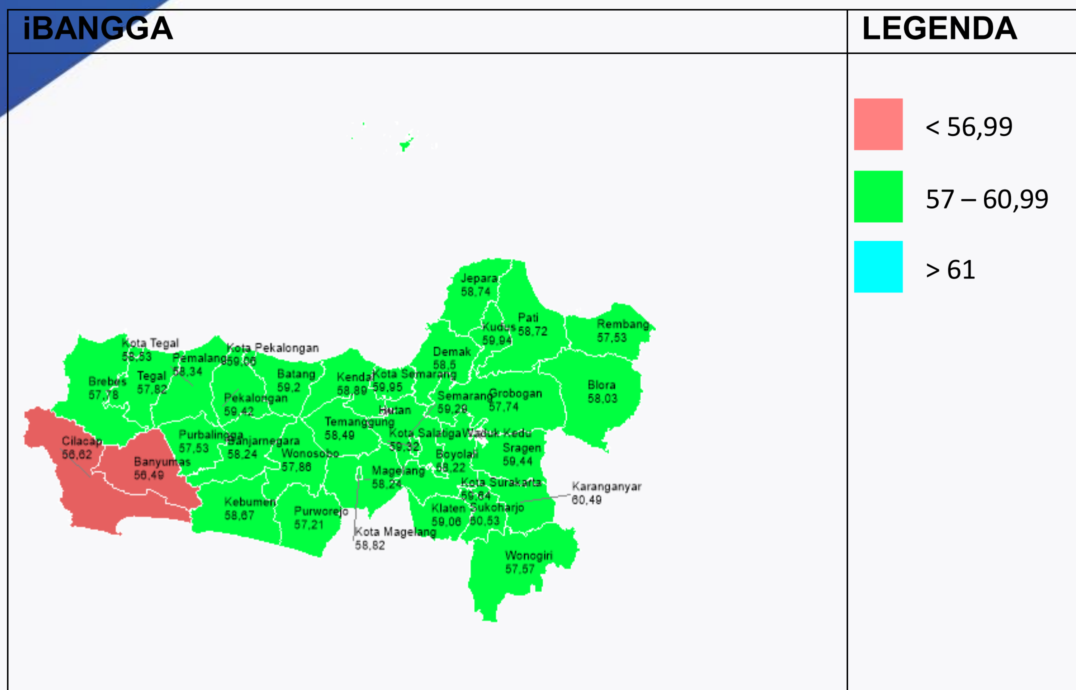
Berdasarkan peta di atas, terlihat bahwa 15 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah masih memiliki angka Median Usia Kawin Pertama (MUKP) di bawah 20,9 tahun sedangkan 20 kabupaten/kota lainnya sudah mencapai target yang ditetapkan. Lima belas (15) kabupaten/kota yang menjadi lokus untuk upaya penurunan MUKP adalah Kabupaten Brebes, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Batang, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Demak, Kabupaten Jepara, Kabupaten Pati, Kabupaten Rembang, Kabupaten Blora, Kabupaten Grobogan, dan Kabupaten Wonogiri.



Berdasarkan peta di atas terlihat bahwa pencapaian indikator mCPR di Provinsi Jawa Tengah sudah cukup baik karena dua pertiga kabupaten/kota sudah di atas 63,41 persen. Akan tetapi masih terdapat 13 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah yang perlu mendapatkan perhatian karena masih belum mencapai target indikator mCPR yaitu Kabupaten Tegal, Kabupaten Pekalongan, Kota Pekalongan, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Kendal, Kota Semarang, Kabupaten Klaten, Kabupaten Karanganyar, Kota Surakarta, dan Kabupaten Kudus.

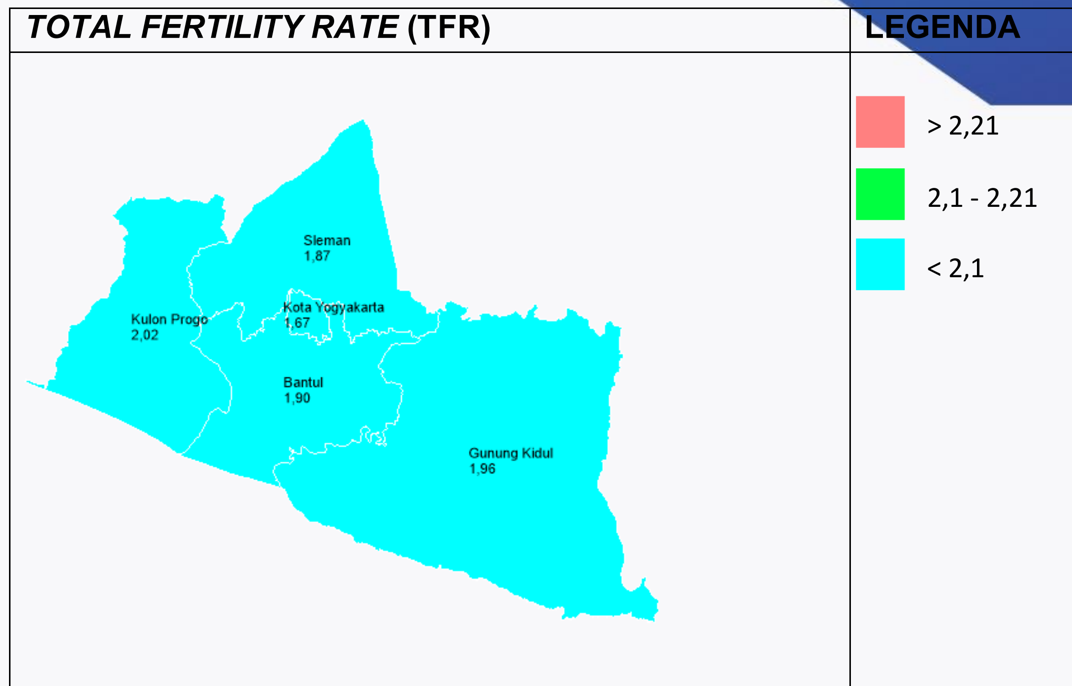


Berdasarkan peta di atas dapat terlihat bahwa hanya terdapat 19 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah yang sudah mencapai target MKJP yaitu 26,75 persen ke atas yaitu Kota Tegal, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Magelang, Kota Magelang, Kabupaten Semarang, Kota Semarang, Kota Salatiga, Kabupaten Boyolali, Kota Surakarta, Kabupaten Klaten, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Sragen, dan Kabupaten Kedu. Akan tetapi, masih ada 16 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah yang belum mencapai target sehingga diperlukan sosialisasi terkait pemakaian kontrasepsi metode jangka panjang.



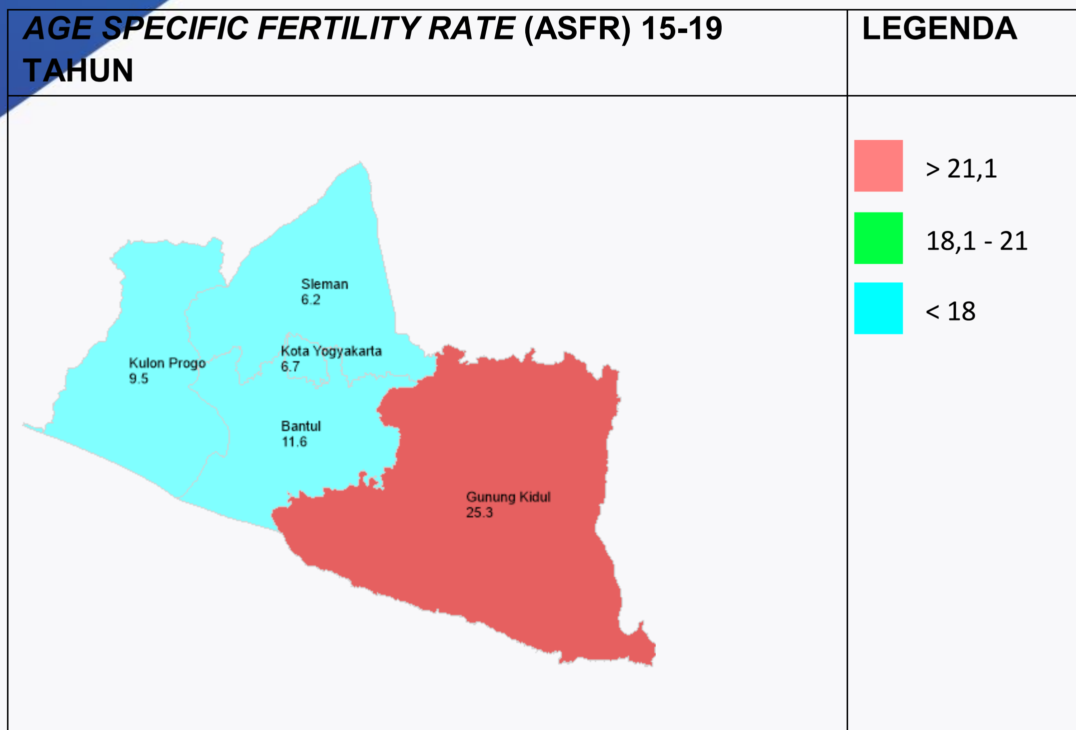
Peta di atas menunjukkan bahwa pencapaian indeks iBangga di kabupaten/kota Provinsi Jawa tengah sudah baik karena hanya Kabupaten Cilacap dan Kabupaten Banyumas yang masih belum mencapai target iBangga sedangkan 33 kabupaten/kota lainnya sudah mencapai target iBangga di tahun 2022 yakni di atas 57. Maskipun demikian masih perlu upaya untuk meningkatkan indeks iBangga agar dapat mencapai target di tahun berikutnya

4.2.14. Peta Parameter Provinsi DIY

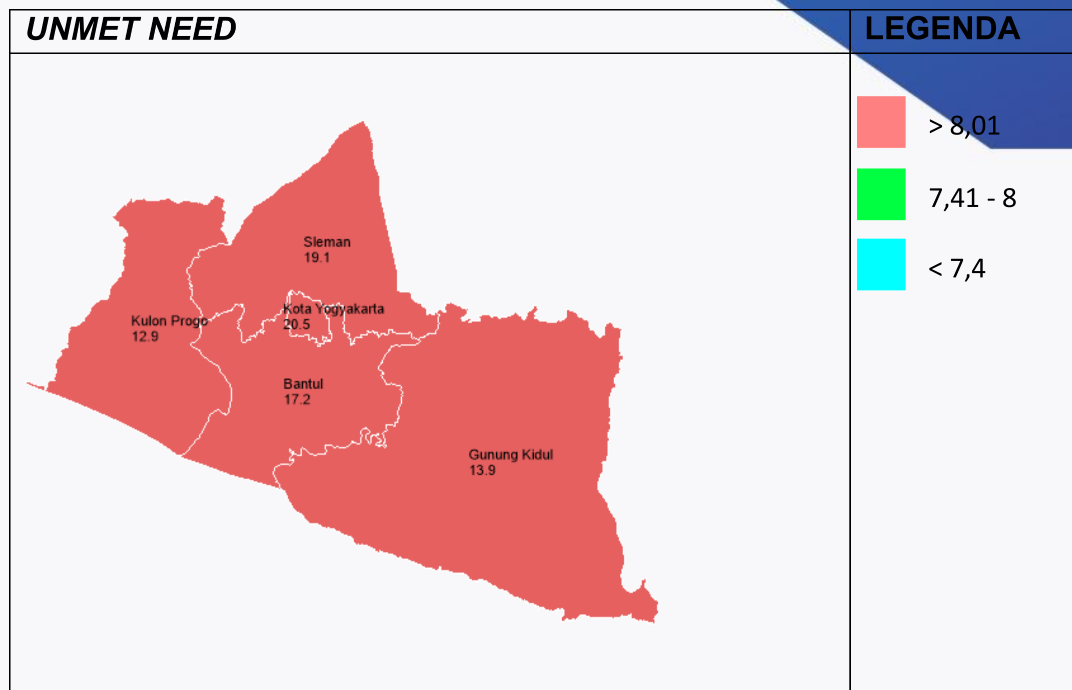


Peta DI Yogyakarta untuk TFR menampilkan pencapaian yang sangat baik karena semua kabupaten/kota telah berwarna biru yaitu telah mencapai target tahun 2024. Jika diamati lebih detil, 4 dari 5 kabupaten/kota yang ada telah mencapai TFR dibawah 2. Ini menunjukkan bahwa TFR pada Provinsi DI Yogyakarta sudah sangat rendah. Langkah kedepannya adalah perlu untuk mempertahankan TFR tersebut dan tidak perlu terus diturunkan, karena TFR terlalu kecil juga tidak ideal karena tidak menuju penduduk tumbuh seimbang.

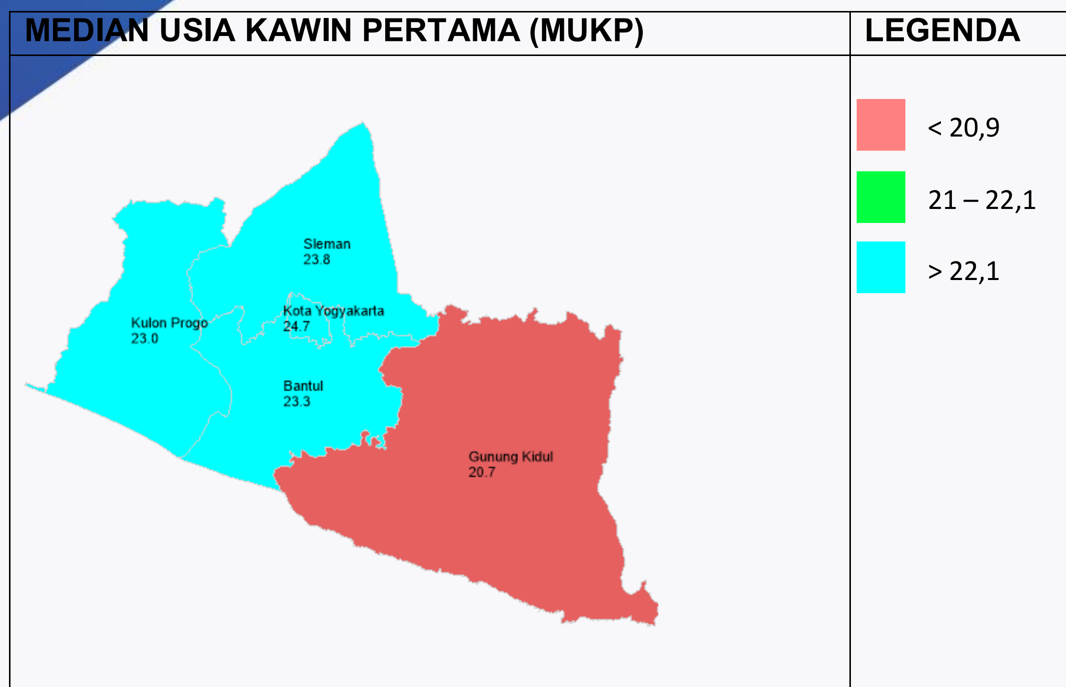
AGE SPECIFIC FERTILITY RATE **(ASFR) 15-19 TAHUN**	**LEGENDA**



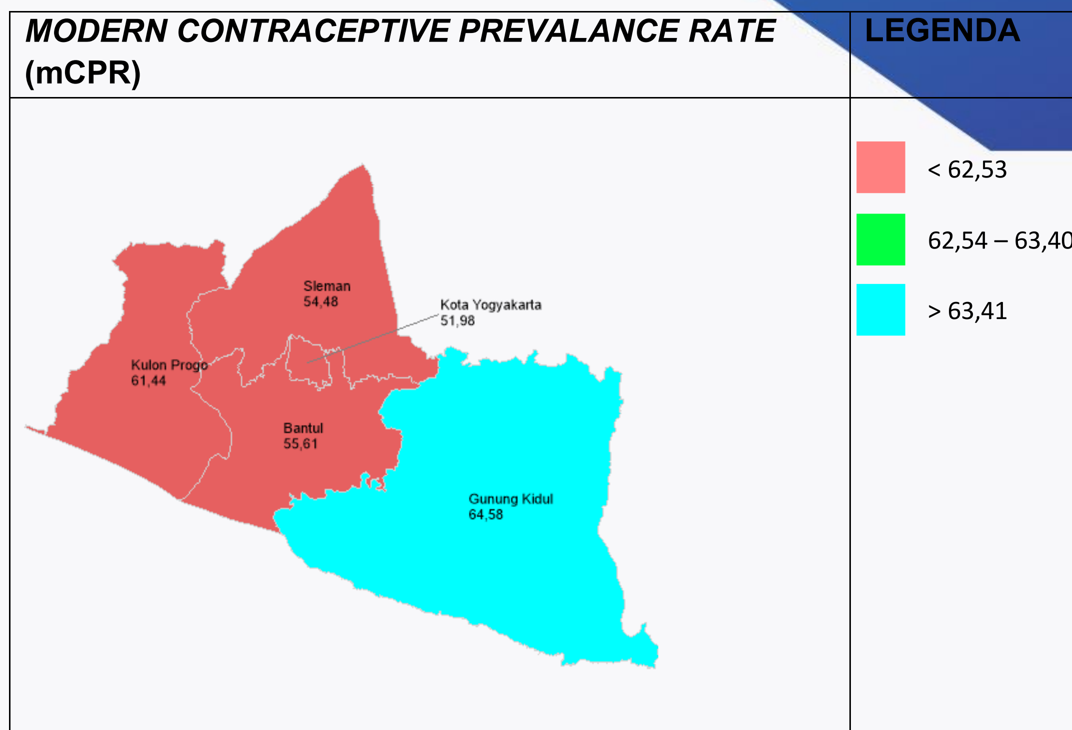
ASFR 15-19 tahun pada Provinsi DI Yogyakarta menunjukkan adanya disparitas yang mencolok terutama pada Kabupaten Gunung Kidul yang masih tinggi angkanya, sementara kabupaten/kota lainnya sudah rendah bahkan sudah mencapai target tahun 2024 sehingga 4 kabupaten/kota tersebut berwarna biru. Kabupaten Gunung Kidul perlu secara serius untuk berupaya menurunkan angka dari indikator ini, karena kelahiran dari ibu yang berusia 15-19 tahun merupakan kelahiran yang memiliki risiko tinggi untuk kematian ibu dan bayi, serta masalah gizi dan tumbuh kembang anak seperti stunting.



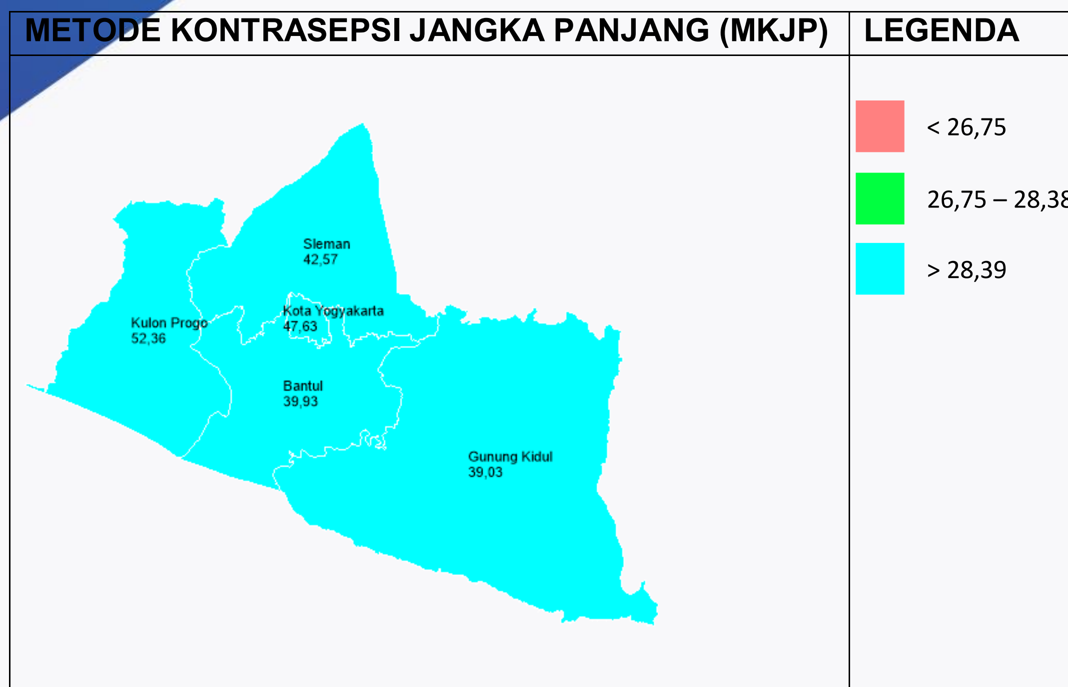
Berbeda dengan angka TFR yang secara merata telah cukup baik, angka *unmet need* pada Provinsi DI Yogyakarta masih menghadapi tantangan yang cukup berat karena tidak ada satu pun kabupaten/kota berhasil mencapai target tahun 2022 sehingga semua nya berwarna merah. *Unmet need* tidak hanya untuk menurunkan TFR namun juga dapat menurunkan angka kehamilan yang tidak diinginkan. Pemetaan sasaran yang tepat dapat membantu dalam penurunan angka *unmet need* sehingga setiap kelahiran merupakan kelahiran terencana dan menjadi generasi yang unggul dimasa depan.



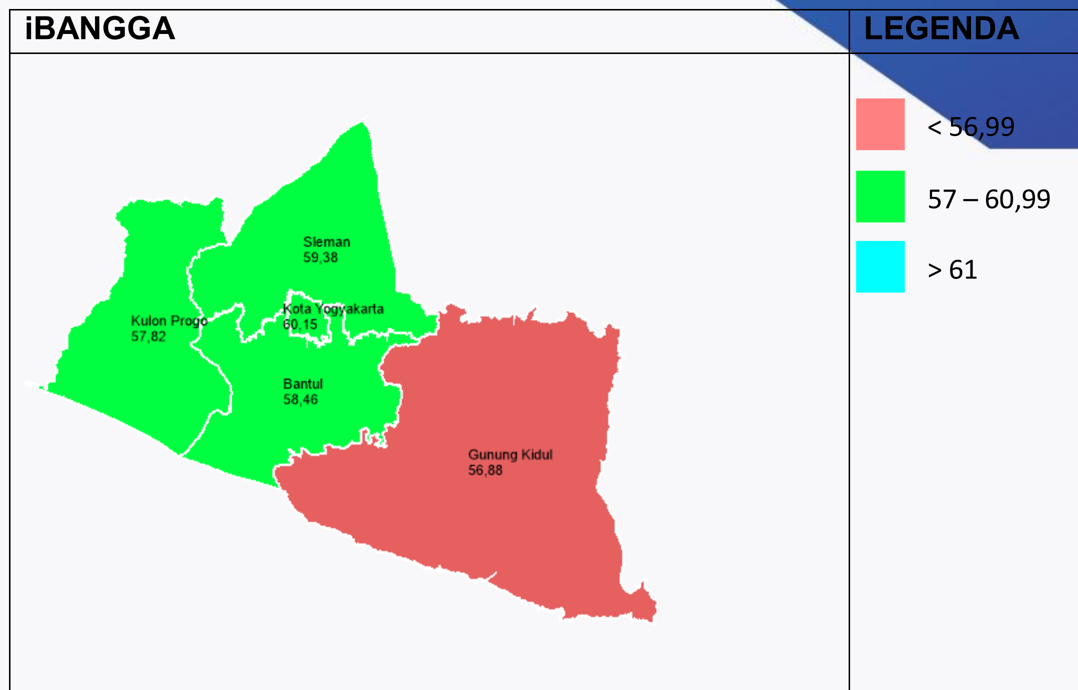
Pola MUKP sama persis dengan pola dari ASFR 15-19 tahun, dimana hanya kabupaten Gunung Kidul yang memiliki warna merah karena tidak mencapai target tahun 2022. Sedangkan keempat kabupaten/kota lainnya memiliki warna biru karena sudah mencapai target tahun 2024. Keterkaitan MUKP dan ASFR 15-19 tahun dimana semakin tinggi MUKP maka diharapkan kelahiran diusia 15-19 tahun dapat semakin berkurang. Sehingga program seperti PIK-RR, Pendewasaan Usia Perkawinan, dan lainnya dapat berjalan beriringan untuk mencapai tujuan yang sama.

***MODERN CONTRACEPTIVE PREVALANCE RATE* (mCPR)**	**LEGENDA**
	< 62,53 62,54 – 63,40 > 63,41

Pola anomali ditunjukkan pada pemetaan mCPR Provinsi DI Yogyakarta, dimana untuk mCPR, Gunung Kidul yang memiliki nilai merah untuk ASFR 15-19 tahun dan MUKP justru memiliki nilai biru karena untuk mCPR angkanya telah diatas dari target tahun 2024. Sementara itu, kabupaten/kota yang lain justru memiliki nilai merah karena mCPR nya tidak mencapai target tahun 2022. Pola ini menarik untuk diteliti lebih lanjut sehingga dapat memberikan penjelasan yang lebih detil tentang hal tersebut.

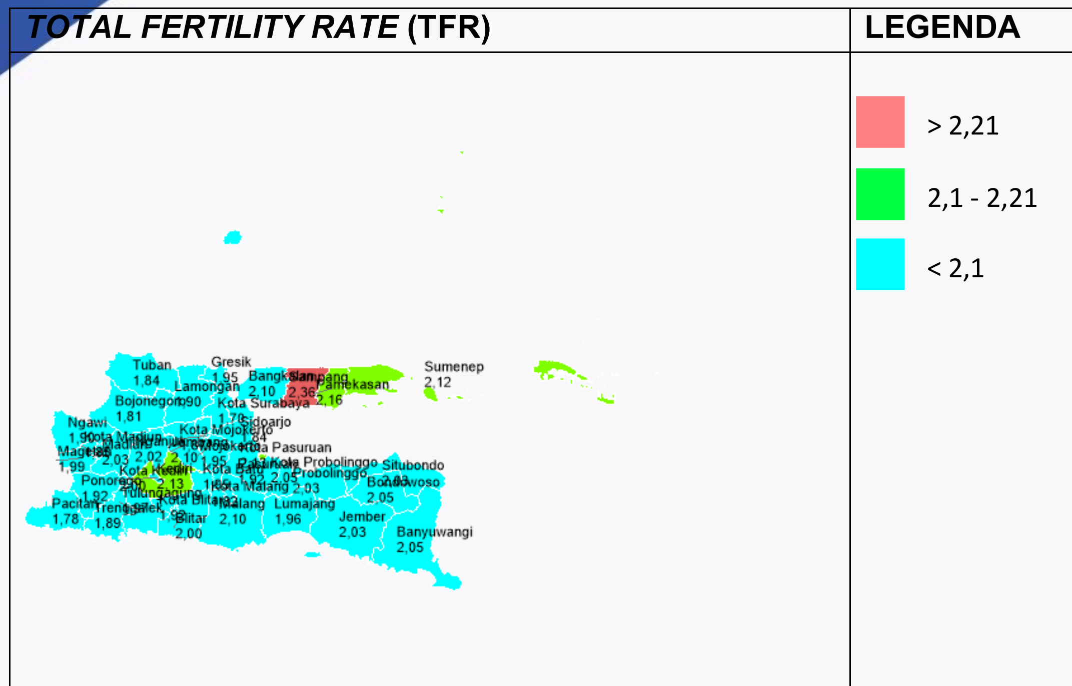


Jika pada mCPR masih ada 4 kabupaten/kota yang merah, berbeda dengan MKJP yang menunjukkan bahwa seluruh kabupaten/kota terlihat biru yang artinya di Provinsi DI Yogyakarta, tingkat penggunaan kontrasepsi Jangka Panjang sudah sangat baik bahkan telah mencapai target tahun 2024. Pencapaian yang sudah sangat baik ini perlu untuk dipertahankan agar pengaturan kehamilan di provinsi ini dapat lebih tertata dan terkendali.

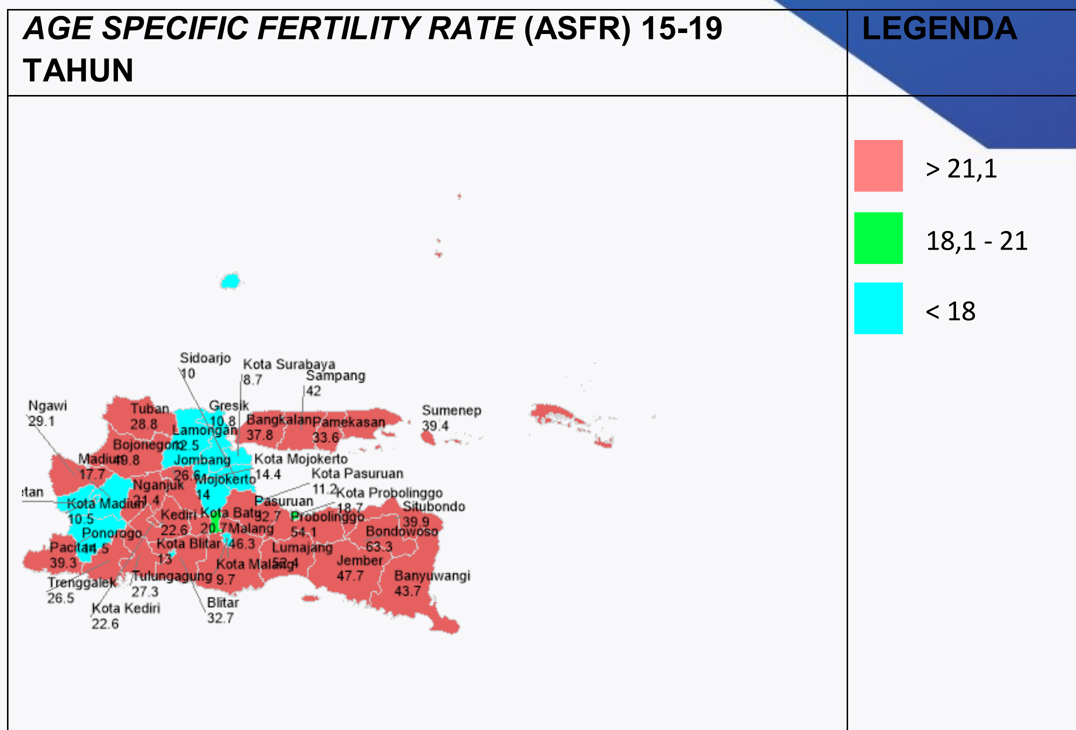


Peta iBangga untuk Provinsi DI Yogyakarta diatas menunjukkan bahwa Gunung Kidul kembali menjadi satu-satunya kabupaten yang tidak mencapai target tahun 2022 sehingga warnanya menjadi merah. Sementara untuk kabupaten/kota lainnya mencapai warna hijau yang artinya berhasil memenuhi target tahun 2022 iBangga lebih besar dari 57. Gunung Kidul harus bekerja keras untuk memenuhi target kinerja dari berbagai indikator yang tampil merah agar dimasa mendatang memiliki kinerja yang lebih baik.

4.2.15. Peta Parameter Provinsi Jawa Timur



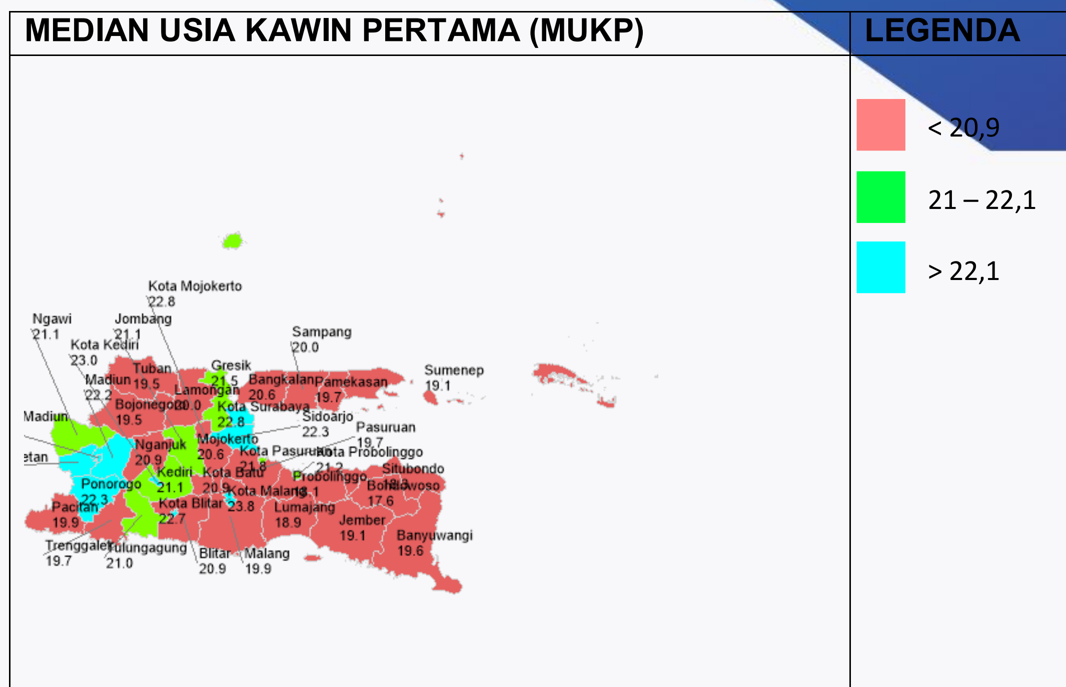
Berdasarkan peta di atas dapat dilihat bahwa angka TFR di Provinsi Jawa Timur sudah baik karena seluruh kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur memiliki TFR kurang dari 2,1, kecuali Kabupaten Sampang yang memiliki TFR di atas 2,21. Dengan rendahnya angka TFR di sebagian besar kabupaten/kota dan masih ada kabupaten dengan TFR yang amsih tinggi di Provinsi Jawa Timur maka perlu disusun kebijakan TFR asimetris terkai pengendalian penduduk.

***AGE SPECIFIC FERTILITY RATE* (ASFR) 15-19 TAHUN**	**LEGENDA**
	> 21,1 18,1 - 21 < 18

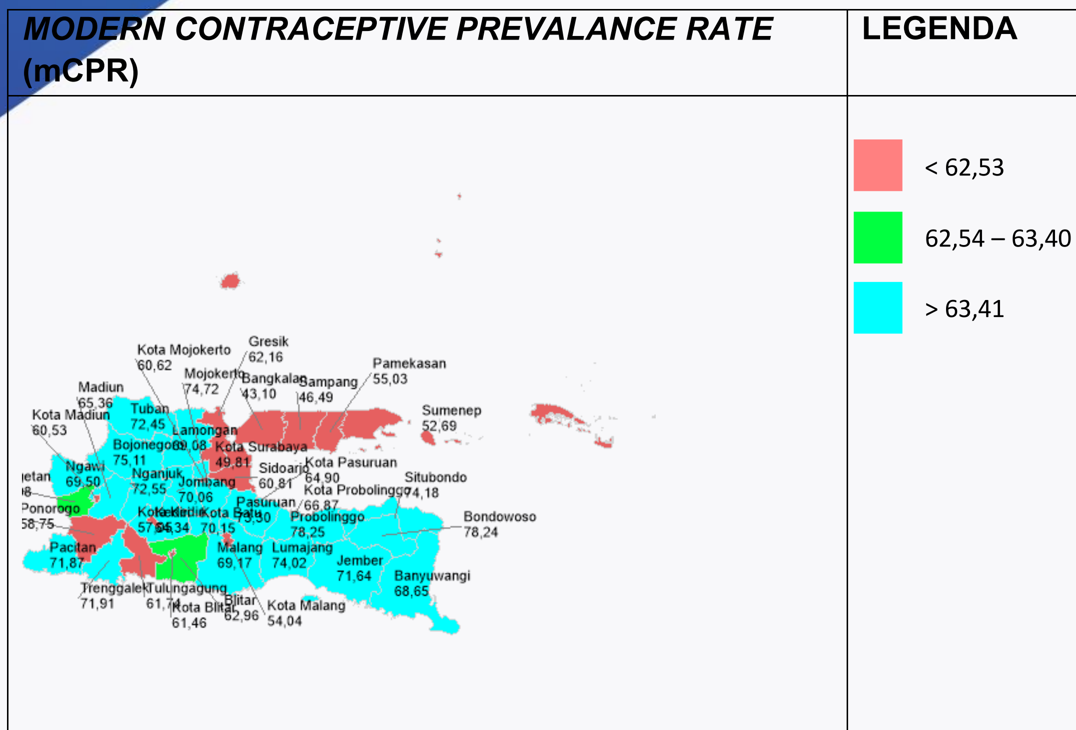
Berdasarkan peta di atas menunjukkan bahwa hampir seluruh kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur memiliki angka ASFR 15-19 tahun di atas 21,1 kelahiran per 1000 perempuan usia 15 – 19 tahun. Akan tetapi, terdapat 13 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur yang sudah mencapai target tahun 2024 yakni di bawah 18 kelahiran per 1000 perempuan usia 15 – 19 tahun yaitu Kabupaten Gresik, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Madiun, Kabupaten Magetan, Kabupaten Ponorogo, Kota Surabaya, Kota Madiun, Kota Blitar, Kota Mojokerto, Kota Malang, dan Kota Pasuruan.

UNMET NEED	LEGENDA
	> 8,01 7,41 - 8 < 7,4

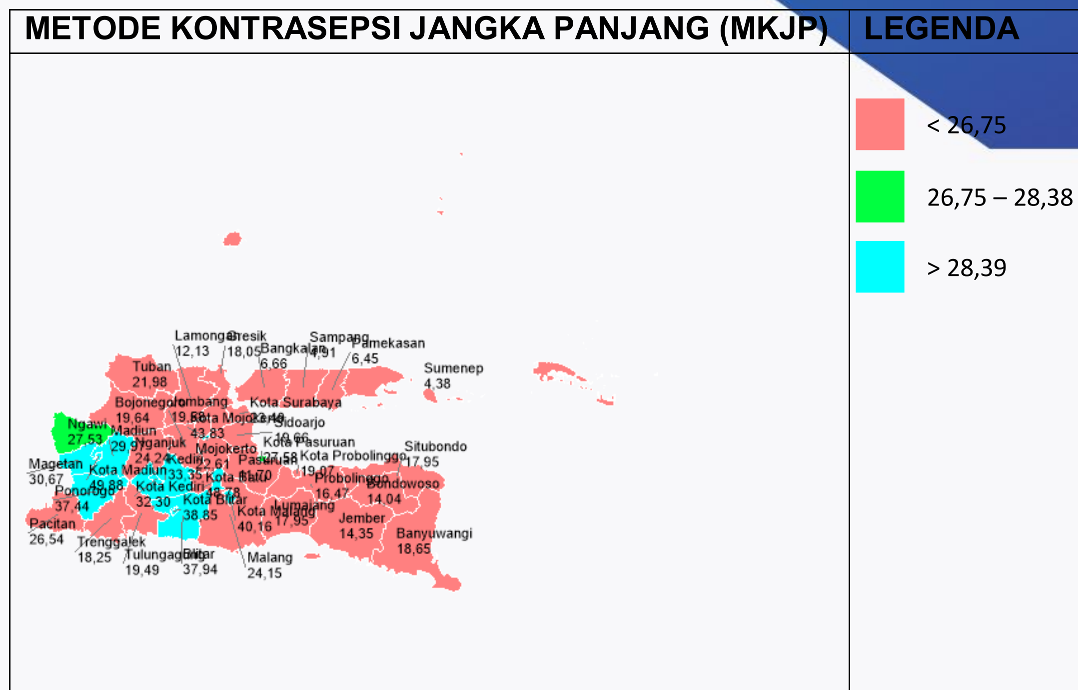
Peta terkait pencapaian indikator *unmet need* pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur di atas menunjukkan bahwa terdapat 9 kabupaten/kota yang memiliki *unmet need* di bawah 8 persen. Perlu diperhatikan bahwa terdapat 27 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur lainnya yang memiliki *unmet need* di atas 8,01 persen. Oleh karena itu, upaya untuk penurunan *unmet need* meliputi penyediaan pelayanan KB yang berkualitas harus dilakukan dengan lokus terhadap 27 kabupaten/kota tersebut.



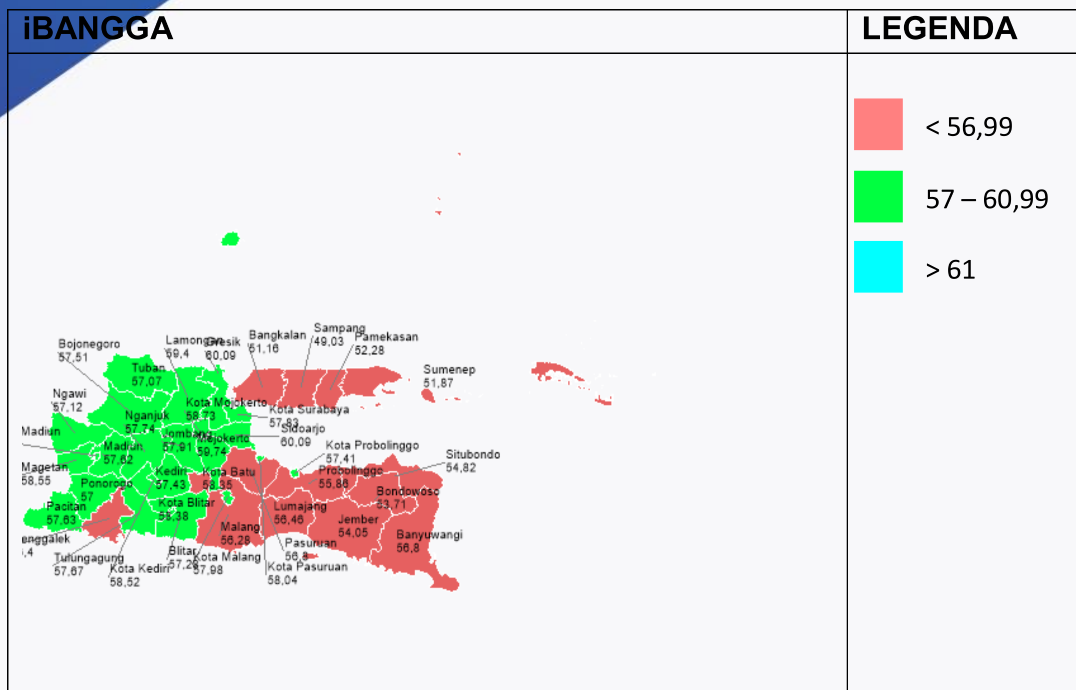
Berdasarkan peta di atas menunjukkan bahwa 21 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur masih memiliki angka Median Usia Kawin Pertama (MUKP) di bawah 20,9 tahun sedangkan 17 kabupaten/kota lainnya sudah mencapai target yang ditetapkan. Hal ini perlu menjadi perhatian oleh para pemangku kebijakan karena rendahnya MUKP menandakan bahwa masih terdapat adanya budaya pernikahan dini di Provinsi Jawa Timur.



Peta terkait pencapaian indikator mCPR di Provinsi Jawa Timur di atas memperlihatkan bahwa 14 kabupaten/kota masih di bawah 62,53 persen, antara lain Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Gresik, Kota Blitar, Kota Kediri, Kota Madiun, Kota Malang, Kota Mojokerto, Kota Surabaya, Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Sampang, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Sumenep dan Kabupaten Tulungagung. Dengan demikian, 14 kabupaten/kota dapat menjadi lokus untuk upaya peningkatan mCPR.

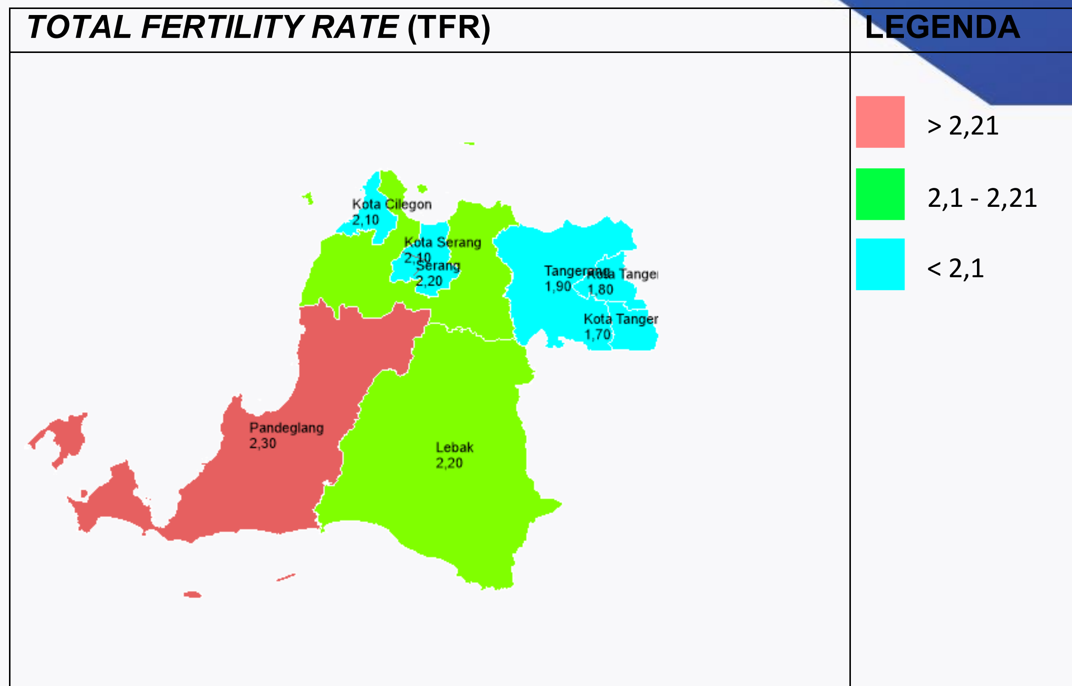


Peta di atas menunjukkan bahwa pencapaian indikator MKJP Provinsi Jawa Timur belum optimal karena sebagian besar kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur memiliki pencapaian target MKJP di bawah 26,75 persen. Hanya 14 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur yang memiliki pencapaian indikator MKJP di atas 26,75 persen, yaitu Kabupaten Blitar, Kabupaten Kediri, Kota Blitar, Kota Kediri, Kota Madiun, Kota Malang, Kota Mojokerto, Kota Surabaya, Kota Batu, Kota Pasuruan, Kabupaten Madiun, Kabupaten Magetan, Kabupaten Ngawi, dan Kabupaten Ponorogo.

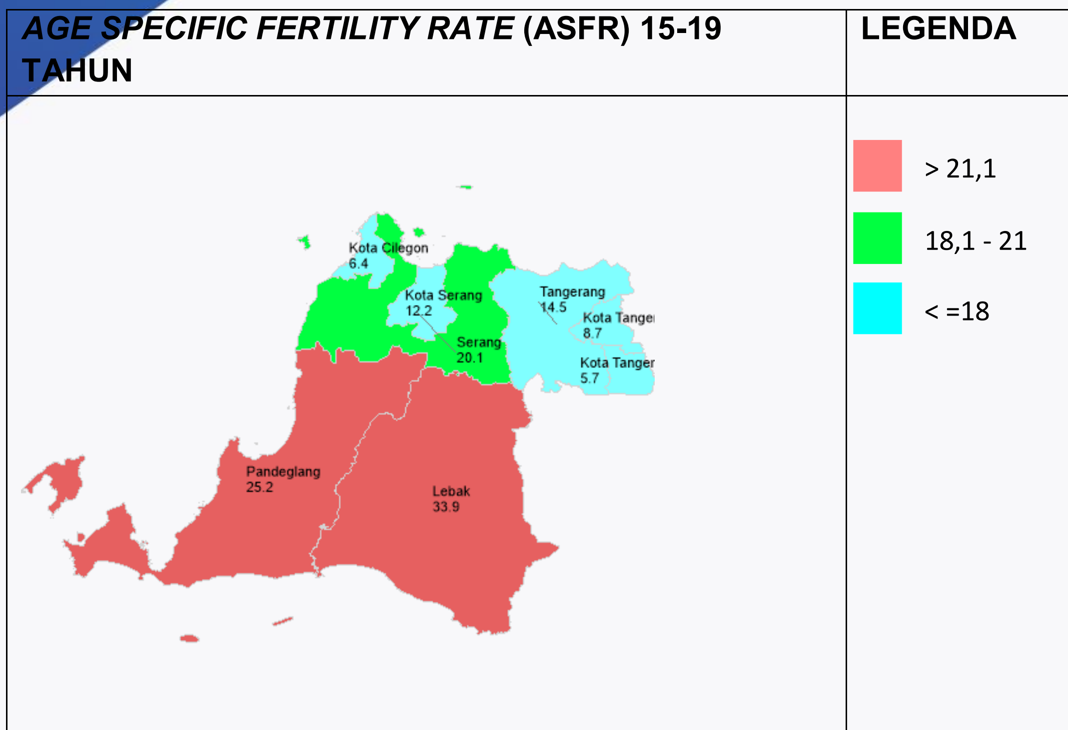


Peta di atas memperlihatkan bahwa pencapaian indeks iBangga di kabupaten/kota Provinsi Jawa Timur sudah cukup baik karena terdapat 26 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur yang telah mencapai target indeks iBangga tahun 2022 (57). Adapun 13 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur lainnya belum mencapai target indeks iBangga yaitu Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Jember, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Malang, Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Sampang, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Sumenep, Kabupaten Trenggalek.

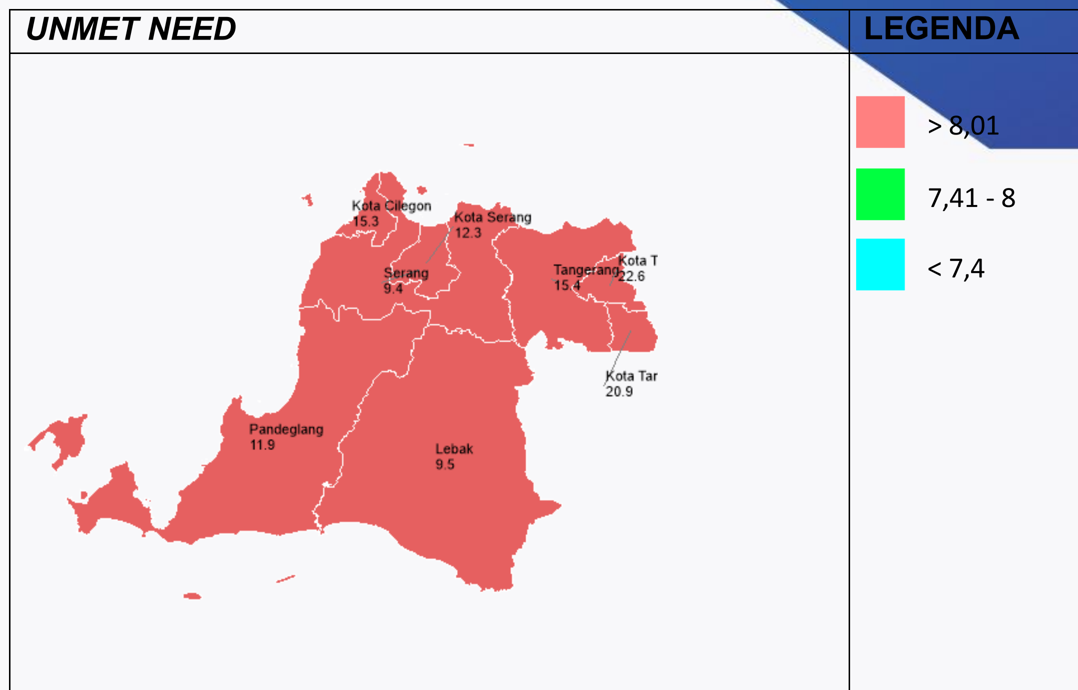
4.2.16. Peta Parameter Provinsi Banten



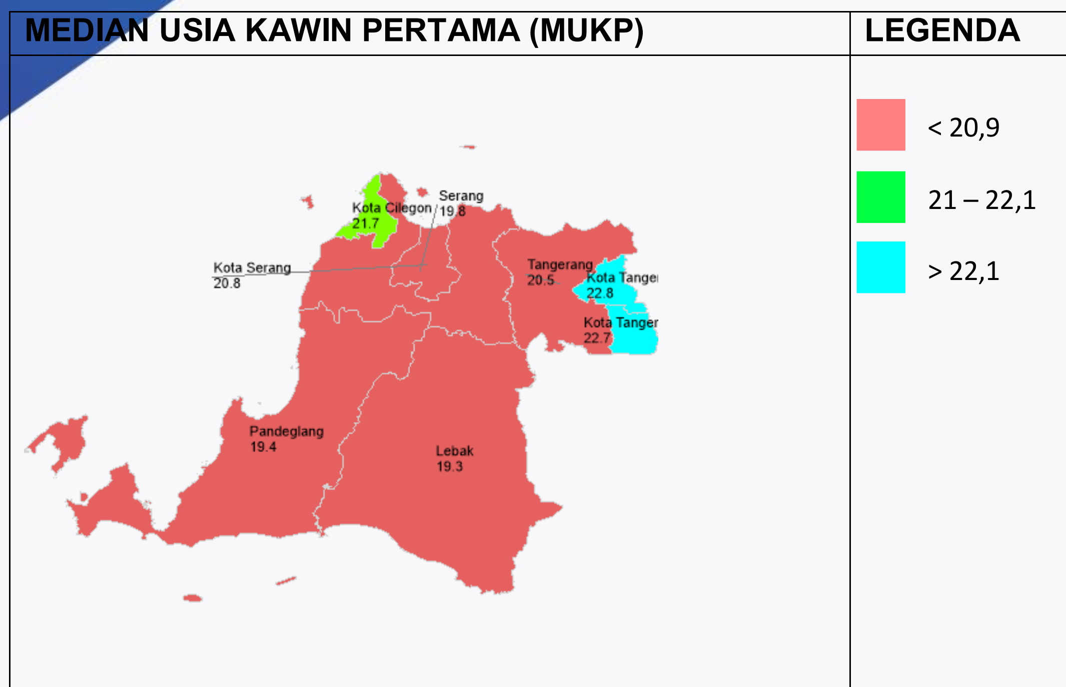
Peta TFR di atas menunjukkan bahwa hampir semua kabupaten/kota di Provinsi Banten telah mencapai target 2022 (berwarna hijau) dan target 2024 (berwarna biru). Hanya Kabupaten Pandenglang yang belum mencapai target TFR tahun 2022 yaitu TFR=2,21 sehingga berwarna merah. Penurunan angka TFR terlihat harus fokus diturunkan pada kabupaten yang berada pada ujung Pulau Jawa ini dengan melibatkan berbagai sektor terkait agar pengendalian kelahiran dapat lebih terjaga.



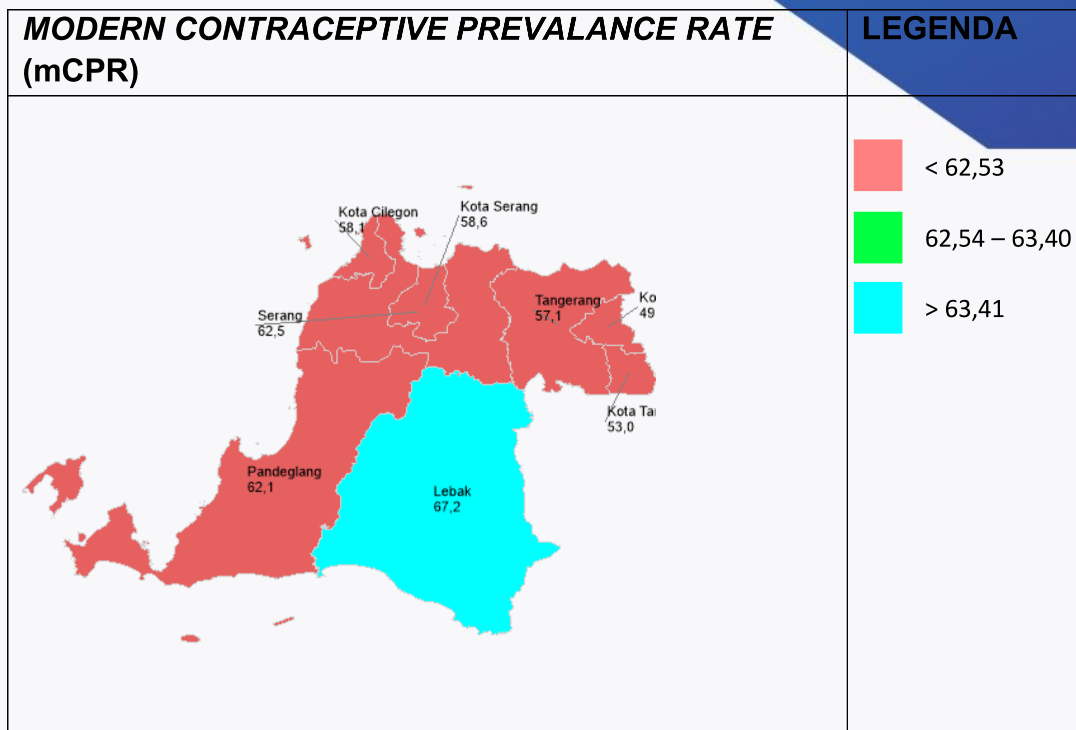
Peta di atas memperlihatkan pemetaan untuk indikator ASFR 15-19 tahun di Provinsi Banten. Terlihat bahwa wilayah di selatan provinsi ini memiliki angka ASFR 15-19 tahun yang belum mencapai target tahun 2022 sehingga berwarna merah yaitu Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak, ini menunjukkan angka kelahiran pada usia ibu yang berusia 15-19 tahun masih tinggi. Kabupaten/kota lainnya terlihat memiliki pencapaian yang cukup baik yaitu Kabupaten Serang sedangkan sisanya bahkan telah mencapai target tahun 2024 yang yaitu kota Cilegon, Kota Serang, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan dan Kabupaten Tangerang. Terlihat untuk wilayah administrasi kota memiliki angka ASFR 15-19 tahun yang lebih kecil. Upaya yang lebih kuat harus dicurahkan untuk Kabupaten Pandeglang dan Lebak untuk menurunkan indikator ini agar dapat mencapai target yang ditetapkan.



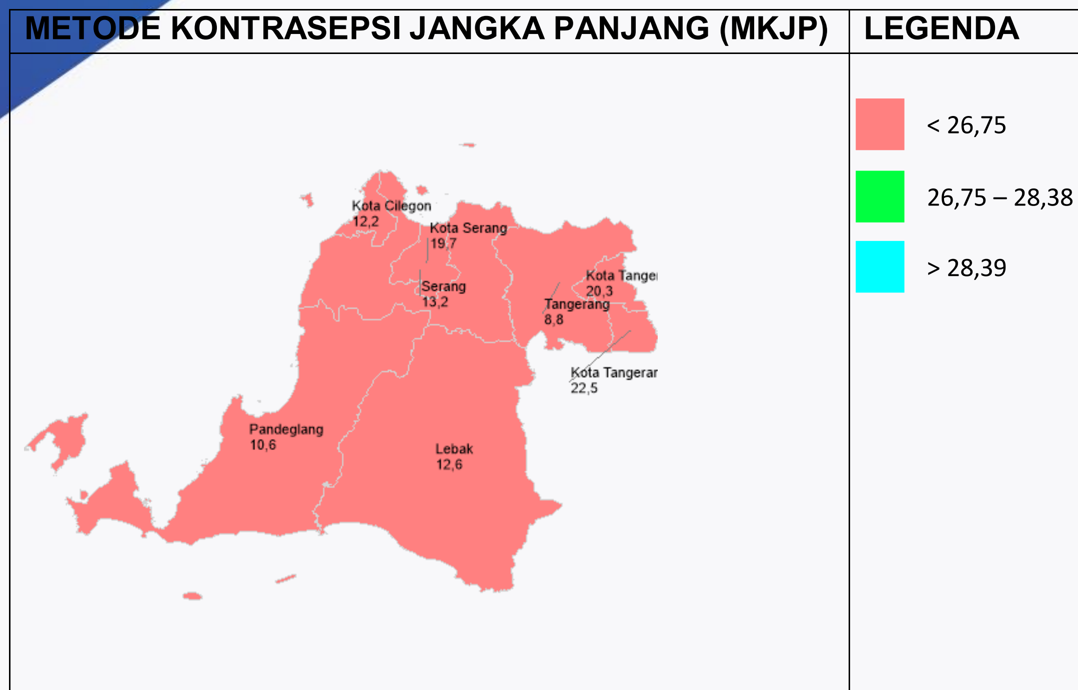
Peta sebaran *unmet need* pada Provinsi Banten diatas menunjukkan bahwa *unmet need* masih menghadapi tantangan yang sangat besar untuk provinsi ini, terlihat dengan tidak adanya kabupaten/kota yang mecapai target tahun 2022 sehingga secara merata memiliki warna merah. Ini menunjukkan bahwa program *unmet need* harus secara lebih intensif diselenggarakan pada seluruh wilayah di Provinsi Banten.



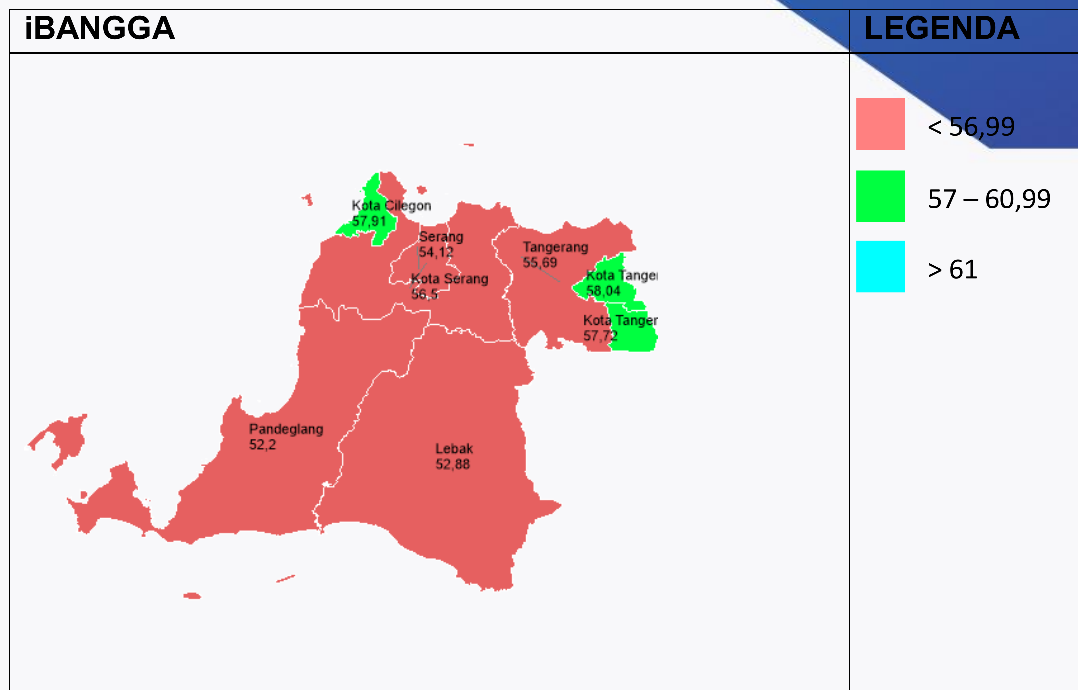
Berdasarkan peta di atas, terlihat bahwa Median Usia Kawin Pertama (MUKP) di Provinsi Banten masih belum mencapai target, terlihat masih didominasi dengan warna merah untuk seluruh kabupaten/kotanya. Hanya tiga kabupaten yaitu Kota Cilegon, Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan yang telah mencapai target sehingga berwarna hijau dan biru. Oleh karena itu, upaya-upaya peningkatan Program Pendewasaan Usia Perkawinan harus dilaksanakan secara seksama ini Provinsi Banten.

***MODERN CONTRACEPTIVE PREVALANCE RATE* (mCPR)**	**LEGENDA**
	< 62,53 62,54 – 63,40 > 63,41

Peta di atas menunjukkan indikator mCPR di Provinsi Banten juga masih belum menggembirakan, dimana terlihat hanya Kabupaten Lebak yang telah mencapai target tahun 2024 sehingga berwarna biru. Kabupaten lainnya ternyata masih belum mencapai target sehingga masih merah. mCPR merupakan suatu indikator kesertaan ber-KB modern, sehingga setiap keluarga dapat mengatur dan membatasi kehamilan untuk meningkatkan kualitas hidup ibu dan anak, hal tersebut membantu pada peningkatan kualitas SDM secara keseluruhan.

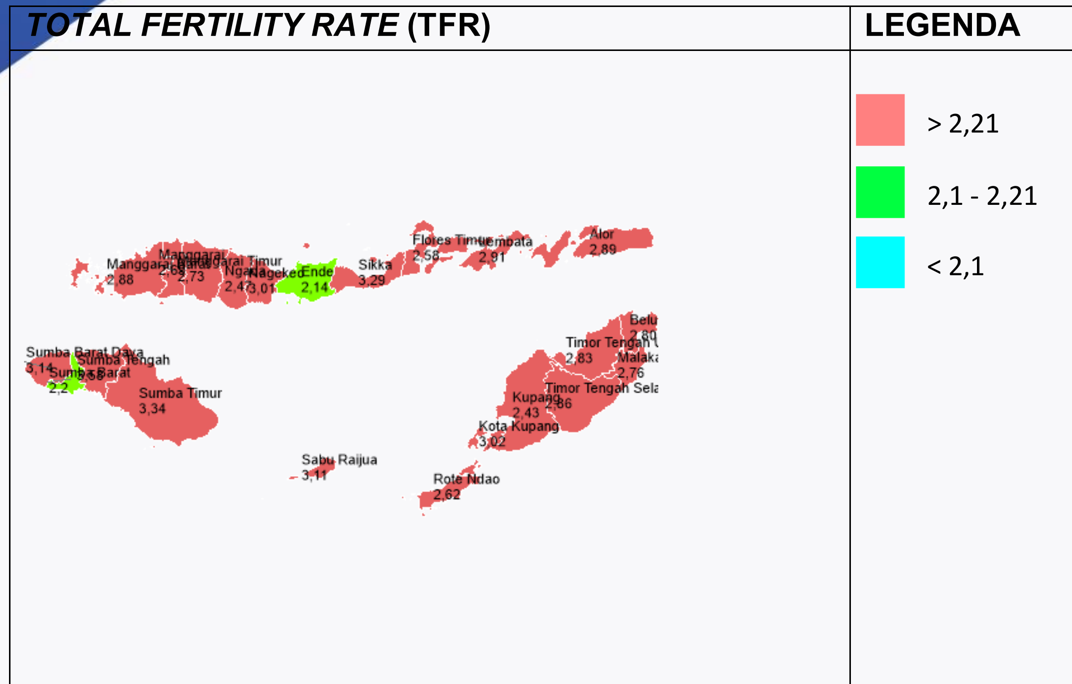


Berdasarkan peta terlihat sebaran MKJP di Provinsi Banten yang didominasi oleh warna merah. Ini menunjukkan seluruh kabupaten/kota di Provinsi Banten memiliki kesertaan ber KB MKJP yang dibawah target tahun 2022 atau dengan kata lain angka MKJP rendah secara merata di Provinsi Banten. Peningkatan Program KB Pasca Persalinan merupakan sasaran yang dapat ditujukan dan digalakkan pada provinsi ini. Pendekatan secara personal kemasing-masing Pasangan Usia Subur agar lebih ditingkatkan sehingga mereka bersedia untuk segera ber KB Jangka Panjang untuk perlindungan dari kehamilan yang lebih efektif dan lebih lama untuk mencegah kehamilan yang tidak diinginkan.



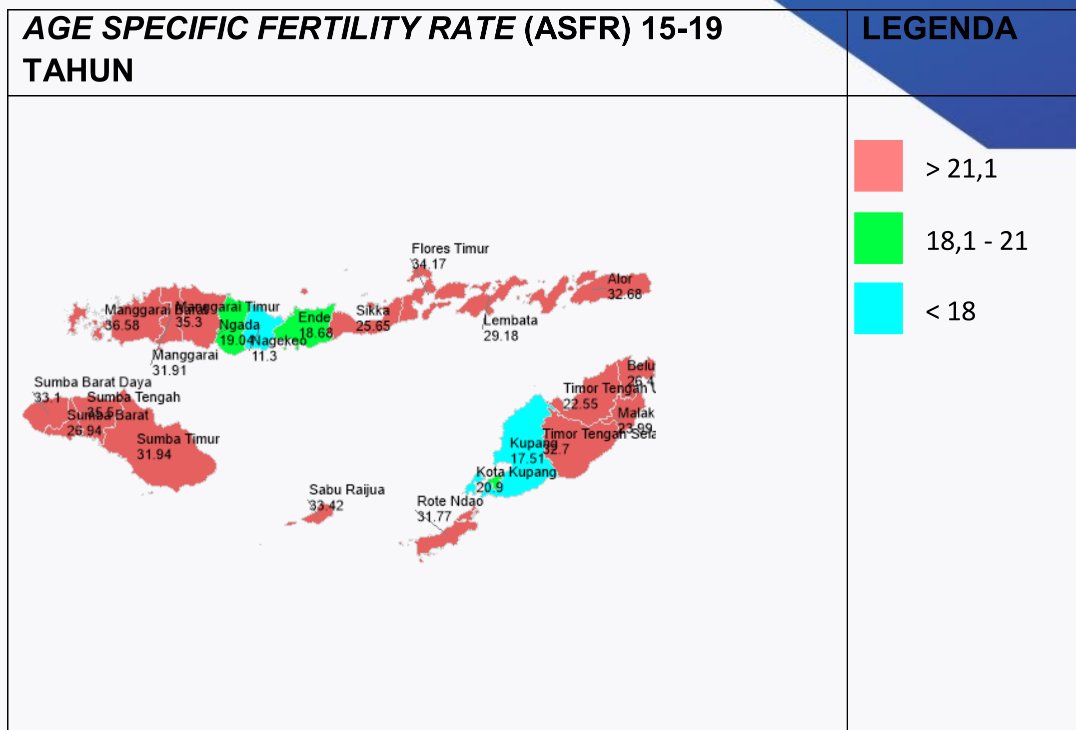
Pemetaan indikator iBangga pada Provinsi Banten secara umum didominasi warna merah yang artinya belum mencapai target tahun 2022 yaitu sebesar 57. Hanya tiga kabupaten/kota yang berhasil mencapai target tersebut yaitu Kota Cilegon, Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan. Dengan kondisi tersebut menunjukan terjadi Provinsi Banten harus bekerja keras untuk meningkatkan kualitas keluarga sehingga indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) dapat lebih baik dimasa mendatang.

4.2.17. Peta Parameter Provinsi NTT

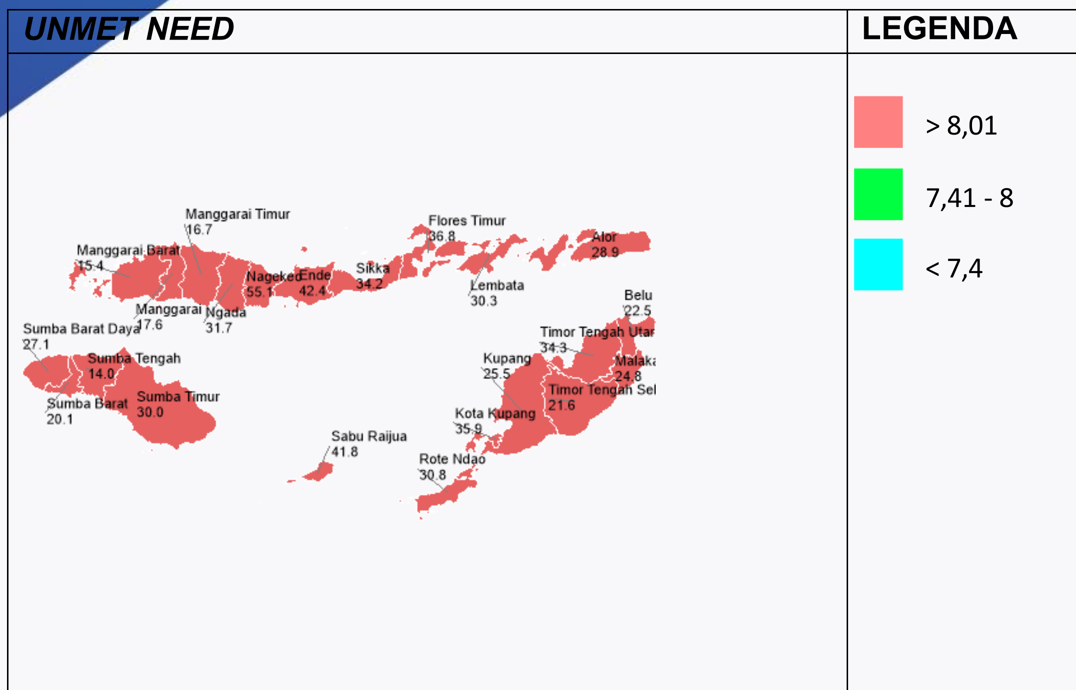
TOTAL FERTILITY RATE **(TFR)**	**LEGENDA**
	> 2,21 2,1 - 2,21 < 2,1

Berdasarkan Peta di atas dapat dilihat bahwa program penurunan fertilitas di NTT masih butuh perhatian yang sangat besar karena hampir seluruh kabupaten/kota di NTT memiliki angka yang cukup tinggi yaitu diatas 2,21 kecuali. Hal ini perlu menjadi perhatian bagi para pengambil kebijakan di kabupaten/kota di NTT untuk melakukan intervensi program di wilayahnya masing-masing agar dapat dilaksanakan dengan tepat sasaran dan komprehensif.

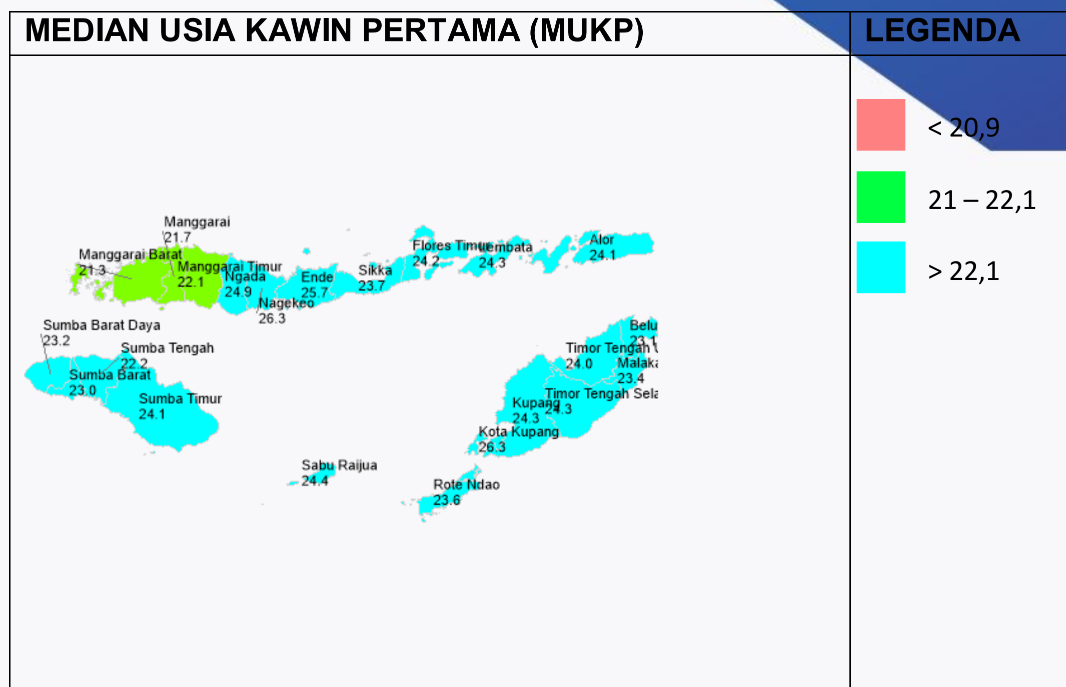
***AGE SPECIFIC FERTILITY RATE* (ASFR) 15-19 TAHUN**	**LEGENDA**



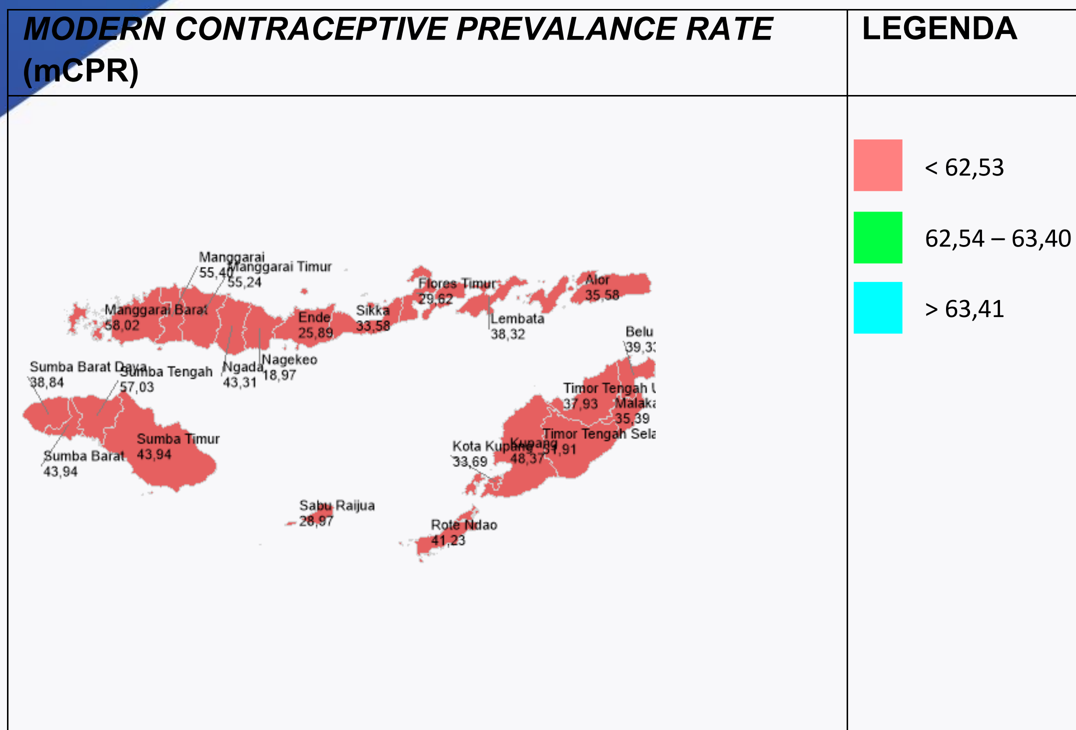
Berdasarkan peta di atas, terlihat bahwa ada beberapa kabupaten/kota di NTT yang telah mencapai target ASFR 15-19 Tahun, dimana yang telah mencapai target tahun 2022 adalah Ngada, Ende, dan Kota Kupang Sementara yang telah mencapai target tahun 2024 adalah Nagekeo dan Kupang. Walau demikian, masih terdapat lebih banyak kabupaten/kota di NTT yang belum mencapai target ASFR 15-19 Tahun di NTT. Hal tersebut perlu di intervensi secara tepat karena fertilitas pada usia yang belum cukup dewasa dapat mengakibatkan berbagai dampak buruk dimana salah satunya adalah meningkatnya resiko kematian ibu dan bayi serta stunting.



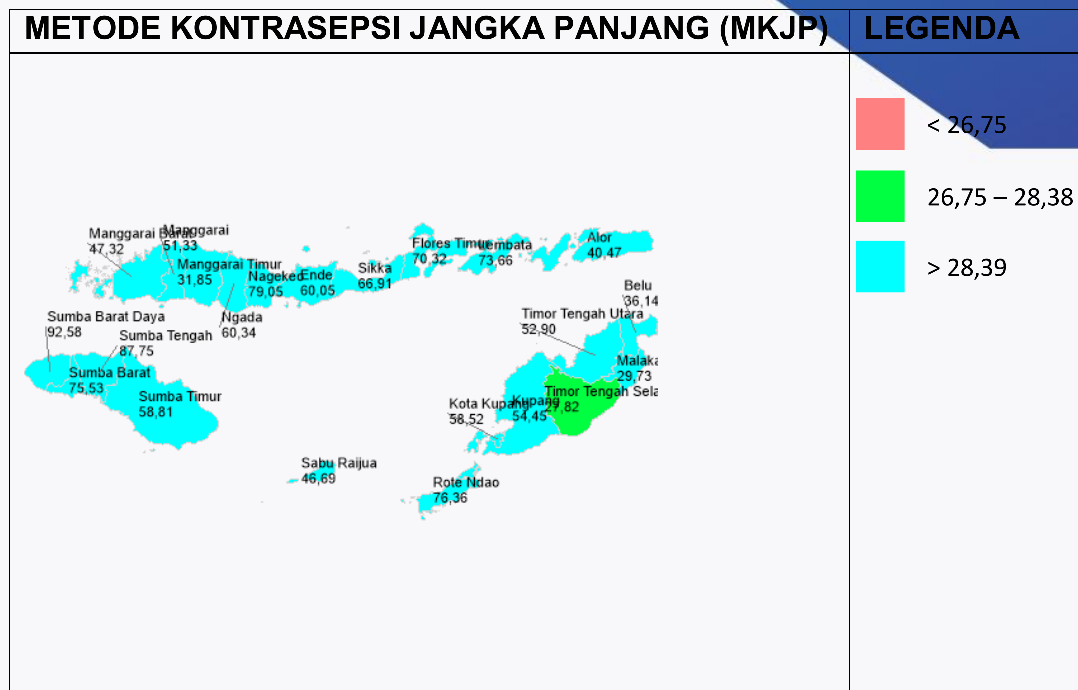
Berdasarkan peta di atas terlihat bahwa diperlukan intervensi program bagi pemenuhan kebutuhan ber-KB para pasangan usia subur di NTT karena seluruh kabupaten/kota di NTT masih memiliki angka *unmet need* yang tinggi, yakni lebih tinggi dari 8,01 atau belum mencapai target yang telah ditetapkan.



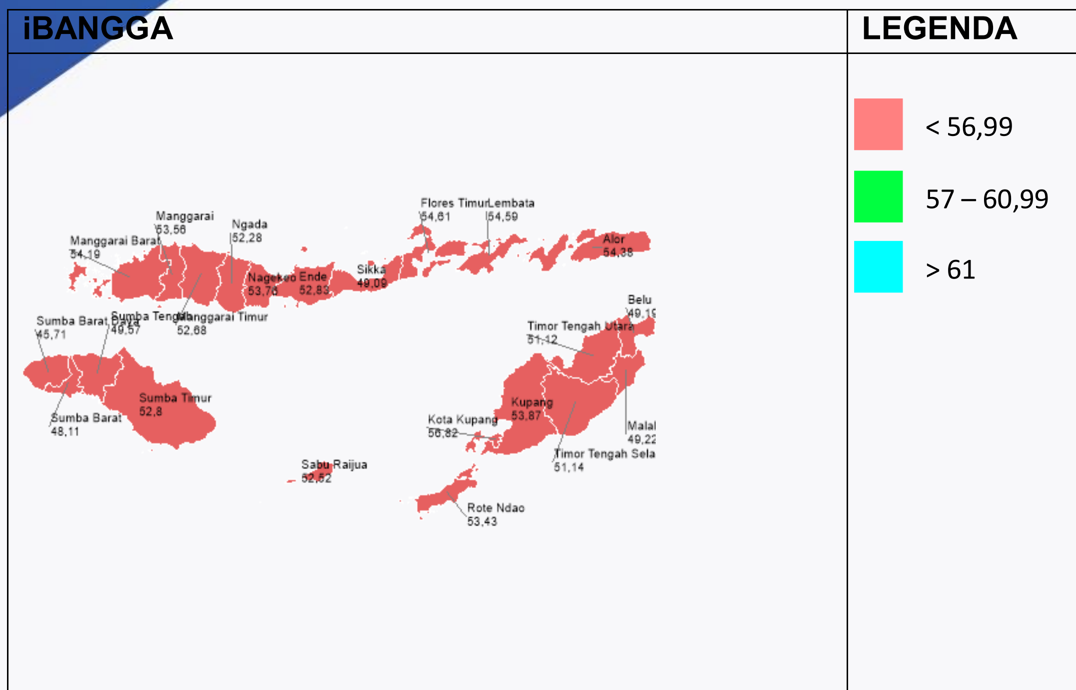
Berdasarkan peta di atas, terlihat bahwa angka Median Usia Kawin Pertama (MUKP) di Provinsi NTT sudah baik karena seluruh kabupaten/kotanya telah mencapai target MUKP yang telah ditentukan, bahkan lebih banyak ada kabupaten/kota yang telah mencapai target tahun 2024. Hal ini perlu dipertahankan kedepannya karena dengan pendewasaan usia perkawinan, potensi kehamilan beresiko yang berujung pada stunting dan kematian bayi dan ibu dapat dicegah dengan cukup baik.



Berdasarkan peta di atas terlihat bahwa indikator mCPR pada seluruh kabupaten/kota di Provinsi NTT masih sangat rendah dan belum ada mencapai target. Hal ini perlu menjadi perhatian, karena dapat menjadi batu sandungan dalam program penurunan fertilitas dan pemenuhan kebutuhan KB di NTT yang masih didapati tinggi.

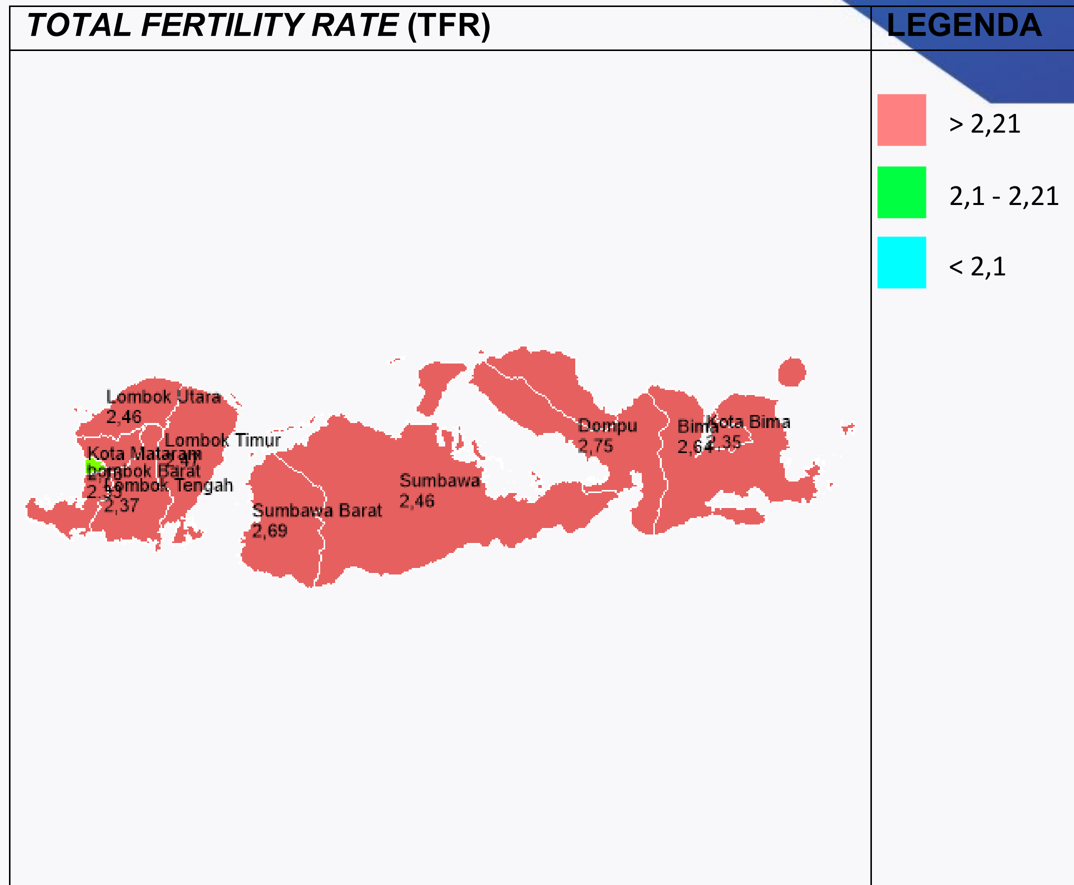


Berdasarkan peta di atas dapat dilihat bahwa capaian indikator MKJP di NTT sudah sangat baik karena seluruh kabupaten/kotanya sudah mencapai target, untuk tahun 2022 bahkan tahun 2024. Hal ini perlu dipertahankan kedepannya dengan program advokasi dan KIE

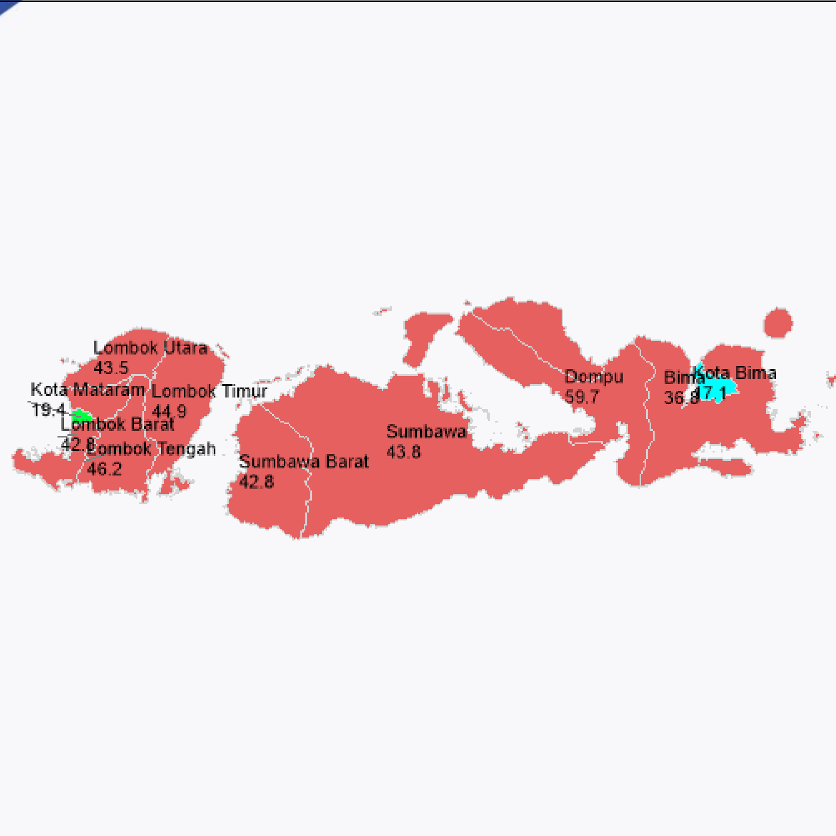
iBANGGA	LEGENDA
	< 56,99 57 – 60,99 > 61

Berdasarkan peta di atas dapat dilihat bahwa seluruh kabupaten/kota di NTT masih belum mencapai target iBangga yang telah ditetapkan. Hal tersebut perlu menjadi perhatian khusus karena tidak tercapainya iBangga menandakan bahwa kualitas dari pembangunan keluarga di ketiga dimensi masih belum maksimal dan perlu diintervensi lebih dalam.

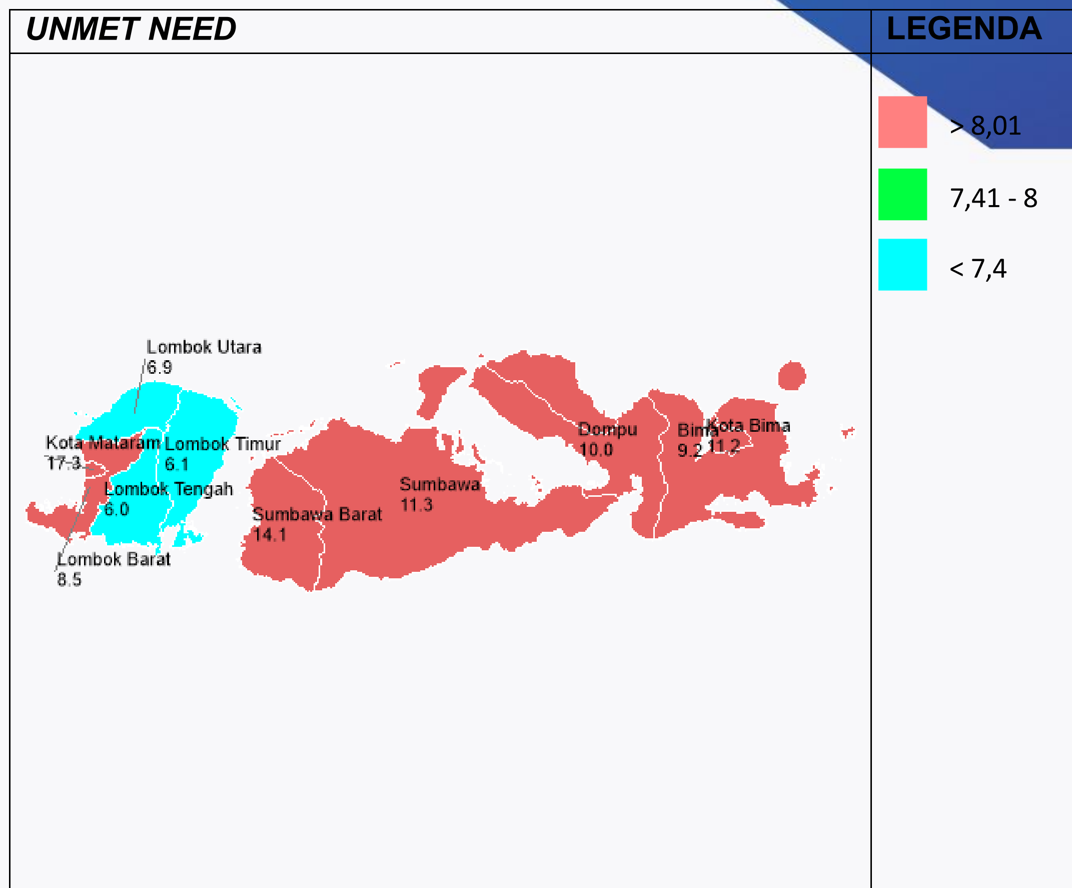
4.2.18. Peta Parameter Provinsi NTB



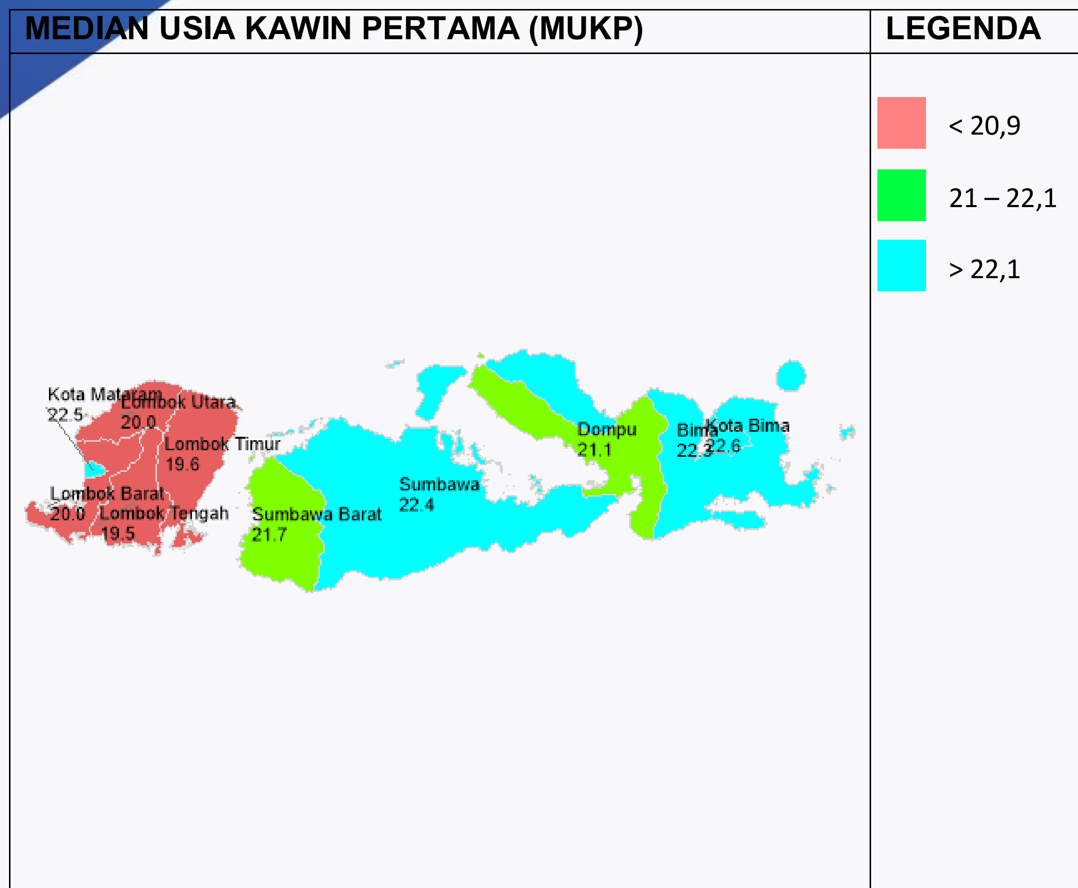
Berdasarkan Peta di atas dapat dilihat bahwa angka kelahiran total di NTB masih sangat memiliki tantangan karena hampir seluruh kabupaten/kota di Maluku Utara memiliki angka yang tinggi yaitu diatas 2,21 kecuali Kota Mataram. Hal ini perlu menjadi perhatian bagi para pengambil kebijakan di kabupaten/kota di NTB untuk melakukan upaya dan langkah-langkah untuk menurunkan angka TFR di wilayahnya masing-masing agar dapat dilaksanakan secara efisien sesuai latar situasi dan tempat daerah masing-masing.

AGE SPECIFIC FERTILITY RATE (ASFR) 15-19 TAHUN	LEGENDA
	> 21,1 18,1 - 21 < 18

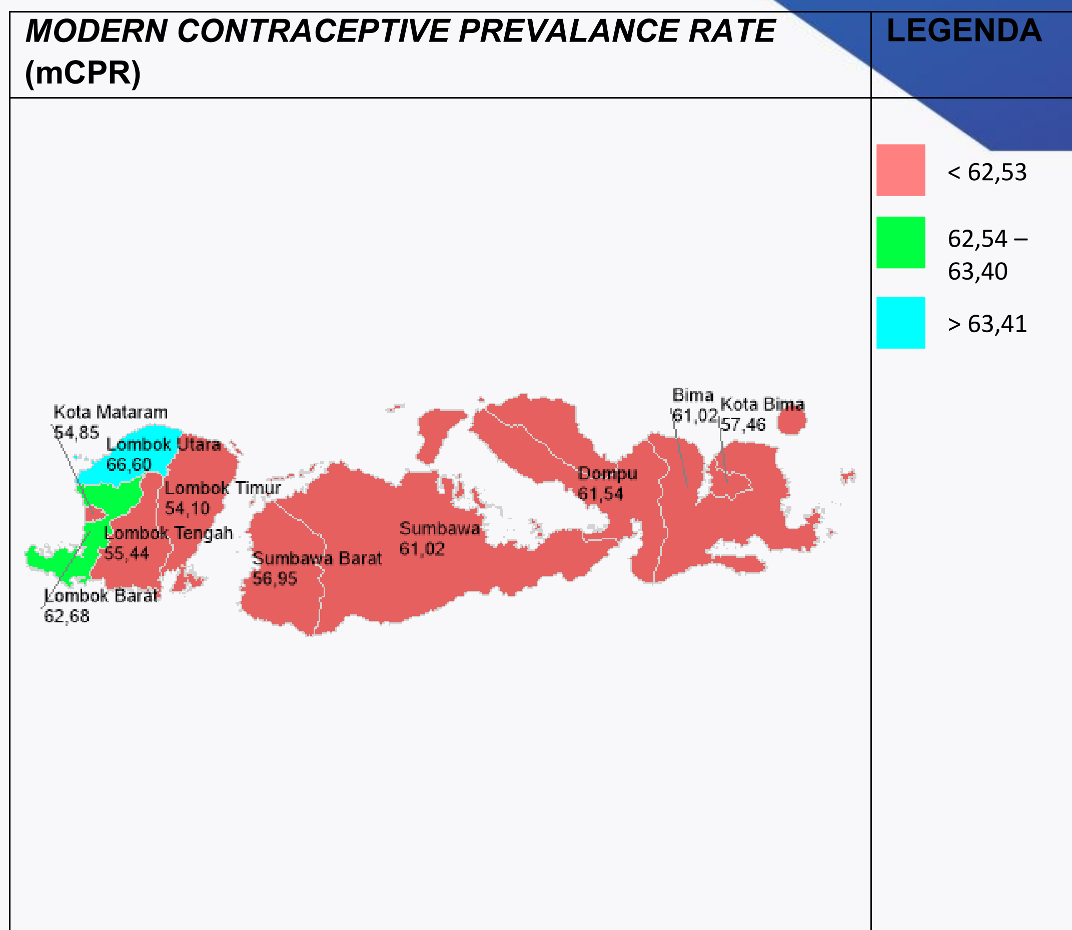
Berdasarkan peta di atas terlihat bahwa indikator ASFR 15-19 tahun tingkat kabupaten/kota di Provinsi NTB juga hampir serupa dengan indikator TFR, dimana semuanya masih belum mencapai target, kecuali Kota Mataram yang sudah mencapai target tahun 2022 dan Kota Bima yang sudah mencapai target tahun 2024. Hal tersebut perlu di intervensi secara efisien dan tepat sasaran agar dapat mencapai target yang telah ditentukan di tahun-tahun kedepannya.



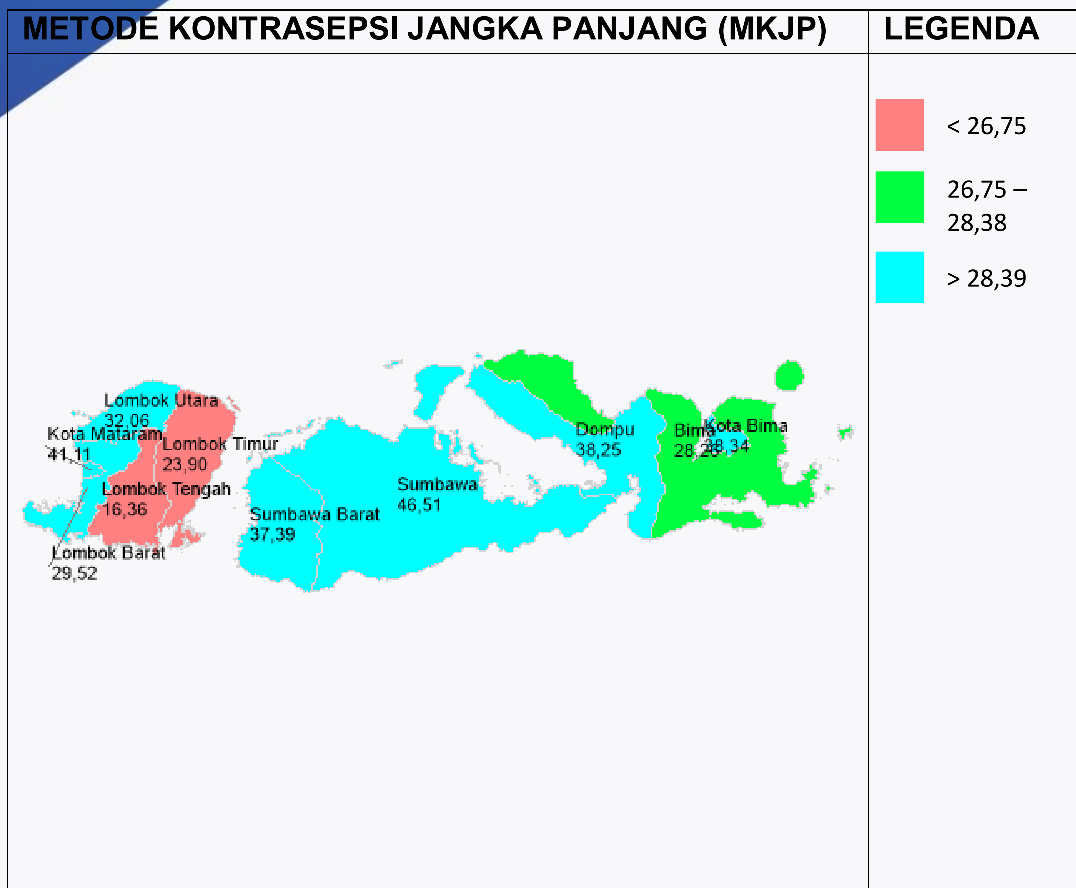
Berdasarkan peta di atas terlihat bahwa untuk indikator *unmet need* di Provinsi NTBjuga perlu perhatian yang besar karena dari seluruh kabupaten/kota di NTB, baru ada tiga kabupaten/kota yang sudah mencapai target mCPR yang telah ditetapkan yakni Lombok Tengah, Lombok Timur, dan Lombok Utara.



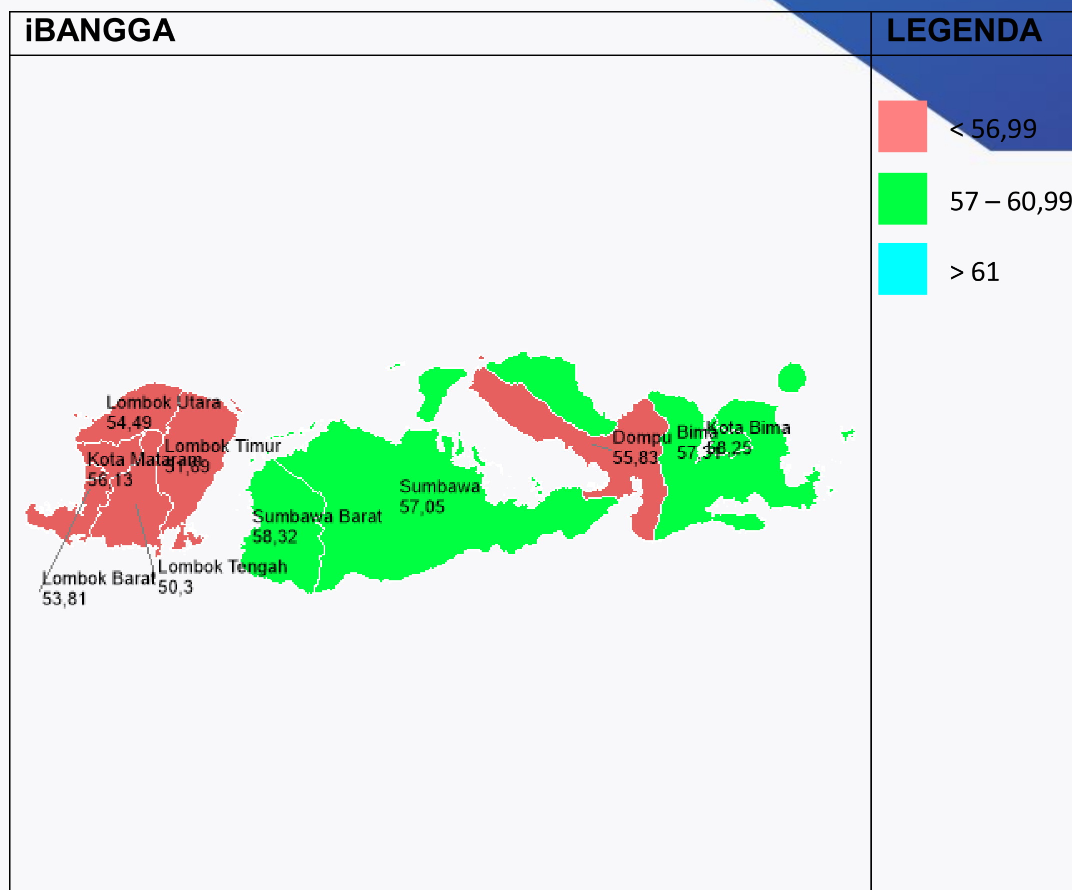
Berdasarkan peta di atas, terlihat bahwa angka Median Usia Kawin Pertama (MUKP) di Provinsi NTB sudah cukup baik karena sebagian besar kabupaten/kotanya telah mencapai target MUKP yang telah ditentukan. Walau demikian, masih terdapat beberapa kabupaten/kota yang belum mencapai target yang telah ditetapkan yaitu Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Timur, dan Lombok Utara.



Berdasarkan peta di atas terlihat bahwa untuk indikator mCPR sebagian besar kabupaten/kota di Provinsi NTB masih sangat rendah dan belum mencapai target. Hanya terdapat dua kabupaten/kota di NTB yang telah mencapai target adalah Lombok Utara dan Lombok Barat. Hal ini perlu menjadi perhatian, karena dapat menjadi batu sandungan dalam program penurunan fertilitas dan pemenuhan kebutuhan KB di NTB yang masih didapati tinggi.



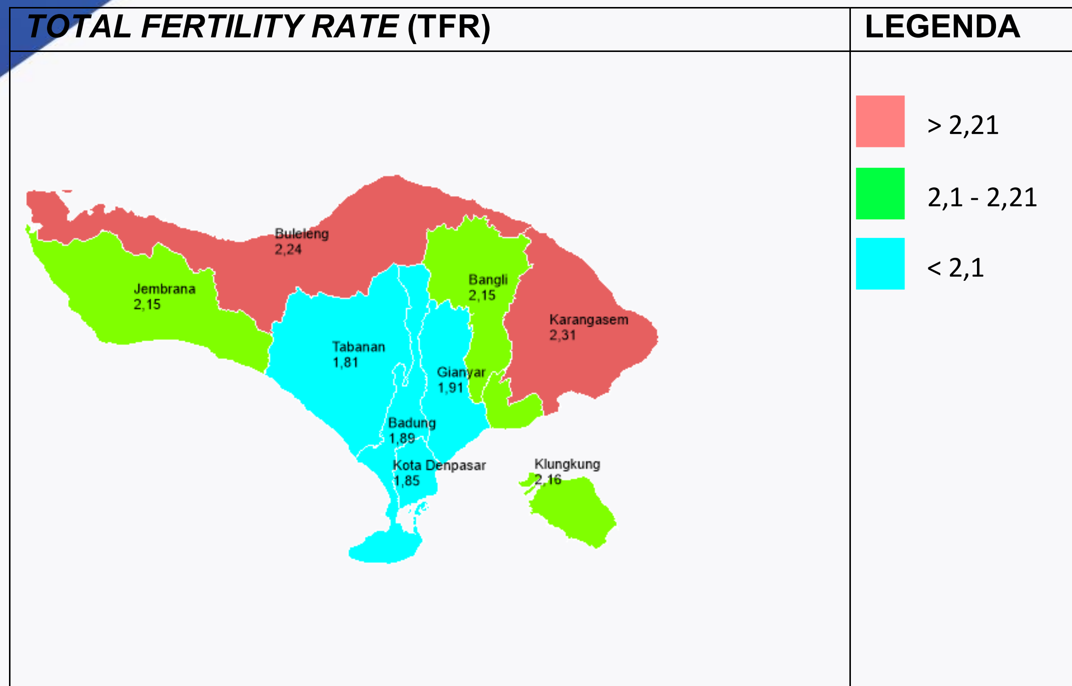
Secara umum berdasarkan peta di atas dapat dilihat bahwa capaian indikator MKJP di NTB sudah cukup baik karena sebagian besar kabupaten/kotanya sudah mencapai target, untuk tahun 2022 bahkan tahun 2024. Namun dimikian, masih terdapat dua kabupaten/kota di Provinsi NTB yang belum mencapai target MKJP yakni Lombok Tengah dan Lombok Timur.



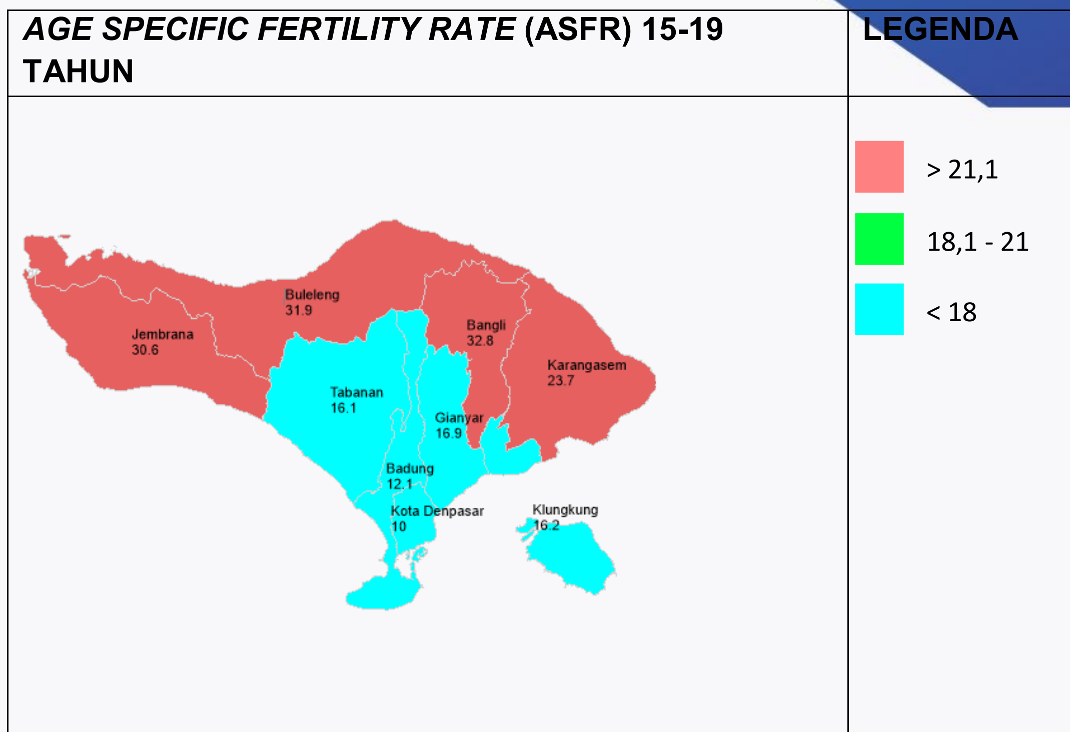
Berdasarkan peta di atas dapat dilihat bahwa secara umum sebagian besar kabupaten/kota di NTB masih belum mencapai target iBangga yang telah ditetapkan. Namun demikian terdapat empat kabupaten/kota di NTB yang telah mencapai target iBangga yakni Sumbawa Barat, Sumbawa, Bima, dan Kota Bima.

4.2.19. Peta Parameter Provinsi Bali

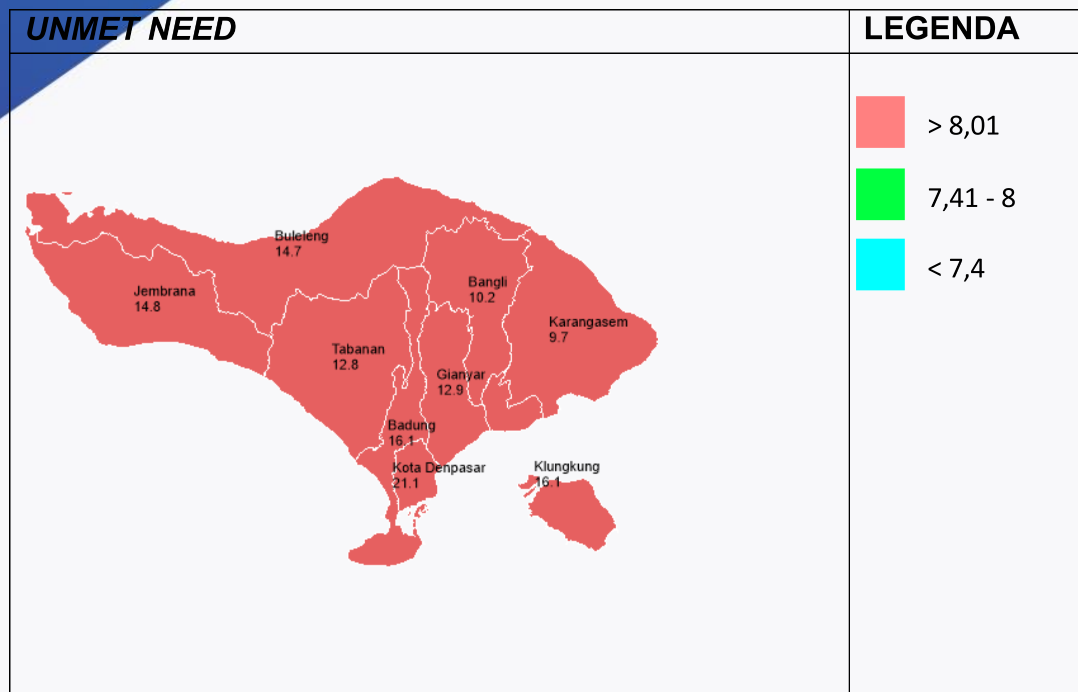
TOTAL FERTILITY RATE **(TFR)**	**LEGENDA**



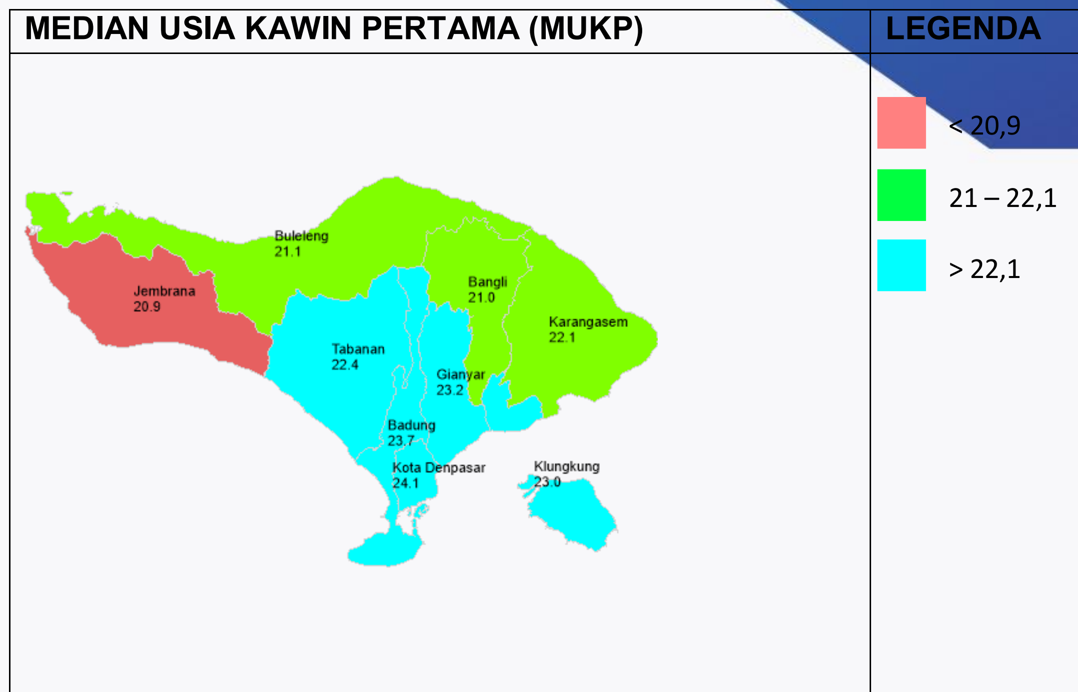
Pemetaan TFR untuk Provinsi Bali memiliki kabupaten/kota yang telah berhasil mencapai target 2024 (biru) yaitu Kabupaten Tabanan, Gianyar, Badung dan Kota Denpasar. Sementara Kabupaten yang telah berhasil mencapai target 2022 (hijau) adalah Klungkung, Bangli dan Jembrana. Sedangkan yang belum mencapai target 2022 adalah Buleleng dan Karangasem, kedua kabupaten ini perlu untuk terus menurunkan TFR nya sampai pada target yang telah ditetapkan, sedangkan untuk kabupaten lainnya yang telah mencapai target juga harus mempertahankan angka TFR tersebut dan mencapai penduduk tumbuh seimbang TFR = 2,1



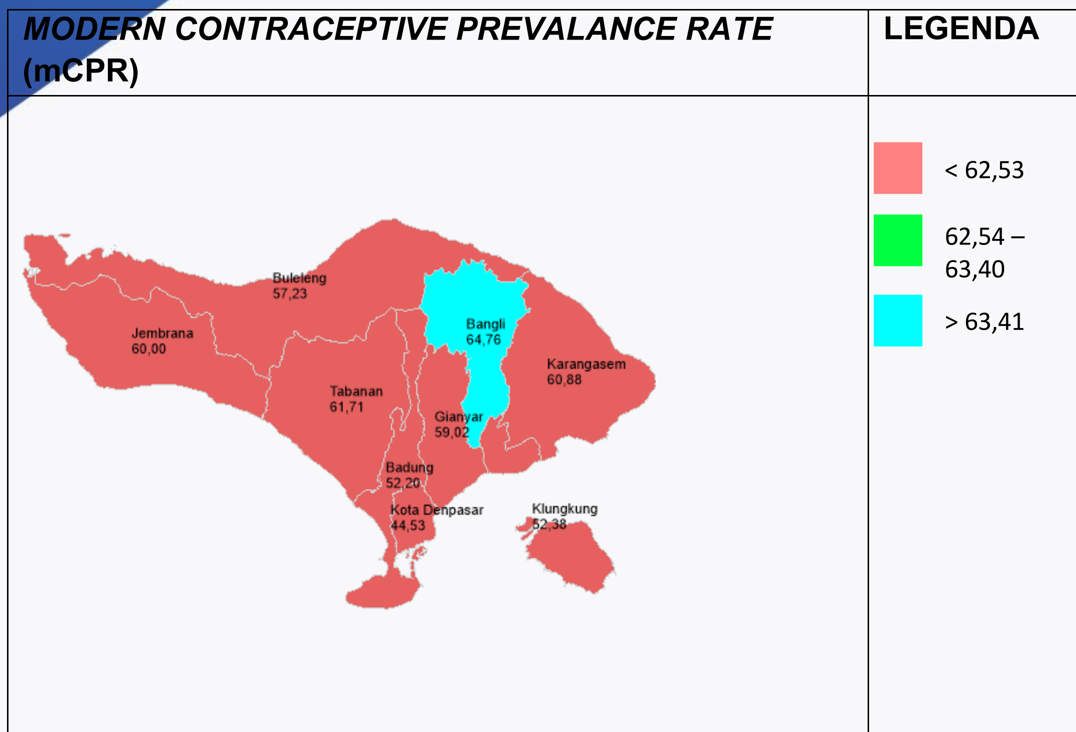
Berdasarkan peta di atas terlihat bahwa indikator ASFR 15-19 tahun di Provinsi Bali ada yang sudah sangat baik dengan mencapai target tahun 2024 yaitu Kota Denpasar, Gianyar, Tabanan, Badung dan Klungkung. Sementara sisanya masih memiliki ASFR diatas 21 yang artinya belum mencapai target tahun 2022. Ini menunjukkan bahwa daerah penurunan ASFR 15-19 tahun harus diutamakan pada wilayah di utara Provinsi Bali.



Berdasarkan peta di atas terlihat bahwa untuk indikator unmet need di Provinsi Bali perlu perhatian yang besar karena seluruh kabupaten/kota di Provinsi Bali memiliki angka unmet need yang sangat tinggi yaitu di atas 8 persen. Ini menunjukkan bahwa program penurunan unmet need harus merata di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Bali.

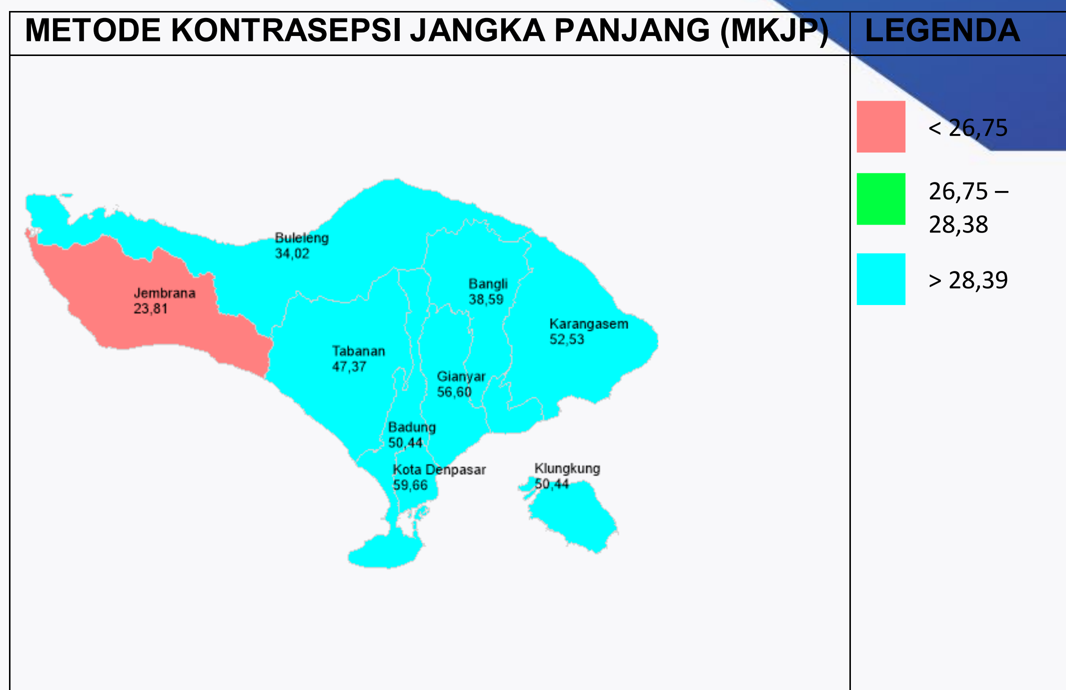


Berdasarkan peta di atas, terlihat bahwa angka Median Usia Kawin Pertama (MUKP) di Provinsi Bali sudah cukup baik karena hanya ada 1 kabupaten yang tidak mencapai target tahun 2022 yaitu kabupaten Jembrana. Sementara yang telah mencapai target tahun 2022 – hijau adalah Buleleng, Bangli dan Karangasem, sementara 5 kabupaten lainnya berhasil mencapai target tahun 2024 yaitu diatas 22,1 tahun dan telah berwarna biru. Sehingga khusus untuk Kabupaten Jembarana kampanye Program Upaya Pendewasaan Perkawinan perlu lebih ditingkatkan untuk dapat meningkatkan MUKP pada kabupaten tersebut.

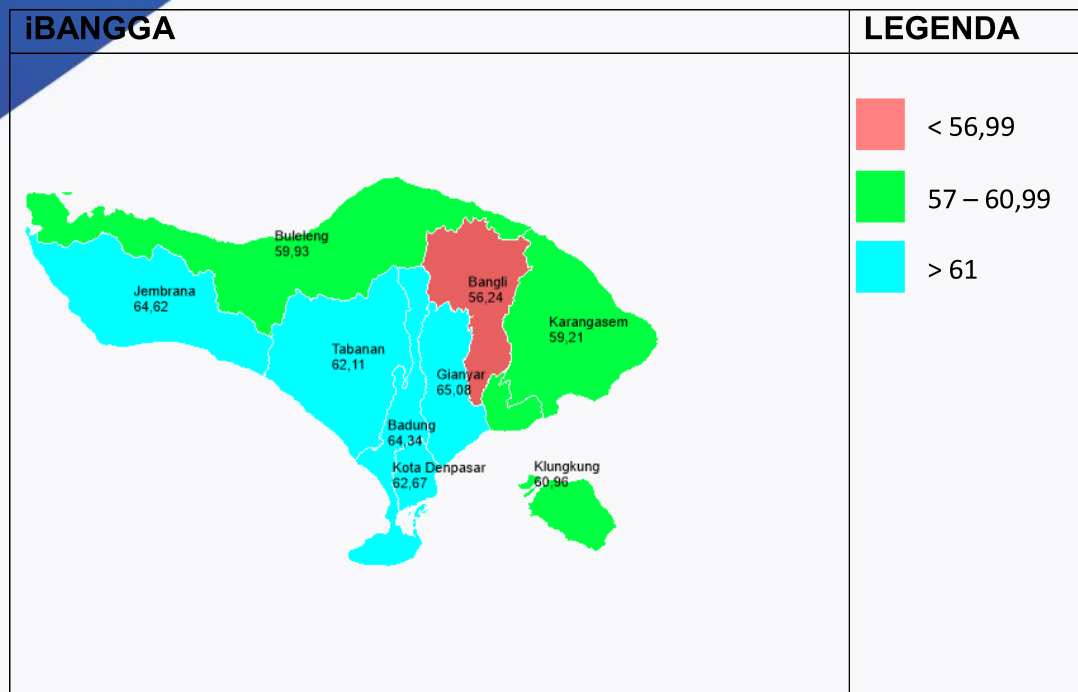


Berdasarkan peta di atas terlihat bahwa untuk indikator mCPR di Provinsi Bali masih menghadapi tantangan yang berat dimana hampir semua kabupaten/kota berwarna merah alias tidak berhasil mencapai target tahun 2022, hanya Kabupaten Bangli yang berhasil mencapai target tahun 2024 dan berwarna biru. mCPR harus secara merata ditingkatkan pada wilayah-wilayah yang belum mencapai target dengan meningkatkan akses pelayanan dan penggerakkan KB bagi penduduk di Provinsi Bali.

.

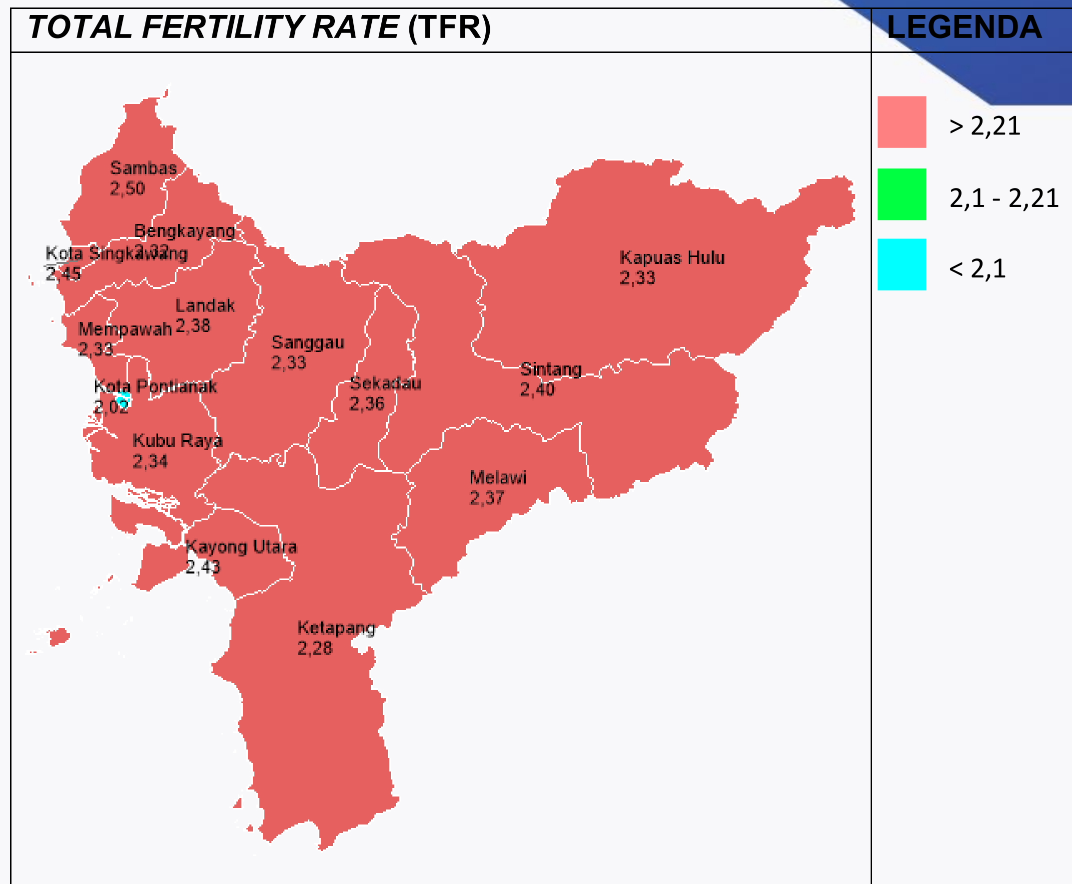


Berdasarkan peta di atas dapat dilihat MKJP di Provinsi Bali menunjukkan hasil yang cukup baik karena hampir seluruh wilayah kabupaten/kota berwarna biru yang artinya telah mencapai target tahun 2024. Hanya ada satu kabupaten yaitu Jembrana yang belum mencapai target tahun 2022 sehingga masih berwarna merah. MKJP memberikan perlindungan dari kehamilan yang lebih efektif kepada pasangan usia subur, sehingga dapat menurunkan angka putus pakai sehingga dapat menghindari kehamilan yang tidak diinginkan. Kabupaten Jembrana harus menerupaya meningkatkan pencapaian kinerja sehingga mencapai target yang telah ditetapkan.

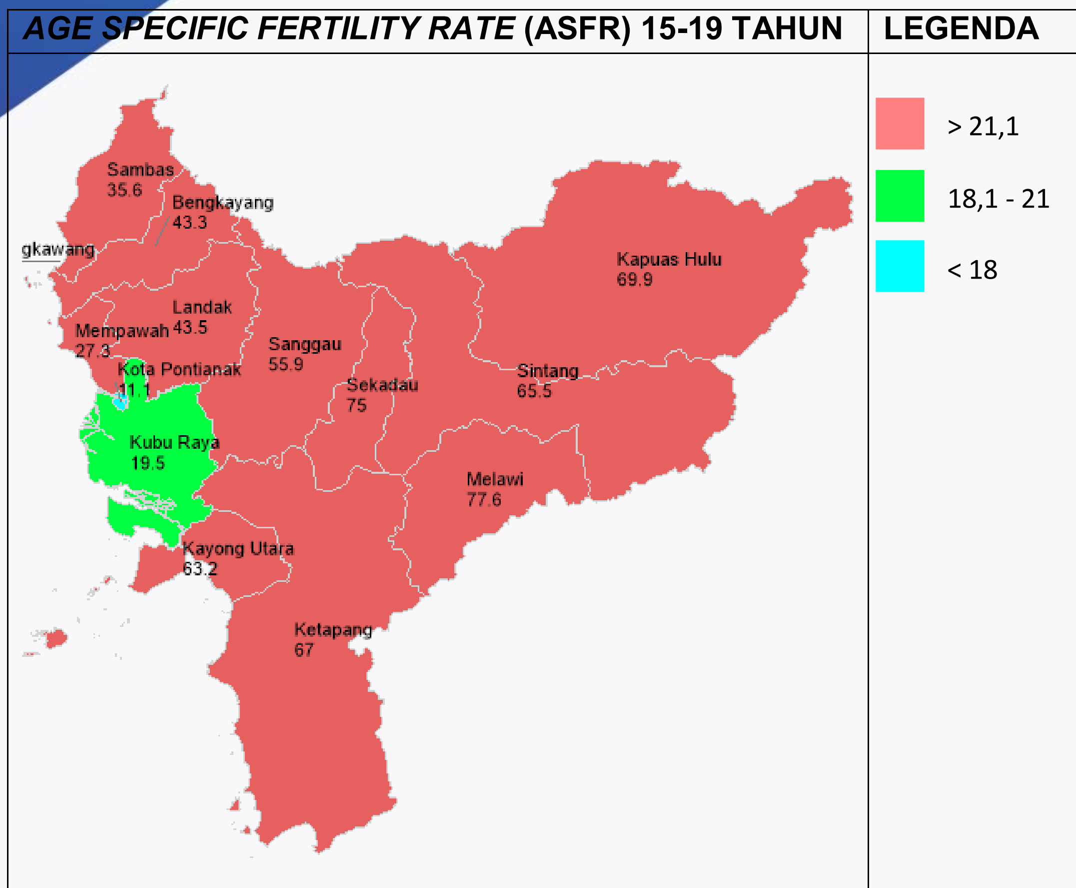


Peta di atas dapat dilihat iBangga kabupaten/kota di Provinsi Bali hampir seluruhnya telah mencapai target tahun 2022 (berwarna biru dan hijau), namun hanya 1 kabupeten Bangli yang berwarna merah dengan nilai 56,24 yang belum mencapai target tahun 2022 senilai 57. Kondisi tersebut menunjukan bahwa program-program untuk meningkatkan kualitas keluarga di Provinsi Bali harus ditekankan pada Kabupaten Bangli agar dimasa depan dapat berhasil mencapai targert yang telah ditetapkan.

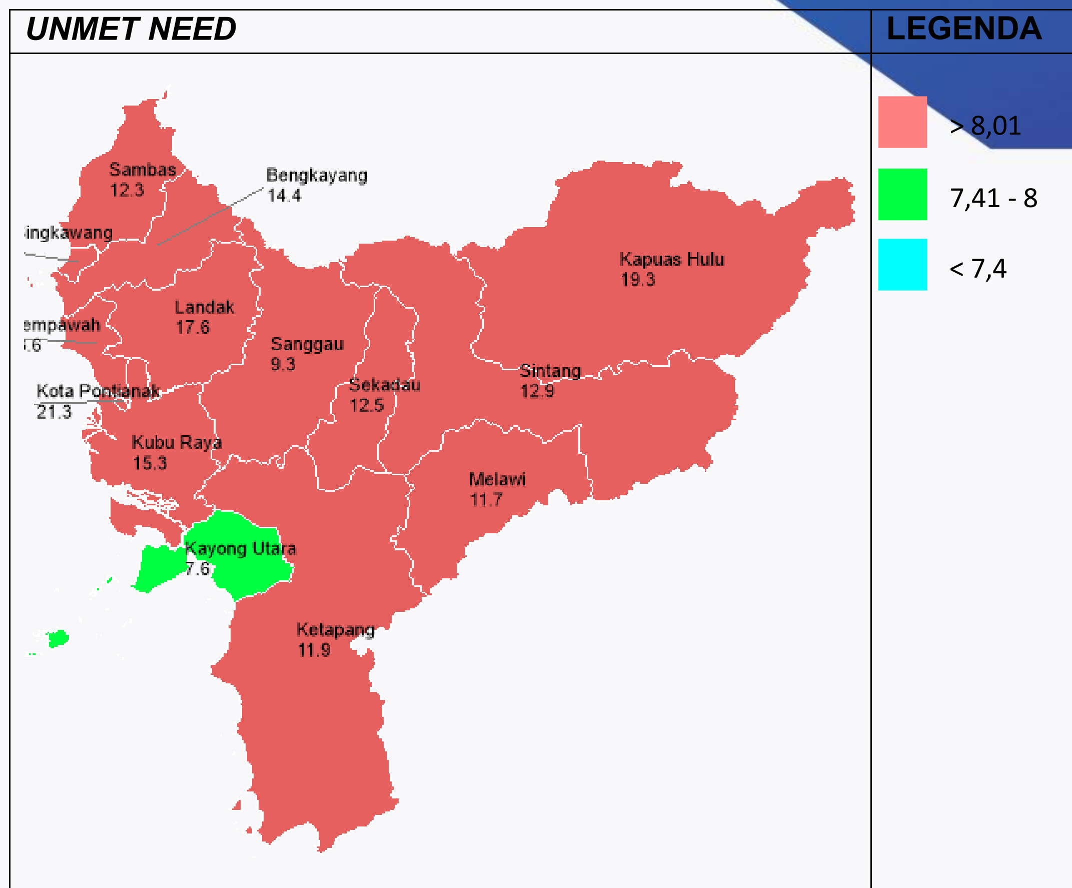
4.2.20. Peta Parameter Provinsi Kalimantan Barat



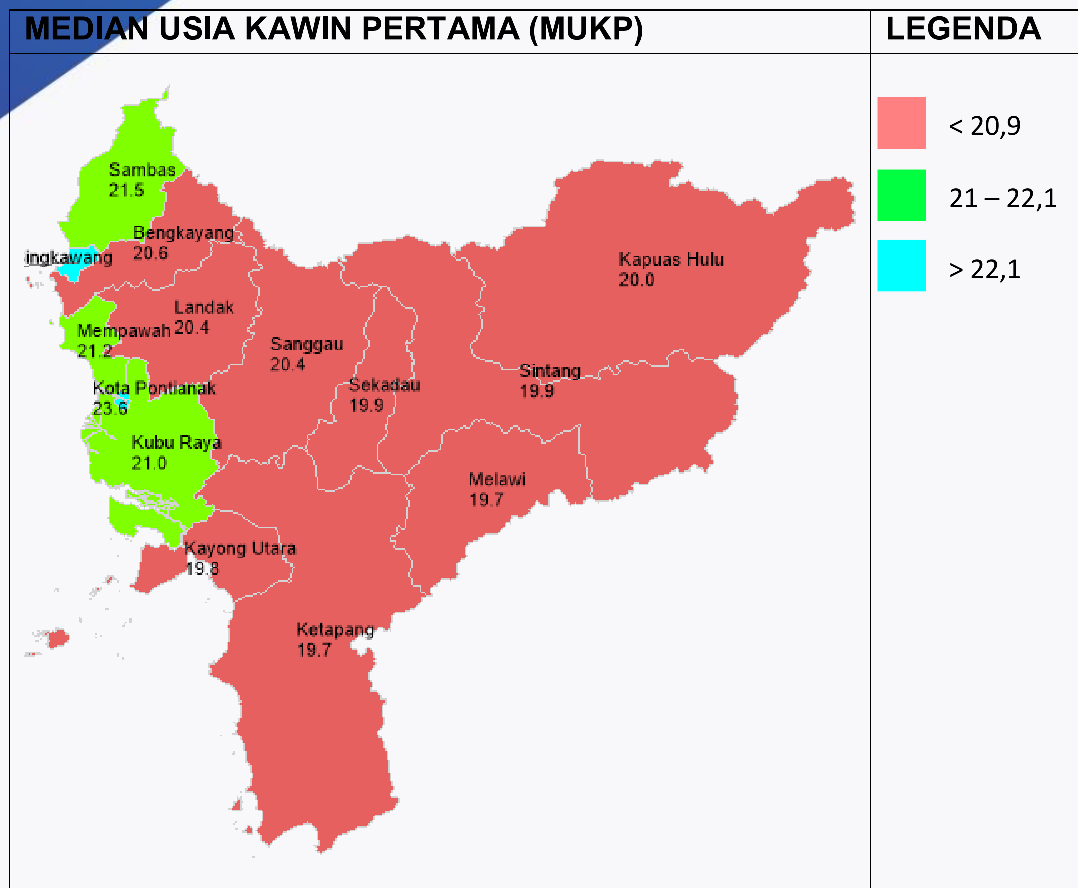
Peta terkait pencapaian TFR di atas memperlihatkan bahwa seluruh kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat memiliki TFR lebih dari 2,21, kecuali Kota Pontianak yang TFRnya cukup rendah yakni mencapai 2,02. Program Pengendalian kelahiran masih harus terus diupayakan karena masih tingginya angka TFR di Provinsi Kalimantan Barat.



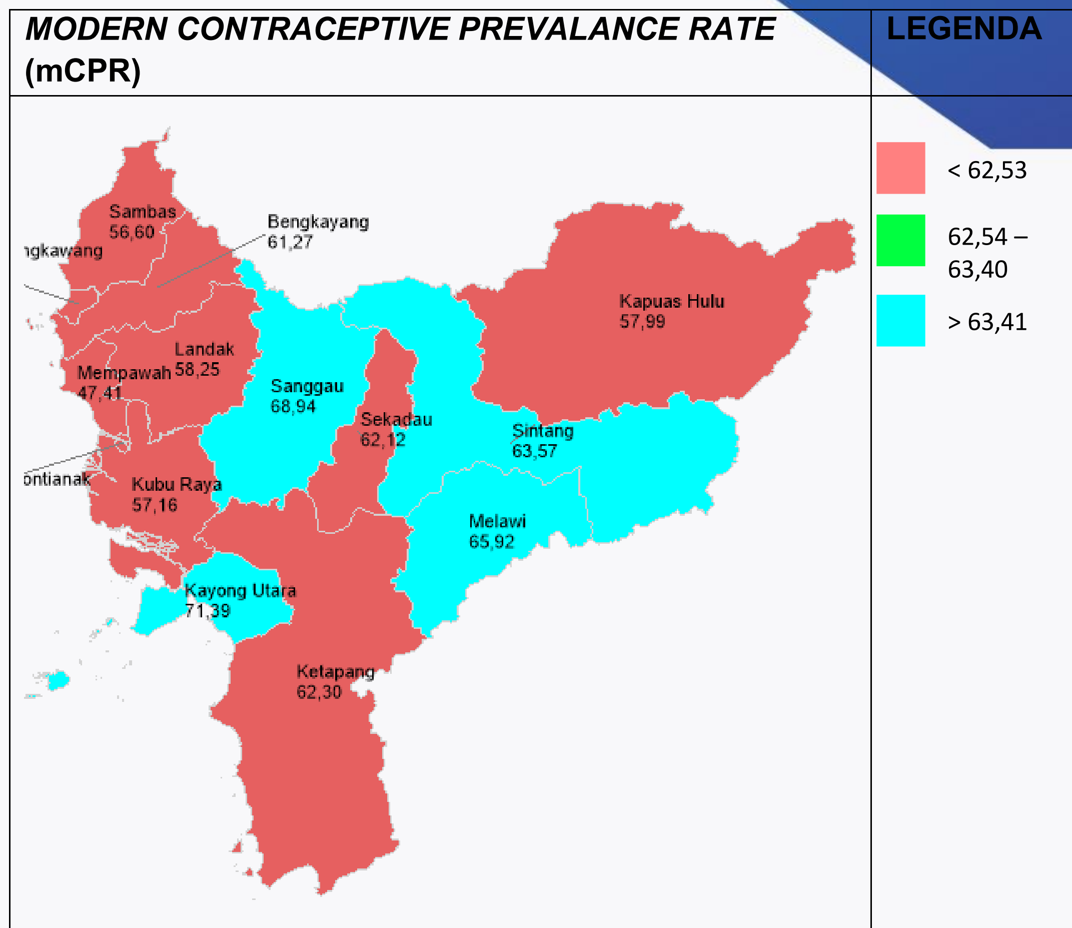
Berdasarkan peta di atas menunjukkan bahwa seluruh kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat memiliki angka ASFR 15-19 tahun di atas 21,1 kelahiran per 1000 perempuan usia 15 – 19 tahun, kecuali Kota Pontianak dan Kabupaten Kubu Raya. Oleh karena itu, diperlukan upaya penurunan pernikahan dini dan kelahiran pada remaja dengan menggandeng tokoh agama dan tokoh masyarakat.



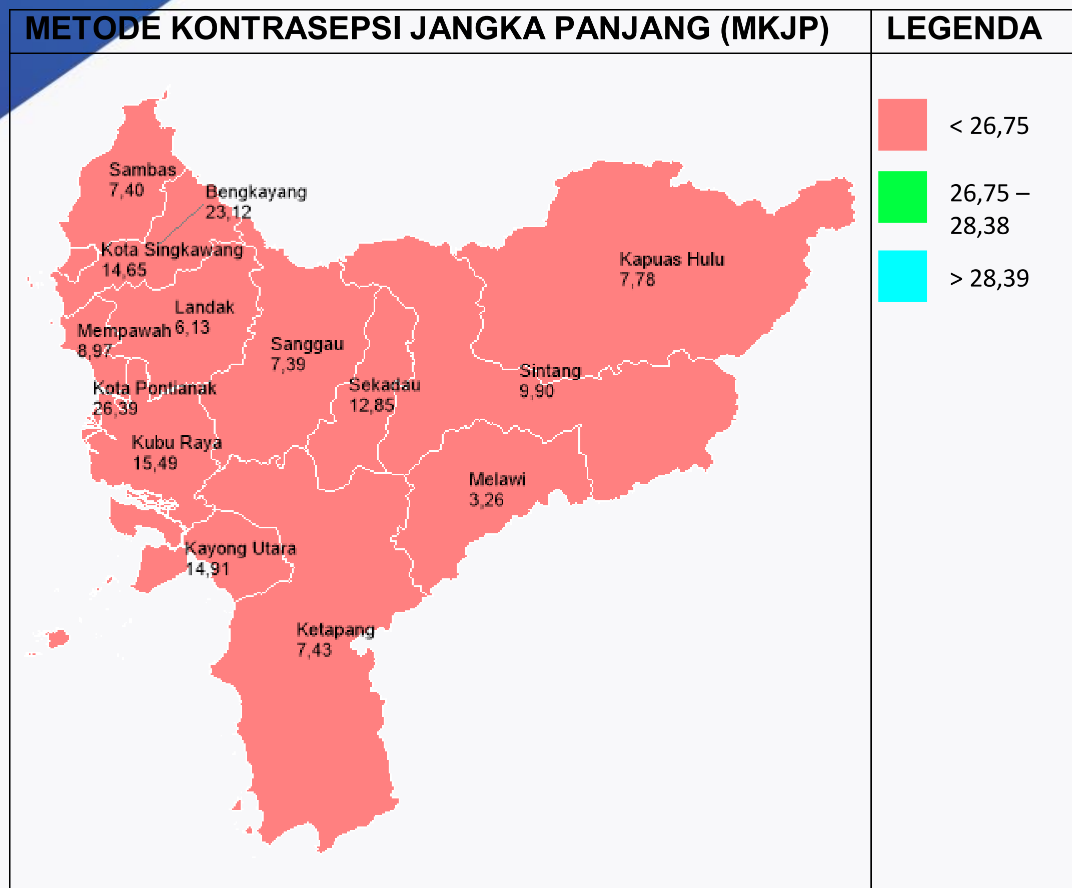
Peta terkait pencapaian indikator *unmet need* pada kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat di atas menunjukkan bahwa seluruh kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat memiliki *unmet need* di atas 8,01 persen kecuali Kabupaten Kayong Utara. Peningkatan kualitas dan keterjangkauan pelayanan KB merupakan hal yang harus diperhatikan di Provinsi Kalimantan Barat mengingat wilayahnya yang luas dan kurangnya tenaga kesehatan.



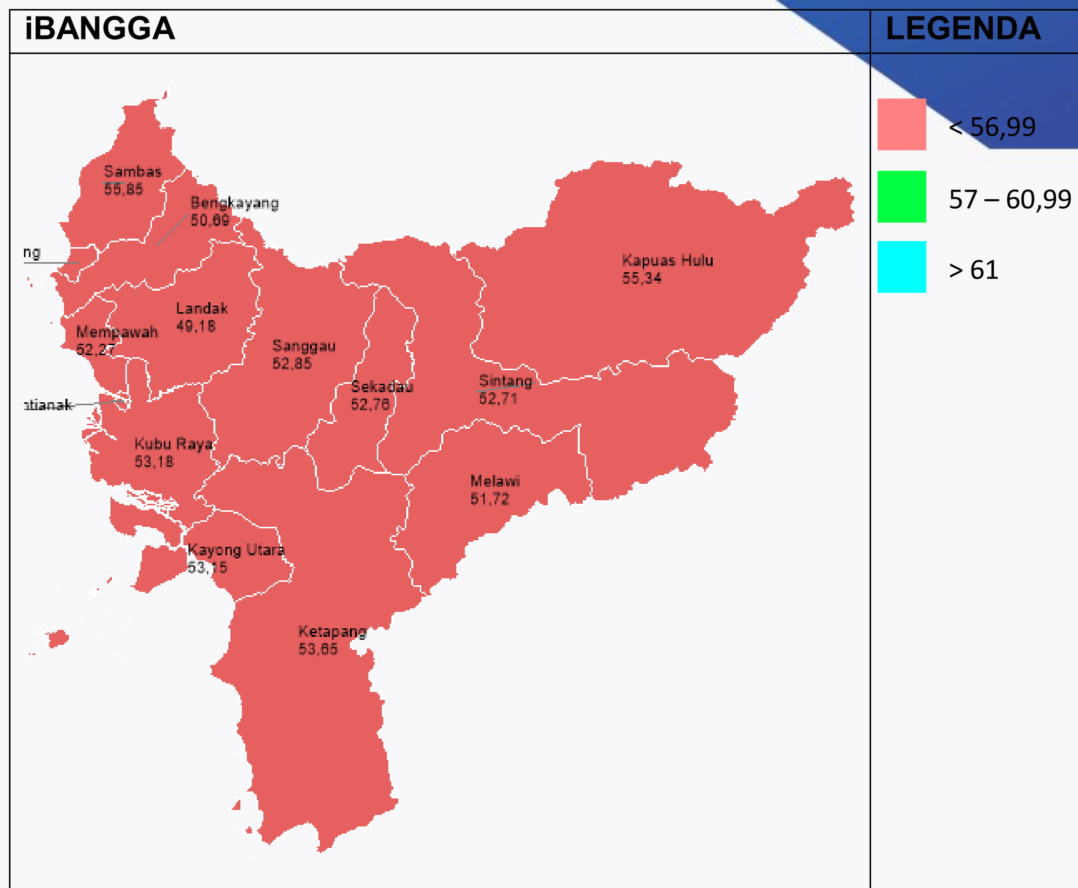
Berdasarkan peta di atas menunjukkan bahwa sebagian besar kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat masih memiliki angka Median Usia Kawin Pertama (MUKP) di bawah 20,9 tahun. Hanya Kabupaten Sambas, Kota Singkawang, Kabupaten Mempawah, Kota Pontianak, dan Kabupaten Kubu Raya yang memiliki MUKP di atas 22,1 tahun. Dengan demikian diperlukan upaya untuk memasukkan nilai-nilai perencanaan keluarga melalui berbagai media terutama media sosial yang digunakan secara luas oleh masyarakat.



Peta terkait pencapaian indikator mCPR di Provinsi Kalimantan Barat di atas memperlihatkan bahwa Kabupaten Kayong Utara, Kabupaten Sanggau, Kabupaten Sintang dan Kabupaten Melawi memiliki mCPR di atas 63,41 persen. Di sisi lain, sebagian besar kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat lainnya memiliki pencapaian mCPR di bawah 62,53 persen. Oleh karena itu, sosialisais terkait pemakaian kontrasepsi modern perlu dilkaukan secara masih di Provinsi Kalimantan Barat.

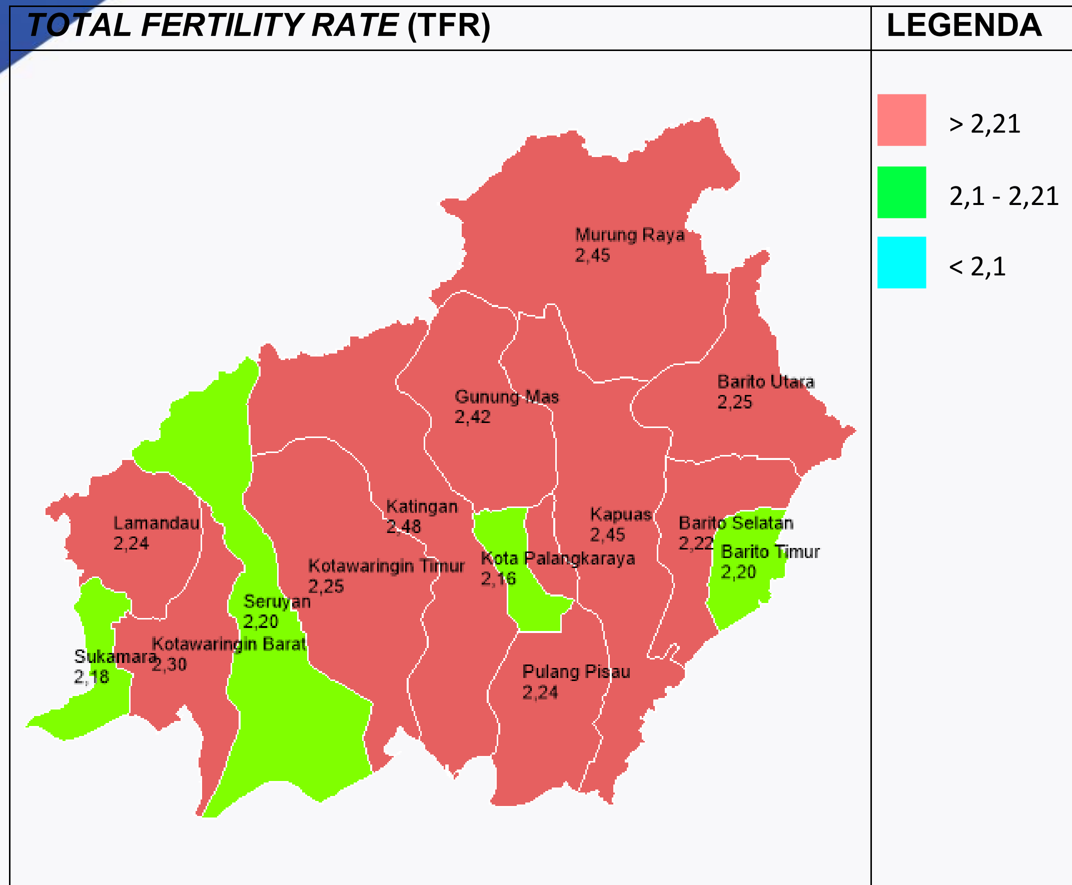


Peta di atas menunjukkan bahwa pencapaian indikator MKJP Provinsi Kalimantan Barat masih belum baik karena seluruh kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat memiliki pencapaian MKJP di bawah 26,75 persen. Hal ini patut menjadi perhatian karena wilayah Provinsi Kalimantan Barat yang luas dan pelayanan KB tidak tersedia secara optimal serta kontinu maka diperlukan kontrasepsi metode jangka panjang untuk menghindari adanya *unmet need*. Oleh karena itu, perlu adanya sosialisasi terkait pentingnya pemakaian kontrasepsi jangka panjang terutama untuk daerah dengan wilayah yang luas.

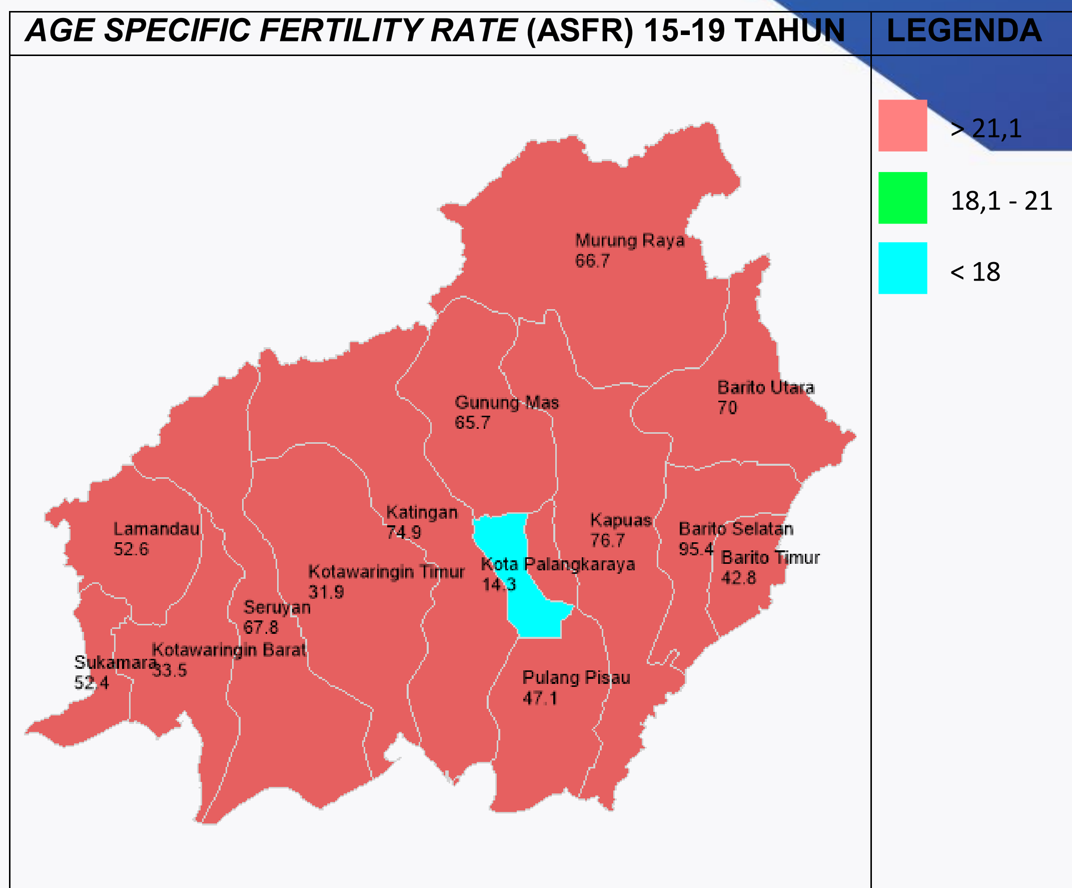


Berdasarkan peta di atas terlihat bahwa pencapaian indeks iBangga di kabupaten/kota Provinsi Kalimantan Barat belum optimal karena seluruh kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat belum mencapai target indeks iBangga (di bawah 56,99). Perlu diupayakan pembinaan terkait Program Pembangunan Keluarga di wilayah ini

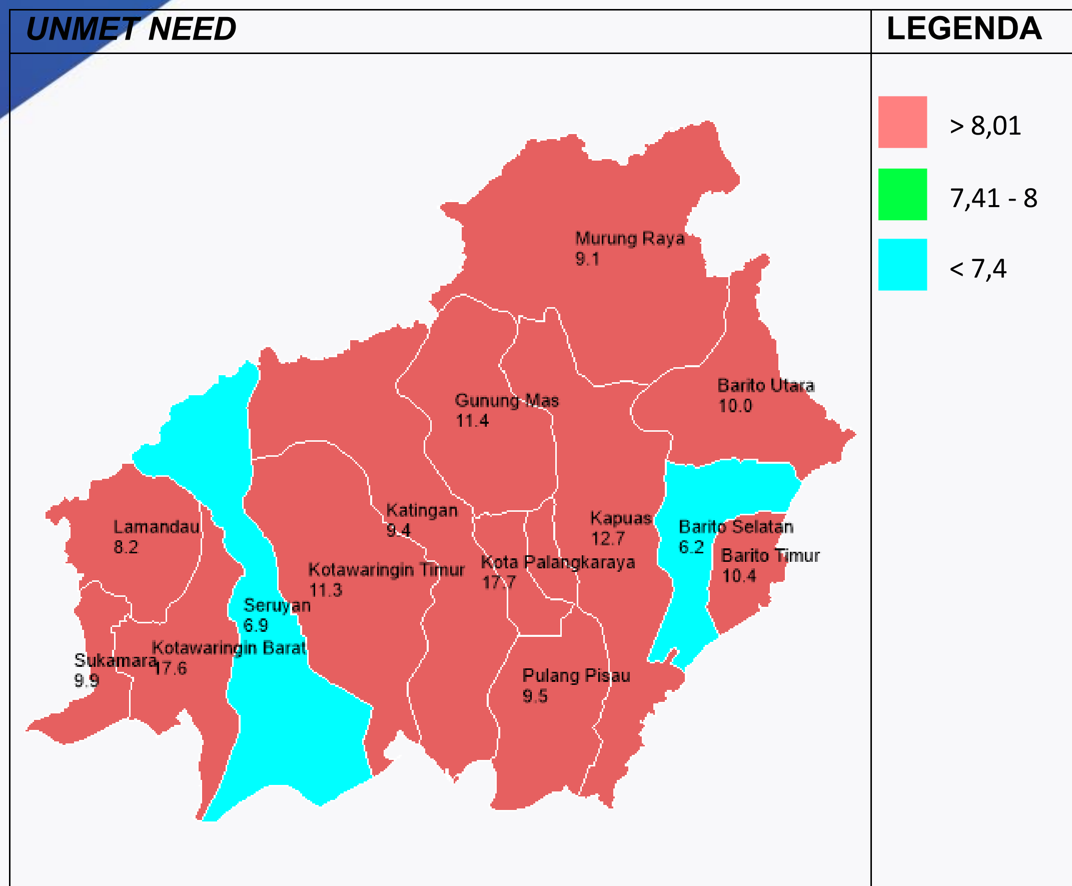
4.2.21. Peta Parameter Provinsi Kalimantan Tengah



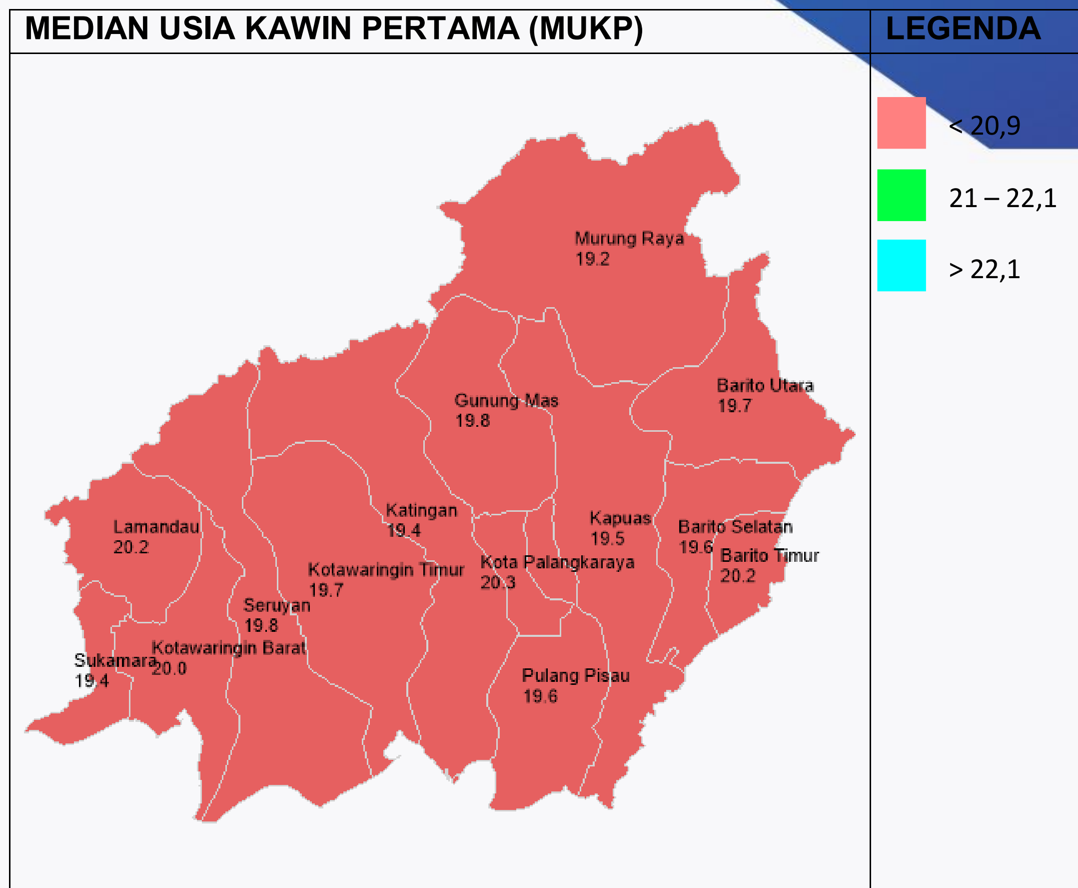
Peta di atas menunjukkan bahwa terkait pencapaian TFR di Provinsi Kalimantan Tengah masih belum optimal karena sebagian besar kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan tengah memiliki TFR lebih dari 2,21, kecuali Kabupaten Sukamara, Kabupaten Seruyan, Kota Palangkaraya, dan Kabupaten Barito Timur. Wilayah Kalimantan Tengah yang sangat luas dan penduduk yang hidup tersebar hingga ke pelosok mungkin menjadi salah satu hambatan dalam pemberian pelayanan KB sehingga diperlukan kebijakan untuk menyesuaikan pelayanan KB sesuai kondisi wilayahnya.



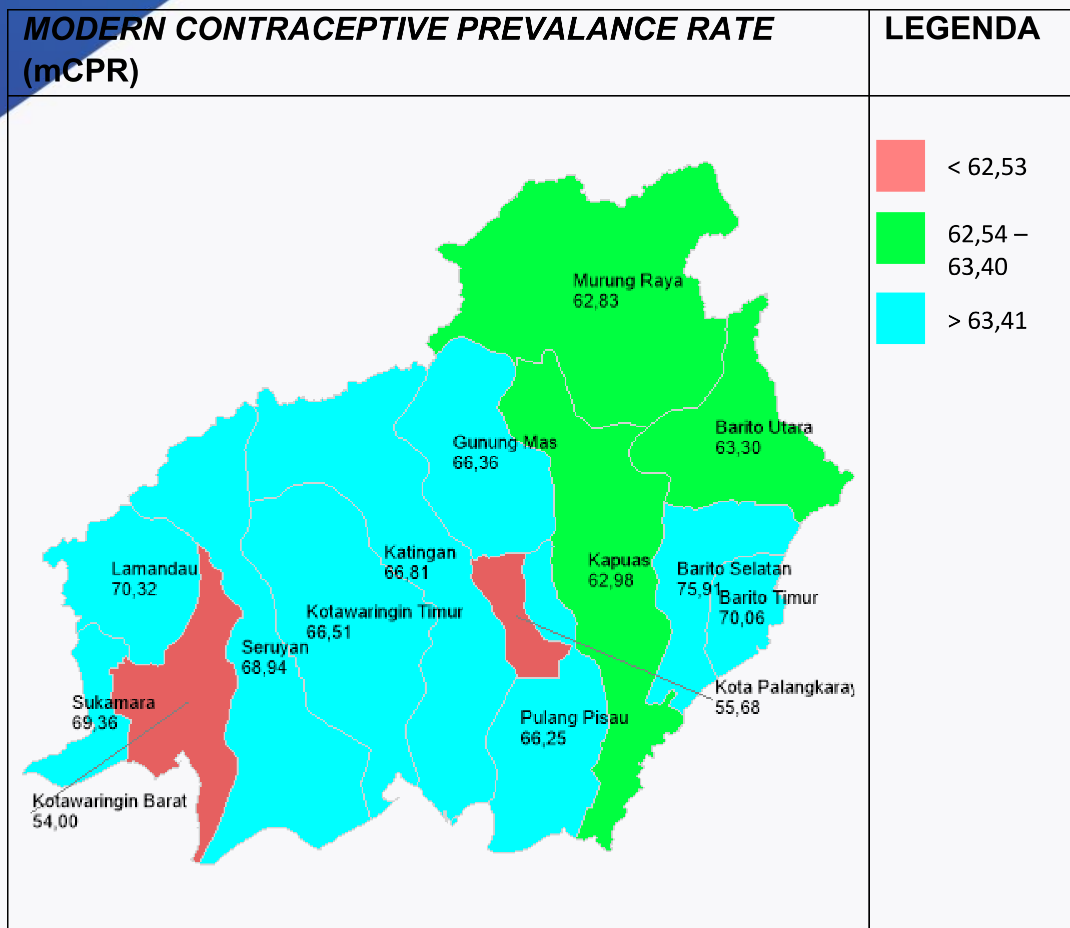
Berdasarkan peta di atas memperlihatkan bahwa seluruh kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Tengah memiliki angka ASFR 15-19 tahun di atas 21,1 kelahiran per 1000 perempuan usia 15 – 19 tahun, kecuali Kota Palangkaraya. Hal ini menandakan masih banyaknya kelahiran pada usia remaja di Provinsi Kalimantan Tengah sehingga perlu adanya perhatian dari masyarakat dan lintas sektor untuk menanggulangi hal tersebut.



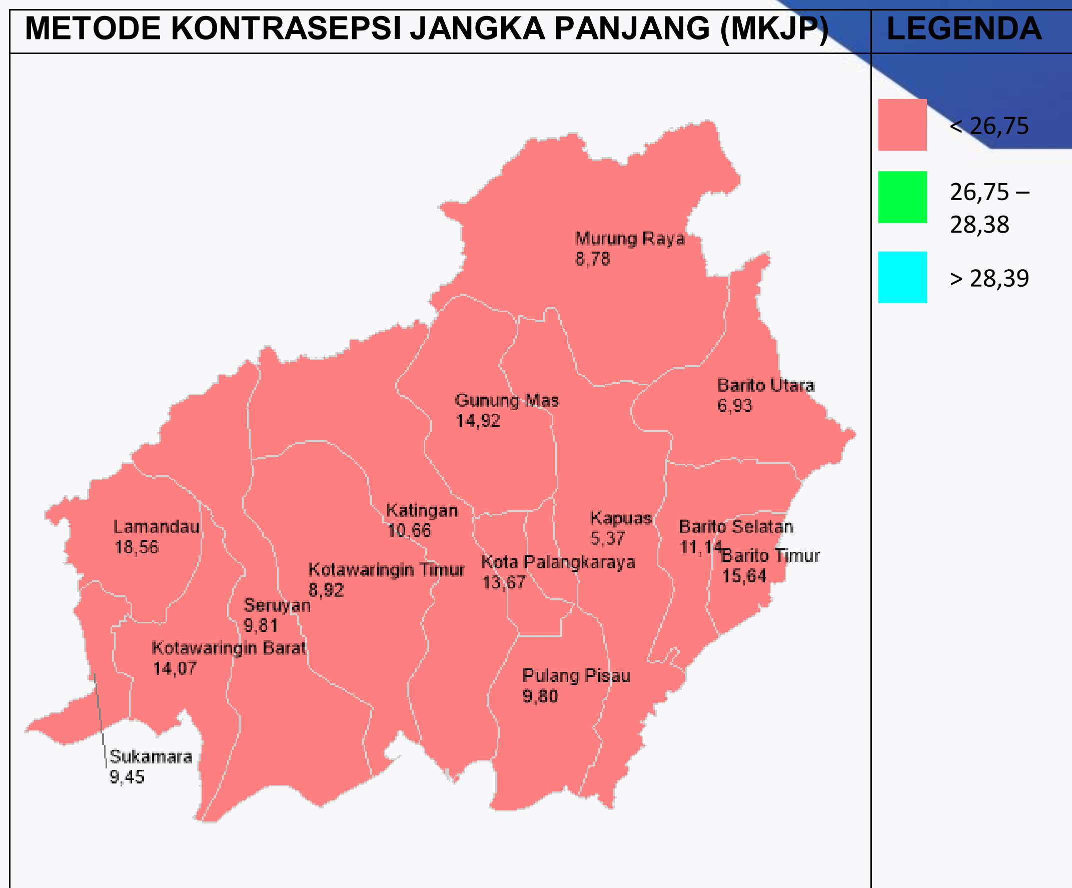
Peta di atas menunjukkan bahwa pencapaian indikator *unmet need* di Provinsi Kalimantan Tengah masih belum baik karena seluruh kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Tengah memiliki *unmet need* di atas 8,01 persen kecuali Kabupaten Seruyan dan Kabupaten Barito Selatan. Upaya penurunan *unmet need* di Provinsi Kalimantan Tengah harus mendapat perhatian karena terkait dengan kualitas dan keterjangkauan pelayanan KB.



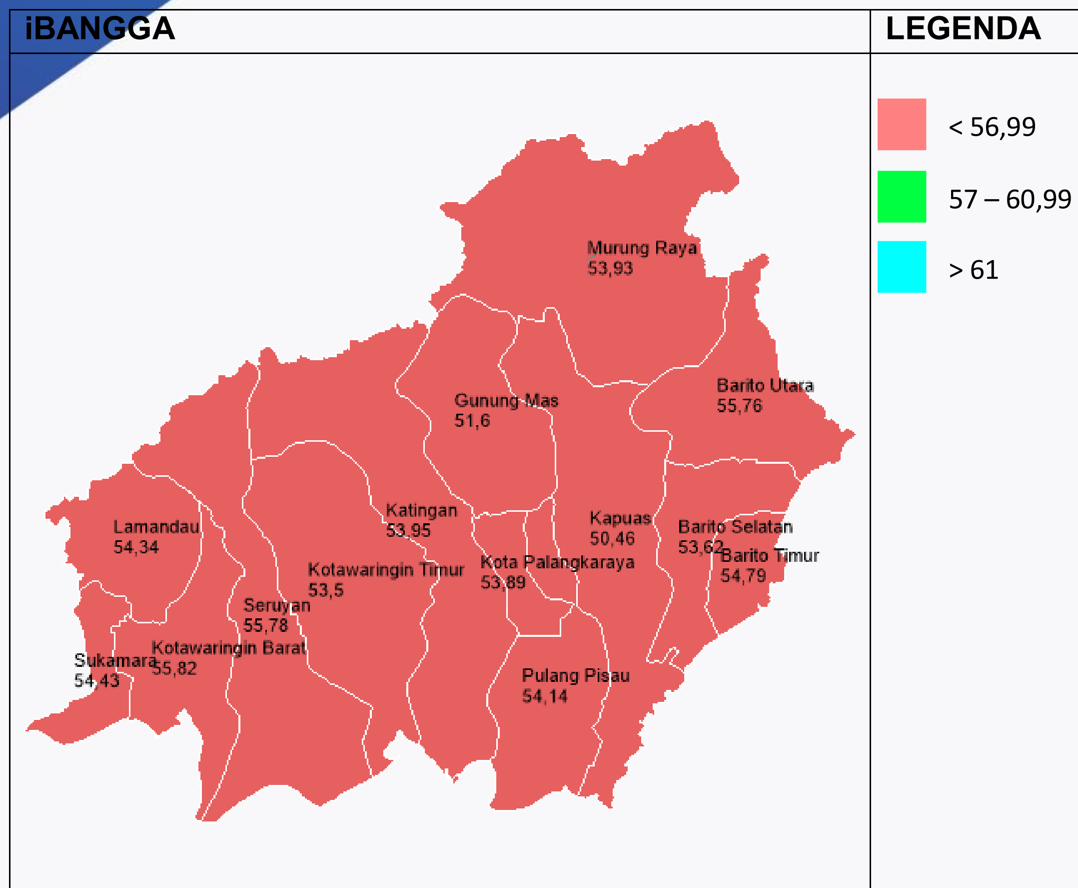
Berdasarkan peta di atas menunjukkan bahwa seluruh besar kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Tengah masih memiliki angka Median Usia Kawin Pertama (MUKP) di bawah 20,9 tahun. Rendahnya MUKP memiliki banyak konsekuensi antara lain terkait belum siapnya orangtua dalam menjalankan peran pengasuhan anak dan kelahiran pada remaja yang berimbas pada kejadian stunting, serta kematian ibu dan bayi.



Peta di atas memperlihatkan bahwa pencapaian indikator mCPR di Provinsi Kalimantan Tengah sudah baik karena hanya dua kabupaten/kota saja yang belum mencapai target indikator mCPR yaitu Kabupaten Kotawaringin Barat dan Kota Palangkaraya sedangkan kabupaten/kota lainnya memiliki capaian mCPR di atas 62,54 persen. Dengan demikian, perlunya adanya intervensi untuk upaya peningkatan pemakaian kontrasepsi modern di kedua daerah tersebut.

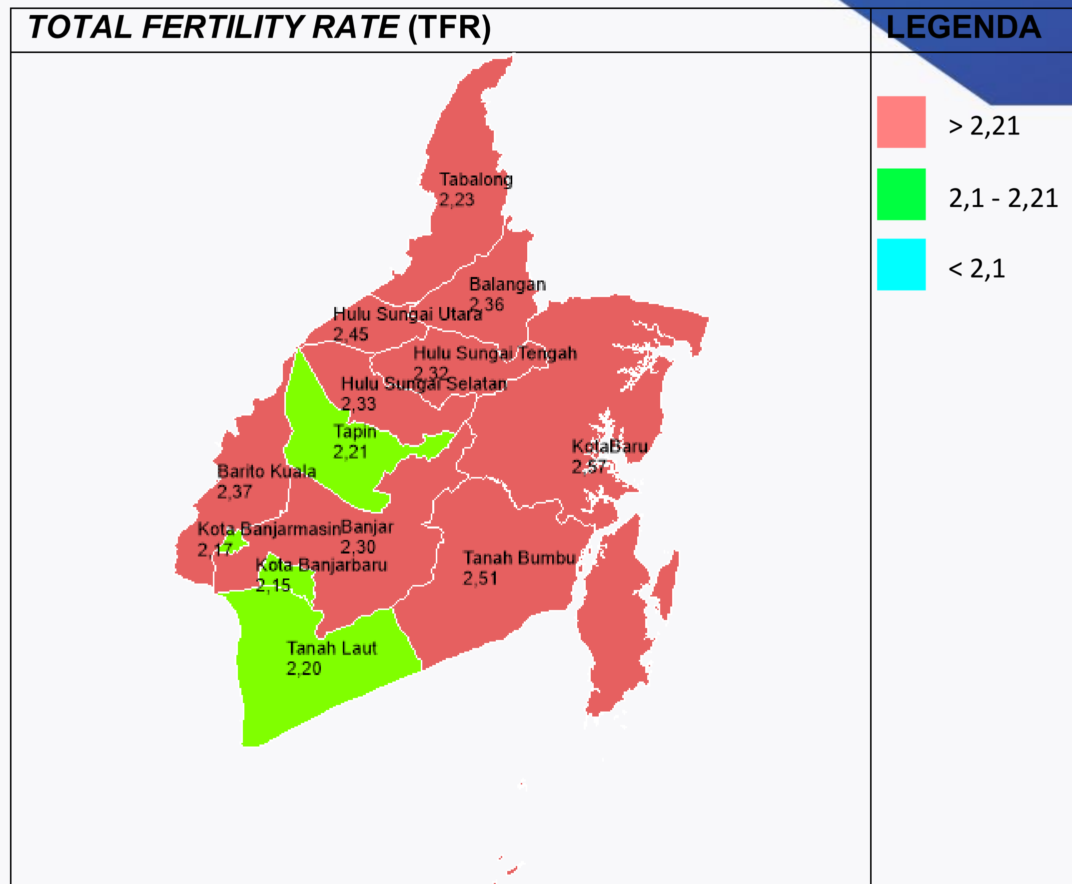


Peta di atas menunjukkan bahwa pencapaian indikator MKJP Provinsi Kalimantan Tengah masih belum baik karena seluruh kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan tengah memiliki pencapaian MKJP di bawah 26,75 persen. Ketidaknyamanan masyarakat dalam menggunakan kontrasepsi metode jangka panjang dan berbagai mitosnya menyebabkan rendahnya capaian indikator tersebut. Oleh karena itu, perlu sosialisasi yang lebih luas terkait pemakaian kontrasepsi metode jangka panjang.

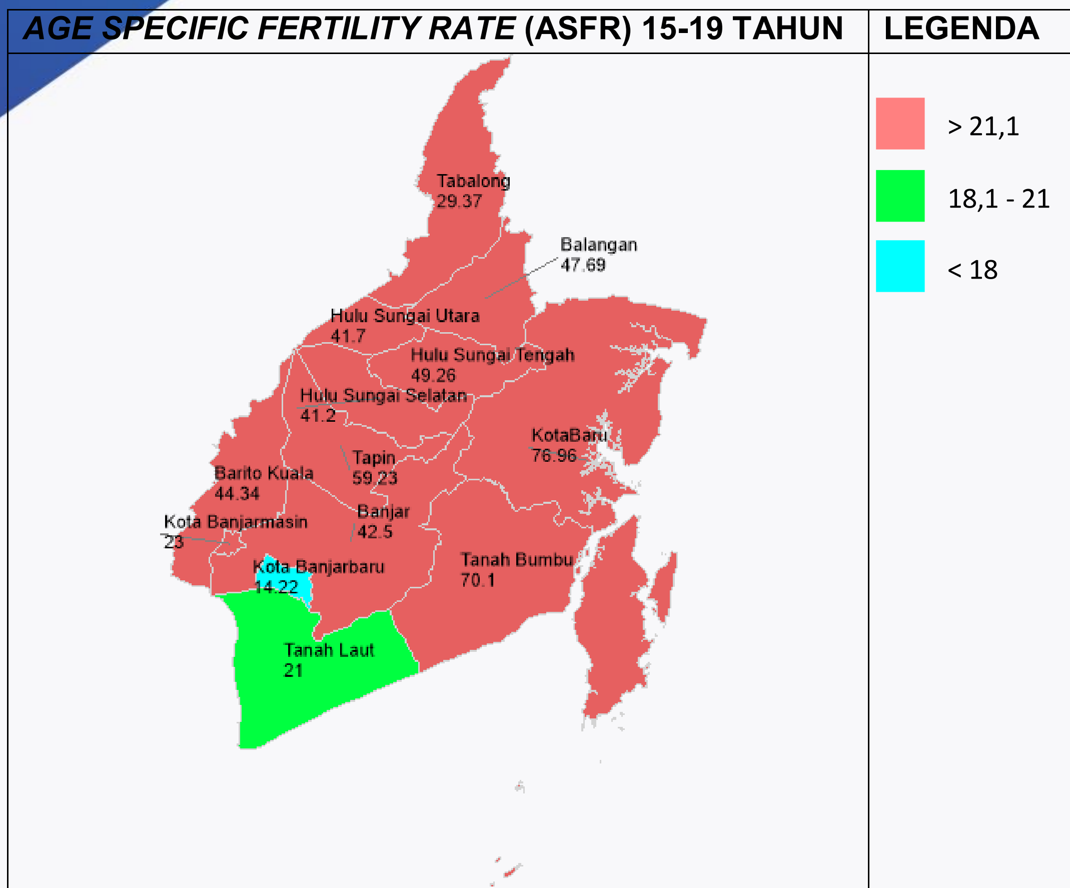


Berdasarkan peta di atas terlihat bahwa pencapaian indeks iBangga di kabupaten/kota Provinsi Kalimantan Tengah belum optimal karena seluruh kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Selatan belum mencapai target indeks iBangga (di bawah 56,99). Pentingnya peningkatan Program Pembangunan Keluarga untuk menuju keluarga yang berkualitas harus terus diupayakan di Provinsi Kalimantan Tengah.

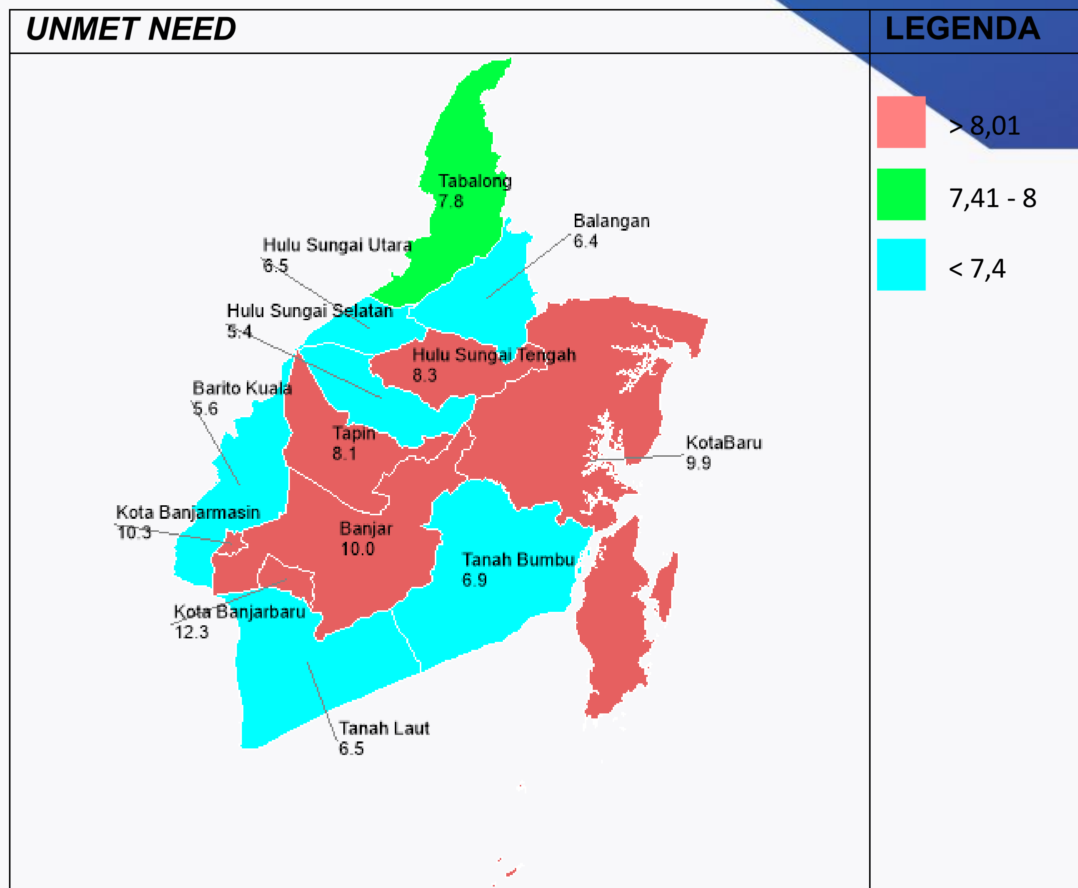
4.2.22. Peta Parameter Provinsi Kalimantan Selatan



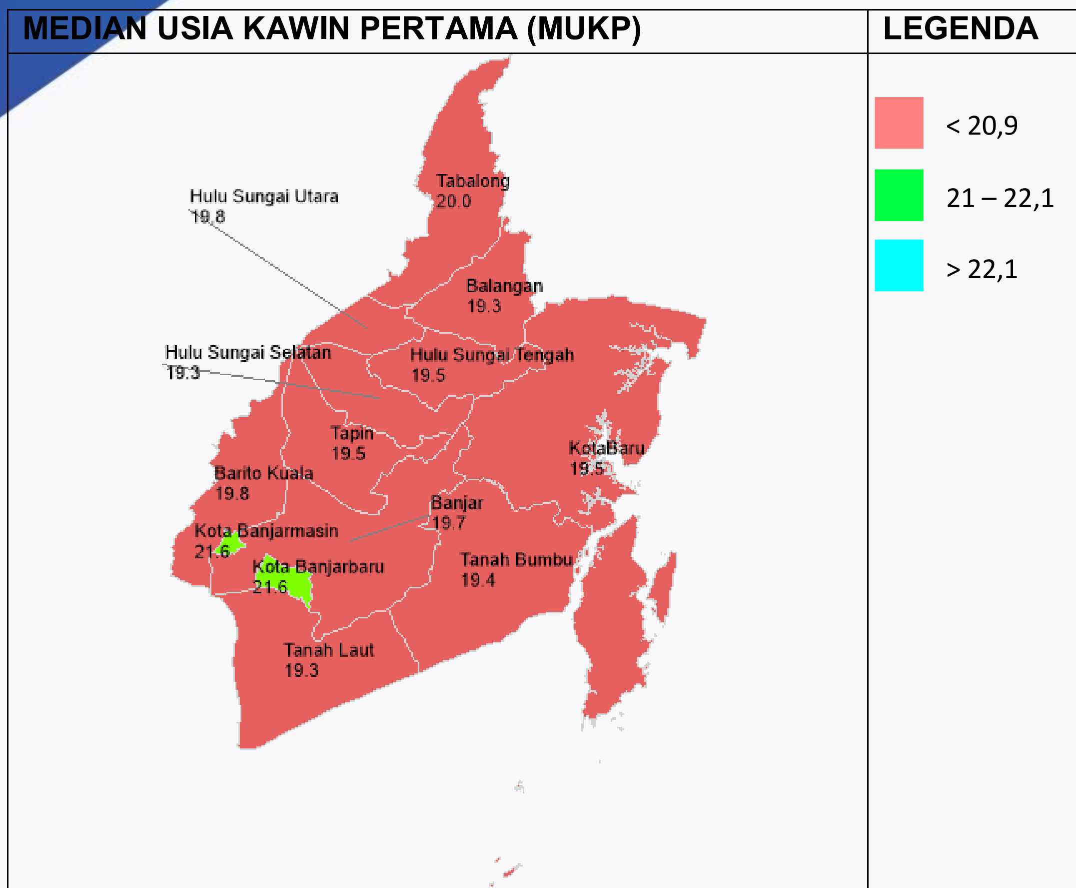
Peta di atas menunjukkan bahwa terkait pencapaian TFR di Provinsi Kalimantan Selatan masih belum optimal karena sebagian besar kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Selatan memiliki TFR lebih dari 2,21, kecuali Kabupaten Tapin, Kota Banjarmasin, Kota Banjarbaru, Kabupaten Tanah Laut. Dengan demikian, pemangku kebijakan masih tetap harus berfokus pada upaya pengendalian kelahiran.



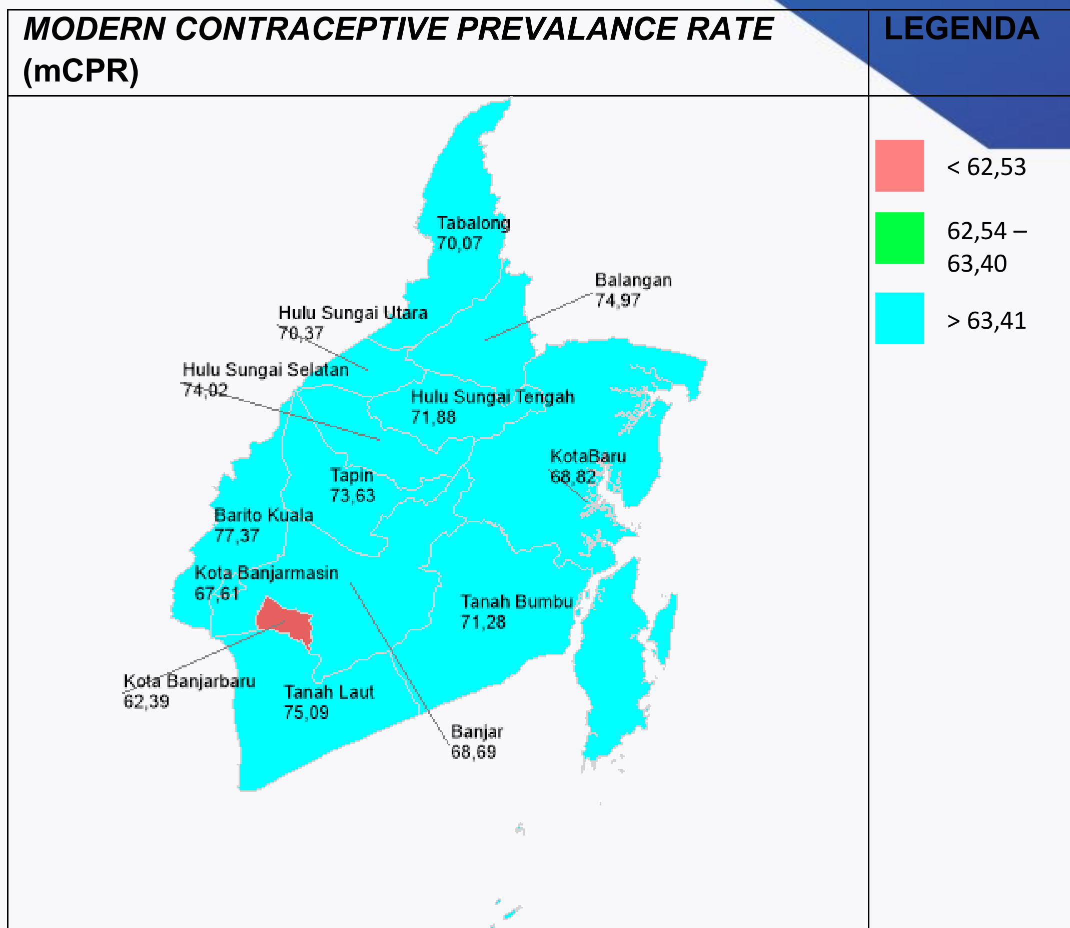
Berdasarkan peta di atas memperlihatkan bahwa seluruh kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat memiliki angka ASFR 15-19 tahun di atas 21,1 kelahiran per 1000 perempuan usia 15 – 19 tahun, kecuali Kota Banjarbaru dan Kabupaten Tanah Laut. Indikator ASFR 15-19 tahun merupakan indikator yang penting untuk melihat adanya peristiwa pernikahan dini dan kelahiran pada remaja sehingga diperlukan upaya untuk penurunan angka ASFR 15-19 tahun ini.



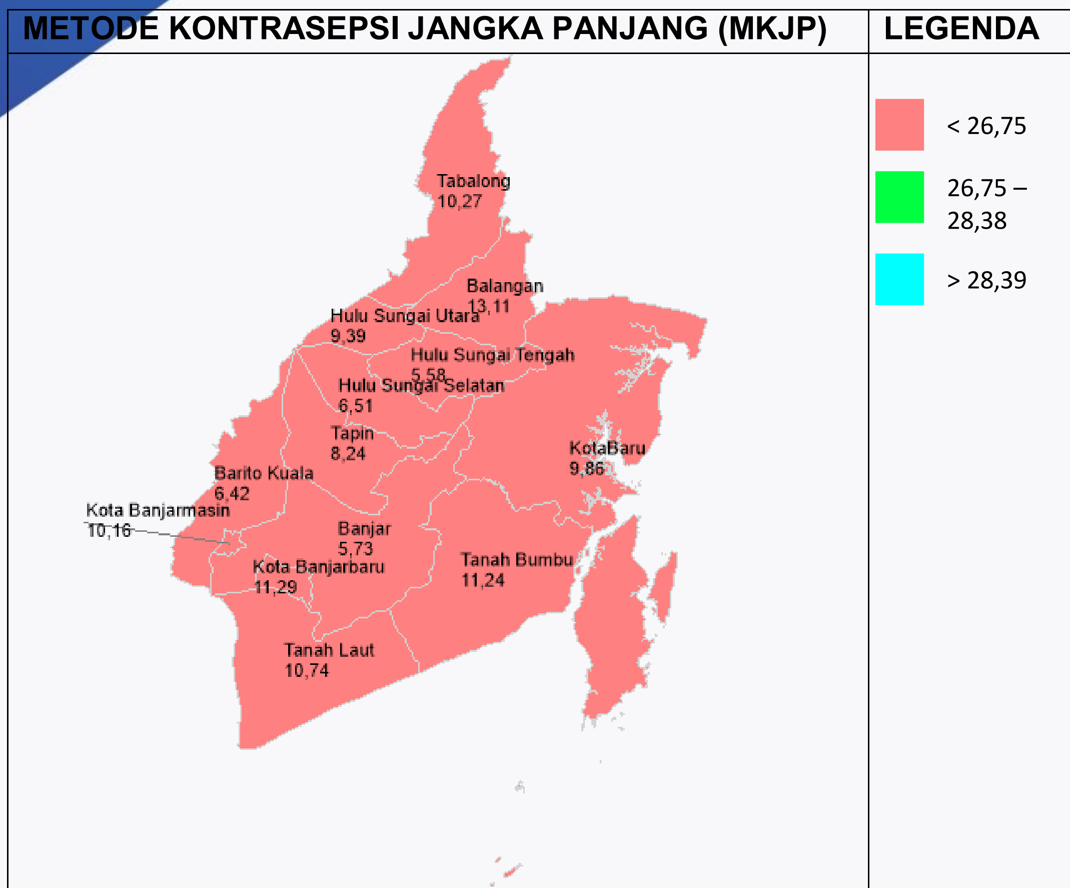
Peta di atas menunjukkan bahwa pencapaian indikator *unmet need* di Provinsi Kalimantan Selatan sudah cukup baik karena hanya 5 kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Selatan memiliki *unmet need* di atas 8,01 persen yaitu Kabupaten Banjar, Kabupaten Tapin, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kota Banjarmasin dan Kabupaten Kotabaru. Keempat kabupaten/kota tersebut harus menjadi lokus bagi upaya penurunan *unmet need* di Provinsi Kalimantan Selatan.



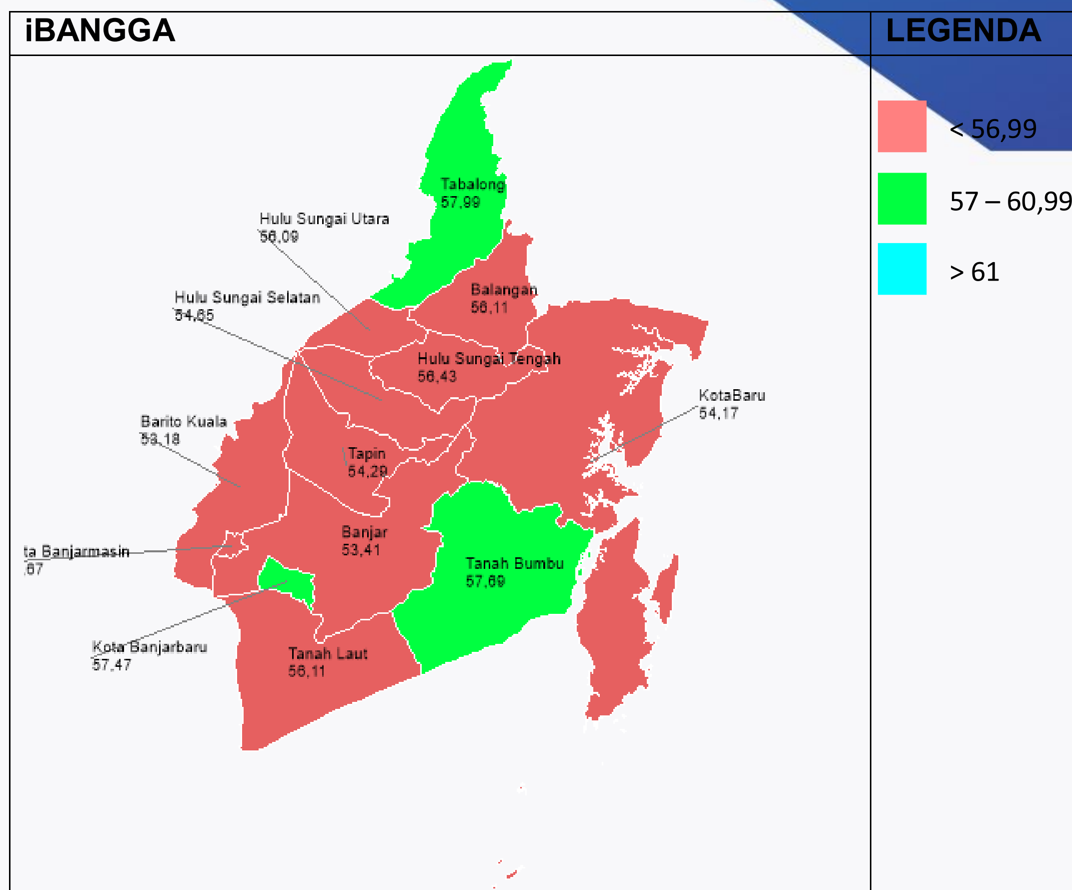
Berdasarkan peta di atas menunjukkan bahwa seluruh besar kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Selatan masih memiliki angka Median Usia Kawin Pertama (MUKP) di bawah 20,9 tahun, kecuali Kota Banjarmasin dan Kota Banjarbaru. Hal tersebut membuktikan bahwa daerah perkotaan memiliki akses lebih luas untuk pendidikan sehingga dapat meningkatkan MUKP.



Peta di atas memperlihatkan bahwa pencapaian indikator mCPR di Provinsi Kalimantan Selatan sudah cukup baik karena hanya satu kabupaten/kota saja yang belum mencapai target indikator mCPR, yaitu Kota Banjarbaru sedangkan kabupaten/kota lainnya memiliki capaian mCPR di atas 63,41 persen. Perlu adanya intervensi khusus untuk dapat memberikan komunikasi, informasi dan edukasi terkait pemakaian kontrasepsi modern di Kota Banjarbaru.

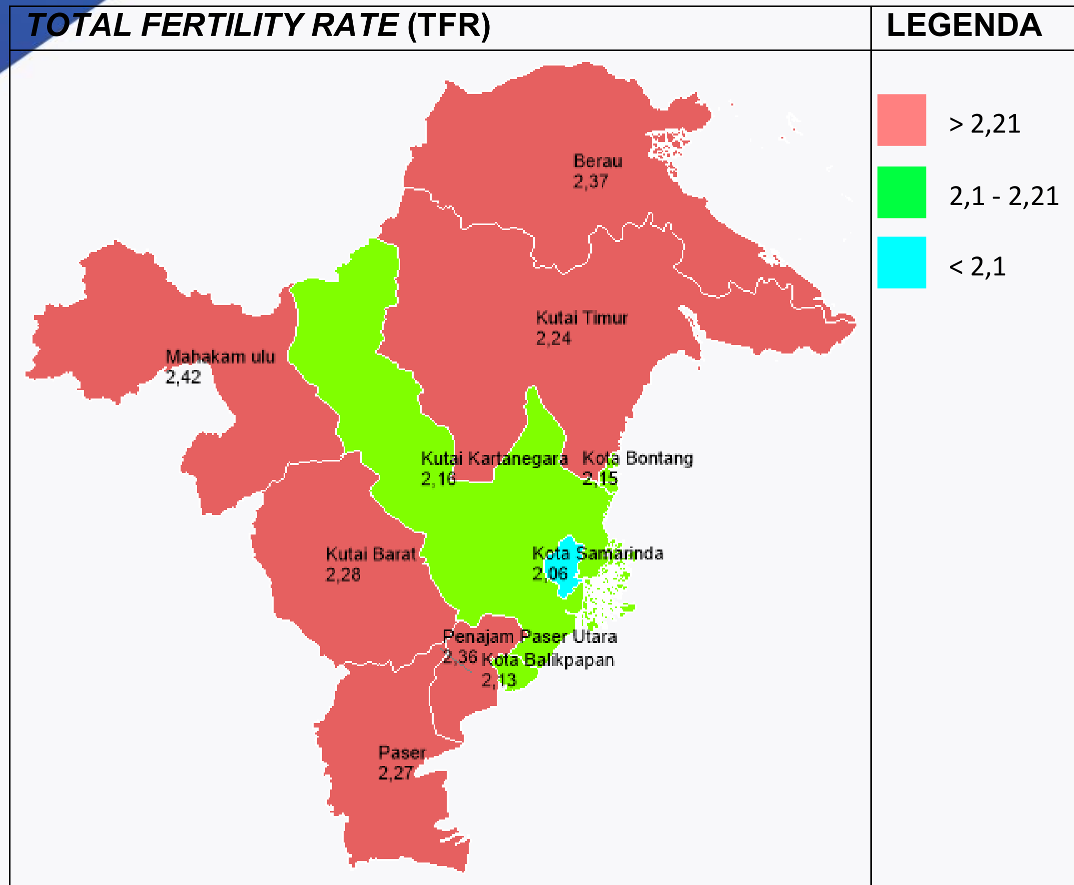


Peta di atas menunjukkan bahwa pencapaian indikator MKJP Provinsi Kalimantan Selatan masih belum baik karena seluruh kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Selatan memiliki pencapaian MKJP di bawah 26,75 persen. Sosialisasi terkait metode kontrasepsi jangka panjang harus dilakukan secara kontinu dan melalui berbagai media agar masyarakat lebih memahami keuntungan dari pemakaian kontrasepi jangka panjang.



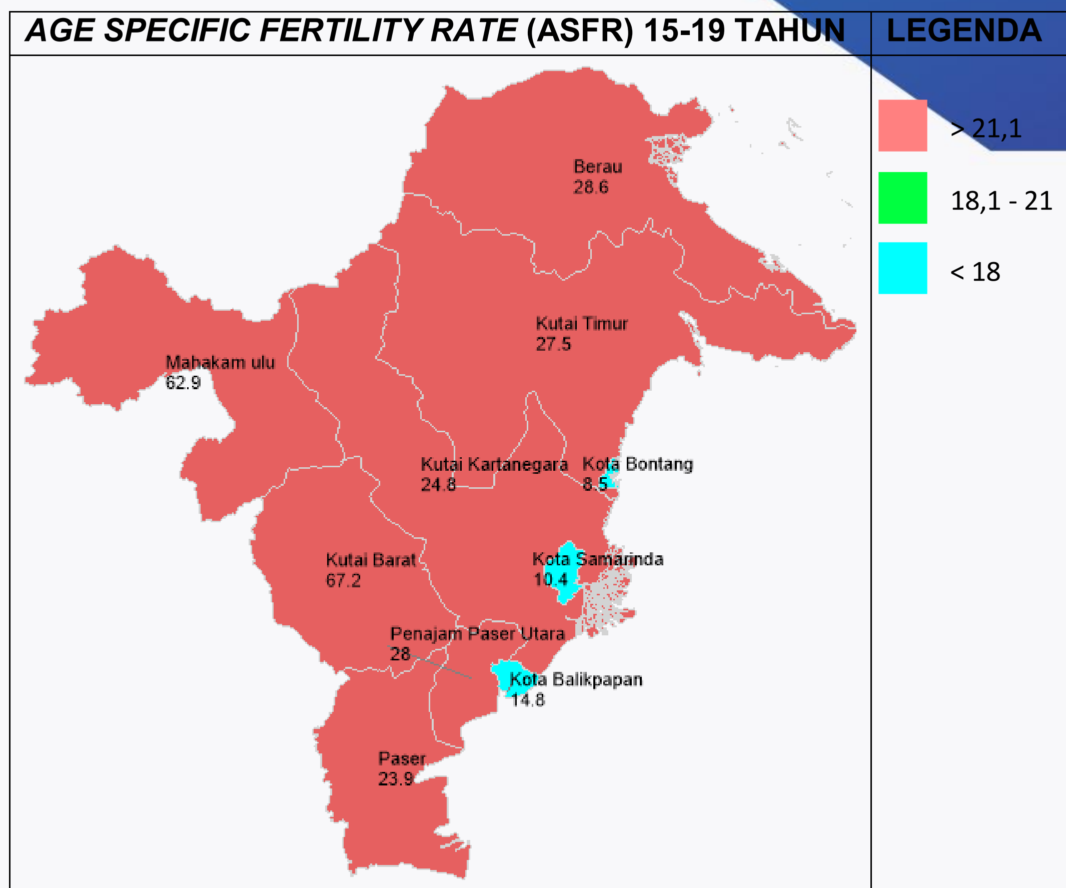
Berdasarkan peta di atas terlihat bahwa pencapaian indeks iBangga di kabupaten/kota Provinsi Kalimantan Selatan belum optimal karena sebagian besar kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Selatan belum mencapai target indeks iBangga (di bawah 56,99), kecuali Kabupaten Tabalong, Kota Banjarbaru, dan Kabupaten Tanah Bumbu. Oleh karena itu, masih perlu adanya upaya untuk dapat meningkatkan Program Pembangunan Keluarga.

4.2.23. Peta Parameter Provinsi Kalimantan Timur

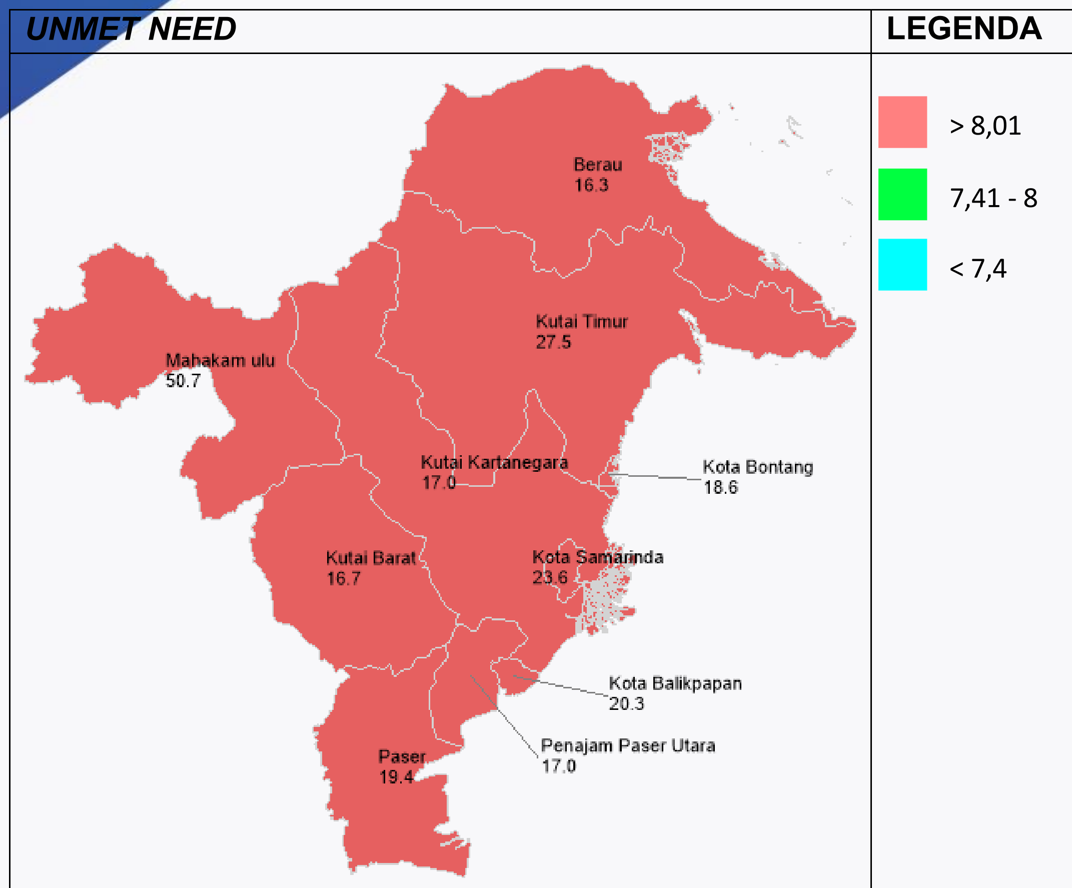


Berdasarkan Peta di atas dapat dilihat bahwa angka kelahiran total di Provinsi Kalimantan Timur masih perlu perhatian yang besar, karena hampir seluruh kabupaten/kota di Kalimantan Timur memiliki angka *Total Fertility Rate* (TFR) yang tinggi di atas target TFR tahun 2022 yaitu diatas 2,21 kecuali 3 kabupaten/kota yang terdiri dari 2 kabupaten/kota yang TFR-nya berada diantara 2,1–2,21 yaitu Kabupaten Kutai Kertanegara sebesar 2,16 dan Kota Bontang sebesar 2,06, serta 1 wilayah kota yang TFR-nya di bawah 2,1 artinya sudah memenuhi target TFR tahun 2024 yaitu Kota Samarinda yang memiliki TFR 2,06.

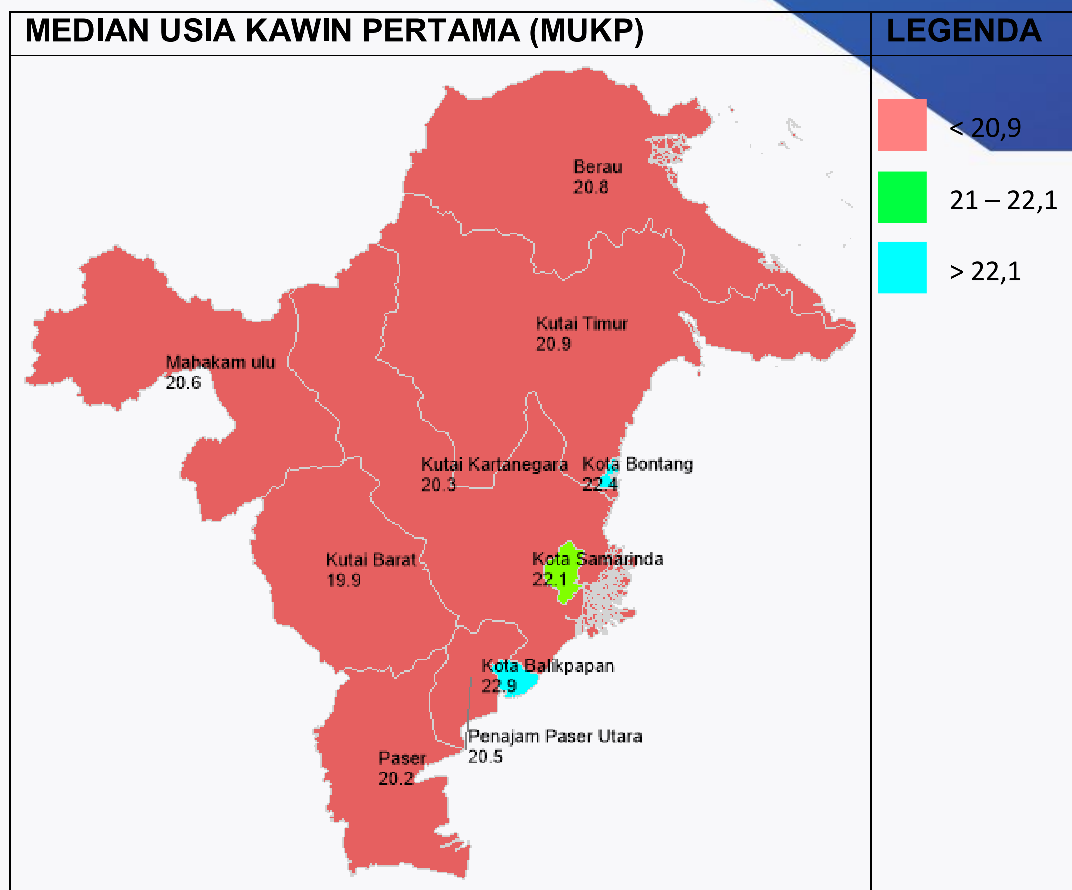
Kondisi TFR yang masih tinggi yang terjadi pada sebagian besar wilayah di Kalimantan timur ini perlu menjadi perhatian bagi para pengambil kebijakan di tingkat kabupaten/kota tersebut untuk melakukan upaya dan langkah-langkah yang lebih serius dalam pengendalian kelahiran agar dapat menurunkan angka TFR yang tinggi tersebut.



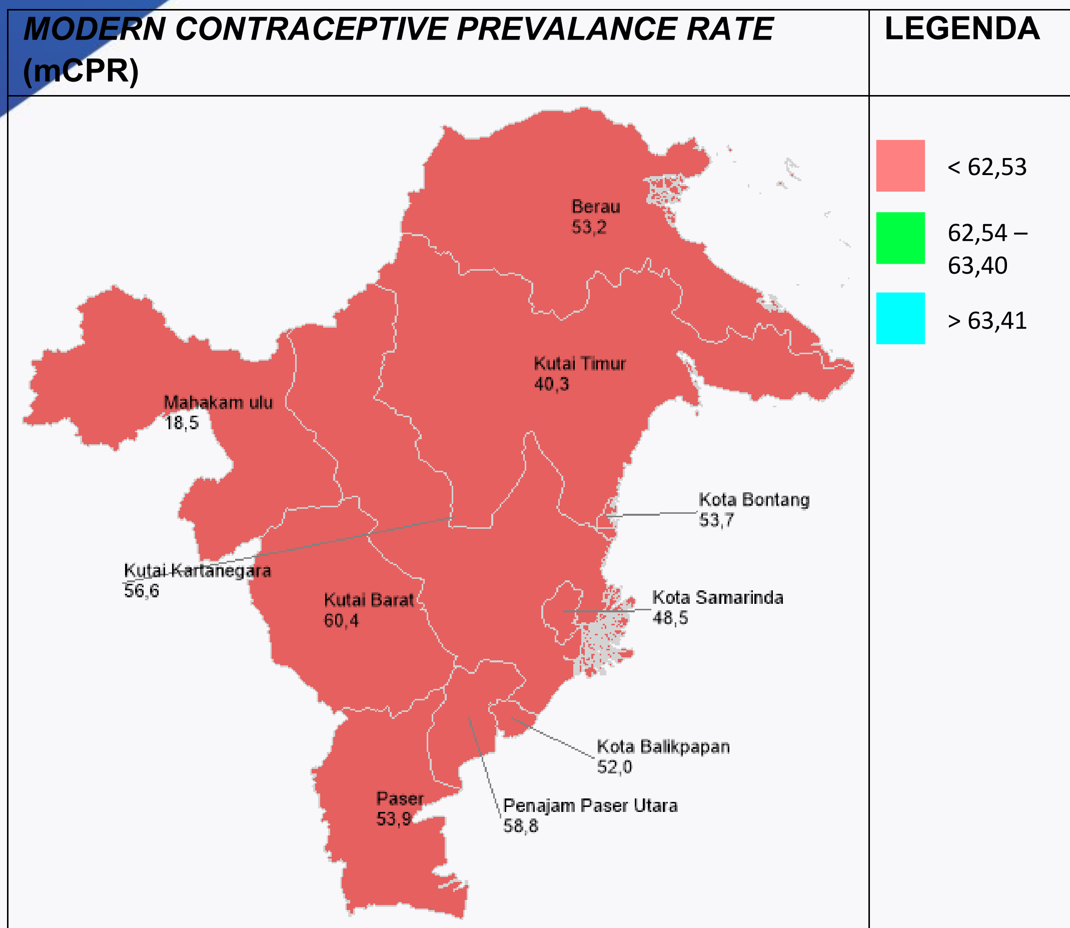
Berdasarkan peta di atas terlihat bahwa hampir semua kabupaten/kota di Kalimantan Timur memiliki angka ASFR 15-19 yang tinggi. Kondisi ini terjadi pada semua wilayah kabupaten dengan angka ASFR 15-19 yang lebih dari 21,1 kelahiran per 1000 penduduk perempuan usia 15-19 tahun. Sedangkan untuk wilayah Kota semuanya memiliki angka ASFR 15-19 yang sudah rendah bahkan sudah memenuhi target ASFR tahun 2024 yaitu di bawah 18 kelahirahan per 1000 penduduk perempuan usia 15-19 tahun. Wilayah tersebut yaitu Kota Balikpapan sebesar 14,8, kelahiran Kota Samarinda sebesar 10,4 kelahiran dan Kota Bontang sebesar 8,5 kelahiran. Untuk semua wilayah kabupaten dimana angka ASFR-nya masih tinggi dan belum mencapai target, maka upaya untuk mencegah pernikahan dini dan kelahiran pada remaja masih tetap diperlukan.



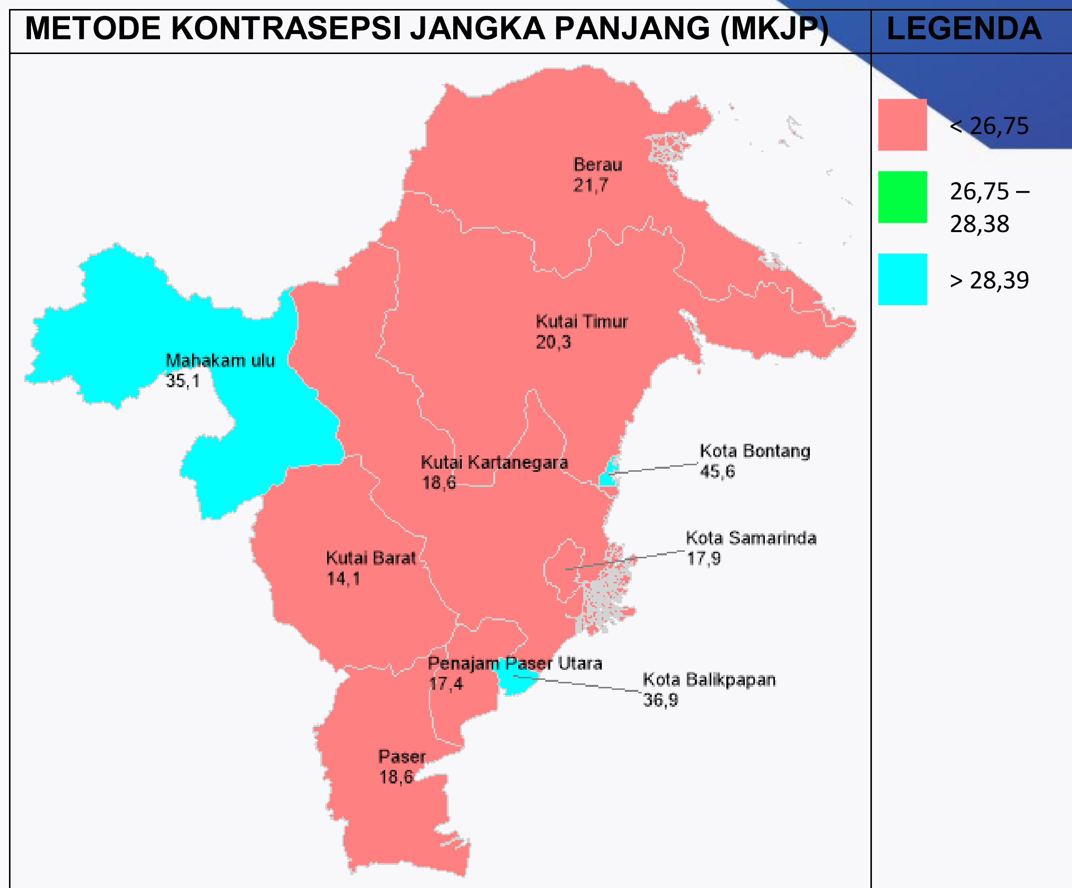
Berdasarkan peta di atas terlihat bahwa untuk indikator *unmet need* di Provinsi Kalimantan Timur sangat perlu perhatian yang besar karena seluruh kabupaten/kota di Kalimantan Timur memiliki angka *unmet need* yang sangat tinggi yaitu di atas 8,01 persen, sehingga perlu menjadi perhatian bagi para pengambil kebijakan di seluruh kabupaten/kota di Kalimantan Timur yaitu dari segi penyediaan alokon, dan juga pelayanan keluarga berencana yang berkualitas dan dapat diakses oleh yang semua masyarakat yang membutuhkan di wilayahnya masing-masing.



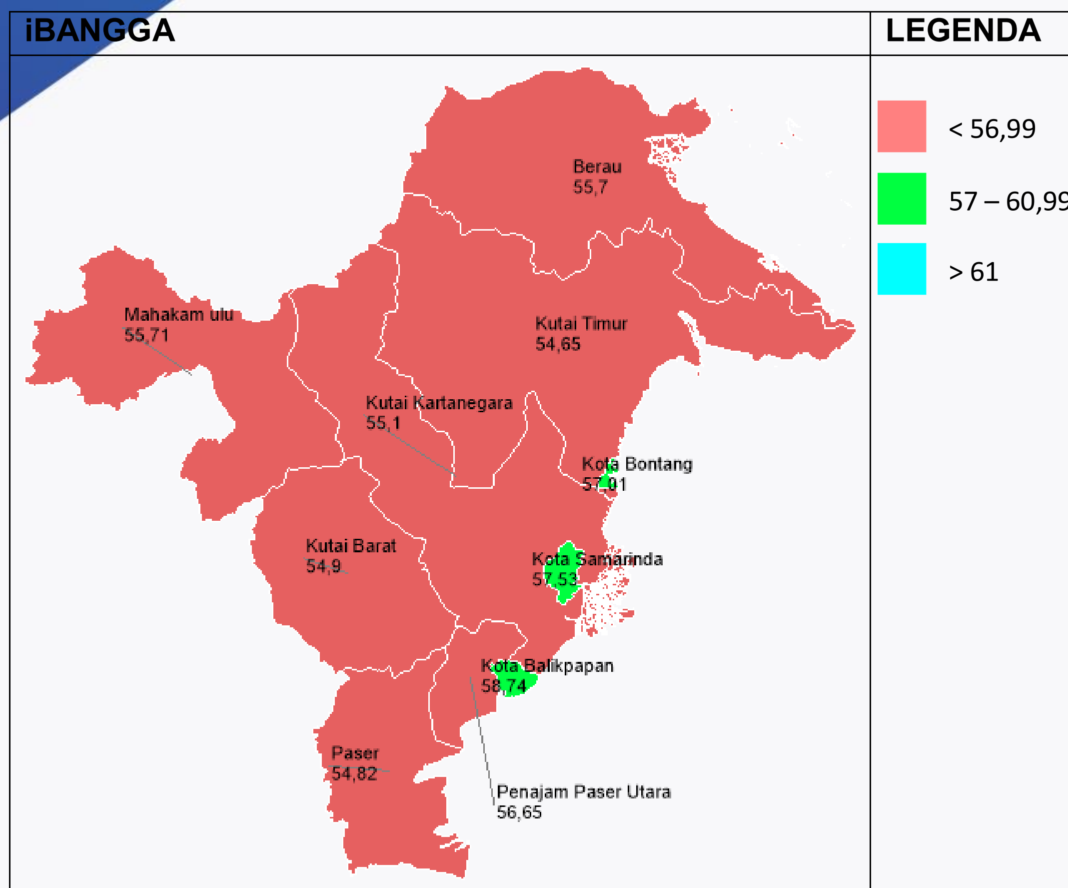
Berdasarkan peta di atas, terlihat bahwa angka Median Usia Kawin Pertama (MUKP) di Kalimantan Timur hampir semua kabupaten/kota mempunyai angka yang masih rendah yaitu di bawah 20,9. Kondisi tersebut hampir sama dengan kondisi pada indikator ASFR 15-19 tahun yang tinggi yaitu terjadi di seluruh wilayah kabupaten. Sedangkan untuk wilayah kota angka MUKP sudah mencapai target tahun 2022 yaitu 21 tahun ke atas . Wilayah tersebut yaitu Kota Samarinda dengan MUKP sebesar 22,1 tahun dan bahkan untuk 2 wilayah kota lainnya telah mencapai target MUKP tahun 2024 yaitu Kota Balikpapan sebesar 22,9 tahun dan Kota Bontang sebesar 22,4. Dengan kondisi angka MUKP yang rendah di seluruh wilayah kabupaten di Provinsi Kalimantan Timur tersebut, kampanye Upaya Pendewasaan Perkawinan perlu lebih ditingkatkan di seluruh wilayah kabupaten tersebut.



Berdasarkan peta di atas terlihat bahwa untuk indikator mCPR di Provinsi Kalimantan Timur rendah di seluruh wilayah baik di wilayah kabupaten maupun di wilayah kota yaitu di bawah angka 62,53 persen. Hal ini perlu menjadi perhatian yang cukup besar bagi pengambil kebijakan di seluruh kabupaten/kota di Kalimantan Timur untuk meningkatkan kampanye program keluarga berencana khususnya sosialisasi penggunaan metode kontrasepsi modern.

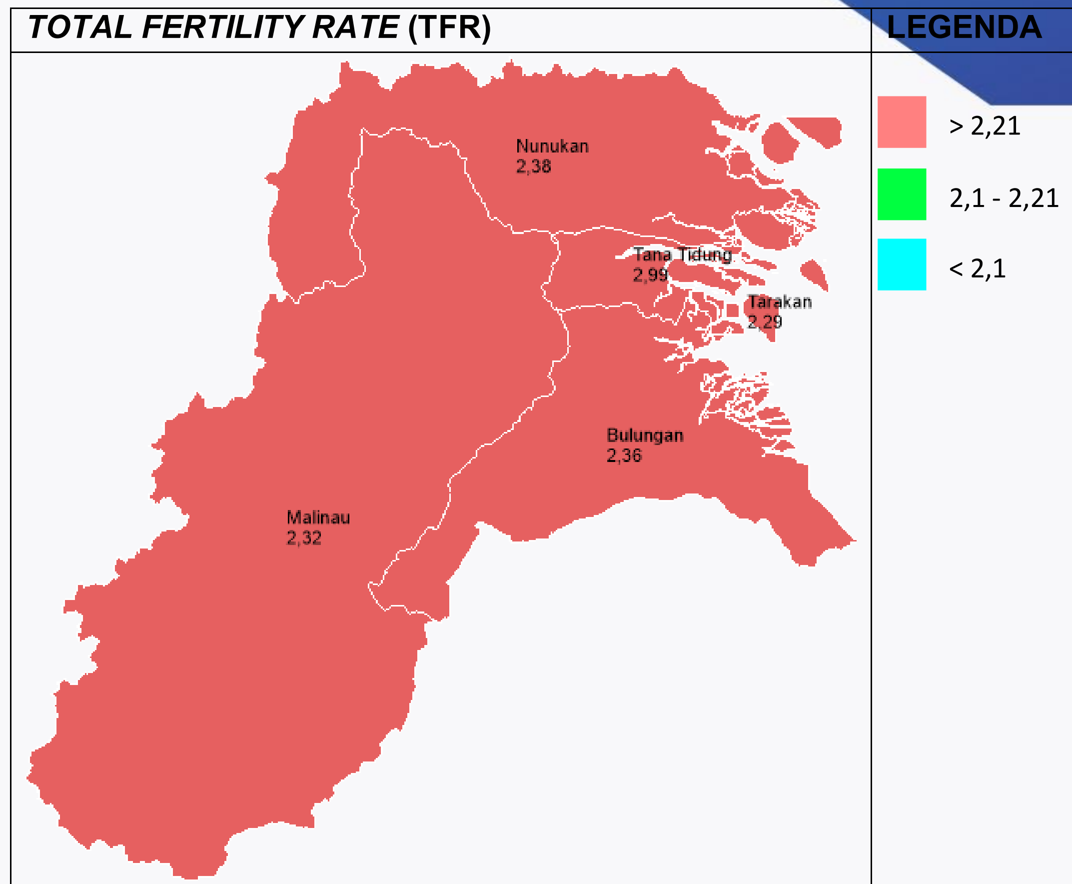


Berdasarkan peta di atas dapat dilihat bahwa hampir seluruh wilayah kabupaten/kota di Kalimantan Timur berwarna merah yang artinya memiliki angka MKJP yang rendah di bawah target MKJP tahun 2022 yaitu di bawah angka 26,75 persen, sehingga perlu ada peningkatan. Berdasarkan peta tersebut hanya ada 3 kabupaten/kota yang berwarna biru yaitu angka MKJP-nya cukup tinggi bahkan sudah mencapai target MKJP tahun 2024 yaitu Kota Mahakam Ulu sebesar 35,1 persen, Kota Balikpapan sebesar 36,9 persen dan Kota Bontang sebesar 45,6 persen. Hal ini menunjukan bahwa kebijakan setiap kabupaten/kota dalam rangka penurunan angka TFR harus sejalan dengan peningkatan angka MKJP

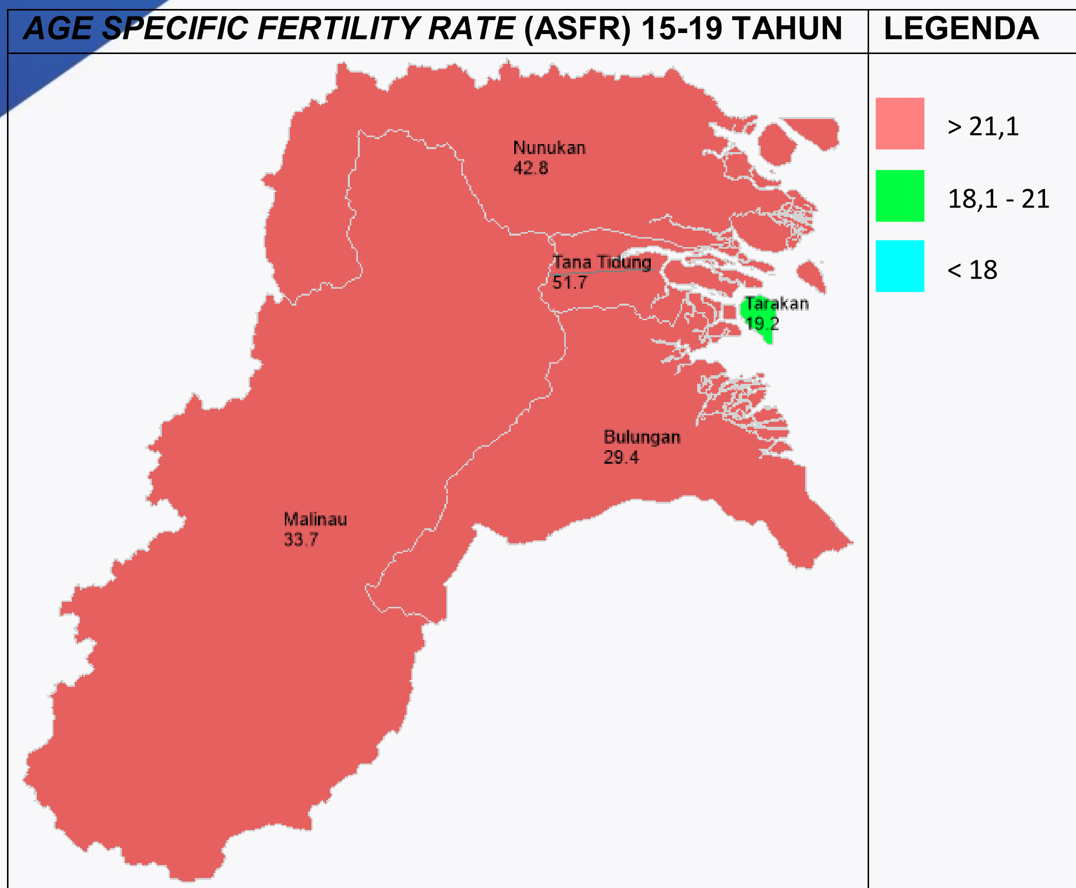


Berdasarkan peta di atas dapat dilihat bahwa secara umum angka indeks iBangga di Provinsi Kalimantan Timur masih rendah, karena hampir semua kabupaten/kota berada di bawah 56,99. Kondisi tersebut hampir sama dengan kondisi pada indikator ASFR 15 - 19 tahun yang tinggi dan kondisi pada indikator MUKP yang rendah yaitu terjadi di seluruh wilayah kabupaten di Kalimantan Timur. Hal ini menunjukan bahwa semua wilayah kabupaten di Kalimantan Timur memiliki angka indeks iBangga yang rendah yaitu belum mencapai target indikator iBangga tahun 2022 yaitu 57 persen atau lebih. Sedangkan untuk wilayah Kota di Kalimantan Timur indikator iBangga sudah tinggi, namun belum ada kabupaten/kota yang mencapai target indikator iBangga tahun 2024 yaitu di atas angka 61 persen, masih berada pada angka 57 - 60,99 persen. Wilayah yang mencapai angka iBangga tersebut yaitu Kota Bontang sebesar 57,01, Kota Samarinda sebesar 57,53 dan Kota Balikpapan sebesar 58,74. Dengan kondisi tersebut menunjukan terjadi disparitas yang cukup tinggi pada indikator iBangga di Provinsi Kalimantan Timur. Kondisi capaian iBangga di wilayah kabupaten di Kalimantan Timur ini mengindikasikan bahwa peran, fungsi, dan kualitas keluarga yang ditunjukkan melalui dimensi ketenteraman, kemandirian, dan kebahagiaan keluarga masih belum maksimal, sehingga dibutuhkan kolaborasi berbagai sektor pembangunan terkait di wilayah masing-masing

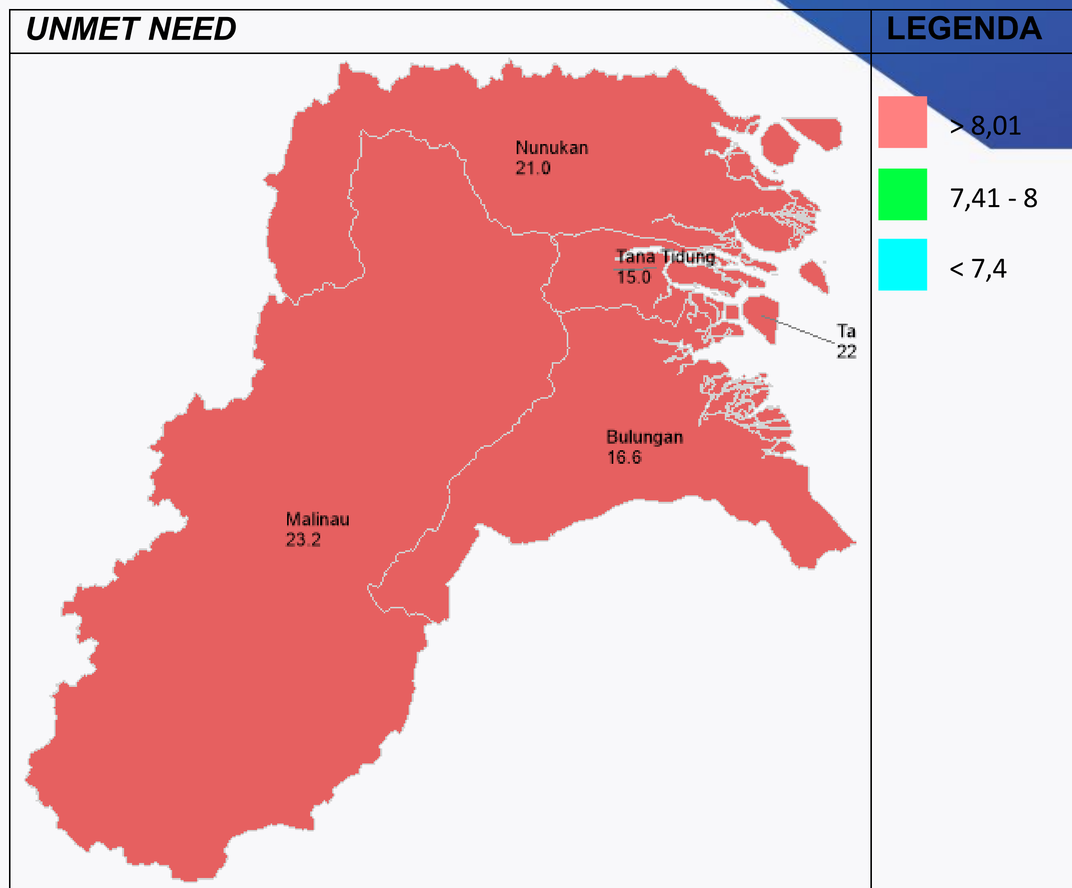
4.2.24. Peta Parameter Provinsi Kalimantan Utara



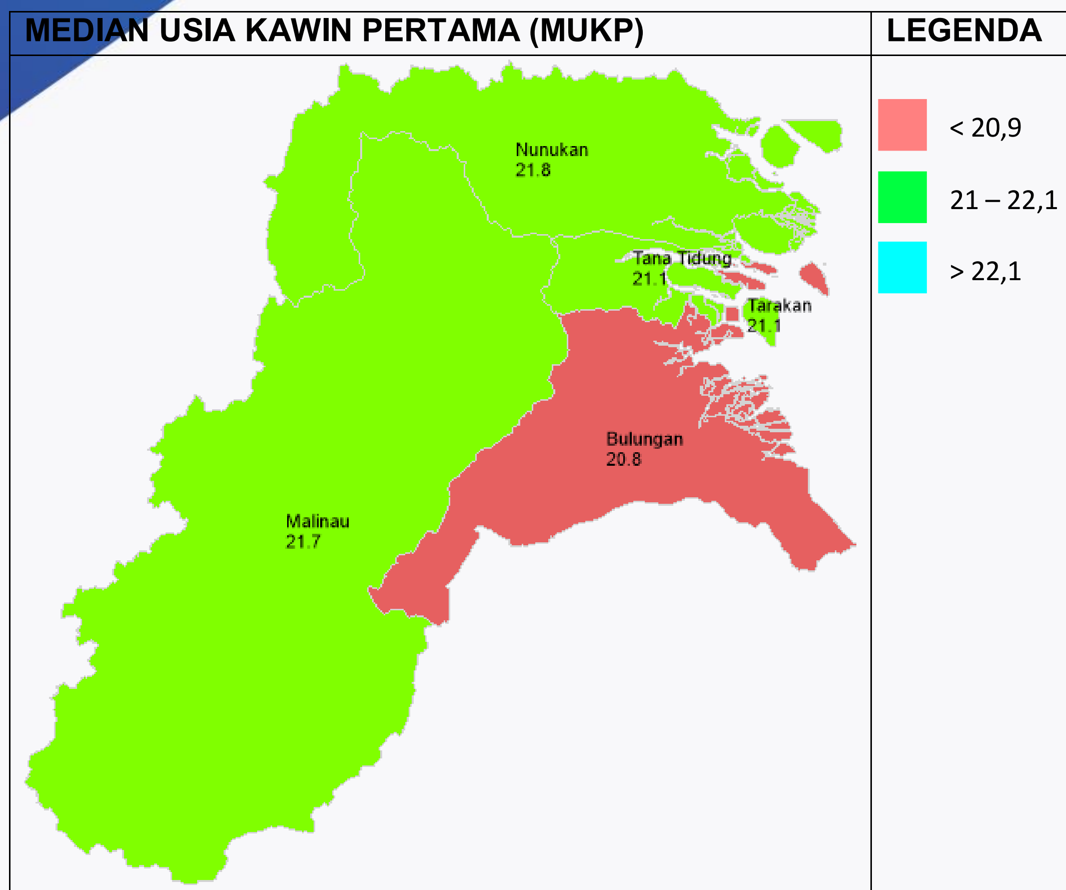
Berdasarkan Peta di atas dapat dilihat bahwa angka kelahiran total di Kalimantan Utara perlu benar-benar mendapat perhatian yang besar, karena seluruh kabupaten/kota yang ada di Kalimantan Utara memiliki angka *Total Fertility Rate* (TFR) yang tinggi di atas target TFR tahun 2022 yaitu 2,1-2,21. Hal ini perlu menjadi perhatian bagi para pengambil kebijakan di tingkat kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Utara untuk melakukan upaya dan langkah-langkah dalam pengendalian kelahiran agar dapat menurunkan angka TFR di wilayahnya masing-masing.



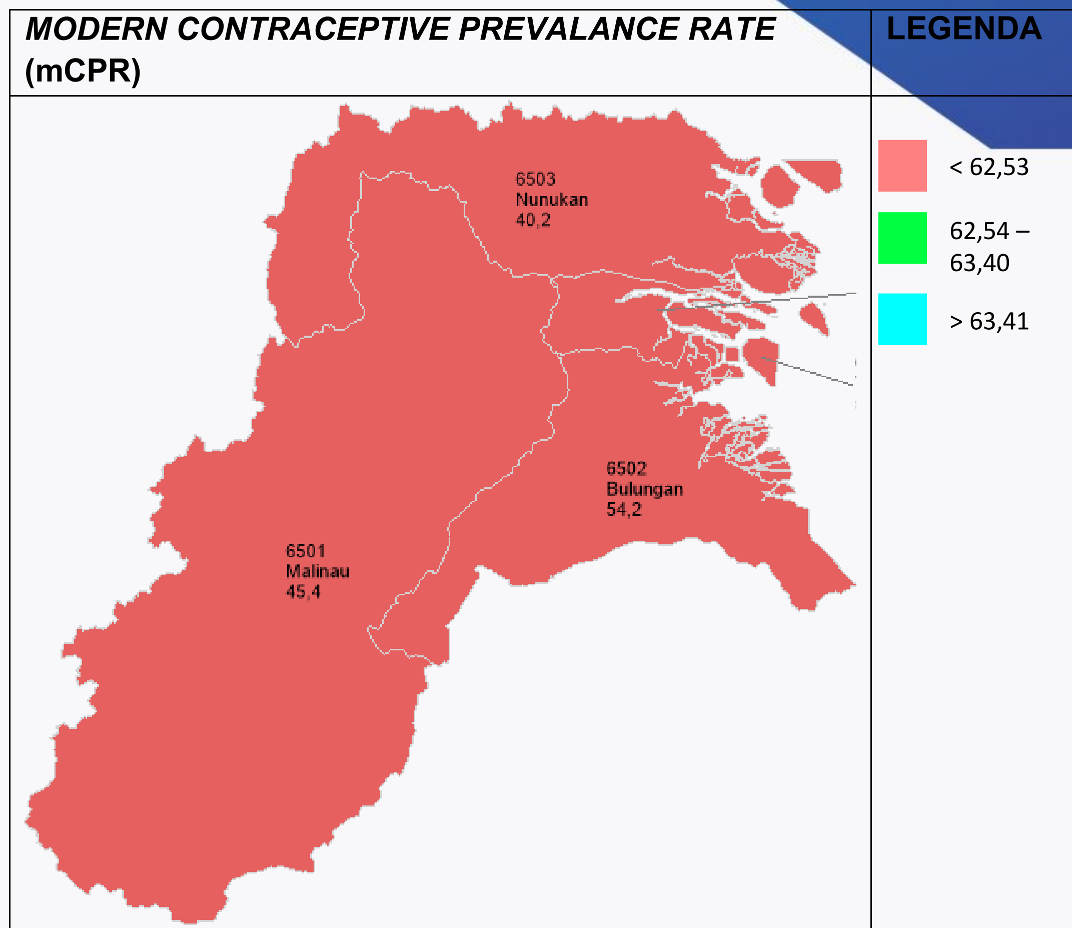
Berdasarkan peta di atas terlihat bahwa hampir semua wilayah kabupaten di Kalimantan Utara memiliki angka ASFR 15-19 yang tinggi yang lebih dari target ASFR 15-19 tahun tahun 2022 yaitu 21,1 kelahiran per 1000 penduduk perempuan usia 15-19 tahun. Angka ASFR pada wilayah kabupaten tersebut yaitu Kabupaten Malinau sebesar 33,7 kelahiran, Kabupaten Bulungan sebesar 29, 4 kelahiran, Kabupaten Tana Tidung sebesar 51,7 kelahiran dan kabupaten Nunukan sebesar 42,8 kelahiran. Sedangkan untuk wilayah Kota dimana hanya ada satu wilayah Kota di Kalimantan Utara yaitu Kota Tarakan memiliki angka ASFR 15-19 tahun yang rendah berada pada angka 18,1-21, yaitu sebesar 19,2 kelahiran. Kondisi ASFR 15-19 tahun yang tinggi di semua wilayah kabupaten di Kalimantan Utara ini perlu adanya peningkatan upaya untuk pencegahan pernikahan dini dan kelahiran pada remaja.



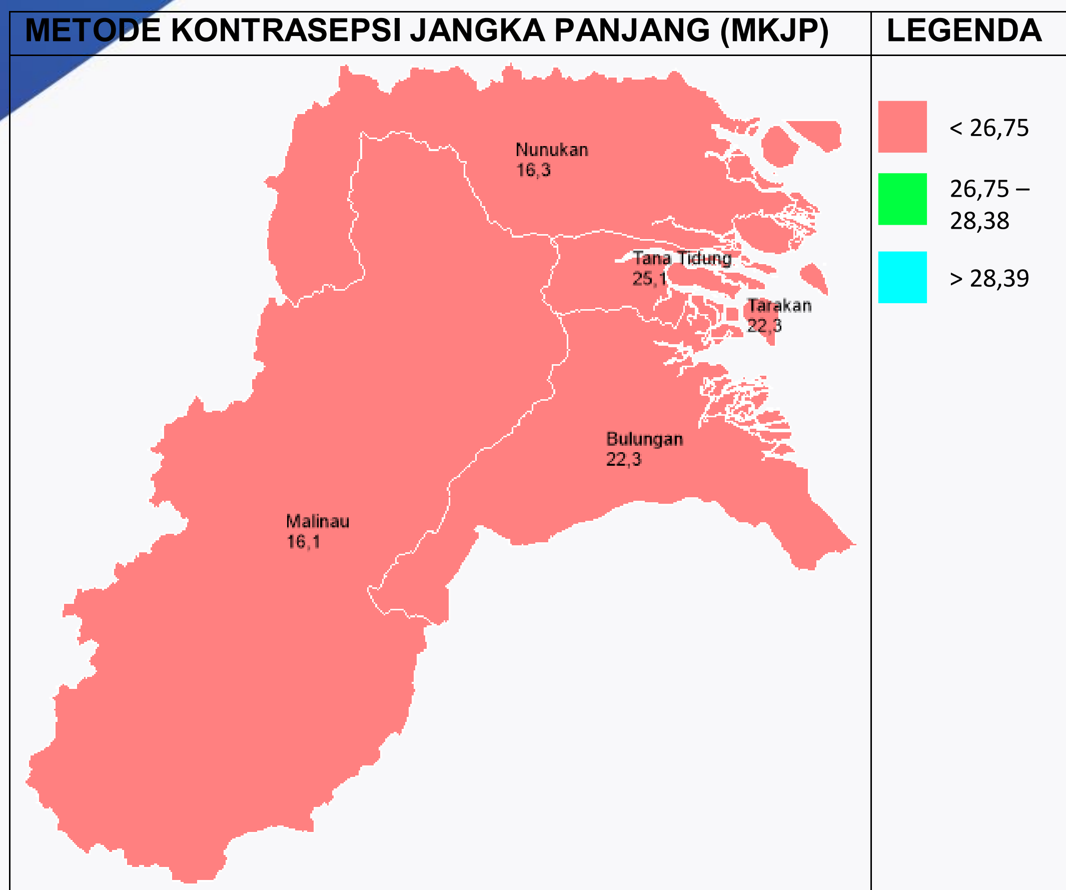
Berdasarkan peta di atas terlihat bahwa untuk indikator *unmet need* di Provinsi Kalimantan Utara sangat perlu perhatian yang besar karena seluruh kabupaten/kota di Kalimantan Utara memiliki angka *unmet need* yang sangat tinggi yaitu di atas 8,01 persen, sehingga perlu menjadi perhatian bagi para pengambil kebijakan di seluruh kabupaten/kota di Kalimantan Utara yaitu dari segi penyediaan alokon, dan juga pelayanan keluarga berencana yang berkualitas dan dapat diakses oleh yang semua masyarakat yang membutuhkan di wilayahnya masing-masing.



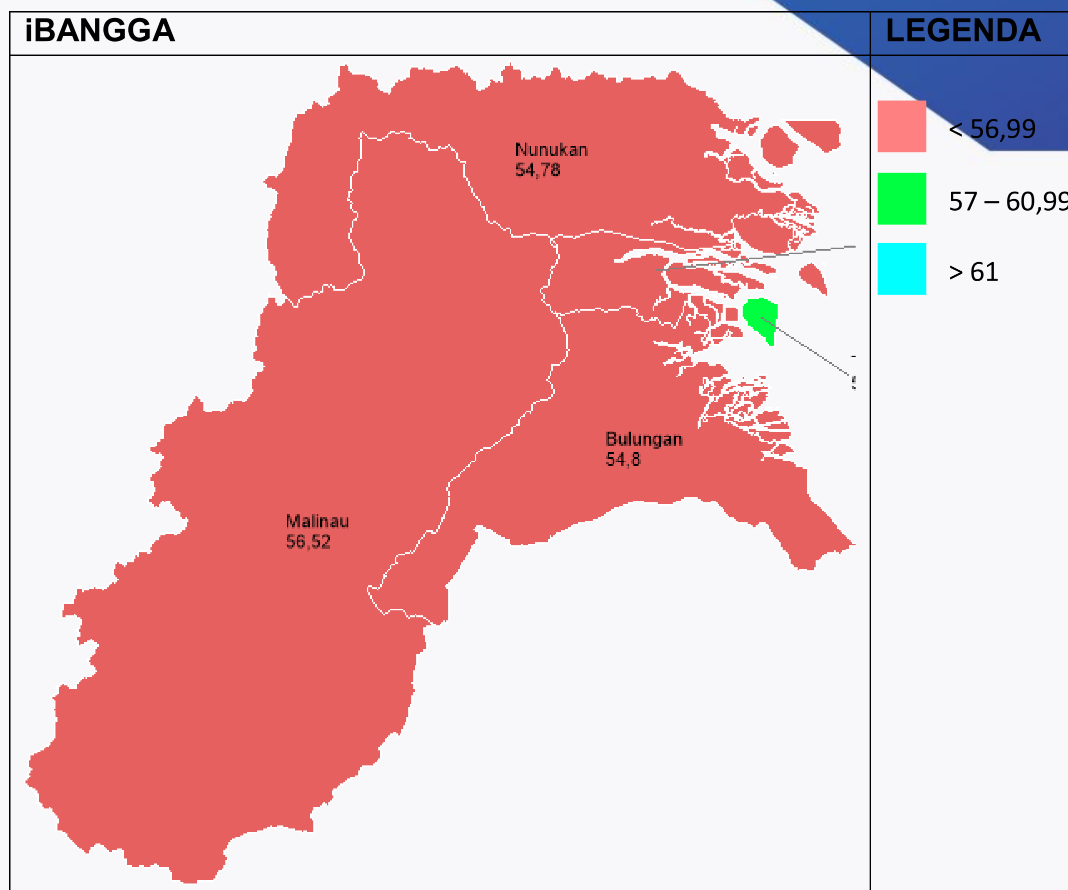
Berdasarkan peta di atas, terlihat bahwa angka Median Usia Kawin Pertama (MUKP) di Kalimantan Utara merupakan indikator yang lebih baik dibanding indikator lainnya, karena hampir semua kabupaten/kota mempunyai angka yang sudah cukup tinggi dan sudah mencapai target tahun 2022 yaitu 21 tahun ke atas . Wilayah tersebut yaitu kabupaten Malinau sebesar 21,7, kabupaten Tana Tidung sebesar 21,1, kabupaten Nunukan sebesar 21,8 dan Kota Tarakan sebesar 21,1 tahun. Sedangkan satu kabupaten yaitu kabupaten Bulungan masih termasuk rendah karena masih di bawah 20,9 tahun yaitu sebesar 20,8 tahun. Dengan kondisi angka MUKP yang sudah cukup tinggi ini agar dapat dipertahankan dan untuk daerah yang masih belum memenuhi target agar dapat diperbaiki di kemudian hari.



Berdasarkan peta di atas terlihat bahwa untuk indikator mCPR di Provinsi Kalimantan Utara rendah di seluruh kabupaten/kota yaitu di bawah angka 62,53 persen. Hal ini perlu menjadi perhatian yang cukup besar bagi pengambil kebijakan di seluruh kabupaten/kota di Kalimantan Utara untuk meningkatkan kampanye program keluarga berencana khususnya sosialisasi penggunaan metode kontrasepsi modern.

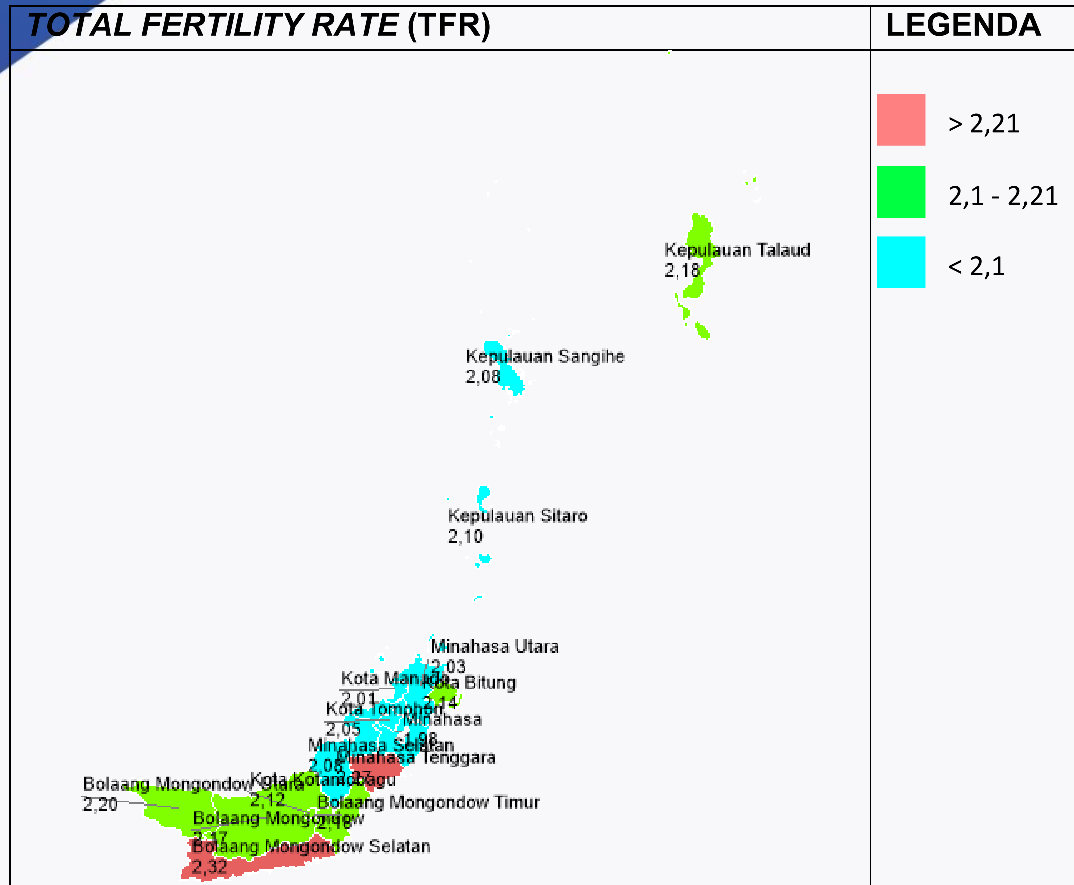


Berdasarkan peta di atas dapat dilihat bahwa hampir seluruh wilayah kabupaten/kota berwarna merah yang artinya memiliki angka MKJP yang rendah di bawah target MKJP tahun 2022 yaitu di bawah angka 26,75 persen, sehingga perlu ada peningkatan. Berdasarkan peta tersebut hanya ada 3 kabupaten/kota yang berwarna biru yaitu angka MKJP-nya cukup tinggi bahkan sudah mencapai target MKJP tahun 2024 yaitu Kota Mahakm Ulu sebesar 35,1 persen, Kota Balikpapan sebesar 36,9 persen dan Kota Bontang sebesar 45,6 persen. Hal ini menunjukan bahwa kebijakan setiap kabupaten/kota dalam rangka penurunan angka TFR harus sejalan dengan peningkatan angka MKJP

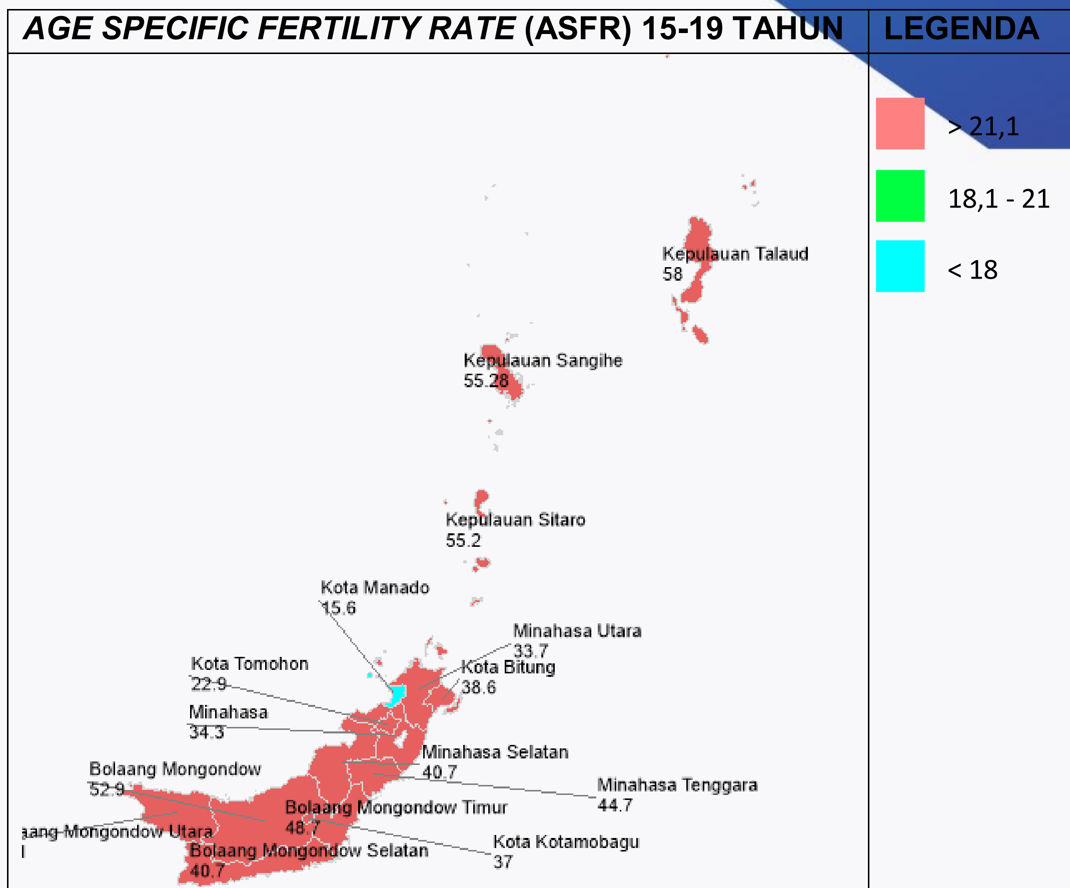


Berdasarkan peta di atas dapat dilihat bahwa secara umum angka indeks iBangga di Provinsi Kalimantan Utara masih rendah, karena hampir semua kabupaten/kota berada di bawah 56,99. Kondisi ini terjadi di seluruh wilayah kabupaten di Kalimantan Utara. Hal ini menunjukan bahwa semua wilayah kabupaten di Kalimantan Timur memiliki angka indeks iBangga yang rendah yaitu belum mencapai target indikator iBangga tahun 2022 yaitu 57 persen atau lebih. Sedangkan untuk wilayah Kota yaitu Kota Tarakan indikator iBangga sudah tinggi, namun belum ada kabupaten/kota yang mencapai target indikator iBangga tahun 2024 yaitu di atas angka 61 persen, masih berada pada angka 57 - 60,99 persen. Selain di kondisi capaian iBangga di Kota Tarakan yang sudah cukup baik, Kondisi capaian iBangga di wilayah kabupaten di Kalimantan Utara ini mengindikasikan bahwa peran, fungsi, dan kualitas keluarga yang ditunjukkan melalui dimensi ketenteraman, kemandirian, dan kebahagiaan keluarga masih belum maksimal, sehingga dibutuhkan kolaborasi berbagai sektor pembangunan terkait di wilayah masing-masing.

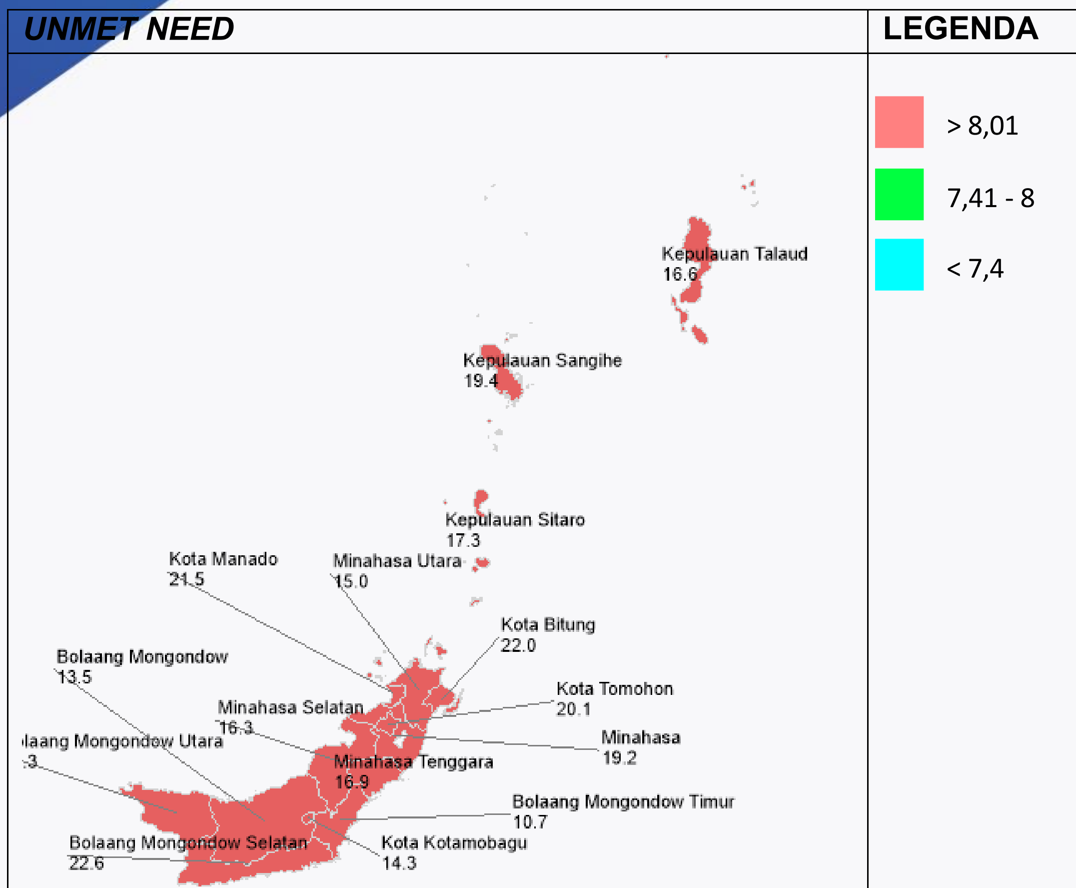
4.2.25. Peta Parameter Provinsi Sulawesi Utara



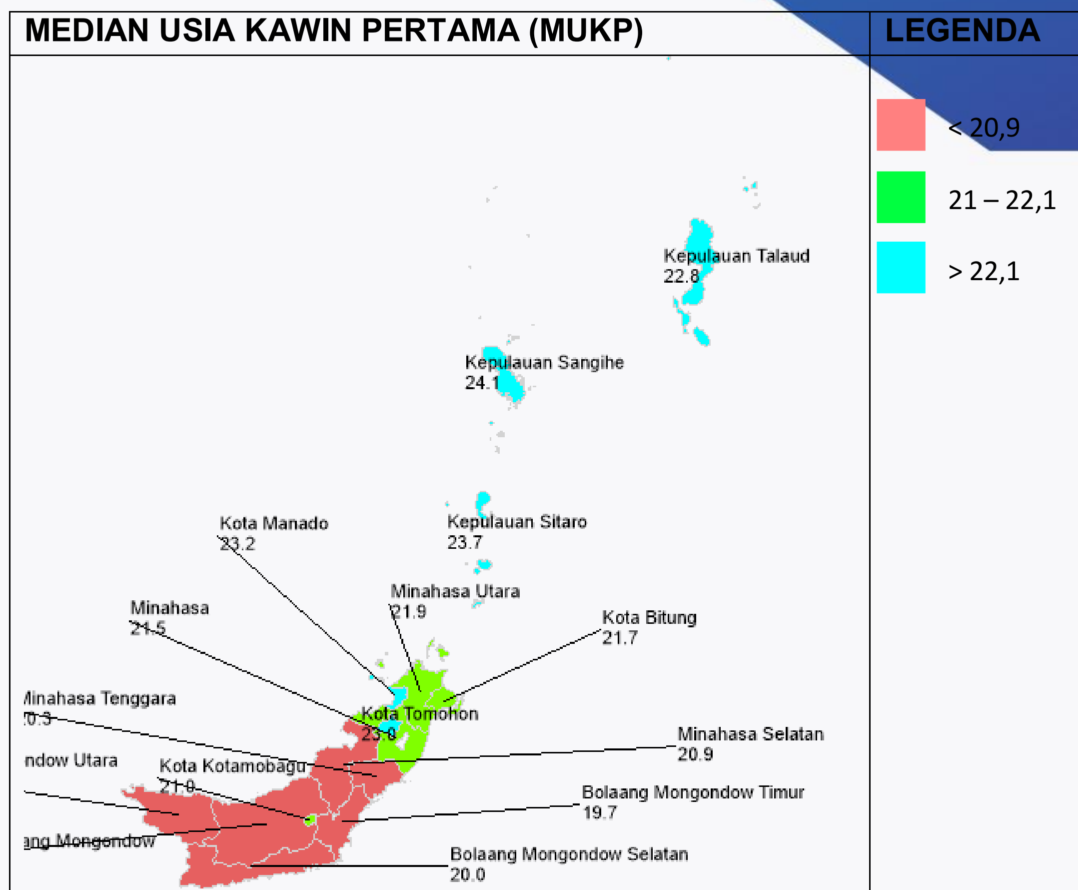
Berdasarkan Peta di atas dapat dilihat bahwa angka kelahiran total di Sulawesi Utara sudah sangat baik karena sebagian besar kabupaten/kota di Sulawesi Utara memiliki angka yang rendah yaitu di bawah 2,21. Hanya Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dan Kabupaten Minahasa Tenggara yang belum memiliki angka kelahiran yang sesuai dengan target RPJMN. Hal ini perlu menjadi perhatian untuk melakukan upaya dan langkah-langkah untuk menurunkan angka TFR di wilayahnya masing-masing bagi yang belum mencapai target. Untuk daerah yang telah mencapai target yang perlu dilakukan adalah untuk menjaga angka kelahiran di daerahnya agar tetap stabil dan tidak naik.



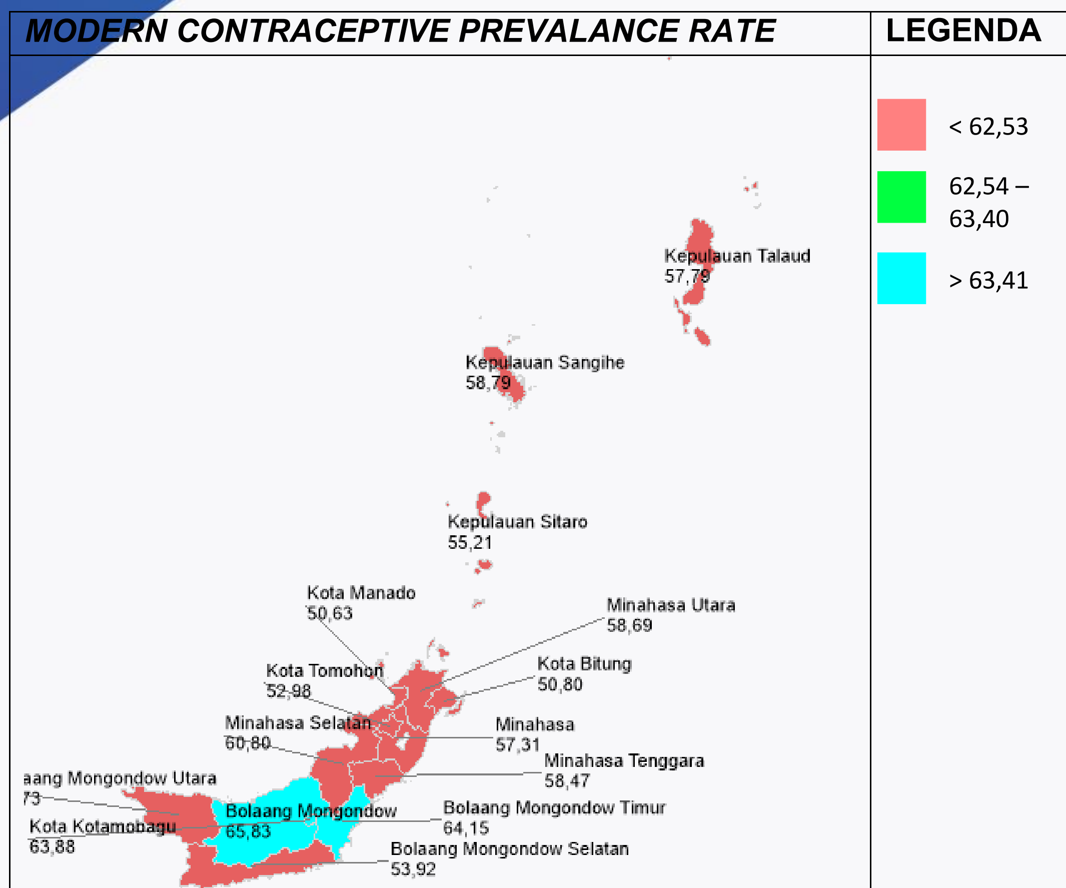
Berdasarkan peta di atas terlihat bahwa indikator ASFR 15-19 tahun tingkat kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Utara hampir semuanya masih belum mencapai target, kecuali Kota Manado. Hal tersebut perlu menjadi perhatian untuk dapat di intervensi secara efisien dan tepat sasaran agar kabupaten/kota lain yang belum mencapai target dapat mencapai target yang telah ditentukan di tahun-tahun kedepannya.



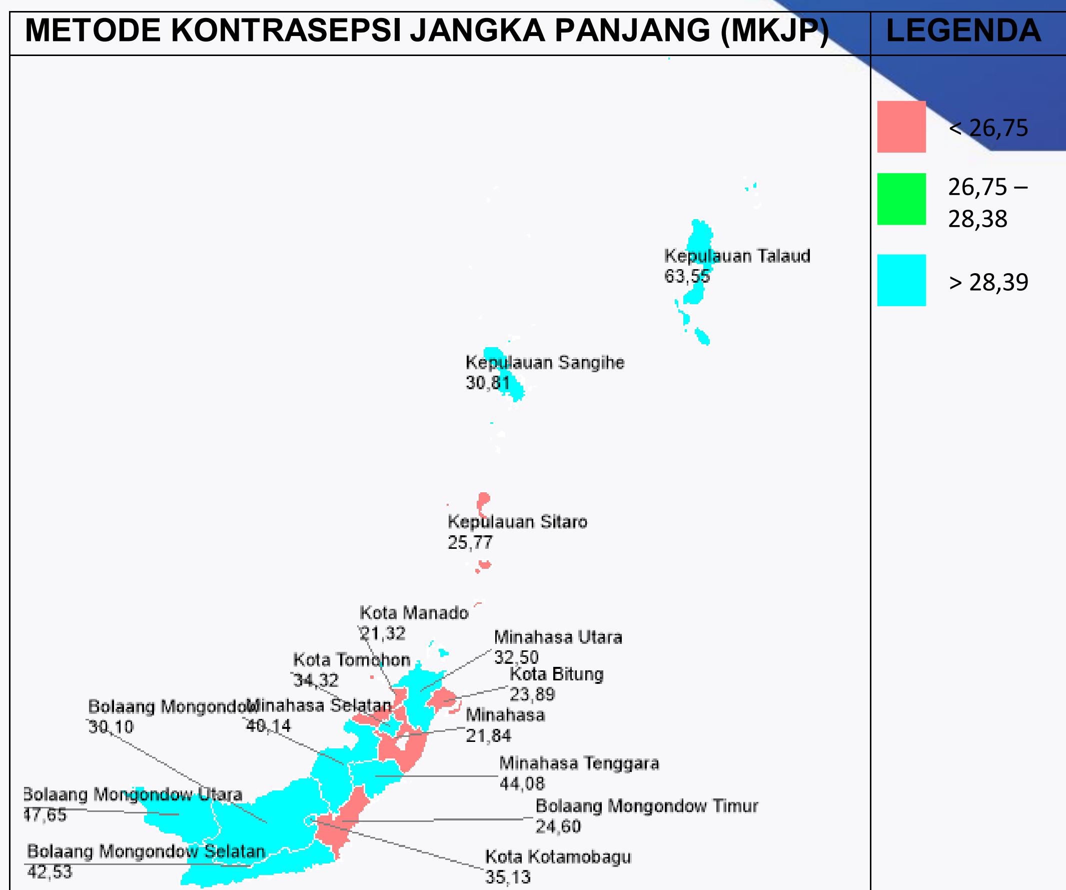
Berdasarkan peta di atas terlihat bahwa untuk indikator *unmet need* di Provinsi Sulawesi Utara perlu perhatian yang besar karena seluruh kabupaten/kota di Sulawesi Utara memiliki angka *unmet need* yang sangat tinggi yaitu di atas 8,01 persen.



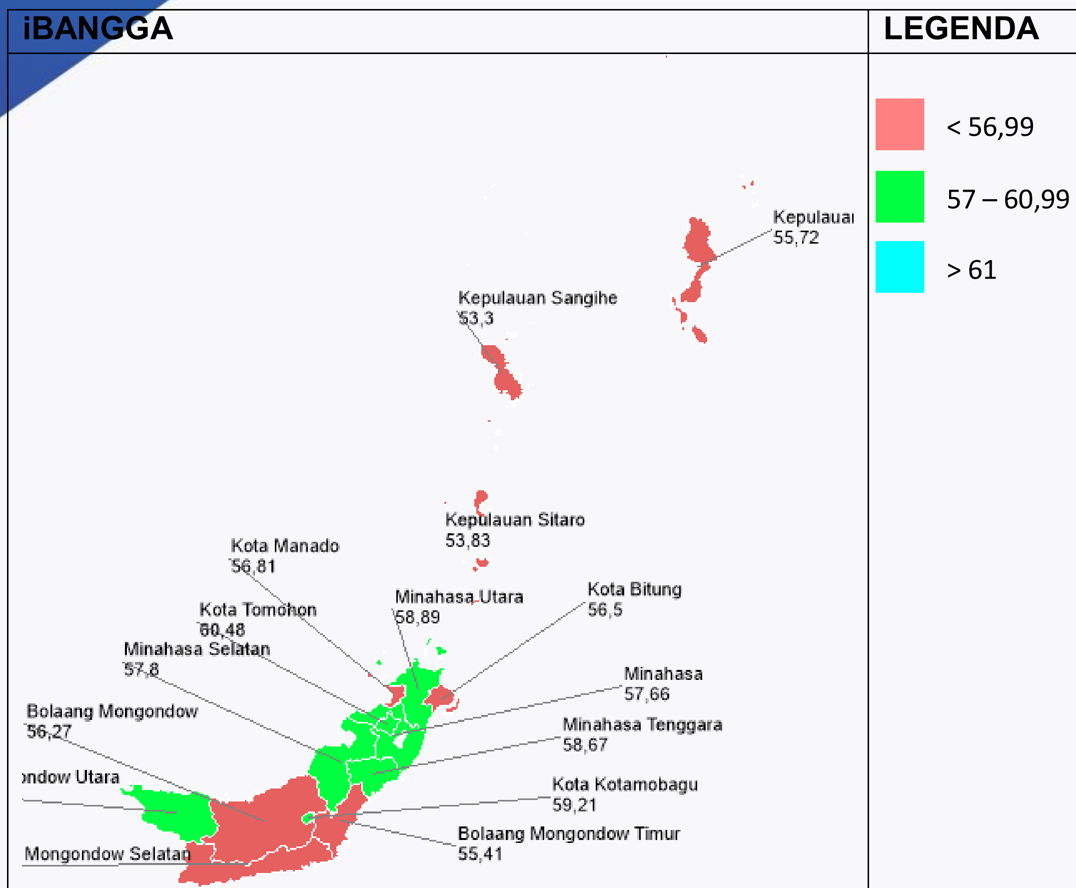
Berdasarkan peta di atas, terlihat bahwa angka Median Usia Kawin Pertama (MUKP) di Provinsi Sulawesi Utara perlu menjadi perhatian karena masih terdapat sebagian kabupaten/kota yang belum mencapai target yang telah ditetapkan untuk MUKP tahun 2022 yaitu 21 tahun ke atas. Hal ini tentu harus menjadi perhatian agar kabupaten/kota yang angka MUKP-nya belum mencapai target dapat difokuskan untuk dilakukan intervensi yang diperlukan agar dapat mencapai target MUKP tahun 2024 yaitu di atas 22,1.



Berdasarkan peta di atas terlihat bahwa untuk indikator mCPR hampir seluruh kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Utara masih sangat rendah dan belum mencapai target, hanya Kabupaten Bolaang Mongondow, Bolaang Mongondow Timur, dan Kota Kotamobagu yang sudah mencapai target. Hal ini perlu menjadi perhatian, khususnya dalam aspek advokasi dan KIE serta pelayanan kontrasepsi di Sulawesi Utara agar dapat dilaksanakan sesuai dengan kondisi dan situasi masing-masing daerah agar dapat berjalan secara terfokus dan tepat sasaran.

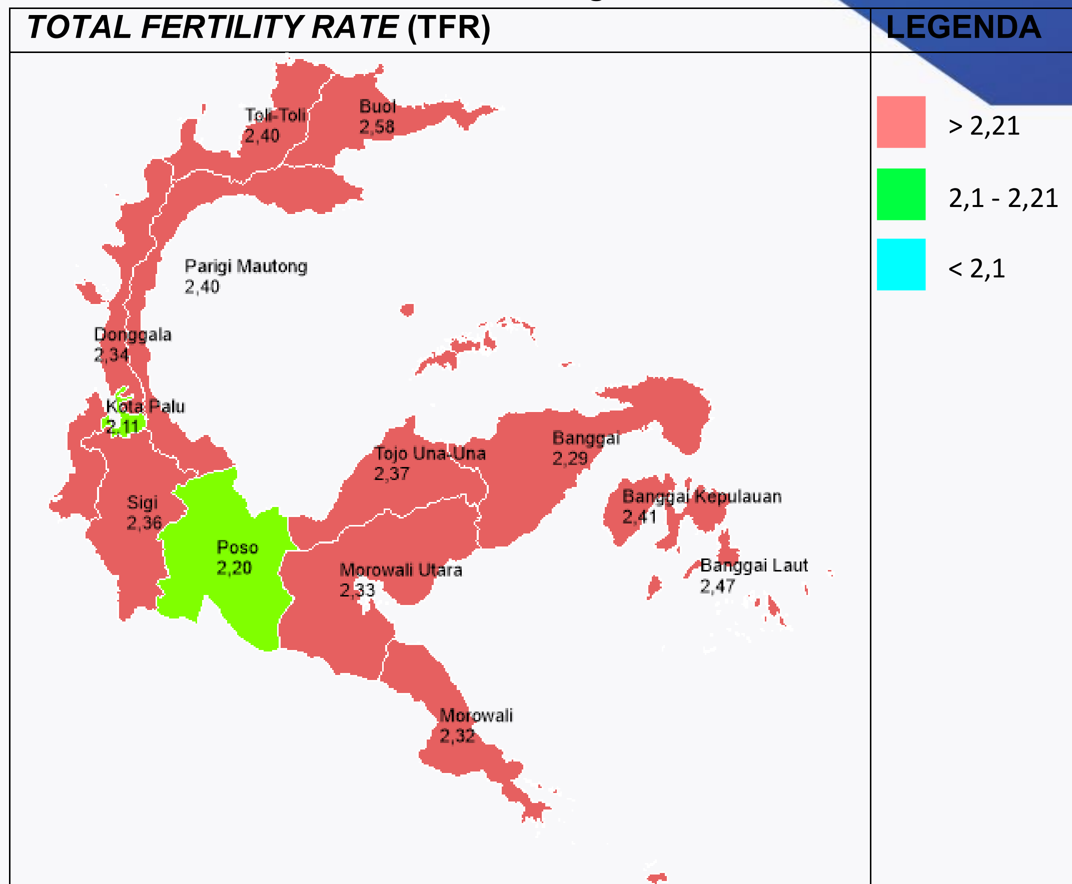


Berdasarkan peta di atas dapat dilihat bahwa masih terdapat sebagian kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Utara yang belum mencapai target MKJP tahun 2022. Hal ini perlu menjadi perhatian untuk menggencarkan kembali program-program dalam peningkatan angka MKJP di tingkat kabupaten/kota yang masih belum dapat mencapai target.

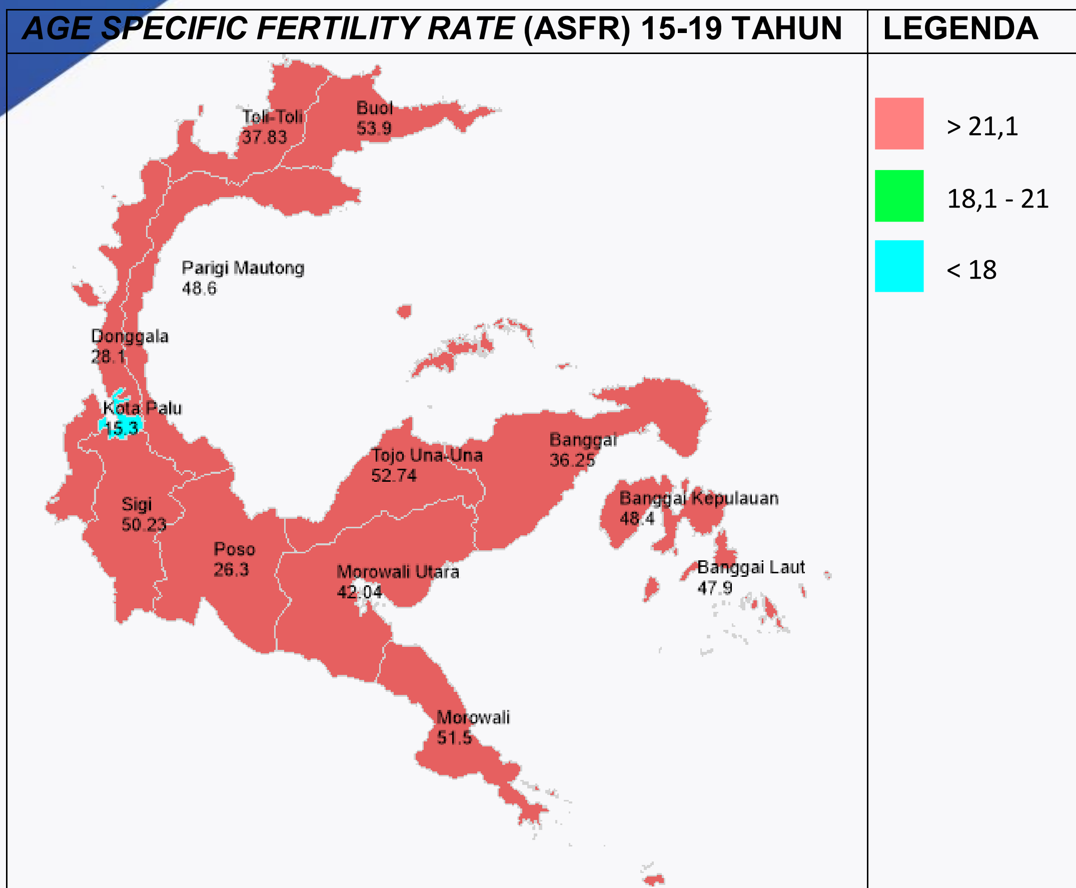


Berdasarkan peta di atas dapat dilihat bahwa secara umum angka indeks iBangga sebagian kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Utara masih belum mencapai target tahun 2022.

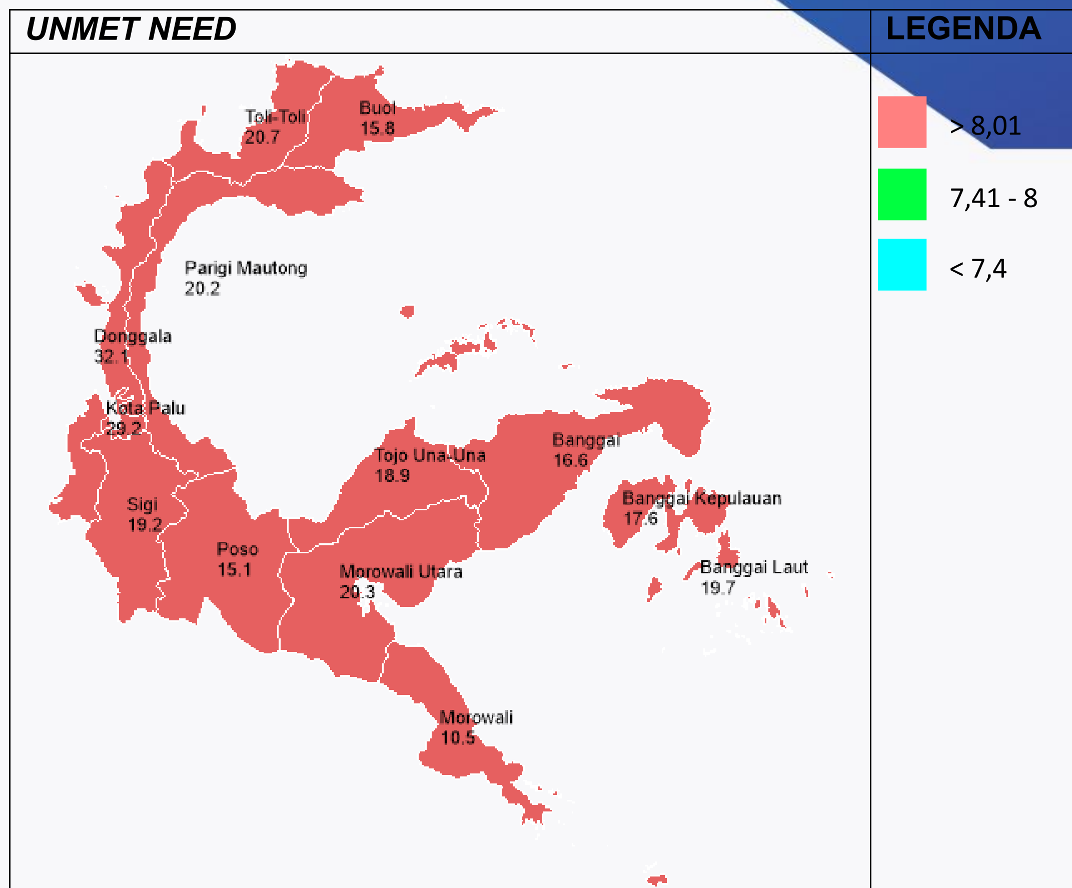
4.2.26. Peta Parameter Provinsi Sulawesi Tengah



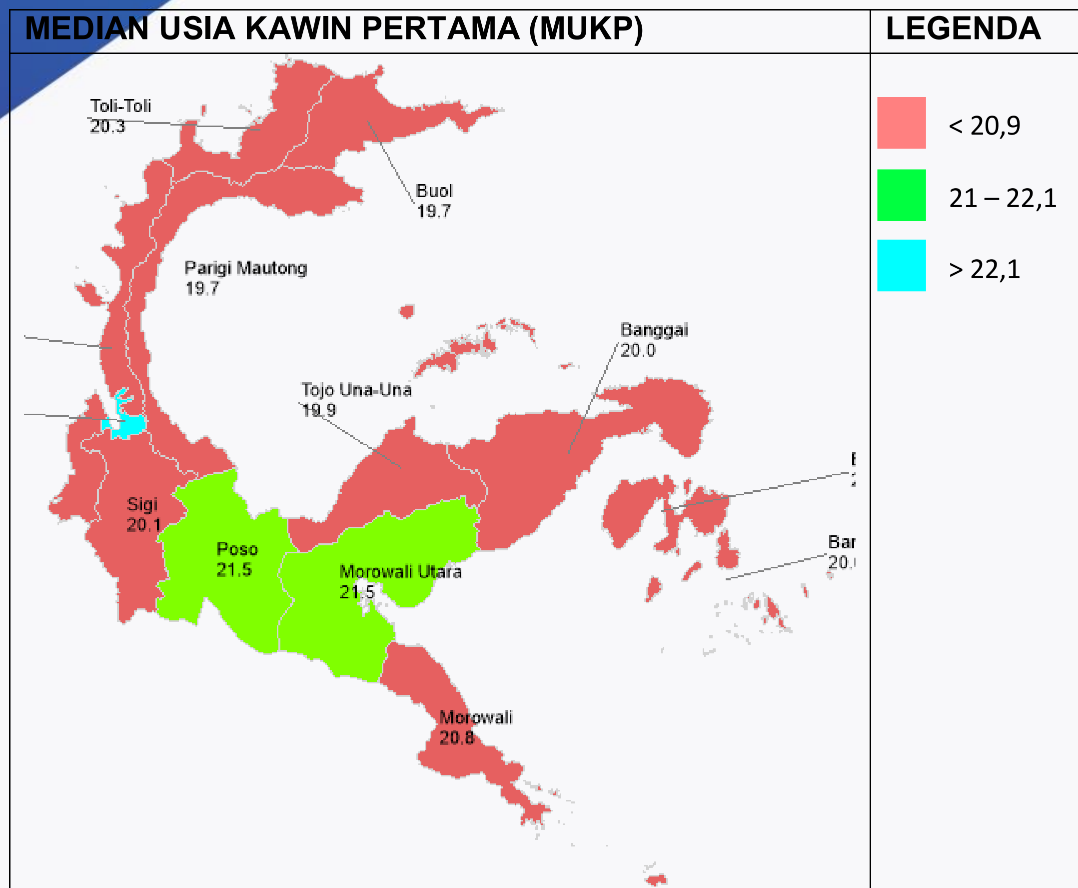
Berdasarkan Peta di atas dapat dilihat bahwa angka kelahiran total di Sulawesi Tengah masih cukup memiliki tantangan karena sebagian besar kabupaten/kota di Sulawesi Tengah memiliki angka yang tinggi yaitu di atas 2,21. Hanya Kota Palu dan Kabupaten Poso yang sudah memiliki angka kelahiran yang sesuai dengan target RPJMN. Hal ini perlu menjadi perhatian bagi para pengambil kebijakan di kabupaten/kota di Sulawesi Tengah untuk melakukan upaya dan langkah-langkah untuk menurunkan angka TFR di wilayahnya masing-masing.



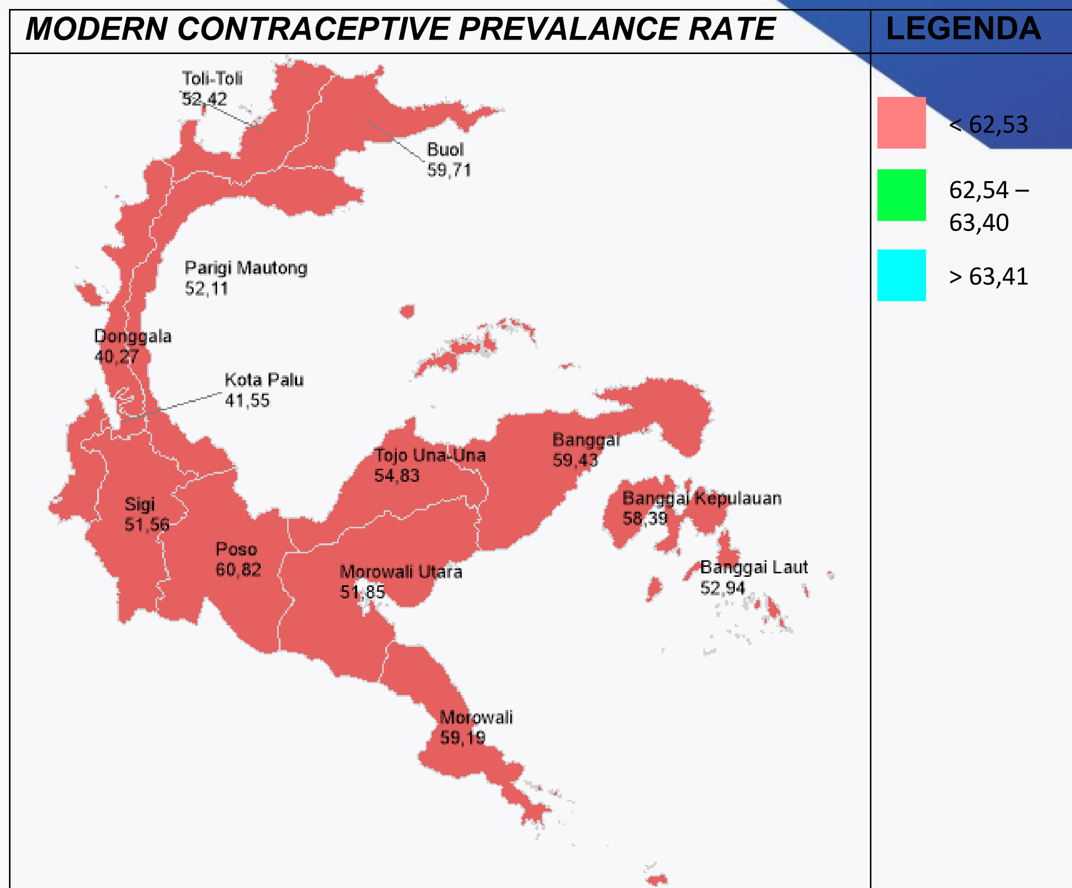
Berdasarkan peta di atas terlihat bahwa indikator ASFR 15-19 tahun tingkat kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tengah hampir semuanya masih belum mencapai target, kecuali Kota Palu. Hal tersebut perlu menjadi perhatian untuk dapat di intervensi secara efisien dan tepat sasaran agar dapat mencapai target yang telah ditentukan di tahun-tahun kedepannya.



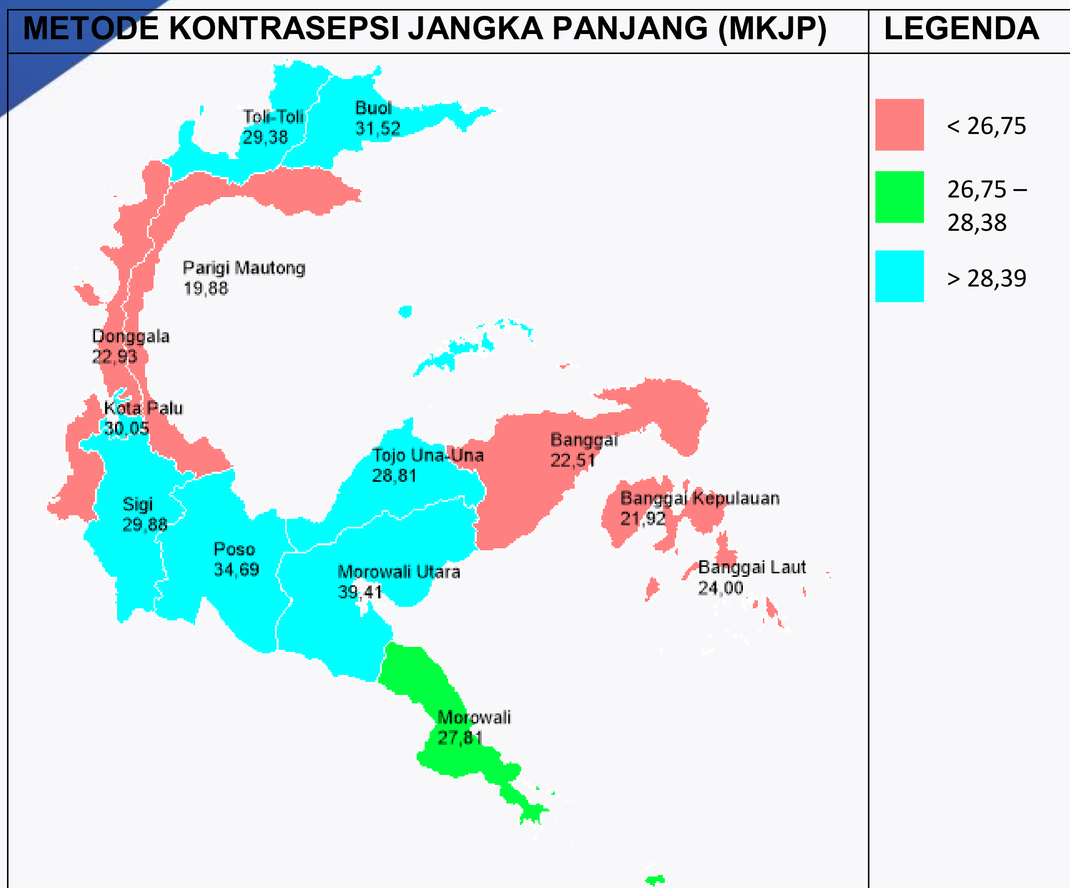
Berdasarkan peta di atas terlihat bahwa untuk indikator *unmet need* di Provinsi Sulawesi Tengah perlu perhatian yang besar karena seluruh kabupaten/kota di Sulawesi Tengah memiliki angka *unmet need* yang sangat tinggi yaitu di atas 8,01 persen.



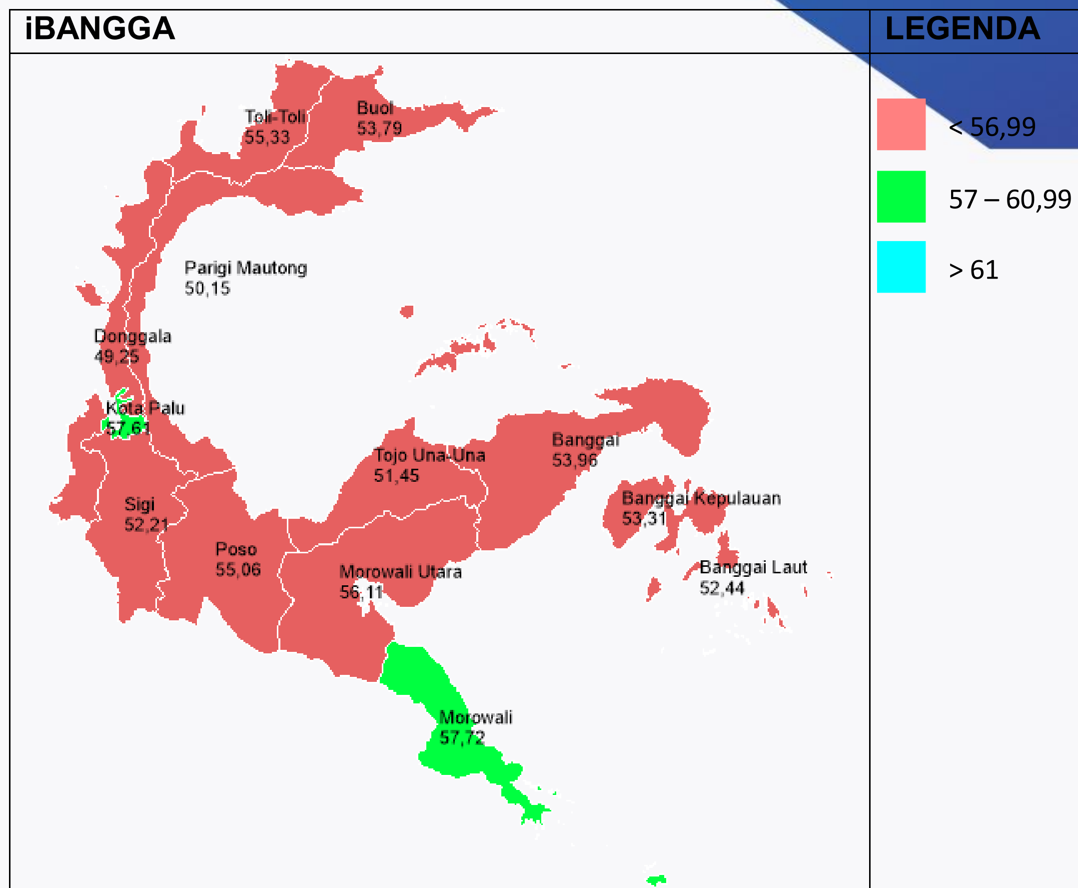
Berdasarkan peta di atas, terlihat bahwa angka Median Usia Kawin Pertama (MUKP) di Provinsi Sulawesi Tengah perlu menjadi perhatian karena hanya 3 kabupaten/kota yang sudah mencapai target yang telah ditetapkan. Sementara itu, kabupaten/kota lainnya belum mencapai target MUKP tahun 2022 yaitu 21 tahun ke atas. Hal ini tentu harus menjadi perhatian agar kabupaten/kota yang angka MUKP-nya belum mencapai target dapat difokuskan untuk dilakukan intervensi yang diperlukan agar dapat mencapai target MUKP tahun 2024 yaitu di atas 22,1.



Berdasarkan peta di atas terlihat bahwa untuk indikator mCPR seluruh kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tengah masih sangat rendah dan belum mencapai target. Hal ini perlu menjadi perhatian, khususnya dalam aspek advokasi dan KIE serta pelayanan kontrasepsi di Sulawesi Tengah agar dapat dilaksanakan sesuai dengan kondisi dan situasi masing-masing daerah agar dapat berjalan secara terfokus dan tepat sasaran.

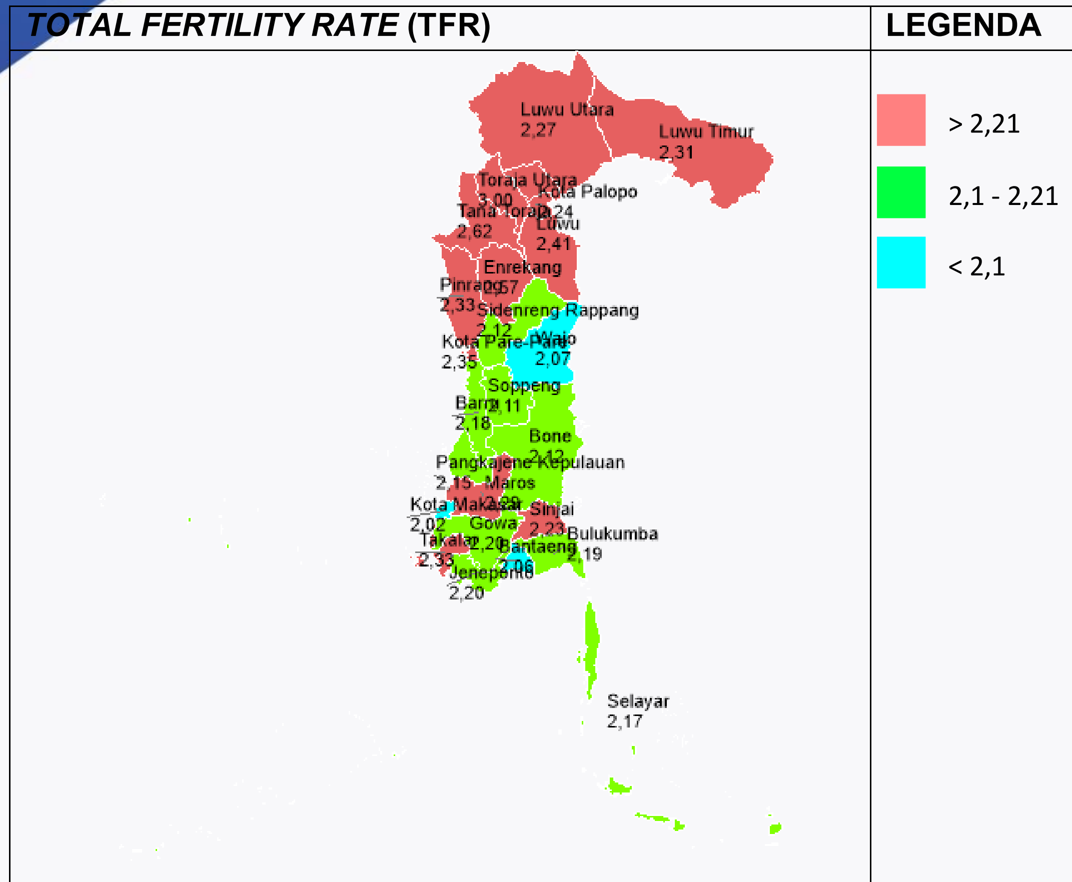


Berdasarkan peta di atas dapat dilihat bahwa masih terdapat sebagian kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tengah yang belum mencapai target MKJP tahun 2022. Hal ini perlu menjadi perhatian untuk menggencarkan kembali program-program dalam peningkatan angka MKJP di tingkat kabupaten/kota yang masih belum dapat mencapai target.

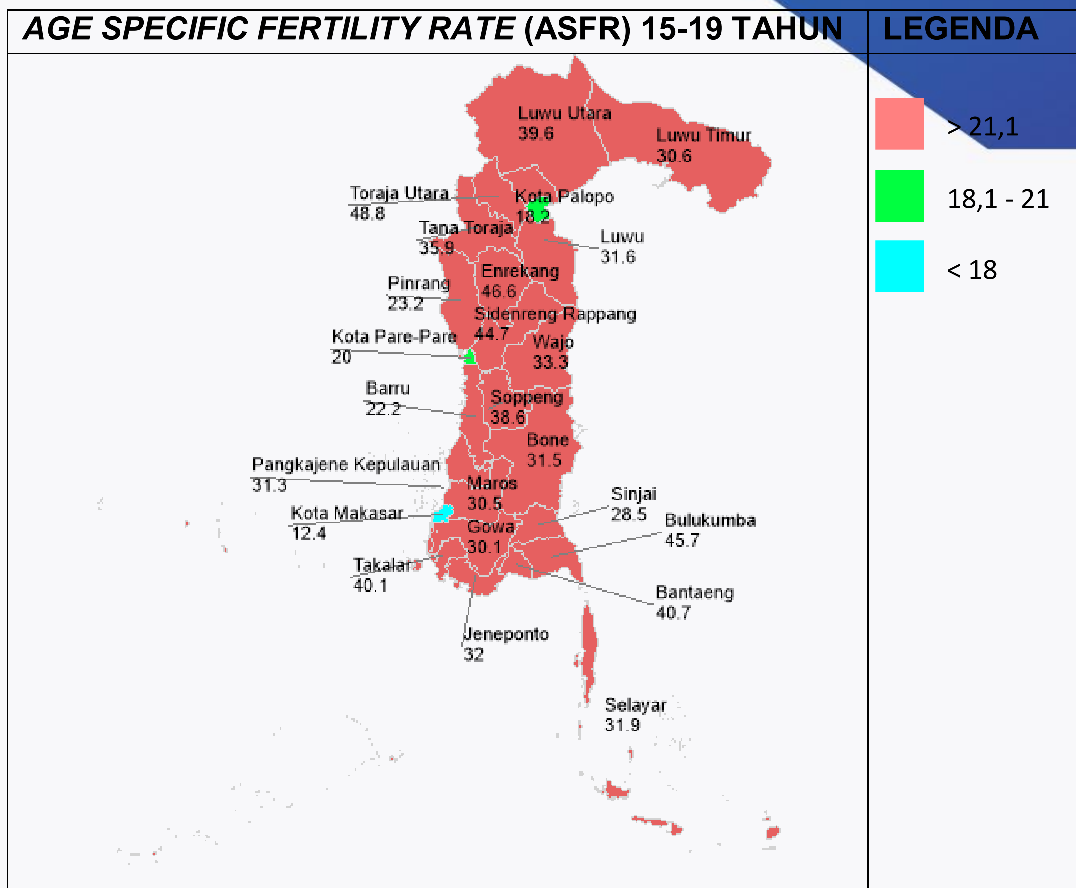


Berdasarkan peta di atas dapat dilihat bahwa secara umum angka indeks iBangga sebagian besar kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tengah masih belum mencapai target tahun 2022. Hanya terdapat 2 kabupaten/kota yang telah mencapai target tahun 2022 yakni Kota Palu dan Kabupaten Morowali.

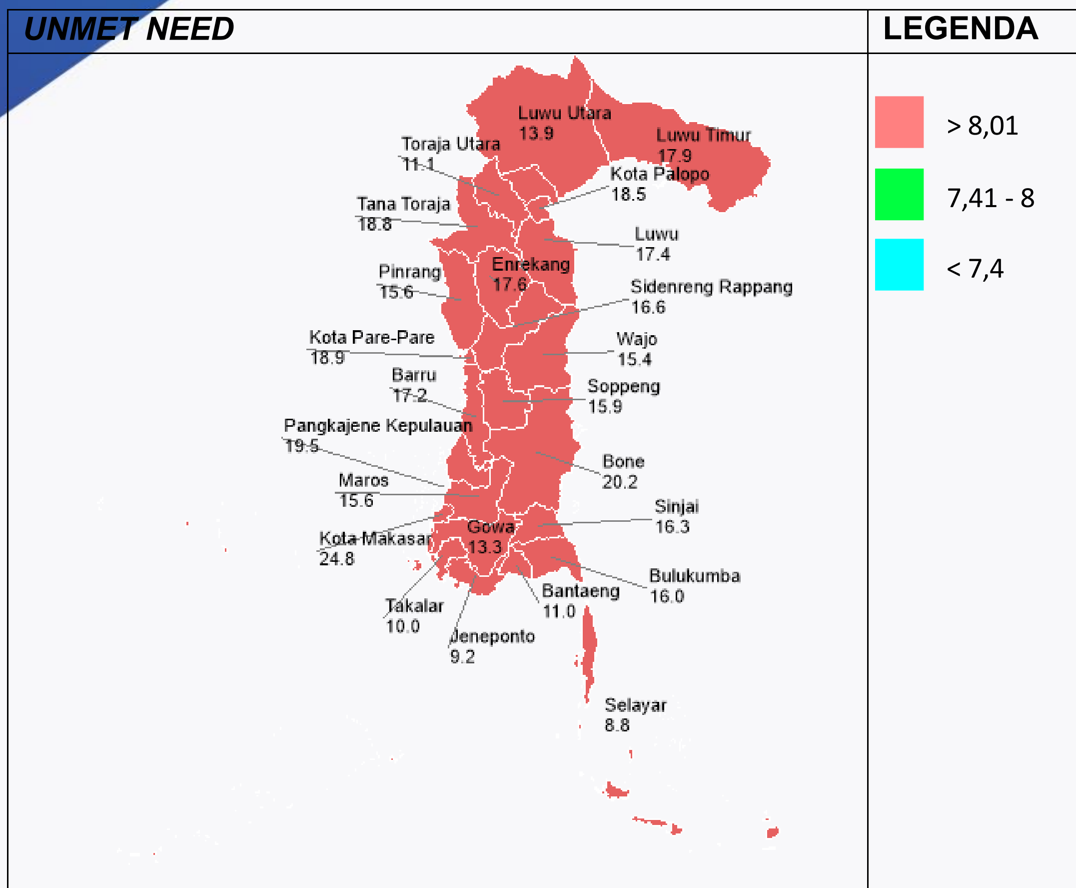
4.2.27. Peta Parameter Provinsi Sulawesi Selatan

TOTAL FERTILITY RATE **(TFR)**	**LEGENDA**
	

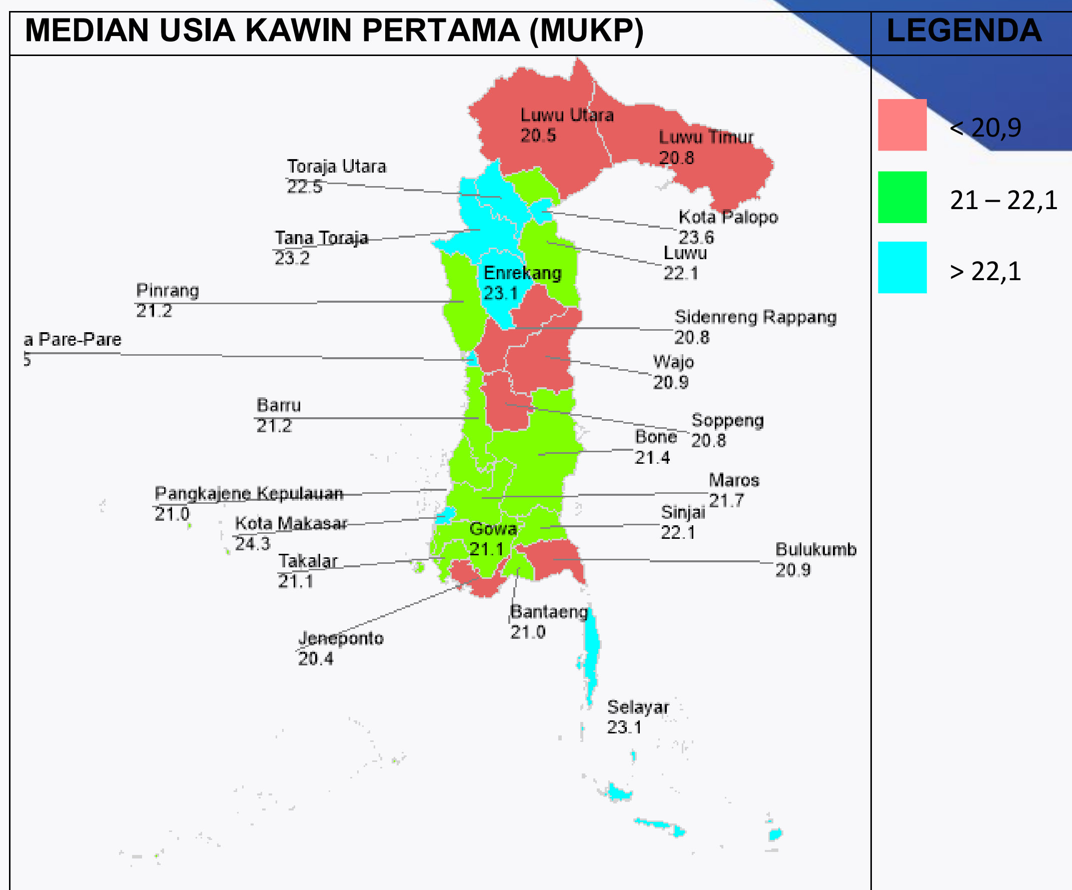
Berdasarkan Peta di atas dapat dilihat bahwa angka kelahiran total di Sulawesi Selatan masih cukup memiliki tantangan karena sebagian kabupaten/kota di Sulawesi Selatan memiliki angka yang tinggi yaitu di atas 2,21. Hal ini perlu menjadi perhatian bagi para pengambil kebijakan di kabupaten/kota di Sulawesi Selatan untuk melakukan upaya dan langkah-langkah untuk menurunkan angka TFR di wilayahnya masing-masing.



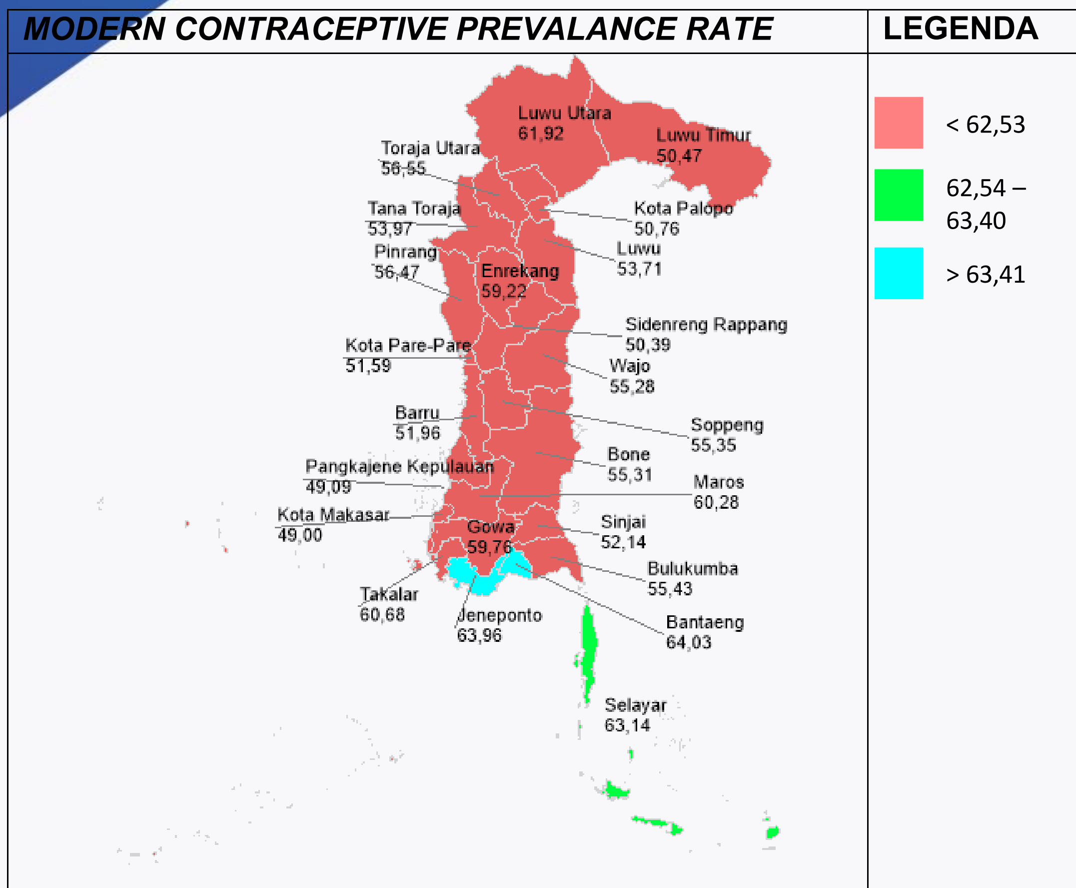
Berdasarkan peta di atas terlihat bahwa indikator ASFR 15-19 tahun tingkat kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan hampir semuanya masih belum mencapai target, kecuali Kota Pare-Pare, Kota Palopo, dan yang terbaik adalah Kota Makasar. Hal tersebut perlu di intervensi secara efisien dan tepat sasaran agar dapat mencapai target yang telah ditentukan di tahun-tahun kedepannya.



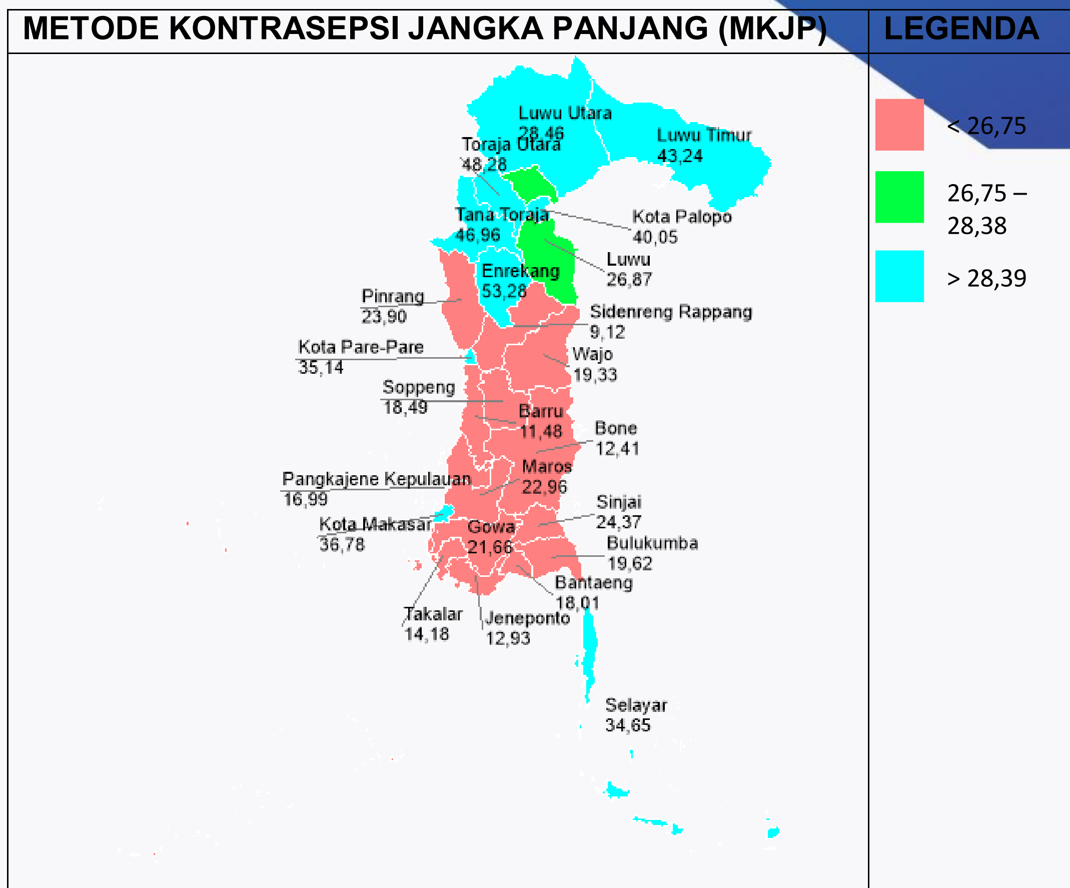
Berdasarkan peta di atas terlihat bahwa untuk indikator *unmet need* di Provinsi Sulawesi Selatan perlu perhatian yang besar karena seluruh kabupaten/kota di Sulawesi Selatan memiliki angka *unmet need* yang sangat tinggi yaitu di atas 8,01 persen.



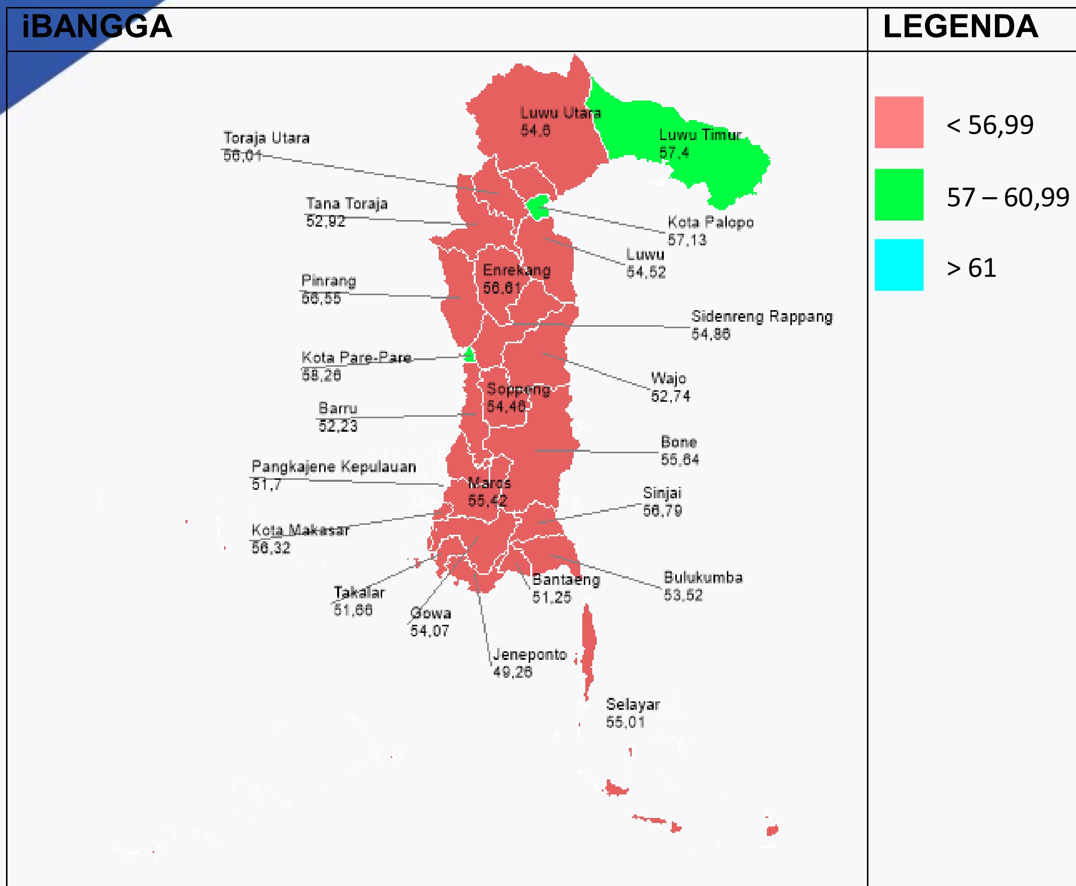
Berdasarkan peta di atas, terlihat bahwa angka Median Usia Kawin Pertama (MUKP) di Provinsi Sulawesi Selatan sudah cukup baik karena hanya 7 kabupaten/kota yang belum mencapai target yang telah ditetapkan. Sementara itu, kabupaten/kota lainnya sudah mencapai target MUKP tahun 2022 yaitu 21 tahun ke atas, namun hal ini tentu tetap harus menjadi perhatian agar kabupaten/kota yang angka MUKP-nya belum mencapai target dapat difokuskan untuk dilakukan intervensi yang diperlukan agar dapat mencapai target MUKP tahun 2024 yaitu di atas 22,1.



Berdasarkan peta di atas terlihat bahwa untuk indikator mCPR hampir seluruh kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan masih sangat rendah dan belum mencapai target. Hal ini perlu menjadi perhatian, khususnya dalam aspek advokasi dan KIE serta pelayanan kontrasepsi di Sulawesi Selatan agar dapat dilaksanakan sesuai dengan kondisi dan situasi masing-masing daerah agar dapat berjalan secara terfokus dan tepat sasaran.

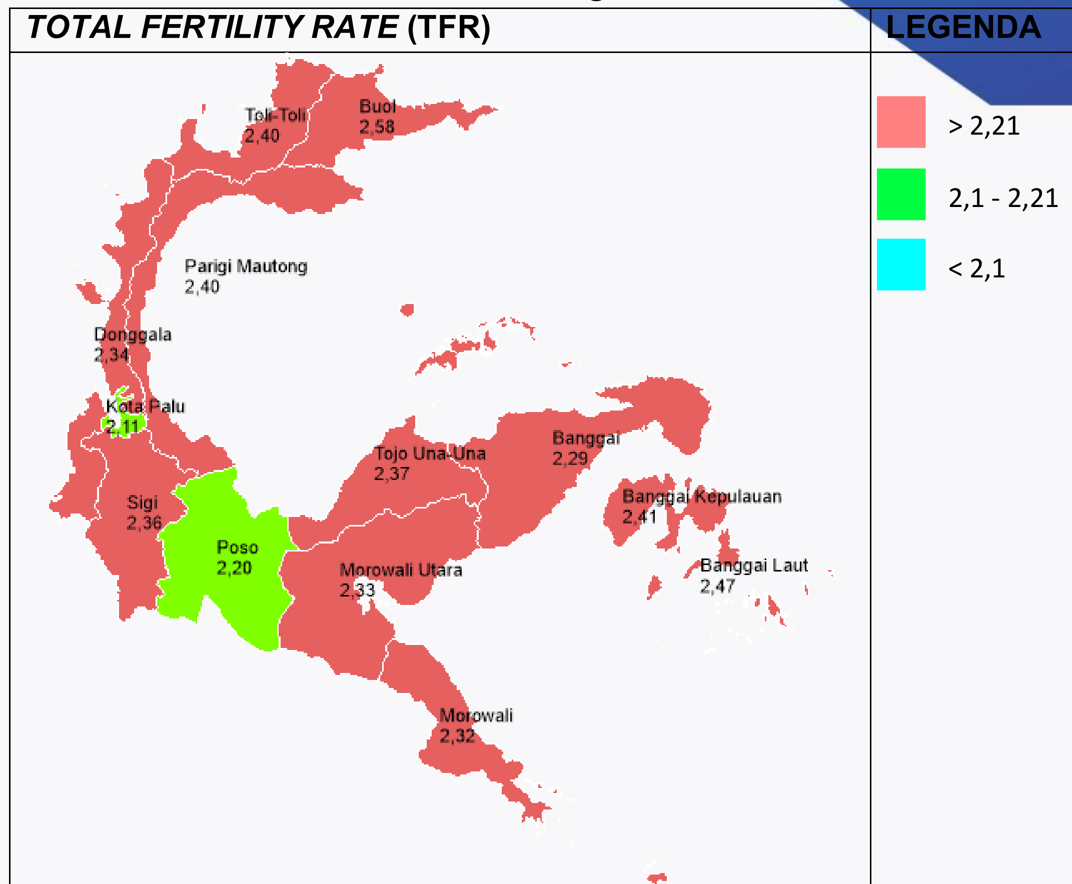


Berdasarkan peta di atas dapat dilihat bahwa masih terdapat sebagian kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan yang belum mencapai target MKJP tahun 2022. Hal ini perlu menjadi perhatian untuk menggencarkan kembali program-program dalam peningkatan angka MKJP di tingkat kabupaten/kota yang masih belum dapat mencapai target.

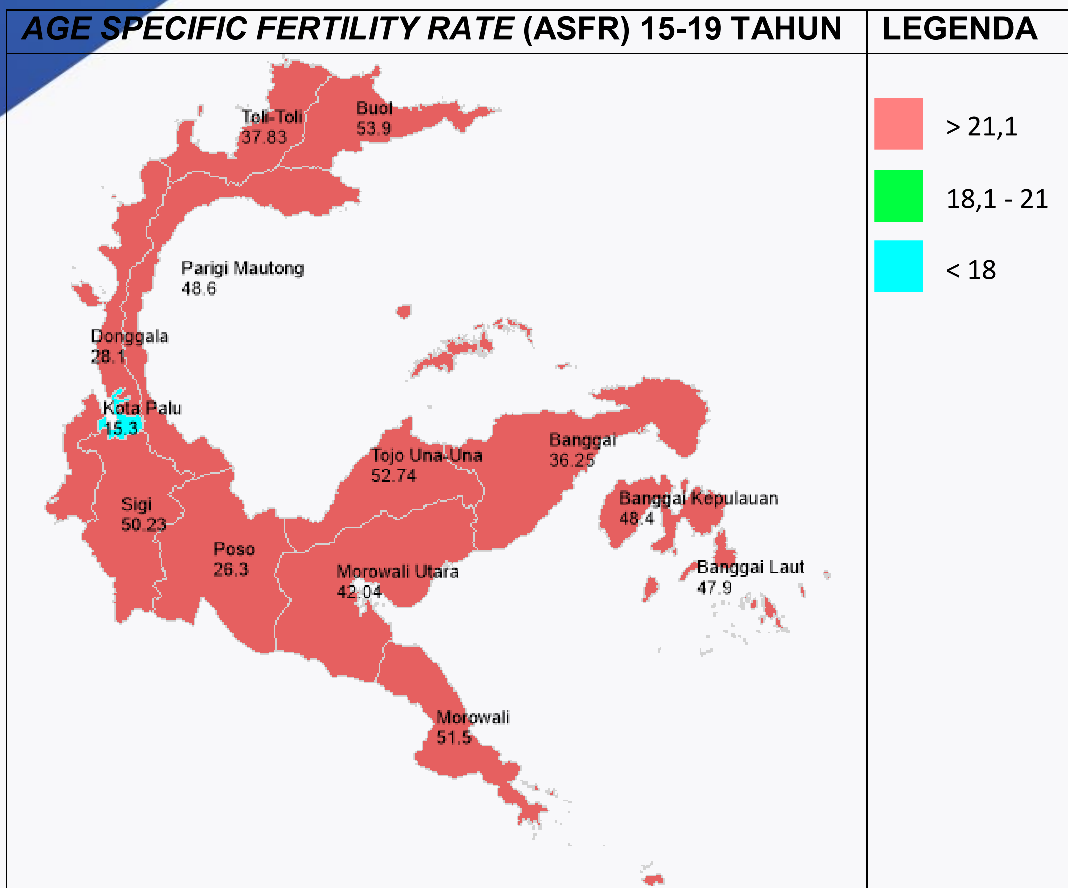


Berdasarkan peta di atas dapat dilihat bahwa secara umum angka indeks iBangga sebagian besar kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan masih belum mencapai target tahun 2022. Hanya terdapat 3 kabupaten/kota yang telah mencapai target tahun 2022 yakni Kota Pare-Pare, Kota Palopo, dan Kabupaten Luwu Timur.

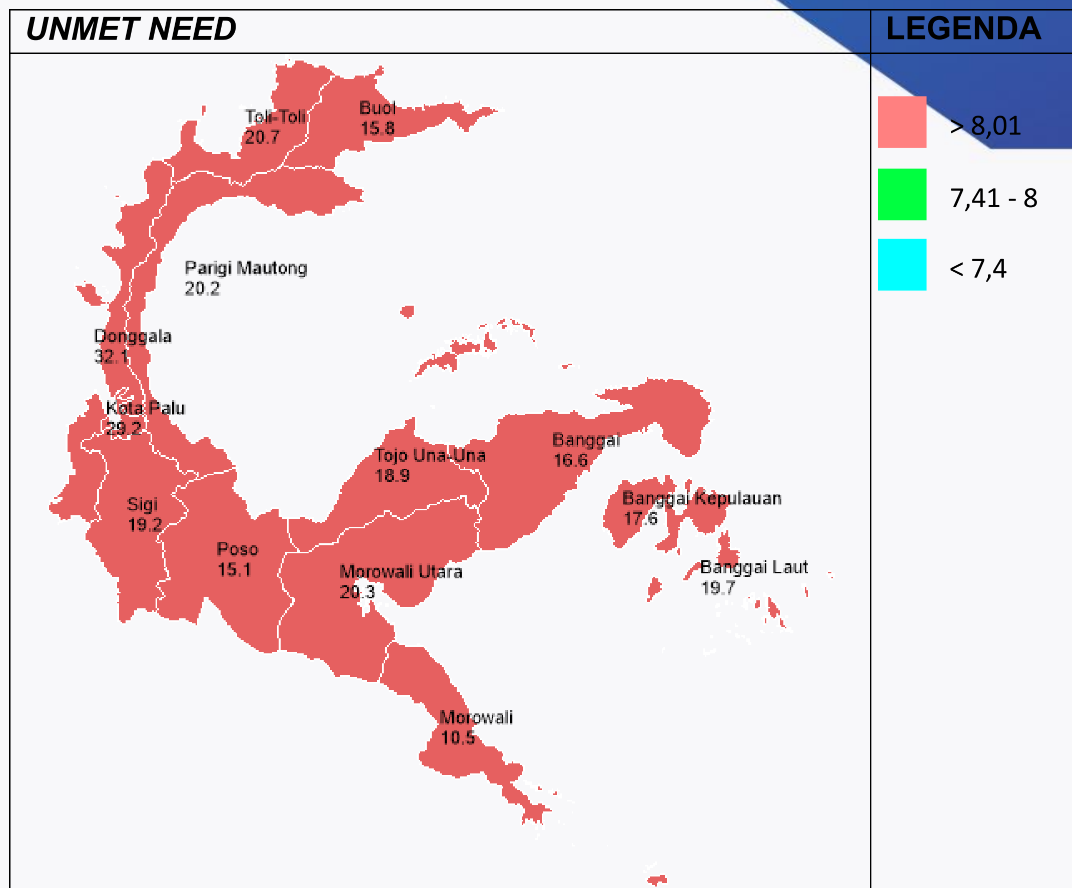
4.2.28. Peta Parameter Provinsi Sulawesi Tengah



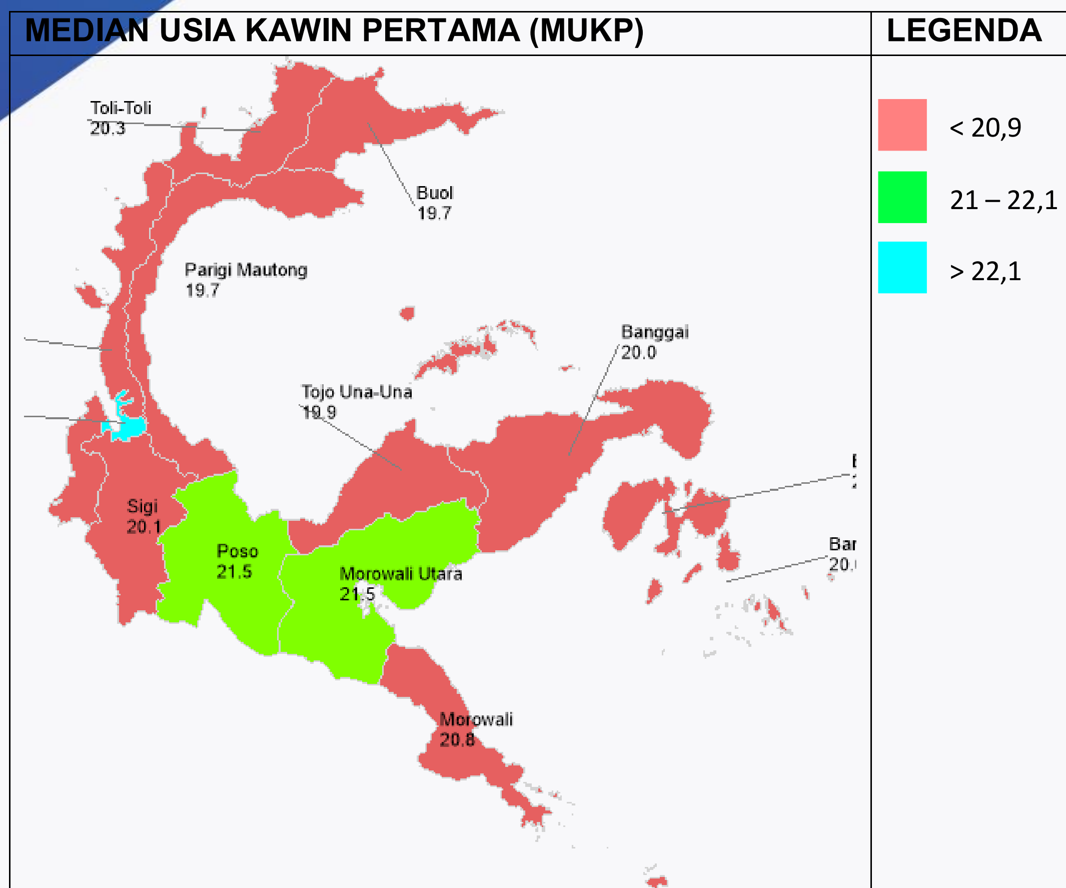
Berdasarkan Peta di atas dapat dilihat bahwa angka kelahiran total di Sulawesi Tengah masih cukup memiliki tantangan karena sebagian besar kabupaten/kota di Sulawesi Tengah memiliki angka yang tinggi yaitu di atas 2,21. Hanya Kota Palu dan Kabupaten Poso yang sudah memiliki angka kelahiran yang sesuai dengan target RPJMN. Hal ini perlu menjadi perhatian bagi para pengambil kebijakan di kabupaten/kota di Sulawesi Tengah untuk melakukan upaya dan langkah-langkah untuk menurunkan angka TFR di wilayahnya masing-masing.



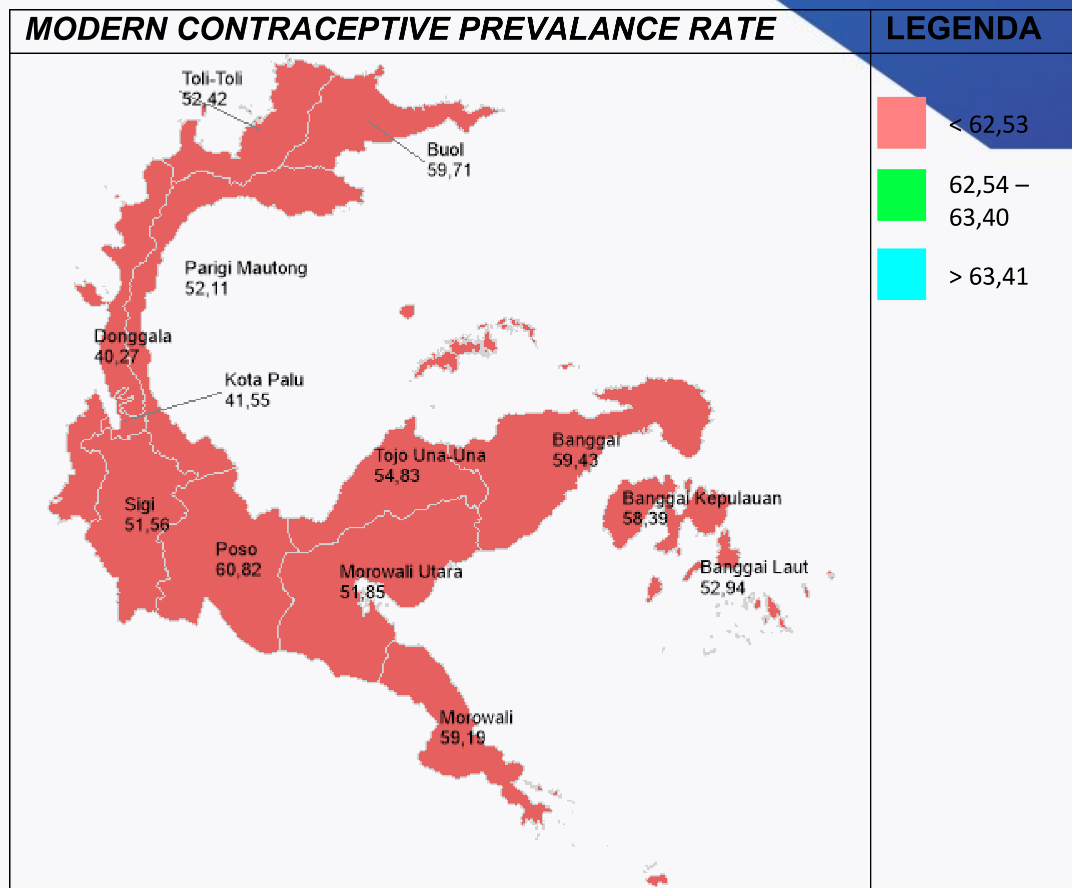
Berdasarkan peta di atas terlihat bahwa indikator ASFR 15-19 tahun tingkat kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tengah hampir semuanya masih belum mencapai target, kecuali Kota Palu. Hal tersebut perlu menjadi perhatian untuk dapat di intervensi secara efisien dan tepat sasaran agar dapat mencapai target yang telah ditentukan di tahun-tahun kedepannya.



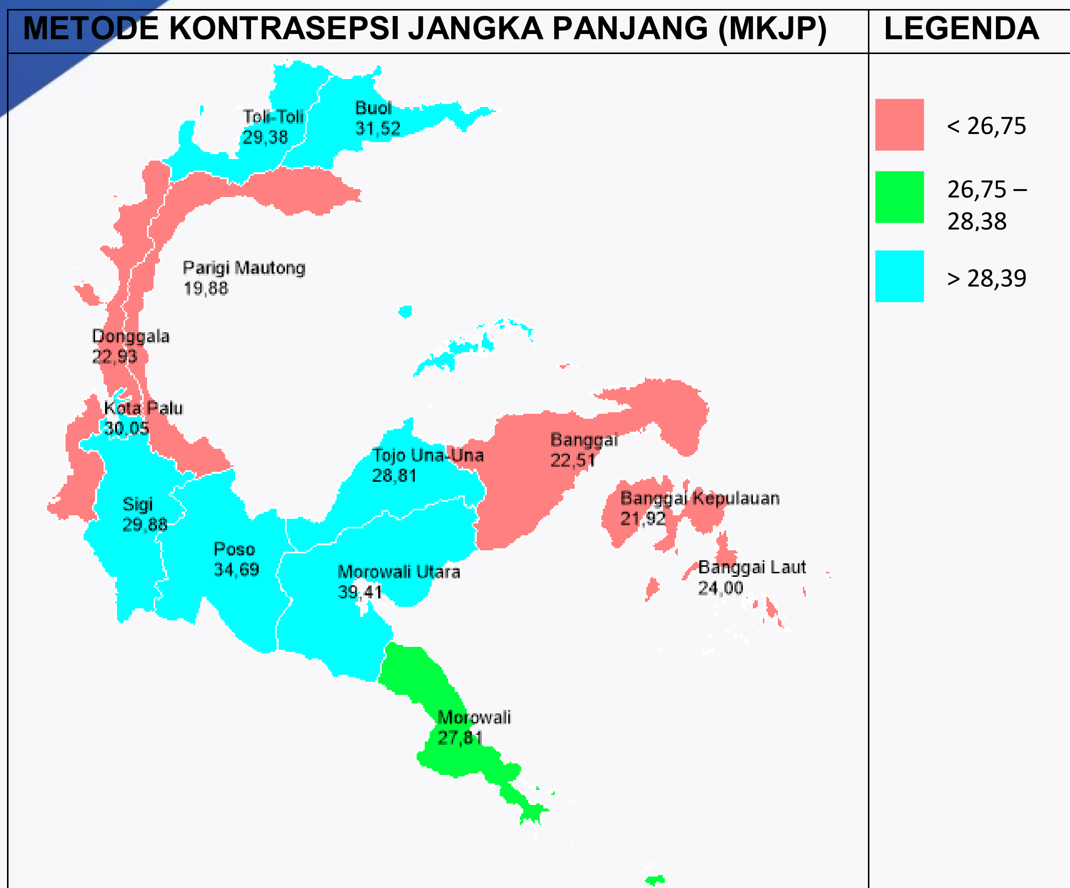
Berdasarkan peta di atas terlihat bahwa untuk indikator *unmet need* di Provinsi Sulawesi Tengah perlu perhatian yang besar karena seluruh kabupaten/kota di Sulawesi Tengah memiliki angka *unmet need* yang sangat tinggi yaitu di atas 8,01 persen.



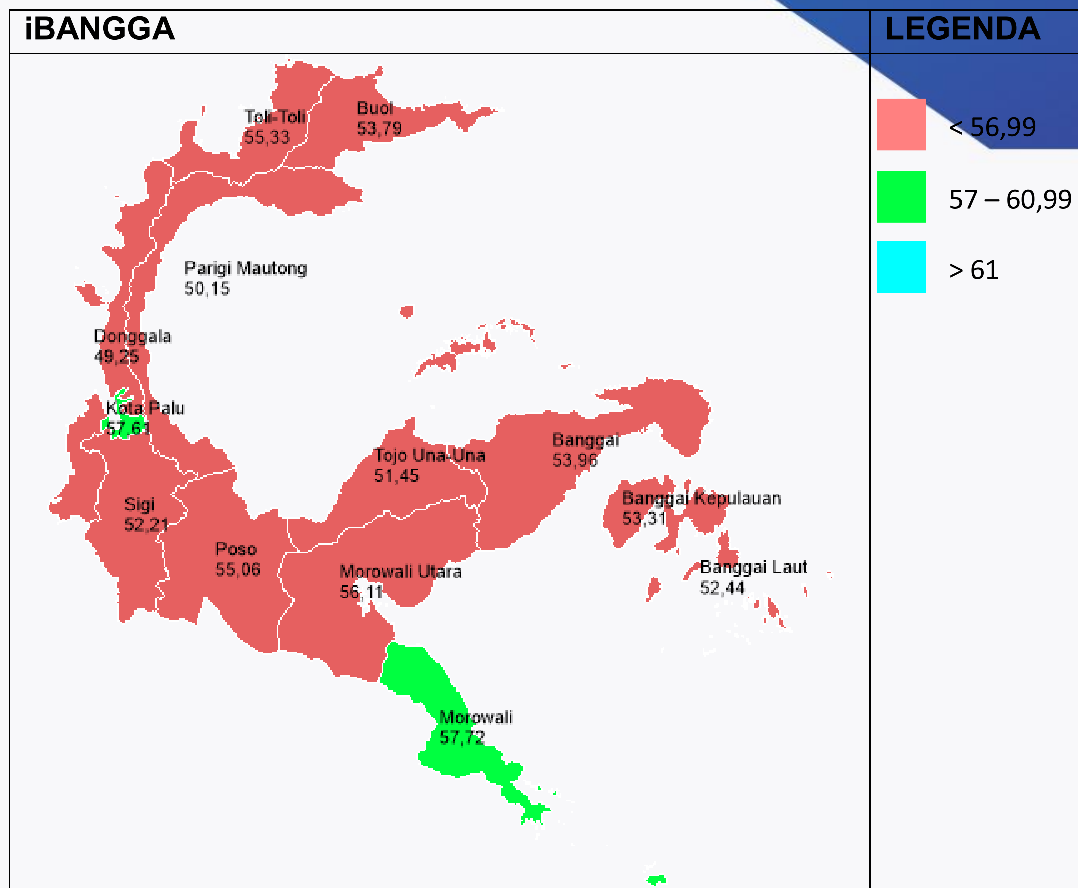
Berdasarkan peta di atas, terlihat bahwa angka Median Usia Kawin Pertama (MUKP) di Provinsi Sulawesi Tengah perlu menjadi perhatian karena hanya 3 kabupaten/kota yang sudah mencapai target yang telah ditetapkan. Sementara itu, kabupaten/kota lainnya belum mencapai target MUKP tahun 2022 yaitu 21 tahun ke atas. Hal ini tentu harus menjadi perhatian agar kabupaten/kota yang angka MUKP-nya belum mencapai target dapat difokuskan untuk dilakukan intervensi yang diperlukan agar dapat mencapai target MUKP tahun 2024 yaitu di atas 22,1.



Berdasarkan peta di atas terlihat bahwa untuk indikator mCPR seluruh kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tengah masih sangat rendah dan belum mencapai target. Hal ini perlu menjadi perhatian, khususnya dalam aspek advokasi dan KIE serta pelayanan kontrasepsi di Sulawesi Tengah agar dapat dilaksanakan sesuai dengan kondisi dan situasi masing-masing daerah agar dapat berjalan secara terfokus dan tepat sasaran.

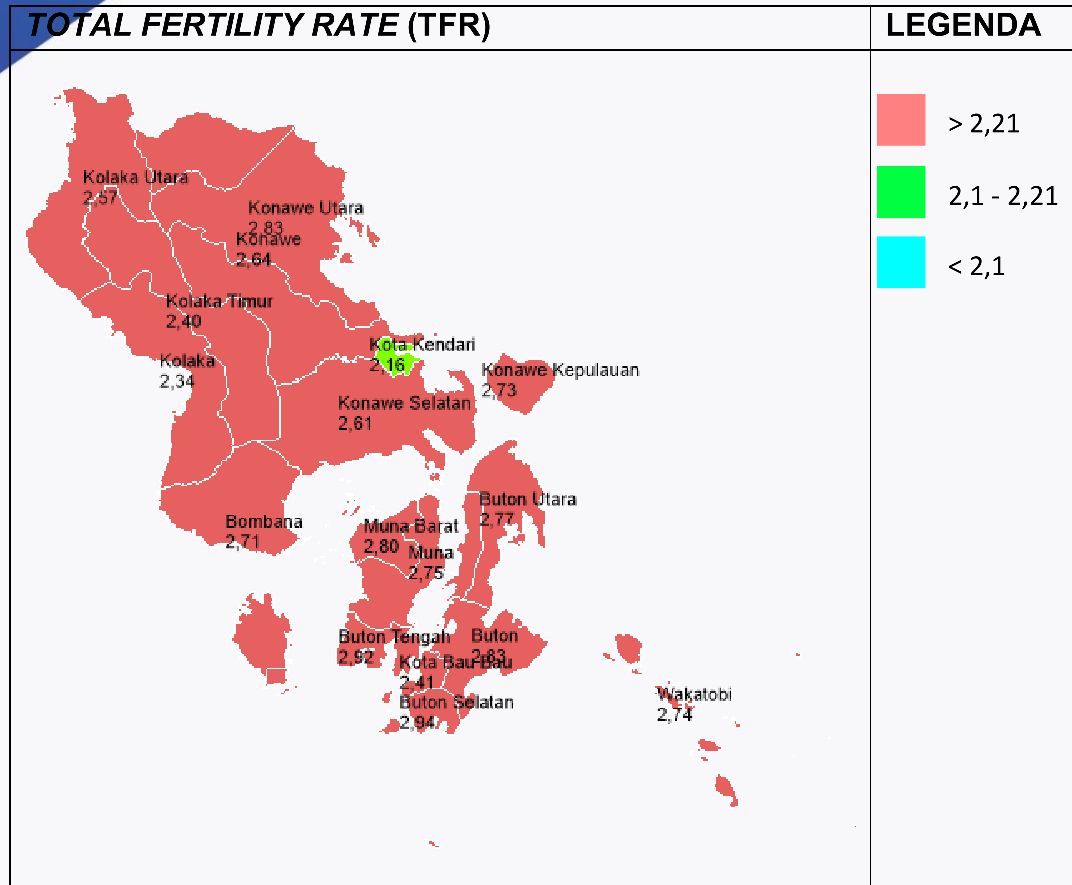


Berdasarkan peta di atas dapat dilihat bahwa masih terdapat sebagian kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tengah yang belum mencapai target MKJP tahun 2022. Hal ini perlu menjadi perhatian untuk menggencarkan kembali program-program dalam peningkatan angka MKJP di tingkat kabupaten/kota yang masih belum dapat mencapai target.

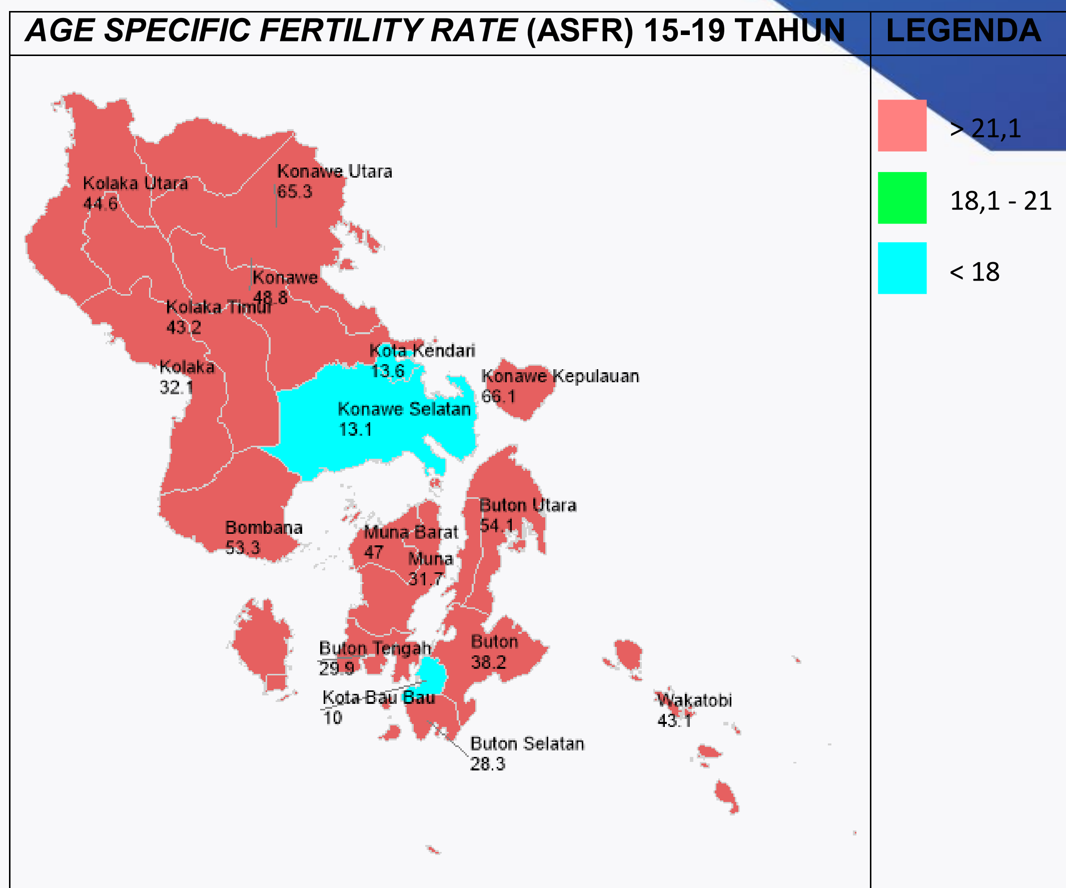


Berdasarkan peta di atas dapat dilihat bahwa secara umum angka indeks iBangga sebagian besar kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tengah masih belum mencapai target tahun 2022. Hanya terdapat 2 kabupaten/kota yang telah mencapai target tahun 2022 yakni Kota Palu dan Kabupaten Morowali.

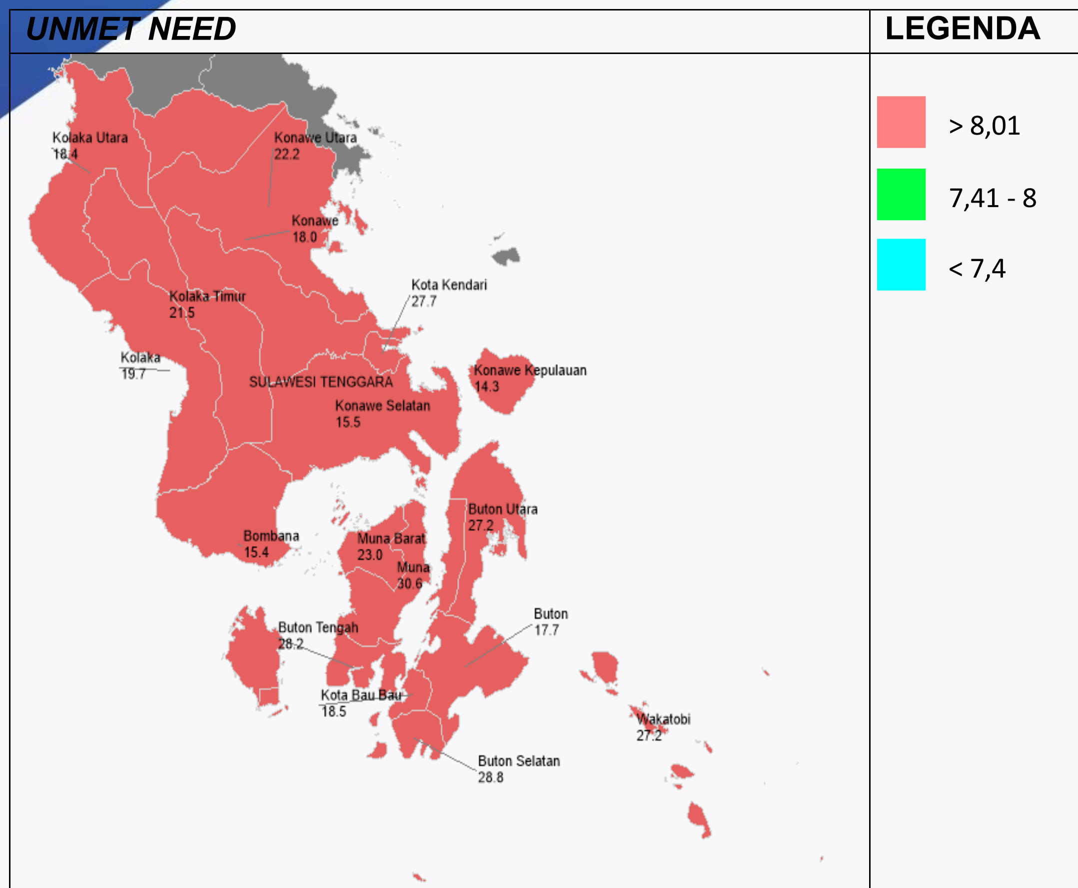
4.2.29. Peta Parameter Provinsi Sulawesi Tenggara



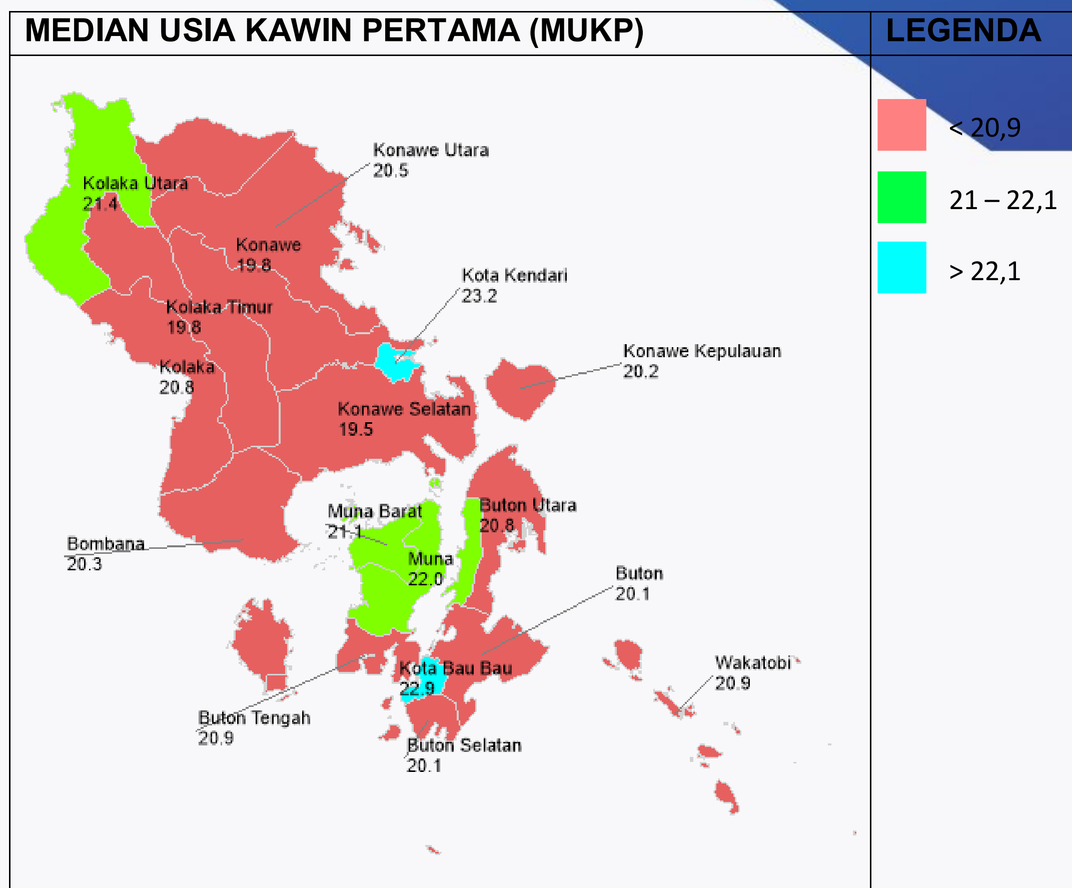
Berdasarkan Peta di atas dapat dilihat bahwa angka kelahiran total di Sulawesi Tenggara masih cukup memiliki tantangan karena sebagian besar kabupaten/kota di Sulawesi Tenggara memiliki angka yang tinggi yaitu di atas 2,21. Hanya Kota Kendari yang sudah memiliki angka kelahiran yang sesuai dengan target RPJMN. Hal ini perlu menjadi perhatian bagi para pengambil kebijakan di kabupaten/kota di Sulawesi Tenggara untuk melakukan upaya dan langkah-langkah untuk menurunkan angka TFR di wilayahnya masing-masing.



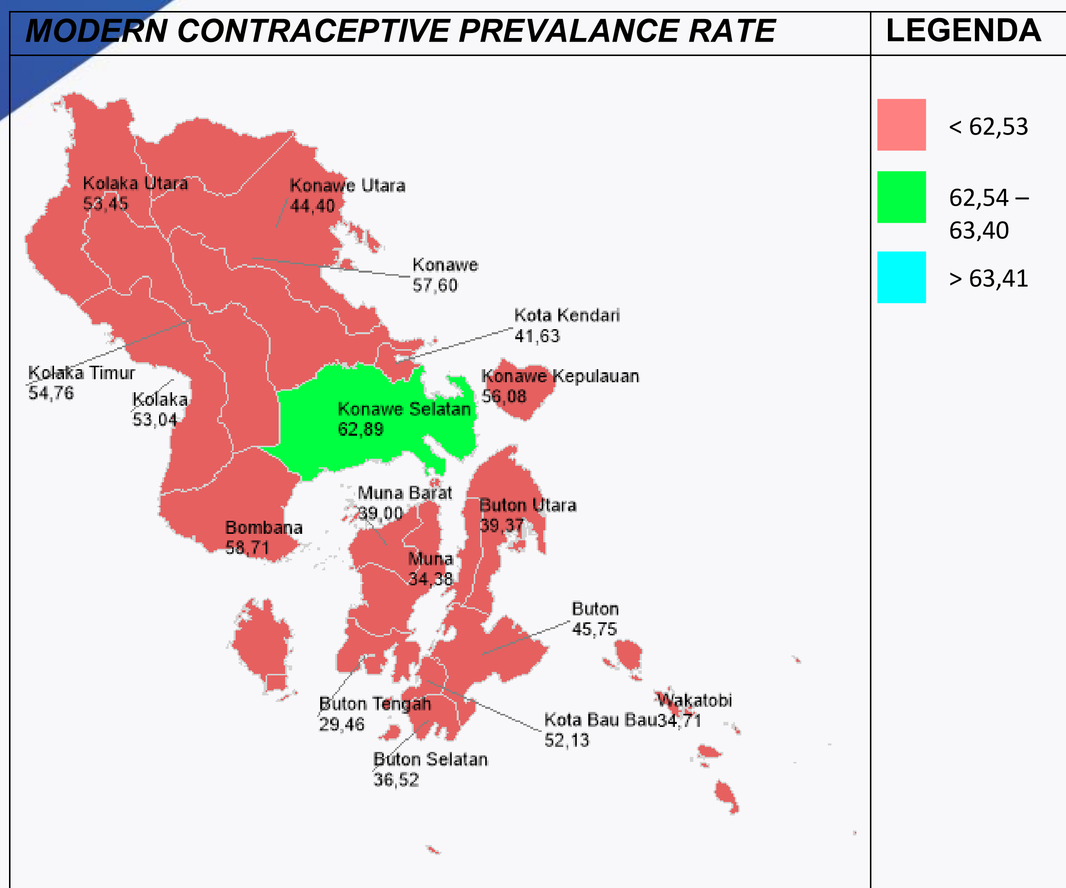
Berdasarkan peta di atas terlihat bahwa indikator ASFR 15-19 tahun tingkat kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tenggara hampir semuanya masih belum mencapai target, kecuali Kota Kendari, Kota Bau Bau, dan Kabupaten Konawe Selatan. Hal tersebut perlu menjadi perhatian untuk dapat di intervensi secara efisien dan tepat sasaran agar kabupaten/kota lain yang belum mencapai target dapat mencapai target yang telah ditentukan di tahun-tahun kedepannya.



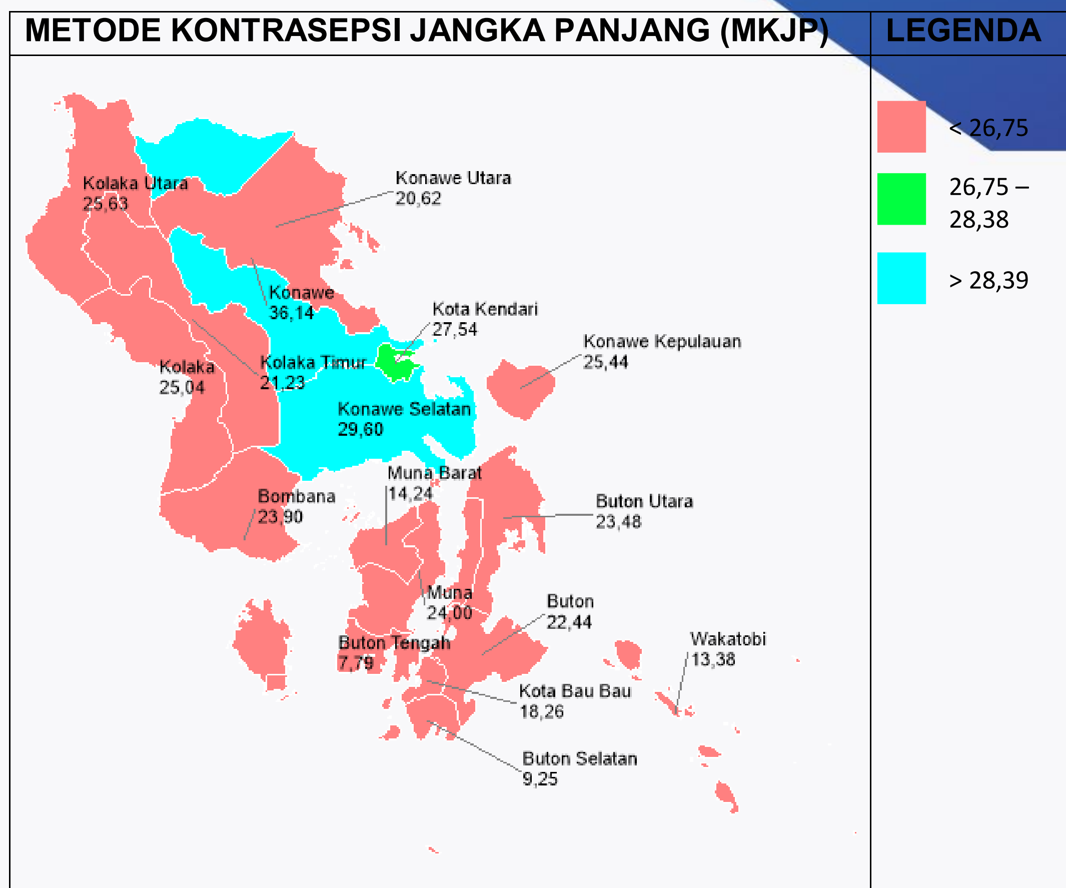
Berdasarkan peta di atas terlihat bahwa untuk indikator *unmet need* di Provinsi Sulawesi Tenggara perlu perhatian yang besar karena seluruh kabupaten/kota di Sulawesi Tenggara memiliki angka *unmet need* yang sangat tinggi yaitu di atas 8,01 persen.



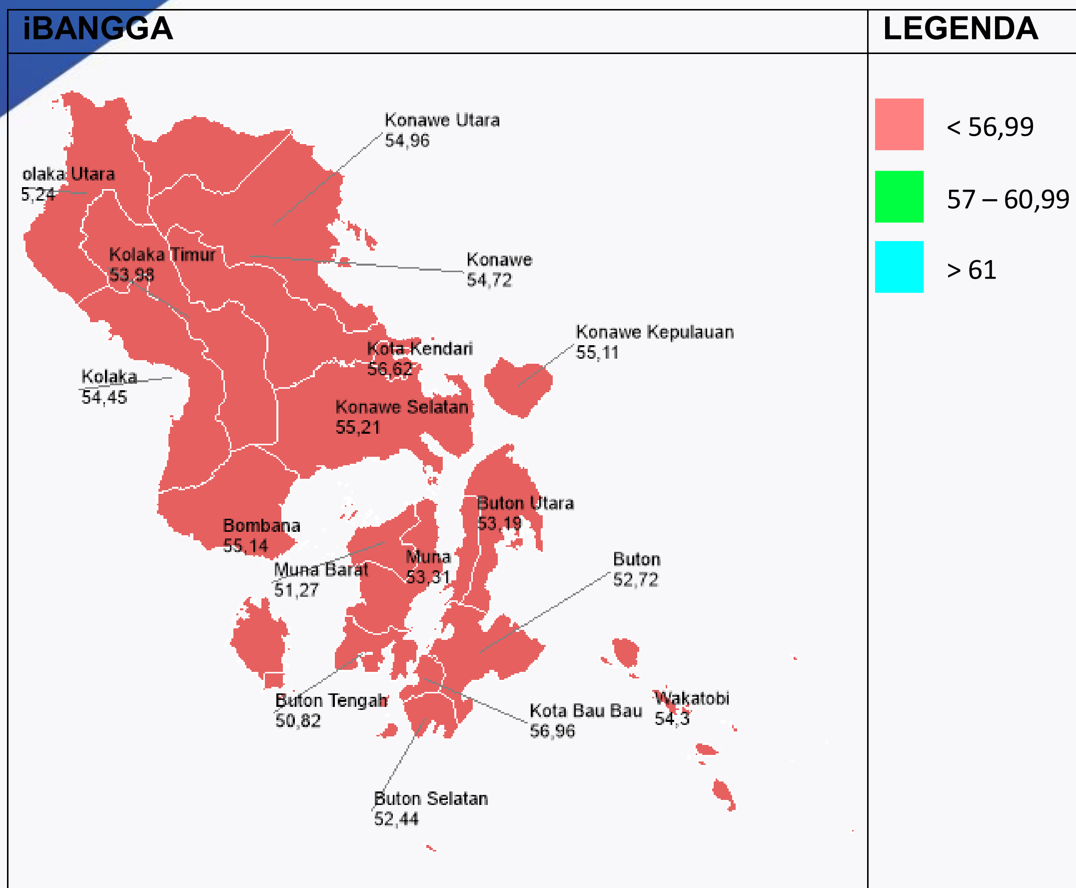
Berdasarkan peta di atas, terlihat bahwa angka Median Usia Kawin Pertama (MUKP) di Provinsi Sulawesi Tenggara perlu menjadi perhatian karena masih terdapat sebagian besar kabupaten/kota yang belum mencapai target yang telah ditetapkan untuk MUKP tahun 2022 yaitu 21 tahun ke atas. Hal ini tentu harus menjadi perhatian agar kabupaten/kota yang angka MUKP-nya belum mencapai target dapat difokuskan untuk dilakukan intervensi yang diperlukan agar dapat mencapai target MUKP tahun 2024 yaitu di atas 22,1.



Berdasarkan peta di atas terlihat bahwa untuk indikator mCPR hampir seluruh kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tenggara masih sangat rendah dan belum mencapai target, hanya Kabupaten Konawe Selatan yang sudah mencapai target. Hal ini perlu menjadi perhatian, khususnya dalam aspek advokasi dan KIE serta pelayanan kontrasepsi di Sulawesi Tenggara agar dapat dilaksanakan sesuai dengan kondisi dan situasi masing-masing daerah agar dapat berjalan secara terfokus dan tepat sasaran.

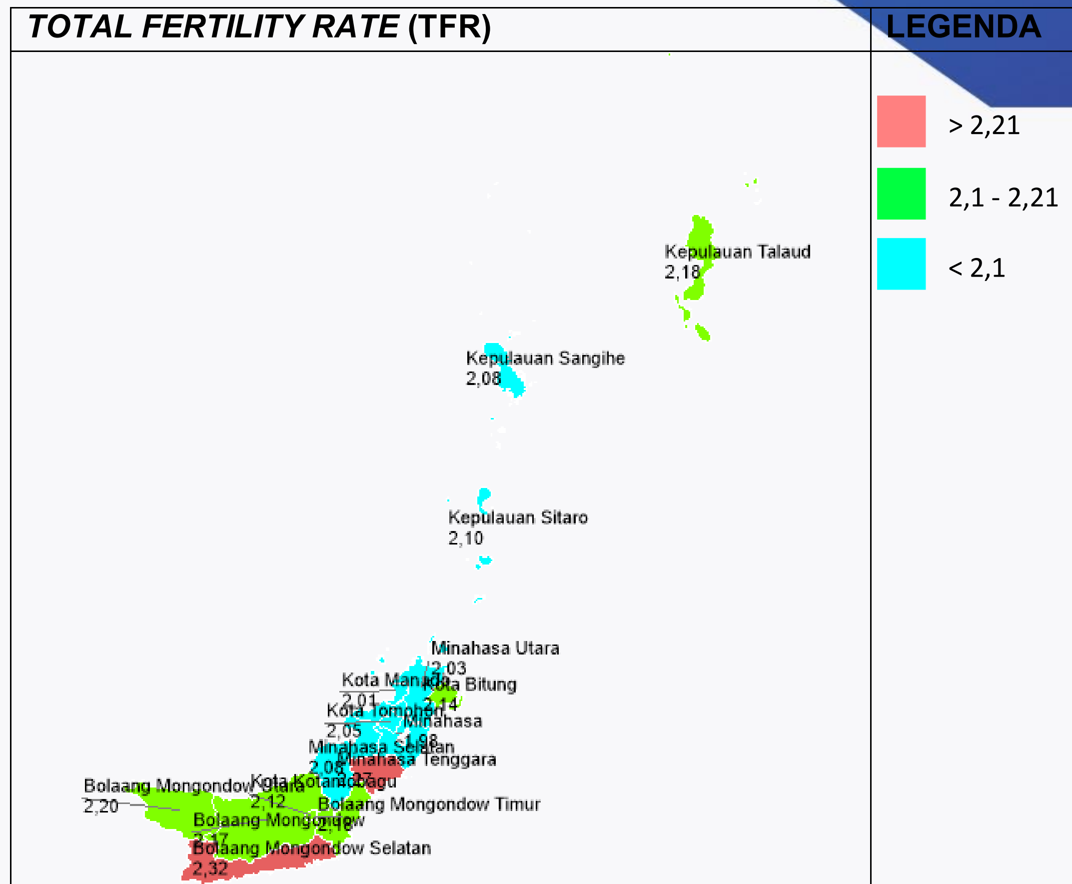


Berdasarkan peta di atas dapat dilihat bahwa masih terdapat sebagian besar kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tenggara yang belum mencapai target MKJP tahun 2022. Hal ini perlu menjadi perhatian untuk menggencarkan kembali program-program dalam peningkatan angka MKJP di tingkat kabupaten/kota yang masih belum dapat mencapai target.

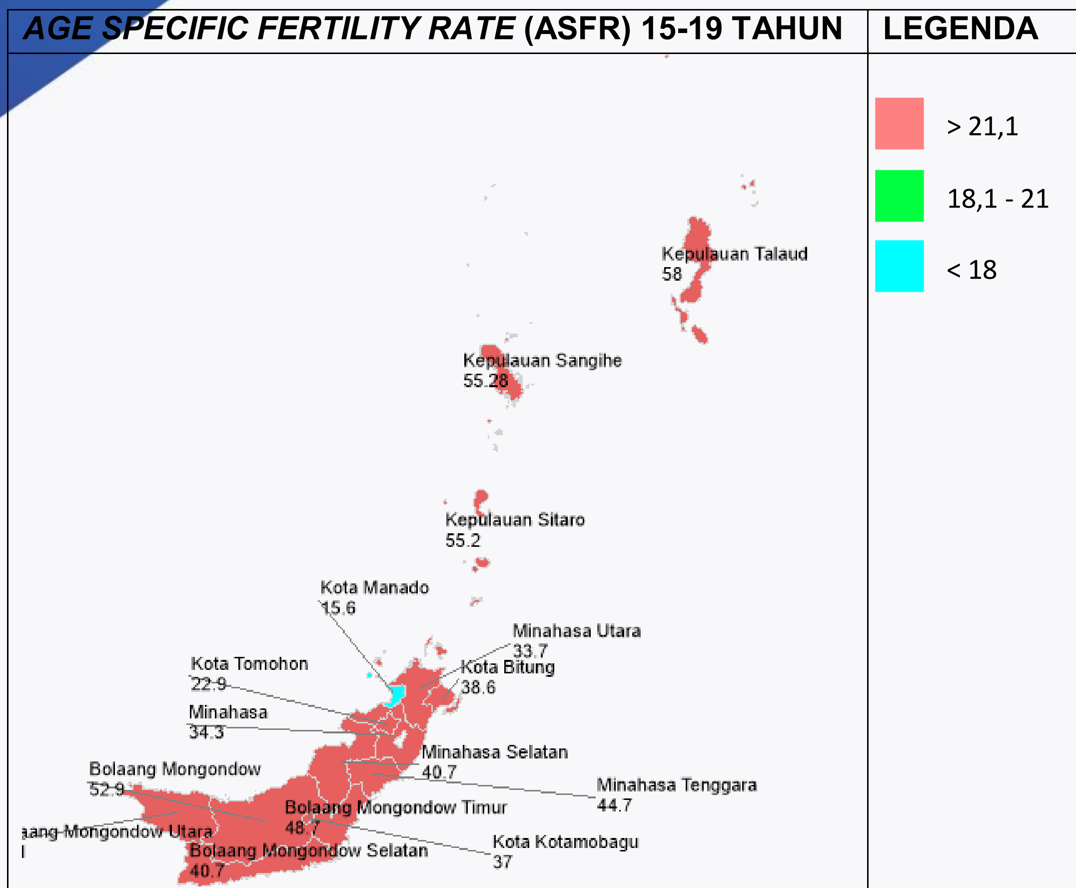


Berdasarkan peta di atas dapat dilihat bahwa secara umum angka indeks iBangga seluruh kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tenggara masih belum mencapai target tahun 2022.

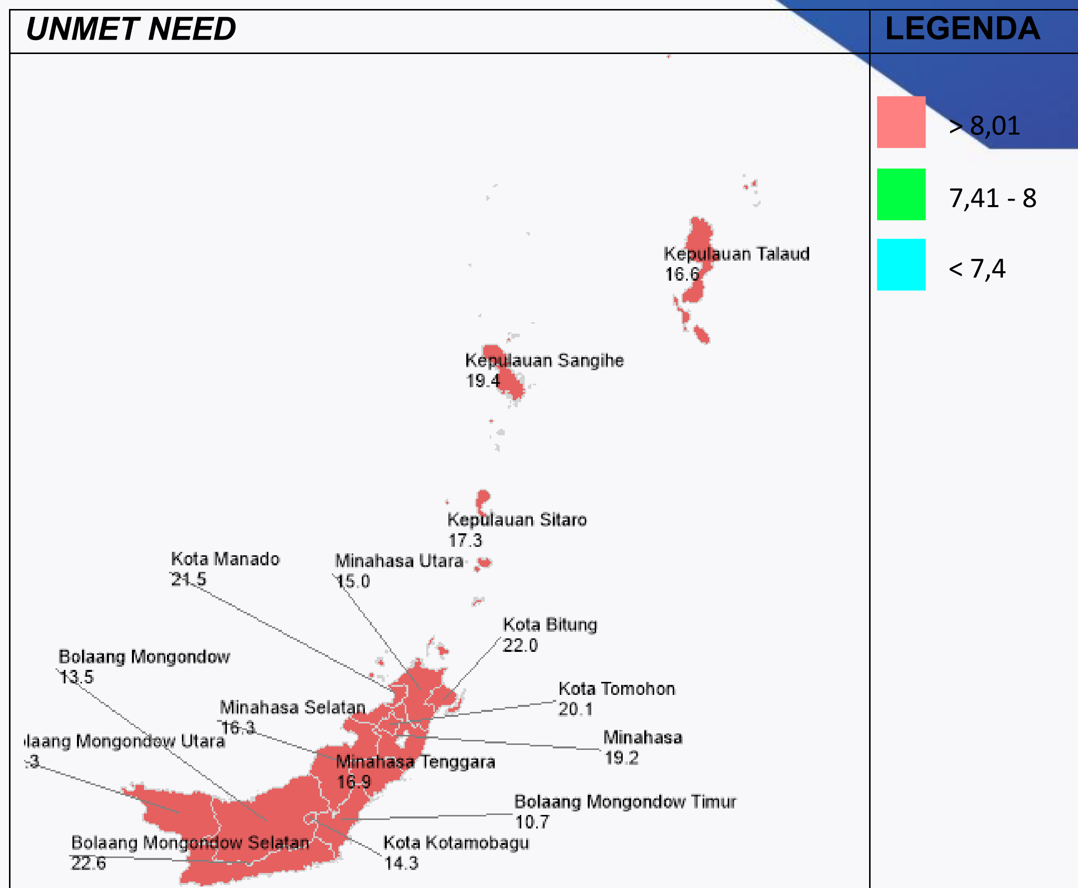
4.2.30. Peta Parameter Provinsi Sulawesi Utara



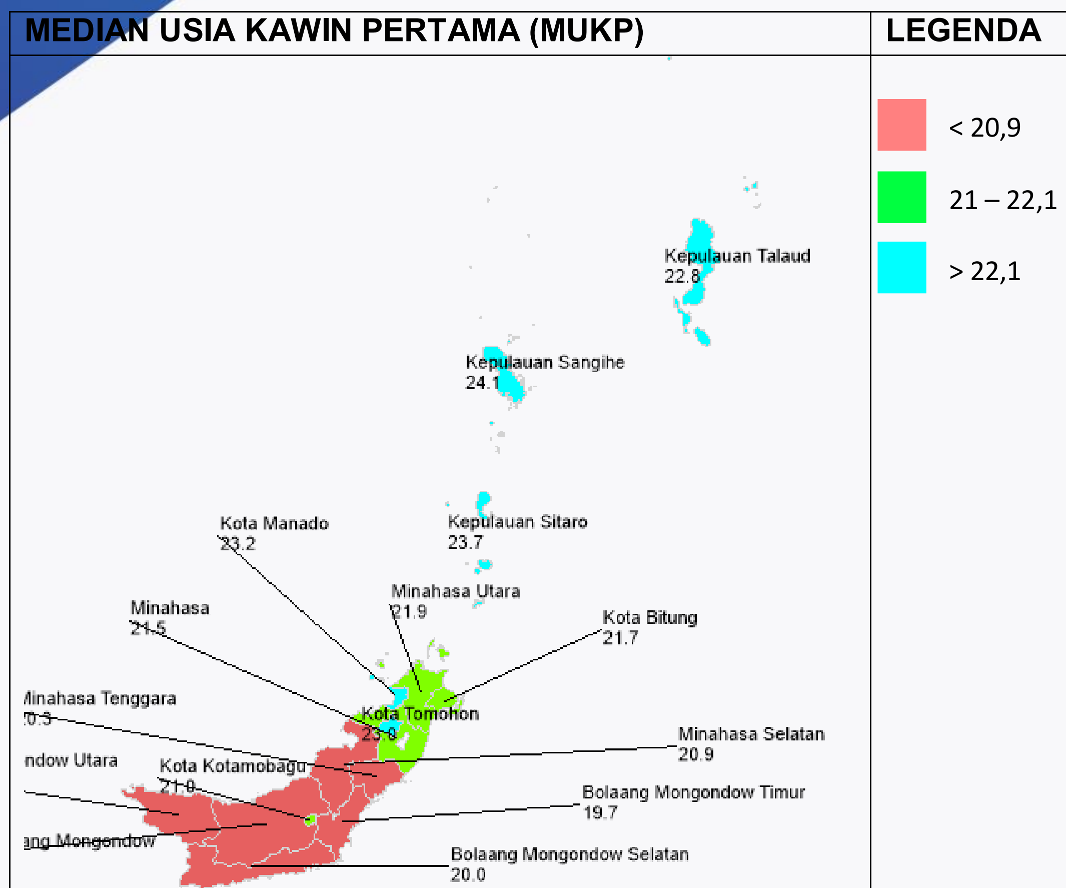
Berdasarkan Peta di atas dapat dilihat bahwa angka kelahiran total di Sulawesi Utara sudah sangat baik karena sebagian besar kabupaten/kota di Sulawesi Utara memiliki angka yang rendah yaitu di bawah 2,21. Hanya Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dan Kabupaten Minahasa Tenggara yang belum memiliki angka kelahiran yang sesuai dengan target RPJMN. Hal ini perlu menjadi perhatian untuk melakukan upaya dan langkah-langkah untuk menurunkan angka TFR di wilayahnya masing-masing bagi yang belum mencapai target. Untuk daerah yang telah mencapai target yang perlu dilakukan adalah untuk menjaga angka kelahiran di daerahnya agar tetap stabil dan tidak naik.



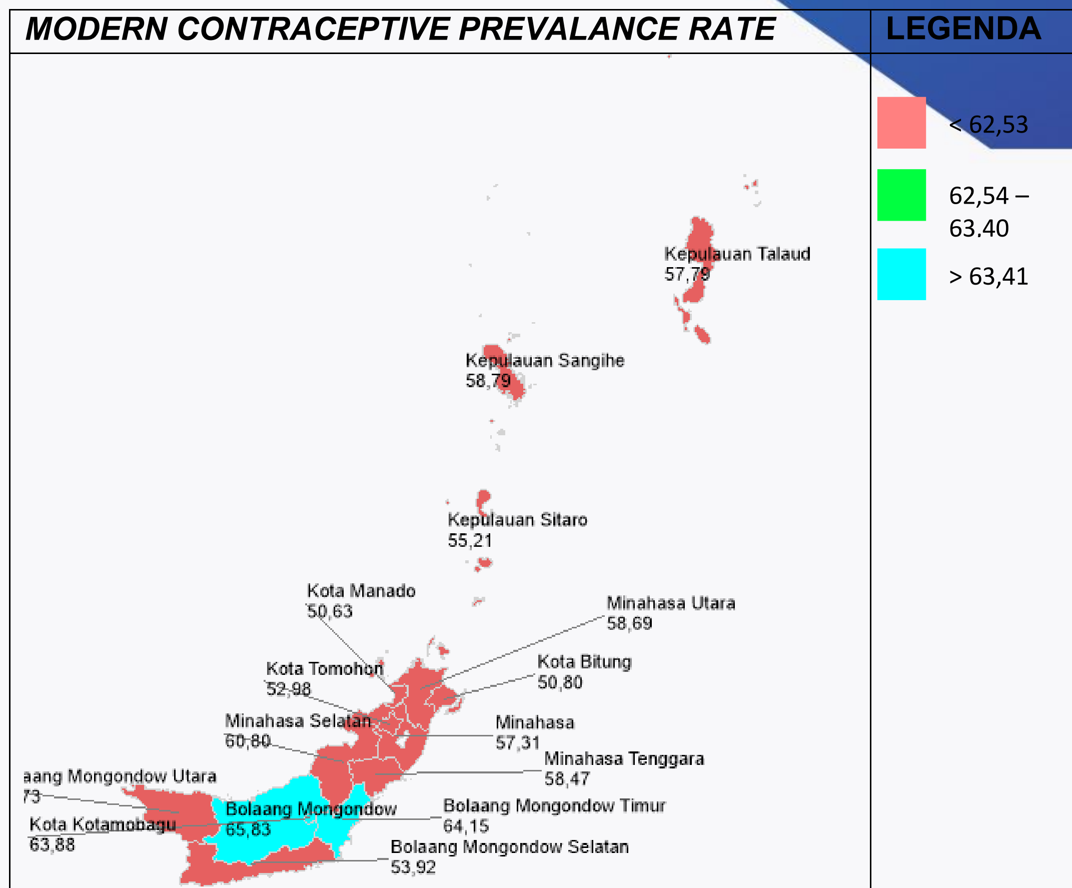
Berdasarkan peta di atas terlihat bahwa indikator ASFR 15-19 tahun tingkat kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Utara hampir semuanya masih belum mencapai target, kecuali Kota Manado. Hal tersebut perlu menjadi perhatian untuk dapat di intervensi secara efisien dan tepat sasaran agar kabupaten/kota lain yang belum mencapai target dapat mencapai target yang telah ditentukan di tahun-tahun kedepannya.



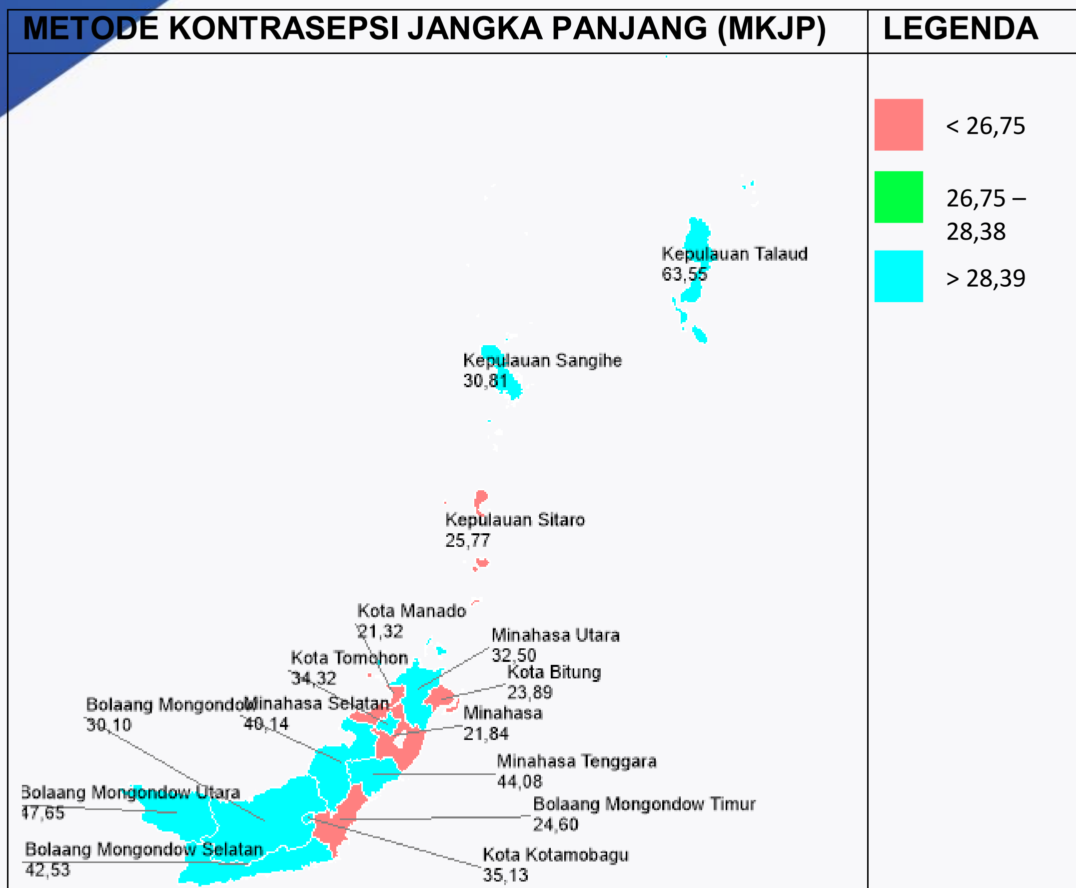
Berdasarkan peta di atas terlihat bahwa untuk indikator *unmet need* di Provinsi Sulawesi Utara perlu perhatian yang besar karena seluruh kabupaten/kota di Sulawesi Utara memiliki angka *unmet need* yang sangat tinggi yaitu di atas 8,01 persen.



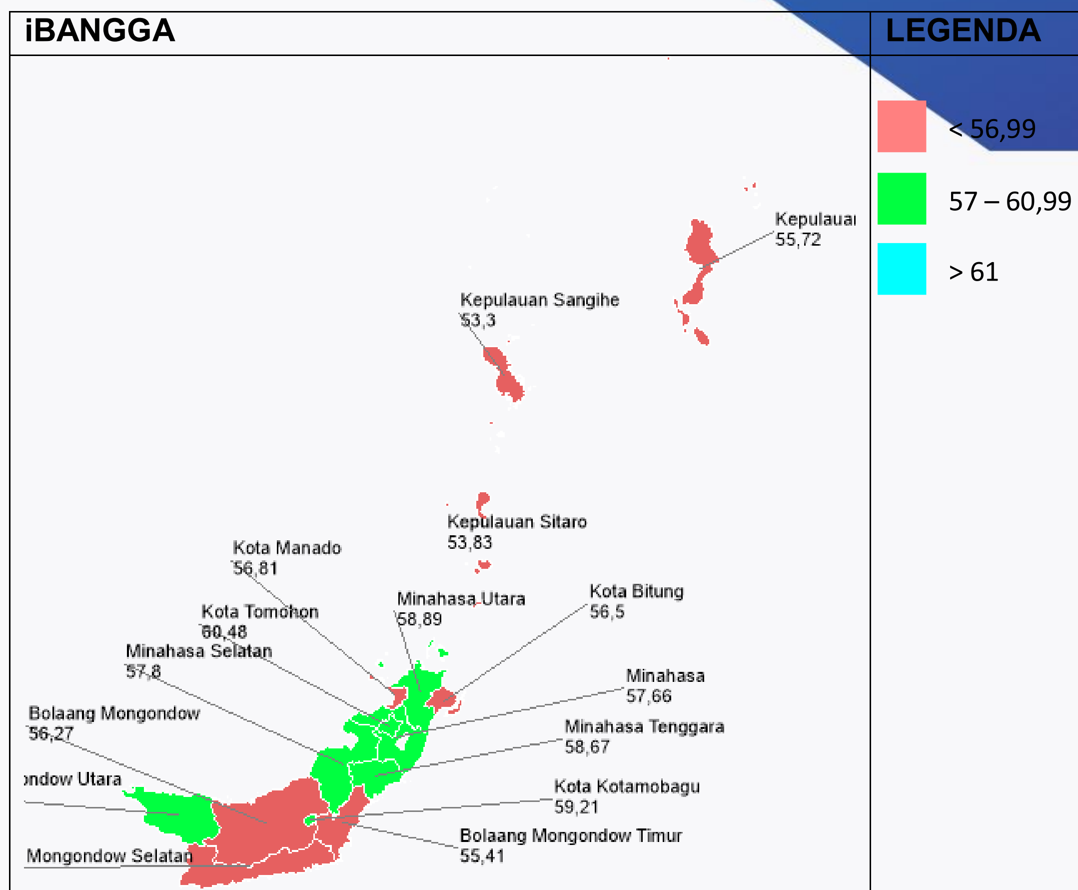
Berdasarkan peta di atas, terlihat bahwa angka Median Usia Kawin Pertama (MUKP) di Provinsi Sulawesi Utara perlu menjadi perhatian karena masih terdapat sebagian kabupaten/kota yang belum mencapai target yang telah ditetapkan untuk MUKP tahun 2022 yaitu 21 tahun ke atas. Hal ini tentu harus menjadi perhatian agar kabupaten/kota yang angka MUKP-nya belum mencapai target dapat difokuskan untuk dilakukan intervensi yang diperlukan agar dapat mencapai target MUKP tahun 2024 yaitu di atas 22,1.



Berdasarkan peta di atas terlihat bahwa untuk indikator mCPR hampir seluruh kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Utara masih sangat rendah dan belum mencapai target, hanya Kabupaten Bolaang Mongondow, Bolaang Mongondow Timur, dan Kota Kotamobagu yang sudah mencapai target. Hal ini perlu menjadi perhatian, khususnya dalam aspek advokasi dan KIE serta pelayanan kontrasepsi di Sulawesi Utara agar dapat dilaksanakan sesuai dengan kondisi dan situasi masing-masing daerah agar dapat berjalan secara terfokus dan tepat sasaran.

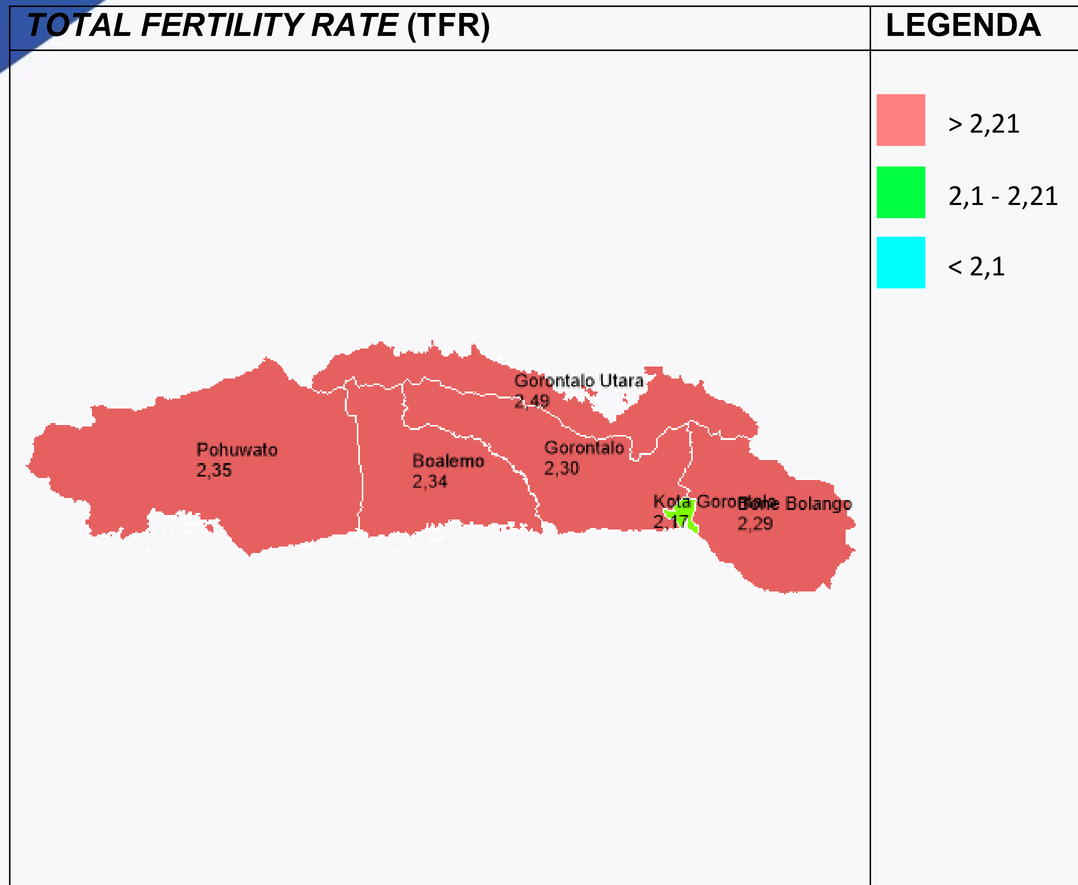


Berdasarkan peta di atas dapat dilihat bahwa masih terdapat sebagian kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Utara yang belum mencapai target MKJP tahun 2022. Hal ini perlu menjadi perhatian untuk menggencarkan kembali program-program dalam peningkatan angka MKJP di tingkat kabupaten/kota yang masih belum dapat mencapai target.

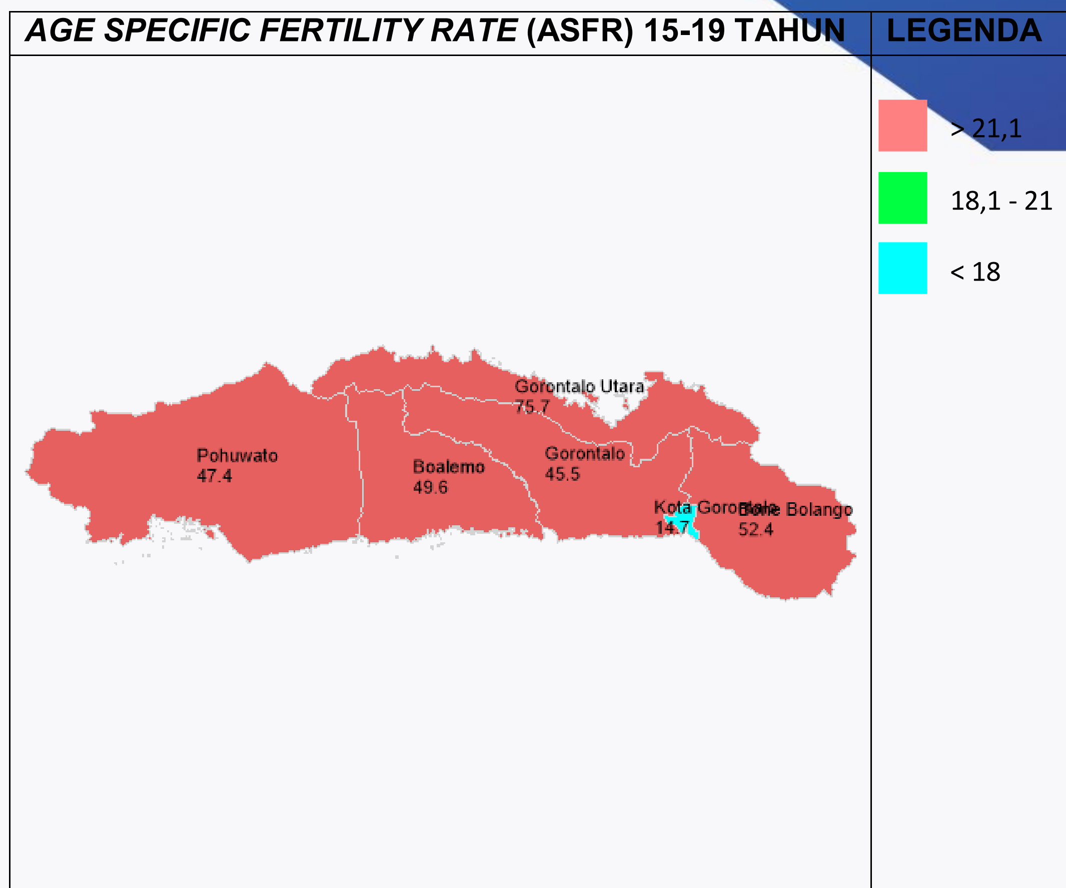


Berdasarkan peta di atas dapat dilihat bahwa secara umum angka indeks iBangga sebagian kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Utara masih belum mencapai target tahun 2022.

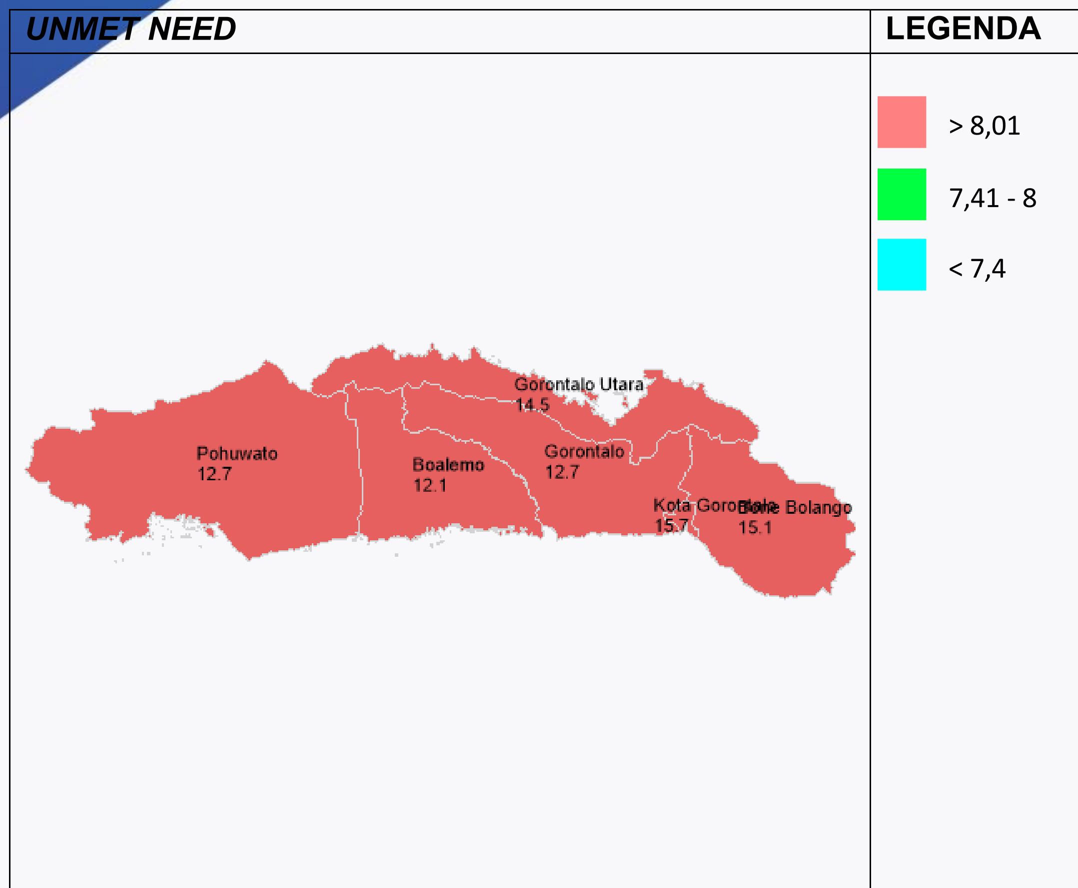
4.2.31. Peta Parameter Provinsi Gorontalo



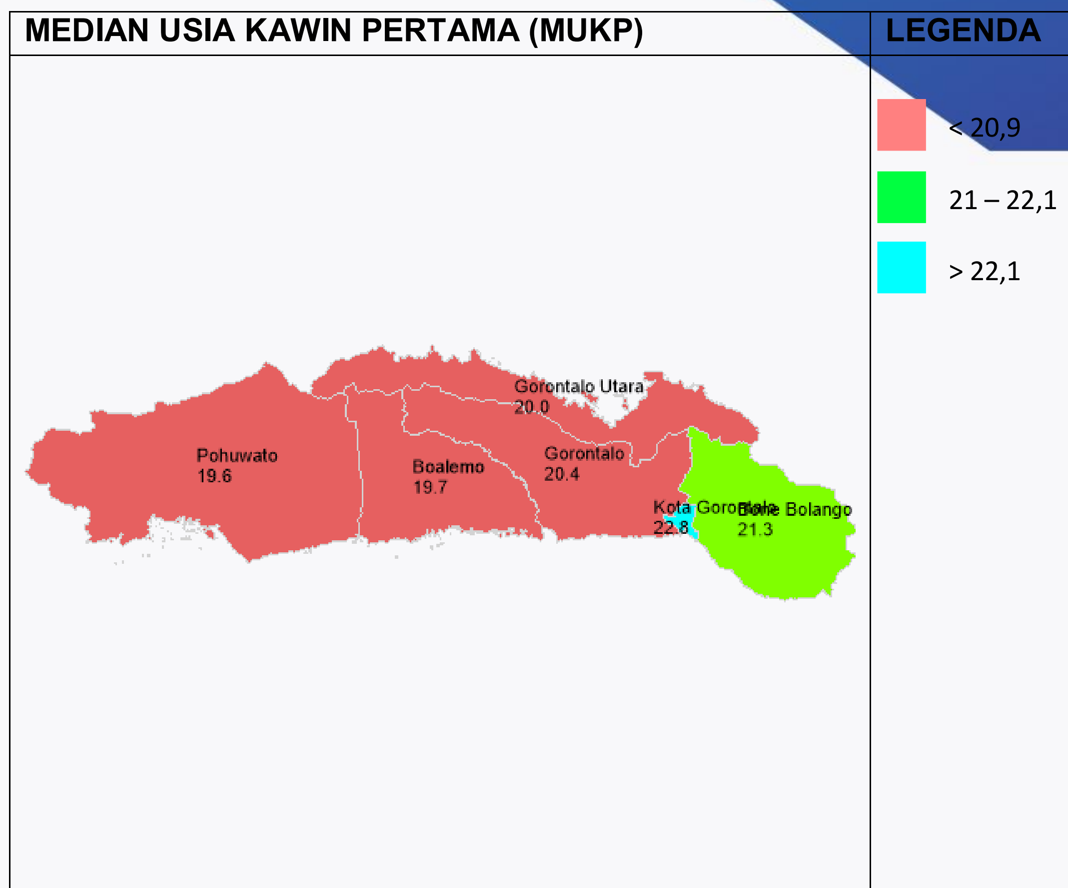
Peta TFR untuk Provinsi Gorontalo menunjukkan dominasi warna merah yang berarti sebagian besar tidak mencapai target TFR =2,21 untuk tahun 2022. Hanya Kota Gorontalo yang berwarna hijau yang artinya telah mencapai target TFR 2,21. Ini menunjukkan bahwa kabupaten/kota lain perlu untuk menghadapi tantangan dalam menurunkan TFR menuju penduduk tumbuh seimbang.



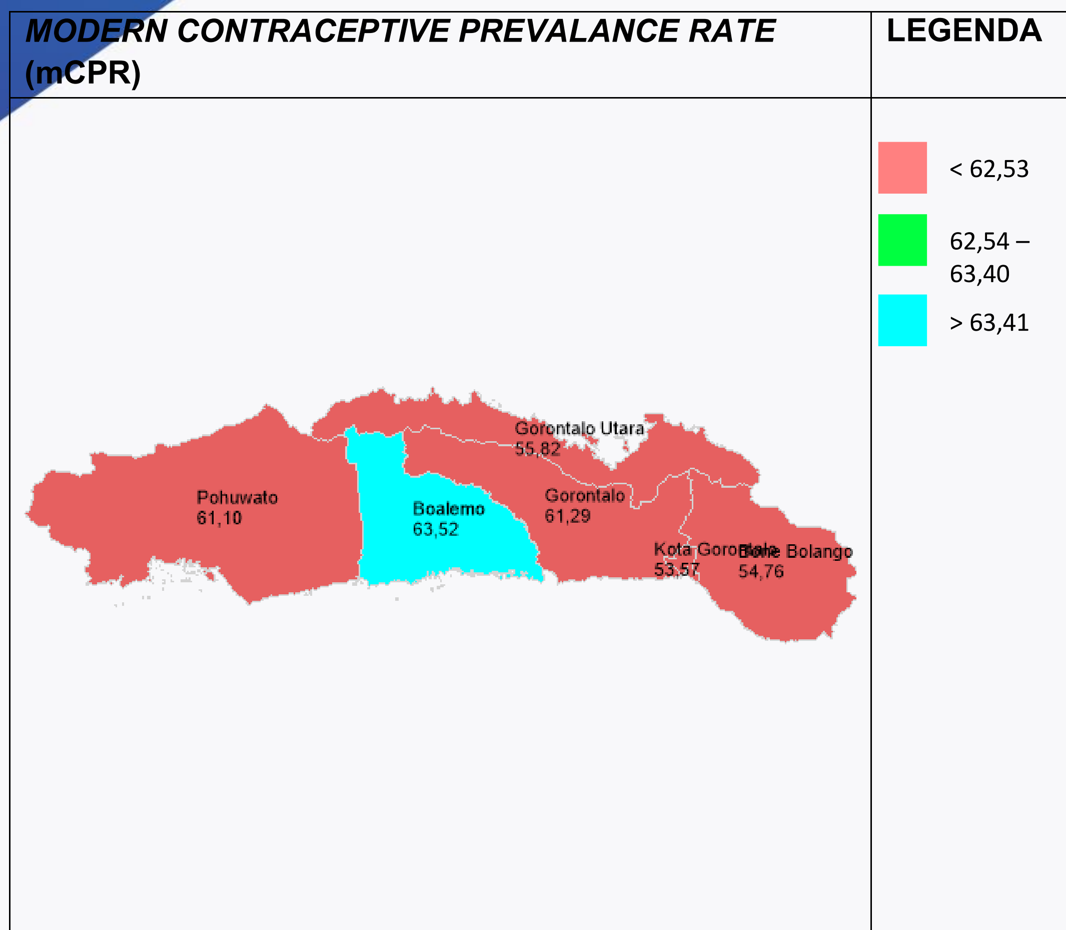
Pola ASFR 15-19 tahun untuk Provinsi Gorontalo tampak sama dengan pola TFR nya. Hanya Kota Gorontalo yang berhasil mencapai target tahun 2024, kabupaten/kota lainnya tidak mencapai target tahun 2021 yaitu ASFR 15-19 tahun = 21 sehingga berwarna merah. Kebijakan ASFR 15-19 tahun harus terus diturunkan sekecil-kecilnya dalam rangka peningkatan kualitas kesehatan reproduksi dan pencegahan kehamilan dan kelahiran pada usia 15-19 tahun.



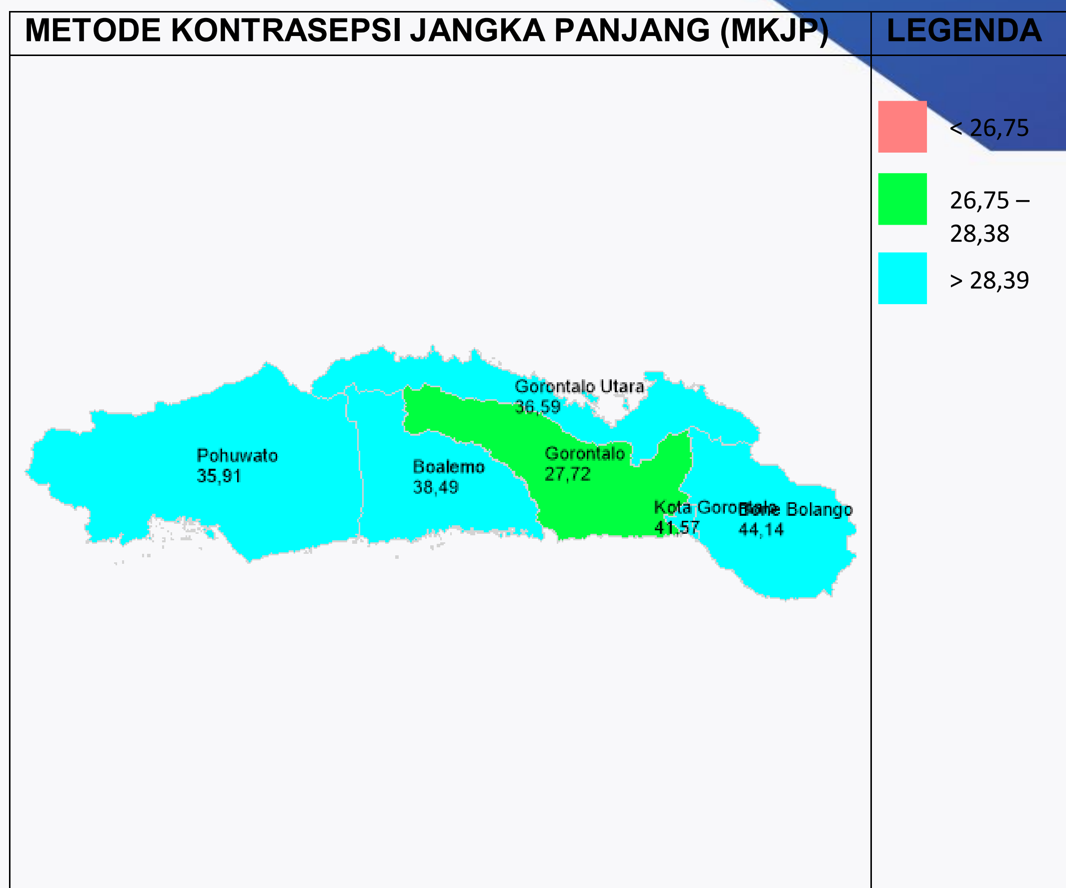
Pemetaan *unmet need* untuk Provinsi Gorontalo menunjukkan warna yang seluruhnya merah, yang artinya tidak ada satupun kabupaten/kota yang mencapai target tahun 2022 yaitu *unmet need* = 8. Pemetaan PUS dilapangan, dan penajaman sasaran *unmet need* harus dengan seksama dilaksanakan agar penurunan *unmet need* dapat secara serentak terlaksana.



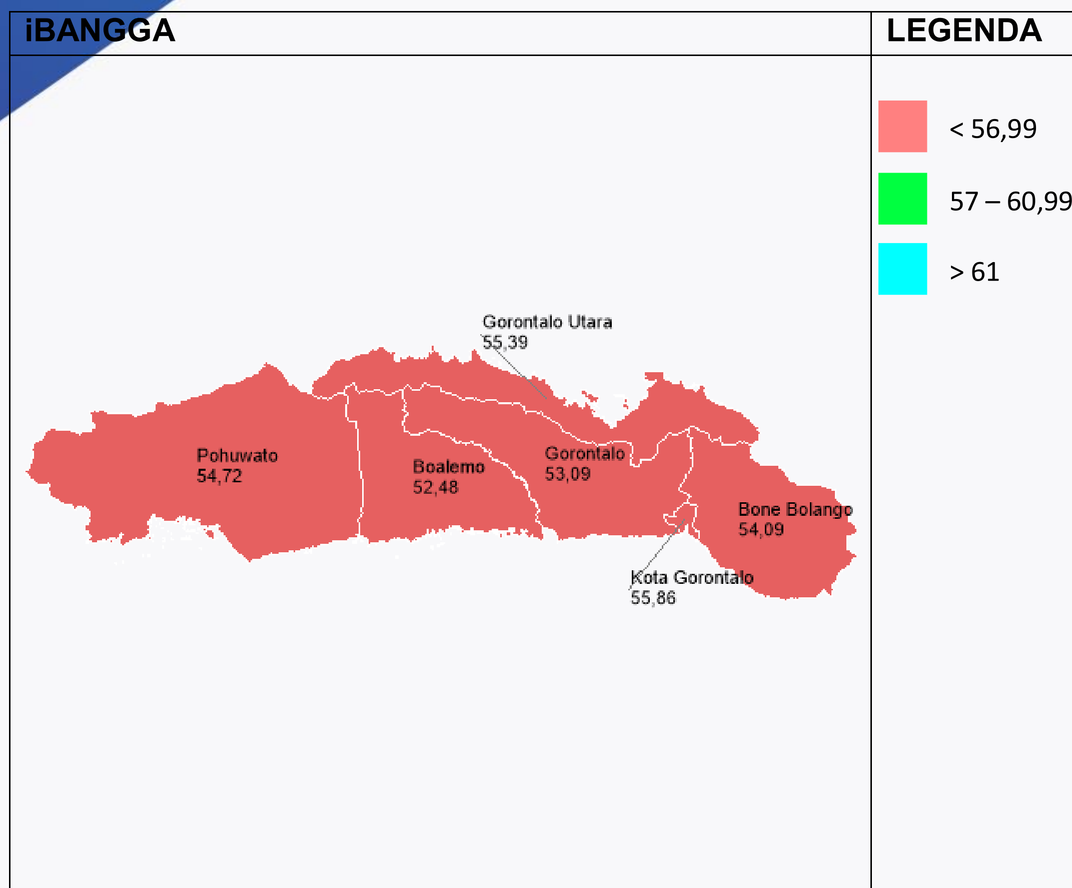
Berdasarkan peta di atas, terlihat bahwa angka Median Usia Kawin Pertama (MUKP) di Provinsi Gorontalo didominasi oleh warna merah masih dibawah 21 sehingga tidak berhasil mencapai target MUKP tahun 2022. Hanya Kota Gorontalo yang mencapai target tahun 2024 (biru) dan Kabupaten Bone Bolango yang berhasil mencapai target tahun 2022 (hijau). Fakta tersebut menunjukkan bahwa 2 kabupaten paling timur provinsi ini memiliki MUKP yang lebih baik dari pada disebelah barat. Upaya peningkatan MUKP dapat beriringan dengan Program pendewasaan usia perkawinan, PIK-RR, peningkatan pendidikan dan penyediaan lapangan kerja pada perempuan.



Berdasarkan peta di atas terlihat bahwa untuk indikator mCPR di Provinsi Gorontalo secara umum masih didominasi oleh warna merah yang artinya tidak berhasil mencapai target tahun 2022. Hanya Kabupaten Boalemo berhasil mencapai target 2024 sehingga berwarna biru. Penggunaan alat kontrasepsi modern perlu terus dipantau dan ditingkatkan dalam rangka pengendalian kelahiran dan jumlah kuantitas penduduk di Provinsi Gorontalo.

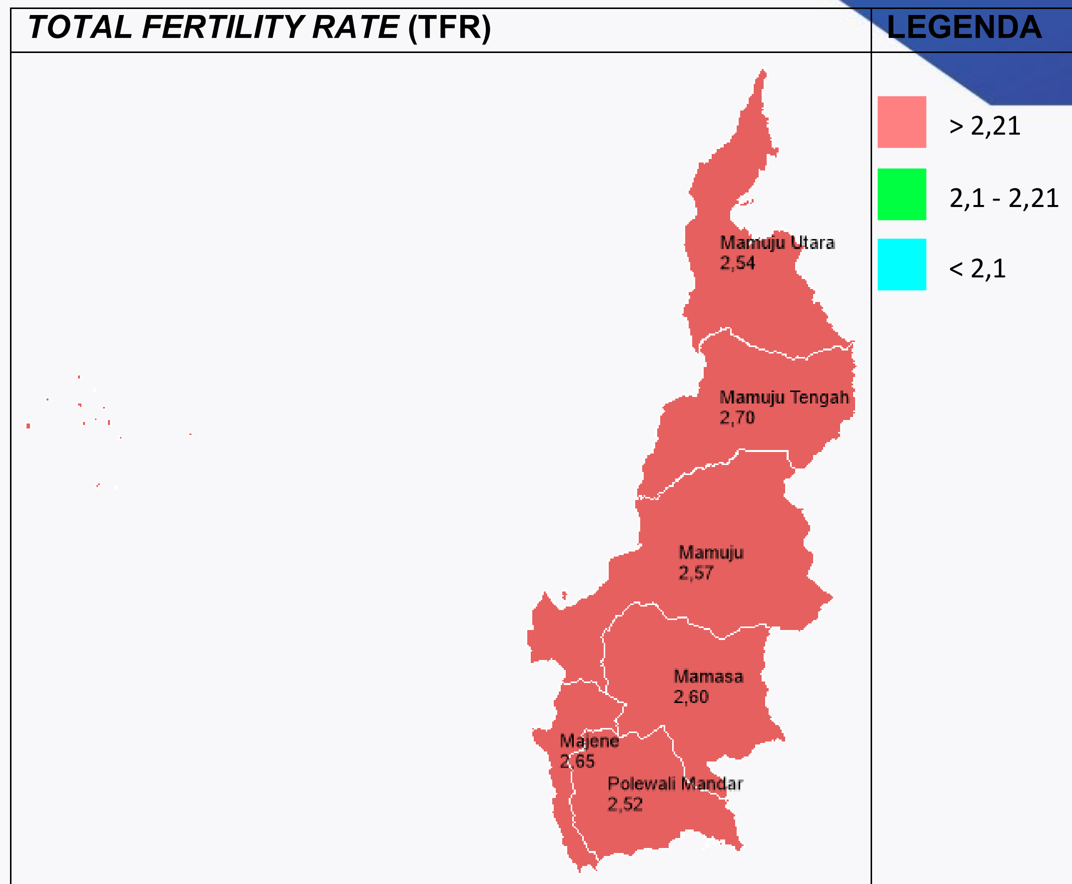


Peta MKJP di Provinsi Gorontalo menunjukkan pola yang cukup menggembirakan karena mayoritas berwarna biru yang artinya telah melampaui target tahun 2024, hanya Kabupaten Gorontalo yang berwarna hijau yang artinya telah mencapat target tahun 2022. Walaupun pada pencapaian mCPR provinsi Gorontalo banyak yang merah, namun pencapaian MKJP tampak lebih baik, ini menunjukkan bahwa proporsi penggunaan kontrasepsi jangka panjang pada provinsi ini sudah sangat baik dan harus terus dipertahankan.

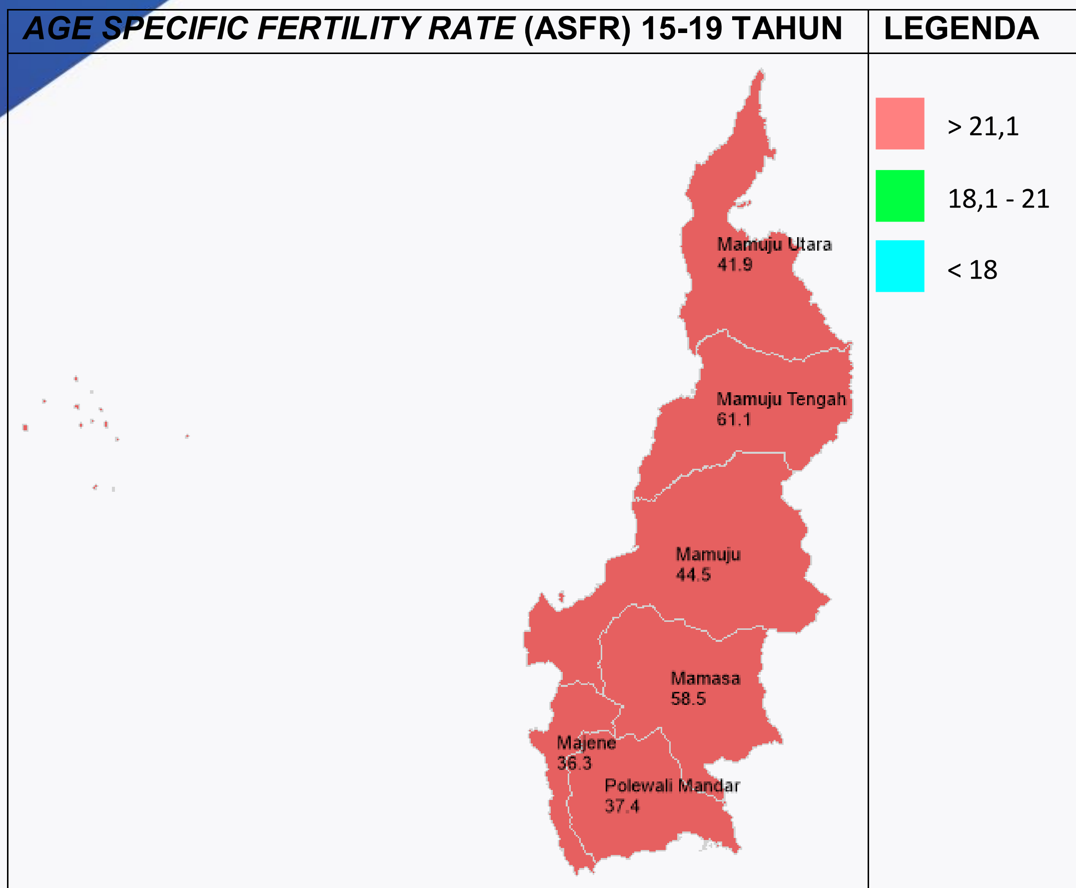


Untuk Indikator iBangga pada Provinsi Gorontalo, pemetaan kabupaten/kota menunjukkan semuanya berwarna merah yang menandakan bahwa tidak ada satupun kabupaten/kota yang berhasil mencapai target tahun 2022. Ini menunjukkan bahwa semua kabupaten/kota di Provinsi Gorontalo harus bekerja keras mencapai target yang ditetapkan pada tahun-tahun mendatang.

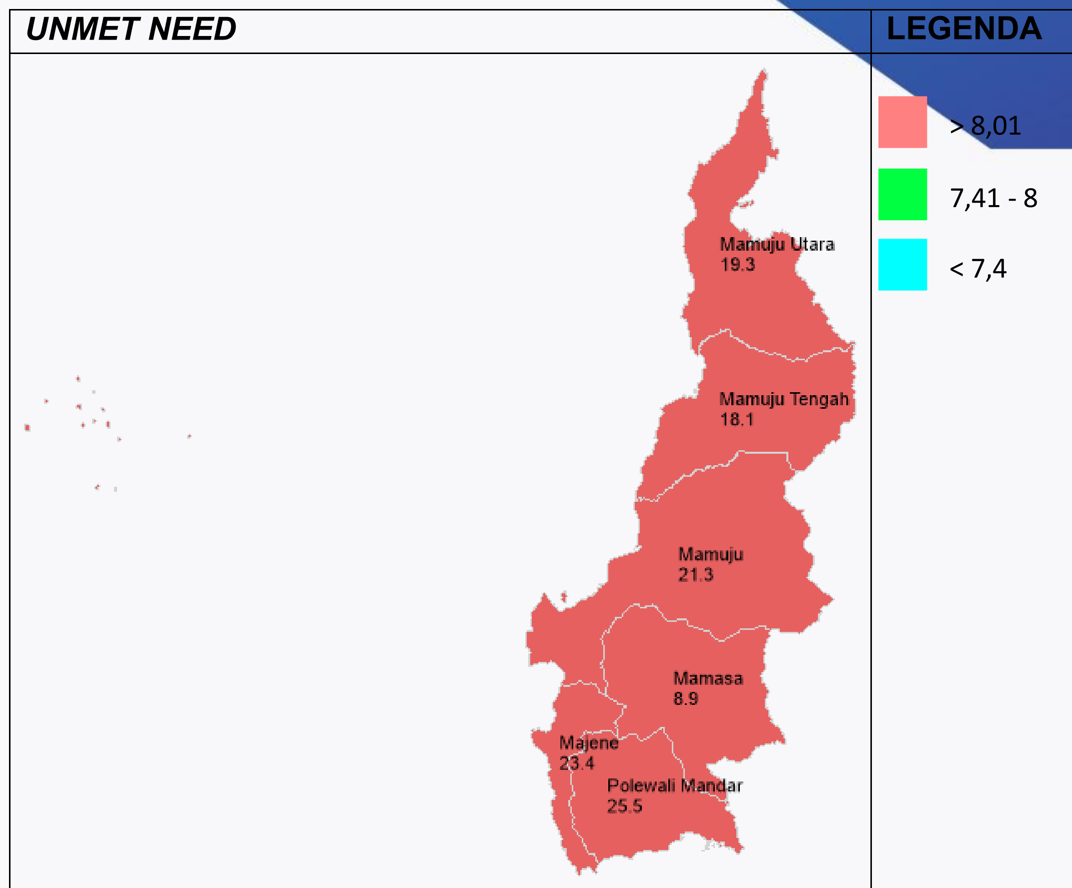
4.2.32. Peta Parameter Provinsi Sulawesi Barat



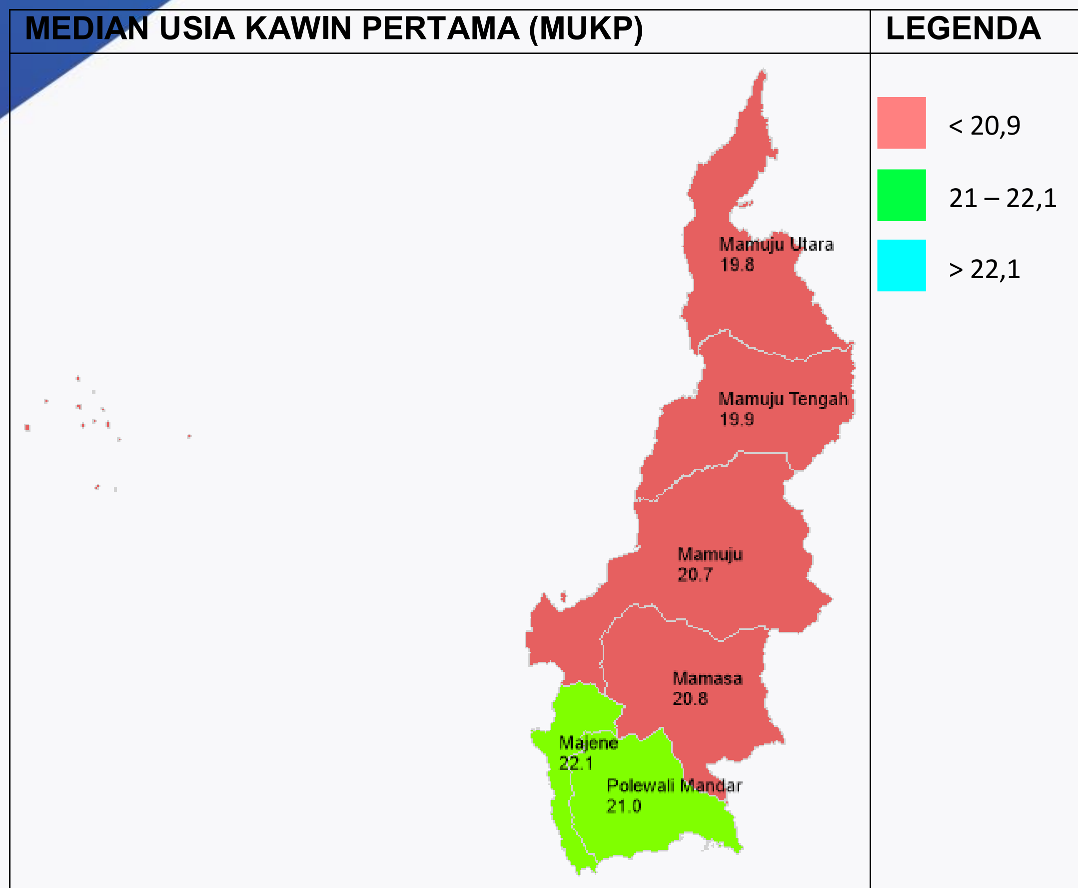
Berdasarkan Peta di atas, terlihat bahwa kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Barat masih memiliki angka TFR yang cukup tinggi dan/ belum ada memenuhi target. Dengan itu dapat disimpulkan bahwa masih diperlukan penajaman dan pemerataan program, khususnya advokasi dan KIE pada *stakeholder* dan penduduk di Riau dalam rangka penurunan angka fertilitas.



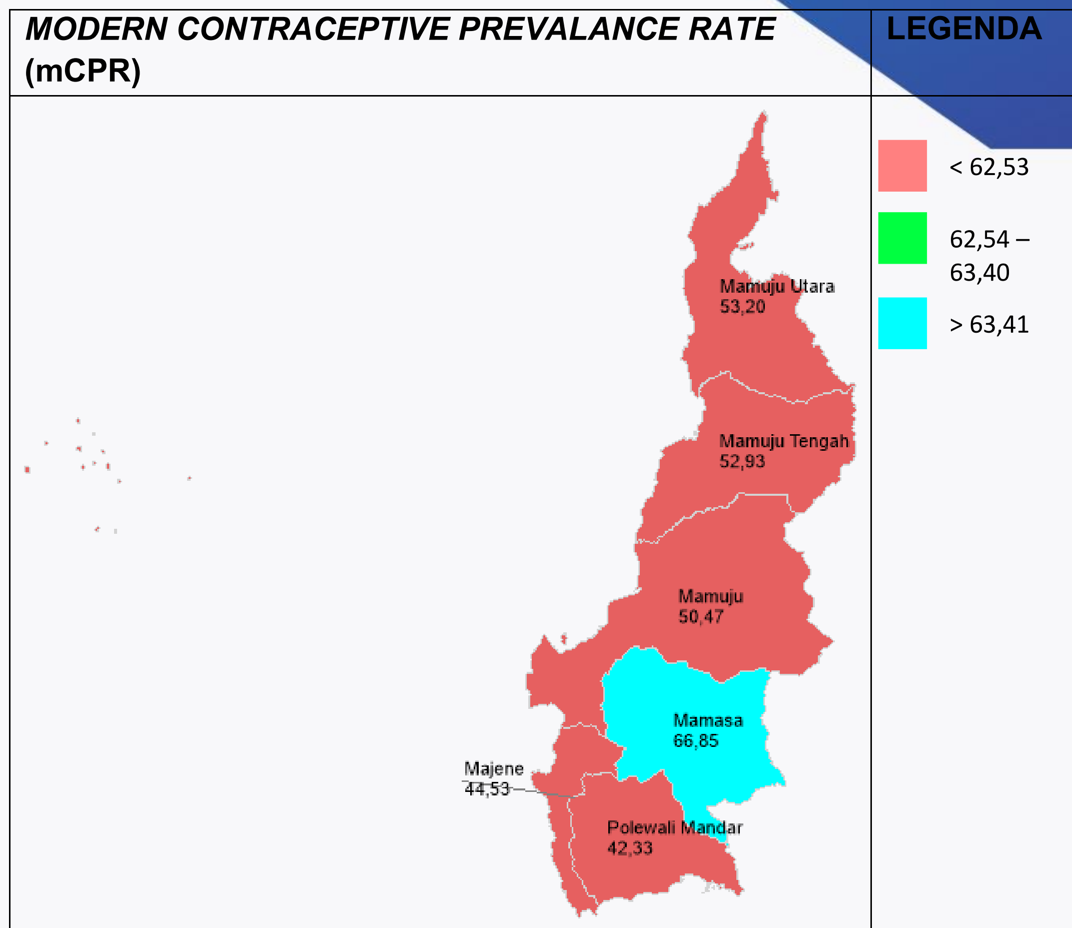
Dari peta diatas, terlihat bahwa seluruh kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Barat masih memiliki angka ASFR 15-19 Tahun yang tinggi dan belum ada yang mencapai target. Hal tersebut menandakan perlunya dilaksanakan pelaksanaan program Bangga Kencana di Sulawesi Barat yang menyeluruh dan tepat sasaran karena fertilitas pada usia yang belum cukup dewasa dapat mengakibatkan berbagai dampak buruk dimana salah satunya adalah meningkatnya resiko kematian ibu dan bayi serta stunting.



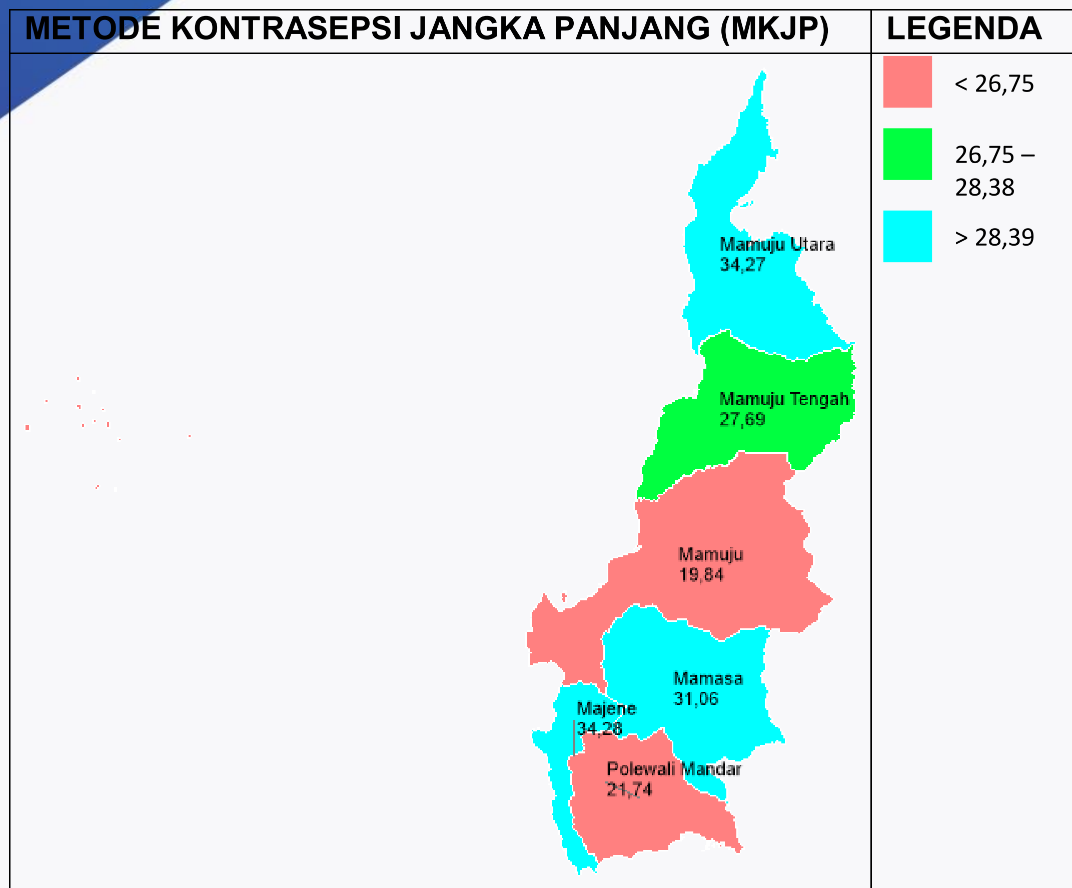
Berdasarkan peta di atas, terlihat bahwa diperlukan intervensi program bagi pemenuhan kebutuhan ber-KB para pasangan usia subur di Sulawesi Barat karena belum ada kabupaten/kota di Sulawesi Barat yang telah mencapai target *unmet need.* Oleh sebab itu, perlu dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program KB yang lebih dalam dan terfokus karena unmet need dapat mengakibatkan berbagai dampak buruk termasuk kehamilan yang tidak diinginkan yang berpotensi besar terhadap kehamilan beresiko, dan juga kematian ibu dan bayi serta stunting.



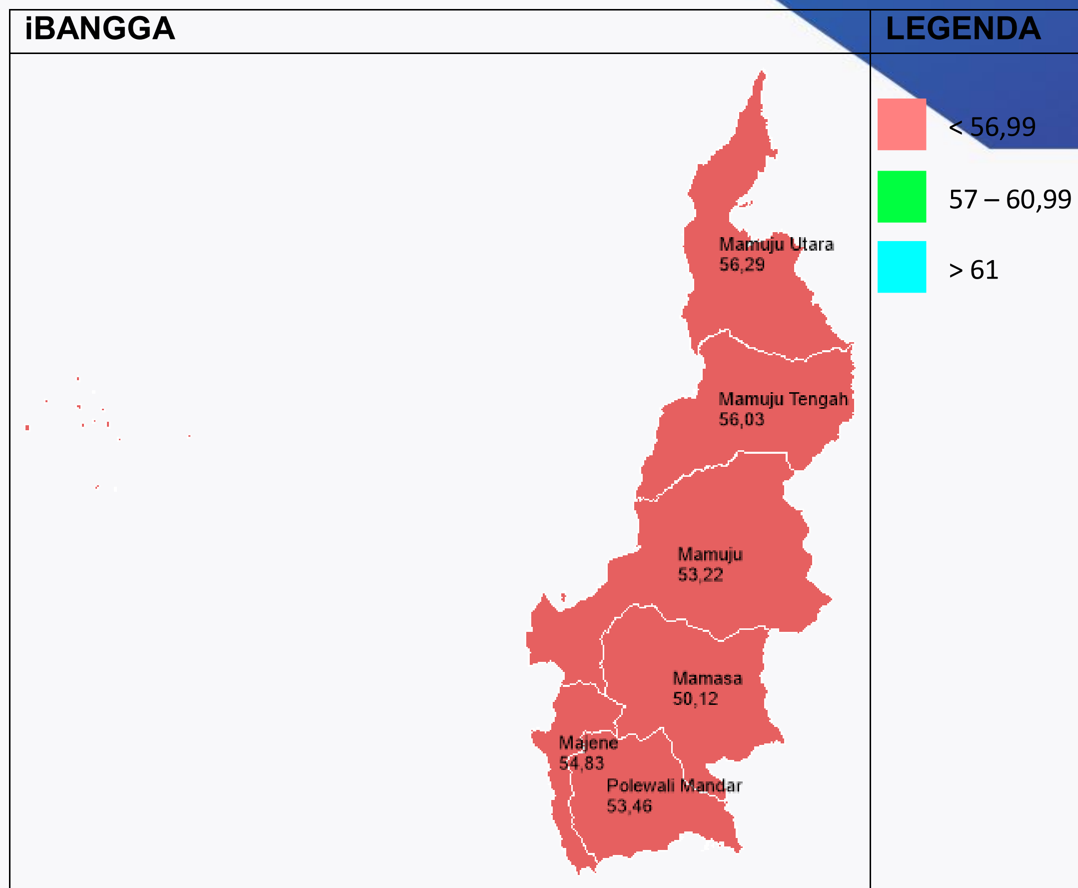
Berdasarkan peta di atas, terlihat bahwa diperlukan intervensi program bagi pendewasaan usia perkawinan penduduk di Sulawesi Barat karena seluruh kabupaten/kota di Sulawesi Barat masih belum mencapai target MUKP, kecuali Majene dan Polewali Mandar. Hal tersebut perlu diintervensi mengingat pendewasaan usia perkawinan berdampak baik dalam menekan resiko perceraian dan juga kehamilan beresiko yang dapat mengakibatkan terganggunya kesehatan janin, kematian ibu dan bayi, serta stunting pada anak.



Berdasarkan peta di atas terlihat bahwa indikator mCPR sebagian besar kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Barat masih sangat rendah dan baru ada satu kabupaten/kota yang mencapai target yakni Mamasa. Hal ini perlu menjadi perhatian, karena dapat menjadi hambatan dalam pencapaian target program Bangga Kencana lainnya.

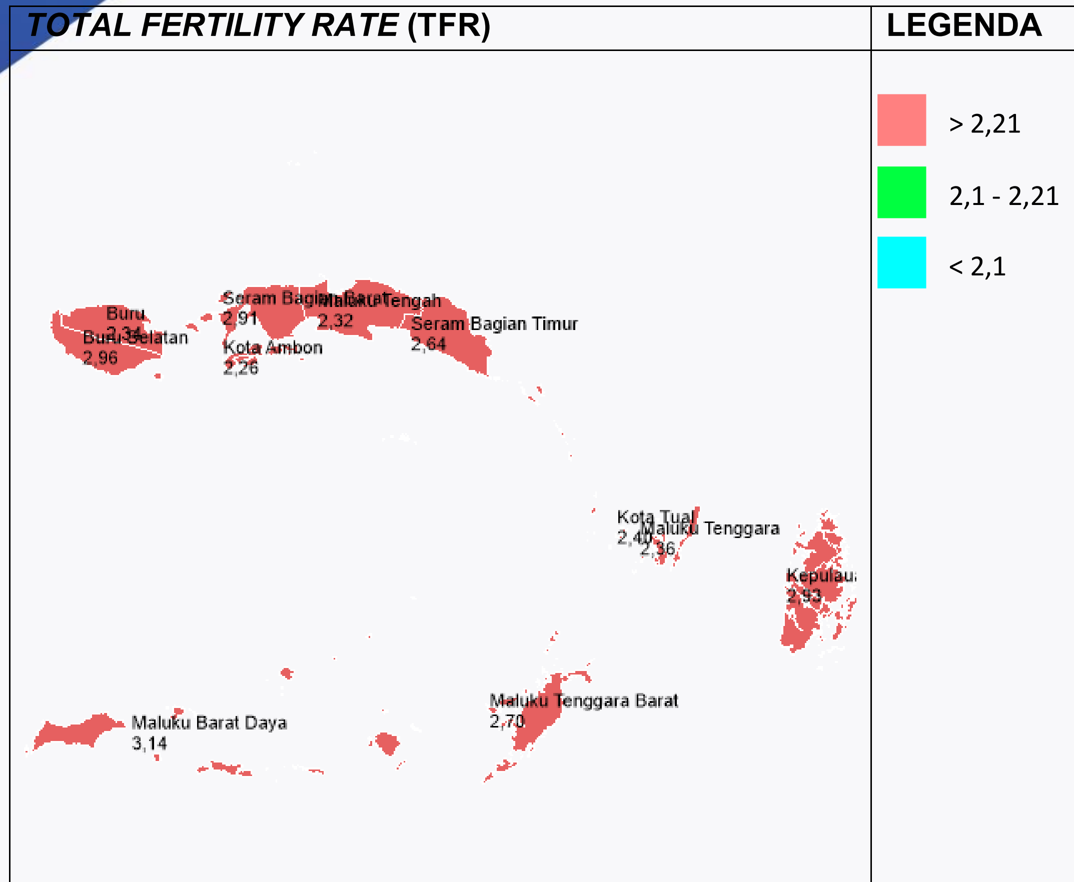


Berdasarkan peta di atas dapat dilihat bahwa capaian indikator MKJP di Sulawesi Barat sudah cukup baik karena tersisa dua kabupaten/kota saja yang belum didapati mencapai target MKJP yakni Mamuju dan Polewali Mandar. Oleh sebab itu diperlukan intervensi program khususnya terkait advokasi dan KIE penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang khususnya bagi PUS yang terfokus di kedua kabupaten/kota tersebut yang ingin menunda jarak kehamilan dan/ tidak menginginkan kehamilan lagi.

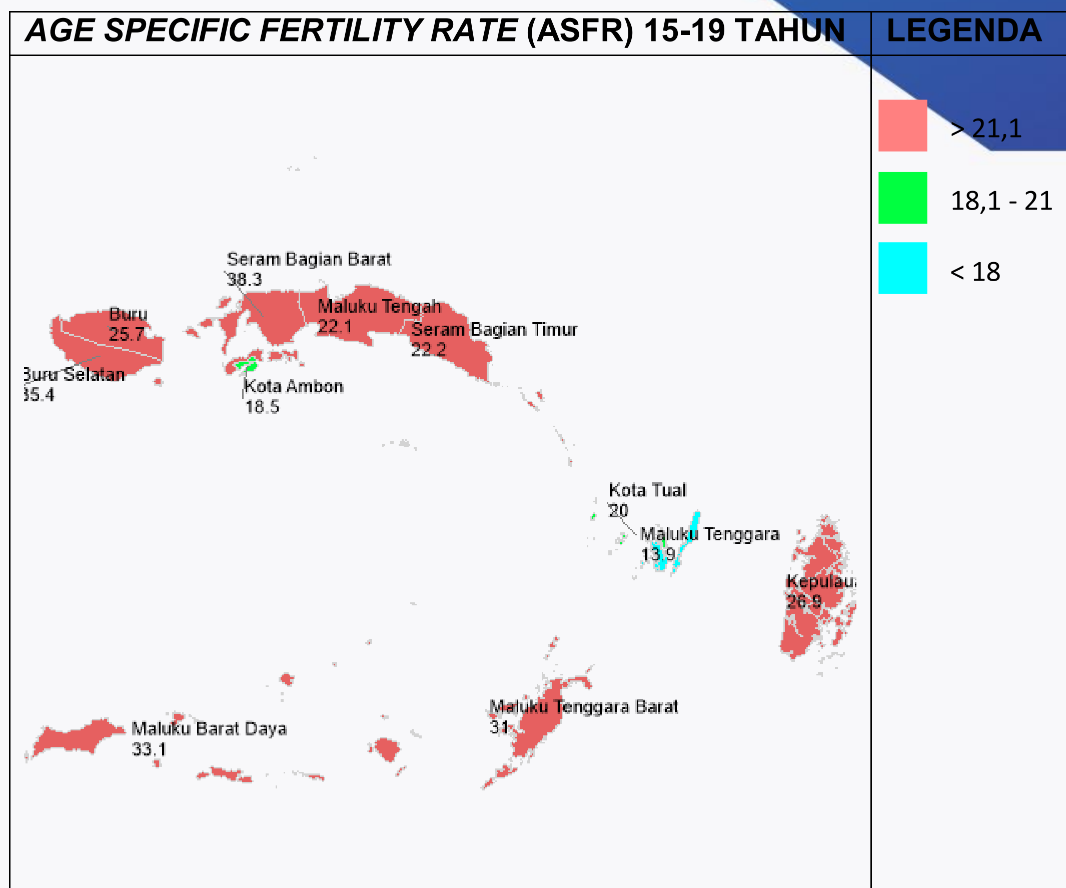


Berdasarkan peta di atas dapat dilihat bahwa seluruh kabupaten/kota di Sulawesi Barat memiliki angka iBangga yang rendah dan belum ada yang mencapai target. Hal tersebut perlu menjadi perhatian khusus karena kualitas dari pembangunan Keluarga sangatlah penting dan mendasari kualitas keluarga sebagai unit terkecil di lingkup masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan

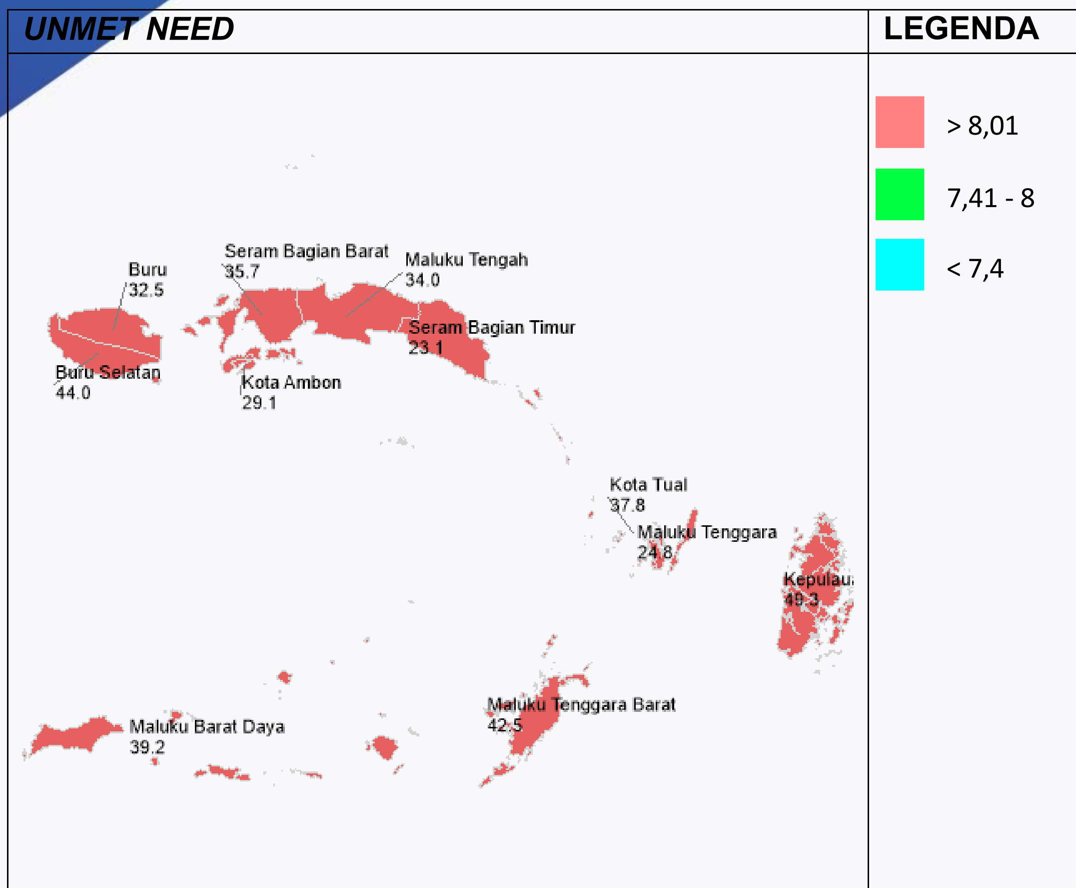
4.2.33. Peta Parameter Provinsi Maluku



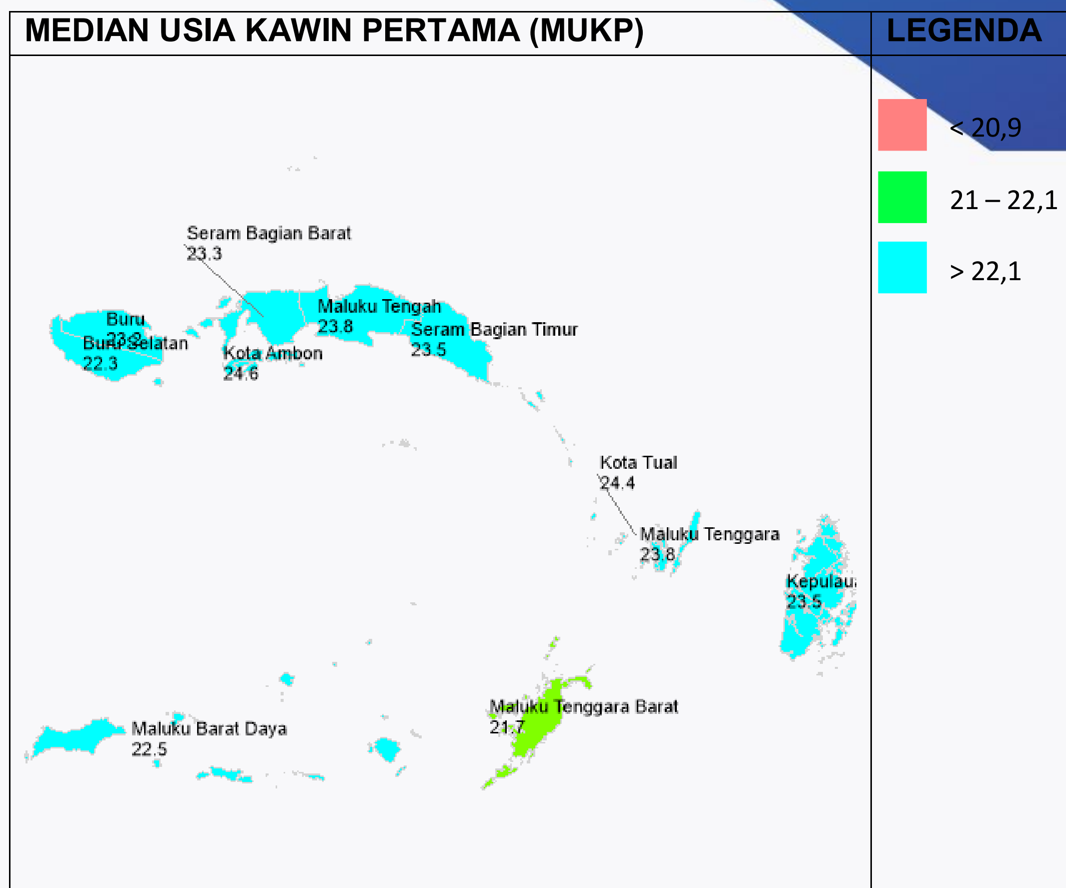
Berdasarkan Peta di atas dapat dilihat bahwa angka kelahiran total di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Maluku berwarna merah artinya seluruh kabupaten/kota di Provinsi Maluku memiliki angka *Total Fertility Rate* (TFR) yang masih tinggi yaitu diatas 2,21, sehingga belum ada kabupaten/kota yang bisa mencapai target TFR tahun 2022 yaitu berada pada angka 2,1-2,21. Angka TFR yang palig tinggi terjadi di Kabupaten Maluku Barat Daya yaitu sebesar 3,14. Hal ini perlu menjadi perhatian bagi para pengambil kebijakan di semua kabupaten/kota di provinsi Maluku untuk melakukan upaya dan langkah-langkah agar dapat menurunkan angka TFR di wilayahnya masing-masing.



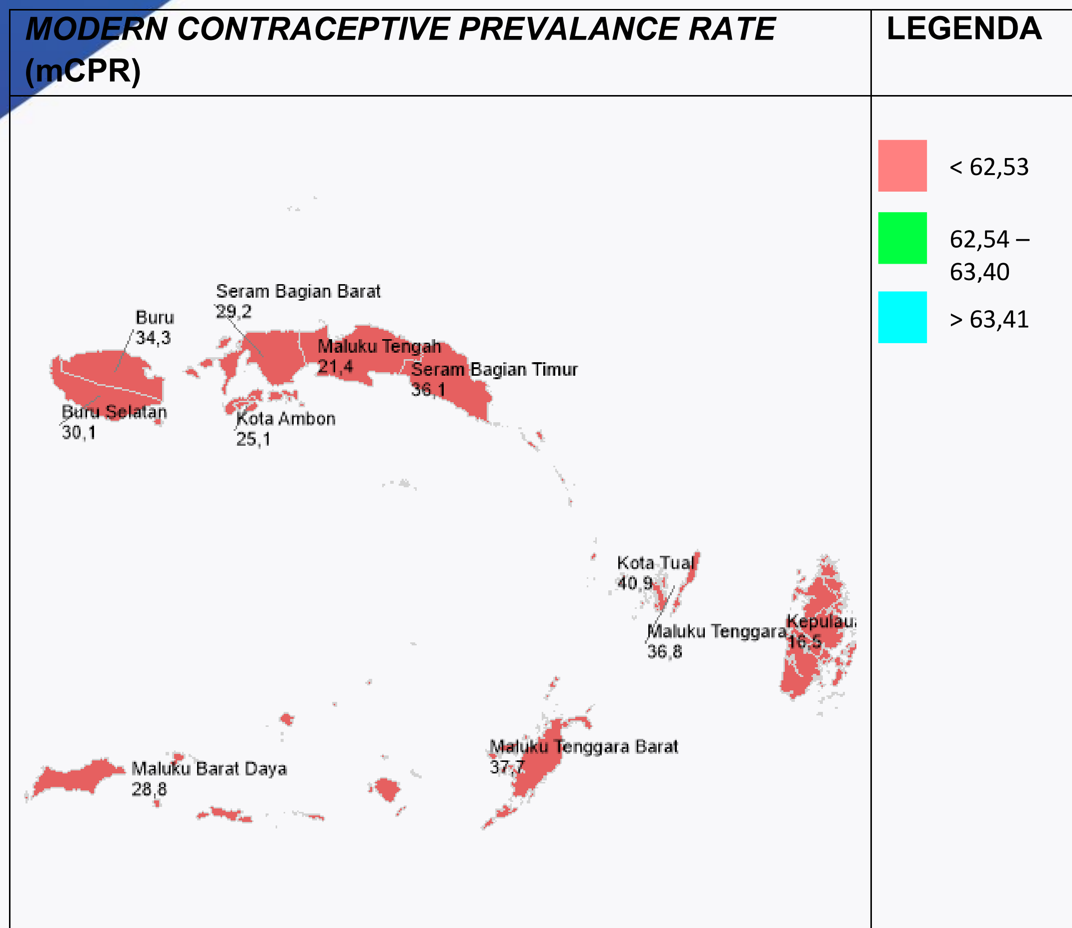
Berdasarkan peta di atas terlihat bahwa sebagian besar wilayah kabupaten/kota di Provinsi Maluku memiliki angka ASFR 15-19 tahun yang tinggi yaitu lebih dari 21,1 kelahiran per 1000 penduduk perempuan usia 15-19 tahun. Untuk wilayah kabupaten, hanya ada 1 kabupaten yang memiliki angka ASFR 15-19 tahun yang sudah rendah bahkah sudah mencapai target ASFR 15-19 tahun pada tahun 2024 yaitu di bawah 18 kelahiran kabupaten tersebut adalah Kabupaten Maluku Tenggara, angka ASFR 15-19 tahun sebesar 13,9 kelahiran. Sedangkan untuk wilayah kota semuanya sudah rendah dan mencapai target ASFR tahun 2022 berada pada 18,1-21. Angka ASFR 15-19 pada wilayah kota tersebut yaitu Kota Ambon sebesar 18,5 kelahiran dan Kota Tual sebesar 20 kelahiran. Kondisi ASFR 15-19 tahun yang tinggi di sebagian besar wilayah kabupaten/kota di Provinsi Maluku ini perlu menjadi perhatian yaitu adanya peningkatan upaya untuk pencegahan pernikahan dini dan kelahiran pada remaja.



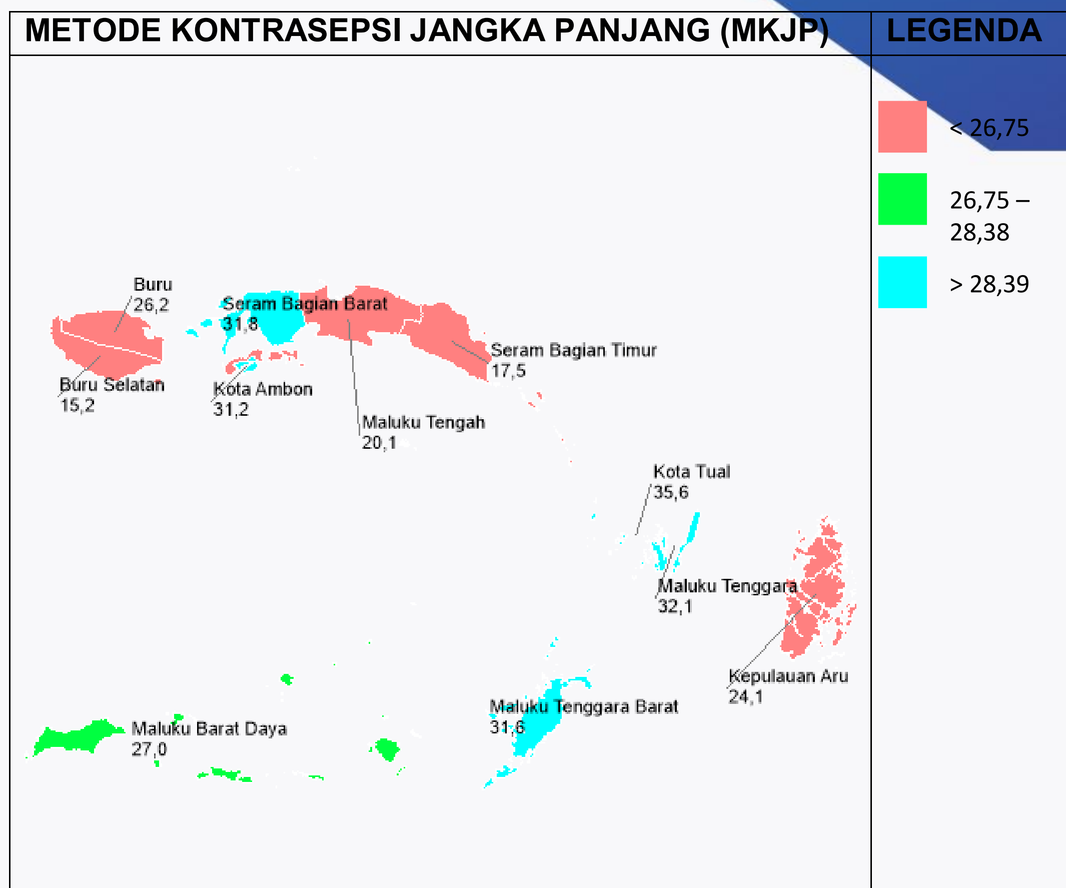
Berdasarkan peta di atas terlihat bahwa untuk indikator *unmet need* di Provinsi Maluku perlu perhatian yang besar karena seluruh kabupaten/kota baik wilayah kabupaten maupun wilayah Kota di Maluku memiliki angka *unmet need* yang tinggi yaitu di atas 8,01 persen, bahkan untuk beberapa kabupaten mencapai angka lebih dari 40 persen, angka *unmet need* pada wilayah tersebut tersebut yaitu Kabupaten Maluku Tenggara Barat sebesar 42,5 persen, Kabupaten Buru Selatan sebesar 44 persen dan Kabupaten Kepulauan Aru sebesar 49,3 persen, sehingga kondisi unmet need seperti ini perlu menjadi perhatian bagi para pengambil kebijakan di kabupaten/kota di Maluku tersebut yaitu dari segi penyediaan alokon, dan juga pelayanan keluarga berencana yang berkualitas yang dapat diakses oleh yang semua masyarakat yang membutuhkan di wilayahnya masing-masing di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Maluku.



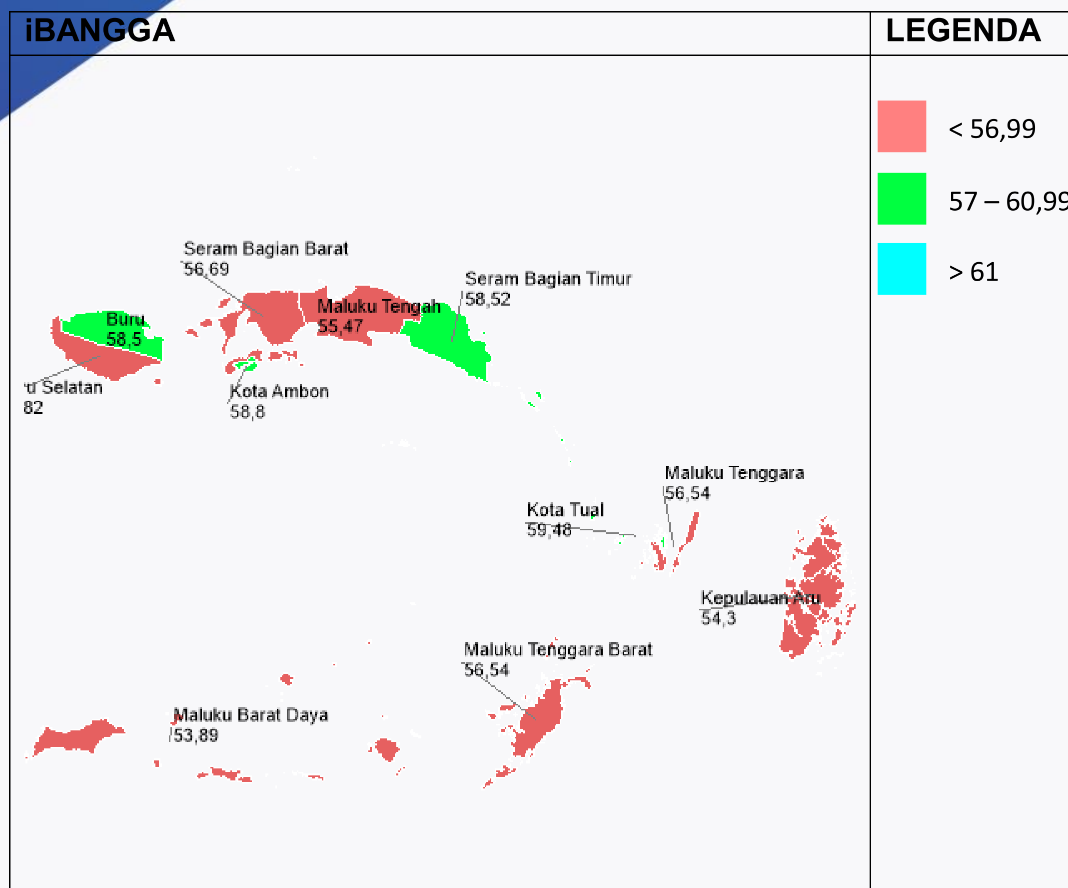
Berdasarkan peta di atas, terlihat bahwa angka Median Usia Kawin Pertama (MUKP) di Kepulauan Riau merupakan indikator yang lebih baik dibanding indikator lainnya, karena hampir semua kabupaten/kota mempunyai angka yang sudah cukup tinggi dan sudah mencapai target MUKP tahun 2022 yaitu 21 tahun ke atas, bahkan hampir semua wilayah sudah mencapai target MUKP tahun 2024 yaitu di atas 22,1 tahun. Kabupaten yang berada pada angka 21 – 22,1 yaitu Kabupaten Maluku Tenggara Barat angka MUKP-nya sebesar 21,7 tahun. Dengan kondisi angka MUKP yang sudah cukup tinggi menunjukan kesadaran terhadap pentingnya pendewasaan usia kawin sudah cukup tinggi, sehingga agar dapat dipertahankan.



Berdasarkan peta di atas terlihat bahwa untuk indikator mCPR di Provinsi Maluku masih rendah yaitu seluruh kabupaten/kota memiliki angka mCPR di bawah 62,53 persen, angka mCPR yang paling kecil terjadi di Kabupaten Maluku Tengah sebesar 21,4 persen dan Kota Ambon sebesar 25,1 persen. Hal ini perlu menjadi perhatian yang cukup besar bagi pengambil kebijakan di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Maluku untuk dapat meningkatkan edukasi dan kampanye program Bangga Kencana kepada seluruh masyarakat dan meningkatkan akses pelayanan Keluarga Berencana khususnya sosialisasi penggunaan metode kontrasepsi modern agar dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dan memenuhi kebutuhan PUS untuk ber-KB.

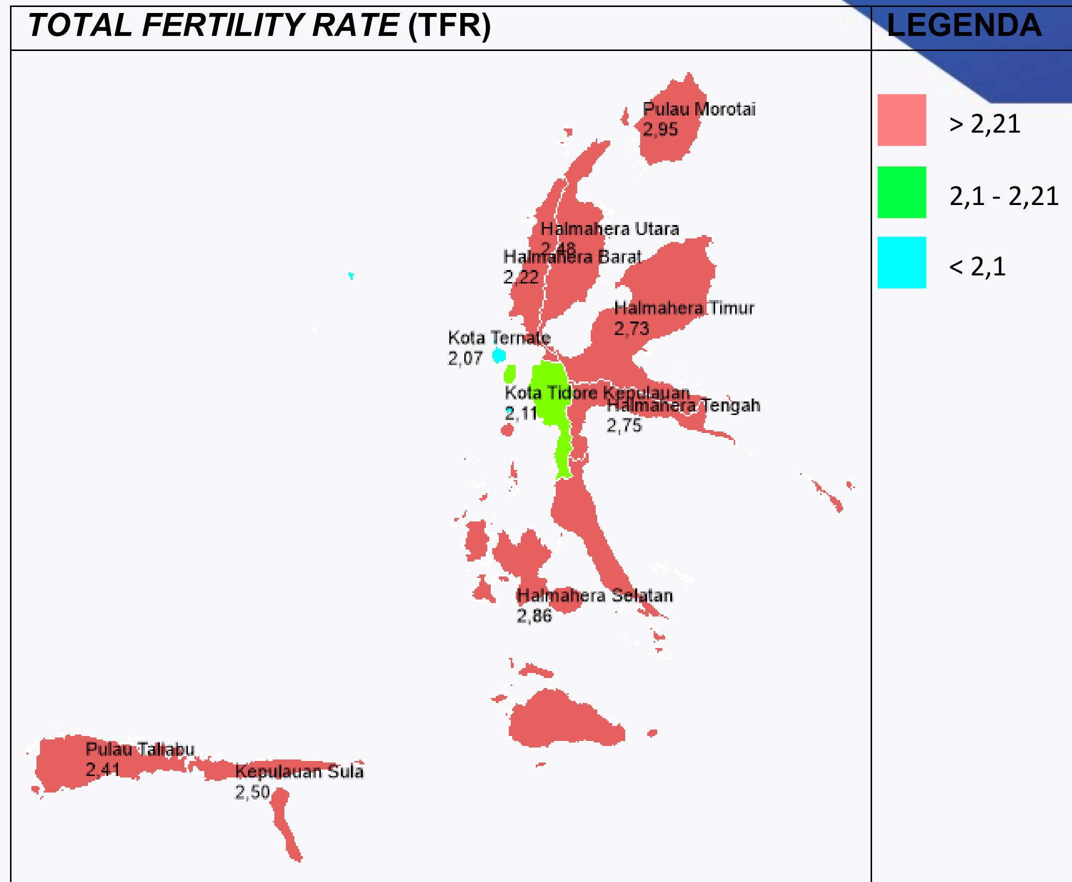


Berdasarkan peta di atas dapat dilihat bahwa sebagian besar wilayah kabupaten/kota di Provinsi Maluku, angka MKJP-nya sudah memenuhi target MKJP tahun 2022 yaitu 26,75 – 28,38, kabupaten yang memenuhi target MKJP tahun 2022 tersebut yaitu kabupaten Maluku Barat Daya sebesar 27,0 persen. Disamping itu ada 5 kabupaten/kota yang sudah tinggi bahkan sudah memenuhi target MKJP tahun 2024 yaitu di atas 28, 39 persen. Kabupaten/kota tersebut yaitu Kota Ambon, Kota Tual, Kabupaten Maluku Tenggara, Kabupaten Maluku Tenggara Barat dan Kabupaten Seram Bagian Barat. Tetapi masih ada 5 kabupaten masih yang rendah di bawah target MKJP tahun 2022 yaitu di bawah angka 26,75 persen, sehingga untuk 5 wilayah kabupaten tersebut perlu ada upaya dan langkah-langkah dalam rangka peningkatan angka MKJP di kabupaten masing-masing.

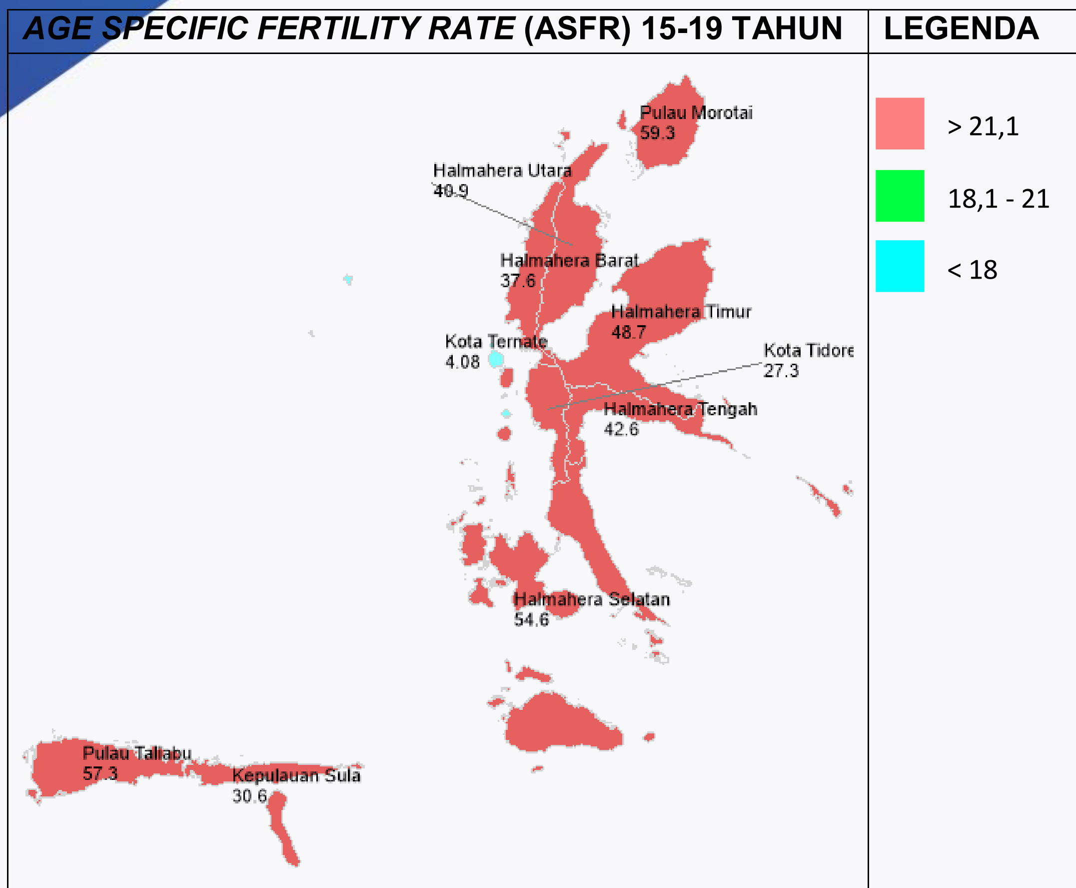


Berdasarkan peta di atas dapat dilihat bahwa secara umum angka indeks iBangga di Provinsi Maluku masih rendah, karena iBangga di 7 wilayah kabupaten/kota dari 11 kabupaten/kota yang ada di Provinsi Maluku berada di bawah 56,99. Ada 4 kabupaten/kota yang sudah memenuhi target iBangga tahun 2022 yaitu berada pada angka 57 - 60,99 persen. Angka iBangga untuk kabupaten/kota yang tersebut yaitu: Kota Ambon sebesar 58,8, Kota Tual sebesar 59,48, Kabupaten Buru sebesar 58,5, Kabupaten Seram Bagian Timur sebesar 58,52. Kondisi capaian iBangga di Provinsi Maluku ini mengindikasikan bahwa peran, fungsi, dan kualitas keluarga yang ditunjukkan melalui dimensi ketenteraman, kemandirian, dan kebahagiaan keluarga masih belum maksimal, sehingga dibutuhkan kolaborasi berbagai sektor pembangunan terkait di wilayah masing-masing.

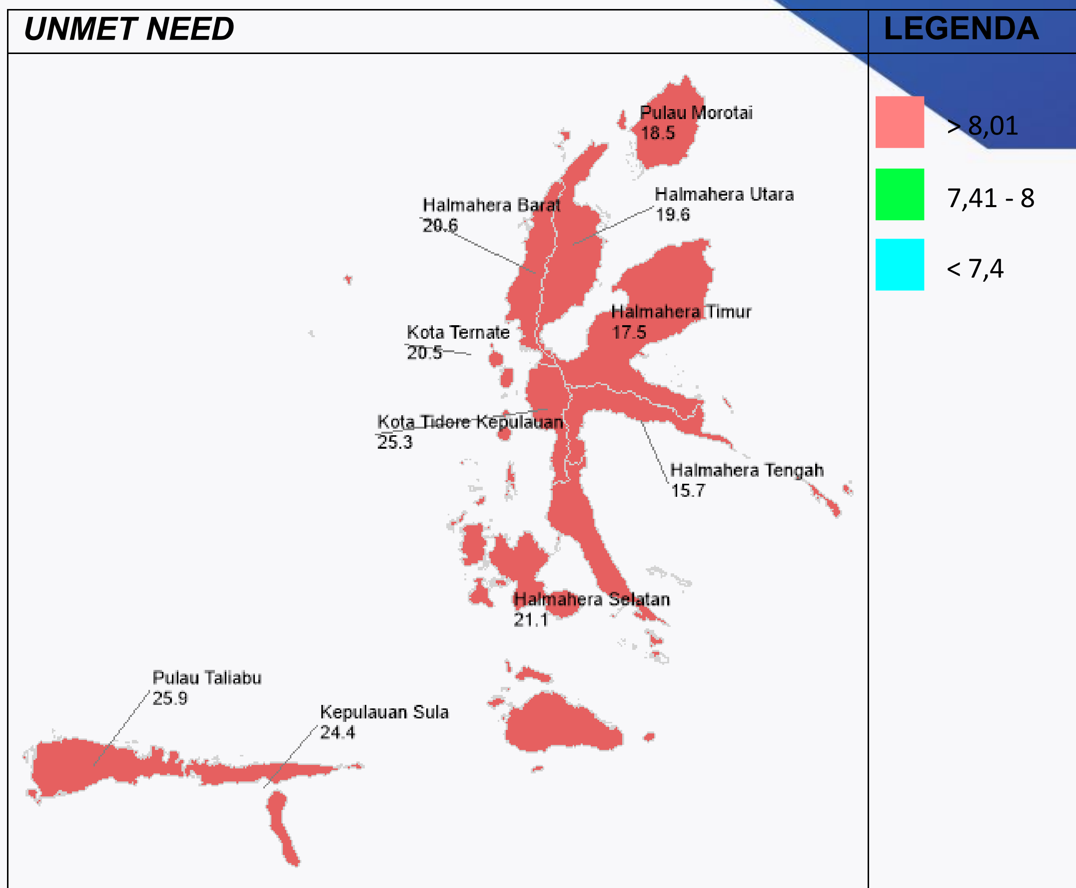
4.2.34. Peta Parameter Provinsi Maluku Utara



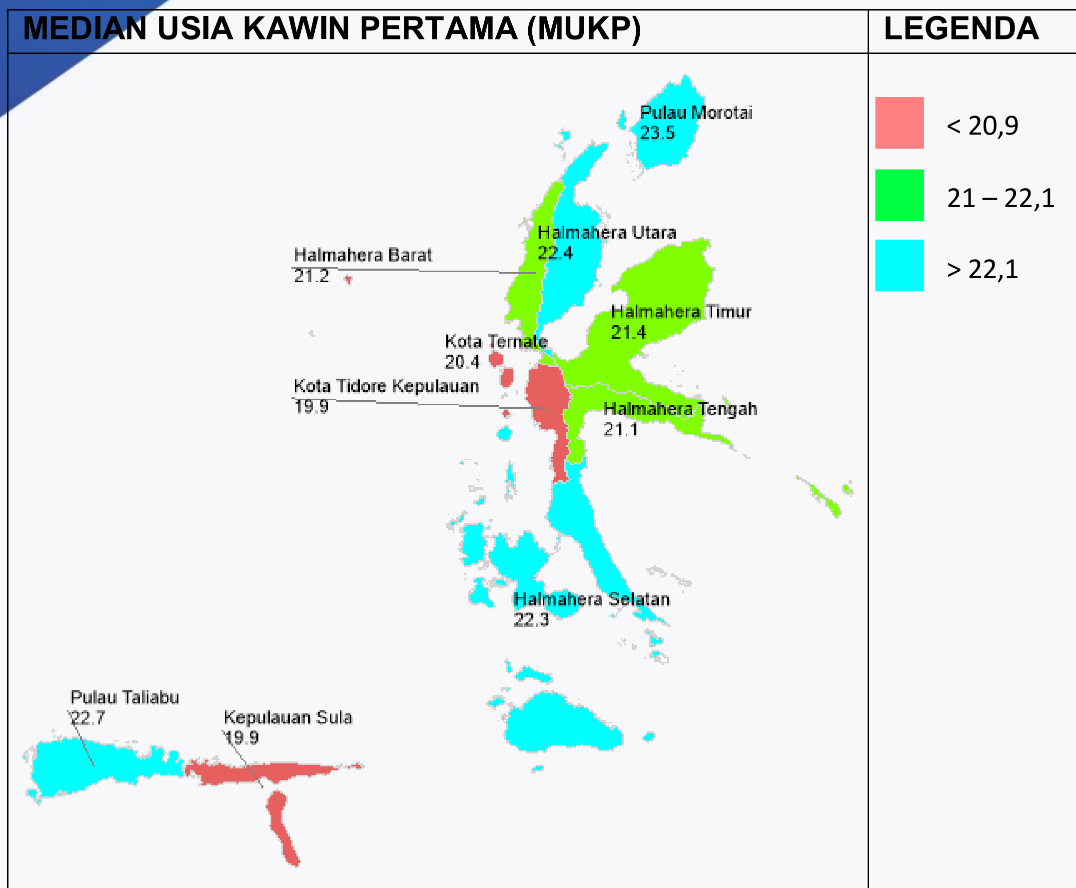
Berdasarkan Peta di atas dapat dilihat bahwa angka kelahiran total di Maluku Utara masih sangat memiliki tantangan karena hampir seluruh kabupaten/kota di Maluku Utara memiliki angka yang tinggi yaitu diatas 2,21 kecuali Kota Ternate dan Kota Tidore. Hal ini perlu menjadi perhatian bagi para pengambil kebijakan di kabupaten/kota di Maluku Utara untuk melakukan upaya dan langkah-langkah untuk menurunkan angka TFR di wilayahnya masing-masing



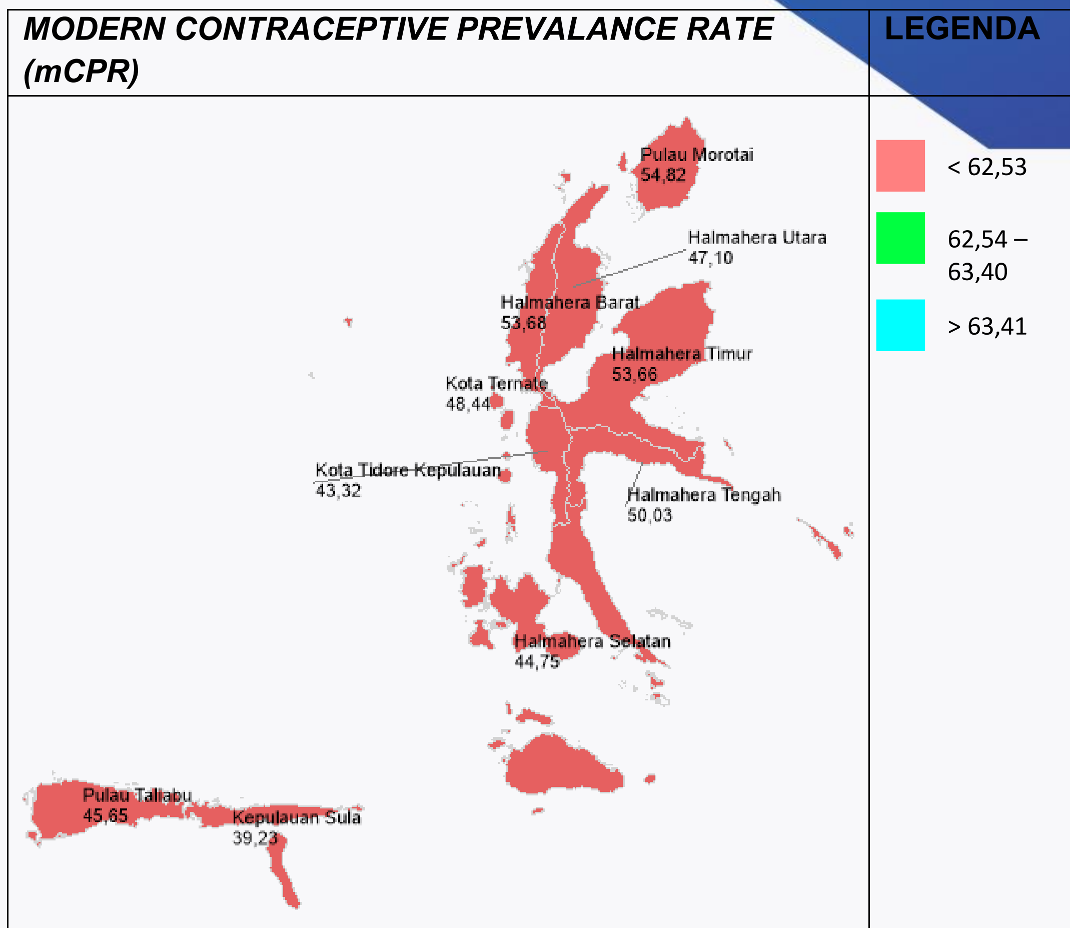
Berdasarkan peta di atas terlihat bahwa indikator ASFR 15-19 tahun) tingkat kabupaten/kota di Provinsi Maluku Utara semuanya masih belum mencapai target, kecuali Kota Ternate. Hal tersebut perlu di intervensi secara efisien dan tepat sasaran agar dapat mencapai target yang telah ditentukan di tahun-tahun kedepannya.



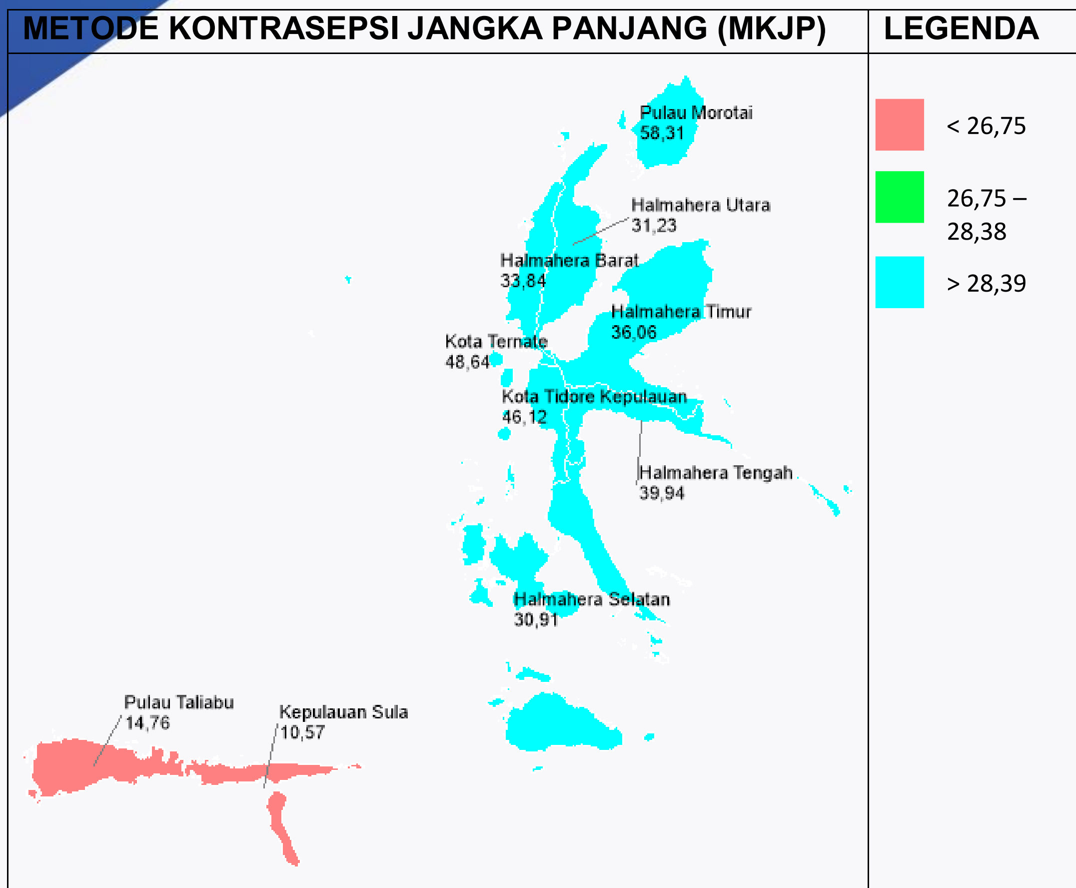
Berdasarkan peta di atas terlihat bahwa untuk indikator *unmet need* di Provinsi Maluku Utara perlu perhatian yang besar karena seluruh kabupaten/kota di Maluku Utara memiliki angka *unmet need* yang sangat tinggi yaitu di atas 8,01 persen.

MEDIAN USIA KAWIN PERTAMA (MUKP)	LEGENDA
	< 20,9 21 – 22,1 > 22,1

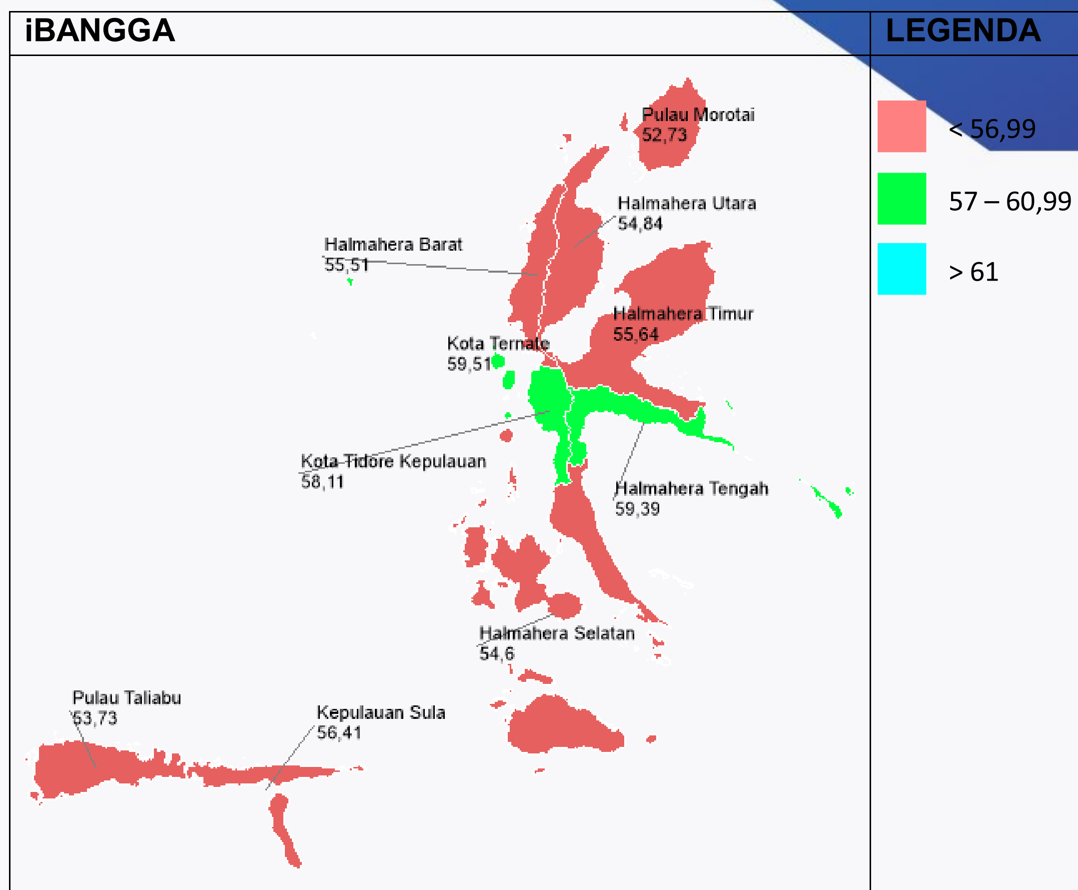
Berdasarkan peta di atas, terlihat bahwa angka Median Usia Kawin Pertama (MUKP) di Provinsi Maluku Utara sudah cukup baik karena hanya 3 kabupaten/kota yakni Kota Ternate, Kota Tidore Kepulauan, dan Kepulauan Sula yang belum mencapai target yang telah ditetapkan. Sementara itu, kabupaten/kota lainnya sudah mencapai target MUKP tahun 2022 yaitu 21 tahun ke atas, bahkan ada 11 kabupaten/kota yang angka MUKP-nya telah mencapai target MUKP tahun 2024 yaitu di atas 22,1.



Berdasarkan peta di atas terlihat bahwa untuk indikator mCPR seluruh kabupaten/kota di Provinsi Maluku Utara masih sangat rendah dan belum mencapai target. Hal ini perlu menjadi perhatian, khususnya dalam aspek advokasi dan KIE serta pelayanan kontrasepsi di Maluku Utara agar dapat dilaksanakan sesuai dengan kondisi dan situasi masing-masing daerah agar dapat berjalan secara terfokus dan tepat sasaran.

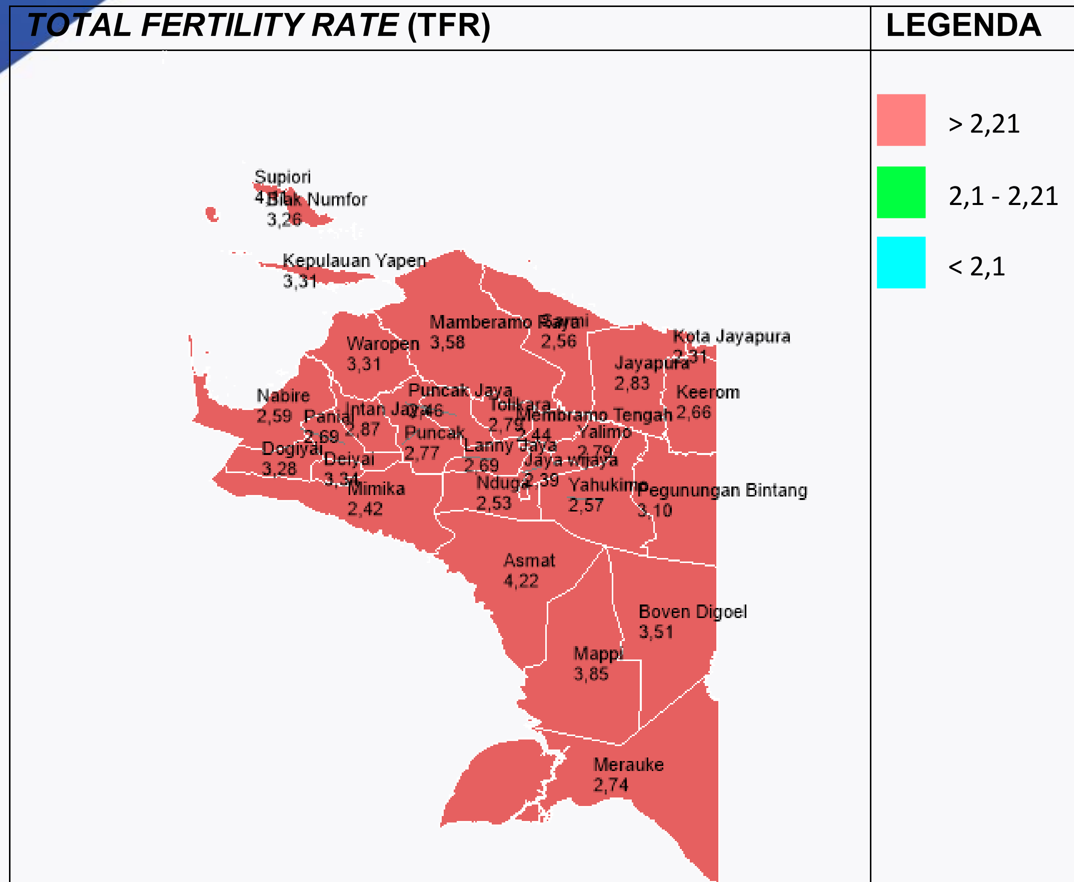


Berdasarkan peta di atas dapat dilihat bahwa hanya terdapat dua kabupaten/kota di Provinsi Maluku Utara yang belum mencapai target MKJP tahun 2022 yakni Pulau Taliabu dan Kepulauan Sula. Hal ini sudah cukup baik dan hmenunjukan bahwa program dalam peningkatan angka MKJP

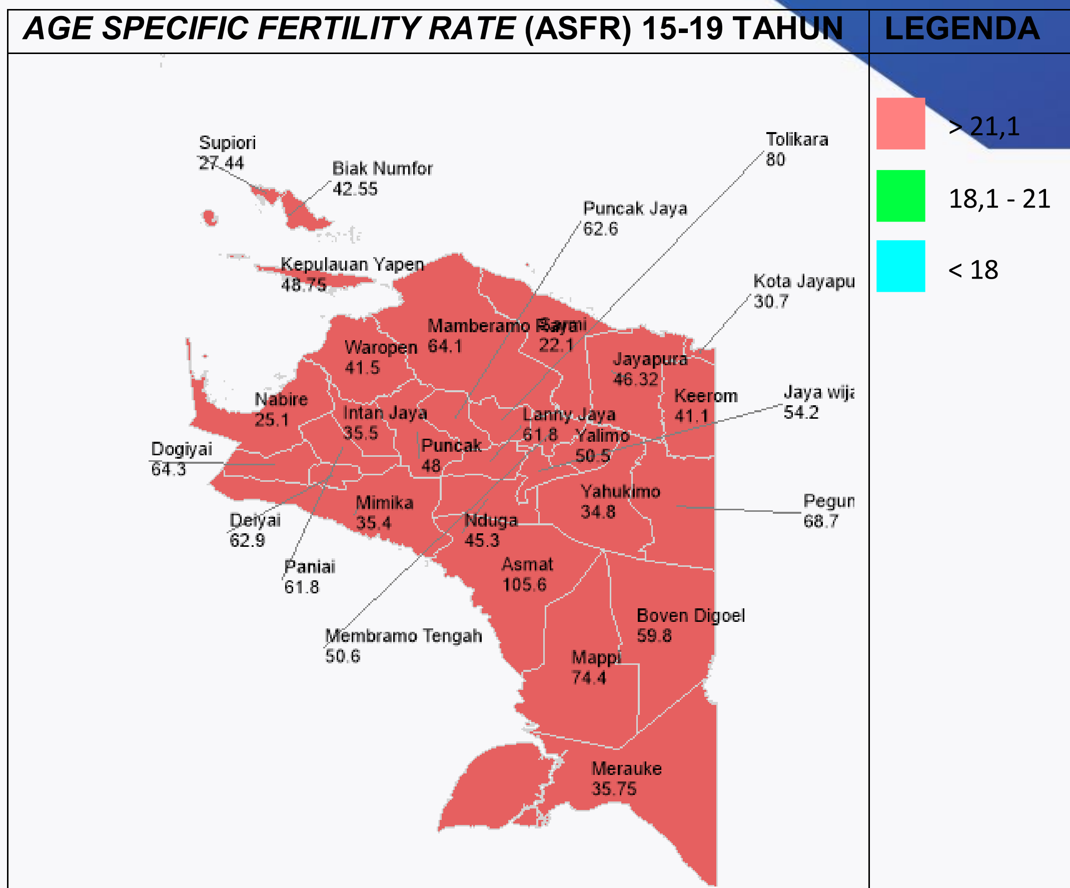


Berdasarkan peta di atas dapat dilihat bahwa secara umum angka indeks iBangga sebagian besar kabupaten/kota di Provinsi Maluku Utara masih belum mencapai target tahun 2022. Hanya terdapat 2 kabupaten/kota yang telah mencapai target tahun 2022 yakni Kota Tidore Kepulauan dan Halmahera Tengah.

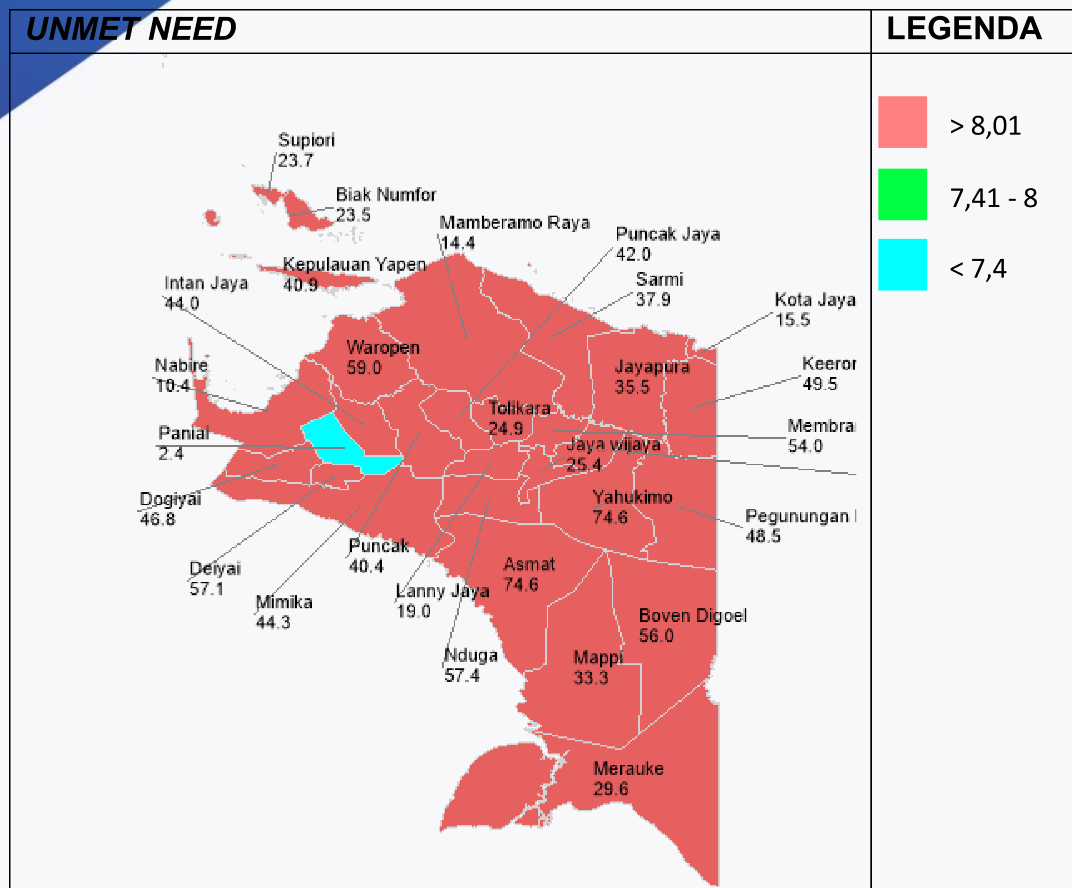
4.2.35. Peta Parameter Provinsi Papua

***TOTAL FERTILITY RATE* (TFR)**	**LEGENDA**
	> 2,21 2,1 - 2,21 < 2,1

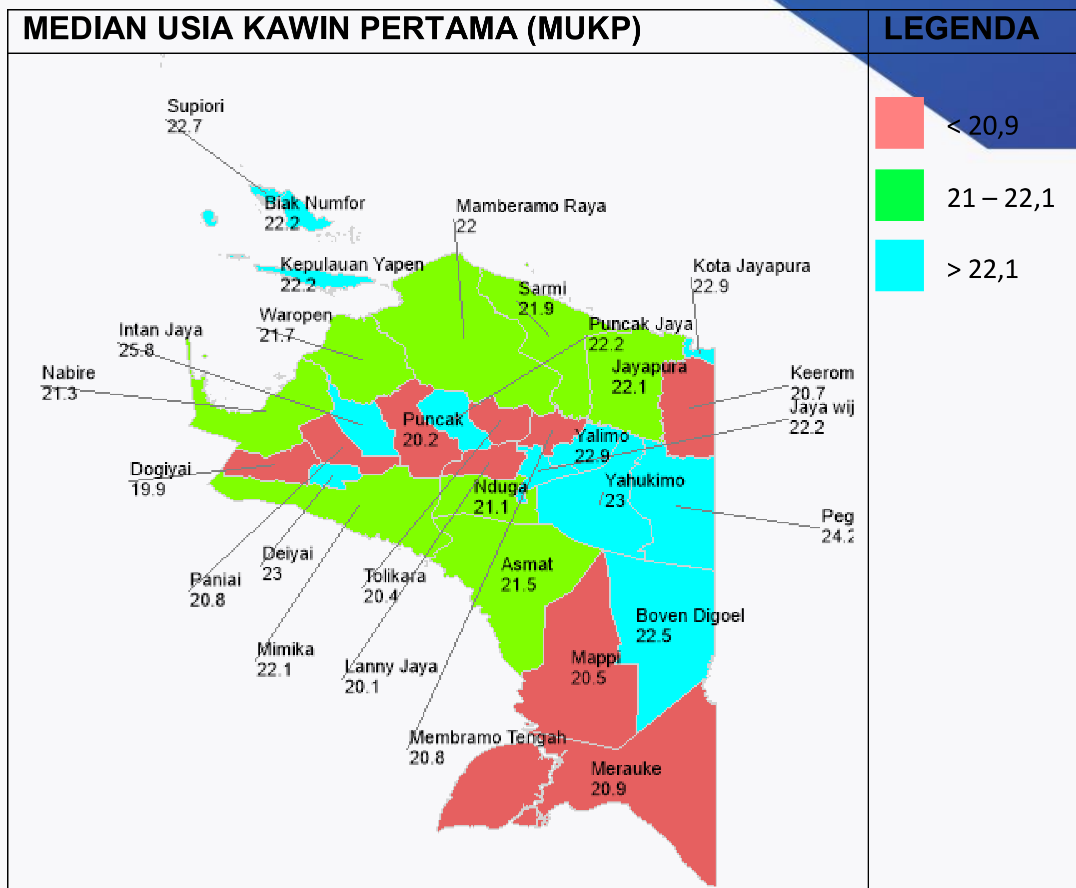
Berdasarkan Peta di atas dapat dilihat bahwa program penurunan fertilitas di Papua butuh perhatian yang sangat besar karena seluruh kabupaten/kota di Papua masih memiliki angka yang cukup tinggi yaitu diatas 2,21 atau belum mencapai target. Hal ini perlu menjadi perhatian bagi para pengambil kebijakan di kabupaten/kota di Papua untuk melakukan intervensi program penurunan fertilitas di wilayahnya masing-masing agar dapat dilaksanakan dengan tepat sasaran dan komprehensif.



Serupa dengan distribusi TFR, seluruh kabupaten/kota di Papua masih sangat tinggi, dimana belum ada yang mencapai target ASFR 15-19 Tahun bahkan ada yang mencapai hingga 105,6. Hal tersebut perlu di intervensi secara tepat karena fertilitas pada usia yang belum cukup dewasa dapat mengakibatkan berbagai dampak buruk dimana salah satunya adalah meningkatnya resiko kematian ibu dan bayi serta stunting.

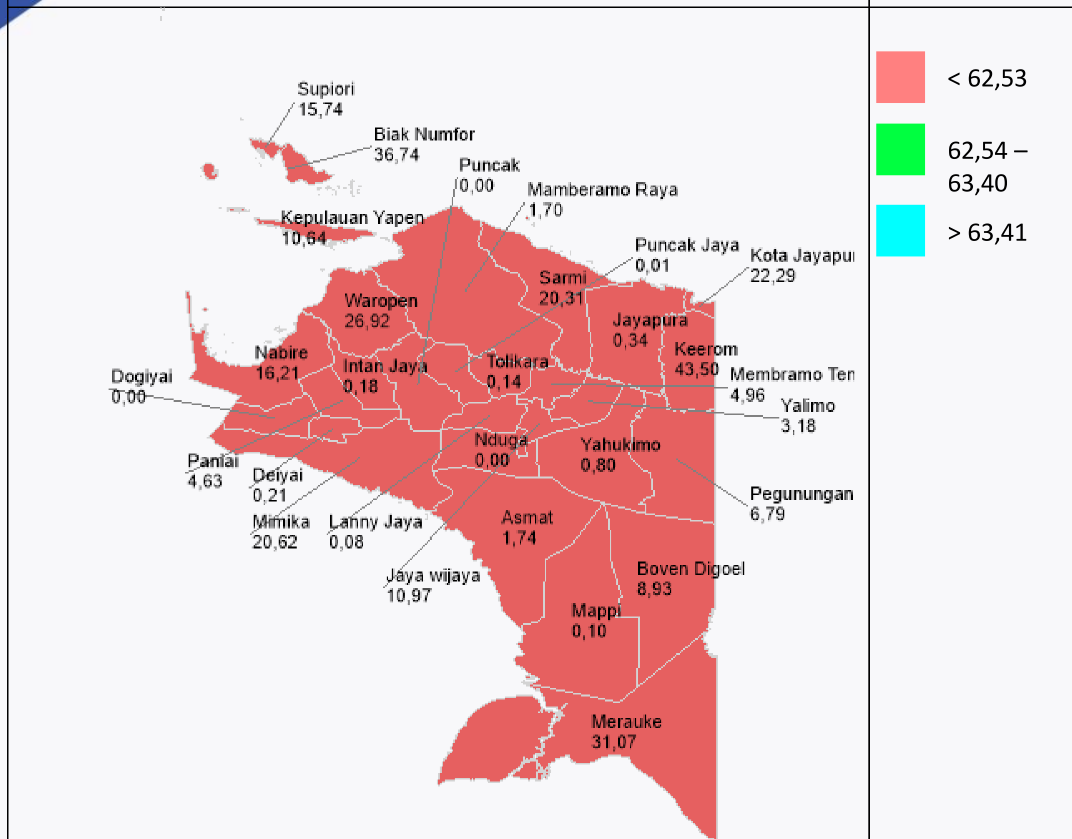


Berdasarkan peta di atas terlihat bahwa diperlukan intervensi program bagi pemenuhan kebutuhan ber-KB para pasangan usia subur di Papua karena seluruh kabupaten/kota di Papua masih memiliki angka *unmet need* yang tinggi dan belum mencapai target yang telah ditetapkan, kecuali Panial. Hal tersebut perlu intervensi yang lebih dalam dan terfokus karena unmet need dapat mengakibatkan berbagai dampak buruk termasuk kehamilan yang tidak diinginkan yang berpotensi besar terhadap kehamilan beresiko, dan juga kematian ibu dan bayi serta stunting.

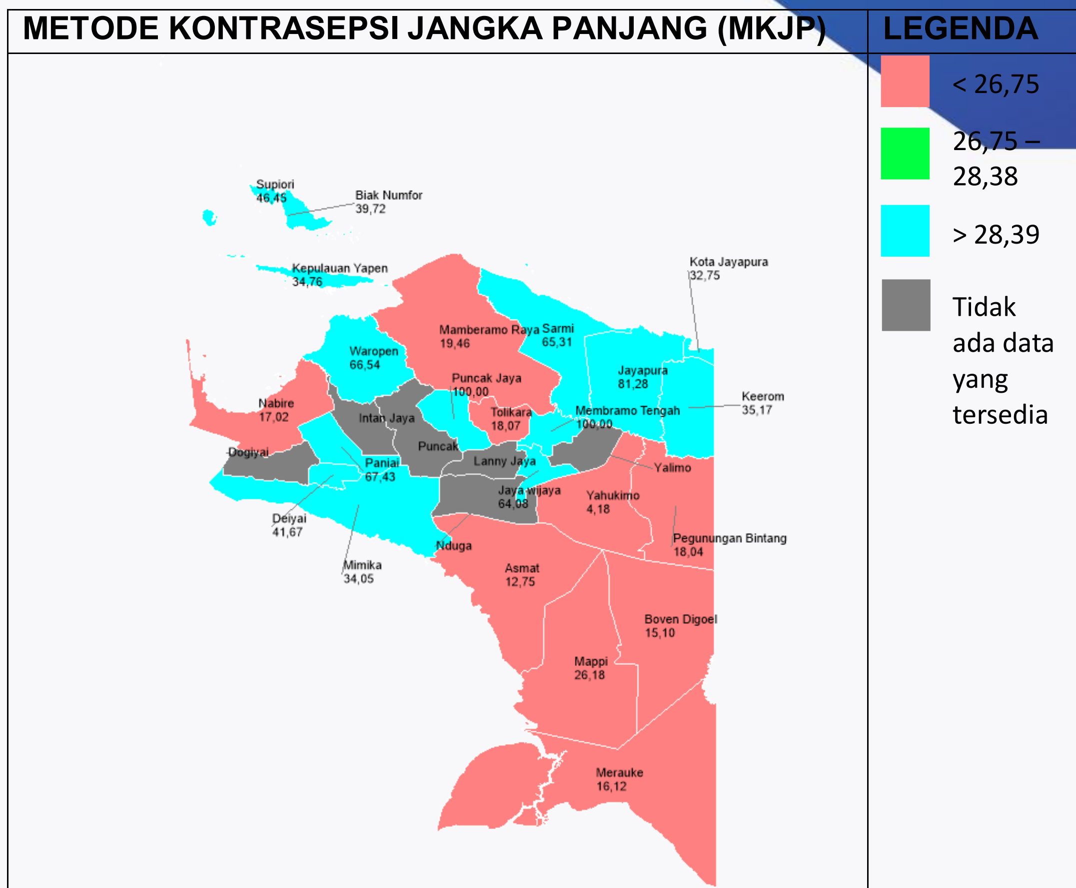


Berdasarkan peta di atas, terlihat bahwa angka Median Usia Kawin Pertama (MUKP) di Provinsi Papua beragam di tingkat kabupaten/kota. Ada beberapa kabupaten/kota yang sudah mencapai target namun masih terdapat juga beberapa kabupaten/kota dengan angka MUKP yang cukup rendah. Oleh itu, perlu program advokasi dan KIE pada kabupaten/kota dengan angka MUKP rendah yang tepat sasaran sesuai latar situasi dan tempat daerah tersebut agar dapat terjadi pendewasaan usia perkawinan kedepannya.

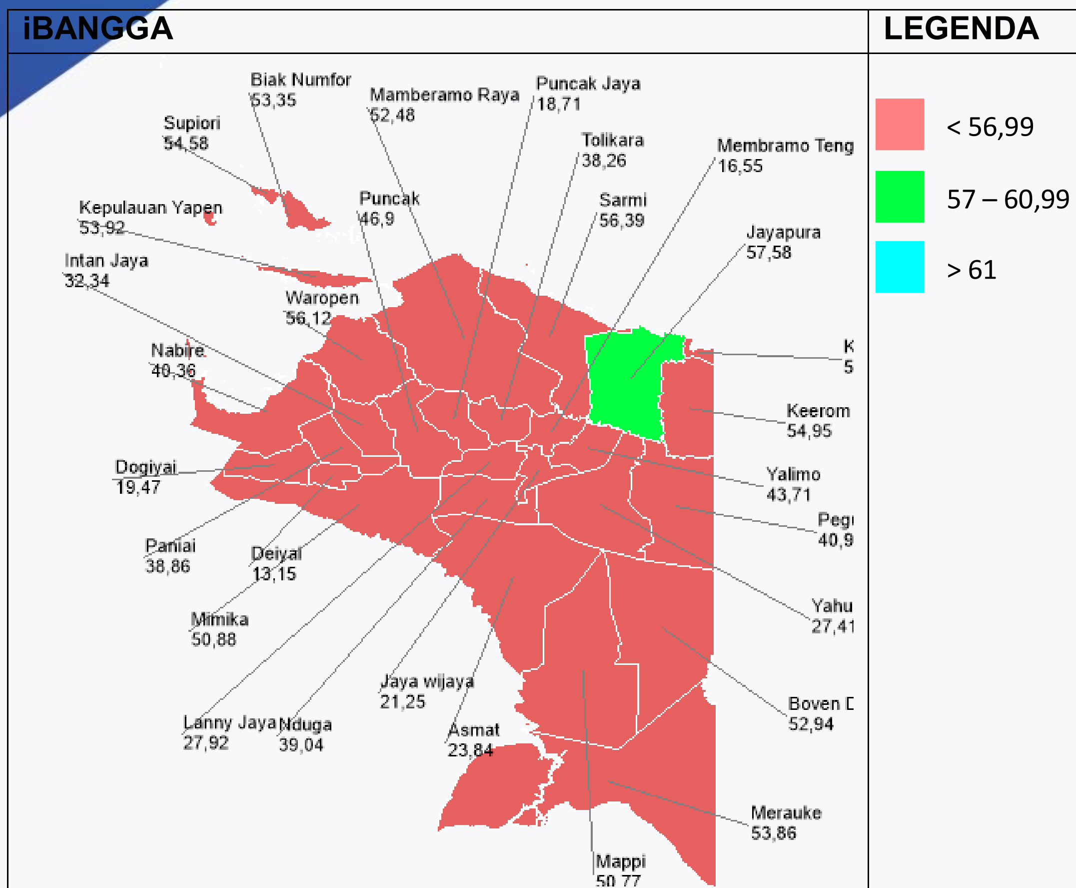
***MODERN CONTRACEPTIVE PREVALANCE RATE* (mCPR)**	**LEGENDA**



Berdasarkan peta di atas terlihat bahwa indikator mCPR pada seluruh kabupaten/kota di Provinsi Papua masih sangat rendah dan belum ada yang mencapai target, bahkan ada yang 0 persen. Hal ini perlu menjadi perhatian, karena dapat menjadi batu sandungan dalam program penurunan fertilitas dan pemenuhan kebutuhan KB di Papua yang masih didapati tinggi.

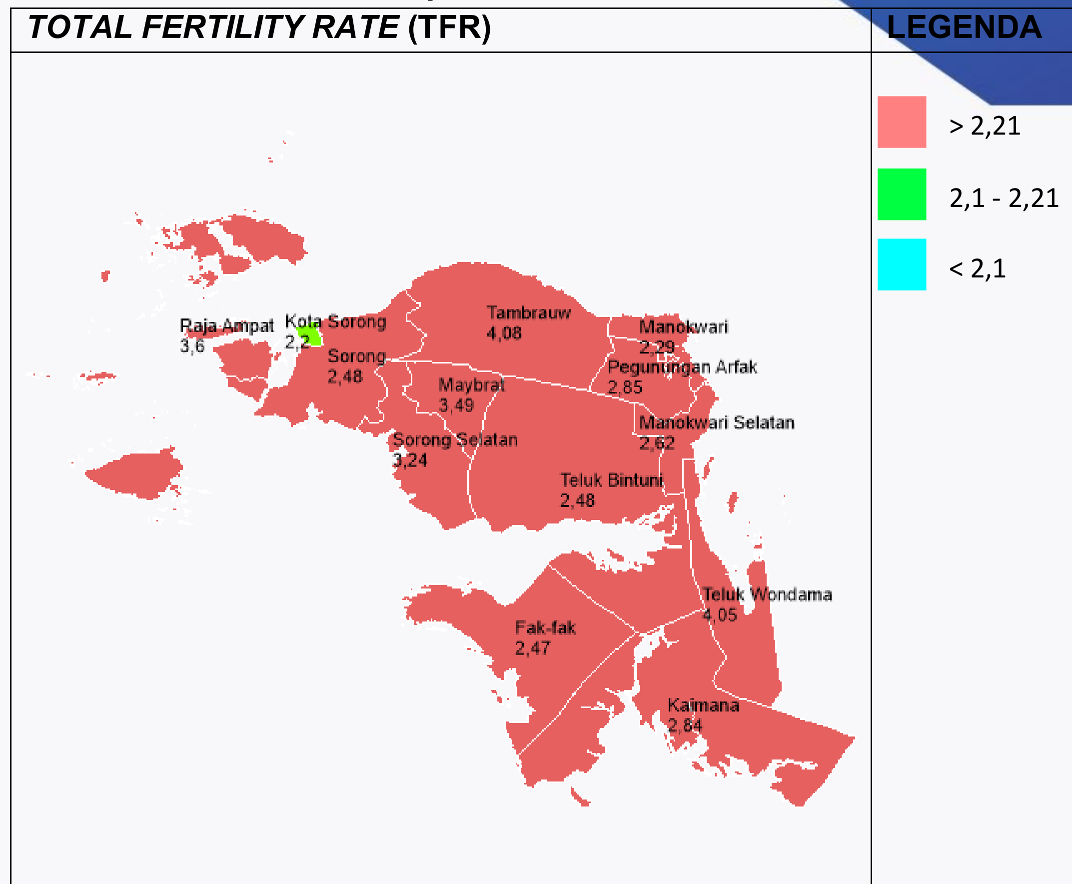


Berdasarkan peta di atas dapat dilihat bahwa capaian indikator MKJP di Papua beragam antar kabupaten/kota. Terdapat beberapa kabupaten/kota yang sudah mencapai target untuk tahun 2024, namun masih terdapat banyak kabupaten/kota dengan angka MKJP yang sangat rendah juga. Hal tersebut perlu menjadi perhatian karena dapat berdampak pada fertilitas penduduk di Papua yang masih tinggi.

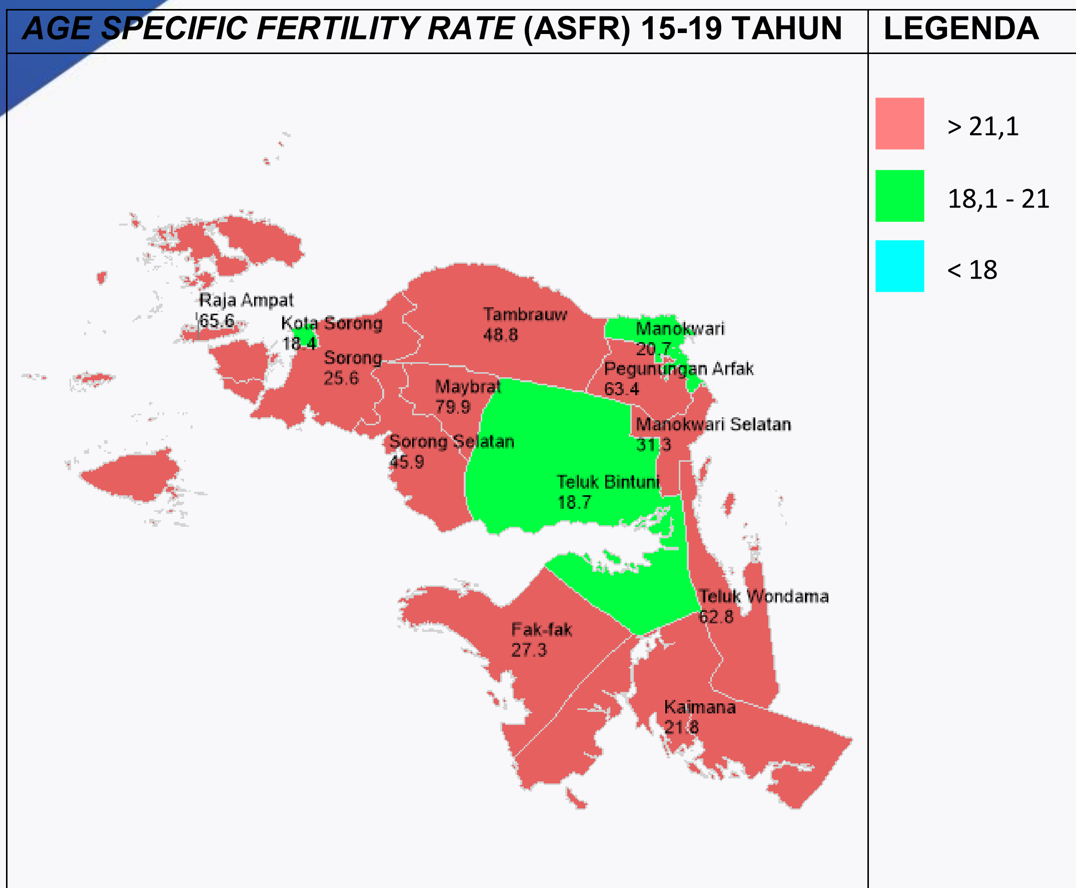


Berdasarkan peta di atas dapat dilihat bahwa seluruh kabupaten/kota di Papua masih belum mencapai target iBangga yang telah ditetapkan. Hal tersebut perlu menjadi perhatian khusus karena tidak tercapainya iBangga menandakan bahwa kualitas dari pembangunan keluarga di ketiga dimensi masih belum maksimal dan perlu diintervensi lebih dalam karena sangat berkaitan dengan kualitas pembangunan keluarga di Papua.

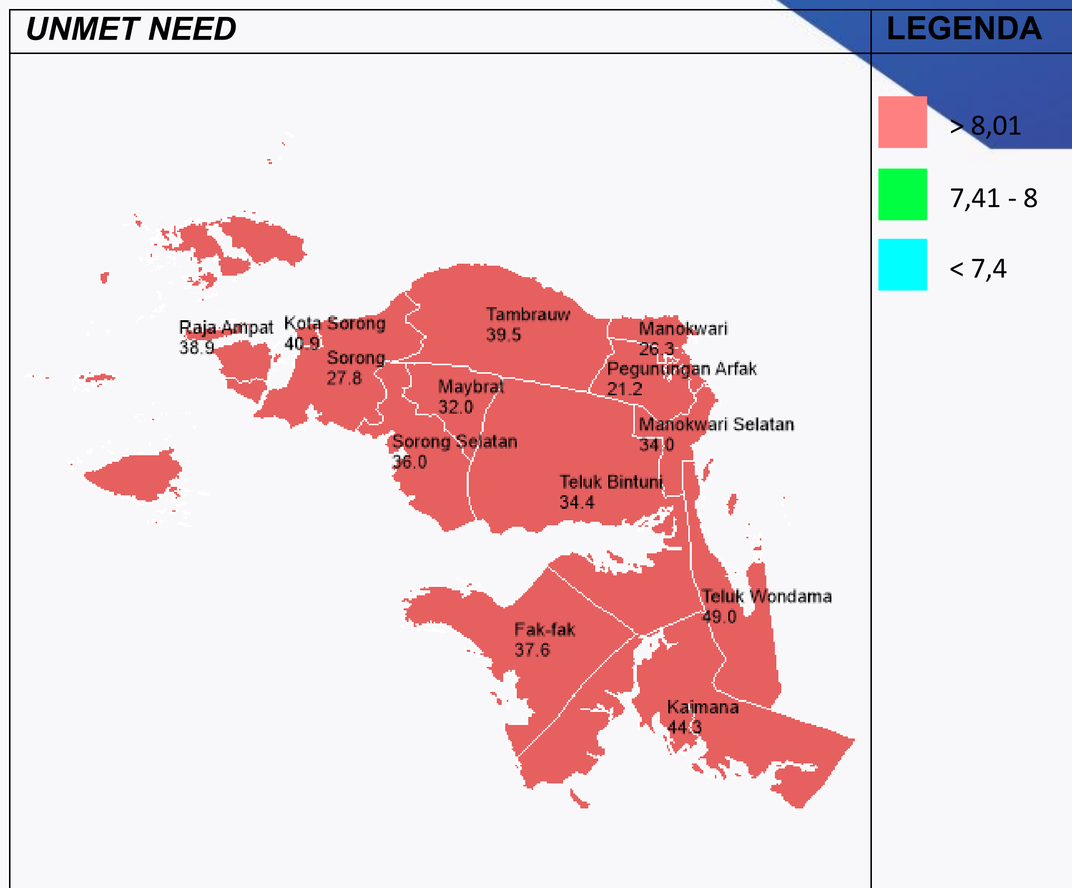
4.2.36. Peta Parameter Provinsi Papua Barat



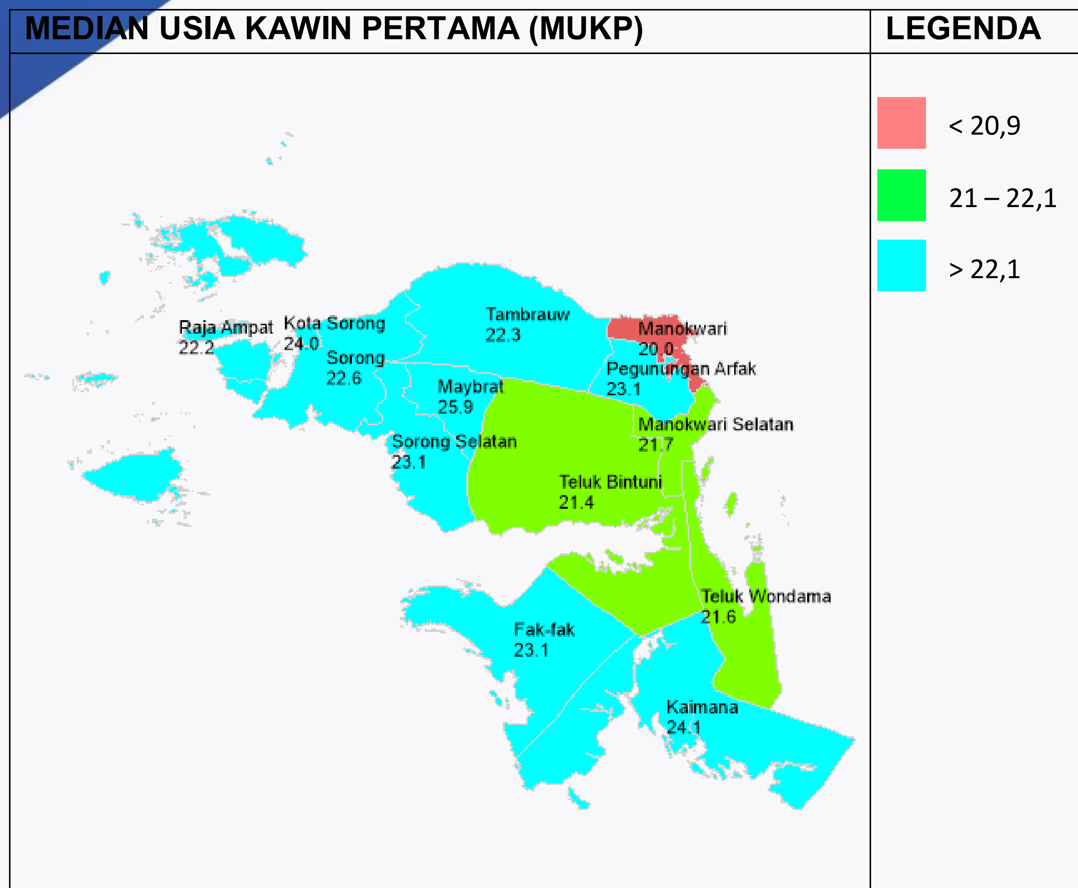
Berdasarkan Peta di atas dapat dilihat bahwa program penurunan fertilitas di Papua Barat butuh perhatian yang sangat besar karena seluruh kabupaten/kota di Papua Barat masih memiliki angka yang cukup tinggi yaitu diatas 2,21 atau belum mencapai target, kecuali Kota Sorong. Oleh sebab itum perlu ada intervensi program penurunan fertilitas di seluruh kabupaten/kota dalam rangka menekan angka fertilitas di Papua Barat secara efisien dan menyeluruh.



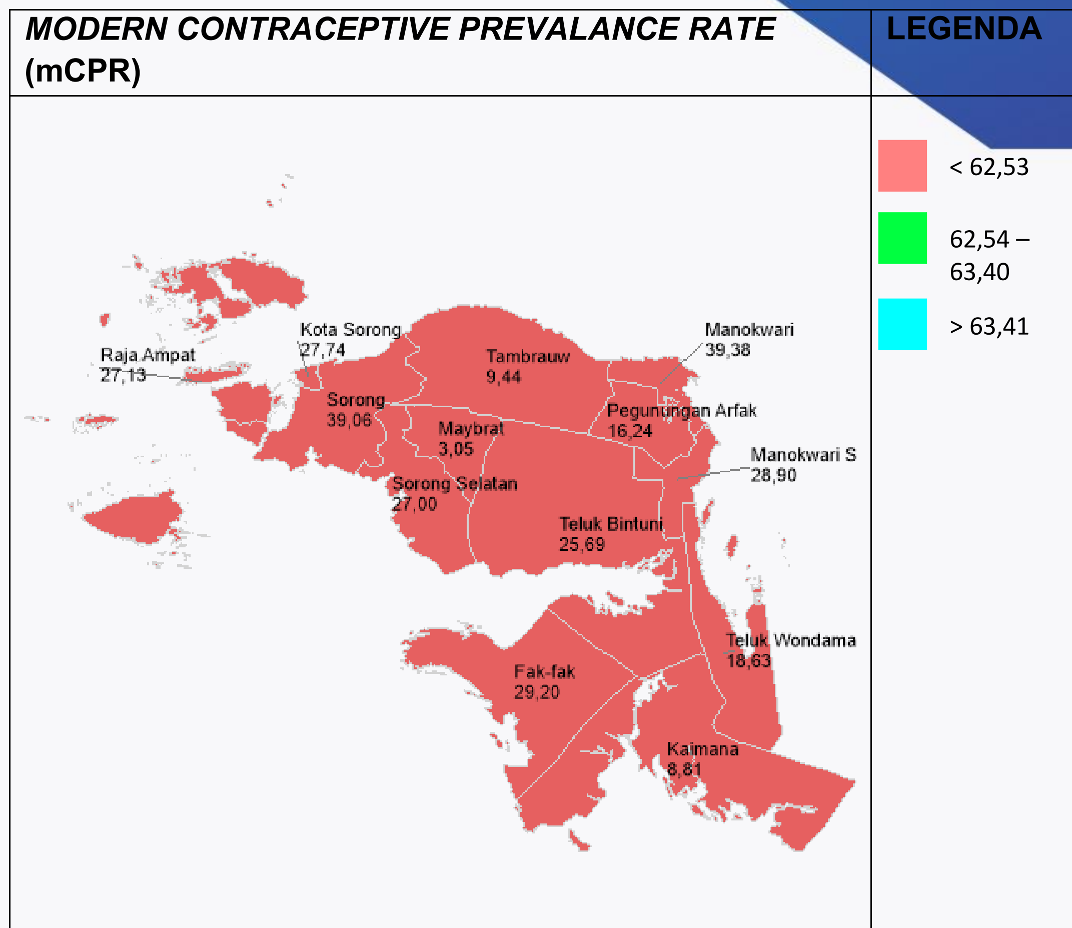
Serupa dengan distribusi TFR, seluruh kabupaten/kota di Papua Barat masih sangat tinggi, dimana hanya terdapat tiga kabupaten/kota yang telah mencapai target ASFR 15-19 Tahun yakni Kota Sorong, Teluk Bintani, dan Manokwari. Hal tersebut perlu di intervensi secara tepat karena fertilitas pada usia yang belum cukup dewasa dapat mengakibatkan berbagai dampak buruk dimana salah satunya adalah meningkatnya resiko kematian ibu dan bayi serta stunting.



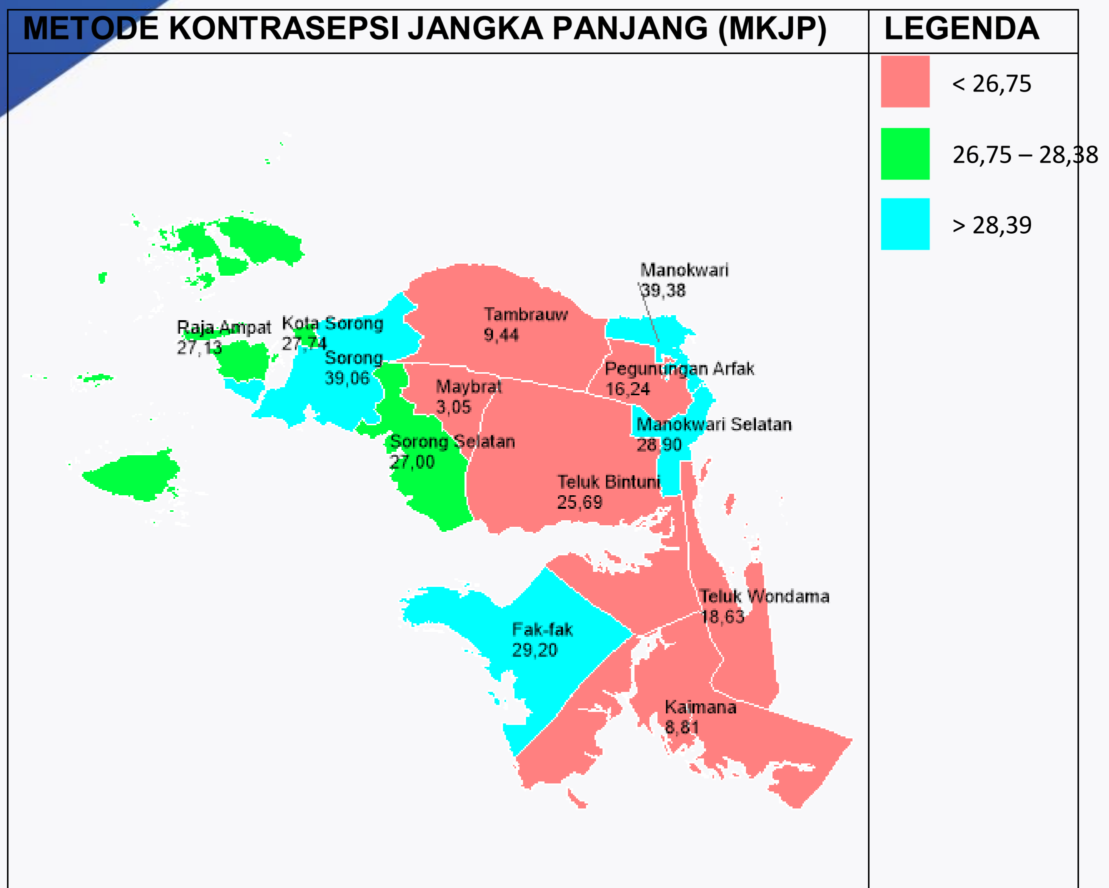
Berdasarkan peta di atas, terlihat bahwa diperlukan intervensi program bagi pemenuhan kebutuhan ber-KB para pasangan usia subur di Papua Barat karena belum ada kabupaten/kota di Papua Barat yang mencapai target *unmet need.* Hal tersebut perlu intervensi yang lebih dalam dan terfokus karena unmet need dapat mengakibatkan berbagai dampak buruk termasuk kehamilan yang tidak diinginkan yang berpotensi besar terhadap kehamilan beresiko, dan juga kematian ibu dan bayi serta stunting.



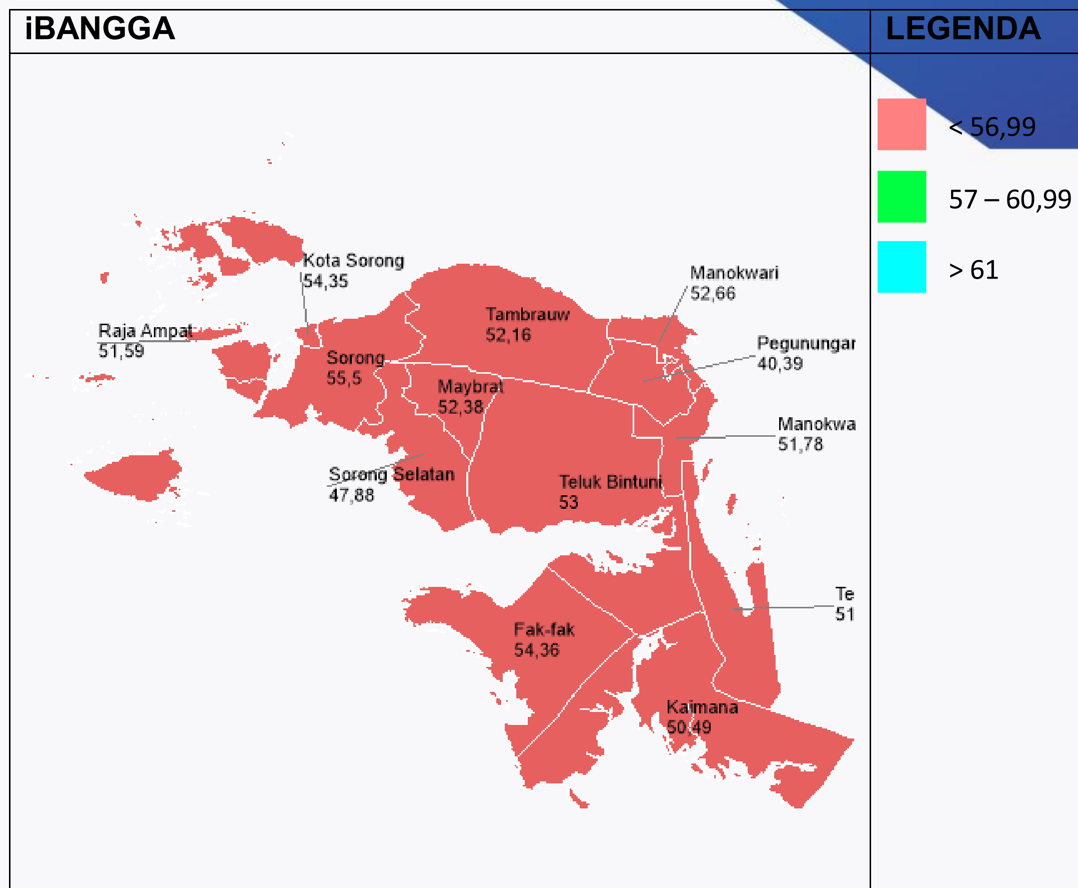
Berbeda dengan distribusi parameter program Bangga Kencana lainnya, terlihat bahwa angka Median Usia Kawin Pertama (MUKP) di Provinsi Papua Barat sudah cukup baik dimana hanya terdapat satu kabupaten/kota yang belum mencapai target MUKP yang telah ditetapkan yakni Manokwari. Hal tersebut perlu dipertahankan karena pendewasaan usia perkawinan berdampak baik dalam menekan resiko perceraian dan juga kehamilan beresiko yang dapat mengakibatkan terganggunya kesehatan janin, kematian ibu dan bayi, serta stunting pada anak.



Berdasarkan peta di atas terlihat bahwa indikator mCPR pada seluruh kabupaten/kota di Provinsi Papua Barat masih sangat rendah dan belum ada yang mencapai target. Hal ini perlu menjadi perhatian, karena dapat menjadi hambatan dalam pencapaian target program Bangga Kencana lainnya.



Berdasarkan peta di atas dapat dilihat bahwa capaian indikator MKJP di Papua Barat beragam antar kabupaten/kota. Terdapat beberapa kabupaten/kota yang sudah mencapai target (baik untuk tahun 2022 maupun 2024), namun masih terdapat banyak kabupaten/kota juga dengan angka MKJP yang sangat rendah, bahkan mencapai angka 3,05% di Maybrat. Oleh sebab itu diperlukan pemerataan pelaksanaan program advokasi dan KIE terkait penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang khususnya bagi PUS yang ingin menunda jarak kehamilan dan/ tidak menginginkan kehamilan lagi pada seluruh kabupaten/kota di Papua Barat.



Berdasarkan peta di atas dapat dilihat bahwa seluruh kabupaten/kota di Papua Barat masih memiliki angka iBangga yang sangat rendah atau belum mencapai target yang telah ditetapkan. Hal tersebut perlu menjadi perhatian khusus Pembangunan Keluarga sangatlah penting dan mendasari kualitas keluarga sebagai unit terkecil di lingkup masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan.

BAB V
PENUTUP

Buku Parameter Program Bangga Kencana Tingkat Kabupaten/Kota Tahun 2022 bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai pencapaian tujuh indikator program Bangga Kencana tingkat kabupaten/kota. Tujuh indikator tersebut antara lain TFR, ASFR (15-19 tahun), MUKP, mCPR, MKJP, *unmet need* dan iBangga. Buku ini diterbitkan dalam rangka memberikan fasilitasi kepada pemerintah daerah agar dapat mengevaluasi pencapaian ke tujuh indikator tersebut pada wilayah masing-masing sehingga pencapaian program Bangga Kencana tingkat kabupaten/kota dapat terus terpantau setiap tahunnya.

Program Bangga Kencana merupakan program dengan pendekatan siklus hidup yang tidak dapat berjalan sendiri. Program ini berupaya untuk merujuk pada Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga yang ditujukan untuk menjamin keberlangsungan hidup seluruh manusia dan mencapai kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, untuk dapat mencapai tujuan program Bangga Kencana dibutuhkan dukungan sinergis dari berbagai entitas berbasis masyarakat dan pemangku kepentingan. Oleh karena itu, BKKBN harus meningkatkan kerjasama dengan pemangku kepentingan dan juga memaksimalkan kerjasama yang telah dibangun untuk mendukung pelaksanaan kebijakan kependudukan yang harmonis dan berorientasi pada sasaran. Keberadaan buku ini diharapkan dapat menjadi acuan pemetaan dan penyusunan kebijakan ke depan sehingga dapat lebih fokus dan tepat sasaran.

DAFTAR PUSTAKA

A. T. Anggraeni and D. Susilaningrum, “Pemodelan Dan Pemetaan Faktor Unmet Need KB di Jawa Timur Sebagai Perencanaan Mencegah Ledakan Penduduk Dengan Regresi Logistik Biner,” Semin. Nas. Mat. dan Apl., pp. 210–215, 2017, [Online]. Available: http://repository.unair.ac.id/id/eprint/73943

BKKBN. (2021). *Kamus Istilah Bangga Kencana*. Jakarta: BKKBN

Pusat Penelitian dan Pengembangan KB dan KS BKKBN. (2021). *Metadata Indikator Kinerja Utama BKKBN Tahun 2021.* Bogor: UIKA Press

Ratnaningsih, E. (2018). Analisis dampak unmet need Keluarga Berencana terhadap kehamilan tidak diinginkan di Rumah Sakit Panti Wilasa Citarum Semarang. Jurnal Kebidanan, 7(2), 80-94.https://doi.org/10.26714/jk.7.2.2018.80-94

Sirusa Badan Pusat Statistik. *Angka Kelahiran Total (TFR) [online]*. Diakses dari: https://sirusa.bps.go.id/sirusa/index.php/indikator/49 (19 April 2022)

Sirusa Badan Pusat Statistik. *Angka Kelahiran menurut Kelompok Umur (Age Specific Fertility Rate/ASFR) [online]*. Diakses dari: https://sirusa.bps.go.id/sirusa/index.php/indikator/1157 (19 April 2022)

LAMPIRAN TABEL

PARAMETER PROGRAM BANGGA KENCANA PROVINSI ACEH
Angka TFR, ASFR 15-19 Tahun, MUKP, mCPR, MKJP dan Unmet Need Tingkat Kabupaten/Kota

Kab/Kota	TFR	ASFR 15-19	MUKP	mCPR	MKJP	Unmet Need		
						Limiting	Spacing	Total
ACEH BARAT	2,3	14,04	22,4	49,3%	19,6%	8,8%	7,7%	16,6%
ACEH BARAT DAYA	2,37	17	22,7	49,9%	9,0%	5,7%	7,1%	12,8%
ACEH BESAR	2,25	17	23,1	48,4%	21,2%	7,5%	9,0%	16,6%
ACEH JAYA	2,77	17,4	20,6	43,8%	14,0%	10,2%	11,5%	21,7%
ACEH SELATAN	2,39	12,46	22,4	54,9%	8,1%	5,6%	7,9%	13,5%
ACEH SINGKIL	3,04	30,8	21,1	49,0%	11,4%	11,2%	8,2%	19,4%
ACEH TAMIANG	2,38	16,37	21,7	59,4%	17,1%	9,1%	4,2%	13,3%
ACEH TENGAH	2,51	23,24	21,8	69,5%	16,9%	4,8%	3,6%	8,4%
ACEH TENGGARA	2,71	38,32	21,2	42,9%	22,9%	10,0%	4,2%	14,2%
ACEH TIMUR	2,41	14,3	21,5	46,8%	9,3%	8,9%	10,7%	19,7%
ACEH UTARA	2,32	16,91	21,7	52,3%	5,6%	7,3%	7,1%	14,4%
BENER MERIAH	2,58	16,4	21,3	66,1%	26,3%	4,9%	4,3%	9,3%
BIREUEN	2,44	10,6	23,7	40,4%	10,0%	9,2%	11,3%	20,6%
GAYO LUES	2,72	46,8	21,4	68,6%	12,1%	4,1%	2,5%	6,6%
KOTA BANDA ACEH	2,04	10,3	24,2	45,1%	28,5%	10,1%	7,6%	17,6%
KOTA LANGSA	2,23	13,6	23,4	44,3%	22,1%	13,2%	8,2%	21,5%
KOTA LHOKSEUMAWE	2,39	10,1	22,8	48,4%	8,7%	8,7%	8,6%	17,2%
KOTA SABANG	2,43	23,41	23,2	50,4%	16,0%	8,8%	8,4%	17,2%
KOTA SUBULUSSALAM	3,13	24,2	20,3	42,8%	18,6%	10,6%	14,9%	25,5%
NAGAN RAYA	2,34	27,41	20,7	48,8%	9,7%	8,6%	7,9%	16,5%
PIDIE	2,35	11,44	23,3	43,9%	9,0%	7,9%	11,6%	19,5%
PIDIE JAYA	2,49	10,91	22,9	50,6%	9,3%	5,0%	11,5%	16,6%
SIMEULUE	2,71	44,31	21,7	44,5%	33,8%	10,1%	9,4%	19,5%
Provinsi	**2,42**	**16,4**	**22,4**	**49,9%**	**14,1%**	**8,2%**	**8,2%**	**16,4%**

Angka iBangga beserta Dimensi-Dimensinya Tingkat Kabupaten/Kota

Kabupaten/Kota	Dimensi			iBangga
	Dimensi Ketentraman	Dimensi Kemandirian	Dimensi Kebahagiaan	
ACEH BARAT	56,79	53,39	63,34	57,84
ACEH BARAT DAYA	56,83	51,73	61,98	56,85
ACEH BESAR	60,35	53,98	64,26	59,53
ACEH JAYA	56,46	51,54	60,82	56,27
ACEH SELATAN	55,40	53,05	64,14	57,53
ACEH SINGKIL	57,71	51,52	61,23	56,82
ACEH TAMIANG	56,82	53,31	60,97	57,03
ACEH TENGAH	57,93	54,00	63,00	58,31
ACEH TENGGARA	56,13	53,10	63,03	57,42
ACEH TIMUR	54,43	48,08	60,03	54,18
ACEH UTARA	56,65	48,40	61,53	55,53
BENER MERIAH	58,58	54,32	64,30	59,07
BIREUEN	56,67	51,25	63,35	57,09
GAYO LUES	57,23	50,86	59,27	55,79
KOTA BANDA ACEH	61,63	55,62	65,66	60,97
KOTA LANGSA	59,41	52,83	62,26	58,17
KOTA LHOKSEUMAWE	59,84	53,32	62,35	58,50
KOTA SABANG	60,30	55,67	65,50	60,49
KOTA SUBULUSSALAM	59,11	53,51	63,51	58,71
NAGAN RAYA	54,18	50,65	63,04	55,96
PIDIE	58,34	50,16	60,61	56,37
PIDIE JAYA	55,23	50,49	64,31	56,67
SIMEULUE	56,27	52,76	63,25	57,42
Provinsi	**60,99**	**51,78**	**60,61**	**57,79**

PARAMETER PROGRAM BANGGA KENCANA PROVINSI SUMATERA UTARA

Angka TFR, ASFR 15-19 Tahun, MUKP, mCPR, MKJP dan Unmet Need Tingkat Kabupaten/Kota

Kab/Kota	TFR	ASFR 15-19	MUKP	mCPR	MKJP	Unmet Need		
						Limiting	Spacing	Total
ASAHAN	2,47	29,7	21,4	46,90%	29,16%	15,6%	6,5%	22,1%
BATU BARA	2,55	22,9	21,4	40,13%	23,80%	18,5%	8,2%	26,7%
DAIRI	3,15	29,4	24,5	36,31%	76,70%	22,8%	7,1%	29,9%
DELI SERDANG	2,28	19,6	22,3	53,51%	25,78%	15,4%	4,4%	19,9%
HUMBANG HASUNDUTAN	3,17	13,8	24,7	39,07%	78,69%	17,3%	6,4%	23,6%
KARO	2,35	46,0	22,5	41,50%	41,75%	22,5%	7,9%	30,4%
KOTA BINJAI	2,14	10,3	22,9	61,87%	27,67%	9,8%	2,7%	12,4%
KOTA GUNUNGSITOLI	2,72	17,9	24,2	35,29%	68,60%	24,6%	3,1%	27,7%
KOTA MEDAN	1,90	11,0	24,5	49,23%	28,92%	16,0%	3,9%	19,9%
KOTA PADANG SIDEMPUAN	2,47	13,2	23,3	49,09%	39,66%	16,9%	6,5%	23,4%
KOTA PEMATANG SIANTAR	2,13	11,6	24,8	52,28%	39,08%	17,7%	3,9%	21,5%
KOTA SIBOLGA	2,29	18,7	24,1	44,84%	66,22%	16,7%	6,2%	22,9%
KOTA TANJUNG BALAI	2,37	25,2	22,4	54,52%	16,13%	11,0%	4,4%	15,3%
KOTA TEBING TINGGI	2,2	19,4	23,4	52,35%	30,69%	15,4%	4,4%	19,8%
LABUHANBATU	2,47	15,0	21,4	47,45%	25,19%	17,2%	7,5%	24,7%
LABUHANBATU SELATAN	2,76	44,6	21,3	40,66%	13,78%	21,7%	9,0%	30,7%
LABUHANBATU UTARA	2,67	20,8	21,3	52,64%	31,55%	13,6%	6,3%	19,9%
LANGKAT	2,45	32,8	21,2	53,97%	17,04%	15,4%	4,6%	20,0%
MANDAILING NATAL	3,04	35,1	21,8	43,53%	14,75%	17,2%	9,7%	26,9%
NIAS	3,18	23,3	22,6	29,36%	30,79%	25,9%	9,2%	35,1%
NIAS BARAT	3,42	46,7	23,5	36,88%	61,08%	20,4%	4,7%	25,1%
NIAS SELATAN	3,18	26,9	22,2	19,13%	20,07%	23,5%	5,8%	29,2%
NIAS UTARA	3,2	25,8	22,8	29,02%	36,13%	27,3%	6,7%	34,0%
PADANG LAWAS	3,19	43,2	21,1	40,68%	30,60%	17,2%	10,2%	27,4%

Kab/Kota	TFR	ASFR 15-19	MUKP	mCPR	MKJP	Unmet Need		
						Limiting	Spacing	Total
PADANG LAWAS UTARA	3,07	31,7	21,8	49,26%	31,01%	16,7%	8,3%	25,0%
PAKPAK BHARAT	3,26	32,3	23,9	42,85%	72,81%	19,2%	9,9%	29,2%
SAMOSIR	2,98	14,1	25,1	34,56%	87,53%	18,3%	4,3%	22,6%
SERDANG BEDAGAI	2,42	34,5	21,4	49,73%	25,46%	17,9%	5,0%	22,8%
SIMALUNGUN	2,45	13,4	22,3	46,84%	29,91%	21,9%	5,4%	27,4%
TAPANULI SELATAN	2,77	24,4	21,8	54,93%	38,51%	12,9%	5,0%	17,9%
TAPANULI TENGAH	2,92	21,5	23,2	41,06%	46,81%	17,7%	7,8%	25,5%
TAPANULI UTARA	2,87	21,7	24,8	36,31%	73,93%	22,6%	7,8%	30,4%
TOBA	2,97	19,3	25,0	33,72%	75,70%	22,2%	9,1%	31,3%
Provinsi	**2,21**	**42,8**	**22,6**	**47,2%**	**30,2%**	**17,4%**	**5,8%**	**23,2%**

Angka iBangga beserta Dimensi-Dimensinya Tingkat Kabupaten/Kota

Kabupaten/Kota	Dimensi			iBangga
	Dimensi Ketentraman	Dimensi Kemandirian	Dimensi Kebahagiaan	
ASAHAN	53,65	53,99	59,86	55,83
BATU BARA	51,98	51,27	56,57	53,27
DAIRI	50,77	53,10	46,97	50,28
DELI SERDANG	51,69	54,22	60,38	55,43
HUMBANG HASUNDUTAN	52,87	54,32	51,09	52,76
KARO	52,36	52,71	57,61	54,23
KOTA BINJAI	54,47	55,62	59,67	56,59
KOTA GUNUNGSITOLI	60,93	50,20	56,31	55,81
KOTA MEDAN	58,63	53,99	54,55	55,73
KOTA PADANG SIDEMPUAN	55,91	53,71	59,00	56,21
KOTA PEMATANG SIANTAR	55,93	54,21	55,53	55,22
KOTA SIBOLGA	56,29	55,26	63,17	58,24

Kabupaten/Kota	Dimensi			iBangga
	Dimensi Ketentraman	Dimensi Kemandirian	Dimensi Kebahagiaan	
KOTA TANJUNG BALAI	55,74	52,78	56,14	54,89
KOTA TEBING TINGGI	58,05	54,24	54,02	55,43
LABUHAN BATU	53,06	53,36	58,44	54,95
LABUHAN BATU SELATAN	54,08	53,78	58,82	55,56
LABUHAN BATU UTARA	53,48	53,99	59,20	55,55
LANGKAT	50,69	52,51	57,51	53,57
MANDAILING NATAL	50,93	48,55	56,54	52,01
NIAS	57,85	38,69	52,81	49,78
NIAS BARAT	59,88	41,71	60,03	53,87
NIAS SELATAN	44,01	37,57	43,09	41,56
NIAS UTARA	56,73	43,80	52,32	50,95
PADANG LAWAS	53,63	52,87	59,25	55,25
PADANG LAWAS UTARA	52,50	50,88	56,47	53,28
PAKPAK BHARAT	60,63	52,80	49,38	54,27
SAMOSIR	56,66	51,82	48,23	52,24
SERDANG BEDAGAI	51,73	53,60	59,51	54,95
SIMALUNGUN	54,01	53,88	58,23	55,37
TAPANULI SELATAN	52,53	51,40	59,39	54,44
TAPANULI TENGAH	51,38	50,94	61,68	54,67
TAPANULI UTARA	54,70	52,22	52,99	53,31
TOBA	55,98	53,53	50,06	53,19
Provinsi	**61,79**	**52,65**	**56,49**	**56,98**

PARAMETER PROGRAM BANGGA KENCANA PROVINSI SUMATERA BARAT

Angka TFR, ASFR 15-19 Tahun, MUKP, mCPR, MKJP dan Unmetneed Tingkat Kabupaten/Kota

Kab/Kota	TFR	ASFR 15-19	MUKP	mCPR	MKJP	Unmet Need		
						Limiting	Spacing	Total
AGAM	2,55	10,0	23,2	46,41%	30,05%	16,4%	8,7%	25,1%
DHARMASRAYA	2,40	33,5	20,6	65,40%	26,25%	8,7%	4,7%	13,4%
KEPULAUAN MENTAWAI	2,80	50,7	20,8	36,27%	35,52%	19,4%	15,5%	34,9%
KOTA BUKITTINGGI	2,36	4,2	24,4	53,31%	42,68%	13,9%	6,0%	19,9%
KOTA PADANG	2,27	4,0	24,4	55,92%	34,01%	11,3%	4,4%	15,7%
KOTA PADANG PANJANG	2,51	7,8	24,3	49,86%	63,93%	16,9%	6,5%	23,4%
KOTA PARIAMAN	2,43	6,2	24,8	54,15%	32,31%	7,9%	8,4%	16,3%
KOTA PAYAKUMBUH	2,40	14,0	23,4	50,76%	38,32%	15,7%	5,8%	21,5%
KOTA SAWAHLUNTO	2,41	22,0	22,8	61,49%	39,49%	10,5%	4,5%	15,0%
KOTA SOLOK	2,45	17,0	23,5	61,60%	49,98%	7,0%	3,5%	10,4%
LIMA PULUH KOTA	2,45	19,2	21,6	56,93%	29,80%	13,7%	4,9%	18,6%
PADANG PARIAMAN	2,54	17,7	23,0	37,53%	25,35%	17,1%	12,4%	29,6%
PASAMAN	2,60	21,8	21,7	53,50%	25,60%	12,8%	7,1%	19,9%
PASAMAN BARAT	2,51	12,0	21,1	50,81%	24,62%	13,1%	8,1%	21,2%
PESISIR SELATAN	2,56	17,7	21,3	58,40%	21,85%	8,8%	4,7%	13,5%
SIJUNJUNG	2,51	31,6	19,8	67,45%	24,57%	7,4%	4,1%	11,5%
SOLOK	2,39	16,8	21,5	61,23%	35,57%	10,1%	5,8%	15,8%
SOLOK SELATAN	2,60	31,7	21,1	56,40%	19,44%	10,7%	5,6%	16,2%
TANAH DATAR	2,41	10,7	23,0	59,32%	36,66%	11,1%	4,4%	15,5%
Provinsi	**2,46**	**14,17**	**22,5**	**54,8%**	**29,77%**	**12,1%**	**6,3%**	**18,4%**

** Relative Standard Error (RSE) ≥ 25% sehingga estimasi level kabupaten/kota tidak bisa digunakan*

Angka iBangga beserta Dimensi-Dimensinya Tingkat Kabupaten/Kota

Kabupaten/Kota	Dimensi			iBangga
	Dimensi Ketenteraman	Dimensi Kemandirian	Dimensi Kebahagiaan	
AGAM	54,80	52,69	55,05	54,18
DHARMASRAYA	53,41	54,46	57,51	55,13
KEPULAUAN MENTAWAI	54,47	45,07	54,95	51,50
KOTA BUKITTINGGI	60,03	56,30	59,95	58,76
KOTA PADANG	55,23	54,10	60,03	56,45
KOTA PADANG PANJANG	63,91	55,16	60,66	59,91
KOTA PARIAMAN	58,89	53,89	62,18	58,32
KOTA PAYAKUMBUH	55,85	56,33	60,93	57,71
KOTA SAWAHLUNTO	58,40	55,82	59,08	57,77
KOTA SOLOK	56,33	56,11	61,06	57,84
LIMA PULUH KOTA	53,24	53,66	58,36	55,08
PADANG PARIAMAN	53,82	50,55	52,42	52,26
PASAMAN	54,58	52,34	56,11	54,34
PASAMAN BARAT	54,62	53,74	57,92	55,42
PESISIR SELATAN	54,15	52,08	59,76	55,33
SIJUNJUNG	52,13	52,91	56,81	53,95
SOLOK	54,76	52,17	58,37	55,10
SOLOK SELATAN	54,42	52,39	53,72	53,51
TANAH DATAR	54,57	54,02	57,99	55,53
Provinsi	**58,63**	**53,18**	**56,56**	**56,12**

PROGRAM BANGGA KENCANA PROVINSI RIAU

Angka TFR, ASFR 15-19 Tahun, MUKP, mCPR, MKJP dan Unmetneed Tingkat Kabupaten/Kota

Kab/Kota	TFR	ASFR 15-19	MUKP	mCPR	MKJP	Unmet Need		
						Limiting	Spacing	Total
BENGKALIS	2,62	20,6	22,1	60,8%	17,7%	11,2%	4,3%	15,5%
INDRAGIRI HILIR	2,28	59,4	20,2	51,9%	3,6%	11,9%	6,6%	18,4%
INDRAGIRI HULU	2,24	29,2	20,5	65,9%	19,7%	7,7%	2,9%	10,6%
KAMPAR	2,33	26,2	21,3	53,5%	17,1%	14,4%	6,3%	20,7%
KEPULAUAN MERANTI	2,22	11,5	22,5	48,3%	13,9%	14,3%	7,7%	22,1%
KOTA DUMAI	2,19	15,4	22,1	60,0%	17,4%	10,3%	4,8%	15,1%
KOTA PEKANBARU	2,09	13	23,7	64,8%	19,5%	8,7%	2,3%	11,1%
KUANTAN SINGINGI	2,27	23,7	20,6	62,0%	18,0%	9,0%	4,4%	13,4%
PELALAWAN	2,28	23,5	21,2	59,9%	23,6%	9,3%	4,4%	13,7%
ROKAN HILIR	2,33	24,9	20,7	42,4%	18,1%	20,8%	8,2%	29,0%
ROKAN HULU	2,27	44,2	20,5	50,0%	15,8%	15,4%	5,8%	21,1%
SIAK	2,31	16,1	21,5	52,2%	21,9%	11,7%	5,6%	17,3%
Provinsi	**2,28**	**25,51**	**21,5**	**55,9%**	**17,27%**	**12,3%**	**5,2%**	**17,4%**

Angka iBangga beserta Dimensi-Dimensinya Tingkat kabupaten/kota

Kabupaten/Kota	Dimensi			iBangga
	Dimensi Ketentraman	Dimensi Kemandirian	Dimensi Kebahagiaan	
BENGKALIS	54,39	51,78	62,03	56,07
INDRAGIRI HILIR	50,20	47,27	56,80	51,42
INDRAGIRI HULU	51,08	53,41	64,55	56,35
KAMPAR	55,01	53,28	62,38	56,89
KEPULAUAN MERANTI	51,60	47,48	57,23	52,11
KOTA DUMAI	55,60	54,30	64,30	58,07
KOTA PEKANBARU	55,65	53,98	60,89	56,84
KUANTAN SINGINGI	53,87	54,11	65,57	57,85
PELALAWAN	55,94	53,48	64,53	57,98
ROKAN HILIR	52,58	50,05	58,38	53,67
ROKAN HULU	53,60	53,06	63,24	56,63
SIAK	54,94	54,52	63,86	57,77
Provinsi	**57,32**	**52,38**	**60,52**	**56,74**

PARAMETER PROGRAM BANGGA KENCANA PROVINSI JAMBI

Angka TFR, ASFR 15-19 Tahun, MUKP, mCPR, MKJP dan Unmet Need Tingkat Kabupaten/Kota

Kab/Kota	TFR	ASFR 15-19	MUKP	mCPR	MKJP	Unmet Need		
						Limiting	Spacing	Total
BATANGHARI	2,27	50,1	20,0	65,92%	17,11%	7,6%	2,8%	10,4%
BUNGO	2,23	38,6	19,5	63,48%	15,23%	8,8%	4,0%	12,7%
KERINCI	2,20	47,2	19,3	71,75%	28,32%	5,2%	1,4%	6,6%
KOTA JAMBI	2,08	17,5	23,7	55,95%	17,63%	13,1%	3,5%	16,6%
KOTA SUNGAI PENUH	2,19	17,4	21,4	63,40%	36,20%	6,9%	2,4%	9,3%
MERANGIN	2,18	40,6	19,4	72,26%	17,23%	5,1%	2,1%	7,2%
MUARO JAMBI	2,19	21,7	20,4	64,42%	11,18%	8,1%	3,5%	11,6%
SAROLANGUN	2,64	62,1	19,7	64,75%	17,98%	7,8%	2,8%	10,6%
TANJUNG JABUNG BARAT	2,39	50,8	19,9	60,48%	11,67%	10,2%	4,9%	15,0%
TANJUNG JABUNG TIMUR	2,36	63	19,9	64,82%	14,26%	7,3%	4,0%	11,2%
TEBO	2,45	46,8	19,6	69,62%	15,91%	6,9%	3,0%	9,9%
Provinsi	**2,28**	**50,47**	**20,2**	**64,9%**	**16,71%**	**8,2%**	**3,2%**	**11,5%**

Angka iBangga beserta Dimensi-Dimensinya Tingkat Kabupaten/Kota

Kabupaten/Kota	Dimensi			iBangga
	Dimensi Ketentraman	Dimensi Kemandirian	Dimensi Kebahagiaan	
BATANGHARI	56,53	53,17	61,85	57,18
BUNGO	55,99	51,47	60,00	55,82
KERINCI	52,69	51,35	59,74	54,59
KOTA JAMBI	59,47	54,49	61,23	58,40
KOTA SUNGAI PENUH	57,96	51,77	57,44	55,72
MERANGIN	54,52	52,58	61,72	56,27
MUARO JAMBI	57,73	53,38	60,08	57,06
SAROLANGUN	55,18	52,16	57,48	54,94
TANJUNG JABUNG BARAT	55,95	51,45	60,07	55,83
TANJUNG JABUNG TIMUR	54,96	51,48	60,24	55,56
TEBO	54,75	53,18	61,14	56,36
Provinsi	**57,61**	**52,66**	**59,74**	**56,67**

PARAMETER PROGRAM BANGGA KENCANA PROVINSI SUMATERA SELATAN

Angka TFR, ASFR 15-19 Tahun, MUKP, mCPR, MKJP dan Unmet Need Tingkat Kabupaten/Kota

Kab/Kota	TFR	ASFR 15-19	MUKP	mCPR	MKJP	Unmet Need		
						Limiting	Spacing	Total
BANYUASIN	2,23	29,1	19,8	65,99%	17,15%	9,0%	3,3%	12,3%
EMPAT LAWANG	2,34	47,3	19,8	70,26%	25,30%	7,2%	2,4%	9,6%
KOTA LUBUK LINGGAU	2,23	21,4	21,5	61,96%	19,88%	9,8%	3,7%	13,5%
KOTA PAGAR ALAM	2,30	35,3	21,6	66,32%	22,85%	9,1%	3,8%	12,9%
KOTA PALEMBANG	2,10	14,9	24,0	40,44%	18,40%	22,6%	6,9%	29,5%
KOTA PRABUMULIH	2,20	18,5	21,2	59,52%	28,97%	12,7%	3,7%	16,4%
LAHAT	2,28	34,9	21,2	69,76%	18,13%	7,0%	2,1%	9,1%
MUARA ENIM	2,24	27,1	20,4	64,39%	21,88%	9,5%	4,1%	13,6%
MUSI BANYUASIN	2,31	38,6	19,7	65,63%	22,18%	8,0%	2,8%	10,8%
MUSI RAWAS	2,26	51	19,4	72,66%	28,32%	6,3%	2,0%	8,2%
MUSI RAWAS UTARA	2,28	73,4	19,5	69,22%	29,33%	7,4%	2,5%	9,9%
OGAN ILIR	2,23	16	21,4	64,94%	12,98%	7,7%	2,9%	10,7%
OGAN KOMERING ILIR	2,28	48,9	19,5	67,85%	20,85%	7,7%	2,6%	10,3%
OGAN KOMERING ULU	2,31	27	21,1	63,62%	22,64%	10,4%	2,6%	13,0%
OGAN KOMERING ULU SELATAN	2,27	43,8	20,1	67,10%	28,11%	7,7%	3,0%	10,6%
OGAN KOMERING ULU TIMUR	2,20	33,8	20,0	65,94%	23,81%	8,6%	2,6%	11,1%
PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR	2,29	45,4	19,5	72,35%	34,30%	5,1%	2,0%	7,1%
Provinsi	**2,23**	**36,5**	**20,6**	**64,3%**	**21,76%**	**10,5%**	**3,5%**	**14,0%**

Angka iBangga beserta Dimensi-Dimensinya Tingkat Kabupaten/Kota

Kabupaten/Kota	Dimensi			iBangga
	Dimensi Ketentraman	Dimensi Kemandirian	Dimensi Kebahagiaan	
BANYUASIN	54,34	51,80	59,89	55,34
EMPAT LAWANG	53,05	52,24	53,97	53,09
KOTA LUBUK LINGGAU	58,19	55,69	61,43	58,44
KOTA PAGAR ALAM	55,27	55,66	63,71	58,21
KOTA PALEMBANG	55,42	55,38	57,88	56,23
KOTA PRABUMULIH	56,16	55,81	60,09	57,35
LAHAT	54,69	55,83	63,27	57,93
MUARA ENIM	54,26	54,88	60,41	56,52
MUSI BANYUASIN	53,85	53,14	60,28	55,76
MUSI RAWAS	54,68	54,13	62,34	57,05
MUSI RAWAS UTARA	54,23	51,64	59,13	55,00
OGAN ILIR	53,72	52,05	57,85	54,54
OGAN KOMERING ILIR	50,72	52,84	58,08	53,88
OGAN KOMERING ULU	55,67	53,49	60,18	56,45
OGAN KOMERING ULU SELATAN	54,81	53,39	59,66	55,95
OGAN KOMERING ULU TIMUR	53,54	54,44	58,75	55,57
PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR	56,25	54,86	61,56	57,56
Provinsi	**57,02**	**53,63**	**58,22**	**56,29**

PARAMETER PROGRAM BANGGA KENCANA PROVINSI BENGKULU

Angka TFR, ASFR 15-19 Tahun, MUKP, mCPR, MKJP dan Unmet Need Tingkat Kabupaten/Kota

Kab/Kota	TFR	ASFR 15-19	MUKP	mCPR	MKJP	Unmet Need		
						Limiting	Spacing	Total
BENGKULU SELATAN	2,38	45,8	21,0	66,89%	29,60%	12,4%	3,1%	15,5%
BENGKULU TENGAH	2,35	29,7	19,9	67,86%	24,28%	7,5%	2,9%	10,4%
BENGKULU UTARA	2,35	29,7	19,9	66,55%	26,51%	8,3%	2,7%	11,0%
KAUR	2,47	51,7	20,1	68,84%	20,30%	9,4%	2,1%	11,5%
KEPAHIANG	2,18	29,8	19,9	65,04%	21,68%	10,2%	4,7%	14,9%
KOTA BENGKULU	2,15	10,2	23,1	53,90%	26,07%	13,5%	4,1%	17,6%
LEBONG	2,42	51,8	19,9	75,08%	10,96%	4,3%	1,3%	5,6%
MUKO MUKO	2,32	31,8	19,7	66,35%	27,33%	5,6%	3,4%	9,0%
REJANG LEBONG	2,16	28,5	20,1	71,45%	20,27%	6,9%	2,4%	9,2%
SELUMA	2,44	54,6	19,6	74,98%	18,64%	5,8%	2,2%	7,9%
Provinsi	**2,3**	**38,17**	**20,5**	**66,4%**	**22,93%**	**8,8%**	**3,0%**	**12,2%**

Angka iBangga beserta Dimensi-Dimensinya Tingkat Kabupaten/Kota

Kabupaten/Kota	Dimensi			iBangga
	Dimensi Ketentraman	Dimensi Kemandirian	Dimensi Kebahagiaan	
BENGKULU SELATAN	55,72	53,20	58,45	55,79
BENGKULU TENGAH	54,80	53,80	61,35	56,65
BENGKULU UTARA	54,78	54,00	61,35	56,71
KAUR	53,84	50,32	60,02	54,72
KEPAHIANG	57,23	52,85	61,26	57,12
KOTA BENGKULU	60,20	54,93	62,05	59,06
LEBONG	54,21	51,39	61,27	55,62
MUKO MUKO	57,40	54,53	62,01	57,98
REJANG LEBONG	57,08	52,99	61,86	57,31
SELUMA	55,76	53,33	59,06	56,05
Provinsi	**59,30**	**52,81**	**60,41**	**57,51**

PARAMETER PROGRAM BANGGA KENCANA PROVINSI LAMPUNG

Angka TFR, ASFR 15-19 Tahun, MUKP, mCPR, MKJP dan Unmet Need Tingkat Kabupaten/Kota

Kab/Kota	TFR	ASFR 15-19	MUKP	mCPR	MKJP	Unmet Need		
						Limiting	Spacing	Total
LAMPUNG SELATAN	2,33	29,6	20,1	65,89%	17,91%	9,1%	3,1%	12,1%
LAMPUNG TENGAH	2,19	30,8	20,4	66,28%	20,01%	8,8%	3,5%	12,3%
LAMPUNG UTARA	2,31	27,1	20,2	65,37%	19,12%	8,9%	4,2%	13,2%
KOTA BANDAR LAMPUNG	2,19	9,8	22,9	59,20%	25,81%	13,6%	3,8%	17,5%
LAMPUNG BARAT	2,51	49,2	19,9	74,23%	22,77%	6,1%	2,9%	9,0%
TULANG BAWANG	2,26	37,4	19,8	67,00%	21,91%	8,1%	3,3%	11,5%
TANGGAMUS	2,37	21,9	20,5	62,25%	19,94%	9,7%	4,1%	13,7%
KOTA METRO	2,10	10,6	22,9	59,73%	32,09%	11,4%	3,3%	14,8%
LAMPUNG TIMUR	2,28	48,0	20,4	62,60%	19,81%	9,4%	2,8%	12,2%
WAY KANAN	2,32	34,2	19,8	66,82%	20,75%	9,4%	2,5%	11,9%
PESAWARAN	2,29	21,6	20,7	67,55%	18,53%	7,6%	2,9%	10,5%
PRINGSEWU	2,29	19,6	21,4	59,14%	25,45%	12,2%	4,3%	16,5%
MESUJI	2,31	50,3	20,0	64,94%	25,80%	8,7%	3,7%	12,5%
TULANG BAWANG BARAT	2,24	33,2	19,8	68,51%	18,00%	6,9%	4,0%	11,0%
PESISIR BARAT	2,58	38,6	20,6	57,97%	36,47%	8,5%	4,2%	12,7%
Provinsi	**2,28**	**34,5**	**20,6**	**64,5%**	**21,09%**	**9,5%**	**3,4%**	**12,9%**

Angka iBangga beserta Dimensi-Dimensinya Tingkat Kabupaten/Kota

Kabupaten/Kota	Dimensi			iBangga
	Dimensi Ketenteraman	Dimensi Kemandirian	Dimensi Kebahagiaan	
LAMPUNG SELATAN	54,08	52,50	61,19	55,92
LAMPUNG TENGAH	54,34	52,68	56,82	54,61
LAMPUNG UTARA	55,79	52,76	57,15	55,24
KOTA BANDAR LAMPUNG	56,36	54,46	62,36	57,73
LAMPUNG BARAT	55,10	52,33	60,05	55,82
TULANG BAWANG	55,04	52,63	58,72	55,46
TANGGAMUS	52,85	51,65	58,36	54,29
KOTA METRO	58,27	55,17	58,52	57,32
LAMPUNG TIMUR	53,81	53,63	58,61	55,35
WAY KANAN	55,38	52,86	60,08	56,11
PESAWARAN	54,71	51,91	60,32	55,64
PRINGSEWU	52,98	52,88	56,98	54,28
MESUJI	54,84	52,78	58,82	55,48
TULANG BAWANG BARAT	54,29	53,63	59,62	55,85
PESISIR BARAT	55,55	49,54	62,28	55,79
Provinsi	**56,67**	**52,61**	**58,03**	**55,77**

PARAMETER PROGRAM BANGGA KENCANA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Angka TFR, ASFR 15-19 Tahun, MUKP, mCPR, MKJP dan Unmetneed Tingkat Kabupaten/Kota

Kab/Kota	TFR	ASFR 15-19	MUKP	mCPR	MKJP	Unmet Need		
						Limiting	Spacing	Total
BANGKA	2,34	42,5	20,7	65,6%	15,5%	10,1%	3,2%	13,3%
BANGKA BARAT	2,33	56,2	20,0	65,2%	13,9%	12,2%	3,2%	15,4%
BANGKA SELATAN	2,15	52,1	19,0	76,2%	10,5%	4,5%	1,6%	6,1%
BANGKA TENGAH	2,32	36,9	20,1	68,2%	15,7%	8,8%	2,5%	11,2%
BELITUNG	2,13	34,7	20,1	70,7%	13,8%	7,4%	1,9%	9,3%
BELITUNG TIMUR	2,11	47,97	19,9	72,4%	15,4%	6,7%	1,8%	8,5%
KOTA PANGKAL PINANG	2,26	15,55	22,5	51,3%	24,1%	13,9%	5,0%	18,9%
Provinsi	**2,24**	**36,99**	**20,3**	**66,8%**	**14,98%**	**9,3%**	**2,8%**	**12,1%**

** Relative Standard Error (RSE) ≥ 25% sehingga estimasi level kabupaten/kota tidak bisa digunakan*

Angka iBangga beserta Dimensi-Dimensinya Tingkat Kabupaten/Kota

Kabupaten/Kota	Dimensi			iBangga
	Dimensi Ketenteraman	Dimensi Kemandirian	Dimensi Kebahagiaan	
BANGKA	55,07	52,49	60,19	55,91
BANGKA BARAT	57,26	52,56	61,07	56,96
BANGKA SELATAN	53,76	51,68	60,65	55,37
BANGKA TENGAH	56,55	53,03	61,69	57,09
BELITUNG	57,52	51,64	57,92	55,69
BELITUNG TIMUR	63,96	51,52	60,59	58,69
KOTA PANGKAL PINANG	59,16	52,69	60,01	57,29
Provinsi	59,79	52,30	58,62	56,90

PARAMETER PROGRAM BANGGA KENCANA PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Angka TFR, ASFR 15-19 Tahun, MUKP, mCPR, MKJP dan Unmetneed Tingkat Kabupaten/Kota

Kab/Kota	TFR	ASFR 15-19	MUKP	mCPR	MKJP	Unmet Need		
						Limiting	Spacing	Total
BINTAN	2,25	17,4	22,6	47,7%	23,5%	18,1%	5,8%	23,9%
KARIMUN	2,28	26,71	22,6	46,2%	23,0%	17,6%	5,5%	23,1%
KEPULAUAN ANAMBAS	2,45	37,8	21,3	64,4%	22,6%	8,1%	2,0%	10,1%
KOTA BATAM	2,16	6,5	23,8	31,8%	30,5%	20,1%	8,8%	28,9%
KOTA TANJUNG PINANG	2,08	9,1	23,6	49,2%	30,4%	16,7%	4,2%	20,9%
LINGGA	2,27	27,7	21,5	65,5%	12,8%	8,5%	2,9%	11,5%
NATUNA	2,43	50,3	20,8	61,7%	20,7%	9,2%	3,4%	12,6%
Provinsi	**2,21**	**12,99**	**23,5**	**37,2%**	**27,59%**	**18,8%**	**7,7%**	**26,5%**

** Relative Standard Error (RSE) ≥ 25% sehingga estimasi level kabupaten/kota tidak bisa digunakan*

Angka iBangga beserta Dimensi-Dimensinya Tingkat Kabupaten/Kota

Kabupaten/Kota	Dimensi			iBangga
	Dimensi Ketenteraman	Dimensi Kemandirian	Dimensi Kebahagiaan	
BINTAN	58,01	53,81	65,35	59,06
KARIMUN	56,88	51,89	62,71	57,16
KEPULAUAN ANAMBAS	57,77	50,97	61,82	56,86
KOTA BATAM	59,92	54,09	65,29	59,76
KOTA TANJUNG PINANG	60,15	53,15	58,52	57,27
LINGGA	56,61	49,00	59,24	54,95
NATUNA	57,67	50,74	60,52	56,31
Provinsi	61,88	53,49	62,79	59,39

PARAMETER PROGRAM BANGGA KENCANA PROVINSI DKI JAKARTA

Angka TFR dan ASFR 15-19 Tahun Tingkat Kabupaten/Kota

Kab/Kota	TFR	ASFR 15-19
JAKARTA PUSAT	1,54	6,9
JAKARTA SELATAN	1,65	6,9
JAKARTA TIMUR	1,77	4,1
JAKARTA BARAT	1,80	7,9
JAKARTA UTARA	1,87	11,5
KEPULAUAN SERIBU	2,16	8,0
Provinsi	**1,75**	**7,9**

PARAMETER PROGRAM BANGGA KENCANA PROVINSI JAWA BARAT

Angka TFR, ASFR 15-19 Tahun, MUKP, mCPR, MKJP dan Unmetneed Tingkat Kabupaten/Kota

Kab/Kota	TFR	ASFR 15-19	MUKP	mCPR	MKJP	Unmet Need		
						Limiting	Spacing	Total
BEKASI	1,97	10,0	21,1	55,29%	16,67%	12,7%	4,8%	17,5%
KARAWANG	2,05	20,9	19,4	62,72%	10,87%	8,6%	3,6%	12,2%
PURWAKARTA	2,35	25,7	19,2	66,03%	19,10%	7,3%	3,3%	10,6%
BOGOR	2,02	25,0	19,8	63,91%	11,12%	9,8%	4,0%	13,9%
SUKABUMI	2,12	32,0	18,9	69,25%	15,65%	6,0%	3,0%	9,0%
CIANJUR	2,31	32,3	18,3	64,51%	12,75%	7,4%	3,6%	11,0%
BANDUNG	2,09	27,0	19,5	72,92%	22,07%	6,1%	2,2%	8,4%
BANDUNG BARAT	2,24	33,3	18,6	72,33%	19,16%	5,7%	2,2%	7,8%
SUMEDANG	2,06	30,5	19,2	75,38%	20,70%	5,4%	1,3%	6,7%
GARUT	2,45	36,3	19,1	67,73%	26,08%	6,3%	3,2%	9,5%
TASIKMALAYA	2,25	29,1	19,0	68,48%	13,31%	8,1%	2,5%	10,6%
CIAMIS	2,23	18,8	19,4	68,57%	19,95%	6,9%	2,1%	9,0%
CIREBON	2,19	19,9	20,4	58,19%	12,85%	8,7%	4,4%	13,1%
KUNINGAN	2,26	15,7	20,2	64,70%	25,05%	8,4%	3,1%	11,5%
INDRAMAYU	2,11	28,1	19,8	59,35%	13,60%	7,6%	3,8%	11,4%
MAJALENGKA	2,17	20,0	19,3	67,96%	13,56%	6,2%	1,9%	8,2%
SUBANG	2,15	43,7	18,9	66,49%	15,01%	7,4%	2,3%	9,6%
KOTA BANDUNG	1,83	10,3	22,8	60,57%	37,74%	13,0%	3,7%	16,8%
KOTA CIREBON	2,03	11,5	22,6	49,41%	32,36%	16,7%	5,1%	21,9%
KOTA BOGOR	1,87	9,3	22,4	56,04%	21,11%	15,4%	4,3%	19,7%
KOTA SUKABUMI	2,16	13,1	21,2	60,09%	25,94%	11,8%	4,2%	16,0%
KOTA BEKASI	1,85	6,0	23,1	50,24%	20,30%	16,0%	4,9%	20,9%
KOTA DEPOK	1,99	9,2	23,3	51,17%	27,50%	15,1%	4,4%	19,6%
KOTA CIMAHI	2,05	12,5	22,4	63,23%	37,52%	10,7%	3,5%	14,2%

Kab/Kota	TFR	ASFR 15-19	MUKP	mCPR	MKJP	Unmet Need		
						Limiting	Spacing	Total
KOTA TASIKMALAYA	2,19	12,8	20,5	62,81%	29,21%	9,5%	3,5%	12,9%
KOTA BANJAR	2,23	19,7	20,1	68,13%	25,61%	5,2%	2,2%	7,4%
PANGANDARAN	2,22	58,2	19,1	66,51%	16,76%	8,4%	2,8%	11,2%
Provinsi	**2,11**	**24,5**	**19,9**	**63,0%**	**18,29%**	**9,5%**	**3,5%**	**13,0%**

Angka iBangga beserta Dimensi-Dimensinya Tingkat Kabupaten/Kota

Kabupaten/Kota	Dimensi			iBangga
	Dimensi Ketenteraman	Dimensi Kemandirian	Dimensi Kebahagiaan	
BEKASI	56,93	56,16	62,40	58,50
KARAWANG	54,52	53,09	59,35	55,66
PURWAKARTA	53,46	54,17	60,39	56,01
BOGOR	52,79	54,11	59,45	55,45
SUKABUMI	53,87	52,17	58,18	54,74
CIANJUR	51,71	50,76	56,87	53,11
BANDUNG	55,74	52,60	55,98	54,77
BANDUNG BARAT	52,84	52,53	56,31	53,89
SUMEDANG	56,35	54,41	58,40	56,39
GARUT	53,42	51,19	56,75	53,79
TASIKMALAYA	56,34	52,91	59,42	56,22
CIAMIS	54,68	53,62	58,12	55,47
CIREBON	56,10	54,67	60,48	57,08
KUNINGAN	59,16	55,26	58,93	57,78
INDRAMAYU	55,19	53,25	60,28	56,24
MAJALENGKA	57,18	54,18	57,91	56,42
SUBANG	54,93	53,21	57,87	55,34

Kabupaten/Kota	Dimensi			iBangga
	Dimensi Ketenteraman	Dimensi Kemandirian	Dimensi Kebahagiaan	
KOTA BANDUNG	58,15	54,89	56,59	56,54
KOTA CIREBON	60,61	54,05	51,64	55,43
KOTA BOGOR	59,82	54,91	57,57	57,43
KOTA SUKABUMI	61,03	54,06	54,59	56,56
KOTA BEKASI	59,91	57,04	60,25	59,07
KOTA DEPOK	62,07	56,86	58,14	59,02
KOTA CIMAHI	60,41	55,44	54,65	56,83
KOTA TASIKMALAYA	60,08	54,54	56,01	56,87
KOTA BANJAR	59,18	54,47	56,40	56,68
PANGANDARAN	55,72	54,25	61,05	57,00
Provinsi	**59,21**	**54,01**	**60,40**	**57,87**

PARAMETER PROGRAM BANGGA KENCANA PROVINSI JAWA TENGAH

Angka TFR, ASFR 15-19 Tahun, MUKP, mCPR, MKJP dan Unmet Need Tingkat Kabupaten/Kota

Kab/Kota	TFR	ASFR 15-19	MUKP	mCPR	MKJP	Unmet Need		
						Limiting	Spacing	Total
BANJARNEGARA	2,25	43,6	19,6	72,90%	31,74%	5,5%	1,6%	7,1%
BANYUMAS	2,17	20,4	21,2	61,45%	44,23%	10,0%	2,6%	12,7%
BATANG	2,15	27,8	19,8	69,76%	24,03%	5,0%	2,1%	7,0%
BLORA	2,03	34,3	19,5	75,29%	21,79%	6,0%	1,2%	7,2%
BOYOLALI	2,15	19,6	21,1	65,52%	29,06%	9,4%	2,8%	12,2%
BREBES	2,12	23,1	19,8	66,87%	22,44%	6,2%	2,3%	8,5%
CILACAP	2,18	19,4	20,9	60,38%	25,02%	8,0%	3,1%	11,1%
DEMAK	2,09	11,9	20,3	68,94%	16,41%	6,6%	2,2%	8,7%
GROBOGAN	2,21	33	19,2	72,31%	12,68%	6,2%	1,8%	8,0%
JEPARA	2,06	22,9	19,8	65,10%	17,80%	8,1%	2,8%	10,9%
KARANGANYAR	1,93	10,9	21,8	60,71%	34,46%	11,2%	3,5%	14,7%
KEBUMEN	2,21	15,7	21,6	60,48%	31,40%	9,7%	3,8%	13,5%
KENDAL	2,03	13,3	21,5	59,71%	19,29%	9,0%	2,9%	11,8%
KLATEN	1,95	11,9	22,8	59,96%	33,93%	11,8%	3,3%	15,1%
KOTA MAGELANG	1,79	10,5	23,8	65,22%	40,96%	9,5%	2,5%	12,1%
KOTA PEKALONGAN	2,25	10,5	22,7	56,88%	22,88%	9,7%	4,3%	14,1%
KOTA SALATIGA	2,06	12,7	23,2	56,44%	47,44%	14,1%	3,0%	17,1%
KOTA SEMARANG	1,79	9,5	23,7	53,38%	33,26%	16,2%	3,5%	19,7%
KOTA SURAKARTA	1,79	9,1	24,1	59,61%	34,15%	7,9%	1,7%	9,7%
KOTA TEGAL	2,22	12,4	22,6	64,97%	27,64%	8,0%	2,7%	10,7%
KUDUS	2,07	12,8	22,0	61,92%	12,57%	9,3%	3,0%	12,3%
MAGELANG	2,11	24,4	21,3	63,84%	34,32%	10,7%	3,6%	14,3%
PATI	1,91	21,6	20,3	67,73%	10,56%	6,3%	1,6%	7,9%
PEKALONGAN	2,25	19,6	21,3	59,92%	18,02%	8,8%	4,6%	13,4%

Kab/Kota	TFR	ASFR 15-19	MUKP	mCPR	MKJP	Unmet Need		
						Limiting	Spacing	Total
PEMALANG	2,23	21,2	20,1	68,47%	15,98%	5,7%	2,1%	7,9%
PURBALINGGA	2,22	27,9	20,2	67,67%	31,65%	6,4%	2,6%	9,0%
PURWOREJO	2,11	17,7	21,9	60,78%	33,68%	12,1%	3,1%	15,2%
REMBANG	2,04	26,4	19,1	73,18%	14,30%	5,3%	1,5%	6,8%
SEMARANG	2,01	18,6	21,3	64,69%	32,06%	9,4%	2,7%	12,1%
SRAGEN	2,05	15,1	21,3	67,23%	28,00%	8,5%	2,2%	10,7%
SUKOHARJO	1,98	13	22,6	69,20%	19,32%	7,4%	2,0%	9,4%
TEGAL	2,21	21,7	21,2	58,95%	21,42%	9,4%	4,1%	13,5%
TEMANGGUNG	2,09	31,1	19,6	74,92%	42,79%	5,7%	1,5%	7,2%
WONOGIRI	1,9	16,4	20,8	71,28%	18,07%	6,9%	2,1%	9,1%
WONOSOBO	2,27	40,3	19,1	72,40%	35,81%	5,4%	1,6%	7,1%
Provinsi	**2,09**	**23,09**	**21,0**	**65,00%**	**25,11%**	**8,4%**	**2,6%**	**11,0%**

Angka iBangga beserta Dimensi-Dimensinya Tingkat Kabupaten/Kota

Kabupaten/Kota	Dimensi			iBangga
	Dimensi Ketentraman	Dimensi Kemandirian	Dimensi Kebahagiaan	
BANJARNEGARA	60,27	53,74	60,70	58,24
BANYUMAS	57,89	53,90	57,69	56,49
BATANG	60,46	54,31	62,82	59,20
BLORA	61,17	53,34	59,59	58,03
BOYOLALI	59,90	54,81	59,94	58,22
BREBES	60,40	53,28	59,65	57,78
CILACAP	56,04	53,88	59,94	56,62
DEMAK	62,22	53,25	60,02	58,50
GROBOGAN	58,22	53,50	61,48	57,74
JEPARA	59,55	54,90	61,79	58,74
KARANGANYAR	61,80	55,34	64,33	60,49
KEBUMEN	60,75	54,85	60,43	58,67
KENDAL	61,53	54,10	61,04	58,89
KLATEN	59,40	55,30	62,50	59,06
KOTA MAGELANG	62,32	54,77	59,38	58,82
KOTA PEKALONGAN	60,83	54,30	62,05	59,06
KOTA SALATIGA	62,52	55,89	59,55	59,32
KOTA SEMARANG	62,37	55,46	62,02	59,95
KOTA SURAKARTA	62,09	55,09	61,73	59,64
KOTA TEGAL	61,21	54,43	59,95	58,53
KUDUS	61,65	55,43	62,73	59,94
MAGELANG	61,55	54,34	58,83	58,24
PATI	60,59	54,34	61,24	58,72
PEKALONGAN	60,78	54,72	62,77	59,42
PEMALANG	59,29	53,88	61,86	58,34
PURBALINGGA	61,41	53,59	57,58	57,53

Kabupaten/Kota	Dimensi			iBangga
	Dimensi Ketentraman	Dimensi Kemandirian	Dimensi Kebahagiaan	
PURWOREJO	60,54	54,20	56,90	57,21
REMBANG	61,03	53,46	58,10	57,53
SEMARANG	61,11	55,01	61,75	59,29
SRAGEN	61,53	54,85	61,93	59,44
SUKOHARJO	61,45	55,81	64,33	60,53
TEGAL	60,38	53,48	59,60	57,82
TEMANGGUNG	61,82	54,29	59,36	58,49
WONOGIRI	58,17	55,08	59,45	57,57
WONOSOBO	61,76	52,93	58,89	57,86
Provinsi	**60,54**	**54,31**	**59,62**	**58,16**

PARAMETER PROGRAM BANGGA KENCANA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Angka TFR, ASFR 15-19 Tahun, MUKP, mCPR, MKJP dan Unmet Need Tingkat Kabupaten/Kota

Kab/Kota	TFR	ASFR 15-19	MUKP	mCPR	MKJP	Unmet Need		
						Limiting	Spacing	Total
BANTUL	1,90	11,6	23,3	55,61%	39,93%	13,7%	3,6%	17,2%
GUNUNG KIDUL	1,96	25,3	20,7	64,58%	39,03%	10,8%	3,2%	13,9%
KOTA YOGYAKARTA	1,67	6,7	24,7	51,98%	47,63%	16,9%	3,7%	20,5%
KULON PROGO	2,02	9,5	23,0	61,44%	52,36%	10,3%	2,6%	12,9%
SLEMAN	1,87	6,2	23,8	54,48%	42,57%	15,3%	3,9%	19,1%
Provinsi	**1,89**	**11,54**	**23,2**	**57,1%**	**42,41%**	**13,7%**	**3,5%**	**17,2%**

Angka iBangga beserta Dimensi-Dimensinya Tingkat Kabupaten/Kota

Kabupaten/Kota	Dimensi			iBangga
	Dimensi Ketentraman	Dimensi Kemandirian	Dimensi Kebahagiaan	
BANTUL	58,50	54,39	62,50	58,46
GUNUNG KIDUL	56,46	53,68	60,51	56,88
KOTA YOGYAKARTA	62,88	54,80	62,78	60,15
KULON PROGO	58,58	54,65	60,23	57,82
SLEMAN	60,62	54,96	62,58	59,38
Provinsi	**62,84**	**54,52**	**60,89**	**59,42**

PARAMETER PROGRAM BANGGA KENCANA PROVINSI JAWA TIMUR

Angka TFR, ASFR 15-19 Tahun, MUKP, mCPR, MKJP dan Unmet Need Tingkat Kabupaten/Kota

Kab/Kota	TFR	ASFR 15-19	MUKP	mCPR	MKJP	Unmet Need		
						Limiting	Spacing	Total
BANGKALAN	2,10	37,8	20,6	43,10%	6,66%	9,0%	7,2%	16,2%
BANYUWANGI	2,05	43,7	19,6	68,65%	18,65%	7,0%	1,8%	8,8%
BLITAR	2,00	32,7	20,9	62,96%	37,94%	7,9%	2,8%	10,7%
BOJONEGORO	1,81	49,8	19,5	75,11%	19,64%	5,5%	1,2%	6,7%
BONDOWOSO	2,05	63,3	17,6	78,24%	14,04%	4,1%	0,8%	4,9%
GRESIK	1,95	10,8	21,5	62,16%	18,05%	11,9%	3,1%	15,0%
JEMBER	2,03	47,7	19,1	71,64%	14,35%	6,7%	1,6%	8,3%
JOMBANG	2,10	26,6	21,1	70,06%	19,58%	7,2%	2,3%	9,5%
KEDIRI	2,13	22,6	21,1	64,34%	33,35%	8,9%	3,2%	12,1%
KOTA BATU	1,95	20,7	20,9	70,15%	48,78%	10,0%	2,6%	12,5%
KOTA BLITAR	1,92	13,0	22,7	61,46%	38,85%	10,6%	2,6%	13,2%
KOTA KEDIRI	2,00	22,6	23,0	57,05%	32,30%	13,6%	3,4%	17,0%
KOTA MADIUN	1,85	10,5	24,0	60,53%	49,88%	9,6%	2,3%	11,9%
KOTA MALANG	1,82	9,7	23,8	54,04%	40,16%	17,8%	4,5%	22,3%
KOTA MOJOKERTO	1,87	14,4	22,8	60,62%	43,83%	12,8%	2,8%	15,7%
KOTA PASURUAN	2,13	11,2	21,8	64,90%	27,58%	8,3%	2,6%	10,9%
KOTA PROBOLINGGO	2,05	18,7	21,2	66,87%	19,07%	9,0%	2,3%	11,3%
KOTA SURABAYA	1,70	8,7	22,8	49,81%	23,40%	18,9%	4,7%	23,6%
LAMONGAN	1,90	12,5	20,0	69,08%	12,13%	6,7%	2,4%	9,2%
LUMAJANG	1,96	52,4	18,9	74,02%	17,95%	5,3%	1,3%	6,7%
MADIUN	2,03	17,7	22,2	65,36%	29,97%	6,7%	1,8%	8,5%
MAGETAN	1,99	10,8	22,3	62,98%	30,67%	9,3%	2,7%	11,9%
MALANG	2,10	46,3	19,9	69,17%	24,15%	7,9%	2,3%	10,2%
MOJOKERTO	1,95	14,0	20,6	74,72%	22,61%	4,6%	1,7%	6,2%

Kab/Kota	TFR	ASFR 15-19	MUKP	mCPR	MKJP	Unmet Need		
						Limiting	Spacing	Total
NGANJUK	2,02	21,4	20,9	72,55%	24,24%	6,3%	1,9%	8,2%
NGAWI	1,90	29,1	21,1	69,50%	27,53%	6,9%	1,5%	8,4%
PACITAN	1,78	39,3	19,9	71,87%	26,54%	6,5%	1,9%	8,4%
PAMEKASAN	2,16	33,6	19,7	55,03%	6,45%	6,0%	5,1%	11,1%
PASURUAN	1,92	32,7	19,7	73,30%	11,70%	5,7%	1,7%	7,3%
PONOROGO	1,92	14,5	22,3	58,75%	37,44%	8,2%	3,0%	11,2%
PROBOLINGGO	2,03	54,1	18,1	78,25%	16,47%	3,2%	1,0%	4,2%
SAMPANG	2,36	42,0	20,0	46,49%	4,91%	7,3%	7,2%	14,5%
SIDOARJO	1,84	10,0	22,3	60,81%	19,66%	12,0%	3,0%	15,0%
SITUBONDO	2,03	39,9	18,3	74,18%	17,95%	5,8%	1,3%	7,1%
SUMENEP	2,12	39,4	19,1	52,69%	4,38%	9,4%	5,4%	14,7%
TRENGGALEK	1,89	26,5	19,7	71,91%	18,25%	5,5%	2,2%	7,7%
TUBAN	1,84	28,8	19,5	72,45%	21,98%	5,9%	1,7%	7,6%
TULUNGAGUNG	1,97	27,3	21,0	61,74%	19,49%	8,5%	2,9%	11,4%
Provinsi	**1,98**	**31,3**	**20,4**	**65,60%**	**20,39%**	**8,4%**	**2,7%**	**11,1%**

Angka iBangga beserta Dimensi-Dimensinya Tingkat Kabupaten/Kota

Kabupaten/Kota	Dimensi			iBangga
	Dimensi Ketenteraman	Dimensi Kemandirian	Dimensi Kebahagiaan	
BANGKALAN	50,80	48,53	54,15	51,16
BANYUWANGI	55,20	54,09	61,09	56,80
BLITAR	56,19	55,17	60,48	57,28
BOJONEGORO	58,31	54,65	59,57	57,51
BONDOWOSO	54,66	49,57	56,92	53,71
GRESIK	61,16	56,10	62,99	60,09
JEMBER	51,96	52,17	58,00	54,05

Kabupaten/Kota	Dimensi			iBangga
	Dimensi Ketenteraman	Dimensi Kemandirian	Dimensi Kebahagiaan	
JOMBANG	58,27	55,68	59,78	57,91
KEDIRI	57,78	55,36	59,14	57,43
KOTA BATU	59,00	56,22	59,84	58,35
KOTA BLITAR	60,25	56,14	58,74	58,38
KOTA KEDIRI	60,94	56,09	58,54	58,52
KOTA MADIUN	61,55	56,93	63,07	60,52
KOTA MALANG	58,62	55,85	59,45	57,98
KOTA MOJOKERTO	60,77	55,73	59,68	58,73
KOTA PASURUAN	59,10	55,09	59,94	58,04
KOTA PROBOLINGGO	59,24	54,93	58,05	57,41
KOTA SURABAYA	59,77	54,82	58,91	57,83
LAMONGAN	59,46	55,59	63,16	59,40
LUMAJANG	54,42	53,65	61,29	56,46
MADIUN	57,14	55,54	60,18	57,62
MAGETAN	57,73	56,41	61,52	58,55
MALANG	53,88	54,74	60,21	56,28
MOJOKERTO	59,38	55,39	64,46	59,74
NGANJUK	57,24	55,57	60,41	57,74
NGAWI	57,80	54,14	59,43	57,12
PACITAN	58,31	55,06	59,52	57,63
PAMEKASAN	53,53	49,05	54,27	52,28
PASURUAN	55,80	53,86	60,72	56,80
PONOROGO	57,28	55,19	58,54	57,00
PROBOLINGGO	55,47	52,15	59,96	55,86
SAMPANG	50,54	45,33	51,21	49,03
SIDOARJO	59,62	56,35	64,28	60,09
SITUBONDO	53,62	50,42	60,42	54,82

Kabupaten/Kota	Dimensi			iBangga
	Dimensi Ketenteraman	Dimensi Kemandirian	Dimensi Kebahagiaan	
SUMENEP	53,29	48,30	54,01	51,87
TRENGGALEK	56,44	54,63	58,14	56,40
TUBAN	58,13	54,70	58,38	57,07
TULUNGAGUNG	57,95	55,88	59,19	57,67
Provinsi	**59,93**	**53,89**	**59,79**	**57,87**

PARAMETER PROGRAM BANGGA KENCANA PROVINSI BANTEN

Angka TFR, ASFR 15-19 Tahun, MUKP, mCPR, MKJP dan Unmetneed Tingkat Kabupaten/Kota

Kab/Kota	TFR	ASFR 15-19	MUKP	mCPR	MKJP	Unmet Need		
						Limiting	Spacing	Total
KOTA CILEGON	2,10	6,4	21,7	58,1%	12,2%	10,6%	4,7%	15,3%
KOTA SERANG	2,10	12,2	20,8	58,6%	19,7%	8,0%	4,3%	12,3%
KOTA TANGERANG	1,80	8,7	22,8	49,4%	20,3%	17,0%	5,6%	22,6%
KOTA TANGERANG SELATAN	1,70	5,7	22,7	53,0%	22,5%	16,4%	4,5%	20,9%
LEBAK	2,20	33,9	19,3	67,2%	12,6%	4,5%	5,0%	9,5%
PANDEGLANG	2,30	25,2	19,4	62,1%	10,6%	6,8%	5,2%	11,9%
SERANG	2,20	20,1	19,8	62,5%	13,2%	5,7%	3,7%	9,4%
TANGERANG	1,90	14,5	20,5	57,1%	8,8%	10,8%	4,6%	15,4%
Provinsi	**2,01**	**18,2**	**20,9**	**57,4%**	**13,82%**	**10,9%**	**4,7%**	**15,7%**

** Relative Standard Error (RSE) ≥ 25% sehingga estimasi level kabupaten/kota tidak bisa digunakan*

Angka iBangga beserta Dimensi-Dimensinya Tingkat Kabupaten/Kota

Kabupaten/Kota	Dimensi			iBangga
	Dimensi Ketenteraman	Dimensi Kemandirian	Dimensi Kebahagiaan	
KOTA CILEGON	58,42	54,54	60,78	57,91
KOTA SERANG	54,77	52,89	61,83	56,50
KOTA TANGERANG	58,64	55,19	60,29	58,04
KOTA TANGERANG SELATAN	57,75	55,10	60,31	57,72
LEBAK	48,24	50,03	60,39	52,88
PANDEGLANG	47,93	49,25	59,42	52,20
SERANG	50,23	52,31	59,82	54,12
TANGERANG	54,03	53,06	59,97	55,69
Provinsi	57,89	53,06	59,98	56,98

PARAMETER PROGRAM BANGGA KENCANA PROVINSI BALI

Angka TFR, ASFR 15-19 Tahun, MUKP, mCPR, MKJP dan Unmet Need Tingkat Kabupaten/Kota

Kab/Kota	TFR	ASFR 15-19	MUKP	mCPR	MKJP	Unmet Need		
						Limiting	Spacing	Total
BADUNG	1,89	12,1	23,7	52,20%	50,44%	13,7%	2,4%	16,1%
BANGLI	2,15	32,8	21,0	64,76%	38,59%	7,7%	2,6%	10,2%
BULELENG	2,24	31,9	21,1	57,23%	34,02%	11,1%	3,6%	14,7%
GIANYAR	1,91	16,9	23,2	59,02%	56,60%	11,0%	1,9%	12,9%
JEMBRANA	2,15	30,6	20,9	60,00%	23,81%	12,0%	2,8%	14,8%
KARANGASEM	2,31	23,7	22,1	60,88%	52,53%	6,8%	2,9%	9,7%
KLUNGKUNG	2,16	16,2	23,0	52,38%	50,44%	13,1%	3,1%	16,1%
KOTA DENPASAR	1,85	10	24,1	44,53%	59,66%	16,7%	4,4%	21,1%
TABANAN	1,81	16,1	22,4	61,71%	47,37%	10,7%	2,1%	12,8%
Provinsi	**2,07**	**17,7**	**22,9**	**54,6%**	**47,24%**	**12,4%**	**3,1%**	**15,5%**

Angka iBangga beserta Dimensi-Dimensinya Tingkat Kabupaten/Kota

Kabupaten/Kota	Dimensi			iBangga
	Dimensi Ketenteraman	Dimensi Kemandirian	Dimensi Kebahagiaan	
BADUNG	58,80	53,85	64,34	58,99
BANGLI	52,18	50,51	56,24	52,98
BULELENG	55,34	51,59	59,93	55,62
GIANYAR	53,37	54,27	65,08	57,57
JEMBRANA	54,16	53,65	64,62	57,47
KARANGASEM	53,87	50,13	59,21	54,40
KLUNGKUNG	56,91	52,71	60,96	56,86
KOTA DENPASAR	62,57	53,84	62,67	59,69
TABANAN	54,08	53,03	62,11	56,41
Provinsi	**62,44**	**53,25**	**61,22**	**58,97**

PARAMETER PROGRAM BANGGA KENCANA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Angka TFR, ASFR 15-19 Tahun, MUKP, mCPR, MKJP dan Unmet Need Tingkat Kabupaten/Kota

Kab/Kota	TFR	ASFR 15-19	MUKP	mCPR	MKJP	Unmet Need		
						Limiting	Spacing	Total
ALOR	2,89	32,7	24,1	35,58%	40,47%	17,4%	11,5%	28,9%
BELU	2,80	26,4	23,1	39,33%	36,14%	14,7%	7,8%	22,5%
ENDE	2,14	18,7	25,7	25,89%	60,05%	21,8%	20,6%	42,4%
FLORES TIMUR	2,58	34,2	24,2	29,62%	70,32%	23,7%	13,2%	36,8%
KOTA KUPANG	3,02	32,7	26,3	33,69%	58,52%	27,6%	8,3%	35,9%
KUPANG	2,43	20,9	24,3	48,37%	54,45%	18,1%	7,4%	25,5%
LEMBATA	2,91	17,5	24,3	38,32%	73,66%	17,9%	12,4%	30,3%
MALAKA	2,76	29,2	23,4	35,39%	29,73%	12,1%	12,7%	24,8%
MANGGARAI	2,69	24,0	21,7	55,40%	51,33%	11,6%	6,0%	17,6%
MANGGARAI BARAT	2,88	31,9	21,3	58,02%	47,32%	9,7%	5,7%	15,4%
MANGGARAI TIMUR	2,73	36,6	22,1	55,24%	31,85%	10,5%	6,2%	16,7%
NAGEKEO	3,01	35,3	26,3	18,97%	79,05%	36,0%	19,1%	55,1%
NGADA	2,47	11,3	24,9	43,31%	60,34%	22,9%	8,7%	31,7%
ROTE NDAO	2,62	19,0	23,6	41,23%	76,36%	21,1%	9,7%	30,8%
SABU RAIJUA	3,11	31,8	24,4	28,97%	46,69%	24,1%	17,7%	41,8%
SIKKA	3,29	33,4	23,7	33,58%	66,91%	21,0%	13,2%	34,2%
SUMBA BARAT	2,2	25,7	23,0	43,94%	75,53%	11,6%	8,5%	20,1%
SUMBA BARAT DAYA	3,14	26,9	23,2	38,84%	92,58%	14,1%	13,0%	27,1%
SUMBA TENGAH	3,58	33,1	22,2	57,03%	87,75%	7,9%	6,2%	14,0%
SUMBA TIMUR	3,34	35,5	24,1	43,94%	58,81%	24,7%	5,3%	30,0%
TIMOR TENGAH SELATAN	2,86	31,9	24,3	51,91%	27,82%	15,3%	6,3%	21,6%
TIMOR TENGAH UTARA	2,83	22,6	24,0	37,93%	52,90%	24,3%	10,0%	34,3%
Provinsi	**2,92**	**19,5**	**23,9**	**42,2%**	**53,65%**	**18,2%**	**9,7%**	**27,9%**

Angka iBangga beserta Dimensi-Dimensinya Tingkat Kabupaten/Kota

Kabupaten/Kota	Dimensi			iBangga
	Dimensi Ketenteraman	Dimensi Kemandirian	Dimensi Kebahagiaan	
ALOR	56,98	49,98	56,18	54,38
BELU	48,30	46,82	52,45	49,19
ENDE	50,90	50,26	57,34	52,83
FLORES TIMUR	53,51	51,36	58,95	54,61
KOTA KUPANG	60,62	53,34	56,51	56,82
KUPANG	53,90	51,41	56,30	53,87
LEMBATA	53,46	51,03	59,30	54,59
MALAKA	41,18	48,75	57,73	49,22
MANGGARAI	49,06	51,48	60,13	53,56
MANGGARAI BARAT	55,66	48,57	58,33	54,19
MANGGARAI TIMUR	48,58	50,32	59,12	52,68
NAGEKEO	53,52	49,84	57,91	53,76
NGADA	50,70	49,73	56,42	52,28
ROTE NDAO	57,32	48,94	54,03	53,43
SABU RAIJUA	58,32	46,20	53,04	52,52
SIKKA	50,22	45,55	51,50	49,09
SUMBA BARAT	46,94	44,97	52,40	48,11
SUMBA BARAT DAYA	37,37	43,13	56,62	45,71
SUMBA TENGAH	47,58	43,79	57,32	49,57

SUMBA TIMUR	52,04	46,59	59,78	52,80
TIMOR TENGAH SELATAN	49,56	47,36	56,50	51,14
TIMOR TENGAH UTARA	49,11	49,27	54,98	51,12
Provinsi	**55,92**	**49,02**	**55,58**	**53,51**

PARAMETER PROGRAM BANGGA KENCANA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Angka TFR, ASFR 15-19 Tahun, MUKP, mCPR, MKJP dan Unmet Need Tingkat Kabupaten/Kota

Kab/Kota	TFR	ASFR 15-19	MUKP	mCPR	MKJP	Unmet Need		
						Limiting	Spacing	Total
BIMA	2,64	36,8	22,3	61,02%	28,26%	6,3%	3,0%	9,2%
DOMPU	2,75	59,7	21,1	61,54%	38,25%	6,7%	3,3%	10,0%
KOTA BIMA	2,35	17,1	22,6	57,46%	38,34%	7,7%	3,5%	11,2%
KOTA MATARAM	2,13	19,4	22,5	54,85%	41,11%	11,0%	6,3%	17,3%
LOMBOK BARAT	2,33	42,8	20,0	62,68%	29,52%	5,2%	3,3%	8,5%
LOMBOK TENGAH	2,37	46,2	19,5	55,44%	16,40%	3,4%	2,6%	6,0%
LOMBOK TIMUR	2,47	44,9	19,6	54,10%	23,90%	3,4%	2,7%	6,1%
LOMBOK UTARA	2,46	43,5	20,0	66,60%	32,06%	3,8%	3,1%	6,9%
SUMBAWA	2,46	43,8	22,4	61,02%	46,51%	8,4%	2,9%	11,3%
SUMBAWA BARAT	2,69	42,8	21,7	56,95%	37,39%	10,1%	3,9%	14,1%
Provinsi	**2,46**	**42,6**	**20,3**	**58,0%**	**28,78%**	**5,5%**	**3,3%**	**8,8%**

Angka iBangga beserta Dimensi-Dimensinya Tingkat Kabupaten/Kota

Kabupaten/Kota	Dimensi			iBangga
	Dimensi Ketenteraman	Dimensi Kemandirian	Dimensi Kebahagiaan	
BIMA	55,46	53,01	63,47	57,31
DOMPU	52,80	52,37	62,33	55,83
KOTA BIMA	58,02	52,66	64,06	58,25
KOTA MATARAM	55,57	54,49	58,33	56,13
LOMBOK BARAT	49,83	52,02	59,57	53,81
LOMBOK TENGAH	46,90	50,50	53,51	50,30
LOMBOK TIMUR	50,70	50,47	53,89	51,69
LOMBOK UTARA	52,71	50,81	59,97	54,49
SUMBAWA	55,32	54,00	61,83	57,05
SUMBAWA BARAT	56,86	55,67	62,44	58,32
Provinsi	**54,31**	**51,93**	**56,07**	**54,10**

PARAMETER PROGRAM BANGGA KENCANA PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Angka TFR, ASFR 15-19 Tahun, MUKP, mCPR, MKJP dan Unmet Need Tingkat Kabupaten/Kota

Kab/Kota	TFR	ASFR 15-19	MUKP	mCPR	MKJP	Unmet Need		
						Limiting	Spacing	Total
BENGKAYANG	2,32	43,3	20,6	61,27%	23,12%	10,8%	3,6%	14,4%
KAPUAS HULU	2,33	69,9	20,0	57,99%	7,78%	14,4%	5,0%	19,3%
KAYONG UTARA	2,43	63,2	19,8	71,39%	14,91%	6,3%	1,3%	7,6%
KETAPANG	2,28	67,0	19,7	62,30%	7,43%	9,4%	2,6%	11,9%
KOTA PONTIANAK	2,02	11,1	23,6	45,94%	26,39%	16,4%	5,0%	21,3%
KOTA SINGKAWANG	2,45	56,9	22,3	36,54%	14,65%	19,1%	8,3%	27,4%
KUBU RAYA	2,34	19,5	21,0	57,16%	15,49%	10,6%	4,7%	15,3%
LANDAK	2,38	43,5	20,4	58,25%	6,13%	11,6%	6,0%	17,6%
MELAWI	2,37	77,6	19,7	65,92%	3,26%	7,9%	3,8%	11,7%
MEMPAWAH	2,33	27,3	21,2	47,41%	8,97%	17,6%	6,0%	23,6%
SAMBAS	2,50	35,6	21,5	56,60%	7,40%	8,9%	3,4%	12,3%
SANGGAU	2,33	55,9	20,4	68,94%	7,39%	6,8%	2,5%	9,3%
SEKADAU	2,36	75,0	19,9	62,12%	12,85%	8,6%	3,9%	12,5%
SINTANG	2,40	65,5	19,9	63,57%	9,90%	9,9%	2,9%	12,9%
Provinsi	**2,33**	**42,71**	**20,8**	**58,3%**	**11,36%**	**11,1%**	**4,1%**	**15,2%**

Angka iBangga beserta Dimensi-Dimensinya Tingkat Kabupaten/Kota

Kabupaten/Kota	Dimensi			iBangga
	Dimensi Ketentraman	Dimensi Kemandirian	Dimensi Kebahagiaan	
BENGKAYANG	50,23	49,79	52,05	50,69
KAPUAS HULU	57,73	50,01	58,28	55,34
KAYONG UTARA	53,11	49,27	57,08	53,15
KETAPANG	51,56	50,14	59,26	53,65
KOTA PONTIANAK	56,97	51,94	60,91	56,61
KOTA SINGKAWANG	57,24	51,34	56,45	55,01
KUBU RAYA	51,46	49,21	58,86	53,18
LANDAK	48,59	46,45	52,51	49,18
MELAWI	52,62	46,64	55,90	51,72
MEMPAWAH	52,97	49,09	54,75	52,27
SAMBAS	55,59	51,70	60,25	55,85
SANGGAU	51,24	50,13	57,18	52,85
SEKADAU	52,37	49,50	56,40	52,76
SINTANG	53,07	48,81	56,26	52,71
Provinsi	**57,48**	**49,84**	**56,50**	**54,61**

PROGRAM BANGGA KENCANA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Angka TFR, ASFR 15-19 Tahun, MUKP, mCPR, MKJP dan Unmetneed Tingkat Kabupaten/Kota

Kab/Kota	TFR	ASFR 15-19	MUKP	mCPR	MKJP	Unmet Need		
						Limiting	Spacing	Total
BARITO SELATAN	2,22	95,4	19,6	75,91%	11,14%	4,5%	1,6%	6,2%
BARITO TIMUR	2,20	42,8	20,2	70,06%	15,64%	6,9%	3,5%	10,4%
BARITO UTARA	2,25	70,0	19,7	63,30%	6,93%	7,6%	2,4%	10,0%
GUNUNG MAS	2,42	65,7	19,8	66,36%	14,92%	8,9%	2,5%	11,4%
KAPUAS	2,45	76,7	19,5	62,98%	5,37%	8,7%	4,0%	12,7%
KATINGAN	2,48	74,9	19,4	66,81%	10,66%	5,7%	3,6%	9,4%
KOTA PALANGKARAYA	2,16	14,3	20,3	55,68%	13,67%	12,9%	4,9%	17,7%
KOTAWARINGIN BARAT	2,30	33,5	20,0	54,00%	14,07%	12,3%	5,3%	17,6%
KOTAWARINGIN TIMUR	2,25	31,9	19,7	66,51%	8,92%	8,2%	3,1%	11,3%
LAMANDAU	2,24	52,6	20,2	70,32%	18,56%	5,6%	2,6%	8,2%
MURUNG RAYA	2,45	66,7	19,2	62,83%	8,78%	6,7%	2,4%	9,1%
PULANG PISAU	2,24	47,1	19,6	66,25%	9,80%	7,9%	1,5%	9,5%
SERUYAN	2,20	67,8	19,8	68,94%	9,81%	5,0%	1,9%	6,9%
SUKAMARA	2,18	52,4	19,4	69,36%	9,45%	8,1%	1,7%	9,9%
Provinsi	**2,31**	**63,13**	**19,7**	**64,20%**	**10,61**	**8,4%**	**3,3%**	**11,8%**

* Relative Standard Error (RSE) ≥ 25% sehingga estimasi level kabupaten/kota tidak bisa digunakan

Angka iBangga beserta Dimensi-Dimensinya Tingkat kabupaten/kota

Kabupaten/Kota	Dimensi			iBangga
	Dimensi Ketentraman	Dimensi Kemandirian	Dimensi Kebahagiaan	
BARITO SELATAN	55,99	48,46	56,40	53,62
BARITO TIMUR	56,89	53,43	54,06	54,79
BARITO UTARA	55,89	49,56	61,82	55,76
GUNUNG MAS	53,82	50,12	50,84	51,60
KAPUAS	52,32	46,48	52,59	50,46
KATINGAN	54,89	47,85	59,10	53,95
KOTA PALANGKARAYA	54,62	51,71	55,34	53,89
KOTAWARINGIN BARAT	55,86	52,12	59,47	55,82
KOTAWARINGIN TIMUR	50,85	50,97	58,67	53,50
LAMANDAU	55,48	52,32	55,20	54,34
MURUNG RAYA	52,44	50,55	58,81	53,93
PULANG PISAU	53,82	50,52	58,08	54,14
SERUYAN	57,28	51,48	58,58	55,78
SUKAMARA	56,43	53,50	53,37	54,43
Provinsi	**56,73**	**50,44**	**55,58**	**54,25**

PROGRAM BANGGA KENCANA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

Angka TFR, ASFR 15-19 Tahun, MUKP, mCPR, MKJP dan Unmetneed Tingkat Kabupaten/Kota

Kab/Kota	TFR	ASFR 15-19	MUKP	mCPR	MKJP	Unmet Need		
						Limiting	Spacing	Total
BALANGAN	2,36	47,7	19,3	74,97%	13,11%	4,2%	2,2%	6,4%
BANJAR	2,30	42,5	19,7	68,69%	5,73%	6,6%	3,4%	10,0%
BARITO KUALA	2,37	44,3	19,8	77,37%	6,42%	4,3%	1,3%	5,6%
HULU SUNGAI SELATAN	2,33	41,2	19,3	74,02%	6,51%	3,9%	1,5%	5,4%
HULU SUNGAI TENGAH	2,32	49,3	19,5	71,88%	5,58%	5,8%	2,5%	8,3%
HULU SUNGAI UTARA	2,45	41,7	19,8	70,37%	9,39%	4,7%	1,8%	6,5%
KOTA BANJARBARU	2,15	14,2	21,6	62,39%	11,29%	9,8%	2,6%	12,3%
KOTA BANJARMASIN	2,17	23,0	21,6	67,61%	10,16%	8,0%	2,3%	10,3%
KOTABARU	2,57	77,0	19,5	68,82%	9,86%	7,2%	2,6%	9,9%
TABALONG	2,23	29,4	20,0	70,07%	10,27%	5,6%	2,2%	7,8%
TANAH BUMBU	2,51	70,1	19,4	71,28%	11,24%	5,3%	1,5%	6,9%
TANAH LAUT	2,20	21,0	19,3	75,09%	10,74%	4,6%	1,9%	6,5%
TAPIN	2,21	59,2	19,5	73,63%	8,24%	6,0%	2,1%	8,1%
Provinsi	**2,31**	**45,1**	**19,8**	**70,70%**	**8,93**	**6,1%**	**2,2%**	**8,3%**

Angka iBangga beserta Dimensi-Dimensinya Tingkat kabupaten/kota

Kabupaten/Kota	Dimensi			iBangga
	Dimensi Ketentraman	Dimensi Kemandirian	Dimensi Kebahagiaan	
BALANGAN	55,63	52,85	59,83	56,11
BANJAR	52,16	50,58	57,49	53,41
BARITO KUALA	52,75	50,19	56,59	53,18
HULU SUNGAI SELATAN	55,90	51,00	57,05	54,65
HULU SUNGAI TENGAH	53,74	52,31	63,25	56,43
HULU SUNGAI UTARA	55,05	52,85	60,38	56,09
KOTA BANJARBARU	56,94	54,29	61,20	57,47
KOTA BANJARMASIN	54,41	53,76	55,84	54,67
KOTABARU	55,23	50,87	56,42	54,17
TABALONG	58,01	54,36	61,61	57,99
TANAH BUMBU	55,41	54,21	63,47	57,69
TANAH LAUT	55,22	52,85	60,26	56,11
TAPIN	53,68	50,04	59,16	54,29
Provinsi	**57,89**	**52,25**	**57,31**	**55,82**

PARAMETER PROGRAM BANGGA KENCANA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
Angka TFR, ASFR 15-19 Tahun, MUKP, mCPR, MKJP dan Unmetneed Tingkat Kabupaten/Kota

Kab/Kota	TFR	ASFR 15-19	MUKP	mCPR	MKJP	Unmet Need		
						Limiting	Spacing	Total
BERAU	2,37	28,6	20,8	53,2%	21,7%	10,0%	6,3%	16,3%
KOTA BALIKPAPAN	2,13	14,8	22,9	52,0%	36,9%	15,0%	5,3%	20,3%
KOTA BONTANG	2,15	8,5	22,4	53,7%	45,6%	12,0%	6,6%	18,6%
KOTA SAMARINDA	2,06	10,4	22,1	48,5%	17,9%	17,6%	6,1%	23,6%
KUTAI BARAT	2,28	67,2	19,9	60,4%	14,1%	12,0%	4,8%	16,7%
KUTAI KARTANEGARA	2,16	24,8	20,3	56,6%	18,6%	11,5%	5,5%	17,0%
KUTAI TIMUR	2,24	27,5	20,9	40,3%	20,3%	19,0%	8,4%	27,5%
MAHAKAM ULU	2,42	62,9	20,6	18,5%	35,1%	28,2%	22,5%	50,7%
PASER	2,27	23,9	20,2	53,9%	18,6%	12,7%	6,7%	19,4%
PENAJAM PASER UTARA	2,36	28	20,5	58,8%	17,4%	11,4%	5,6%	17,0%
Provinsi	**2,18**	**22,28**	**21,4**	**51,5%**	**22,87%**	**14,5%**	**6,2%**	**20,7%**

** Relative Standard Error (RSE) ≥ 25% sehingga estimasi level kabupaten/kota tidak bisa digunakan*

Angka iBangga beserta Dimensi-Dimensinya Tingkat Kabupaten/Kota

Kabupaten/Kota	Dimensi			iBangga
	Dimensi Ketenteraman	Dimensi Kemandirian	Dimensi Kebahagiaan	
BERAU	57,70	50,35	59,04	55,70
KOTA BALIKPAPAN	60,94	55,06	60,23	58,74
KOTA BONTANG	62,09	54,57	54,37	57,01
KOTA SAMARINDA	57,35	54,90	60,34	57,53
KUTAI BARAT	54,94	50,28	59,49	54,90
KUTAI KARTANEGARA	56,33	50,63	58,35	55,10
KUTAI TIMUR	56,42	49,19	58,35	54,65
MAHAKAM ULU	56,17	48,56	62,39	55,71
PASER	60,70	49,05	54,70	54,82
PENAJAM PASER UTARA	59,62	51,47	58,86	56,65
Provinsi	61,74	50,88	57,55	56,72

PARAMETER PROGRAM BANGGA KENCANA PROVINSI KALIMANTAN UTARA

Angka TFR, ASFR 15-19 Tahun, MUKP, mCPR, MKJP dan Unmetneed Tingkat Kabupaten/Kota

Kab/Kota	TFR	ASFR 15-19	MUKP	mCPR	MKJP	Unmet Need		
						Limiting	Spacing	Total
BULUNGAN	2,36	29,4	20,8	54,2%	22,3%	11,9%	4,7%	16,6%
KOTA TARAKAN	2,29	19,2	21,7	45,4%	16,1%	12,8%	9,2%	22,0%
MALINAU	2,32	42,8	21,8	40,2%	16,3%	14,8%	8,4%	23,2%
NUNUKAN	2,38	42,8	21,1	47,0%	25,1%	14,0%	7,0%	21,0%
TANA TIDUNG	2,99	51,7	21,1	56,2%	22,3%	10,7%	4,2%	15,0%
Provinsi	**2,35**	**33,86**	**21,4**	**47,4%**	**20,05%**	**13,1%**	**7,4%**	**20,5%**

** Relative Standard Error (RSE) ≥ 25% sehingga estimasi level kabupaten/kota tidak bisa digunakan*

Angka iBangga beserta Dimensi-Dimensinya Tingkat Kabupaten/Kota

Kabupaten/Kota	Dimensi			iBangga
	Dimensi Ketenteraman	Dimensi Kemandirian	Dimensi Kebahagiaan	
BULUNGAN	57,27	49,85	57,29	54,80
KOTA TARAKAN	61,34	53,90	56,29	57,18
MALINAU	58,67	48,63	62,25	56,52
NUNUKAN	60,40	48,88	55,06	54,78
TANA TIDUNG	59,02	51,50	60,02	56,85
Provinsi	62,63	49,89	55,89	56,14

PARAMETER PROGRAM BANGGA KENCANA PROVINSI SULAWESI UTARA

Angka TFR, ASFR 15-19 Tahun, MUKP, mCPR, MKJP dan Unmetneed Tingkat Kabupaten/Kota

Kab/Kota	TFR	ASFR 15-19	MUKP	mCPR	MKJP	Unmet Need		
						Limiting	Spacing	Total
BOLAANG MONGONDOW	2,17	40,7	19,6	65,83%	30,10%	10,3%	3,2%	13,5%
BOLAANG MONGONDOW SELATAN	2,32	48,7	20,0	53,92%	42,53%	16,2%	6,4%	22,6%
BOLAANG MONGONDOW TIMUR	2,18	51,1	19,7	64,15%	24,60%	9,2%	1,5%	10,7%
BOLAANG MONGONDOW UTARA	2,20	55,2	20,2	56,73%	47,65%	13,2%	3,2%	16,3%
KEP. SIAU TAGULANDANG BIARO	2,1	58,0	23,7	58,79%	25,77%	15,9%	1,4%	17,3%
KEPULAUAN SANGIHE	2,08	38,6	24,1	55,21%	30,81%	16,8%	2,6%	19,4%
KEPULAUAN TALAUD	2,18	37,0	22,8	57,79%	63,55%	13,3%	3,3%	16,6%
KOTA BITUNG	2,14	15,6	21,7	50,80%	23,89%	17,6%	4,3%	22,0%
KOTA KOTAMOBAGU	2,12	22,9	21,0	63,88%	35,13%	10,3%	4,0%	14,3%
KOTA MANADO	2,01	40,7	23,2	50,63%	21,32%	17,2%	4,3%	21,5%
KOTA TOMOHON	2,05	44,7	23,0	52,98%	34,32%	16,9%	3,1%	20,1%
MINAHASA	1,98	33,7	21,5	57,31%	21,84%	15,2%	4,0%	19,2%
MINAHASA SELATAN	2,08	40,7	20,9	60,80%	40,14%	13,3%	3,0%	16,3%
MINAHASA TENGGARA	2,27	48,7	20,3	58,47%	44,08%	14,0%	2,9%	16,9%
MINAHASA UTARA	2,03	51,1	21,9	58,69%	32,50%	12,1%	2,9%	15,0%
Provinsi	**2,1**	**42,77**	**21,6**	**57,40%**	**31,08%**	**14,3%**	**3,5%**	**17,8%**

Angka iBangga beserta Dimensi-Dimensinya Tingkat Kabupaten/Kota

Kabupaten/Kota	Dimensi			iBangga
	Dimensi Ketenteraman	Dimensi Kemandirian	Dimensi Kebahagiaan	
BOLAANG MONGONDOW	56,18	51,54	61,09	56,27
BOLAANG MONGONDOW SELATAN	55,25	52,45	59,34	55,68
BOLAANG MONGONDOW TIMUR	56,31	52,05	57,86	55,41
BOLAANG MONGONDOW UTARA	57,37	53,20	64,72	58,43
KEP. SIAU TAGULANDANG BIARO	55,83	54,60	51,07	53,83
KEPULAUAN SANGIHE	60,58	48,62	50,69	53,30
KEPULAUAN TALAUD	57,82	52,12	57,21	55,72
KOTA BITUNG	60,10	52,15	57,26	56,50
KOTA KOTAMOBAGU	61,55	55,92	60,16	59,21
KOTA MANADO	62,77	53,48	54,17	56,81
KOTA TOMOHON	62,14	55,03	64,27	60,48
MINAHASA	60,15	53,07	59,76	57,66
MINAHASA SELATAN	58,55	53,60	61,25	57,80
MINAHASA TENGGARA	60,29	52,79	62,95	58,67
MINAHASA UTARA	60,65	54,04	61,97	58,89
Provinsi	**61,79**	**52,65**	**56,49**	**56,98**

PARAMETER PROGRAM BANGGA KENCANA PROVINSI SULAWESI TENGAH

Angka TFR, ASFR 15-19 Tahun, MUKP, mCPR, MKJP dan Unmet Need Tingkat Kabupaten/Kota

Kab/Kota	TFR	ASFR 15-19	MUKP	mCPR	MKJP	Unmet Need		
						Limiting	Spacing	Total
BANGGAI	2,29	36,3	20,0	59,43%	22,51%	12,4%	4,3%	16,6%
BANGGAI KEPULAUAN	2,41	48,4	20,0	58,39%	21,92%	12,6%	5,0%	17,6%
BANGGAI LAUT	2,47	47,9	20,0	52,94%	24,00%	14,3%	5,4%	19,7%
BUOL	2,58	53,9	19,7	59,71%	31,52%	10,5%	5,2%	15,8%
DONGGALA	2,34	28,1	19,8	40,27%	22,93%	18,9%	13,2%	32,1%
KOTA PALU	2,11	15,3	23,1	41,55%	30,05%	21,1%	8,1%	29,2%
MOROWALI	2,32	51,5	20,8	59,19%	27,81%	6,7%	3,8%	10,5%
MOROWALI UTARA	2,33	42,0	21,5	51,85%	39,41%	15,6%	4,7%	20,3%
PARIGI MOUTONG	2,40	48,6	19,7	52,11%	19,88%	12,7%	7,5%	20,2%
POSO	2,20	26,3	21,5	60,82%	34,69%	11,3%	3,8%	15,1%
SIGI	2,36	50,2	20,1	51,56%	29,88%	14,5%	4,7%	19,2%
TOJO UNA UNA	2,37	52,7	19,9	54,83%	28,81%	13,4%	5,5%	18,9%
TOLI TOLI	2,40	37,8	20,3	52,42%	29,38%	14,7%	6,1%	20,7%
Provinsi	**2,32**	**38,77**	**20,5**	**52,40%**	**26,71%**	**14,3%**	**6,4%**	**20,7%**

Angka iBangga beserta Dimensi-Dimensinya Tingkat Kabupaten/Kota

Kabupaten/Kota	Dimensi			iBangga
	Dimensi Ketenteraman	Dimensi Kemandirian	Dimensi Kebahagiaan	
BANGGAI	53,05	51,12	57,70	53,96
BANGGAI KEPULAUAN	51,28	48,87	59,77	53,31
BANGGAI LAUT	54,53	47,78	55,02	52,44
BUOL	53,12	49,19	59,06	53,79
DONGGALA	50,74	46,75	50,27	49,25
KOTA PALU	60,62	53,40	58,80	57,61
MOROWALI	57,02	52,74	63,39	57,72
MOROWALI UTARA	56,99	51,91	59,42	56,11
PARIGI MOUTONG	51,19	45,50	53,78	50,15
POSO	56,68	52,35	56,15	55,06
SIGI	51,93	49,13	55,56	52,21
TOJO UNA UNA	52,98	47,21	54,16	51,45
TOLI TOLI	54,08	50,54	61,37	55,33
Provinsi	**58,47**	**49,63**	**55,15**	**54,42**

PARAMETER PROGRAM BANGGA KENCANA PROVINSI SULAWESI SELATAN

Angka TFR, ASFR 15-19 Tahun, MUKP, mCPR, MKJP dan Unmet Need Tingkat Kabupaten/Kota

Kab/Kota	TFR	ASFR 15-19	MUKP	mCPR	MKJP	Unmet Need		
						Limiting	Spacing	Total
BANTAENG	2,06	40,7	21,0	64,03%	18,01%	6,2%	4,8%	11,0%
BARRU	2,18	22,2	21,2	51,96%	11,48%	10,0%	7,2%	17,2%
BONE	2,12	31,5	21,4	55,31%	12,41%	13,0%	7,1%	20,2%
BULUKUMBA	2,19	45,7	20,9	55,43%	19,62%	8,9%	7,0%	16,0%
ENREKANG	2,57	46,6	23,1	59,22%	53,28%	9,9%	7,8%	17,6%
GOWA	2,2	30,1	21,1	59,76%	21,66%	8,0%	5,2%	13,3%
JENEPONTO	2,2	32	20,4	63,96%	12,93%	6,5%	2,7%	9,2%
KEPULAUAN SELAYAR	2,17	31,9	23,1	49,00%	34,65%	18,8%	6,0%	24,8%
KOTA MAKASSAR	2,02	12,4	24,3	50,76%	36,78%	12,3%	6,2%	18,5%
KOTA PALOPO	2,24	18,2	23,6	51,59%	40,05%	11,2%	7,7%	18,9%
KOTA PARE PARE	2,35	20	22,5	53,71%	35,14%	11,0%	6,4%	17,4%
LUWU	2,41	31,6	22,1	50,47%	26,87%	10,7%	7,2%	17,9%
LUWU TIMUR	2,31	30,6	20,8	61,92%	43,24%	8,5%	5,4%	13,9%
LUWU UTARA	2,27	39,6	20,5	60,28%	28,46%	10,3%	5,4%	15,6%
MAROS	2,29	30,5	21,7	49,09%	22,96%	11,6%	7,9%	19,5%
PANGKAJENE KEPULAUAN	2,15	31,3	21,0	56,47%	16,99%	8,6%	7,0%	15,6%
PINRANG	2,33	23,2	21,2	63,14%	23,90%	5,6%	3,2%	8,8%
SIDENRENG RAPPANG	2,12	44,7	20,8	50,39%	9,12%	10,5%	6,1%	16,6%
SINJAI	2,23	28,5	22,1	52,14%	24,37%	8,6%	7,8%	16,3%
SOPPENG	2,11	38,6	20,8	55,35%	18,49%	9,3%	6,6%	15,9%
TAKALAR	2,33	40,1	21,1	60,68%	14,18%	6,5%	3,4%	10,0%
TANA TORAJA	2,62	35,9	23,2	53,97%	46,96%	14,4%	4,4%	18,8%
TORAJA UTARA	3	48,8	22,5	56,55%	48,28%	8,0%	3,1%	11,1%
WAJO	2,07	33,3	20,9	55,28%	19,33%	10,2%	5,3%	15,4%
Provinsi	**2,22**	**29,5**	**21,9**	**55,8%**	**25,33%**	**10,0%**	**5,8%**	**15,8%**

Angka iBangga beserta Dimensi-Dimensinya Tingkat Kabupaten/Kota

Kabupaten/Kota	Dimensi			iBangga
	Dimensi Ketentraman	Dimensi Kemandirian	Dimensi Kebahagiaan	
BANTAENG	53,02	50,68	50,04	51,25
BARRU	53,79	51,74	51,17	52,23
BONE	56,18	52,89	57,86	55,64
BULUKUMBA	53,93	51,50	55,12	53,52
ENREKANG	57,62	54,44	57,75	56,61
GOWA	55,18	52,54	54,50	54,07
JENEPONTO	48,68	47,80	51,31	49,26
KEPULAUAN SELAYAR	55,95	51,78	57,32	55,01
KOTA MAKASSAR	60,92	52,43	55,61	56,32
KOTA PALOPO	61,01	52,89	57,50	57,13
KOTA PARE PARE	62,23	53,86	58,69	58,26
LUWU	55,42	51,80	56,36	54,52
LUWU TIMUR	57,66	54,22	60,32	57,40
LUWU UTARA	55,63	52,37	55,80	54,60
MAROS	57,26	52,21	56,80	55,42
PANGKAJENE KEPULAUAN	54,18	49,16	51,76	51,70
PINRANG	56,67	52,66	60,33	56,55
SIDENRENG RAPPANG	55,68	51,61	57,30	54,86
SINJAI	57,73	53,32	59,31	56,79
SOPPENG	56,87	52,66	53,85	54,46
TAKALAR	52,71	50,71	51,56	51,66
TANA TORAJA	57,34	50,77	50,65	52,92
TORAJA UTARA	56,75	52,79	58,50	56,01
WAJO	53,23	51,55	53,44	52,74
Provinsi	**60,84**	**52,07**	**53,88**	**55,60**

PARAMETER PROGRAM BANGGA KENCANA PROVINSI SULAWESI TENGGARA

Angka TFR, ASFR 15-19 Tahun, MUKP, mCPR, MKJP dan Unmet Need Tingkat Kabupaten/Kota

Kab/Kota	TFR	ASFR 15-19	MUKP	mCPR	MKJP	Unmet Need		
						Limiting	Spacing	Total
BOMBANA	2,71	53,3	20,3	58,71%	23,90%	8,1%	7,3%	15,4%
BUTON	2,83	38,2	20,1	45,75%	22,44%	8,6%	9,1%	17,7%
BUTON SELATAN	2,94	28,3	20,1	36,52%	9,25%	17,1%	11,8%	28,8%
BUTON TENGAH	2,92	29,9	20,9	29,46%	7,79%	13,2%	15,0%	28,2%
BUTON UTARA	2,77	54,1	20,8	39,37%	23,48%	13,4%	13,8%	27,2%
KOLAKA	2,34	32,1	20,8	53,04%	25,04%	11,6%	8,1%	19,7%
KOLAKA TIMUR	2,40	43,2	19,8	54,76%	21,23%	12,0%	9,6%	21,5%
KOLAKA UTARA	2,57	44,6	21,4	53,45%	25,63%	10,1%	8,3%	18,4%
KONAWE	2,64	48,8	19,8	57,60%	36,14%	12,0%	6,0%	18,0%
KONAWE KEPULAUAN	2,73	66,1	20,2	56,08%	25,44%	8,7%	5,6%	14,3%
KONAWE SELATAN	2,61	13,1	19,5	62,89%	29,60%	10,1%	5,4%	15,5%
KONAWE UTARA	2,83	65,3	20,5	44,40%	20,62%	11,4%	10,8%	22,2%
KOTA BAU BAU	2,41	10	22,9	52,13%	18,26%	11,5%	7,0%	18,5%
KOTA KENDARI	2,16	13,6	23,2	41,63%	27,54%	17,9%	9,8%	27,7%
MUNA	2,75	31,7	22,0	34,38%	24,00%	18,7%	12,0%	30,6%
MUNA BARAT	2,80	47	21,1	39,00%	14,24%	12,8%	10,3%	23,0%
WAKATOBI	2,74	43,1	20,9	34,71%	13,38%	15,3%	11,9%	27,2%
Provinsi	**2,57**	**34,5**	**21,0**	**49,2%**	**24,92%**	**12,9%**	**8,7%**	**21,6%**

Angka iBangga beserta Dimensi-Dimensinya Tingkat Kabupaten/Kota

Kabupaten/Kota	Dimensi			iBangga
	Dimensi Ketentraman	Dimensi Kemandirian	Dimensi Kebahagiaan	
BOMBANA	53,58	53,47	58,36	55,14
BUTON	55,66	49,47	53,04	52,72
BUTON SELATAN	54,83	46,96	55,53	52,44
BUTON TENGAH	54,05	45,26	53,14	50,82
BUTON UTARA	53,68	50,94	54,94	53,19
KOLAKA	56,52	52,01	54,80	54,45
KOLAKA TIMUR	55,00	51,11	55,82	53,98
KOLAKA UTARA	56,07	51,97	57,67	55,24
KONAWE	54,59	51,77	57,79	54,72
KONAWE KEPULAUAN	54,66	52,77	57,92	55,11
KONAWE SELATAN	53,76	52,43	59,45	55,21
KONAWE UTARA	53,65	50,89	60,35	54,96
KOTA BAU BAU	59,00	53,05	58,82	56,96
KOTA KENDARI	58,49	53,73	57,64	56,62
MUNA	54,29	51,12	54,52	53,31
MUNA BARAT	52,81	49,42	51,58	51,27
WAKATOBI	55,19	51,27	56,43	54,30
Provinsi	**54,29**	**51,12**	**54,52**	**53,31**

PARAMETER PROGRAM BANGGA KENCANA PROVINSI GORONTALO

Angka TFR, ASFR 15-19 Tahun, MUKP, mCPR, MKJP dan Unmetneed Tingkat Kabupaten/Kota

Kab/Kota	TFR	ASFR 15-19	MUKP	mCPR	MKJP	Unmet Need		
						Limiting	Spacing	Total
BOALEMO	2,34	49,6	19,7	63,52%	38,49%	8,2%	3,9%	12,1%
BONE BOLANGO	2,29	52,4	21,3	54,76%	44,14%	9,3%	5,8%	15,1%
GORONTALO	2,30	45,5	20,4	61,29%	27,72%	8,4%	4,3%	12,7%
GORONTALO UTARA	2,49	75,7	20,0	55,82%	36,59%	11,3%	3,2%	14,5%
KOTA GORONTALO	2,17	14,7	22,8	53,57%	41,57%	9,5%	6,2%	15,7%
POHUWATO	2,35	47,4	19,6	61,10%	35,91%	8,0%	4,7%	12,7%
Provinsi	**2,30**	**46,3**	**20,7**	**58,80%**	**35,54%**	**8,9%**	**4,7%**	**13,6%**

Angka iBangga beserta Dimensi-Dimensinya Tingkat Kabupaten/Kota

Kabupaten/Kota	Dimensi			iBangga
	Dimensi Ketenteraman	Dimensi Kemandirian	Dimensi Kebahagiaan	
BOALEMO	54,39	50,42	52,64	52,48
BONE BOLANGO	56,30	51,11	54,84	54,09
GORONTALO	55,64	50,90	52,74	53,09
GORONTALO UTARA	57,60	52,64	55,92	55,39
KOTA GORONTALO	59,44	53,81	54,34	55,86
POHUWATO	57,05	51,50	55,61	54,72
Provinsi	**58,75**	**51,67**	**53,74**	**54,72**

PROGRAM BANGGA KENCANA PROVINSI SULAWESI BARAT

Angka TFR, ASFR 15-19 Tahun, MUKP, mCPR, MKJP dan Unmetneed Tingkat Kabupaten/Kota

Kab/Kota	TFR	ASFR 15-19	MUKP	mCPR	MKJP	Unmet Need		
						Limiting	Spacing	Total
MAJENE	2,65	36,3	22,1	44,53%	34,28%	12,0%	11,4%	23,4%
MAMASA	2,60	58,5	20,8	66,85%	31,06%	7,4%	1,5%	8,9%
MAMUJU	2,57	44,5	20,7	50,47%	19,84%	11,8%	9,6%	21,3%
MAMUJU TENGAH	2,70	61,1	19,9	52,93%	27,69%	9,3%	8,8%	18,1%
PASANGKAYU	2,54	41,9	19,8	53,20%	34,27%	10,8%	8,5%	19,3%
POLEWALI MANDAR	2,52	37,4	21,0	42,33%	21,74%	13,7%	11,8%	25,5%
Provinsi	**2,58**	**43,54**	**20,7**	**52,30%**	**26,04**	**12,1%**	**6,3%**	**18,4%**

Angka iBangga beserta Dimensi-Dimensinya Tingkat kabupaten/kota

Kabupaten/Kota	Dimensi			iBangga
	Dimensi Ketentraman	Dimensi Kemandirian	Dimensi Kebahagiaan	
MAJENE	56,54	51,45	56,51	54,83
MAMASA	53,46	47,24	49,67	50,12
MAMUJU	55,30	49,03	55,35	53,22
MAMUJU TENGAH	55,83	51,21	61,04	56,03
PASANGKAYU	54,93	52,04	61,89	56,29
POLEWALI MANDAR	56,44	50,08	53,86	53,46
Provinsi	**60,68**	**50,05**	**54,73**	**55,15**

PARAMETER PROGRAM BANGGA KENCANA PROVINSI MALUKU

Angka TFR, ASFR 15-19 Tahun, MUKP, mCPR, MKJP dan Unmetneed Tingkat Kabupaten/Kota

Kab/Kota	TFR	ASFR 15-19	MUKP	mCPR	MKJP	Unmet Need		
						Limiting	Spacing	Total
BURU	2,34	25,7	23,2	34,3%	26,2%	22,4%	10,1%	32,5%
BURU SELATAN	2,96	35,4	22,3	30,1%	15,2%	29,0%	15,0%	44,0%
KEPULAUAN ARU	2,93	26,9	23,5	16,5%	24,1%	37,2%	12,1%	49,3%
KEPULAUAN TANIMBAR	2,70	31	21,7	25,1%	31,6%	35,7%	6,7%	42,5%
KOTA AMBON	2,26	18,5	24,6	40,9%	31,2%	23,7%	5,4%	29,1%
KOTA TUAL	2,40	20	24,4	28,8%	35,6%	22,5%	15,3%	37,8%
MALUKU BARAT DAYA	3,14	33,1	22,5	21,4%	27,0%	32,5%	6,7%	39,2%
MALUKU TENGAH	2,32	22,1	23,8	36,8%	20,1%	23,0%	11,0%	34,0%
MALUKU TENGGARA	2,36	13,9	23,8	37,7%	32,1%	15,4%	9,4%	24,8%
SERAM BAGIAN BARAT	2,91	38,3	23,3	29,2%	31,8%	26,1%	9,6%	35,7%
SERAM BAGIAN TIMUR	2,64	22,2	23,5	36,1%	17,5%	16,5%	6,6%	23,1%
Provinsi	**2,52**	**25,01**	**23,7**	**33,9%**	**26,38%**	**24,8%**	**8,8%**	**33,6%**

Angka iBangga beserta Dimensi-Dimensinya Tingkat Kabupaten/Kota

Kabupaten/Kota	Dimensi			iBangga
	Dimensi Ketentraman	Dimensi Kemandirian	Dimensi Kebahagiaan	
BURU	57,87	53,69	63,92	58,50
BURU SELATAN	56,22	48,39	56,86	53,82
KEPULAUAN ARU	55,57	43,65	63,68	54,30
KEPULAUAN TANIMBAR	58,23	51,09	60,30	56,54
KOTA AMBON	60,25	54,54	61,62	58,80
KOTA TUAL	60,55	52,85	65,05	59,48
MALUKU BARAT DAYA	59,03	44,84	57,79	53,89
MALUKU TENGAH	56,64	51,82	57,93	55,47
MALUKU TENGGARA	58,45	48,95	62,22	56,54
SERAM BAGIAN BARAT	58,19	50,11	61,77	56,69
SERAM BAGIAN TIMUR	58,90	52,90	63,77	58,52
Provinsi	**56,37**	**51,70**	**59,94**	**56,00**

PARAMETER PROGRAM BANGGA KENCANA PROVINSI MALUKU UTARA

Angka TFR, ASFR 15-19 Tahun, MUKP, mCPR, MKJP dan Unmetneed Tingkat Kabupaten/Kota

Kab/Kota	TFR	ASFR 15-19	MUKP	mCPR	MKJP	Unmet Need		
						Limiting	Spacing	Total
HALMAHERA BARAT	2,22	37,6	21,2	53,68%	33,84%	15,9%	4,7%	20,6%
HALMAHERA SELATAN	2,86	54,6	22,3	44,75%	30,91%	10,5%	10,5%	21,1%
HALMAHERA TENGAH	2,75	42,6	21,1	50,03%	39,94%	11,9%	3,8%	15,7%
HALMAHERA TIMUR	2,73	48,7	21,4	53,66%	36,06%	9,7%	7,8%	17,5%
HALMAHERA UTARA	2,48	40,9	22,4	47,10%	31,23%	13,6%	5,9%	19,6%
KEPULAUAN SULA	2,5	30,6	19,9	39,23%	10,57%	14,8%	9,6%	24,4%
KOTA TERNATE	2,07	4,8	20,4	48,44%	48,64%	13,0%	7,5%	20,5%
KOTA TIDORE KEPULAUAN	2,11	27,3	19,9	43,32%	46,12%	14,4%	10,9%	25,3%
PULAU MOROTAI	2,95	59,3	23,5	54,82%	58,31%	12,1%	6,4%	18,5%
PULAU TALIABU	2,41	57,3	22,7	45,65%	14,76%	12,6%	13,3%	25,9%
Provinsi	**2,47**	**42,4**	**21,7**	**47,7%**	**35,60%**	**12,8%**	**8,1%**	**20,9%**

Angka iBangga beserta Dimensi-Dimensinya Tingkat Kabupaten/Kota

Kabupaten/Kota	Dimensi			iBangga
	Dimensi Ketentraman	Dimensi Kemandirian	Dimensi Kebahagiaan	
HALMAHERA BARAT	58,73	50,86	56,93	55,51
HALMAHERA SELATAN	53,63	50,47	59,69	54,60
HALMAHERA TENGAH	59,56	53,19	65,41	59,39
HALMAHERA TIMUR	54,34	50,80	61,77	55,64
HALMAHERA UTARA	58,16	47,81	58,53	54,84
KEPULAUAN SULA	58,26	51,43	59,53	56,41
KOTA TERNATE	60,44	55,44	62,64	59,51
KOTA TIDORE KEPULAUAN	60,53	53,64	60,16	58,11
PULAU MOROTAI	56,40	49,39	52,39	52,73
PULAU TALIABU	54,22	48,81	58,15	53,73
Provinsi	**56,33**	**51,40**	**58,82**	**55,52**

PARAMETER PROGRAM BANGGA KENCANA PROVINSI PAPUA
Angka TFR, ASFR 15-19 Tahun, MUKP, mCPR, MKJP dan Unmetneed Tingkat Kabupaten/Kota

Kab/Kota	TFR	ASFR 15-19	MUKP	mCPR	MKJP	Unmet Need		
						Limiting	Spacing	Total
ASMAT	4,22	105,6	21,5	1,74%*	12,75%*	34,0%	40,6%	74,6%
BIAK NUMFOR	3,26	42,55	22,2	36,74%	39,72%	13,3%	10,2%	23,5%
BOVEN DIGOEL	3,51	59,8	22,5	8,93%	15,10%*	30,2%	25,8%	56,0%
DEIYAI	3,34	62,9	23,0	0,21%*	41,67%*	29,8%	27,3%	57,1%
DOGIYAI	3,28	64,3	19,9	0,00%*	-	33,9%	12,8%	46,8%
INTAN JAYA	2,87	35,5	25,8	0,18%*	-*	23,4%	20,7%	44,0%
JAYAPURA	2,83	46,32	22,1	10,97%	81,28%	20,1%	15,5%	35,5%
JAYAWIJAYA	2,39	54,2	22,2	0,34%*	64,08%	15,4%	9,9%	25,4%
KEEROM	2,66	41,1	20,7	43,50%	35,17%	33,5%	15,9%	49,5%
KEPULAUAN YAPEN	3,31	48,75	22,2	10,64%*	34,76%	30,5%	10,4%	40,9%
KOTA JAYAPURA	2,31	30,7	22,9	22,29%	32,75%	9,8%	5,7%	15,5%
LANNY JAYA	2,69	61,8	20,1	,08%	-*	9,5%	9,5%	19,0%
MAMBERAMO RAYA	3,58	64,1	22,0	1,70%*	19,46%	12,9%	1,5%	14,4%
MAMBERAMO TENGAH	2,44	50,6	20,8	0,10%*	100,00%*	33,9%	20,1%	54,0%
MAPPI	3,85	74,4	20,5	4,96%*	26,18%	21,6%	11,7%	33,3%
MERAUKE	2,74	35,75	20,9	31,07%	16,12%	16,7%	12,9%	29,6%
MIMIKA	2,42	35,4	22,1	20,62%	34,05%	25,4%	18,9%	44,3%
NABIRE	2,59	25,1	21,3	16,21%	17,02%	0,6%	9,8%	10,4%
NDUGA	2,53	45,3	21,1	0,00%*	-	31,8%	25,6%	57,4%
PANIAI	2,69	61,8	20,8	4,63%*	67,43%	0,5%	1,9%	2,4%
PEGUNUNGAN BINTANG	3,10	68,7	24,2	6,79%*	18,04%*	33,5%	14,9%	48,5%
PUNCAK	2,77	48	20,2	0,00%*	-	29,6%	10,8%	40,4%
PUNCAK JAYA	2,46	62,6	22,2	0,01%*	100,00%*	26,9%	15,1%	42,0%
SARMI	2,56	22,1	21,9	20,31%	65,31%	12,9%	24,9%	37,9%
SUPIORI	4,11	27,44	22,7	15,74%	46,45%	18,9%	4,8%	23,7%

Kab/Kota	TFR	ASFR 15-19	MUKP	mCPR	MKJP	Unmet Need		
						Limiting	Spacing	Total
TOLIKARA	2,79	80	20,4	0,14%*	18,07%*	7,0%	17,9%	24,9%
WAROPEN	3,31	41,5	21,7	26,92%	66,54%	54,1%	4,9%	59,0%
YAHUKIMO	2,57	34,8	23,0	0,80%*	4,18%*	34,0%	40,6%	74,6%
YALIMO	2,79	50,5	22,9	3,18%*	-*	13,3%	10,2%	23,5%
Provinsi	**2,76**	**59,0**	**21,7**	**10,6%**	**32,77%**	**21,7%**	**15,3%**	**37,1%**

** Relative Standard Error (RSE) ≥ 25% sehingga estimasi level kabupaten/kota tidak bisa digunakan*

Angka iBangga beserta Dimensi-Dimensinya Tingkat Kabupaten/Kota

Kabupaten/Kota	Dimensi			iBangga
	Dimensi Ketenteraman	Dimensi Kemandirian	Dimensi Kebahagiaan	
ASMAT	26,91	16,67	27,93	23,84
BIAK NUMFOR	50,12	51,66	58,28	53,35
BOVEN DIGOEL	57,68	46,57	54,57	52,94
DEIYAI	24,65	10,86	3,94	13,15
DOGIYAI	35,00	14,21	9,19	19,47
INTAN JAYA	42,29	17,30	37,45	32,34
JAYAPURA	54,14	53,41	65,19	57,58
JAYAWIJAYA	35,51	15,83	12,41	21,25
KEEROM	54,71	50,44	59,71	54,95
KEPULAUAN YAPEN	50,19	48,41	63,16	53,92
KOTA JAYAPURA	56,29	53,66	60,52	56,82
LANNY JAYA	29,88	17,52	36,38	27,92
MAMBERAMO RAYA	44,93	47,21	65,31	52,48
MAMBERAMO TENGAH*	32,19	16,97	0,49	16,55
MAPPI	47,95	43,11	61,25	50,77
MERAUKE	50,52	49,35	61,70	53,86

Kabupaten/Kota	Dimensi			iBangga
	Dimensi Ketenteraman	Dimensi Kemandirian	Dimensi Kebahagiaan	
MIMIKA	50,19	43,57	58,86	50,88
NABIRE	49,62	34,14	37,31	40,36
NDUGA	28,46	26,49	62,16	39,04
PANIAI	35,41	32,81	48,35	38,86
PEGUNUNGAN BINTANG	40,57	33,98	48,18	40,91
PUNCAK*	36,33	35,28	69,08	46,90
PUNCAK JAYA	33,62	14,90	7,60	18,71
SARMI	51,18	49,25	68,74	56,39
SUPIORI	49,21	50,26	64,29	54,58
TOLIKARA	34,30	25,61	54,86	38,26
WAROPEN	52,57	48,86	66,94	56,12
YAHUKIMO	24,93	22,16	35,14	27,41
YALIMO	30,86	31,78	68,48	43,71
Provinsi	**52,27**	**40,50**	**46,18**	**46,32**

PARAMETER PROGRAM BANGGA KENCANA PROVINSI PAPUA BARAT

Angka TFR, ASFR 15-19 Tahun, MUKP, mCPR, MKJP dan Unmetneed Tingkat Kabupaten/Kota

Kab/Kota	TFR	ASFR 15-19	MUKP	mCPR	MKJP	Unmet Need		
						Limiting	Spacing	Total
FAK FAK	2,47	27,3	23,1	29,20%	29,20%	24,2%	13,4%	37,6%
KAIMANA	2,84	21,8	24,1	8,81%*	8,81%*	32,3%	12,0%	44,3%
KOTA SORONG	2,2	18,4	24,0	27,74%	27,74%	29,7%	11,2%	40,9%
MANOKWARI	2,29	20,7	20,0	39,38%	39,38%	16,4%	9,9%	26,3%
MANOKWARI SELATAN	2,62	31,3	21,7	28,90%	28,90%	18,8%	15,2%	34,0%
MAYBRAT	3,49	79,9	25,9	3,05%	3,05%*	27,1%	5,0%	32,0%
PEGUNUNGAN ARFAK	2,85	63,4	23,1	16,24%	16,24%*	15,1%	6,1%	21,2%
RAJA AMPAT	3,6	65,6	22,2	27,13%	27,13%	22,3%	16,7%	38,9%
SORONG	2,48	25,6	22,6	39,06%	39,06%	20,4%	7,5%	27,8%
SORONG SELATAN	3,24	45,9	23,1	27,00%	27,00%*	23,4%	12,6%	36,0%
TAMBRAUW	4,08	48,8	22,3	9,44%	9,44%	20,7%	18,8%	39,5%
TELUK BINTUNI	2,48	18,7	21,4	25,69%	25,69%	24,9%	9,5%	34,4%
TELUK WONDAMA	4,05	62,8	21,6	18,63%	18,63%	30,6%	18,3%	49,0%
Provinsi	**2,66**	**37,5**	**22,6**	**28,1%**	**16,78%**	**24,0%**	**11,2%**	**35,2%**

** Relative Standard Error (RSE) ≥ 25% sehingga estimasi level kabupaten/kota tidak bisa digunakan*

Angka iBangga beserta Dimensi-Dimensinya Tingkat Kabupaten/Kota

Kabupaten/Kota	Dimensi			iBangga
	Dimensi Ketenteraman	Dimensi Kemandirian	Dimensi Kebahagiaan	
FAK FAK	57,02	46,95	59,12	54,36
KAIMANA	53,65	35,45	62,36	50,49
KOTA SORONG	60,12	45,91	57,01	54,35
MANOKWARI	53,42	46,82	57,72	52,66
MANOKWARI SELATAN	52,73	42,87	59,73	51,78
MAYBRAT	53,85	43,24	60,04	52,38
PEGUNUNGAN ARFAK	38,22	40,80	42,17	40,39
RAJA AMPAT	51,57	42,21	60,99	51,59
SORONG	56,59	47,64	62,26	55,50
SORONG SELATAN	49,34	40,68	53,62	47,88
TAMBRAUW	54,32	44,65	57,52	52,16
TELUK BINTUNI	54,85	48,06	56,10	53,00
TELUK WONDAMA	52,99	41,70	58,60	51,10
Provinsi	**55,32**	**43,29**	**55,75**	**51,45**



BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
DIREKTORAT PERENCANAAN PENGENDALIAN PENDUDUK

CONTACT US

 021-8098028 (ext 675)

 021-8007388 (Fax)

 ditrendukbkkbn22@gmail.com

 ditrenduk.bkkbn

 Jl. Permata No. 1 Halim Perdana Kusuma,
Jakarta Timur